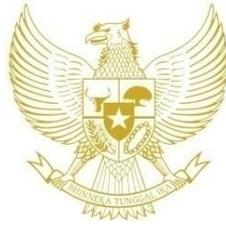




**PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022**

**KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021**



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.

6. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan Daerah.
12. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 pada tahun ke 5 (lima) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.
- (2) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi dalam pengalokasian anggarannya.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai berikut:

- a. pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2022; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Dalam rangka Penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, kedudukan RKPD Tahun 2022 adalah untuk:

- a. menyelaraskan sasaran prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur dengan Program dan Kegiatan Prioritas SKPD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. penetapan Renja SKPD Tahun 2022.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja SKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD menyampaikan rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2022 kepada Kepala Badan; dan
- b. Badan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2022, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD Tahun 2022 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022.

Pasal 5

Penetapan Renja SKPD Tahun 2022 oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah RKPD Tahun 2022 ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD;
- b. Badan melakukan evaluasi dan pengendalian kebijakan terhadap seluruh Renja SKPD;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran dengan DPRD;

- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi yang sesuai peruntukan beserta pendampingannya;
- g. Kepala Badan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2022, serta RKPD Tahun 2022;
- h. RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), periode pelaksanaan pada tahun ke-5 (lima).

Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dokumen RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 9

Dokumen RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal, 1 juli 2021

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili

pada tanggal 1 juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 25

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, dan Hidayahnya serta kesehatan yang selalu menyertai sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini adalah dokumen perencanaan tahunan masa transisi dari RPJMD 2016-2021 ke periode RPJMD 2021-2026, dimana RKPD tahun 2022 menjadi bagian dari periode RPJMD 2021-2026 yang saat ini sedang dalam proses Penyusunan.

RKPD Tahun 2022 ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya menjadi dasar Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Disadari bahwa informasi yang disajikan dalam RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak dan tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang.

Akhirnya, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RKPD ini.

Malili, 1 Juli 2021

BUPATI LUWU TIMUR



BUDIMAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud Dan Tujuan.....	I-9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-10
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-12
2.1 KONDISI UMUM DAERAH.....	II-12
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-12
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-44
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-77
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-211
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD.....	II-216
2.2.1 Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD	II-220
2.2.2 Konsistensi Anggaran RKPD	II-221
2.2.3 Evaluasi Hasil Capaian RKPD	II-223
2.2.4 Kesimpulan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020	II-266
2.2.5 Rekomendasi Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020	II-266
2.2.6 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	II-268
2.2.7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG)	II-271
2.2.8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG)	II-284
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	II-294
2.3.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-294
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.....	II-298
2.3.3 Isu Strategis Daerah.....	II-316

BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH.....	III-321
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III-323
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah.....	III-323
3.1.2 Neraca Keuangan Daerah.....	III-337
3.1.2.1 Kewajiban.....	III-338
3.1.2.2 Ekuitas.....	III-338
3.1.3 Rasio Likuiditas, Ratio Solvabilitas dan Ratio Aktivitas	III-339
3.1.3.1 Rasio Likuiditas atau Liquidity Ratio	III-339
3.1.3.2 Rasio Solvabilitas	III-339
3.1.3.3 Rasio Aktivitas	III-340
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....	III-341
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-341
3.2.1.1 Kebijakan Pendapatan Derah	III-341
3.2.1.2 Kebijakan Belanja Derah	III-342
3.2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Derah	III-345
3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-345
3.3 KERANGKA PENDANAAN.....	III-348
3.3.1 Asumsi Makro Ekonomi, Sosial dan kebijakan Fiskal Daerah	III-349
3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III-355
3.3.2.1 Proyeksi Pendapatan	III-355
3.3.2.2 Proyeksi Belanja	III-357
3.3.2.3 Proyeksi Pembiayaan	III-358
3.3.3 Kerangka Pendanaan Pengeluaran Priodik dan Prioritas Utama dan Kapasitas	III-361
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-365
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.....	IV-368
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022	IV-375
4.2.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV-376
4.2.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	IV-381
4.2.3 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	IV-385
4.2.3.1 Tema Pembangunan	IV-385
4.2.3.2 Sasaran Pembangunan	IV-386
4.2.3.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategi Pembangunan Tahun 2022	IV-396
4.2.3.4 Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022	IV-399
4.2.3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dalam mendukung Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-400
4.2.3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dalam mendukung	IV-416

Pengarusutamaan Gender (PUG)

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	
5.1 Kerangka Pendanaan	
5.1.1 Asumsi Makro Ekonomi, Sosial dan kebijakan Fiskal Daerah	V-440
5.1.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	V-445
5.1.3 Kerangka Pendanaan Pengeluaran Priodik dan Prioritas Utama dan Kapasitas Rill	V-451
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-633
6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-633
6.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI-635
BAB VII PENUTUP.....	
7.1 Kaidah Pelaksanaan.....	VII-657
7.2 Kesimpulan.....	VII-659

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur 2016-2020	13
Tabel 2.2	Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten Luwu Timur	26
Tabel 2.3	Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur	31
Tabel 2.4	Kawasan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur	33
Tabel 2.5	Kawasan Holtikultura Kabupaten Luwu Timur	33
Tabel 2.6	Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Luwu Timur	34
Tabel 2.7	Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Kabupaten Luwu Timur	36
Tabel 2.8	Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Luwu Timur	37
Tabel 2.9	Kawasan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur	38
Tabel 2.10	Lokasi Objek Wisata Alam Kabupaten Luwu Timur	41
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Luwu Timur	42
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Luwu Timur	43
Tabel 2.13	Data Sex Ratio Kabupaten Luwu Timur Keadaan per 31 Desember 2020	43
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020	43
Tabel 2.15	Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020	44
Tabel 2.16	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)	46
Tabel 2.17	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)	47
Tabel 2.18	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016 s.d 2020	50
Tabel 2.19	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016- 2020	53
Tabel 2.20	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020 (Dalam Ribu Rupiah)	56
Tabel 2.21	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020 (Dalam Ribu Rupiah)	57
Tabel 2.22	IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palopo Desember 2020, Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)	59
Tabel 2.23	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman	

	Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	61
Tabel 2.24	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2020	66
Tabel 2.25	Angka Melek Huruf di Kabupaten Luwu Timur	68
Tabel 2.26	Angka Rata-rata Lama Sekolah	68
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Sekolah	70
Tabel 2.28	Angka Kelulusan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016- 2020	70
Tabel 2.29	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	71
Tabel 2.30	Presentase Standar Kompetensi Pendidik di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	71
Tabel 2.31	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Menurut Komponen Tahun 2016- 2020	74
Tabel 2.32	Rasio Gini Kabupaten Luwu Timur	76
Tabel 2.33	Benda Warisan Budaya yang dikelola Pemerintah Daerah	76
Tabel 2.34	Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016- 2020	77
Tabel 2.35	Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	77
Tabel 2.36	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	78
Tabel 2.37	Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	78
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Kasar Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020	78
Tabel 2.39	Angka Partisipasi Kasar PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2020	78
Tabel 2.40	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Menurut Kecamatan Tahun 2020	79
Tabel 2.41	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Menurut Kecamatan Tahun 2020	79
Tabel 2.42	Angka Partisipasi Murni Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020	80
Tabel 2.43	Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A Menurut Kecamatan Tahun 2020	80
Tabel 2.44	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Menurut Kecamatan Tahun 2020	81
Tabel 2.45	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020	82
Tabel 2.46	Angka Partisipasi Sekolah(APS)SD/MI Menurut Kecamatan Tahun 2020	82
Tabel 2.47	Angka Partisipasi Sekolah(APS) SMP/MTs Menurut Kecamatan Tahun 2020	82
Tabel 2.48	Angka Putus Sekolah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	83
Tabel 2.49	Angka Kelulusan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	83
Tabel 2.50	Angka Kelulusan SMP/MTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016- 2020	83
Tabel 2.51	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs Kab. Luwu	

	Timur Tahun 2016-2020	84
Tabel 2.52	Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	84
Tabel 2.53	Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SMP/MTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	84
Tabel 2.54	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	85
Tabel 2.55	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2020	85
Tabel 2.56	Rasio Guru/Murid Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	85
Tabel 2.57	Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020	86
Tabel 2.58	Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020	87
Tabel 2.59	Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	87
Tabel 2.60	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	87
Tabel 2.61	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Dasar (SD) Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	88
Tabel 2.62	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Dasar (SD) Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	88
Tabel 2.63	Kondisi Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	89
Tabel 2.64	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	90
Tabel 2.65	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Luwu Timur 2016-2020	90
Tabel 2.66	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	91
Tabel 2.67	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	91
Tabel 2.68	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	91
Tabel 2.69	Rasio Posyandu dan Balita Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	92
Tabel 2.70	Rasio Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020	92
Tabel 2.71	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kab. Luwu Timur Tahun 2016 - 2020	93
Tabel 2.72	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	93
Tabel 2.73	Rasio Rumah Sakit menurut kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020	94
Tabel 2.74	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	94
Tabel 2.75	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur	

	Tahun 2016-2020	95
Tabel 2.76	Cakupan komplikasi Kebidanan Yang di Tangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	95
Tabel 2.77	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki kompetensi Kebidanan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	95
Tabel 2.78	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	96
Tabel 2.79	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	96
Tabel 2.80	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	96
Tabel 2.81	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	97
Tabel 2.82	Cakupan Balita Pneumonia yang di tangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	97
Tabel 2.83	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	98
Tabel 2.84	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	98
Tabel 2.85	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis Yang terdeteksi dalam program DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	99
Tabel 2.86	Proporsi Kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam program DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	99
Tabel 2.87	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	100
Tabel 2.88	Penderita diare yang ditangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	100
Tabel 2.89	Angka kejadian malaria Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	100
Tabel 2.90	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	101
Tabel 2.91	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	101
Tabel 2.92	Cakupan Kunjungan Bayi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	101
Tabel 2.93	Cakupan Puskesmas Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	102
Tabel 2.94	Cakupan Puskesmas Pembantu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	102
Tabel 2.95	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	102
Tabel 2.96	Cakupan pelayanan Nifas Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	103
Tabel 2.97	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	103
Tabel 2.98	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	104
Tabel 2.99	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	104

Tabel 2.100	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	104
Tabel 2.101	Cukup pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	105
Tabel 2.102	Cukup Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	105
Tabel 2.103	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	106
Tabel 2.104	Kondisi Jalan Kab. Luwu Timur 2016 – 2020	106
Tabel 2.105	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	107
Tabel 2.106	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	108
Tabel 2.107	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan (Minimal 1,5 m) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	108
Tabel 2.108	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	109
Tabel 2.109	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	110
Tabel 2.110	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	110
Tabel 2.111	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	110
Tabel 2.112	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	111
Tabel 2.113	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan Dan Perdesaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	111
Tabel 2.114	Persentase Areal Kawasan Kumuh Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	112
Tabel 2.115	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	112
Tabel 2.116	Rasio Rumah Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	113
Tabel 2.117	Rasio Permukiman Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	113
Tabel 2.118	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	114
Tabel 2.119	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	114
Tabel 2.120	Persentase Permukiman Yang Tertata Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	114
Tabel 2.121	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	115
Tabel 2.122	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	115

Tabel 2.123	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	115
Tabel 2.124	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Di Dukung Dengan PSU Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	116
Tabel 2.125	Cakupan petugas perlindungan masyarakat Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020	116
Tabel 2.126	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020	117
Tabel 2.127	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2020	117
Tabel 2.128	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020	117
Tabel 2.129	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	118
Tabel 2.130	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020	118
Tabel 2.131	Persentase PMKS yang Tertangani Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020	118
Tabel 2.132	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020	119
Tabel 2.133	Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	119
Tabel 2.134	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	120
Tabel 2.135	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020	120
Tabel 2.136	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020	121
Tabel 2.137	Persentase Penyandang Cacat Dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020	121
Tabel 2.138	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun kab. Luwu timur tahun 2016-2020	122
Tabel 2.139	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	122
Tabel 2.140	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	123
Tabel 2.141	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	123
Tabel 2.142	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	123
Tabel 2.143	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Peklatihan Kewirausahaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	124
Tabel 2.144	Jumlah Perusahaan Menurut Besar Kecilnya Jumlah Tenaga Kerja	124
Tabel 2.145	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB, LKS BIPARTIT, Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan	

	Hubungan Kerja Kabupaten Luwu Timur 2016-2020	124
Tabel 2.146	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	125
Tabel 2.147	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	125
Tabel 2.148	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	126
Tabel 2.149	Rasio KDRT Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	126
Tabel 2.150	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	126
Tabel 2.151	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	127
Tabel 2.152	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Didalam Unit Pelayanan Terpadu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	127
Tabel 2.153	cakupan kupa penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	128
Tabel 2.154	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020	128
Tabel 2.155	Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	129
Tabel 2.156	Ketersediaan Pangan Utama Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	129
Tabel 2.157	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 -2020	129
Tabel 2.158	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	130
Tabel 2.159	Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	130
Tabel 2.160	Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani	130
Tabel 2.161	Persentase luas lahan bersertifikat Kabupaten Luwu Timur 2016-2020	131
Tabel 2.162	Penyelesaian kasus tanah negara Kabupaten Luwu Timur 2016-2020	131
Tabel 2.163	Penyelesaian izin lokasi Kabupaten Luwu Timur 2016-2020	132
Tabel 2.164	IKLH Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020	132
Tabel 2.165	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Hutan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2020	132
Tabel 2.166	Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	132
Tabel 2.167	Jumlah Timbulan Sampah Per Hari Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	135

Tabel 2.168	Jumlah Sampah Terolah Per Hari Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	135
Tabel 2.169	Tersedianya Dokumen RPPLH Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	137
Tabel 2.170	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	137
Tabel 2.171	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	137
Tabel 2.172	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air kab. Luwu timur tahun 2016-2020	137
Tabel 2.173	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara kab. Luwu timur tahun 2016-2020	138
Tabel 2.174	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	138
Tabel 2.175	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha kab. Luwu timur tahun 2016-2020	138
Tabel 2.176	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	139
Tabel 2.177	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional	139
Tabel 2.178	Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	139
Tabel 2.179	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	140
Tabel 2.180	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	140
Tabel 2.181	Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R. Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	140
Tabel 2.182	Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R. Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	141
Tabel 2.183	Oprasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Kota Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	141
Tabel 2.184	Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	143
Tabel 2.185	Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2016-2020	143
Tabel 2.186	Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2016-2020	144
Tabel 2.187	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Tahun 2016-2020	144
Tabel 2.188	Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2016-2020	145
Tabel 2.189	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2020	145
Tabel 2.190	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016-2020	146
Tabel 2.191	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	146
Tabel 2.192	Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	147
Tabel 2.193	Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 S.d 2020	147

Tabel 2.194	Persentase PKK Aktif Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	148
Tabel 2.195	Jumlah Bantuan Keuangan Desa Dari Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	148
Tabel 2.196	Kondisi Kantor Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	149
Tabel 2.197	Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	150
Tabel 2.198	Total Fertility Rate (TFR) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	151
Tabel 2.199	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	151
Tabel 2.200	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	152
Tabel 2.201	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	152
Tabel 2.202	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	152
Tabel 2.203	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	153
Tabel 2.204	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	153
Tabel 2.205	Rasio Akseptor KB Tahun 2016-2020 Kabupaten Luwu Timur	154
Tabel 2.206	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 –49 Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	154
Tabel 2.207	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	155
Tabel 2.208	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	156
Tabel 2.209	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	156
Tabel 2.210	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	157
Tabel 2.211	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2016-2020	158
Tabel 2.212	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	159
Tabel 2.213	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	160
Tabel 2.214	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	161
Tabel 2.215	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	161

Tabel 2.216	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	161
Tabel 2.217	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	162
Tabel 2.218	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	163
Tabel 2.219	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	164
Tabel 2.220	Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	164
Tabel 2.221	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	165
Tabel 2.222	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	165
Tabel 2.223	Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020	166
Tabel 2.224	Rata-rata usia kawin pertama wanita Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020	166
Tabel 2.225	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020	167
Tabel 2.226	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kab. Luwu Timur tahun 2016– 2020	167
Tabel 2.227	Rasio Ijin Trayek Kab. Luwu Timur Tahun 2016– 2020	168
Tabel 2.228	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	169
Tabel 2.229	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kab. Luwu Timur Tahun 2016– 2020	169
Tabel 2.230	Persentase Layanan Angkutan Darat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	169
Tabel 2.231	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	170
Tabel 2.232	Presentase Pemasangan Rambu-rambu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	170
Tabel 2.233	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	170
Tabel 2.234	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	171
Tabel 2.235	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020	171
Tabel 2.236	Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu Timur	172

Tabel 2.237	Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Luwu Timur	172
Tabel 2.238	Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	173
Tabel 2.239	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	173
Tabel 2.240	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	173
Tabel 2.241	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	173
Tabel 2.242	Persentase Koperasi Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	174
Tabel 2.243	Presentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kab Luwu Timur Tahun 2020	174
Tabel 2.244	UKM Non BPR/LKM Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	175
Tabel 2.245	Persentase BPR/LKM Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	175
Tabel 2.246	Persentase Usaha Mikro dan Jumlah seluruh UMKM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 -2020	176
Tabel 2.247	Jumlah Investor PMDN/PMA Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	176
Tabel 2.248	Jumlah Investasi PMDN Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	177
Tabel 2.249	Jumlah Investasi PMA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	177
Tabel 2.250	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	177
Tabel 2.251	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	178
Tabel 2.252	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	178
Tabel 2.253	Persentase Wirausaha Muda Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	179
Tabel 2.254	Cakupan Pembinaan Olahraga Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	179
Tabel 2.255	Cakupan Pembinaan Olahraga Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	179
Tabel 2.256	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	180
Tabel 2.257	Jumlah Atlet Berprestasi Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	180
Tabel 2.258	Jumlah Prestasi Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	180
Tabel 2.259	Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	182
Tabel 2.260	Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	182
Tabel 2.261	Buku PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	182
Tabel 2.262	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan	

	Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	183
Tabel 2.263	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	184
Tabel 2.264	Jumlah Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Di Lestarikan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	184
Tabel 2.265	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	185
Tabel 2.266	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	185
Tabel 2.267	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	187
Tabel 2.268	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	187
Tabel 2.269	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	187
Tabel 2.270	Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	188
Tabel 2.271	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Luwu Timur	188
Tabel 2.272	Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	188
Tabel 2.273	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	189
Tabel 2.274	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Luwu Timur	189
Tabel 2.275	Perkembangan Wisatawan pada Obyek Wisata Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	190
Tabel 2.276	Kunjungan Pariwisata Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	190
Tabel 2.277	Lama Kunjungan Wisata Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	191
Tabel 2.278	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya Per hektar	191
Tabel 2.279	Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016- 2020	192
Tabel 2.280	Data Populasi Ternak Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2020	192
Tabel 2.281	Situasi Umum Penyakit Hewan Menular Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	193
Tabel 2.282	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	193
Tabel 2.283	Ekspor bersih perdagangan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	194
Tabel 2.284	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	195
Tabel 2.285	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	195
Tabel 2.286	Persentase Transmigran Swakarsa Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	195
Tabel 2.287	Produksi perikanan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	196
Tabel 2.288	Konsumsi ikan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	197

Tabel 2.289	Cakupan bina kelompok nelayan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	198
Tabel 2.290	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020	199
Tabel 2.291	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	199
Tabel 2.292	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	200
Tabel 2.293	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	200
Tabel 2.294	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	201
Tabel 2.295	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2019	201
Tabel 2.296	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	201
Tabel 2.297	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020	202
Tabel 2.298	Persentase SILPA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020	202
Tabel 2.299	Persentase Belanja Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020	203
Tabel 2.300	Persentase Belanja Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020	203
Tabel 2.301	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	204
Tabel 2.302	Penetapan APBD Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020	205
Tabel 2.303	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	205
Tabel 2.304	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	205
Tabel 2.305	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Struktural Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	206
Tabel 2.306	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	207
Tabel 2.307	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	207
Tabel 2.308	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	207
Tabel 2.309	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	208
Tabel 2.310	Persentase Perangkat Daerah Yang Di Fasilitas Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	208
Tabel 2.311	Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	209
Tabel 2.312	Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Luwu Timur	

	Tahun 2016 – 2020	209
Tabel 2.313	Jumlah Temuan BPK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	210
Tabel 2.314	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	210
Tabel 2.315	Tersusun Dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP)	210
Tabel 2.316	Terintegrasi Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	211
Tabel 2.317	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018- 2020	212
Tabel 2.318	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018- 2020	212
Tabel 2.319	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	213
Tabel 2.320	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	213
Tabel 2.321	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	214
Tabel 2.322	Angka Kriminalitas Tahun 2015-2019 Kabupaten Luwu Timur	214
Tabel 2.323	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2020	215
Tabel 2.324	Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Di Kabupaten Luwu Timur 2018-2020	215
Tabel 2.325	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Angka Beban Ketergantungan, dan Kelompok Umur di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	216
Tabel 2.326	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	216
Tabel 2.327	Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah TA. 2020	222
Tabel 2.328	Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020	224
Tabel 2.329	Pengukuran Capaian Anggaran Dan Kinerja Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	225
Tabel 2.330	Permasalahan Kinerja dan Keuangan yang dihadapi Masing-masing Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	228
Tabel 2.331	Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	268
Tabel 2.332	Pencapaian Indikator (TPB/SDGs) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	273

Tabel 2.333	Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Kabupaten Luwu Timur	284
Grafik 2. 1	Variasi Temperatur Rata-rata Bulanan	21
Grafik 2. 1	Variasi Kelembaban Relatif Rata-rata Bulanan	22
Grafik 2. 2	Variasi evaporasi rata-rata bulanan	23
Grafik 2. 3	Grafik Curah hujan rata-rata	23
Grafik 2. 4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	23
Grafik 2. 5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan	47
Grafik 2. 6	Produk Domestik Regional Bruto	48
Grafik 2. 7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan	48
Grafik 2. 8	Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 (Persen) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan	52
Grafik 2. 9	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020 (Dalam Ribu Rupiah)	55
Grafik 2. 10	Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2016 – 2020 (Persen)	61
Grafik 2. 11	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	63
Grafik 2. 12	Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	63
Grafik 2. 13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)	65
Grafik 2. 14	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020	68
Grafik 2. 15	Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur	71
Grafik 2. 16	Perkembangan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur, Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016-2020	73
Grafik 2. 17	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020	76
Grafik 2. 18	Perubahan Jumlah Program dan Kegiatan Pada Tahapan Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Tahun 2020	219

Tabel 3.1	Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016-2020	324
Tabel 3.2	Capaian Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016-2020	325
Tabel 3.3	Capaian Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2016-2020	326
Tabel 3.4	Proporsi Realisasi Jenis Pendapatan terhadap Total Pendapatan	327
Tabel 3.5	Proporsi Realisasi Rincian Pendapatan terhadap Jenis Pendapatan Tahun 2016-2020	327
Tabel 3.6	Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020	330
Tabel 3.7	Capaian Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016-2020	331
Tabel 3.8	Realisasi Belanja dibandingkan Anggaran Belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	331
Tabel 3.9	Capaian Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016-2020	333
Tabel 3.10	Capaian Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2016-2020	334
Tabel 3.11	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	337
Tabel 3.12	Ratio Likuiditas, Ratio Solvabilitas dan Ratio Aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016-2020	340
Tabel 3.13	Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2020	342
Tabel 3.14	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	343
Tabel 3.15	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Timur 2018-2020	344
Tabel 3.16	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Luwu Timur	346
Tabel 3.17	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-2020	347
Tabel 3.18	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2018-2020	348
Tabel 3.19	Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kab. Luwu Timur Tahun 2022	349
Tabel 3.20	Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026	353
Tabel 3.21	Analisis Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026	355
Tabel 3.22	Analisis Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026	358
Tabel 3.23	Analisis Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah	359
Tabel 3.24	Analisis Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	360
Tabel 3.25	Analisis Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib Dan mengikat serta prioritas Utama Kabupaten Luwu	

	Timur Tahun Anggaran 2022	362
Tabel 3.26	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur	362
Tabel 3.27	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	363

Grafik 3.1	Perbandingan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan	351
Grafik 3.2	Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan	351
Grafik 3.3	Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi dengan Pertumbuhan IPM	352
Grafik 3.4	Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi dengan	354
Grafik 3.5	Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Total Pendapatan	354

Tabel 4. 1	Penjelasan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	369
Tabel 4. 2	Keterkaitan Pokok Visi dan Misi serta Penjelasan Misi RPJMD	371
Tabel 4. 3	Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 berdasarkan Target RKPD Kabupaten Luwu Timur 2022	374
Tabel 4. 4	Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	384
Tabel 4. 5	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2021-2026	395
Tabel 4. 6	Strategi Pembangunan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2021-2026	397
Tabel 4. 7	Sinkronisasi Tujuan SDG's dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022	402
Tabel 4. 8	Kebijakan Umum Dan Prioritas Program Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	420

Gambar 4. 1	Bagan alir proses perumusan prioritas dan sasaran	366
Gambar 4. 2	indikator sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022	378
Gambar 4. 3	Strategi Pembangunan Nasional RKP Tahun 2022	380
Gambar 4. 4	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	381
Gambar 4. 5	Indikator Sasaran Mkro Pembangunan RKPD tahun 2022	387

Tabel 5. 1	Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kab. Luwu Timur Tahun 2022	440
Tabel 5. 2	Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026	444
Tabel 5. 3	Analisis Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026	446
Tabel 5. 4	Analisis Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	448
Tabel 5. 5	Analisis Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	449
Tabel 5. 6	Analisis Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	450
Tabel 5. 7	Analisis Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib Dan mengikat serta prioritas Utama Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	452
Tabel 5. 8	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	452
Tabel 5. 9	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	453
Tabel 5. 10	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur	457

Tabel 6.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	633
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur	636

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor : 25 Tahun 2022.
Tanggal : 1 Juli 2021
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD Tahun 2022 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedudukan dari RKPD ini, diantaranya adalah:

- a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah;
- c. Sebagai acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
- d. RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam RKPD dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja Pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Aparat Pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan
Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu :
 - a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. Penyusunan Rancangan Awal
Pada tahap penyusunan rancangan awal aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal hal sebagai berikut :
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis Nasional;
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dibutuhkan penelaahan terhadap pokok pokok pikiran DPRD dalam rancangan awal dikarenakan pokok pokok pikiran DPRD yang harus diparipurnakan diperlukan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pada RKP, program strategis nasional dan Rancangan awal RKPD Provinsi.

Sistematika Rancangan Awal adalah sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan
- 2) Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 3) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- 4) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- 5) Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- 6) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 7) Penutup

Setelah Rancangan Awal disusun, selanjutnya, dilakukan konsultasi publik untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD tersebut. Rancangan Awal RKPD yang telah disempurnakan digunakan sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

3. Penyempurnaan Rancangan Awal.

Penyusunan Rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan RKPD Provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Timur dan penyesuaian dengan Tema Pembangunan, Prioritas dan Arah Kebijakan Pemerintah maupun Provinsi.

4. Pelaksanaan Musrenbang.

Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang

Kabupaten.

5. Perumusan Rancangan Akhir.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

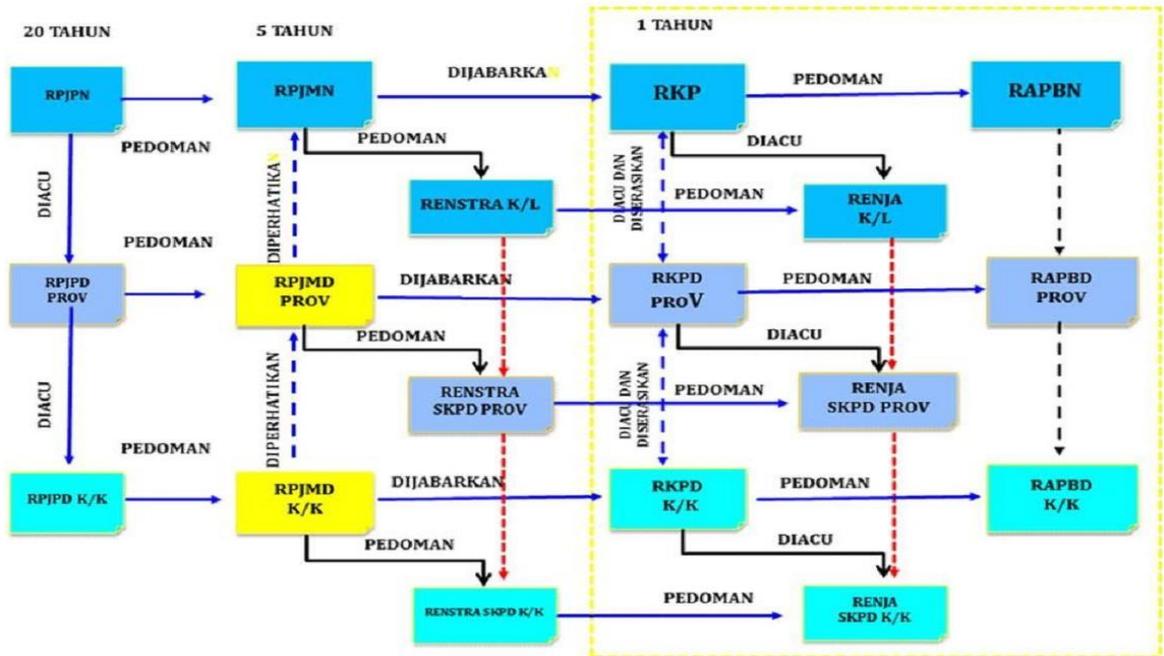
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan tahun ke 2 (dua) dari Operasional RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2022 dimana saat ini Proses Penyusunan RPJMD Periode 2021-2026 dalam tahap penyusunan sehingga berjalan simultan dengan penyusunan Rancangan RPJMD sehingga pengintegrasian RPJMD Sudah Dilakukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 , RKPD ini selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) sampai kepada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati digunakan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan KUA, Rancangan PPAS yang akan dibahas dengan DPRD untuk mendapat kesepakatan. Adapun KUA-PPAS yang sudah disepakati oleh DPRD dan Bupati sebagai dasar penyusunan RAPBD.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka RKPD Kabupaten Luwu Timur akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta PPAS Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Sistem Perencanaan Pembangunan



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2022 adalah selain merupakan dokumen Operasional dari pelaksanaan tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 pemerintah kabupaten Luwu timur, tidak kalah pentingnya adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2022 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan dan sasaran perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Pemerintahan Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan

pembangunan;

6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.
8. Menjadi pedoman bagi seluruh Stakeholders Pembangunan daerah dalam mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh

1.5 SISTEMATIKA RKPD.

RKPD Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, dan Realisasi RPJMD.
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah
 - 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.3.3 Isu Strategis

III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

VII. Penutup

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 124 Desa dan 3 Kelurahan. Adapun 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Bura, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kota Malili merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara (Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar).

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1.	Bura	256,23	3,69%
2.	Wotu	130,52	1,88%
3.	Tomoni	230,09	3,31%
4.	Tomoni Timur	43,91	0,63%
5.	Angkona	147,24	2,12%
6.	Malili	921,2	13,26%
7.	Towuti	1.820,48	26,21%
8.	Nuha	808,27	11,64%
9.	Wasuponda	1244	17,91%
10.	Mangkutana	1.300,96	18,73%
11.	Kalaena	41,98	18,73%
	Kabupaten Luwu Timur	6.944,88	100,00

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Luwu Timur ,2021

Struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai daerah tiga dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 13 (tiga belas) sungai dan 5 (lima) danau dimana 3 (tiga) diantaranya sangat potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik dan kegiatan pariwisata, yakni Danau Towuti (luas 585



km² – kedalaman 95 m), Danau Matano (luas 245,70 km² kedalaman 589 m), Danau Mahalona (luas 25 km² kedalaman 95 m). Disamping itu juga terdapat 2 (dua) telaga, yaitu Tapareng Masapi (luasnya 243,1 Ha), dan Lontoa (luasnya 171,5 Ha).

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak antara 2^o03'00"-3^o03'25" LS dan 119^o28'56"-121^o47'27" BT. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah timur, Kabupaten Kendari dan Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone di sebelah selatan, dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah barat.

Secara geografis, sesungguhnya posisi Kabupaten Luwu Timur cukup strategis, karena berbatasan dengan beberapa provinsi, sejumlah kabupaten, dan berada di wilayah pesisir Teluk Bone. Posisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan kerjasama wilayah secara fungsional dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan menerapkan konsep ini, Sul-Selakini bahwa Kabupaten Luwu Timur akan dapat memperoleh kemanfaatan yang lebih besar akibat posisi geografis-strategis tersebut. Curah hujan berkisar antara 2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yang cukup merata. Dengan demikian, dari segi agroklimatologi, Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian.

2.1.1.1 Topografis

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeck merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah dataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah pedataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Bura, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan



bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha), hal ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian. Jika dilihat posisi wilayah ini dari muka laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: 0 – 25 m, 25 – 100m, 100 – 500m, 500 – 1000m dan >1000m. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah pedataran. Sejalan dengan kelerengan, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti didominasi oleh pegunungan berada pada ketinggian di atas 1000 mdpl.

2.1.1.2 Geologi

Kondisi geologi wilayah Luwu Timur diuraikan berdasarkan tinjauan geomorfologi, stratigrafi dan struktur geologi.

1. Geomorfologi

Morfologi daerah ini dapat dibagi atas 4 satuan, yakni : Daerah pegunungan, Daerah Perbukitan, Daerah Karst dan Daerah Pedataran.

- a. Daerah pegunungan menempati bagian barat dan tenggara pada lembar Buyu Baliase, Salindu, Lawangke, Pendolo, Mangkutana dan Rauta, Ballawai, Ledu ledu dan Tapara Masapi. Pada bagian tenggara lembar peta terdapat Pegunungan Verbeck dengan ketinggian 800-1346 mdpl, dibentuk oleh batuan ultramafik dan batugamping meliputi lembar Ledu-Ledu, Tara Masapi, Malili, Tolala dan Rauta. Puncak-puncaknya antara lain G. Tambake (1838 m), bulu Nowinokel (1700 m), G. Kaungabu (1760 m), Bulu Taipa (1346 m), Bulu ladu (1274 m), Bulu Burangga (1032 m) dan Bulu Lingke (1209 m). Sungai-sungai yang mengalir di daerah ini yaitu S. Kalaena, S. Pincara, S. Larona dan S. Malili merupakan sungai utama. Pola aliran sungai umumnya dendritik.
- b. Daerah perbukitan menempati bagian meliputi lembar Bone-Bone, Mangkutana, Wotu sebagian lembar Malili, dengan ketinggian antara 200-

700 mdpl dan merupakan perbukitan yang agak landai yang terletak di antara daerah pegunungan dan daerah pedataran. Perbukitan ini dibentuk oleh batuan vulkanik, ultramafik dan batupasir. Puncak-puncak bukit yang terdapat di daerah ini diantaranya Bulu Tiruan (630 m), Bulu Tambunana (477 m) dan Bulu Bukila (645 m).

- c. Daerah karst menempati bagian timur laut pada peta lembar Matano dengan ketinggian antara 800-1700 mdpl dan dibentuk oleh batugamping. Daerah ini dicirikan oleh adanya *dolina*, “*sinkhole*” dan sungai bawah permukaan. Puncak yang tinggi di daerah ini di antaranya Bulu Empenai (1185 m).
- d. Daerah pedataran menempati daerah selatan semua lembar peta, menghampar mulai dari utara Bone-bone, Wotu dan Malili. Daerah ini mempunyai ketinggian hanya beberapa meter di atas permukaan laut dan dibentuk oleh endapan aluvium. Pada umumnya merupakan daerah pemukiman dan pertanian yang baik. Sungai yang mengalir di daerah ini di antaranya Sungai Salonoa, Sungai Angkona dan Sungai Malili, menunjukkan proses berkelok.
- e. Sungai-sungai yang bersumber di daerah pegunungan mengalir melewati daerah ini terus ke daerah pedataran dan bermuara di Teluk Bone. Pola alirannya dendrit. Terdapatnya pola aliran subdendritit dengan air terjun di beberapa tempat, terutama di daerah pegunungan, aliran sungai yang deras, serta dengan memperhatikan dataran yang agak luas di bagian selatan peta dan adanya perkelokan sungai utama, semuanya menunjukkan morfologi dewasa.

2. Stratigrafi

Berdasarkan himpunan satuan batuan, struktur dan biostratigrafi, secara regional lembar Malili termasuk dalam Mandala Geologi Sulawesi Timur dan Mandala Geologi Sulawesi Barat dibatasi oleh sesar Palu Koro yang membujur hampir utara – selatan. Mandala Geologi Sulawesi Timur dapat dibagi menjadi dua jalur (*belt*) : lajur batuan malihan dan lajur ofiolit Sulawesi Timur yang terdiri

dari batuan ultramafik dan batuan sedimen pelagos mesozoikum. Mandala Geologi Sulawesi Barat dicirikan oleh lajur gunung api Paleogen dan Neogen, intrusi Neogen dan sedimen flysch Mesozoikum yang diendapkan di pinggiran benua (Paparan Sunda).

Mandala Geologi Sulawesi Timur, berdasarkan jenis batumannya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1) batuan ofiolit, 2) lajur metamorfik, 3) kompleks batuan campur aduk.

- a. *Batuan Ofiolit*; Merupakan batuan tertua di lembar ini, terdiri dari ultramafik termasuk harsburgit, dunit, piroksenit, wehrlit dan serpentin, setempat batuan mafik termasuk gabro dan basal. Umurnya belum dapat dipastikan, tetapi diperkirakan sama dengan ofiolit di lengan timur Sulawesi yang berumur Kapur – Awal Tersier (Simandjuntak, 1986).
- b. *Lajur metamorfik, kompleks pompango*; Terdiri dari berbagai jenis sekis hijau di antaranya sekis mika, sekis hornblende, sekis glaukupan, filit, batusabak, batugamping terdaunkan atau pualam dan setempat breksi. Umurnya diduga tidak lebih tua dari Kapur. Di atas ofiolit diendapkan tak selaras Formasi Matano ; bagian atas berupa batugamping kalsilitit, rijang radiolaria, argilit dan batulempung napalan, sedangkan bagian bawah terdiri dari rijang radiolaria dengan sisipan kalsilitit yang semakin banyak ke bagian atas. Berdasarkan kandungan fosil formasi ini menunjukkan umur Kapur.
- c. *Komplek batuan buncah (Melange Wasuponda)*; Terdiri dari bongkahan asing batuan mafik, serpentin, pikrit, rijang, batugamping terdaunkan, sekis, amfibolit dan eklogit berbagai ukuran yang tertanam di dalam massa dasar lempung merah bersisik. Batuan tektonika ini tersingkap baik di daerah Wasuponda serta di daerah Ensa, Koro Mueli dan Petumbea, diduga terbentuk sebelum Tersier (Simandjuntak, 1980).
- d. Pada Kala Miosen Akhir batuan sedimen pasca orogenesis Neogen (kelompok Molasa Sulawesi) diendapkan tak selaras di atas batuan yang

lebih tua. Kelompok ini termasuk Formasi Tomata yang terdiri dari klastika halus sampai kasar, dan Formasi Larona yang umumnya terdiri dari klastika kasar yang diendapkan dalam lingkungan dangkal sampai darat. Pengendapan ini terus berlangsung sampai Kala Pliosen.

3. Struktur Geologi

Struktur utama yang berkembang di daerah ini berupa lipatan, sesar dan kekar. Sesar meliputi sesar turun, sesar geser dan sesar naik. Daerah ini memiliki tektonik yang cukup kompleks dengan pengaruh dua sesar besar yaitu Sesar Palu-Koro dan Sesar Matano. Sesar Palu-Koro berarah relatif utara-selatan, sedangkan sesar Matano berarah barat laut – tenggara.

Ditinjau dari arah sumbunya pelipatan di wilayah ini dapat dibagi menjadi dua yaitu perlipatan yang berarah barat daya-timur laut dan perlipatan yang berarah barat laut –tenggara. Jenis perlipatan yang teridentifikasi melalui kedudukan batuan adalah jenis antiklin.

Kekar terdapat dalam hampir semua satuan batuan. Terjadinya mungkin dalam beberapa periode, sejalan dengan perkembangan tektonik di daerah ini. Tegasan utama berarah N330°E, hasil pengukuran pada satuan sekis di Sungai Laimbo dan satuan metagamping di Sungai Kalaena kemungkinan merupakan arah sesar Regional Palu-Koro. Arah tegasan relatif timur barat N270°E dihasilkan dari pengukuran pada satuan peridotit di daerah Bonepute. Arah tegasan tersebut ditafsirkan sebagai arah Sesar Matano, kemungkinan arah ini adalah arah Sesar matano Bawah. Tegasan utama berarah N20°E, hasil pengukuran pada satuan peridotit di daerah Karebbe diperkirakan sebagai arah tegasan utama yang mengontrol Sesar Geser Lampea dan Sesar Naik Tabarano. Tegasan utama berarah N345°E, hasil pengukuran pada satuan batupasir sedang di Sungai Bungadidi ditafsirkan sebagai arah tegasan yang mempengaruhi pembentukan Perlipatan dan Sesar Naik Balease. Di tempat ini pula dilakukan pengukuran kekar tarik yang menghasilkan arah N45°E, arah tersebut akan memberikan dukungan terhadap keberadaan struktur sesar turun di wilayah ini.

2.1.1.3 Hidrologi

Dari data historis yang tersedia diperoleh bentuk pola curah hujan secara umum untuk seluruh daerah pengamatan terjadi pola dengan 2 puncak musim hujan yaitu pada sekitar bulan April dan Oktober. Pengaruh monsun barat yang kaya uap air dan bertiup dari benua Asia dan Samudera Pasifik selama periode Desember, Januari, dan Februari tidak menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi dalam bulan-bulan ini. Jumlah curah hujan yang lebih tinggi justru terjadi pada bulan April, hingga Mei yang mana di beberapa tempat di Indonesia merupakan bulan transisi I yang juga dikenal sebagai bulan-bulan peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau.

Peningkatan jumlah curah hujan juga terjadi pada bulan Oktober, yaitu setelah periode JJA, di mana merupakan transisi kedua atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Pada bulan Oktober menuju bulan Desember perlahan jumlah curah hujan untuk seluruh stasiun mengalami kenaikan hingga mencapai 100-200 mm/bulan. Walaupun demikian jumlah curah hujan ini jauh lebih rendah dibanding jumlah curah hujan yang terjadi pada periode Maret, April, dan Mei yang mencapai nilai 300 mm/bulan hingga 400 mm/bulan.

Adanya 2 puncak hujan yang terjadi di Sorowako dan wilayah sekitarnya menandakan daerah ini merupakan daerah dengan pola hujan ekuatorial. Pola hujan ekuatorial adalah suatu pola hujan dengan dua puncak musim hujan. Puncak-puncak ini terjadi setelah ekuinoks (waktu ketika matahari berada di atas khatulistiwa). Ekuinoks terjadi dua kali dalam setahun, yaitu pada 21 Maret dan 23 September, puncak-puncak hujan untuk daerah Sorowako terjadi di bulan April dan Oktober yakni ketika matahari berada dekat dengan khatulistiwa. Pada saat matahari berada pada posisi yang demikian, maka daerah-daerah yang dekat dengan ekuator akan mendapatkan suplai radiasi yang besar yang akan membantu terjadinya evaporasi yang pada akhirnya menyebabkan kondensasi awan dan melahirkan endapan hujan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, yaitu hasil perhitungan rata-rata curah hujan bulanan dan maksimum rata-rata curah hujan bulanan menunjukkan jika Maret, April dan Mei merupakan bulan-bulan dengan curah hujan tinggi dan secara



tidak langsung menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan basah. Sementara Agustus dan September dengan curah hujan yang lebih rendah dianggap sebagai bulan-bulan kering. Dari nilai curah hujan yang turun ke permukaan dapat dilihat jika secara umum distribusi curah hujan mengikuti pola pergerakan angin. Pola distribusi curah hujan bulan Januari, Februari, Maret memiliki tendensi yang besar ke arah timur. Ini disebabkan karena proses penguapan lebih banyak terjadi pada daerah tubuh air seperti danau, dan sungai yang terletak di sekitar stasiun 3, dan 4. Sedangkan pada bulan April endapan hujan yang terjadi cukup seimbang antara dataran tinggi di sebelah barat dan dataran rendah di sebelah timur. Ini disebabkan karena pada bulan ini kecepatan angin dari arah barat melemah dan arah angin pada bulan ini tidak stabil mengingat bulan ini adalah bulan peralihan dari muson barat ke muson timur. Disamping itu pada bulan ini matahari masih berada dekat dengan khatulistiwa, sehingga daerah rendah di sebelah timur dengan bentangan tubuh air akan mengalami penguapan yang besar.

Pada bulan Juni, Juli, Agustus distribusi lebih dominan ke arah barat laut, utara, dan timur laut, sebab pada bulan ini matahari berada di Belahan Bumi Utara (BBU), akibatnya daerah pada sebelah barat laut, utara dan timur laut mendapat radiasi matahari yang besar dan menyebabkan suhu tinggi serta tekanan yang rendah dibanding di sebelah selatan. Sehingga angin akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi disebelah selatan menuju ke arah daerah yang bertekanan rendah.

Pada bulan September pola sebaran hujan membesar ke arah tenggara dan endapan hujan lebih besar pada dataran rendah daripada dataran tinggi. Hal ini terjadi sebab pada bulan ini matahari kembali berada di khatulistiwa sehingga daerah danau yang berada di sebelah tenggara mengalami penguapan dan akumulasi awan hujan yang besar dibanding daerah pegunungan di sebelah timur.

Di bulan Oktober, November, dan Desember endapan justru lebih kecil di sebelah tenggara. Pada bulan ini angin muson timur yang bertiup melemah dan berangsur digantikan oleh muson barat yang lembab, mengakibatkan daerah dataran tinggi di bagian barat memperoleh curah hujan yang besar.

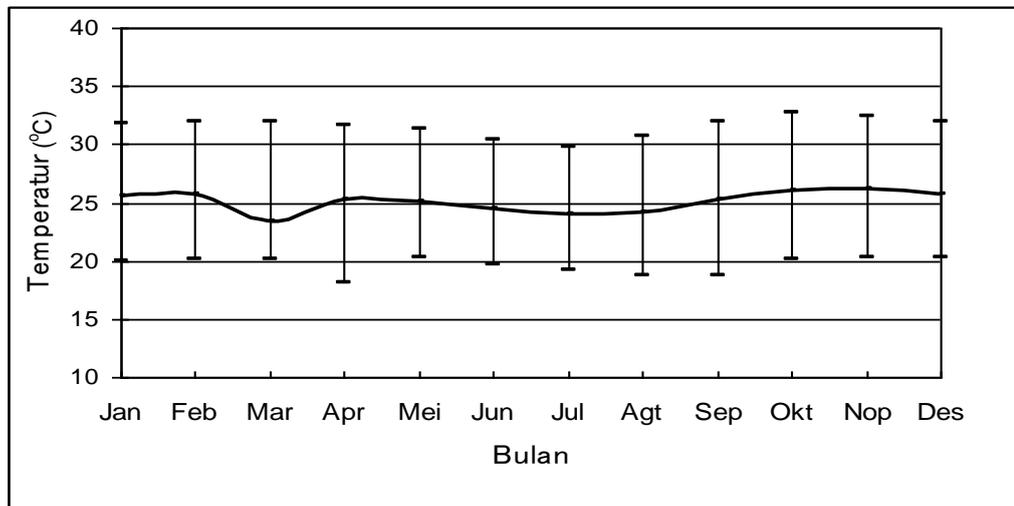
Secara umum pola distribusi curah hujan tahunan menunjukkan arah yang



semakin besar ke arah dataran tinggi disebelah barat laut. Ini disebabkan karena daerah di sebelah barat adalah daerah dengan bentangan pegunungan. Pada daerah dataran tinggi suhu udara lebih rendah dibandingkan dataran rendah. Daerah sebelah barat merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut. Sedangkan daerah sebelah timur merupakan dataran rendah yang < 500 m dari permukaan laut. Sepanjang tahun pola pergerakan angin bergerak dari dataran tinggi yang memiliki gradien tekanan yang tinggi menuju ke arah dataran rendah dengan gradien tekanan yang lebih rendah.

2.1.1.4 Klimatologi

Temperatur Udara. Temperatur rata-rata bulanan berkisar pada 24,0-26,1°C. Temperatur tertinggi tercatat pada bulan November, sedangkan temperatur terendah pada bulan Juli. Temperatur rata-rata bulanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Variasi tempertur rata-rata bulanan diperlihatkan pada Grafik berikut:

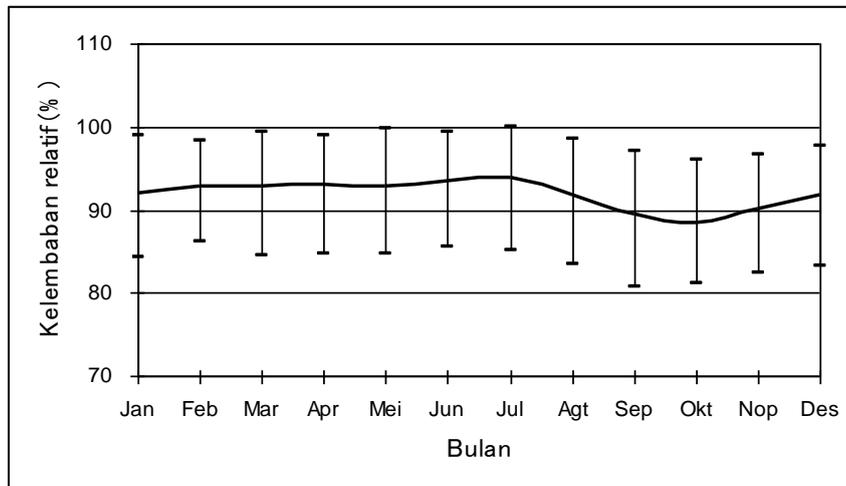


Grafik 2. 1 Variasi Temperatur Rata-rata Bulanan

Kelembaban Udara. Kelembaban (relatif) bulanan rata-rata berkisar pada 88,4-93,8%. Kelembaban relatif tertinggi terjadi pada hampir semua bulan (100%) terutama pada bulan Juli, dan terendah pada bulan September (80,8%). Variasi

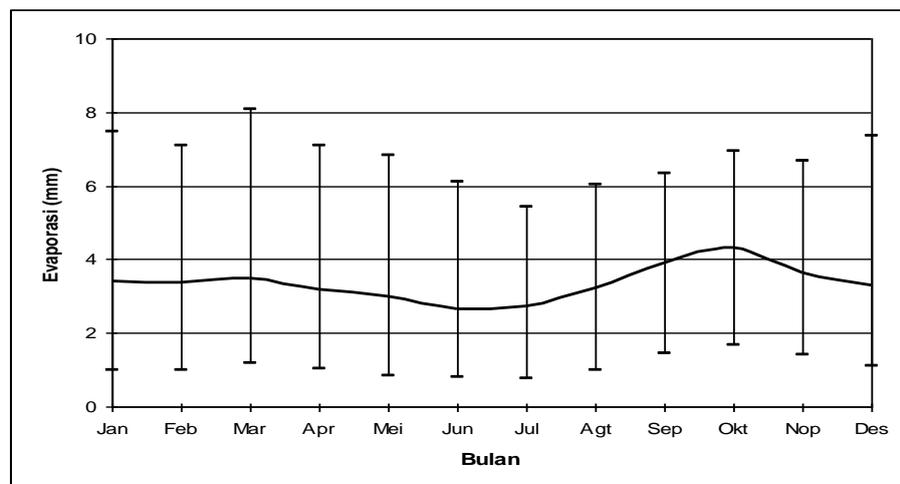


kelembaban relatif rata-rata bulanan diperlihatkan pada grafik berikut.



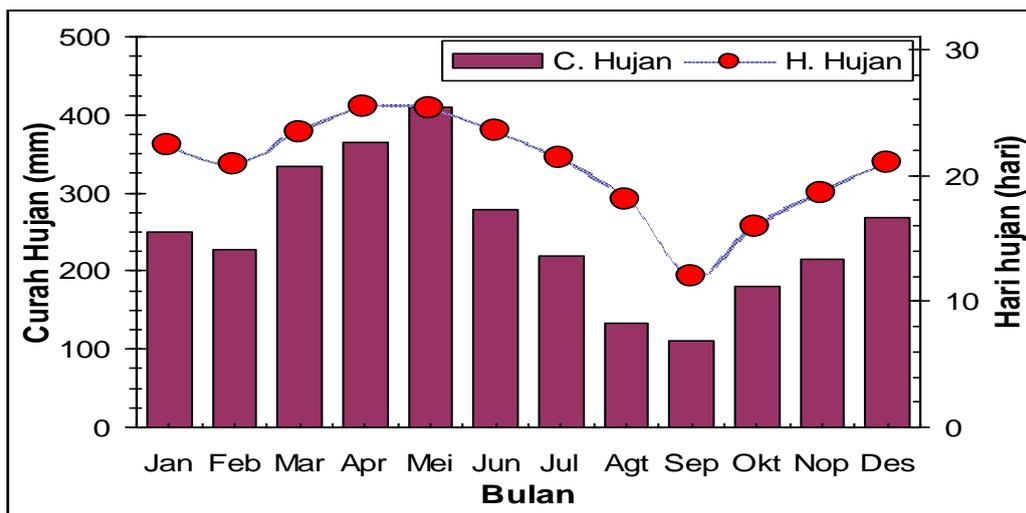
Grafik 2. 2 Variasi Kelembaban Relatif Rata-rata Bulanan

Penguapan. Penguapan yang terjadi cukup tinggi dengan nilai rata-rata bulanan sekitar 2,7-4,3 mm, walaupun demikian diimbangi oleh curah hujan harian yang tinggi pula. Penguapan tertinggi terjadi pada bulan Oktober (4,3 mm/hari), sedangkan penguapan terendah teramati pada Bulan Juni (2,7 mm/hari). Periode dengan tingkat penguapan tinggi terjadi mulai bulan Agustus sampai April (>3 mm/hari), sedangkan periode dengan penguapan rendah mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli (≤ 3 mm/hari). Profil penguapan di daerah studi diperlihatkan pada Grafik berikut:



Grafik 2. 3 Variasi evaporasi rata-rata bulanan

Curah Hujan. Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2014, rata-rata hari hujan per bulan sebanyak 16 hari. Bulan Juni memiliki jumlah hari hujan tertinggi hingga 22 hari dalam sebulan. Jumlah rata-rata hari hujan setiap bulan antara 12-25 hari. Periode dengan tingkat curah hujan tinggi terjadi mulai bulan Maret sampai Mei (> 300 mm), sedangkan periode dengan curah hujan rendah mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober (< 200 mm). Periode dengan tingkat curah hujan sedang terjadi dari bulan November sampai Februari ($200 - 300$ mm). Variasi curah hujan bulanan diperlihatkan pada grafik berikut



Grafik 2. 4 Grafik Curah hujan rata-rata

Angin. Dalam penelitian ini data kecepatan dan arah angin setiap jam selama 7 tahun terakhir diperoleh dari Stasiun Meteorologi PT. Vale, Tbk. Data angin selama 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa antara pukul 07.00 sampai 18.00 (siang) arah angin dominan dari arah tenggara (24,8 %) dan dari utara (24,13 %), sedangkan antara pukul 19.00 sampai 06.00 (malam) arah angin dominan dari arah utara (36,8 %) dan dari arah tenggara (19,1 %). Kecepatan angin selama 7 tahun terakhir antara pukul 07.00 sampai 18.00 sebagian besar berkisar 0 sampai 2 m/s



(69,1 %), sedangkan antara pukul 19.00 sampai 06.00 besar berkisar 0 sampai 2 m/s (73.16 %).

2.1.1.1.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan terhadap potensi sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur terbagi 2 (dua) yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

A. Kawasan Budidaya.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Kawasan budidaya berdasarkan RTRW Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk:

1. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memberikan arahan dalam menentukan prioritas pemanfaatan ruang antara kegiatan budidaya yang berlainan.
3. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Kawasan budidaya di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi, perkebunan, pertanian padi sawah dan padi ladang, permukiman (termasuk kawasan pemerintahan) dan kawasan pertambangan.

Kriteria kawasan budidaya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai kegiatan usaha dan atau kegiatan yang terdiri dari kriteria teknis sektoral dan kriteria ruang. berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

1. Saling menunjang antar kegiatan meliputi:
 - a. Meningkatkan daya guna pemanfaatan ruang serta sumber daya yang ada di dalamnya guna perkembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.
 - b. Dorongan terhadap perkembangan kegiatan sekitarnya.



2. Kelestarian lingkungan, meliputi:
 - a. Jaminan terhadap ketersediaan sumberdaya dalam waktu panjang.
 - b. Jaminan terhadap kualitas lingkungan.
3. Tanggap terhadap dinamika perkembangan, meliputi:
 - a. Peningkatan pendapatan masyarakat.
 - b. Peningkatan pendapatan daerah dan nasional.
 - c. Peningkatan kesempatan kerja.
 - d. Peningkatan ekspor.
 - e. Peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya

Kawasan budidaya di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

1. Kawasan hutan produksi, meliputi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas
2. Kawasan budidaya pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering, peternakan, perkebunan, dan perikanan.
3. Kawasan budidaya non pertanian, meliputi kawasan permukiman, pertambangan, industri, pariwisata dan sebagainya.

B. Kawasan Lindung

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Klasifikasi kawasan lindung di Kabupaten Luwu Timur dari fungsinya, meliputi:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung
2. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari;
 - Kawasan sempadan pantai
 - Kawasan sempadan sungai
 - Kawasan sempadan danau



3. Kawasan suaka alam, terdiri dari;
- Kawasan cagar alam
 - Kawasan konservasi perairan

Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan klasifikasi kriteria serta urutan prioritas penerapannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten Luwu Timur

Fungsi Kawasan	Peruntukan Ruang	Rencana Pengelolaan	Lokasi
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	Hutan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan dan meningkatkan fungsi hidrologisnya, sehingga tidak boleh dikonversi untuk kepentingan lain yang mengubah fungsi hutan lindung. 2. Menjaga fungsi hutan lindung yang masih baik serta mengembalikan kawasan yang beralih pemanfaatan lahannya dari non hutan menjadi hutan lindung. 3. Beberapa kawasan tertentu, terutama hutan produksi (terbatas dan tetap) yang memenuhi kriteria hutan lindung agar diproses secara cermat sesuai prosedur yang berlaku menjadi kawasan hutan lindung. 4. Mengukuhkan kawasan sebagai hutan lindung apabila kawasan tersebut belum dikukuhkan. 5. Bagi kawasan non hutan (perkebunan) yang mempunyai kriteria lindung agar dikaji dan dipertimbangkan fungsinya sebagai hutan lindung atau kawasan resapan air atau dialihfungsikan secara bertahap (terutama bagi HGU-nya telah habis atau dihapuskan) secara cermat dan tepat sehingga menjadi bagian dari kawasan yang berfungsi lindung. 6. Kegiatan pada kawasan hutan lindung harus dibatasi secara ketat dan tidak mengganggu fungsi lindung seperti ekosistem, penelitian, dan pendidikan lingkungan. 7. Kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada kawasan hutan lindung dicegah perkembangannya, dan secara bertahap diarahkan sesuai fungsi kawasan. 8. Wilayah-wilayah perkampungan/penduduk asli/setempat yang berada di kawasan ini diupayakan mendapat perlakuan khusus, antara lain: 9. Pemanfaatannya harus tetap mengacu pada fungsi lindung. 10. Luasnya tidak boleh ditambah dan tidak boleh diperjualbelikan. 11. Tidak diperkenankan mengubah bentang alam, kecuali untuk meningkatkan sistem konservasi tanah dan air. 12. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan bagian jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum/ekowisata sepanjang tidak mengganggu keseimbangan ekosistemnya, misalnya pos 	Rencana alokasi hutan lindung seluas 238.589,42 hektar. Lokasi hutan lindung tersebar di Kecamatan Towuti, Nuha, Wasuponda, Malili, Angkona, Tomoni, Mangkutana, Wotu, dan Kecamatan Burau.

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

		<p>pengamatan dan penjagaan, jalan setapak untuk wisata, triangulasi, jaringan listrik/telekomunikasi dan patok.</p> <p>13. Melakukan rehabilitasi dan reboisasi dengan tutupan vegetasi tetap, terutama pada lahan-lahan yang saat ini kritis.</p> <p>14. Menjaga dan melindungi flora dan fauna yang ada.</p> <p>15. Monitoring secara kontinu, khususnya pada kegiatan/pemanfaatan lahan yang saat ini tidak sesuai dengan peruntukan fungsi hutan lindung.</p> <p>16. Dilakukan pola-pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.</p> <p>17. Dilakukan studi-studi terhadap potensi ekonomi hutan lindung untuk sumberdaya non kayu.</p>	
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	Cagar Alam	<p>1. Memperhatikan keberadaan kawasan baik fungsi dan kualitasnya.</p> <p>2. Dapat dikembangkan sebagai daerah ekowisata selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan.</p> <p>3. Rehabilitasi dan reboisasi terhadap kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan.</p> <p>4. Melakukan pengawasan dan pengamanan kawasan terhadap gangguan dan kegiatan pariwisata.</p>	Luas rencana kawasan cagar alam adalah 101.453,89 hektar. Kawasan cagar alam tersebar di Kecamatan Angkona, Kalaena, Mangkutana, Nuha, Towuti, dan Kecamatan Wasuponda
	1. Konservasi Perairan	<p>1. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air.</p> <p>2. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi kawasan selama tidak mengganggu ekosistem kawasan</p> <p>3. Kawasan ini dikategorikan sebagai wilayah limitasi bagi pembangunan fisik dan diperlukan bagi kelestarian lingkungan.</p>	Luas rencana kawasan konservasi perairan adalah 73.445,47 hektar. Kawasan konservasi ini tersebar di Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha.
Kawasan Perlindungan Setempat	(a) Sempadan Sungai	<p>1. Tidak mengeluarkan ijin bangunan dan kegiatan yang berdampak mengganggu aliran sungai pada daerah sempadan sungai, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi kawasan.</p> <p>2. Bangunan yang sudah berada di kawasan sempadan sungai ditata, baik secara rekayasa teknis maupun non teknis, sehingga tidak mengganggu aliran sungai.</p> <p>3. Menata atau mengelola saluran-saluran bangunan limbah yang menuju badan sungai dan tertentu pada sempadan pantai.</p> <p>4. Melakukan konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang potensial erosi dan longsor.</p>	Luas sempadan sungai adalah 36.083,21 hektar. Kawasan sempadan sungai tersebar di seluruh Kabupaten Luwu Timur.
	(b) Sempadan Pantai	<p>1. Pemanfaatan lahan pada kawasan ini baik melalui rekayasa teknis maupun non teknis harus dilakukan melalui kajian AMDAL yang cermat dan tidak diperkenankan memberi dampak negatif terhadap lingkungan pantai.</p> <p>2. Penataan dan pengendalian terhadap bangunan atau aktivitas yang mengganggu lingkungan pantai dan keindahannya.</p>	Luas sempadan pantai adalah 5.542,97 hektar. Lokasi kawasan sempadan pantai berada

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

		3. Menyusun pengelolaan terpadu kawasan pesisir terutama untuk pengembangan kegiatan budidaya.	di Kec. Angkona, Burau, Malili dan Kecamatan Wotu.
	(c) Kawasan Sekitar Danau	1. Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan yang rawan erosi untuk mencegah percepatan sedimentasi pada danau. 2. Menata ulang kawasan untuk meningkatkan fungsi kawasan 3. Kegiatan budidaya dapat dilakukan selama tidak mengganggu kualitas dan fungsi danau 4. Memasang rambu/tanda peringatan di wilayah radius kawasan	Kawasan sekitar danau memiliki luas 6.575,38 hektar. Lokasi kawasan sekitar danau terdapat di Kecamatan Towuti, Nuha dan Kecamatan Wasuponda.

Sumber : RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031

2.1.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tiga dimensi utama yaitu daerah pantai, dataran sampai ke daerah yang berbukit. Sebagian besarnya didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha). Hal ini mengGrafikkan suatu daerah menyimpan potensi kandungan sumberdaya alam yang melimpah.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan Aset pengembangan di masa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan, dimana kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46% dari total luas Kabupaten Luwu Timur.
3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata,

- hususnya sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
4. Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur. Pengembangan bidang pertambangan :
 - a. Nikel terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha
 - b. Batu koral terdapat di Desa Tabarano Kecamatan Nuha, Desa Loeha Kecamatan Towuti Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana dan Desa Jalajja Kecamatan Burau.
 - c. Pasir terdapat di Desa Lioka, Loeha, Tokalimbo Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu, Puncak Indah, Balantang Kecamatan Malili, Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni, Desa Kasintuwu, Margolembo, Pertasi Kencana, Wonorejo Kecamatan Mangkutana, dan Desa Jalajja, Lumbewe Kecamatan Burau.
 - d. Tanah liat terdapat di Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu Kecamatan Malili, Desa Lera Kecamatan Wotu, dan Desa Lanosi Kecamatan Burau.
 - e. Kaolin terdapat di Desa Asuli Kecamatan Towuti.
 - f. Pasir kuarsa terdapat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.
 5. Kawasan wisata yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Obyek wisata yang adapun bervariasi jenisnya, yaitu berupa obyek wisata alam, budaya, bahari, dsb. Berikut ini dijelaskan mengenai obyek-obyek wisata yang terdapat di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Lokasi kawasan wisata tersebut masih memerlukan pembenahan dan pengelolaan dengan upaya peningkatan infrastruktur pendukung kawasan wisata, potensi ekowisata dan wisata bahari. Potensi wisata ini meliputi;
 - a. Danau Towuti yang terdapat di Desa Timampu Kecamatan Towuti.
 - b. Air Terjun Mata Buntu terdapat di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda.
 - c. Danau Matano terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha.
 - d. Wisata Perburuan terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha.
 - e. Pantai Batu Menggoro terdapat di Desa Harapan Kecamatan Malili.

- f. Air Terjun Atu'e terdapat di Desa Atu'e Kecamatan Malili.
 - g. Pemandian Alam Mantadulu di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona.
 - h. Pantai Sare Bissue di Desa Lera Kecamatan Wotu.
 - i. Wisata Sejarah Makam Puang Sanro di Desa Lampe Nai Kecamatan Wotu.
 - j. Air Terjun Salu Anoang di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.
 - k. Pemandian Air Panas di Desa Cendana Kecamatan Burau.
 - l. Gua Kelelawar di Desa Mabonta Kecamatan Burau.
 - m. Pantai Lemo di Desa Mabonta Kecamatan Burau.
 - n. Pulau Bulu' Poloe, Malili wisata bahari (Panorama Alam)
6. Potensi pengembangan sumber daya kelautan di Teluk Bone
- Potensi sarana wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur yang dapat dijadikan aset untuk pengembangan di masa yang akan meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Adanya jaringan jalan regional yang melewati wilayah Kabupaten Luwu Timur (jalan arteri primer) yang menghubungkan Kabupaten Luwu Timur dengan Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Morowali) serta Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kendari).
 - b. Terdapat Pelabuhan Laut Lampia yang keberadaannya diharapkan dapat membuka keterisolasian daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh transportasi darat.
 - c. Adanya bandar udara di Sorowako yang dapat menghubungkan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - d. Potensi pengembangan pelabuhan di Malili untuk memperkuat keterkaitan dengan wilayah eksternal.

Sedangkan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan potensi unggulan daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Produksi;



Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah hutan memiliki potensi yang besar untuk dikelola dengan baik di kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 tercatat luas kawasan hutan seluas 690.805,31 Ha, hutan lindung 216.289,84 Ha selain sebagai pengatur tata air hutan lindung dapat dimanfaatkan penghasil nonkayu seperti rotan, damar dll. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebesar 179.797,15 Ha juga dapat berfungsi sebagai jasa wisata, dan kawasan hutan produksi yang terdiri dari:

- (1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Towuti, Nuha dan Wasuponda dengan luas 114.264,71 Ha;
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Burau, Angkona, Malili, Mangkutana, Kalaena, Nuha, Towuti, Wotu, Tomoni dan Wasuponda dengan luas 19.038,99 Ha; dan
- (3) Kawasan hutan produksi konversi di Kecamatan Burau, Mangkutana dan Tomoni dengan luas 11.550,04 Ha.

2. Kawasan peruntukan pertanian;

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Luwu Timur dikembangkan seluas 27.709,50 Ha, meliputi; Kecamatan Angkona , Kecamatan Burau, Kalena, Malili, Mangkutana, Nuha, Tomoni Timur, Towuti, Wasuponda dan Wotu.

Tabel 2.3 Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Tanaman Pangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	4.609,23	16,63
2	Kecamatan Burau	3.000,00	10,83
3	Kecamatan Kalaena	2.900,00	10,47
4	Kecamatan Malili	880,88	3,18
5	Kecamatan Mangkutana	2.218,51	8,01
6	Kecamatan Nuha	109,13	0,39
7	Kecamatan Tomoni	1.400,00	5,05
8	Kecamatan Tomoni Timur	3.000,00	10,83
9	Kecamatan Towuti	4.012,73	14,48

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Tanaman Pangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
10	Kecamatan Wasuponda	979,02	3,53
11	Kecamatan Wotu	4.600,00	16,60
Jumlah		27.709,50	100,00

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

Dalam rangka menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, ditetapkan beberapa kawasan pertanian tanaman pangan sebagai Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. Adapun rencana pengembangan KP2B di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada serta pembukaan sawah baru. Luas lahan yang akan dikembangkan untuk KP2B di Kabupaten Luwu Timur kurang lebih seluas 27.243,78 Ha. Sedangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kurang lebih seluas 465,72 Ha.

b. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pengembangan kawasan perkebunan adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, serta pegembangkan kawasan sentra produksi perkebunan.

Secara khusus pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk:

- Mendorong pengembangan perekonomian masyarakat;
- Merehabilitasi ruang pasca tambang; dan
- Menyediakan bahan baku untuk industri.

Berdasarkan komoditas yang sudah berkembang dan kesesuaian lahan untuk pengembangan perkebunan serta potensi pasar terhadap hasil perkebunan maka komoditas tanaman perkebunan yang akan dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur meliputi perkebunan sawit, perkebunan kelapa, perkebunan lada, dan perkebunan sagu.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur



meliputi areal seluas kurang lebih 66.564,40 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Prioritas pengembangan kawasan perkebunan di masing-masing kecamatan lihat uraian tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kawasan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Perkebunan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	8.247,95	12,39
2	Kecamatan Burau	8.329,38	12,51
3	Kecamatan Kalaena	2.606,89	3,92
4	Kecamatan Malili	7.525,95	11,31
5	Kecamatan Mangkutan	6.225,62	9,35
6	Kecamatan Nuha	4.329,96	6,50
7	Kecamatan Tomoni	3.993,42	6,00
8	Kecamatan Tomoni Timur	949,3	1,43
9	Kecamatan Towuti	12.831,28	19,28
10	Kecamatan Wasuponda	6.531,02	9,81
11	Kecamatan Wotu	4.993,63	7,50
Jumlah		66.564,40	100,00

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

c. Kawasan Hortikultura

Pertanian hortikultura yang tumbuh di Kabupaten Luwu Timur adalah: jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, kacang dan sagu. Jenis pertanian lahan kering ini dikembangkan pada lahan yang bersesuaian, baik berdasarkan peta kesesuaian lahan maupun fakta di lapangan. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Luwu Timur direncanakan seluas kurang lebih 14.939,90 Ha dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Kawasan Holtikultura Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Holtikultura	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Burau	3.300,00	22,09
2	Kecamatan Malili	1.769,95	11,85
3	Kecamatan Mangkutana	3.500,00	23,43
4	Kecamatan Nuha	4.329,96	28,98
5	Kecamatan Tomoni	1.400,00	9,37
6	Kecamatan Towuti	14,25	0,10
7	Kecamatan Wotu	625,74	4,19
Jumlah		14.939,90	100,00

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019



3. Kawasan peruntukan perikanan;

Kawasan perikanan di Kabupaten Luwu Timur berupa kawasan perikanan budidaya (tambak/air tawar) dan kawasan pengembangan pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap

Pengolahan ikan atau industri perikanan (*added value*) terhadap hasil tangkapan/budidaya ikan masih belum berkembang di Kabupaten Luwu Timur. Mengingat potensi perikanan tangkap/budidaya yang sangat besar (terutama laut), serta perlunya transformasi struktur ekonomi masyarakat yang berbasis non lahan, maka usaha pengolahan ikan merupakan salah satu tumpuan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten terutama di kawasan pesisir Kabupaten Luwu Timur.

kawasan Minapolitan di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu juga didorong pengembangan pada kawasan sebagai berikut:

- a. Perikanan tangkap laut di Kabupaten Luwu Timur dengan sebaran berada pada wilayah pesisir yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Angkona dan Malili;
- b. Perairan umum 3 (tiga) Danau sebanyak 589,20 ton yang meliputi Kecamatan Towuti dan Nuha.

2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya darat di Kabupaten Luwu Timur direncanakan seluas kurang lebih 13.920,40 Ha dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 2.6 Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Perikanan Budidaya	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	2.900,00	20,83
2	Kecamatan Burau	420,4	3,02
3	Kecamatan Malili	8.100,00	58,19
4	Kecamatan Wotu	2.500,00	17,96

Jumlah	13.920,40	100,00
---------------	------------------	---------------

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

3) Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan

Jangka Panjang, pengembangan PPI/TPI Malili akan didorong sebagai embrio untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis ikan tangkap dan budidaya. Dengan demikian, untuk mengembangkan Kecamatan Malili, Wotu, Angkona, dan Burau sebagai kawasan minapolitan berbasis ikan tangkap, maka akan dikembangkan fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana produksi, pengolahan, pemasaran, kelembagaan usaha, serta fasilitas penyuluhan dan pelatihan.

Untuk maksimalkan hasil pemasaran hasil perikanan tangkapan, Arah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PPI/TPI) di Kecamatan Malili dan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di Kecamatan Wotu perlu untuk diperhatikan.

4. Kawasan peruntukan pertambangan dan Energi

Kawasan peruntukan pertambangan di kabupaten Luwu Timur, sebaiknya ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
- 2) Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
- 3) Tidak berada dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung

Untuk kepentingan perlindungan lingkungan, perlu disusun rencana pengelolaan kawasan pertambangan, yakni:

- 1) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- 2) Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan

penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

- 3) Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan.
- 4) Memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya-upaya menjaga kestabilan fungsi lahan agar jangan sampai terganggu dan berubah secara drastis.
- 5) Memperhatikan pertimbangan faktor ekonomi pengembangan dengan mengutamakan aktivitas yang lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi pembangunan.
- 6) Memperhatikan ketersediaan cadangan sumber daya mineral agar jangan sampai di eksploitasi secara berlebihan.

A. Potensi Kawasan Pertambangan Mineral Logam

Adapun wilayah pengembangan kawasan pertambangan mineral logam dengan luas 325.717,83 Ha atau 46,67 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

B. Kawasan Pertambangan Batuan

Adapun wilayah pengembangan kawasan pertambangan mineral dengan potensi mineral bukan logam logam/batuan dengan luas 15.9458,17 Ha atau 22,85% dari luas Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.7 Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Kabupaten Luwu Timur

Uraian	Luas (Ha)	Persentase (%)
WPN	205.823,72	29,49
WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan	159.458,17	22,85
WUP Mineral Logam	325.717,83	46,67
WUPK	6991,86	1,00
Grand Total	697991,58	100,00

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

Wilayah usaha pertambangan (WUP) di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari

wilayah pencadangan negara (WPN) dengan luas 20.823,72 Ha, WUP mineral bukan logam sebanyak 159.458,17 Ha, WUP mineral logam sebanyak 6.991,86 Ha. Dari total WUP sebanyak 697.991,58 Ha.

Tabel 2.8 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Billy Indonesia	7521	
	Nikel	7521	17,24
2	Citra Lampia Mandiri	9879,44	
	Nikel	9879,44	22,65
3	Mahkota Nikel Indonesia	9997,75	
	Nikel dmp	9997,75	22,92
4	Prima Utama Lestari	1539,63	
	Nikel	1006,11	2,31
	Nikel Laterit	533,52	1,22
5	Sumber Wahau Jaya	1676,23	
	Nikel dmp	1676,23	3,84
6	Tiga Samudra Nikel	9964,65	
	Nikel dmp	9964,65	22,85
7	Tiga Samudra Perkasa	3039,07	
	Bijih Nikel	3039,07	6,97
Total		43617,77	100,00

Sumber; Dinas ESDM Provinsi Sulsel, Tahun 2019

Potensi tambang yang ada di Kabupaten Luwu Timur meliputi kandungan mineral logam dan bukan logam (batuan). Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi pertambangan mineral yang tersebar di setiap kecamatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan di Kabupaten. Kegiatan pertambangan dilakukan pada lahan yang diindikasikan memiliki kandungan potensi tambang kecuali di dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai:

- kawasan hutan lindung dan kawasan lindung di laut.
- kawasan lindung yang diindikasikan dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan dan dapat membahayakan lingkungan di sekitarnya.
- kawasan cagar budaya.
- kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- kawasan budidaya permukiman sudah terbangun.

Kegiatan pertambangan dapat dilakukan pada kawasan budidaya selain yang



tersebut di atas, dengan ketentuan:

- a. setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.

Tabel 2.9 Kawasan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Pertambangan & Energi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Kalaena	1,1	0,01
2	Kecamatan Malili	795,61	6,89
3	Kecamatan Mangkutana	6,17	0,05
4	Kecamatan Nuha	4.895,11	42,37
5	Kecamatan Towuti	5.600,00	48,47
6	Kecamatan Wasuponda	256,59	2,22
Jumlah		11.554,58	100

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

5. Kawasan peruntukan industri;

Kegiatan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kawasan perindustrian merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Adapun kriteria kawasan perindustrian yakni sebagai berikut :

- Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;
- Tersedia sistem air baku yang cukup;
- Adanya sistem pembuangan limbah;
- Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat; dan
- Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.

Tujuan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan ruangan bagi kegiatan-kegiatan produksi suatu barang yang mempunyai nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan yang berkaitan dengan lapangan kerja perekonomian lainnya;
2. Memberikan kemudahan pertumbuhan industri baru dengan mengendalikan pemanfaatan ruangnya, untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas lingkungan.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur diintegrasikan dengan rencana pengembangan pelabuhan serta mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur meliputi kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah.

A. Kawasan Industri

Rencana kawasan industri lampia di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur merupakan kawasan industri yang memiliki luas yang sudah dibebaskan mencapai 36,33 Ha. Kawasan Industri Lampia merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan industri pengolahan dan manufaktur.

B. Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan 10 kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah, sesuai karakteristik dan komoditas unggulan di wilayahnya seperti pertanian, pariwisata, industri, UMKM, hingga peternakan.

1. Kecamatan Nuha, pengembangan Kawasan Wisata yang terdiri 4 desa yaitu Desa Nuha, Desa Sorowako, Desa Nikkel dan Kelurahan Magani.
2. Kecamatan Towuti, Kawasan Pertanian Terpadu yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Mahalona, Desa Libukan Mandiri, Desa Kalosi, Desa Tole, dan Desa Buangin.
3. Kawasan Agro Industri, Perkebunan Lada yang terdiri 5 desa yaitu Desa Tokalimbo, Desa Loeha, Desa Ranteangin, Desa Bantilang, dan Desa Masiku.

4. Kawasan Perdagangan, dan Industri Olahan Komoditas, terdiri dari 5 desa yaitu Desa Asuli, Desa Wawondula, Desa Lioka, Desa Baruga dan Desa Langkea Raya.
5. Kawasan Peternakan dan Penunjang, terdiri dari 3 desa yaitu Desa Pekaloa, Desa Matompi, Desa Timampu, Kecamatan Wasuponda.
6. Kawasan Peternakan dan Pengolahan, hasil Hutan Non-Kayu terdiri dari 3 desa yaitu Desa Kawata, Desa Parumpanai, dan Desa Matano (Kec. Nuha).
7. Kawasan Agrowisata 4 desa meliputi: Desa Wasuponda, Desa Ledu-Ledu, Desa Balambano, Desa Tabarano, Kecamatan Malili.
8. Kawasan Pesisir dan Industri Olahan Hasil Laut terdiri dari 4 desa yaitu Desa Harapan, Desa Pasi-Pasi, Desa Wewangriu, Desa Balantang.
9. Kawasan Layanan Jasa dan Perkotaan terdiri dari 3 desa yaitu Desa Baruga, Desa Puncak Indah dan Kelurahan Malili.
10. Kawasan Penunjang pengolahan hasil laut, terdiri dari 2 desa yaitu Desa Laskap dan Desa Pongkeru.

6. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pariwisata, serta mempunyai salah satu kondisi sebagai berikut:

1. Keindahan alam dan keindahan panorama.
2. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan.
3. Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah tinggi.
4. Kawasan yang mendukung upaya pelestarian Budaya dan lingkungan.

Dalam arahan pengembangan pariwisata di Kabupaten Luwu Timur terbagi menjadi 2 (dua) Pengembangan Kawasan Wisata, yaitu:

- a. Kawasan Wisata 3 Danau, memiliki fungsi utama untuk wisata alam danau dengan keunikan danau, dengan wisata pendukung meliputi wisata alam, wisata pantai danau, wisata snorkeling. Ekosistem dan keragaman hayati yang sangat endemis membuat Danau Matano dimasukkan dalam kategori Global



Ecoregions. Lokasi wisata yang populer antara lain Pantai Ide, Pantai Kupu-kupu dan Pantai Salonsa.

- b. Kawasan Wisata Alam dan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Laut, memiliki fungsi utama sebagai pintu masuk wisatawan serta pusat transit wisatawan dengan kegiatan wisata adalah wisata alam dan wisata bahari. Sebaran potensi wisata alam dan wisata bahari di Kecamatan Malili Pulau Bulupoloe, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Angkona, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Tomoni.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan wisata dapat dikembangkan pada kawasan lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kegiatan wisata seperti kawasan cagar budaya, kawasan hutan lindung, kawasan sempadan pantai dan sebagainya.

Kawasan pariwisata yang akan dikembangkan untuk mendukung struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur pada masa yang akan datang kurang lebih seluas 58,02 Ha di Kecamatan Nuha. Pengembangan kawasan wisata dan fasilitas pendukungnya secara khusus akan dikembangkan berdasarkan potensi wisata yang meliputi:

Tabel 2.10 Lokasi Objek Wisata Alam Kabupaten Luwu Timur

No	Nama Objek	Lokasi
<i>Objek Wisata Alam</i>		
1	Danau Matano	Desa Matano Kec. Nuha
2	Cagar Alam Perburuan	Desa Matano Kec. Nuha
3	Mata Air Matano (Bura-Bura)	Desa Matano Kec. Nuha
4	Pantai Ide	Desa Magani Kec. Nuha
5	Pantai Pomua Dahu-Solonsa	Desa Magani Kec. Nuha
6	Bumi Perkemahan Sawerigading	Desa Magani Kec. Nuha
7	Pantai Kupu-Kupu-Tapu Singkole	Desa Magani Kec. Nuha
8	Pantai Molino Topundau	Desa Magani Kec. Nuha
9	Pantai Impian-Old Camp	Desa Sorowako Kec. Nuha
10	Danau Towuti	Desa Timampu Kec. Towuti
11	Danau Mahalona	Desa Mahalona Kec. Towuti
12	Danau Tapparang Masapi	Desa Mahalona Kec. Towuti
13	Air Terjun Mata Buntu	Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
14	Kali Dingin (Wasuponda)	Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
15	Air Terjun Atue	Desa Atue Kec. Malili
16	Sungai Malili	Desa Malili Kec. Malili

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Nama Objek	Lokasi
17	Hutan Mangrove	Kec. Malili/Wotu/Burau
18	Sumur Sawerigading	Desa Baruga Kec. Malili
19	Permandian Alam Mantadulu	Desa Mantadulu Kec. Angkona
20	Air Terjun Tokio	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
21	Sungai Uelanti	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
22	Permandian Lopi	Desa Margolembo Kec. Mangkutana
23	Air Terjun Saloanuang	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
24	Banua Pangka	Desa Bawalipu Kec. Wotu
25	Gua Batu Putih	Desa Batu Putih Kec. Burau
26	Permandian Air Panas	Desa Cendana Kec. Burau
27	Air Terjun Bonepute	Desa Bonepute, Kec. Burau
28	Batu Papan	Desa Rantemario, Kec. Tomoni
<i>Objek Wisata Sejarah</i>		
1	Makam Mokole Lakamandiu	Desa Matano Kec. Nuha
2	Makam Puang Sanro	Desa Lampenai Kec. Wotu
3	Kuburan Tua	Desa Mabonta Kec. Burau
<i>Objek Wisata Bahari</i>		
1	Pantai Balo-Balo	Desa Lera Kec. Wotu
2	Pantai Lemo	Desa Mabonta Kec. Burau
3	Pantai Ujung Suso	Desa Mabonta Kec. Burau
<i>Objek Wisata Buatan</i>		
1	Bukit Agro (Tabarano)	Desa Tabarano Kec. Wasupona
2	Semoga Lestari Water Park	Desa Lestari, Kec. Tomoni

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Lutim Tahun 2019

2.1.1.2 Demografi

2.1.1.2.1 Komposisi dan Jumlah Penduduk

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Luwu Timur

No	Tahun	Penduduk				Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan	
1	2016	151,787	142,191	293,978		81,122
2	2017	152,623	143,281	295,904		82,259
3	2018	154,391	145,584	299,975		85,028
4	2019	154,978	145,396	300,374		87,534
5	2020	155,726	146,313	302,039		89,380

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021



Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Luwu Timur

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	0 – 4	32.540	32.822	33.087	25.568	26.226
2.	5 – 9	29.810	30.341	30.858	29.793	29.869
3.	10 – 14	27.520	27.873	28.264	30.454	30.423
4.	15 – 19	24.614	24.778	24.850	30.681	28.471
5.	20 – 24	22.316	22.985	23.616	27.005	27.425
6.	25 – 29	25.307	25.910	26.520	22.668	23.386
7.	30 – 34	24.588	24.917	25.286	22.437	22.342
8.	35 – 39	20.891	21.144	21.384	24.480	24.027
9.	40 – 44	17.803	18.149	18.454	22.461	23.047
10.	45 – 49	14.838	15.379	15.874	18.452	19.128
11.	50 – 54	12.607	13.224	13.855	13.887	14.404
12.	55 – 59	10.546	11.077	11.617	9.940	10.212
13.	60 – 64	6.817	7.175	7.557	7.687	8.285

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.13 Data Sex Ratio Kabupaten Luwu Timur Keadaan per 31 Desember 2020

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio
2016	144.912	136.910	281.822	105,84
2017	147.984	139.890	287.874	106
2018	151.020	142.802	293.822	106,05
2019	154.978	145.396	300.372	106,59
2020	155.726	146.313	302.039	106,43

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.1.2.2 Distribusi dan kepadatan penduduk

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mangkutana	22,925	22,868	22,827	22,523	22,437
2	Nuha	23,709	23,867	24,003	23,769	23,755
3	Towuti	37,750	39,542	41,510	42,391	43,597
4	Malili	41,475	41,653	42,610	42,882	43,421

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

5	Angkona	24,813	24,955	25,297	25,377	25,303
6	Wotu	33,728	33,531	33,694	33,569	33,732
7	Burau	36,247	35,753	35,463	35,197	35,100
8	Tomoni	26,011	26,220	26,489	26,578	26,773
9	Tomoni Timur	13,559	13,634	13,802	13,699	13,649
10	Kalaena	12,014	12,129	12,334	12,337	12,297
11	Wasuponda	21,747	21,752	21,946	22,052	21,975
Jumlah		293,978	295,904	299,975	300,374	302,039

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.15 Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020

NO	KECAMATAN	Luas Wilayah Km2	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mangkutana	1,300.96	17	17	18	17	17
2	Nuha	808.27	29	29	30	29	29
3	Towuti	1,820.48	20	21	23	23	24
4	Malili	921.2	45	45	46	47	47
5	Angkona	147.24	168	169	172	172	172
6	Wotu	130.52	258	256	258	257	258
7	Burau	256.23	141	139	138	137	137
8	Tomoni	230.09	113	113	115	116	116
9	Tomoni Timur	43.91	308	310	314	312	311
10	Kalaena	41.98	286	288	294	294	293
11	Wasuponda	1,244.00	17	17	18	18	18
LUWU TIMUR		6,944.88	42	42	43	43	43

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur senantiasa memerlukan data-data dan informasi untuk mengambil kebijakan ekonomi daerah. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan, agar prioritas dan sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Oleh karena itu maka diperlukan data-data dan informasi di masa yang telah lalu untuk

mendapatkan Grafikan pada masa lalu dan masa kini, serta untuk menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa mendatang.

Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat dengan PDRB sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah. Indikator PDRB ini sering muncul dalam pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan sebaliknya. Dalam buku statistik PDRB selalu dijelaskan definisi PDRB yaitu sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Terdapat dua model penyajian data PDRB, yaitu : (a) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun perhitungan PDRB; (b) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga tahun tertentu yang tetap untuk setiap tahun perhitungan PDRB.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilihat perkembangan kinerja ekonomi Kabupaten Luwu Timur. Apabila dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan (lihat Tabel 2.15).

Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Luwu Timur mencapai **17.395.068,4 juta** rupiah. Kemudian pada meningkat tahun 2017 mencapai **18.341.283,1 juta rupiah**, kemudian tahun 2018 kembali meningkat mencapai **20.393.893,9 juta** rupiah dan terus meningkat tahun 2019 mencapai **20.994.219,8 juta** rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2020, angka PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 21.529.809,6 juta rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 44,95 persen.

Nilai PDRB yang selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

terjadi pertumbuhan positif PDRB Kabupaten Luwu Timur. Hal tersebut sejalan dengan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang banyak dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Tabel 2.16 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019 *	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.157.596,3	4.488.747,3	4.941.165,3	5.005.805,8	5.157.680,0
B	Pertambangan dan Penggalian	8.520.812,2	8.795.474,3	9.741.532,8	9.502.349,5	9.677.497,8
C	Industri Pengolahan	623.287,6	635.626,1	691.960,3	801.193,7	790.884,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.364,6	8.966,8	9.721,2	10.218,2	10.595,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1.151,3	1.230,0	1.345,0	1.471,1	1.622,3
F	Konstruksi	1.515.435,0	1.644.089,5	1.885.660,9	2.192.080,8	2.269.461,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	625.067,2	681.935,4	775.841,0	882.665,1	883.234,4
H	Transportasi dan Pergudangan	126.788,9	132.112,5	146.264,6	164.428,4	147.146,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33.255,8	36.473,0	41.408,0	46.132,7	41.372,1
J	Informasi dan Komunikasi	231.857,2	255.449,4	288.236,8	325.470,8	362.769,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	150.075,8	165.738,3	189.925,0	210.775,7	221.042,8
L	Real Estate	411.097,6	432.680,3	465.327,8	509.270,1	542.983,8
M,N	Jasa Perusahaan	8.777,5	9.445,3	10.755,2	12.096,3	11.270,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	397.311,9	439.631,3	517.747,4	566.441,9	573.813,9
P	Jasa Pendidikan	349.432,5	368.418,8	409.500,4	454.545,5	486.909,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	215.415,1	222.666,6	251.514,2	280.438,4	325.953,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	20.341,8	22.598,1	25.987,8	28.836,1	25.571,9
Produk Domestik Regional Bruto		17.395.068,4	18.341.283,1	20.393.893,9	20.994.219,8	21.529.809,6

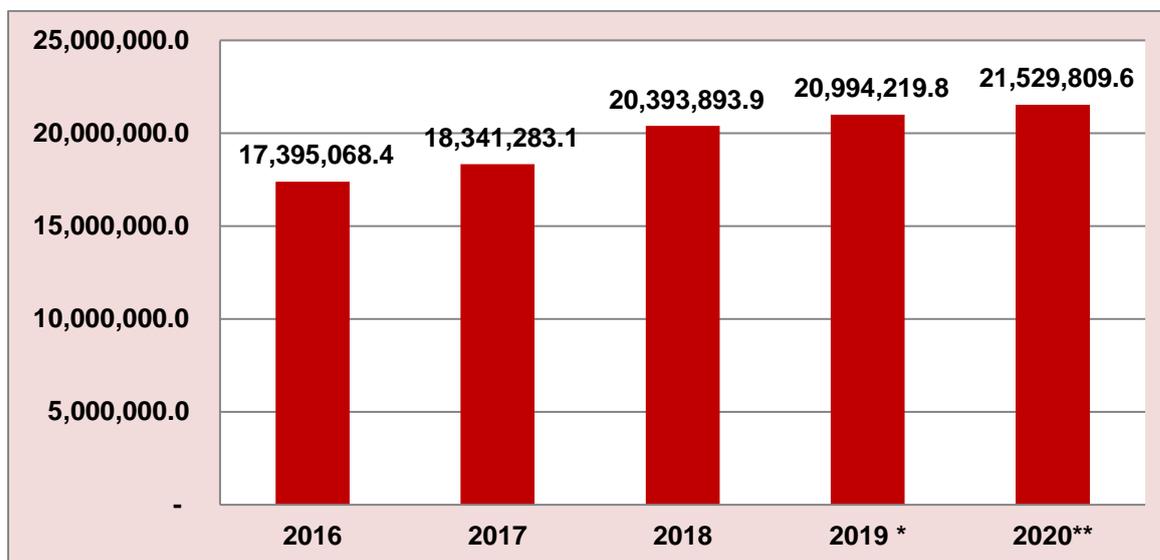
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021

Ket. : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Grafik 2. 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Sementara itu berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 meningkat. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16.256.901,6 juta rupiah. Angka tersebut naik dari tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,46 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 1,17 persen, seperti tersajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.17 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019 *	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.758.786,7	2.955.133,6	3.150.529,4	3.183.973,3	3.175.948,7
B	Pertambangan dan Penggalian	8.634.509,7	8.667.996,5	8.681.490,7	8.447.706,1	8.587.768,9
C	Industri Pengolahan	413.305,7	430.907,2	455.673,6	521.872,7	507.751,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.473,1	9.091,6	9.630,7	10.029,2	10.522,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	938,4	1.051,6	1.139,4	1.206,4	1.319,0
F	Konstruksi	1.119.637,5	1.188.708,2	1.279.365,3	1.403.975,5	1.448.200,8

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

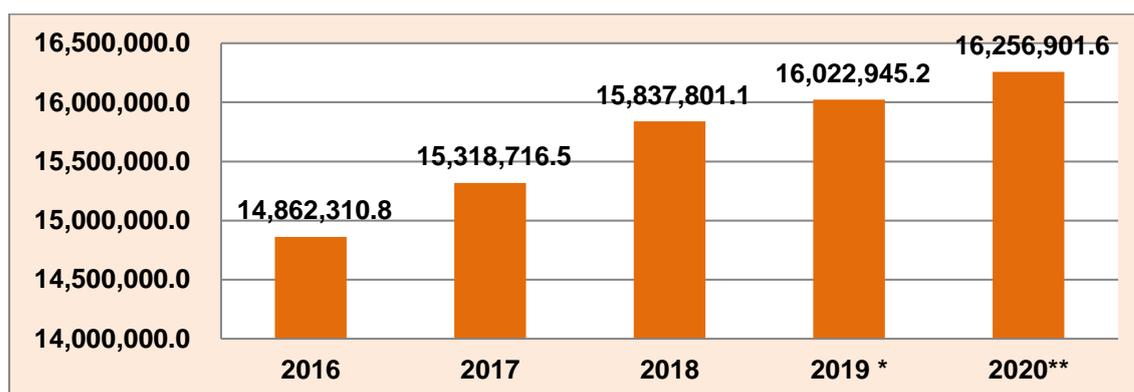
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	506.278,4	549.462,6	606.129,5	669.824,2	662.567,2
H	Transportasi dan Pergudangan	85.919,6	91.413,9	100.787,4	111.864,8	97.385,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21.699,3	22.901,9	25.594,8	27.785,3	24.233,3
J	Informasi dan Komunikasi	219.670,4	241.297,3	266.313,3	294.885,7	328.119,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	121.592,5	126.056,5	134.022,5	141.691,7	147.326,3
L	Real Estate	245.477,2	261.709,3	274.471,9	295.870,9	313.475,3
M,N	Jasa Perusahaan	6.008,0	6.401,6	7.073,5	7.817,0	7.151,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	275.662,5	294.124,7	330.230,5	348.463,1	345.808,2
P	Jasa Pendidikan	258.940,5	272.676,0	296.293,1	317.685,5	337.636,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171.266,2	184.291,0	201.792,9	219.429,5	245.146,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	14.145,2	15.493,0	17.262,4	18.864,4	16.540,3
Produk Domestik Regional Bruto		14.862.310,8	15.318.716,5	15.837.801,1	16.022.945,2	16.256.901,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021

Ket. : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik 2. 6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)

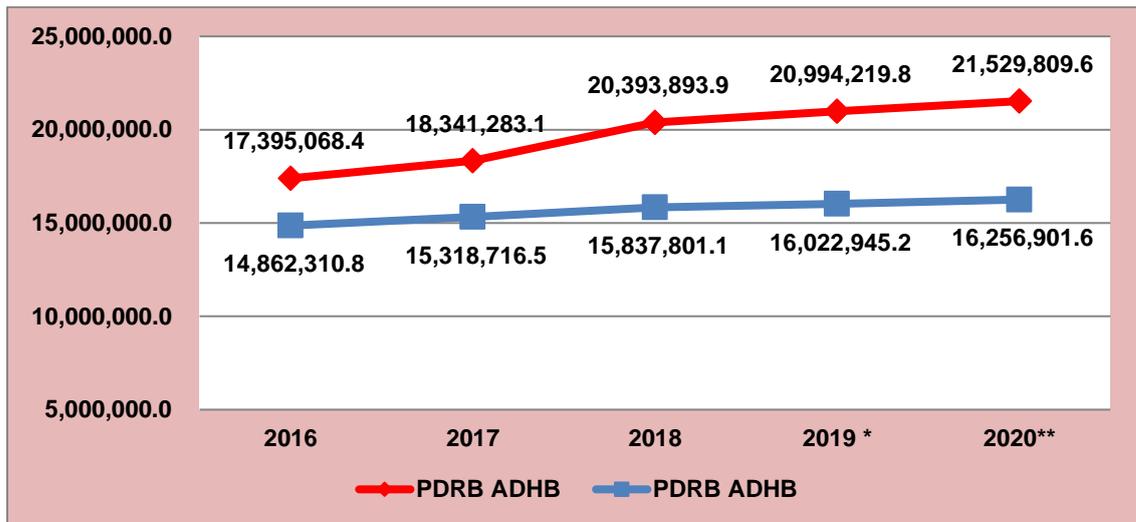


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Grafik 2. 7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010, pada tahun 2017 mencapai 15.318.716,5 juta rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 14.862.310,8 juta rupiah. Hal ini memperlihatkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,07 persen, lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mampu tumbuh sebesar 1,58 persen. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen, namun terjadi perlambatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 1,17 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 kembali mengalami pertumbuhan menjadi 1,46 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur diharapkan terus meningkat seiring dengan berbagai jenis kegiatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur, termasuk dengan kembali positifnya laju pertumbuhan PDRB pada kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Pada tahun 2020, 5 kategori lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan positif dan sangat berpengaruh besar adalah di antaranya adalah lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,72 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 11,27 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang sebesar 9,34 persen, Jasa Pendidikan sebesar 5,95 persen, dan Real Estate sebesar 5,95 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016 s.d 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,16	7,12	6,61	1,06	-0,25
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,23	0,39	0,16	-2,69	1,66
C	Industri Pengolahan	7,85	4,26	5,75	14,53	-2,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,19	7,30	5,93	4,14	4,92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	5,44	12,07	8,34	5,88	9,34
F	Konstruksi	7,01	6,17	7,63	9,74	3,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,63	8,53	10,31	10,51	-1,08
H	Transportasi dan Pergudangan	3,76	6,39	10,25	10,99	-12,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,01	5,54	11,76	8,56	-12,78
J	Informasi dan Komunikasi	9,01	9,85	10,37	10,73	11,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,19	3,67	6,32	5,72	3,98
L	Real Estate	7,30	6,61	4,88	7,80	5,95
M,N	Jasa Perusahaan	7,50	6,55	10,50	10,51	-8,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,73	6,70	12,28	5,52	-0,76
P	Jasa Pendidikan	6,30	5,30	8,66	7,22	6,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,09	7,60	9,50	8,74	11,72
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,10	9,53	11,42	9,28	-12,32
Produk Domestik Regional Bruto		1,58	3,07	3,39	1,17	1,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021

Ket. : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu

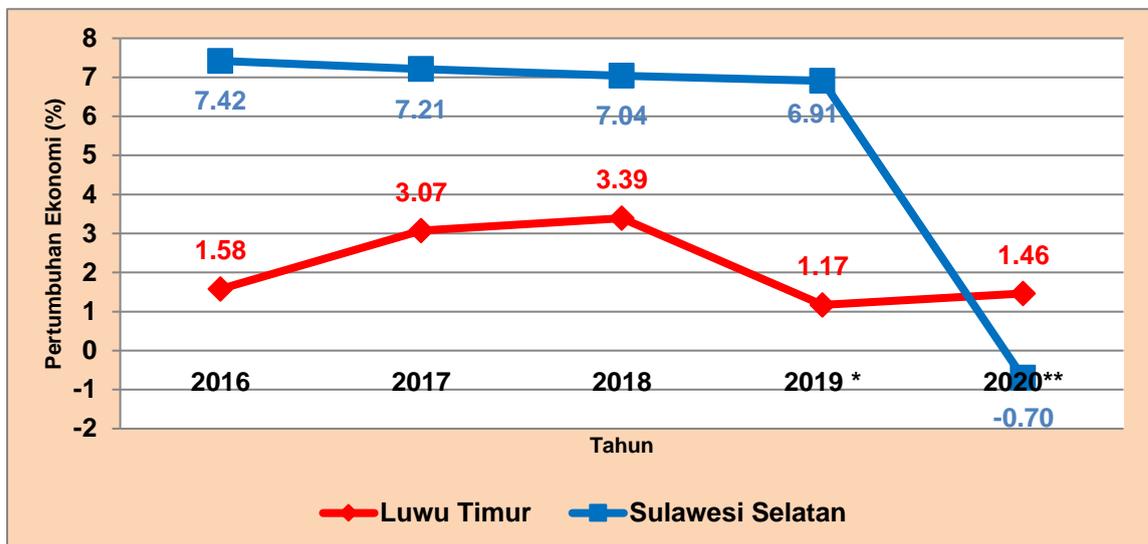


Timur dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada Grafik di bawah bahwa laju pertumbuhan ekonomi Luwu Timur selalu dibawah laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, walaupun pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur tumbuh positif dan meningkat mencapai 1,46 persen dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi -0,70 persen yang diakibatkan dampak Pandemi Covid 19. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan daerah hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya. Meskipun demikian apabila dilihat perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terlihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur berada pada angka 1,58 Persen terdapat kesenjangan sebesar 5,84 persen dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 Kabupaten Luwu Timur berhasil memperkecil perbedaan laju pertumbuhan ekonomi dengan Provinsi Sulawesi Selatan pada angka 3,07 persen dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan pada angka 7,21 persen, dengan demikian hanya terdapat selisih 4,14 persen.

Untuk mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan peningkatan capaian-capaian kinerja pembangunan ekonomi. Diperlukan strategi yang tepat agar dapat mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Sesuai dengan kontribusi PDRB maka sektor diluar kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian adalah adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi PDRB rata-rata sebesar 24,08 persen selama tahun 2016-2020 perlu diprioritaskan dengan meningkatkan volume produk dengan juga meningkatkan kualitas produk. Sedangkan sektor berikutnya yang

perlu mendapatkan perhatian untuk diperbesar nilai tambah produksi barang dan jasanya adalah sektor Konstruksi yang memiliki kontribusi rata-rata dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar 9,58 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki kontribusi rata-rata dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar 3,88 persen. Selanjutnya sektor yang diharapkan mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur apabila diperbesar capaian kinerja ekonominya adalah sektor Industri Pengolahan yang selama tahun 2016-2020 berkontribusi sebesar 3,59 persen.

Grafik 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

3. Distribusi Persentase PDRB

Sektor PDRB yang memiliki distribusi persentase tinggi akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi apabila terjadi sedikit saja perubahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 44,95 persen. Selanjutnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan share kedua terbesar struktur ekonomi Kabupaten Luwu Timur yang berkontribusi sangat tinggi terhadap struktur perekonomian mencapai 23,96 persen.

Tabel 2.19 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,90	24,47	24,23	23,84	23,96
B	Pertambangan dan Penggalian	48,98	47,95	47,77	45,26	44,95
C	Industri Pengolahan	3,58	3,47	3,39	3,82	3,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,71	8,96	9,25	10,44	10,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,59	3,72	3,80	4,20	4,10
H	Transportasi dan Pergudangan	0,73	0,72	0,72	0,78	0,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,19	0,20	0,20	0,22	0,19
J	Informasi dan Komunikasi	1,33	1,39	1,41	1,55	1,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,90	0,93	1,00	1,03
L	Real Estate	2,36	2,36	2,28	2,43	2,52
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,28	2,40	2,54	2,70	2,67
P	Jasa Pendidikan	2,01	2,01	2,01	2,17	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,21	1,23	1,34	1,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,12	0,12	0,13	0,14	0,12
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021

Ket. : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB Per Kapita. Nilai PDRB Per Kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan



ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Per Kapita, Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2012-2016, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Grafik 2.13). Pada Tahun 2016, Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Timur tercatat sebesar 61,723.60 Juta Rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 mencapai 70,495.47 Juta Rupiah. Peningkatan PDRB Per Kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, oleh karena itu untuk melihat peningkatan PDRB Per Kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010. Selama periode 2016-2020, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dari 52,736.52 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 53,230.28 juta rupiah pada tahun 2020. Hal ini memperlihatkan bahwa PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Timur selama periode 2016-2020 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,94 Persen.

Dengan adanya trend kenaikan PDRB Per Kapita seharusnya secara positif akan meningkatkan daya beli pasar Kabupaten Luwu Timur. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter pasar Kabupaten Luwu Timur yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor Industri Pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif.

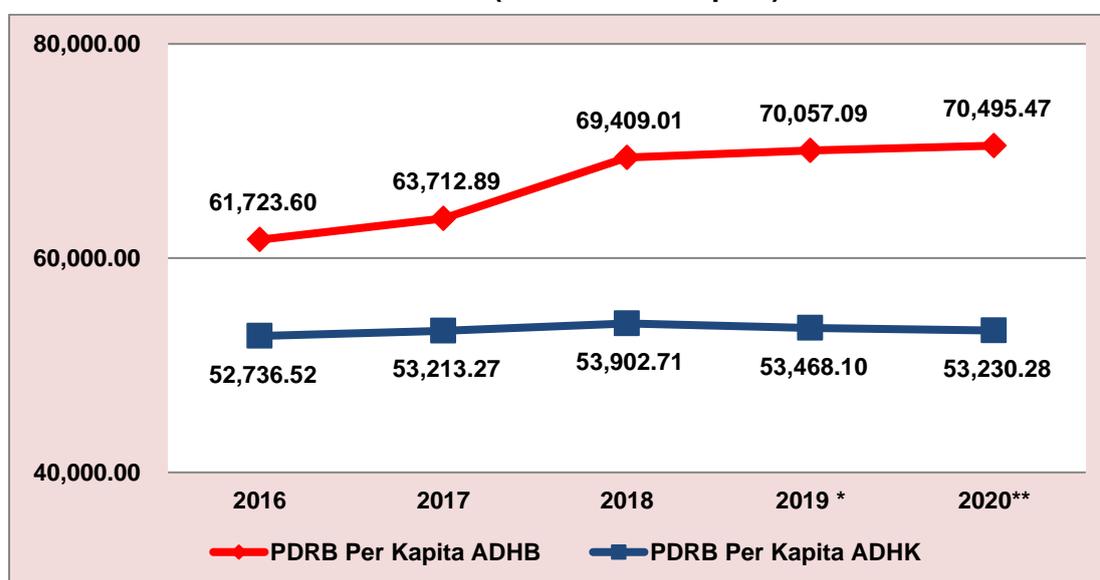
Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur paling besar



disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian.

Sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN dibawah payung ASEAN Economic Community (AEC), kebijakan *single market and single production unit* harus disikapi dengan formulasi kebijakan yang tepat dalam memberikan peluang pasar domestik dan industri lokal untuk berkembang, salah satunya mendorong pembentukan struktur pasar berbasis karakterbudaya lokal.

Grafik 2. 9 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020 (Dalam Ribu Rupiah)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

PDRB Per Kapita Atas Dasar Berlaku apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh Grafikan kesenjangan angka PDRB Per Kapita. Sampai dengan tahun 2020 Kota Makassar masih menjadi daerah dengan nilai PDRB Per Kapita tertinggi yaitu 115,398.03 juta rupiah. Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Timur berada di posisi kedua di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilainya yaitu 70,495.47 juta rupiah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

**Tabel 2.20 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
Se-Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020 (Dalam Ribu Rupiah)**

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019 *	2020**
1	Kepulauan Selayar	35,455.23	39,271.29	43,619.88	47,515.37	46,706.32
2	Bulukumba	26,062.88	29,031.43	31,551.75	33,795.75	34,432.80
3	Bantaeng	34,129.09	37,409.30	41,634.52	46,800.79	47,590.00
4	Jeneponto	21,936.94	23,943.60	26,028.45	27,735.25	28,140.80
5	Takalar	26,727.41	29,213.31	31,514.28	34,006.55	33,906.76
6	Gowa	21,035.02	22,978.70	25,074.69	27,099.04	27,446.24
7	Sinjai	34,606.84	37,885.14	41,879.81	44,897.59	46,151.43
8	Maros	52,091.14	56,122.89	60,920.50	64,334.82	52,277.65
9	Pangkajene Dan Kepulauan	62,918.79	67,600.26	71,977.05	77,463.77	75,875.53
10	Barru	31,754.28	34,508.62	38,094.62	41,711.20	42,472.93
11	Bone	35,147.73	39,039.56	43,874.41	47,502.45	47,975.25
12	Soppeng	34,890.70	39,194.44	44,123.73	48,188.13	50,095.60
13	Wajo	41,939.03	45,078.04	47,150.75	49,869.57	49,583.63
14	Sidenreng Rappang	36,663.86	40,235.98	43,251.00	46,009.98	46,168.74
15	Pinrang	39,783.42	43,952.83	48,287.77	52,053.38	52,933.33
16	Enrekang	29,218.70	31,283.23	32,807.20	35,361.94	36,230.22
17	Luwu	33,548.35	36,560.90	40,204.84	43,250.01	43,959.27
18	Tana Toraja	23,720.67	26,152.96	29,313.82	31,964.57	32,203.51
19	Luwu Utara	32,016.50	35,022.87	38,648.68	41,700.35	41,996.08
20	Luwu Timur	61,723.60	63,712.89	69,409.01	70,057.09	70,495.47
21	Toraja Utara	29,905.61	33,802.38	37,844.09	41,504.20	41,831.67
22	Kota Makassar	87,129.34	95,666.65	106,227.65	116,874.79	115,398.03
23	Kota Parepare	39,352.01	42,876.21	45,942.26	49,803.70	49,917.88
24	Kota Palopo	34,042.65	36,826.91	40,321.14	43,022.09	42,614.50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021

Ket. : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Sementara PDRB Per Kapita Atas Dasar Konstan apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan juga diperoleh Grafikan kesenjangan angka PDRB Per Kapita. Sampai dengan tahun 2020 Kota Makassar masih menjadi daerah dengan nilai PDRB Per Kapita tertinggi yaitu 78,237.26 juta rupiah. Nilai PDRB Per Kapita Pangkajene Dan Kepulauan berada di posisi kedua di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilainya yaitu 50,012.66 juta rupiah.

Tabel 2.21 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020 (Dalam Ribu Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019 *	2020**
1	Kepulauan Selayar	22,223.44	23,664.04	25,489.05	27,175.64	26,449.69
2	Bulukumba	17,503.22	18,596.76	19,413.87	20,369.46	20,340.32
3	Bantaeng	23,706.30	25,294.39	27,199.95	29,961.32	29,977.11
4	Jeneponto	15,396.09	16,575.26	17,520.35	18,377.60	18,315.74
5	Takalar	18,640.45	19,809.83	20,922.07	22,151.05	21,815.66
6	Gowa	15,181.68	16,000.21	16,862.59	17,837.97	17,878.34
7	Sinjai	24,195.13	25,781.23	27,532.02	29,043.66	29,342.11
8	Maros	34,862.49	36,861.85	38,758.96	38,871.33	34,345.40
9	Pangkajene Dan Kepulauan	44,313.72	46,797.83	48,602.86	51,280.02	50,012.66
10	Barru	22,781.85	24,136.46	25,725.52	27,520.35	27,653.83
11	Bone	23,425.45	25,259.48	27,368.17	29,143.63	28,939.14
12	Soppeng	24,514.22	26,526.97	28,638.68	30,809.74	31,454.24
13	Wajo	29,457.27	30,905.70	31,141.72	32,322.77	31,867.80
14	Sidenreng Rappang	24,505.62	25,964.81	26,995.67	27,985.03	27,560.17
15	Pinrang	28,131.08	30,122.84	32,002.10	33,862.20	33,807.02
16	Enrekang	19,341.84	20,491.86	21,003.34	21,975.95	22,099.28
17	Luwu	22,711.26	24,046.45	25,488.16	26,873.60	27,026.19
18	Tana Toraja	15,927.72	17,020.28	18,259.78	19,479.06	19,333.19

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019 *	2020**
19	Luwu Utara	21,550.43	22,990.73	24,721.22	26,275.63	25,928.58
20	Luwu Timur	52,736.52	53,213.27	53,902.71	53,468.10	53,230.28
21	Toraja Utara	17,999.58	19,358.18	20,794.50	22,230.54	22,154.42
22	Kota Makassar	65,295.03	69,728.27	74,639.87	80,217.25	78,237.26
23	Kota Parepare	29,253.08	30,924.82	32,283.10	34,080.85	33,698.41
24	Kota Palopo	25,610.68	26,827.09	28,243.54	29,506.74	29,056.87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2021

*Ket. : * Angka Sementara*

*** Angka Sangat Sementara*

5. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas.

SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 56 Kabupaten/Kota. Dari 90 kota tersebut, 82 kota merupakan cakupan kota SBH 2012 dan 8 kota merupakan kota baru. Paket komoditas hasil SBH 2018 berjumlah 835 komoditas. Paket komoditas terbanyak ada di Jakarta sebanyak 473 barang dan jasa, dan kota dengan jumlah paket komoditas paling sedikit sebanyak 248 komoditas adalah Sintang yang merupakan kota baru. Jumlah paket komoditas komponen inti (core inflation) sebanyak 711 komoditas, komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) sebanyak 23 komoditas, dan komponen harga yang bergejolak (volatile foods) sebanyak 101 komoditas.

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya belimasyarakat. Kenaikan atau penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

Inflasi Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Palopo, hal tersebut karena Kota Palopo dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada Kabupaten sekitar. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kota Palopo, pada Desember 2020 terjadi Inflasi sebesar 0,27 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,21 pada November 2020 menjadi 104,49 pada Desember 2020. Tingkat Inflasi tahun kalender (Januari - Desember 2020) dan tingkat Inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) masing-masing sebesar 1,21 persen dan 1,21 persen.

Tabel 2.22 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palopo Desember 2020, Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

No.	Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2019	IHK November 2020	IHK Desember 2020	Inflasi Desember 2020*)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2020 **)	Laju Inflasi Tahun ke Tahun ***)
UMUM		103,24	104,21	104,49	0,27	1,21	1,21
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	103,88	106,20	106,92	0,68	2,93	2,93
2	Pakaian dan Alas Kaki	106,74	107,81	107,80	-0,01	0,99	0,99
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,66	101,75	101,77	0,02	0,11	0,11
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105,30	106,15	106,15	0,00	0,81	0,81
5	Kesehatan	100,98	103,18	103,18	0,00	2,18	2,18
6	Transportasi	104,12	101,61	101,90	0,29	-2,13	-2,13
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,95	98,66	98,66	0,00	-1,29	-1,29
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,00	103,10	103,10	0,00	0,10	0,10



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No.	Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2019	IHK November 2020	IHK Desember 2020	Inflasi Desember 2020*)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2020 **)	Laju Inflasi Tahun ke Tahun ***)
9	Pendidikan	100,84	101,53	101,53	0,00	0,68	0,68
10	Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	101,68	102,86	102,86	0,00	1,16	1,16
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,46	108,00	107,92	-0,07	4,31	4,31

*) Persentase perubahan IHK Desember 2020 terhadap Bulan Sebelumnya

**) Persentase perubahan IHK Desember 2020 terhadap Bulan Desember 2019

***) Persentase perubahan IHK Desember 2020 terhadap Bulan Desember 2019

Inflasi terjadi karena adanya perubahan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks tiga kelompok pengeluaran yaitu : Inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,68 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen; serta kelompok transportasi sebesar 0,29 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga terbesar pada Desember 2020, antara lain : cabai rawit, cabai merah, dan tomat.

Pada Desember 2020, dari 11 kelompok pengeluaran, 3 kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi, 2 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi, sementara 6 kelompok lainnya tidak signifikan memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Kota Palopo. Kelompok pengeluaran yang memberi andil/sumbangan inflasi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,003 persen; serta kelompok transportasi sebesar 0,03 persen.

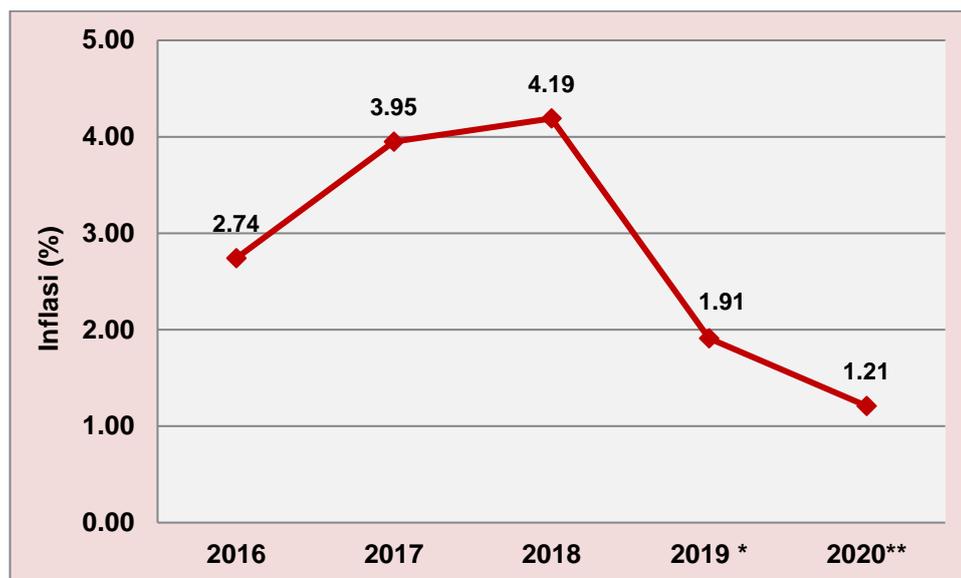
Adapun kelompok pengeluaran yang memberi andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,001 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,004 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang tidak signifikan memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Kota Palopo adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Laju Inflasi Kota Palopo cenderung



mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2016 Laju Inflasi Kota Palopo sebesar 2,74 persen, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 3,95 persen dan terus meningkat menjadi 4,19 persen di tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2019 Laju Inflasi turun menjadi 1,91 persen dan terus menurun menjadi 1,21 persen.

Grafik 2. 10 Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2016 – 2020 (Persen)



6. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2.23 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), IndeksKeparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)
		Jumlah (000)	Persen		
2016	277,520	21,08	7,52	1,09	0,23
2017	289,214	21,94	7,66	1,60	0,5
2018	315,478	21,15	7,23	1,16	0,28
2019	333,739	20,83	6,98	1,11	0,25
2020	350,576	20,82	6,85	1,05	0,24

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Maret 2020 sebesar 20,82 ribu jiwa atau 6,85 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,13 persen poin atau sebesar 0,01 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2019 dengan persentase kemiskinan pada tahun tersebut sebesar 6,98 persen.

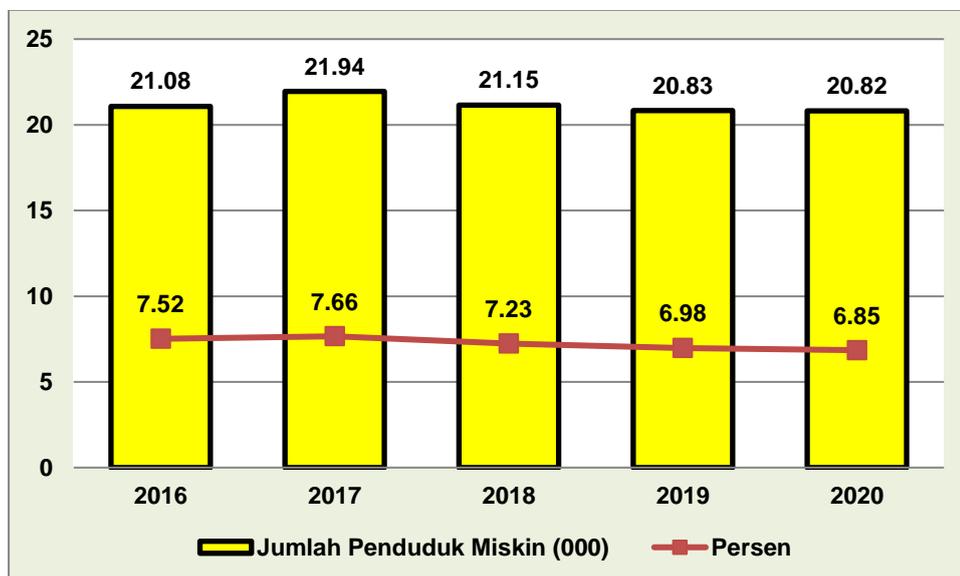
Jika melihat perkembangan selama lima tahun terakhir, 2016-2020, jumlah penduduk miskin di Luwu Timur jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sekitar 21,08 ribu jiwa. Kemudian tahun berikutnya jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 21,94 ribu jiwa di tahun 2017.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 21,15 ribu jiwa, kemudian dua tahun berikutnya yaitu tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 20,83 ribu jiwa pada tahun 2019 dan 20,82 ribu jiwa pada tahun 2020.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur yang juga bervariasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sebesar 7,52 persen. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur kembali meningkat menjadi 7,66 persen. Kemudian pada tahun 2018, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 7,23 persen dan terus mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut menjadi 6,98 persen pada tahun 2019 dan 6,85 persen pada tahun 2020.



Grafik 2. 11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

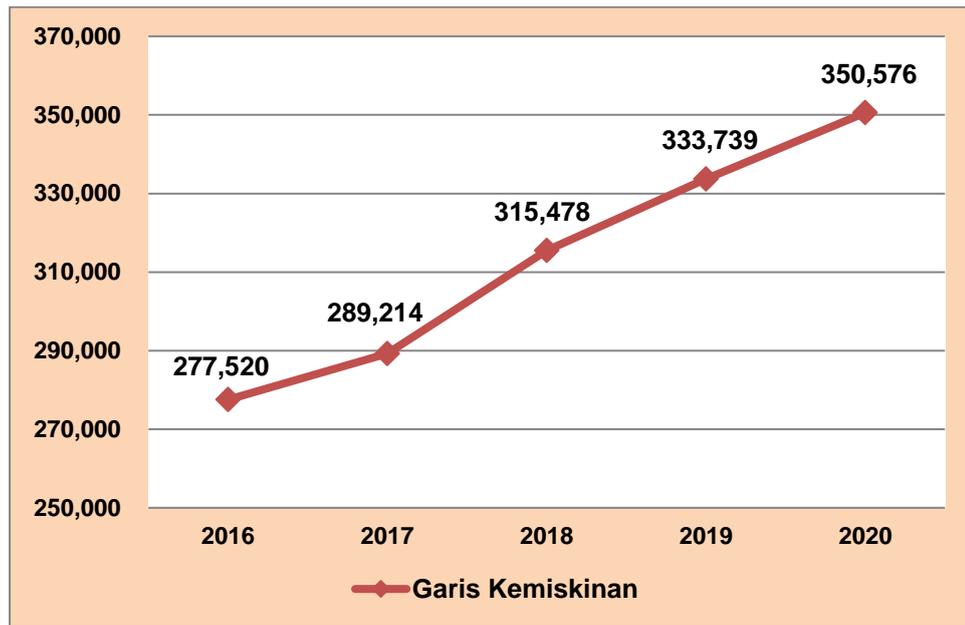


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama tahun 2016-2020, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Rp.277.520,- perkapita/bulan. Selanjutnya di tahun 2017 Garis Kemiskinan menjadi Rp.289.214,- perkapita/bulan dengan peningkatan sebesar 4,21 persen. Pada tahun 2018, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur menjadi Rp 315.478,- perkapita/bulan, di mana pada tahun tersebut persentase peningkatan Garis Kemiskinan yang paling besar sejak tahun 2015 yaitu sebesar 9,08 persen. Pada tahun 2019, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur naik 5,79 persen menjadi Rp 333.739,- perkapita/bulan. Pada tahun 2020, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur naik 5,04 persen menjadi Rp 350.576,- perkapita/bulan.

Grafik 2. 12 Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020



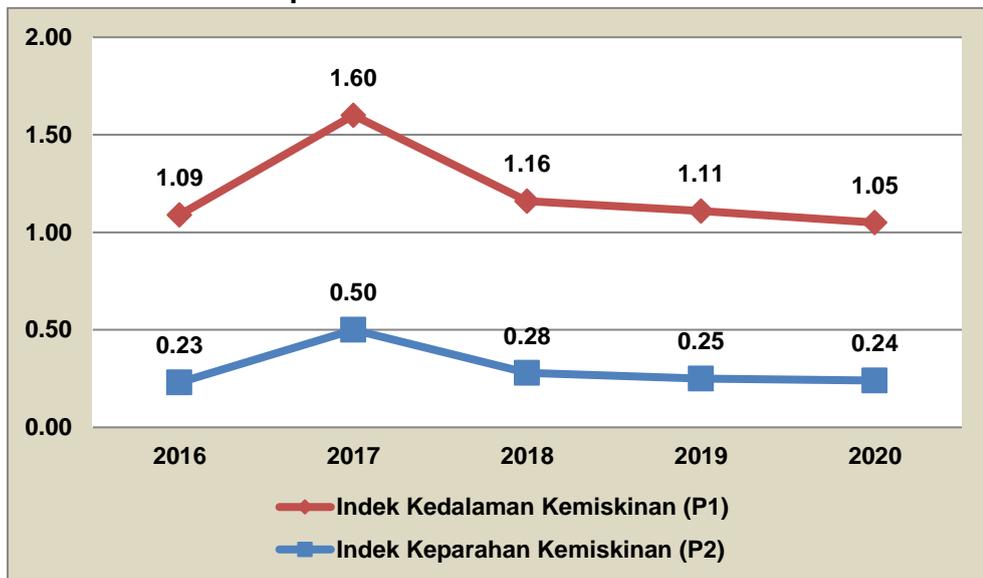
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sekaligus juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan penduduk.

Tingkat kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan adalah ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Grafik 2. 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu Timur pada periode 2016-2020 cenderung berfluktuasi antar tahun. Pada tahun 2016, Indeks P1 di Kabupaten Luwu Timur sekitar 1,09. Namun pada tahun 2017, Indeks P1 mengalami peningkatan menjadi 1,60. Pada tahun 2018, Indeks P1 mengalami penurunan menjadi 1,16. Kemudian pada tahun 2019, indeks P1 mengalami penurunan menjadi 1,11 dan kembali menurun menjadi 1,05 pada tahun 2020. Tahun 2020 merupakan indeks kedalaman paling rendah selama kurun waktu enam tahun terakhir.

Dari perubahan indeks P1 ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur semakin berkurang selama periode lima tahun terakhir.

Sejalan dengan Indeks P1, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur pada periode lima tahun terakhir juga berfluktuasi. Pada tahun 2016 Indeks P2 di Kabupaten Luwu Timur sekitar 0,23. Pada tahun 2017 Indeks P2 mengalami peningkatan menjadi 0,50 kemudian pada tahun 2018 indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,28. Kemudian pada tahun 2019, Indeks P2 terus mengalami penurunan menjadi 0,25 dan pada tahun 2020 menjadi 0,24. Selama kurun waktu lima tahun, seperti halnya Indeks P1, Indeks keparahan paling kecil



terjadi pada tahun 2020. Perubahan Indeks P2 ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur semakin berkurang selama periode lima tahun terakhir.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur bervariasi, dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran akan justru memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan.

Apabila dibanding kabupaten/lota lain di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi keempat terendah dibawah Kota Makassar, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Parepare. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk miskinnya, Kabupaten Luwu Timur masih tergolong daerah yang cukup besar jumlah penduduk miskinnya. Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 sebesar 6,85 persen dengan jumlah penduduk miskin 20,82 ribu orang.

Tabel 2.24 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
		Jumlah (Ribu Orang)	Persen		
Kepulauan Selayar	396 822,00	17,04	12,48	2,25	0,60
Bulukumba	351 180,00	30,00	7,10	0,71	0,14
Bantaeng	340 890,00	16,84	8,95	0,97	0,18
Jeneponto	366 453,00	53,24	14,58	2,60	0,68
Takalar	364 378,00	25,38	8,44	1,09	0,21
Gowa	390 917,00	57,68	7,38	1,18	0,30
Sinjai	329 819,00	22,06	9,00	1,34	0,36
Maros	414 324,00	34,62	9,74	1,45	0,34
Pangkajene dan Kepulauan	358 061,00	47,12	13,96	2,52	0,71
Barru	337 047,00	14,44	8,26	1,31	0,36



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
		Jumlah (Ribuan Orang)	Persen		
Bone	345 009,00	81,33	10,68	1,59	0,36
Soppeng	315 455,00	17,23	7,59	0,83	0,16
Wajo	350 765,00	27,69	6,95	0,98	0,21
Sidenreng Rappang	349 452,00	15,36	5,05	0,82	0,19
Pinrang	336 346,00	33,56	8,86	1,27	0,34
Enrekang	338 731,00	25,25	12,17	1,61	0,34
Luwu	347 539,00	46,04	12,65	2,12	0,49
Tana Toraja	336 877,00	28,41	12,10	2,32	0,74
Luwu Utara	354 669,00	42,20	13,41	2,29	0,61
Luwu Timur	350 576,00	20,82	6,85	1,05	0,24
Toraja Utara	328 096,00	27,88	12,01	1,75	0,37
Kota Makassar	442 513,00	69,98	4,54	0,58	0,12
Kota Parepare	363 710,00	7,96	5,44	0,94	0,24
Kota Palopo	362 859,00	14,71	7,85	0,95	0,21
SULAWESI SELATAN	350 264,00	776,83	8,72	1,53	0,39

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan seratus persen. AMH merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Berdasarkan data, Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Timur meningkat dari tahun 2016 sebesar 94,06 persen menjadi 95,30 persen di tahun 2020. Dengan semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Luwu Timur. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25 Angka Melek Huruf di Kabupaten Luwu Timur

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Angka melek huruf (%)	94,06	93,72	94,8	95,72	95,30

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, 2021

b. Rata-Rata Lama Sekolah

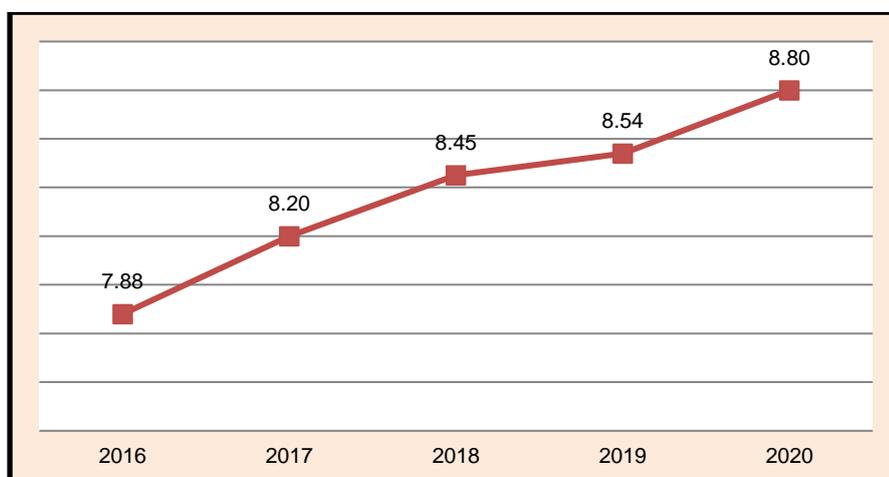
Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan trend peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dari 7.88 tahun menjadi 8,80 tahun. Hal ini dapat dimaknai bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas sudah mencapai kelas II SMP.

Tabel 2.26 Angka Rata-rata Lama Sekolah

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,88	8,20	8,45	8,54	8,80

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur, 2021

Grafik 2. 14 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)



Angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur meningkat pada tahun 2020 sebesar 8,80 Tahun dan berada diatas Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,38 Tahun. Meskipun demikian, capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur masih menunjukkan adanya penduduk usia lebih dari 15 tahun yang belum menyelesaikan sekolahnya, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal. Angka 8,50 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata belum lulus SMP/MTs atau sederajat. Kecenderungan penduduk di atas antara lain yang tidak sedang menjalankan pendidikan di sekolah formal yakni di SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajatnya. Penduduk tersebut lebih cenderung bekerja dengan ijazah terendahnya (misalnya SD), tidak melanjutkan pendidikan formal pada usianya dan tidak melanjutkan pendidikan melalui pendidikan non formal (Paket B, atau C).

c. Angka Partisipasi

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah disajikan atas 4 jenjang pendidikan yang terdiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5 sampai 6 tahun, Sekolah Dasar (SD) usia 7 sampai 12 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) usia 13 sampai 15 tahun dan Sekolah Menengah Atas (SMA) usia 16 sampai 18 tahun. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Luwu Timur selengkapnya tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
PAUD (5-6 Tahun)	Persen	27,25	23,13	12,83	20,20	21.27
SD (7-12 Tahun)	Persen	100,00	99,47	99,53	99,66	99.13

SMP (13-15 Tahun)	Persen	97,07	97,68	100,00	98,43	97,65
-------------------	--------	-------	-------	--------	-------	-------

d. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan di Kabupaten Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh capaian prestasi siswa secara akademik sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditentukan, sistem pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan dan kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian. Upaya untuk memperbaiki hal ini adalah adanya pengawasan kepada seluruh siswa menjelang, saat dan pasca ujian, dan adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam proses pendidikan, hingga pelaksanaan ujian kelulusan berlangsung.

Tabel 2.28 Angka Kelulusan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	99,62	99,62	99,55	99,75
2.	Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100	99,20	99,28	98,82	99,50

Sumber data: Dinas Pendidikan Luwu Timur, 2021

e. Angka Harapan Lama Sekolah

Tabel 2.29 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.78	12.79	12.81	12.82	12.83

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, 2021

f. Standar Kompetensi Pendidik

Kompetensi diakui sebagai faktor yang memegang faktor penting dalam keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya. Pendidik sebagai salah satu profesi, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Mendiknas RI melalui Permen Nomor 16 Tahun 2007 menetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Identifikasi kompetensi guru yang tepat dianggap memiliki nilai prediksi yang valid untuk keberhasilan guru dalam pekerjaannya.

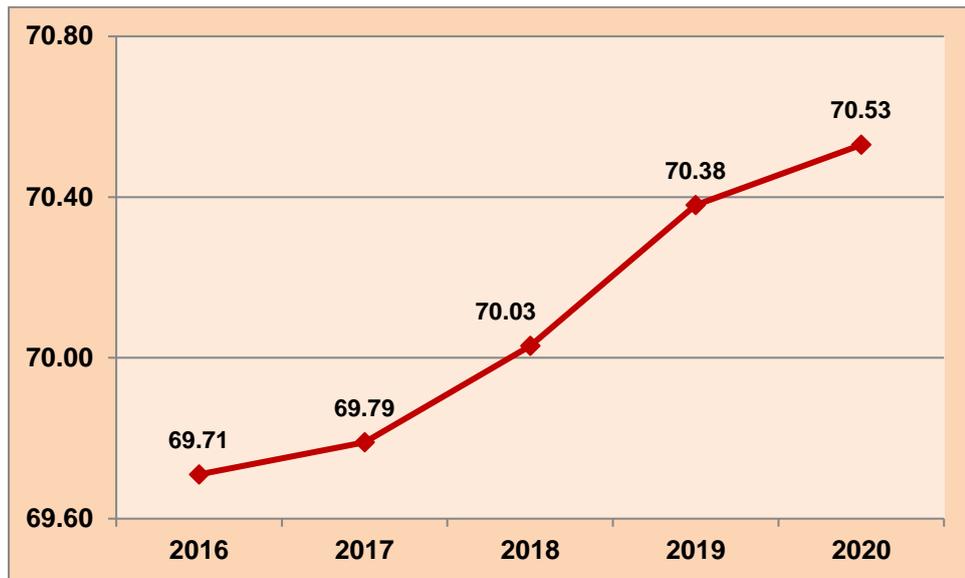
**Tabel 2.30 Presentase Standar Kompetensi Pendidik di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	1477	1450	1464	1552	1548
2.	Guru yang telah bersertifikat pendidik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

g. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan Grafikan umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tercatat pada tahun 2016 sebesar 69,71 tahun meningkat menjadi 70,53 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Grafik berikut ini memberikan Grafikan kondisi Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Grafik 2. 15 Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

h. Indeks Pembangunan Manusia

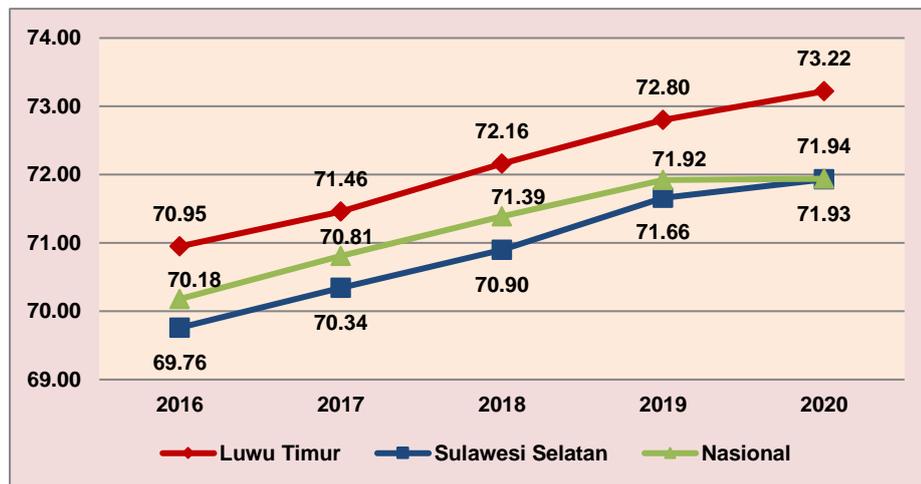
Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk untuk mencapai kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Pada awalnya, konsep pembangunan ekonomi lebih menekankan pada usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan ketertinggalan di bidang ekonomi dan pendapat bahwa perubahan maupun perbaikan di seluruh dimensi kehidupan dapat diwujudkan melalui kemajuan di bidang ekonomi (Subandi, 2011).

Demikian kentalnya paradigma tersebut sehingga seringkali terminologi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dianggap sebagai hal yang sama. Harus dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang secara fundamental berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan per kapita dan penambahan produk secara kuantitas. Adapun pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas, terutama peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia (Perkins, Radelet dan Lindauer, 2006). Lebih lanjut, Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) menjelaskan bahwa suatu wilayah yang berhasil meningkatkan pendapatannya namun gagal dalam meningkatkan usia harapan hidup dan taraf kesehatan penduduk, tidak berhasil mengurangi angka

kematian bayi serta tidak mampu meningkatkan pendidikan warganya dapat dianggap telah gagal dalam melakukan pembangunan.

Selain itu, pengalaman selama lebih dari empat dekade terakhir menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi diperlukan, namun belum mencukupi persyaratan untuk dapat meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk di berbagai negara. Terkait dengan hal tersebut, Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) memaparkan bahwa terdapat paling sedikit tiga alasan utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dinikmati oleh semua penduduk secara merata. Kedua, hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak ditransfer untuk peningkatan standar hidup masyarakat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan konsumsi, akan tetapi penduduk yang telah sejahtera menjadi semakin sejahtera dan penduduk yang sebelumnya kurang sejahtera hanya mengalami sedikit peningkatan (dalam hal ini berlaku pandangan bahwa penduduk kaya semakin kaya dan penduduk miskin semakin miskin).

Grafik 2. 16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur, Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)



Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Menurut Komponen Tahun 2016- 2020

KOMPONEN	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69.71	69.79	70.03	70.38	70.53
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.78	12.79	12.81	12.82	12.83
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.88	8.20	8.45	8.54	8.80
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp. 000	11,960	12,030	12,346	12,802	12,814
IPM		70.95	71.46	72.16	72.80	73.22

Sumber data : Badan Pusat Statistik Sul-Sel, 2021

i. Gini Rasio

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi merupakan salah satu komponen penyusun PDB, maka dengan meningkatnya investasi tentu akan meningkatkan nilai PDB. Investasi juga berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Investasi meningkat maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat. Sebagai upaya dalam meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun dan pendapatan masyarakat meningkat.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan dua masalah krusial yakni kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang dimaksud adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata

yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari perubahan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar kelompok masyarakat.

Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat kelompok berpendapatan bawah tumbuh dengan lambat atau bahkan turun, sedangkan tingkat kesejahteraan kelompok berpendapatan atas tumbuh dengan cepat. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, yang pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi gejolak politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif.

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, kesenjangan ekonomi juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada negara-negara maju. Tidak mengherankan bila ketimpangan itu akan selalu ada, baik itu di negara miskin, negara berkembang, maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

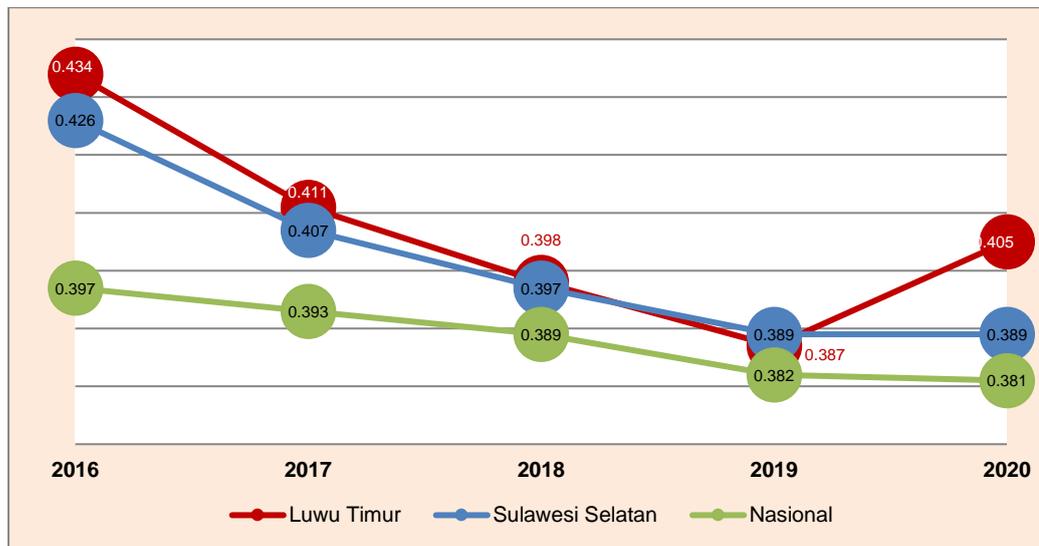
Ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan, namun ketimpangan yang semakin melebar harus dikendalikan. Ketimpangan yang semakin lebar akan melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai macam konflik. Sedangkan perkembangan indikator pemerataan distribusi pendapatan selanjutnya yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Di Kabupaten Luwu Timur perkembangan Rasio Gini dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan dibandingkan dengan Rasio Gini SUL-SEL maupun Nasional, Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur masih dibawahnya. Hal tersebut mengGrafikkan kondisi ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Luwu Timur masih relatif lebih baik dibandingkan dengan SUL-SEL dan Nasional, seperti terlihat dalam Tabel 2.33 dan Grafik 2.20.

Tabel 2.32 Rasio Gini Kabupaten Luwu Timur

WILAYAH	2016	2017	2018	2019	2020
Luwu Timur	0.434	0.411	0.398	0.387	0.405
Sulawesi Selatan	0.426	0.407	0.397	0.389	0.389
Nasional	0.397	0.393	0.389	0.382	0.381

Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 4, 2020

Grafik 2. 17 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Tabel 2.33 Benda Warisan Budaya yang dikelola Pemerintah Daerah

No	Jenis	Jumlah	Satuan
1	Benda tidak bergerak	1	Buah
2	Benda bergerak	2	Buah
	Jumlah	3	Buah

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, 2021



1. Olah Raga

Tabel 2.34 Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Olahraga	-	-	-	-	-
2	Jumlah Klub Olahraga	-	16	21	21	21

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.35 Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Gedung Olahraga	-	5	8	8	9

Sumber: Dinas Parbudmudora Kab. Luwu Timur, 2020

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Luwu Timur. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Bupati 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Pada tahun 2016 dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Evaluasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ketentuan ini seluruh unit pelayanan publik diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Tabel 2.36 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.19	78.46	81.81	83.43	84.31
---	----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Bagian Organisasi Tahun 2021

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2.1.3.1.1 Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 2.37 Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sekolah	163	156	163	165	175
2	Jumlah Murid	6.973	7.414	7.545	7.562	7.961
3	Jumlah Guru	576	579	580	583	589

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tabel 2.38 Angka Partisipasi Kasar Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	APK PAUD	%	38.39	38.39	39.79	45.71	46.11
2	APK SD/MI/Paket A	%	102.31	102.00	102.24	102.94	103.13
3	APK SMP/MTs/Paket B	%	106.13	103.00	103.48	103.50	103.56

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.39 Angka Partisipasi Kasar PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH SISWA TK/RA/Sederajat	JUMLAH ANAK USIA 4-6 TAHUN	APK PAUD
1	BURAU	1254	2644	47.43%
2	WOTU	873	1990	43.86%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

3	TOMONI	901	1755	51.35%
4	TOMONI TIMUR	345	728	47.36%
5	ANGKONA	549	1544	35.55%
6	MALILI	1386	2479	55.91%
7	TOWUTI	1311	2176	60.24%
8	NUHA	994	1909	52.06%
9	WASUPONDA	541	2095	25.82%
10	MANGKUTANA	537	1430	37.55%
11	KALAENA	258	658	39.21%
JUMLAH		8949	19409	46.11%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.40 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SD/MI/PAKET A	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	(APK) SD/MI/PAKET A
1	BURAU	4689	5253	89.27%
2	WOTU	3686	3923	93.95%
3	TOMONI	3426	3254	105.28%
4	TOMONI TIMUR	1446	1438	100.56%
5	ANGKONA	2692	2898	92.90%
6	MALILI	5529	4475	123.55%
7	TOWUTI	5779	3695	156.39%
8	NUHA	2988	3045	98.12%
9	WASUPONDA	2728	3586	76.07%
10	MANGKUTANA	2447	2772	88.28%
11	KALAENA	1335	1291	103.41%
JUMLAH		36745	35631	103.13%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.41 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SMP/MTs/PAKET B	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	(APK) SMP/MTs/PAKET B
1	BURAU	2539	2444	103.90%
2	WOTU	1786	1871	95.44%
3	TOMONI	1241	1568	79.15%



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SMP/MTs/PAKET B	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	(APK) SMP/MTs/PAKET B
4	TOMONI TIMUR	866	690	125.54%
5	ANGKONA	1365	1355	100.75%
6	MALILI	2155	2149	100.26%
7	TOWUTI	2158	1579	136.70%
8	NUHA	1431	1236	115.78%
9	WASUPONDA	1180	1527	77.28%
10	MANGKUTANA	1520	1353	112.38%
11	KALAENA	754	640	117.81%
JUMLAH		16995	16411	103.56%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Tabel 2.42 Angka Partisipasi Murni Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD/MI/Paket A	%	99.18	99.02	92.03	92.39	92.54
2	APM SMP/MTs/Paket B	%	93.47	80.80	95.73	95.97	95.99

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.43 Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SD/MI/PAKET A USIA 7-12 TAHUN	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	APM SD/MI/PAKET A
1	BURAU	4254	5253	80.99%
2	WOTU	3185	3923	81.18%
3	TOMONI	3151	3254	96.83%
4	TOMONI TIMUR	1194	1438	83.03%
5	ANGKONA	2374	2898	81.92%
6	MALILI	4711	4475	105.26%
7	TOWUTI	5387	3695	145.78%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SD/MI/PAKET A USIA 7-12 TAHUN	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	APM SD/MI/PAKET A
8	NUHA	2959	3045	97.16%
9	WASUPONDA	2321	3586	64.72%
10	MANGKUTANA	2252	2772	81.23%
11	KALAENA	1187	1291	91.94%
JUMLAH		32974	35631	92.54%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.44 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SMP/MTs/PAKET B USIA 13-15 TAHUN	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	APM SMP/MTs/PAKET B
1	BURAU	2280	2444	93.30%
2	WOTU	1493	1871	79.78%
3	TOMONI	1205	1568	76.85%
4	TOMONI TIMUR	952	690	138.01%
5	ANGKONA	1372	1355	101.27%
6	MALILI	1869	2149	86.95%
7	TOWUTI	1956	1579	123.91%
8	NUHA	1273	1236	102.99%
9	WASUPONDA	1163	1527	76.16%
10	MANGKUTANA	1404	1353	103.80%
11	KALAENA	786	640	122.81%
JUMLAH		15753	16411	95.99%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)



Tabel 2.45 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	APS SD/MI	%	99.69	95.26	91.93	95.93	95.95
2	APS SMP/MTs	%	98.76	96.55	95.51	98.37	98.49

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.46 Angka Partisipasi Sekolah(APS)SD/MI Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	APS SD/MI
1	BURAU	4380	5253	83.38%
2	WOTU	3627	3923	92.45%
3	TOMONI	3253	3254	99.96%
4	TOMONI TIMUR	1488	1438	103.48%
5	ANGKONA	2511	2898	86.65%
6	MALILI	5197	4475	116.13%
7	TOWUTI	4847	3695	131.17%
8	NUHA	2763	3045	90.73%
9	WASUPONDA	2629	3586	73.31%
10	MANGKUTANA	2216	2772	79.95%
11	KALAENA	1278	1291	98.99%
JUMLAH		34189	35631	95.95%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.47 Angka Partisipasi Sekolah(APS) SMP/MTs Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 13-15Tahun	APS SMP/MTs
1	BURAU	2275	2444	93.10%
2	WOTU	1496	1871	79.94%
3	TOMONI	1279	1568	81.57%
4	TOMONI TIMUR	1018	690	147.58%
5	ANGKONA	1401	1355	103.41%
6	MALILI	1978	2149	92.03%
7	TOWUTI	1988	1579	125.93%
8	NUHA	1291	1236	104.45%
9	WASUPONDA	1214	1527	79.50%
10	MANGKUTANA	1438	1353	106.31%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

11	KALAENA	785	640	122.66%
JUMLAH		16163	16411	98.49%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

5. Angka Putus Sekolah

Tabel 2.48 Angka Putus Sekolah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Angka Putus Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	0.12	0.12	0.10	0.1	0.07
2	SMP/MTs	0.32	0.32	0.23	0.21	0.20

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

6. Angka Kelulusan (AL)

Tabel 2.49 Angka Kelulusan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI						
1	Lulus	3.396	5.695	5.725	5.476	5.522
2	Tidak Lulus	0	22	22	26	14
Angka Kelulusan (%)		100	99,62	99,62	99,55	99,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.50 Angka Kelulusan SMP/MTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SMP/MTS						
1	Lulus	4.024	4.974	5.225	5.171	5.194
2	Tidak Lulus	0	40	38	62	26
Angka Kelulusan (%)		100	99,20	99,28	98,82	99,50

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

7. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTS



Tabel 2.51 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	99,2	89,81	95,74	95,75	95,76

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

8. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Tabel 2.52 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	SEKOLAH	Kondisi Ruang Kelas	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	Baik (%)	79,27	78,04	78,35	71,78	72,27
		Rusak Ringan/Sedang (%)	17,53	17,54	18,32	19,92	19,61
		Rusak Berat/Total (%)	3,20	4,42	3,33	8,30	8,12
		Jumlah Bangunan Gedung (Unit)	1.563	1.562	1.441	1.531	1.540

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.53 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SMP/MTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	SEKOLAH	Kondisi Ruang Kelas	2016	2017	2018	2019	2020
1	SMP/MTS	Baik (%)	83,46	82,34	78,85	77	78,51
		Rusak Ringan/Sedang (%)	15,38	15,36	15,81	17,26	15,91
		Rusak Berat/Total (%)	1,15	2,30	5,34	6,24	5,58
		Jumlah Bangunan Gedung (Unit)	520	521	506	481	484

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar



Tabel 2.54 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	238	248	249	251	251
1.2	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	49.394	49.432	51.748	51.749	52.042
1.3	Rasio	48,18	50,17	48,12	48,50	48,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.55 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar	RASIO
1	Burau	29	7.696	37,68
2	Wotu	30	5.795	51,77
3	Mangkutana	19	4.822	39,40
4	Tomoni	16	2.128	75,20
5	Tomoni Timur	20	4.124	48,49
6	Kalaena	11	1.931	56,97
7	Angkona	27	4.253	63,49
8	Malili	34	6.625	51,32
9	Wasuponda	18	5.113	35,20
10	Nuha	15	4.281	35,04
11	Towuti	32	5.274	60,68
JUMLAH		251	52.042	48,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

10. Rasio Guru/Murid

Tabel 2.56 Rasio Guru/Murid Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Jumlah Guru	1.368	1.375	1.364	1.326	1.465
1.2	Jumlah Murid	34.483	33.833	36.269	36.517	36.745
1.3	Rasio	397	406	376	363	399
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	883	885	880	792	818
2.2	Jumlah Murid	15.690	16.263	16.276	16.276	16.411
	Rasio	563	544	541	487	498

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

11. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah

a. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar tahun 2020

Tabel 2.57 Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Rombel SD/MI	Jumlah Murid SD/MI	Rasio
1	BURAU	208	3833	54,27
2	WOTU	160	3459	46,26
3	TOMONI	144	3344	43,06
4	TOMONI TIMUR	79	1406	56,19
5	ANGKONA	124	2559	48,46
6	MALILI	236	5191	45,46
7	TOWUTI	230	5072	45,35
8	NUHA	108	2511	43,01
9	WASUPONDA	113	2485	45,47
10	MANGKUTANA	118	2138	55,19
11	KALAENA	61	1112	54,86
	TOTAL	1581	33110	47,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

b. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah menengah pertama Tahun 2020



Tabel 2.58 Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Rombel SMP/MTs	Jumlah Murid SMP/MTs	Rasio
1	BURAU	82	2447	33,51
2	WOTU	65	1678	38,74
3	TOMONI	43	1246	34,51
4	TOMONI TIMUR	33	877	37,63
5	ANGKONA	54	1329	40,63
6	MALILI	78	2137	36,50
7	TOWUTI	71	2016	35,22
8	NUHA	44	1203	36,58
9	WASUPONDA	38	1068	35,58
10	MANGKUTANA	42	1169	35,93
11	KALAENA	24	591	40,61
TOTAL		574	15761	36,42

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

12. Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Tabel 2.59 Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya Lulusan SD	3.396	5.695	5.725	5.746	5.522
2	Banyaknya penduduk usia 12 tahun	5.617	5.528	5.912	5.911	5.938
3	Proporsi	60.46	103.46	96.84	97.21	92.99

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

13. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

Tabel 2.60 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Melek Huruf	54.729	55.497	56.624	57.591	57.591
2	Banyaknya Penduduk	54.970	55.729	56.750	57.686	57.956

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
	Usia 15-24 Tahun					
3	Angka Melek Huruf	99,56%	99,58%	99,78%	99,84%	99,37%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

14. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV

- a. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tingkat SD

Tabel 2.61 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Dasar (SD) Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru S1/DIV	968	945	943	1025	1020
2	Jumlah guru SD	1177	1139	1075	1108	1135
Persentase		82,24%	82,97%	87,72%	92,51%	89,87%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

- b. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tingkat SMP

Tabel 2.62 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Dasar (SD) Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru S1/DIV	509	505	521	527	528
2	Jumlah guru SMP	518	508	524	550	553
Persentase		98,26%	99,41%	99,43%	95,82%	95,48%

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pembinaan Ketenagaan, Pengembangan

Budaya Baca dan Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.63 Kondisi Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melek Huruf	94,06	93,72	94,80	95,72	95,30
2	Rata-rata Lama Sekolah	7,88	8,20	8,45	8,54	8,80
3	Angka Partisipasi					
	APM SD	99,18	99,02	92,03	92,39	92,54
	APM SMP	93,47	80,8	95,73	95,97	95,99
4	Angka Kelulusan					
	AK SD	100	99,62	99,62	99,55	99,75
	AK SMP	100	99,20	99,28	98,82	99,50
5	Angka Harapan Lama Sekolah	12,78	12,79	12,81	12,82	12,83
6	Standar Kompetensi Pendidik					
7	Guru yg memenuhi kualifikasi S1/DIV	1477	1450	1464	1552	1548
8	Guru yg telah bersertifikat Pendidik	-	-	-	-	-

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur 2021

Memperhatikan capaian SPM Pendidikan tersebut berbagai upaya yang dilakukan diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kependidikan maupun penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan baik tingkat SD maupun SMP. Sedangkan pendidikan SMA/K menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

2.1.3.1.2 Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2.64 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	43	35	42	45	45
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.689	5.725	5.724	5.607	5518
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,56	6,11	7,34	8,03	8,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami kondisi fluktuasi, pada tahun 2017 terjadi penurunan dari 7,56 di tahun 2017 menjadi angka 6,11 lalu selanjutnya dari tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami kenaikan.

2. Angka kelangsungan hidup bayi

Tabel 2.65 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kelangsungan hidup bayi	92.45	93.89	92.67	91.98	91.85

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Tabel 2.66 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Balita	Kasus	10	5	8	5	4
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.689	5.725	5.724	5.607	5518
3	Angka Kematian Balita	Angka	1,76	0,87	1,40	0,89	0,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

4. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Tabel 2.67 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Neonatal	Kasus	30	30	29	34	32
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.689	5.725	5.724	5.607	5518
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	5,27	5,24	5,07	0,06	4,61

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

5. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Tabel 2.68 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal	Orang	5	4	5	8	6
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.689	5.725	5.724	5.607	5518
3	Angka Kematian Ibu	Angka	87,89	69,87	87,35	142,67	108,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021



6. Rasio posyandu per satuan penduduk

Tabel 2.69 Rasio Posyandu dan Balita Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	Unit	266	267	270	273	274
2	Jumlah Balita	Unit	21.922	22.174	24.945	24.641	24.557
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Angka	12,13	12,04	10,82	11,08	11.16

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.70 Rasio Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio (4/5*1000)
1	BURAU	BURAU	39	2832	13.77
2	WOTU	WOTU	29	2195	13.21
3	TOMONI	TOMONI	22	1726	12.75
4	TOMONI TIMUR	TOMONI TIMUR	16	1109	14.43
5	MANGKUTANA	MANGKUTANA	26	2011	12.93
6	KALAENA	KALAENA	13	976	13.32
7	ANGKONA	ANGKONA	29	2017	14.38
8	MALILI	MALILI	12	2264	5.30
9		LAMPIA	10	748	13.37
10		LAKAWALI	8	1105	7.24
11	WASUPONDA	WASUPONDA	8	1373	5.83
12		PARUMPANAI	5	526	9.51
13	NUHA	NUHA	17	1617	10.51
14	TOWUTI	WAWONDULA	11	1676	6.56
15		TIMAMPU	6	907	6.62
16		MAHALONA	12	709	16.93

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

17	BANTILANG	11	766	14.36
TOTAL		274	24,557	11.16

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

7. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Tabel 2.71 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kab. Luwu Timur Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	Unit	15	15	17	17	17
2	Jumlah Poliklinik	Unit	4	4	4	4	8
3	Jumlah Pustu	Unit	60	62	64	64	73
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	280.689	287.874	293.822	300.374	300.078
5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	0.28	0.28	0.29	0.28	0.33

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

8. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Tabel 2.72 Rasio Rumah sakit per satuan penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	Unit	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	Unit	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit swasta	Unit	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	Unit	2	2	2	2	2

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

6.	Jumlah Penduduk	Jiwa	280.689	287.874	293.822	300.374	30.078
7.	Rasio Rumah Sakit	%	0,003	0,003	0,003	0,003	0,007

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.73 Rasio Rumah Sakit menurut kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Burau	35.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wotu	33.618	1	0,033	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,033
3	Tomoni	26.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tomoni Timur	13.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mangkutana	22.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kalaena	12.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Angkona	25.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Malili	42.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Nuha	23.869	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,048	1	0,048
10	Wasuponda	22.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Towuti	41.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	300.078	1	0,003	0	0	0	0	0	0	1	0,003	2	0,007

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

9. Rasio dokter per satuan penduduk

Tabel 2.74 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter	Orang	45	38	38	42	43
2	Jumlah Penduduk	Orang	280.689	287.874	293.822	300.374	300.078
3	Rasio Dokter Per satuan Penduduk	%	16,03	11,40	13,23	14,51	14,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021



10. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tabel 2.75 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Medis	Orang	83	73	76	94	89
2	Jumlah Penduduk	Orang	280.689	287.874	293.822	300.374	300.078
3	Rasio Tenaga Medis	%	29,21	29,21	26,44	33,16	33,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Tabel 2.76 Cakupan komplikasi Kebidanan Yang di Tangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	Orang	1043	1028	1029	1063	1008
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Orang	1264	1259	1260	1266	1242
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	82,49	81,68	81,68	83,97	35,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

12. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Tabel 2.77 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki kompetensi Kebidanan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan	Orang	5676	5719	8726	5613	5497
2	Jumlah seluruh sasaran ibu yang bersalin di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	6043	5974	6012	6042	5926

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki kompetensi Kebidanan	%	94,07	95,73	95,24	92,9	92,76
---	---	---	-------	-------	-------	------	-------

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Tabel 2.78 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa/kelurahan UCI	Desa/Kel	122	122	117	126	113
2	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Desa/Kel	127	127	127	127	127
3	Cakupan Desa/kelurahan UCI	%	96	96	92,13	99,21	88,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Tabel 2.79 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Orang	1	1	1	3	3
2	Jumlah seluruh balita gizi Buruk yang ditemukan disuatu wilayah	Orang	1	1	1	3	3
3	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

15. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak

Tabel 2.80 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia satu tahun yang	Orang	5674	5848	1931	6079	5466



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	mendapatkan imunisasi campak						
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	Orang	5747	6123	5543	5741	5644
3	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak	%	98,73	95,51	34,84	105,89	96,85

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

16. Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk

Tabel 2.81 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan	Orang	2	4	4	3	2
2	Jumlah penduduk < 15 Tahun	Orang	90.310	91.251	90.161	90.659	44943
3	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	%	2,21	4,38	4,44	3,31	4.45

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

17. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Tabel 2.82 Cakupan Balita Pneumonia yang di tangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita pnemonia balita	Orang	199	197	359	393	82
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia	Orang	2192	2217	103137	231088	1073
3	Cakupan Balita Pneumonia yang di tangani	%	9,08	8,88	0,3	0,2	7,64

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021



18. Cakupan Penemuan Dan penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tabel 2.84
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita baru TBC BTA	Orang	263	320	431	445	310
2	Jumlah Perkiraan penderita baru TBC BTA Dalam kurun waktu yang sama	Orang	263	320	431	445	310
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	93,97	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tabel 2.83 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyak kasus penderita TBC	Orang	263	320	431	445	310
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	280.689	287.874	293.822	300.374	300.078
3	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	%	93,70	111,16	146,69	148,15	103,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

20. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tabel 2.84 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien TB Yang	Orang	10	10	4	5	2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	meninggal						
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	280.689	287.874	293.822	300.374	300.078
3	Tingkat kematian Tuberkulosis	%	3,56	3,47	1,36	1,66	0,67

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

21. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Tabel 2.85 Proporsi jumlah kasus tuberkulosis Yang terdeteksi dalam program DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis terdeteksi	Orang	263	320	431	445	310
2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diperkirakan	Orang	364	364	462	452	462
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	72,25	87,91	93,29	96,30	67,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

22. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Tabel 2.86 Proporsi Kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam program DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	Orang	245	309	420	432	303

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah-jumlah pasien TB PARU BTA Yang di OBATI	Orang	263	320	431	445	310
3	Proporsi kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh	%	93,15	96,56	97,44	97,07	97,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Tabel 2.87 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penderita DBD Yang ditangani	Orang	607	96	114	107	37
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah	Orang	607	96	114	100	37
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

24. Penderita Diare Yang ditangani

Tabel 2.88 Penderita diare yang ditangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan	Orang	11.579	10.442	12.139	12.436	7.741
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama	Orang	6.007	6.069	7.757	7.814	7.757
3	Penderita diare yang di tangani	%	192,75	172,05	156,49	159,15	99,79

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

25. Angka Kejadian Malaria

Tabel 2.89 Angka kejadian malaria Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	Orang	18	30	72	22	13
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	Orang	0	0	0	0	0
3	Angka kejadian malaria	%	<1	<1	<1	<1	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

26. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total populasi

Tabel 2.90 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien HIV/AIDS disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2	7	8	4	4
2	Jumlah penduduk disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	280.689	287.874	293.822	300.374	300.078
3	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi	%	0,0007	0,0024	0,0027	0,0013	0,0013

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

27. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Tabel 2.91 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Orang	4.13	9.64	24.19	31.61	0.19

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

28. Cakupan Kunjungan Bayi

Tabel 2.92 Cakupan Kunjungan Bayi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh kunjungan kes . sesuai standarisasi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	5.629	5.633	5.694	5.622	4.885
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	5.747	5.689	5.726	5.754	5.518
3	Cakupan kunjungan bayi	%	97,95	99,02	99,44	97,71	88,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

29. Cakupan Puskesmas

Tabel 2.93 Cakupan Puskesmas Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	Unit	15	16	17	17	17
2	Jumlah Kecamatan	Unit	11	11	11	11	11
3	Cakupan Puskesmas	%	136,4	145,4	154,6	154,6	154,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

30. Cakupan Puskesmas Pembantu

Tabel 2.94 Cakupan Puskesmas Pembantu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	60	62	64	73	73
2	Jumlah Desa/Kelurahan	Unit	127	127	127	127	127
3	Cakupan Puskesmas Pembantu (1/2)	%	47,24	48,82	50,39	57,48	57,48

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

31. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Tabel 2.95 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal	Orang	6007	6073	6024	6143	5484
2	Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	Orang	6322	6293	6299	6330	6208
3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	95,02	96,50	95,53	97,05	88,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

32. Cakupan pelayanan Nifas

Tabel 2.96 Cakupan pelayanan Nifas Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di suatu wilayah	Orang	5588	5603	5601	5581	5494
2	Seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kerja pada waktu yang sama	Orang	5676	5973	6012	6042	5926
3	Cakupan pelayanan Nifas	%	92,61	95,73	93,13	92,37	92,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

33. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Tabel 2.97 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Orang	430	859	472	461	412
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Orang	862	327	859	841	847



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	49,88	30,08	54,97	54,81	48,67
---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

34. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel 2.98 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja ada waktu tertentu	Orang	19408	19977	20482	27638	14875
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Orang	21922	22174	22406	31315	22405
3	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	88,53	90,09	91,41	88,26	66,39

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

35. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat

Tabel 2.99 Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu	Orang	5427	5551	6177	5808	0
2	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	5427	5551	6188	5808	11255
3	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	99,82	100	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

36. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Tabel 2.100 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun
----	-----------	--------	-------

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan pasien miskin disarkes Strata 1	Orang	107.027	106.708	114.427	106.370	106.763
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	Orang	80.866	85.747	86.495	81.326	106.763
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	132,35	124,45	132,29	130,79	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

37. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Tabel 2.101 Cukup pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Gawat Darurat	Unit	2	2	2	2	2
2	Jumlah RS	Unit	2	2	2	2	2
3	Cukup pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

38. Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Tabel 2.102 Cukup Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KLB di desa / kelurahan yang di tangani >24 jam dalam priode tertentu	Kasus	5	9	8	7	7
2	Jumlah KLB didesa/ kelurahan yang terjadi pada priode yang sama	Kasus	5	9	8	7	7
3	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum



1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Infrastruktur jalan merupakan elemen penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur sebab dengan terbangunnya jalan di wilayah Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa hal ditunjang termasuk, konektivitas antar wilayah yang ada di Kabupaten Luwu Timur, memudahkan pergerakan orang dan barang dan juga mempersingkat waktu dan jarak tempuh.

Panjang jalan kondisi baik yang ada di Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019 dan 2020, dari 1.178,45 di tahun 2018 turun menjadi 748,003 dan 755,802 pada tahun 2019 dan 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2019 dan 2020 Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur melakukan pendataan secara menyeluruh dan menggunakan arahan baru dari Kementerian PUPR, juga terjadi penurunan kondisi jalan bagi jalan yang tidak diintervensi dengan kegiatan pemeliharaan oleh Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur. Selengkapnya pada tabel berikut;

Tabel 2.103 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kondisi baik	Km	1.118,75	1.160,96	1.178,45	748,003	755,802
2	Panjang jalan seluruhnya	Km	1.894,57	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,591	0,615	0,624	0,396	0,400

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.104 Kondisi Jalan Kab. Luwu Timur 2016 – 2020

NO.	KONDISI	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	1.118,75	1.160,96	1.178,447	748,003	755,802
2	Sedang	336,38	323,05	313,263	749,286	594,076
3	Rusak Ringan	276,58	243,24	224,522	71,213	227,577
4	Rusak Berat	162,86	162,03	173,041	320,771	311,818
5	Jumlah	1.894,57	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 2.105 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panjang jalan	Km	1.894,57	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27
2	Jumlah penduduk	Km	280.684	287.874	293.822	300.374	305.407
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,067	0,0065	0,0064	0,0062	0,0062

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami penurunan dari tahun ke tahun. hal tersebut dikarenakan jumlah panjang jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur tidak mengalami penambahan sementara jumlah penduduk bertambah dari tahun ke tahun.

3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)

Jalan kabupaten di Luwu Timur memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang menopang pergerakan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. data menunjukkan bahwa meskipun panjang keseluruhan jalan kabupaten tidak mengalami penambahan selama 2017 sampai 2020, namun untuk jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik mengalami penurunan yang

signifikan khususnya pada tahun 2019 dan 2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	1.118,75	1.160,96	1.178,447	748,003	755,802
2	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	%	1.894,57	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	59,05	61,45	62,37	39,59	40,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

4. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Drainase jalan merupakan bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi persyaratan salah satu teknis prasarana jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Di Kabupaten Luwu Timur persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang sesuai standar masih sangat kecil belum mencapai angka 1 persen. Pada tahun 2106 sampai dengan 2018 hanya naik 0,001 persen dari 0,113 di tahun 2016 menjadi 0,114 di tahun 2018, selanjutnya meningkat tetap dari 2019 sampai tahun 2020 menjadi 0,133, karena ada penambahan panjang jalan sepanjang 370 Km. selengkapnya terdapat pada tabel dibawah.

Tabel 2.107 Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan (Minimal 1,5 m) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	2,157	2,157	2,157	2,527	2,527

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	1.894,57	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m)	%	0,113	0,114	0,114	0,133	0,133

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

5. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menyediakan akses masyarakat terhadap sanitasi memperlihatkan kinerja yang memuaskan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Pada tahun awal 2016 angka persentase berada pada posisi 70,34 persen, selanjutnya terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 97,91 persen di tahun 2020.

Tabel 2.108 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Rumah	40771	50582	55165	58533	58818
2	Jumlah rumah tinggal	Rumah	56364	57575	58776	60075	60075
3	persentase rumah tinggal bersanitasi	%	70,34	87,86	93,88	97,43	97,91

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

6. Persentase drainase dalam kondisi baik

Drainase di Kabupaten Luwu Timur tersebar di wilayah permukiman dan yang berada pada jalan penghubung antar desa. Pembangunan drainase di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan setiap tahunnya sebagai respon atas perencanaan *Top Down* dan *Bottom Up* yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pemanfaatan anggaran belanja daerah sebaik-baiknya. Panjang drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya panjang drainase secara keseluruhan kabupaten. Meskipun kenaikan setiap tahunnya tidak terlalu signifikan, kecuali pada tahun 2018 yang kenaikannya mencapai 3,19 persen, namun kenaikan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan pembangunan baru yang ada pada perangkat daerah terkait berjalan dengan baik. Selengkapny dapat



dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.109 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (km)	Km	249,2	295,228	345,462	370,962	372,628
2	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (km)	Km	311,499	369,035	415,269	436,769	440,25
3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	80	80	83,19	84,93	84,64

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

7. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut seiring dengan peningkatan kondisi saluran irigasi primer, sekunder ataupun tersier yang sesuai kewenangan kabupaten. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 angka persentase tersebut hanya meningkat sekitar 7,35 persen dari 43,37 pada tahun 2016 menjadi 50,72 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.110 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ha	2940	3056,5	3211	3412,7	3438,2
2	Luas irigasi kabupaten	Ha	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	43,37	45,09	47,37	50,34	50,72

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

8. Rasio jaringan irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan Grafikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Tabel 2.111 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jaringan Primer	6.503,00	5.535,00	321,00	5.454,30	5.804,30
2.	Jaringan Sekunder	8.365,60	10.568,30	11.805,00	5.607,70	3.545,00
3.	Jaringan Tersier	795,00	335,00	223,00	223,00	630,00
4.	Total Panjang jaringan	15.663,60	23.466,90	28.012,60	34.751,90	37.991,90
5.	Luas Lahan Budidaya	5078	5078	5078	5078	5078
6.	Rasio	3,085	4,621	5,516	6,844	7,482

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

9. Persentase penduduk berakses air minum

Pencapaian jumlah penduduk yang berakses air minum selama lima tahun mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 11,55 persen. Secara keseluruhan peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebesar 21,40 persen atau sekitar 71.124 jiwa.

Tabel 2.112 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk berakses air minum	Jiwa	90183	103635	139741	148955	161307
2	Jumlah penduduk	Jiwa	281822	287874	293882	300374	302039
3	Persentase penduduk berakses air minum	%	32	36	47,55	49,59	53,40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

10. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan

Tabel 2.113 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan Dan Perdesaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	223.072	236.211	240.943	268.560	NA

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

2	Jumlah penduduk seluruhnya	Jiwa	281.822	287.874	293.882	300.374	NA
3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	%	79,15	82,05	82	89,41	NA

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

11. Persentase areal kawasan kumuh

Tabel 2.114 Persentase Areal Kawasan Kumuh Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah luas kawasan kumuh	Ha	1,0162	1,0374	1,092	2,68	2,72
2	Luas wilayah	Km ²	6945	6945	6945	6945	6945
3	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

12. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Tabel 2.115 Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bangunan ber IMB		820	1.725	2.766	4.018	4.941
2	Jumlah bangunan		6.959	13,746	20.872	28.004	35.458
3	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan		0,11	0,12	0,13	0,14	0,13

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.



Ada empat (4) kriteria rumah layak huni, yaitu : ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m²), akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 dimana terdapat penambahan 1.552 unit rumah dari tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni Kabupaten Luwu Timur adalah sebanyak 53.581 unit, jumlah tersebut bertambah sebanyak 4.090 unit selama lima tahun sejak tahun 2016 yang berada pada posisi 49.491 unit.

Tabel 2.116 Rasio Rumah Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	49.491	49.754	50.809	52.361	53.581
2	Jumlah penduduk	Jiwa	293.978	295.904	299.975	300.374	302.039
3	Rasio rumah layak huni		0,168	0,168	0,169	0,174	0,177

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Data Penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

2. Rasio permukiman layak huni

Rasio permukiman layak huni didapatkan dari pembagian antara luas permukiman layak huni dan luas seluruh wilayah permukiman. Selama lima tahun jumlah luasan permukiman layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan.

Tabel 2.117 Rasio Permukiman Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas permukiman layak huni	Km ²	23,91	24,91	26,23	27,61	27,89
2	Luas wilayah permukiman	Km ²	33,23	33,23	34,98	36,82	36,82
3	Rasio permukiman layak huni		0,71	0,74	0,74	0,74	0,75

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021



3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Tabel 2.118 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	49,491	49.754	50.809	52.361	53.581
2	Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	60,582	61,571	61.614	61.922	61.834
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	81.69	80.81	82.46	84.56	86.65

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Tabel 2.119 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Unit	8.136	8.982	9.582	10.182	10.782
2	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Unit	16.982	18.511	18.530	18.540	18.550
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	47.91	48.52	54.71	54.92	58.12

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

5. Persentase permukiman yang tertata

Tabel 2.120 Persentase Permukiman Yang Tertata Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas area permukiman tertata	Km ²	23,91	24,91	26,23	27,61	27,89



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

2	Luas area permukiman keseluruhan	Km ²	33,23	33,23	34,98	36,82	36,82
3	Persentase permukiman yang tertata	%	71.94	74.95	74.98	74.98	75.74

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

6. Persentase lingkungan permukiman kumuh

Tabel 2.121 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah luas permukiman kumuh	Km ²	1,02	1,04	1.09	2,68	2,72
2	Jumlah luas permukiman luas wilayah	Km ²	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
3	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0.01	0.01	0.02	0.04	0.04

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

7. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Tabel 2.122 Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Luasan permukiman kumuh yang tertangani	%	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
2	Jumlah permukiman kumuh	%	1.02	1.04	1.09	2.68	2.72
3	Persentase luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan	%	5.02	5.21	5.22	2.24	2.24

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

8. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Tabel 2.123 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	%	11.091	11.817	10.111	9.321	8.253
2	Jumlah seluruh rumah	%	60.582	61.571	61.614	61.922	61.834
3	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	18.31	19.19	16.41	15.05	13.35

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

9. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU

Tabel 2.124 Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Di Dukung Dengan PSU Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Unit	57	59	68	75	86
2	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Unit	127	127	127	127	127
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	%	44.88	46.46	53.54	59.06	67.72

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat

Tabel 2.125 Cakupan petugas perlindungan masyarakat Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	1.439	1.349	1.184	1.184	1.16
2	Jumlah Desa/Kelurahan	127	127	127	127	127
3	Cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat	11.33	10.62	9.32	9.32	9.12

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)



Tabel 2.126 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah gangguan K3 yang ditangani	34	38	41	450	448
2	Jumlah gangguan K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol PP	55	60	55	450	448
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	61.82	63.33	74.55	100	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Tabel 2.127 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	529,87	883,12	1.059,75	1.413	1.589,62
2	Luas Wilayah Kabupaten Luwu Timur	6945	6945	6945	6945	6945
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	7.63	12.71	15.26	20.34	22.89

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

4. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Tabel 2.128 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap	23	36	65	133	62
2	Jumlah kejadian kebakaran di WMK	37	47	89	177	68
3	Tingkat waktu tanggap (respon timerate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	62.16	76.6	73.03	75.15	91.18

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021



5. Persentase penegakan perda

Tabel 2.129 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	28	34	38	40	22
2	Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol PP	34	41	49	51	26
3	Persentase Penegakan Perda	82.35	82.93	77.55	78.43	84.61

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.3.1.5 Sosial

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Tabel 2.130 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	Jiwa	-	12074	13313	1126	12710
2	Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Jiwa	-	31579	31586	31584	41138
3	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	-	38.23	42.15	3.57	30.90

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Persentase PMKS yang tertangani

Tabel 2.131 Persentase PMKS yang Tertangani Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	-	12178	13309	13180	12559



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

2	Jumlah PMKS	Jiwa	-	36024	36025	36023	47590
3	Persentase PMKS yang tertangani	%	-	33.81	36.94	36.59	26.39

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Persentase PMKS skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel 2.132 Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bansos dalam 1 tahun	Jiwa	-	12074	12074	11205	12587
2	Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bansos dalam 1 tahun	Jiwa	-	34442	34591	34794	44442
3	Persentase PMKS yang tertangani	%	-	35.06	34.91	32.20	28.32

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Tabel 2.133 Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	-	0	5	7	10
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	-	0	8	9	10
3	Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan	%	-	0.00	62.50	77.78	100.00

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

	Prasarana Pelayanan Kesehatan					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Persentase WKBSM yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.134 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah WKBSM dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	0	0	0	4	7
2	Jumlah WKBSM dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	0	0	0	9	10
3	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0.00	0.00	0.00	44.44	70.00

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tabel 2.135 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	0	112	40	76	151
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	0	112	40	76	151
3	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Dan



Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tabel 2.136 Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	0	112	40	76	151
2	Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	0	112	40	76	151
3	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

8. Persentase Penyandang Cacat Dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial

Tabel 2.137 Persentase Penyandang Cacat Dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	0	297	295	301	298
2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima	Jiwa	0	3201	3580	3906	4030

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

	jaminan sosial dalam satu tahun						
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0.00	9.28	8.24	7.71	7.39

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Tabel 2.138 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun kab. Luwu timur tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus	10	15	12	14	34
2	Jumlah perusahaan	Perusahaan	138	165	102	123	151
3	Angka tenaga sengketa pekerja pertahun	%	7,25	9,09	11,76	11,38	22,82

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Tabel 2.139 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	10	20	16,67	-	8,82

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Tabel 2.140 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pekerja buruh jamsostek	Orang	3.898	4.413	6.357	9.761	16.124
2	Jumlah pekerja/ buruh	Orang	3.898	4.413	6.357	9.761	16.124
3	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tabel 2.141 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang di latih	Orang	22	22	116	110	50
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	31	30	158	149	66
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	70,96	73,33	73,41	73,82	75,75

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Tabel 2.142 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang di latih	Orang	-	300	330	330	330

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Orang	-	300	330	330	330
3	Perentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Tabel 2.143 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang di latih	Orang	-	-	99	110	10
2	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	Orang	-	-	99	110	10
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	-	-	100	100	100

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.144 Jumlah Perusahaan Menurut Besar Kecilnya Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Tahun	Besar	Sedang	Menengah	Kecil		Jumlah
	TK >100	TK 50-99	TK 25-49	< 25	< 10	
2016	11	5	21	33	68	138
2017	21	14	24	45	66	170
2018	31	17	33	45	75	201
2019	23	20	21	31	45	140
2020	25	22	25	36	43	151

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel 2.145 Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB, LKS BIPARTIT, Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kabupaten Luwu Timur 2016-2020



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tahun	PP	PKB	SP/SB	LKS. BIPARTIT	PHI/PHK	TK Korban PHK
2016	51	8	32	1	5	5
2017	52	8	32	2	16	16
2018	58	8	29	2	7	16
2019	62	9	31	3	13	13
2020	65	9	32	3	34	6

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Tabel 2.146 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Orang	0	2381	2384	4130	4287
2	Jumlah Pekerja Perempuan	Orang	0	3377	3404	5454	5639
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	0.00	70.51	70.04	75.72	76.02

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Tabel 2.147 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi di DPRD yang diduduki perempuan	Orang	1	1	1	1	2
2	Jumlah total kursi keanggotaan DPRD	Orang	30	30	30	30	30
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	3.33	3.33	3.33	3.33	6.67

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020



3. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Tabel 2.148 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	Orang	0	996	1020	1324	1352
2	Jumlah Pekerja Perempuan	Orang	0	3377	3404	5454	5639
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	0.00	29.49	29.96	24.28	23.98

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Rasio KDRT

Tabel 2.149 Rasio KDRT Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	Kasus	21	27	27	33	21
2	Jumlah Rumah Tangga	RT	69073	69988	70058	87534	69073
3	Rasio KDRT	%	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2.150 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	0	3377	3404	5454	5639
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	0	48541	48453	46113	45341



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

3	partisipasi angkatan kerja perempuan	%	0.00	6.96	7.03	11.83	12.44
---	--------------------------------------	---	------	------	------	-------	-------

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2.151 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Laporan	0	21	27	27	33
2	Jumlah Laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Laporan	0	21	27	27	33
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	0.00	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2.152 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Didalam Unit Pelayanan Terpadu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Korban Kekerasan yang memperoleh layanan rehabsos	Orang	0	21	21	27	33
2	Jumlah korban kekerasan	Orang	0	21	21	27	33

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

	yang membutuhkan rehabsos						
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	%	0.00	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

8. Cakupan Kupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Tabel 2.153 cakupan kupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	0	14	19	24	31
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidang	Perkara	0	21	21	27	33
3	cakupan kupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0.00	67	90	89	94

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

9. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Tabel 2.154 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

1	Jumlah korban mendapatkan layanan bantuan hukum	Orang	0	14	19	24	31
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang	0	21	21	27	33
3	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	0.00	67	90	89	94

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.155 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Korban	0	8	10	8	9
2	Korban Kekerasan terhadap perempuan	0	5	5	4	4
3	Korban kekerasan terhadap anak	0	3	5	4	5
4	Jumlah Kasus KDRT	0	5	5	4	4

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.3.2.3 Pangan

1. Ketersediaan pangan utama

Tabel 2.156 Ketersediaan Pangan Utama Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rata rata ketersediaan pangan utama pertahun	Ton	193.744	204.693	259.389	245.401	252.728
2	Jumlah penduduk	Orang	293.978	283.609	298.981	300.078	300.078
3	Ketersediaan pangan utama	%	65.90	72.17	86.75	81.77	84.22

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.157 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi (Ton)	308.657	308.404,19	338.836,59	327.848	327.848

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

2.	Kebutuhan (Ton)	32.890	31.730	33.450	33.573	28.055,81
3.	Persediaan (Ton)	155.675	160.234	212.596	205.692	208.872,25
	Surplus/Defisit	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2.158 Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	Gram/kap/hari	5,947.42	3,457.15	4,383.08	3,731.26	3,258.86

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2.159 Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	66.66	36.36	41.66	71.42	-

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Penyuluhan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan. Capaian kinerja penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tahun 2016 s/d 2020 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.160 Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Kondisi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Tani	1994	2063	2101	2162	2306
a	Kelas Pemula	1457	1476	1496	1541	1647
b	Kelas Lanjut	502	548	562	582	605
c	Kelas Madya	33	36	40	45	49
d	Kelas Utama	2	3	3	4	5
2.						
a.	Jumlah Petani/Buruh Tani	49153	50853	51790	53294	56844
b	Jumlah Keanggotaan dalam Kelompok Tani	25	25	25	25	25
c	Rasio jumlah anggota kelompok tani dibanding jumlah petani/buruh tani	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%

Sumber data: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.3.2.4 Pertanahan

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel 2.161 Persentase luas lahan bersertifikat Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah luas lahan bersertifikat	M2	-	8,395,654	8,537,136	8,538,186	8,842,736
2	Jumlah luas wilayah	M2	-	22299929.61	22299929.61	22299929.61	22299929.61
3	Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	37.65	38.28	38.29	39.65

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel 2.162 Penyelesaian kasus tanah negara Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus yang di selesaikan	Kasus	5	3	9	7	5
2	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	6	3	9	7	5



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

3	Penyelesaian kasus tanah negara	%	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00
---	---------------------------------	---	-------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel 2.163 Penyelesaian izin lokasi Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ijin lokasi	Ijin	4	-	-	2	1
2	Jumlah permohonan ijin lokasi	Ijin	4	-	-	2	1
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100.00	-	-	100.00	100.00

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Tabel 2.164 IKLH Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020

No	Tahun	IKLH
1	2017	56.9965
2	2018	58.351
3	2019	70.55097921
4	2020	86.87125

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.165 Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Hutan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air	13.875	15	10.92	26.75829
2	Indeks kualitas Udara	150.255	15.255	29.03879056	29.52077
3	Indeks tutupan hutan/lahan	28.096	28.096	30.59218865	30.59219

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.166 Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	Nama	Dusun	Desa	Kecamatan
1	DELIMA	-	MAGANI	NUHA
2	MORINA	-	SOROWAKO	NUHA
3	MOLENA INIAKU	-	NIKKEL	NUHA
4	KAMASE	-	WAWONDULA	TOWUTI
5	BARUGA SAYANG	-	BARUGA	TOWUTI
6	MANDIRI	-	PEKALOA	TOWUTI
7	SEJAHTERA	-	TIMAMPU	TOWUTI
8	MONSOLINGA	-	ASULI	TOWUTI
9	MABES	-	MATOMPI	TOWUTI
10	RANTE ANGIN	-	RANTE ANGIN	TOWUTI
11	TOKALIMBO	-	TOKALIMBO	TOWUTI
12	LOEHA	-	LOEHA	TOWUTI
13	BANTILANG	-	BANTILANG	TOWUTI
14	LIOKA	-	LIOKA	TOWUTI
15	LANGKEA RAYA	-	LANGKEA RAYA	TOWUTI
16	KECAMATAN TOWUTI	-	KECAMATAN	TOWUTI
17	LOWITA	-	TABARANO	WASUPONDA
18	LEMBO SEJATI	-	WASUPONDA	WASUPONDA
19	BIRONO	-	PARUMPANAI	WASUPONDA
20	HARAPAN KU	-	BALAMBANO	WASUPONDA
21	BSC SATU HATI	-	WASUPONDA	WASUPONDA
22	LEDU-LEDU	-	LEDU-LEDU	WASUPONDA
23	MOMOIKO	-	KANTOR WASUPONDA	WASUPONDA
24	ANGGREK	-	MALILI	MALILI
25	D'LIMA	-	LAKAWALI	MALILI
26	BIRAWA	-	BALANTANG	MALILI
27	IPIN	-	PUNCAK INDAH	MALILI
28	LAKALOI	-	BARUGA	MALILI
29	HARAPAN BERSIH SAMPAH	-	HARAPAN	MALILI
30	MALINDO	-	PASI-PASI	MALILI
31	BAROKAH	-	LASKAP	MALILI
32	MUDA BERKARYA	Dsn. Hulu Padang	PONGKERU	MALILI
33	MALLIWENG	-	WEWANGRIU	MALILI
34	SAHABAT MANURUNG	-	MANURUNG	MALILI
35	BALAPAN	DSN. LADOPING	LAKAWALI PANTAI	MALILI
36	BANK SAMPAH CEMARA	-	PUNCAK INDAH (PERKANTORAN)	MALILI
37	TCLB	-	TAWAKUA	ANGKONA
38	LBS	-	LAMAETO	ANGKONA
39	MPS	-	WANASARI	ANGKONA
40	BBM	-	BALIREJO	ANGKONA

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	Nama	Dusun	Desa	Kecamatan
41	CILIBER	-	TARIPA	ANGKONA
42	GPS	-	SOLO	ANGKONA
43	BSM BALI	-	MANTADULU	ANGKONA
44	WANAGIRI	-	KECAMATAN	ANGKONA
45	WATSAP	-	WATANGPANUA	ANGKONA
46	TAMPINNA BISA	-	TAMPINNA	ANGKONA
47	MABESSAH	-	MALIWOWO	ANGKONA
48	BINA HARAPAN	-	KALAENA KIRI	KALAENA
49	GEMAH RIPAH	-	ARGOMULYO	KALAENA
50	KARYA SEJAHTERA	-	NON BLOK	KALAENA
51	BERLIAN	-	MEKAR SARI	KALAENA
52	BII	-	PERTASI KENCANA	KALAENA
53	BERSERI	-	SUMBER MAKMUR	KALAENA
54	SUMBER AGUNG	-	SUMBER AGUNG	KALAENA
55	BANG KUMIS	-	MARGOLEMBO	MANGKUTANA
56	ANDALAN	-	WONOREJO TIMUR	MANGKUTANA
57	MELAYU	Dsn. Senam Hari 2	WONOREJO	MANGKUTANA
58	MANIS ASAM ASIN	-	TEROMU	MANGKUTANA
59	SAPULIDI	-	SINDU AGUNG	MANGKUTANA
60	BALAI KEMBANG	-	BALAI KEMBANG	MANGKUTANA
61	KASINTUWU	-	KASINTUWU	MANGKUTANA
62	SILET	-	PANCAKARSA	MANGKUTANA
63	KISS	-	KORONCIA	MANGKUTANA
64	HARAPAN JAYA	-	BANGUN JAYA	TOMONI
65	MULYASRI	-	MULYASRI	TOMONI
66	MABALLO	-	TOMONI	TOMONI
67	MANDIRI	-	MANDIRI	TOMONI
68	KARYA	-	BANGUN KARYA	TOMONI
69	BUAH SAWIT	-	KALPATARU	TOMONI
70	BAYONDO CINTA LINGKUNGAN	-	BAYONDO	TOMONI
71	MAWAR	-	SUMBER ALAM	TOMONI
72	TADULAKO	-	TADULAKO	TOMONI
73	BASMAN	-	MANUNGGAL	TOMONI TIMUR
74	DERES	-	KERTORAHARJO	TOMONI TIMUR
75	MARGOMULYO	-	MARGOMULYO	TOMONI TIMUR
76	BERSINAR	-	ALAM BUANA	TOMONI TIMUR
77	SULE	-	LERA	WOTU
78	RANGATA	-	LAMPENAI	WOTU
79	MADANI	-	MADANI	WOTU
80	KANAWATU	-	KANAWATU	WOTU
81	KITA PEDULI KEBERSIHAN	-	MARAMBA	WOTU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Nama	Dusun	Desa	Kecamatan
82	ASRI	-	PEPURO BARAT	WOTU
83	BERIMAN	-	CENDANA HIJAU	WOTU
84	SAYANG BUMI	-	KARAMBUA	WOTU
85	BAHARI	-	BAHARI	WOTU
86	KENNENG	-	BAWALIPIU	WOTU
87	TARENGGE	-	TARENGGE	WOTU
88	RINJANI	-	RINJANI	WOTU
89	TARENGGE TIMUR	-	TARENGGE TIMUR	WOTU
90	LINKBAS	Dsn. Bone Pata	BONE PUTE	BURAU
91	MELATI	-	LEWONU	BURAU
92	SIPAKATAU SIPAKAINGE BURAU	-	BURAU	BURAU
93	BILAS	-	LUMBEWE	BURAU
94	MAPACCING	-	JALAJJA	BURAU
95	BERKASIH	-	BENTENG	BURAU
96	LAUWO	-	LAUWO	BURAU
97	LANOSI	-	LANOSI	BURAU
98	LAMBARESE	-	LAMBARESE	BURAU

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.167 Jumlah Timbulan Sampah Per Hari Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Sumber	Jumlah (ton)	Keterangan
1	Rumah tangga	4,572	-
2	Kantor	1,140	-
3	Pasar tradisional	2280	-
4	Pusat Perniagaan	1140	-
5	Fasilitas Publik	576	-
6	Kawasan Lain	1716	-

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.168 Jumlah Sampah Terolah Per Hari Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Jenis Ollaahan sampah	Jumlah (ton)	Keterangan
1	Komposting	1.00	-
2	Daur Ulang	7.11212	-
3	Bahan Bakar	0	-
4	Dikelola Bank sampah	2.400	-
5	Daur Ulang Biogas	0	-
Jumlah		10.51212	-

1. Tersedianya RPPLH Kabupaten/Kota

Tabel 2.169 Tersedianya Dokumen RPPLH Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Ada/tidak ada	Tidak ada				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Tabel 2.170 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada/tidak ada	Tidak ada				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten

Tabel 2.171 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat daerah Kabupaten	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Tabel 2.172 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air kab. Luwu timur tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun
----	-----------	--------	-------

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	0	46.25	50.00	36.40	89.19

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Tabel 2.173 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara kab. Luwu timur tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara		0	50.078	50.85	96.79	98.40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 2.174 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas tutupan lahan		0	70.24	70.24	76.48	76.48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 2.175 Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha kab. Luwu timur tahun 2016-2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin lingkungan, izil PPLH dan PUU LH dari izin yabng terbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Usaha/ Kegiatan	26	26	26	26	26
2	Total Penanggung jawab usaha dan kegiatan yang dihina dan diawasi terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Usaha/ Kegiatan	50	50	50	50	50
3	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha	Usaha/ Kegiatan	20	20	20	20	20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

8. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA

Tabel 2.176 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah MHA Yang diakui	MHA	0	0	0	1	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

9. Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional

Tabel 2.177 Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional kab. Luwu timur tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah MHA dan kearifan Lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi.	MHA	0	0	0	1	3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

10. Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional

Tabel 2.178 Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan tradisional yang terverifikasi	MHA	0	0	0	1	3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

11. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Tabel 2.179 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Terlaksananya Pemberian penghargaan lingkungan Hidup	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

12. Timbulan Sampah Yang Ditangani

Tabel 2.180 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Terlaksananya Pemberian penghargaan lingkungan Hidup	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

13. Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R

Tabel 2.181 Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R. Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

1.	Sampah yang berkurang melalui 3R Adalah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang di lingkungan.	Ton	-	2.051,3	4.714,89	4.742,69	-
2	Persentase Jumlah Sampah Yang dikurangi Melalui 3R	%	-	5.09	11,46	11,06	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

14. Persentase Jumlah sampah yang ditangani

Tabel 2.182 Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R. Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sampah yang berkurang melalui 3R Adalah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang di lingkungan.	Ton	-	2.051,3	4.714,89	4.742,69	-
2	Persentase Jumlah Sampah Yang dikurangi Melalui 3R	%	-	5.09	11,46	11,06	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

15. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Kota

Tabel 2.183 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Kota Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020



No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai TPA (Program Adipura)	Nilai	-	77,07	77,07	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP persatuan penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin. Kebutuhan akan akses pelayanan publik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el, juga semakin mendorong masyarakat untuk segera memiliki KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga ketersediaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaan blangko KTP-el di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pendistribusiannya ke instansi pelaksana di Kabupaten/Kota. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk merupakan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber KTP dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada Tahun 2016 terdapat 0,90 jiwa penduduk yang memiliki KTP sedangkan untuk tahun 2017 terdapat 0,91 jiwa yang memiliki KTP, Pada Tahun 2018 Mengalami peningkatan lagi 0,96 jiwa, dan tahun 2019-2020 meningkat lagi menjadi 0,97 jiwa yang memiliki KTP, selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.184 Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber KTP	Jiwa	175.927	181.355	191.879	195.707	202.728
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah	Jiwa	195.956	198.622	200.534	202.055	203.326
3	Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk	%	0,90	0,91	0,96	0,97	1,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran

Rasio bayi beraktekelahiran merupakan jumlah bayi berakte kelahiran dibanding dengan jumlah bayi. Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan paspor.

Tabel 2.185 Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jiwa	3.210	3.516	3.809	3.772	4.066
2	Jumlah bayi	Jiwa	3.575	3.821	4.124	4.035	4.256
3	Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran	%	0,90	0,92	0,92	0,93	0,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang

melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya program nasional percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasangan berakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan buku nikah/ akta perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalam SIAK. Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasil pelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnya terintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK). Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kab. Luwu Timur selengkapnya pada table berikut.

Tabel 2.186 Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasang	10.800	12.873	17.054	23.674	29.402
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasang	67.425	63.281	69.889	71.056	71.847
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	0,16	0,19	0,24	0,33	0,41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Tabel 2.187 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Tahun 2016-2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada/tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel 2.188 Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan dibanding Jumlah penduduk wajib KTP. selengkapnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.189 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Jiwa	175.927	181.355	191.879	193.773	202.728
2	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	195.956	198.622	200.534	200.780	203.826
3	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	89,78	91,31	95,68	96,51	99,46

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran merupakan jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dibanding Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan, selanjutnya disajikan sebagai berikut.



Tabel 2.190 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	3.210	3.516	3.809	3.772	4.066
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	3.575	3.821	4.124	4.035	4.256
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	89,79	92,02	92,36	93,48	95,54

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik merupakan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dibanding Jumlah seluruh pemerintahan desa. Selanjutnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.191 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang baik	Unit	124	124	124	124	124
2	Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa	Unit	124	124	124	124	124
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

2. Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata- Rata Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.192 Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM.	%	135	135	135	135	135

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK LPM di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.193 Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 S.d 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	%	340	350	365	365	365

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

4. Persentasi PKK Aktif

Persentasi PKK Aktif di Kab. Luwu timur cukup baik karena adanya dukungan peran aktif pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Penggerak PPK Kabupaten/Kecamatan/Desa untuk melakukan fungsinya dan pelaksanaan agenda kerja. Persentasi PKK Aktif di Kab. Luwu Timur selanjutnya disajikan sebagai berikut.seperti pada table berikut.

Tabel 2.194 Persentase PKK Aktif Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKK Aktif	Klp	139	139	139	139	139
2	Jumlah PKK	Klp	139	139	139	139	139
3	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.195 Jumlah Bantuan Keuangan Desa Dari Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Jenis Bantuan	2016	2017	2018	2019	2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Alokasi Dana Desa	68,920,000,000	69,900,100,000	64,588,000,000	68,418,500,000	67,280,000,000
Bagi Hasil Pajak	812,749,780.56	8,726,296,450.14	13,981,185,000		16,843,320,838
Bagi Hasil retribusi	9,516,406.36	623,113,147.84	623,485,000		418,781,131
Jumlah	69,742,266,186.92	79,249,509,597.98	79,192,670,000.00	68,418,500,000.00	84,542,101,969.00

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bantuan keuangan kepada desa berupa alokasi dana desa selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bagi hasil pajak mengalami fluktuasi ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah. Bagi hasil Retribusi mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karenakarena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi



daerah.

Sarana prasarana perkantoran desa sangat mendukung dalam kelancaran menjalankan pemerintahan dan pembangunan serta menunjang pelayanan masyarakat. Belum semua kondisi kantor desa dalam kondisi baik. Kondisi kantor desa dapat diketahui dalam tabel berikut;

Tabel 2.196 Kondisi Kantor Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak Ringan
1	Mangkutana	11		
2	Nuha	4		
3	Towuti	10	7	1
4	Malili	11	3	
5	Angkona	10		
6	Wotu	14	2	
7	Burau	14	4	
8	Tomoni	12		
9	Tomoni Timur	8		
10	Kalaena	6	1	
11	Wasuponda	6		
Jumlah		106	17	1

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk (*LPP/Growth Rate of Population*) adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Manfaat Laju pertumbuhan penduduk untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu, $LPP > 0$ berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya, $LPP = 0$ berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya, $LPP < 0$ berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian, migrasi. Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanakan program keluarga berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Adapun kesertaan KB pada pasangan usia subur menjadi penghambat jumlah kelahiran. Kematian juga dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang menyebabkan angka kematian antara lain, tidak menjaga kesehatan, kurang sarana kesehatan di wilayah tersebut seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotik, kemiskinan yang berlebihan yang menyebabkan kurangnya asupan gizi, wilayah perperangan, bencana alam, pola makan tidak teratur dan wabah penyakit. Adapun faktor yang menghambat kematian antara lain menjaga kesehatan, pola makan yang teratur, makan yang bergizi, sedikitnya angka kemiskinan, sarana kesehatan yang lengkap. Migrasi penduduk yang datang bisa saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini bias menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Sebaliknya penduduk yang pergi ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, dalam jumlah yang banyak, seperti menjadi TKI, bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kab. Luwu Timur, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.197 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,05	1,66	1,63	1,99	1,99

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Total Fertility Rate (TFR)



Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Total fertility rate (TFR) di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.198 Total Fertility Rate (TFR) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR) Total Angka Kelahiran	%	2,76	2,31	2,21	2,21	2,21

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Tabel 2.199 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	OPD	0	5	9	9	9
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	0	16	16	16	16
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	0	31,25	56,25	56,25	56,25

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020



4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Tabel 2.200 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	OPD	4	4	4	4	4
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	4	4	4	4	4
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk

Tabel 2.201 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Tabel 2.202 Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program

Pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan.

Tabel 2.203 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	0	0	0	1	1

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

8. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Di Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan data yang ada, rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 2 orang, hal ini berarti program Keluarga Berencana dapat dikatakan berjalan. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.204 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak	Jiwa	127.251	121.821	120.407	134.468	154.638

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

2	Jumlah keluarga	KK	66.353	69.073	69.988	70.058	75.510
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga		3	2	2	2	2.04

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

9. Rasio Akseptor KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kab Luwu Timur, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.205 Rasio Akseptor KB Tahun 2016-2020 Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	43098	45004	45047	44971	44679
2	Jumlah Peserta KB Aktif	Pasangan	33277	33523	32224	33227	32381
3	Rasio Akseptor KB	%	77.21	74.49	71.53	73.89	72.47

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15–49 di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.206 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia

15 –49 Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	33277	33523	32224	33227	32381
2	Jumlah pasangan usia subur	Jiwa	43098	45004	45047	44971	44679
3	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	77.21	74.49	71.53	73.89	72.47

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

11. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

Tabel 2.207 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	Jiwa	-	1027	916	1343	-
2	Jumlah pasangan usia subur	Jiwa	-	45004	45047	44971	-
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	Tidak Melakukan Pendataan	2.28	2.03	2.98	Tidak Melaksanakan Pendataan (pandemi COVID 19)

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

12. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) adalah semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, atau tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya.

Unmet Need merupakan presentase yang diperoleh dari PUS yang ingin punya anak ditunda (IAT) dan tidak ingin anak lagi (TIAL) tetapi tidak menggunakan atau memakai alat kontrasepsi, yang dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS)



dan dikalikan 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi cakupan *unmet need* antara lain: Faktor predisposing yang meliputi umur WUS, pendidikan, jumlah anak, pendapatan, dan pengetahuan;) Faktor enabling, meliputi ketersediaan sarana pelayanan KB, dan jarak pelayanan kesehatan; serta Faktor reinforcing, yaitu Kinerja PLKB. Capaian kinerja seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.208 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Jiwa	5068	5955	6691	6377	6976
Jumlah pasangan usia subur	Jiwa	43098	45004	45047	44971	44679
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	11.76	13.23	14.85	14.18	15.61

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

13. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan jenis kontrasepsi yang efektif dari segi biaya dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pemilihan MKJP ini adalah faktor pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama oleh akseptor bersama pasangan atau bersama penyedia layanan secara substansi mempunyai peluang yang lebih besar terhadap penggunaan MKJP. Untuk dapat meningkatkan penggunaan MKJP, peran pasangan dan penyedia layanan untuk mendiskusikan pemilihan alat kontrasepsi dengan akseptor perlu ditingkatkan. MKJP ini juga diharapkan dapat menjadi pilihan pasangan usia subur laki-laki maupun perempuan, sehingga memberi kontribusi dalam meningkatkan kesetaraan gender, utamanya dalam meningkatkan kesertaan MKJP laki-laki di Kab. Luwu Timur, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.209 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Jiwa	10583	10593	10752	11150	11160
2	Jumlah akseptor KB	Jiwa	43098	45004	45047	44971	44679
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24.55	23.54	23.86	24.79	24.98

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

14. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Dalam hal mencapai kelangsungan pemakaian kontrasepsi ini dibutuhkan pelayanan keluarga berencana (KB) yang berkualitas. Melalui konseling kontrasepsi, peserta KB dapat mengetahui secara jelas dan benar tentang maksud dan tujuan pemakaian alat kontrasepsi, cara-cara KB yang tersedia, kemungkinan efek samping dan dapat mencegah timbulnya kecemasan dan ketakutan terhadap pemakaian. Konseling kontrasepsi yang baik akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB. Capain kinerja, selengkapny pada tabel berikut.

Tabel 2.210 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Jiwa	9833	11481	11338	11734	12300
2	Jumlah akseptor KB	Jiwa	33271	33550	30465	33237	32381

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

3	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	29.55	34.22	37.21	26.66	37.98
---	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

15. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang secara menyeluruh dan terpadu guna mencapai tumbuh kembang yang optimal. Sasaran BKB secara langsung adalah orangtua yang memiliki balita dan secara tidak langsung juga anggota keluarga yang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll (organisasi profesi, LSM). Dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas, diharapkan orang tua yang mempunyai balita merencanakan kelahiran anak berikutnya sehingga orang tua dapat fokus pada pengasuhan balitanya. Capaian kinerjanya, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.211 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus PUS	Jiwa	3650	3774	4002	4104	3955
2	Jumlah PUS anggota Kelompok Kegiatan yg menjadi Peserta KB	Jiwa	3227	3280	3391	3449	3160
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	88.41	86.91	84.73	84.04	79.90

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

16. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program bina keluarga remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh



kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif. Dalam wadah BKR ini diharapkan dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok.

Persentase anggota Bina Keluarga Remaja yg ber KB di pada kurun waktu 2015 hingga 2020 masih fluktuatif. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya: intensitas sosialisasi dan edukasi yang belum optimal terutama untuk daerah yang sulit dijangkau, dan motivasi dari keluarga BKR kurang karena masalah kesibukan mencari nafkah dan menganggap bahwa hal tersebut tidak penting. Olehnya itu, masih perlu dilakukan upaya peningkatan kesertaan berKB bagi anggota BKR dengan melakukan sosialisasi yang kontinyu oleh PLKB kepada seluruh keluarga BKR di Kab. Luwu Timur. Selengkapny pada tabel berikut.

Tabel 2.212 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Jiwa	2854	3298	3320	3180	3020
2	Jumlah anggota kelompok BKR	Jiwa	2332	2720	2734	2611	2577
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	81.71	82.47	82.35	82.11	85.33

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

17. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memiliki lanjut usia, diharapkan PUS dalam keluarga menjadi akseptor KB. Pada kurun waktu 2015 hingga 2019 kesertaan ber KB keluarga yang mempunyai lansia yang tergabung dalam kelompok BKL mengalami peningkatan, dan diharapkan

angka ini semakin meningkat di tahun mendatang. Sosialisasi dan edukasi kepada pasangan usia subur yang tergabung dalam kelompok BKL masih harus dioptimalkan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.213 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Jiwa	1962	2026	2150	1759	1749
2	Jumlah anggota kelompok BKL	Jiwa	1740	1733	1833	1427	1420
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	88.69	85.54	85.26	81.13	81.19

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

18. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. PPKS berperan sebagai wadah yang memberikan informasi bagi keluarga dalam hal : 1. Merawat kehamilan dan mempersiapkan kelahiran, 2. Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, 3. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), 4. Membangun komunikasi yg baik dan efektif bagi orang tua dengan anak, 5. Mempersiapkan keluarga memasuki kehidupan lansia dan merawat lansia agar tetap produktif. 6. Masalah kesehatan reproduksi, 7. Konsultasi kewirausahaan, dan 8. Memberikan rujukan terhadap permasalahan keluarga.

Salah satu faktor penghambat pembentukan PPKS ini adalah Kader atau petugas PPKS yang masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Olehnya itu, masih diperluakan komitmen dan upaya yang lebih serius untuk membentuk dan mengembangkan PPKS di seluruh kecamatan di Kab. Luwu Timur. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.214 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS	Klp	0	0	1	1	1
2	Jumlah kecamatan	Kec	0	0	11	11	11
3	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

19. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Tabel 2.215 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PIK R/M	46	49	46	49	48
2	Jumlah kecamatan	11	11	11	11	11
3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	418.18	445.45	418.18	445.55	436.36

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

20. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Tabel 2.216 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	Jiwa	115	115	114	114	112
2	Jumlah PKB/PLKB	Jiwa	115	115	114	114	112

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

3	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

21. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS dipengaruhi oleh beberapa faktor pendiring, diantaranya adanya reward pemerintah bagi penyuluh dan peserta KB mandiri dari UPPKS, dan pemerintah senantiasa memberikan dukungan dengan melakukan pembinaan keterampilan kelompok UPPKS bagi PUS yang ber-KB mandiri. Di sisi lain terdapat pula faktor penghambat, meliputi : pengetahuan dan sikap masyarakat yang tidak merespon dengan baik untuk ber-KB utamanya pada pasangan usia subur (PUS) sehingga untuk kelompok UPPKS tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya stigma di masyarakat untuk menolak ber-KB mandiri pada PUS karena memerlukan waktu dan biaya, dan dukungan dari suami yang kurang serta efek samping dari ber-KB masih tinggi karena kurangnya sosialisasi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.217 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	Jiwa	43098	45004	45047	44971	44679
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Jiwa	444	422	396	385	385
3	Cakupan PUS peserta KB dan (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	1.03	0.94	0.88	0.86	0.86

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

22. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
- Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD/K) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat. Oleh sebab itulah peran mereka harus diberi perhatian dan dukungan agar lebih maksimal membantu masyarakat dalam melaksanakan program KB. Beberapa faktor pendorong keberhasilan PPKBD dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kesertaan ber KB. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja PPKBD diantaranya adalah 1) Meningkatkan motivasi kerja PPKBD perlu ditumbuhkan melalui pemenuhan kebutuhan dalam diri PPKBD mulai dari yang paling dasar sampai pada tingkatan tertinggi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan memperoleh harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri, 2) Peningkatan kualitas PPKBD melalui pelatihan untuk mendukung kemampuan kerja sekaligus menentukan tingkat kinerja yang dihasilkan utamanya dalam berkomunikasi, mengolah data dan berkoordinasi, 3) Pemberian insentif bagi kader PPKBD, mengingat tidak adanya gaji tetap dan penghasilan yang memadai. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.218 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	Jiwa	127	127	127	127	127
2	Jumlah desa/kelurahan	Jiwa	127	127	127	127	127
3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

23. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.



Tabel 2.219 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	Jiwa	33277	33523	32224	33227	32381
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	Jiwa	27251	27654	25032	24036	28464
3	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	%	122.11	121.22	128.73	138.24	113.76

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

24. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Ketersediaan layanan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai satandarisasi pelayanan, akan berdampak pada peningkatan kesertaan KB aktif, karena masyarakat akan lebih mudah memperoleh layanan berkualitas. Untuk ke depannya diharapkan seluruh faskes dapat bekerjasama dengan BPJS sehingga meningkatkan minat PUS untuk ber KB. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.220 Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	17	17	19	21	21
2	Jumlah Faskes dan jejaring	17	17	19	21	21
3	Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	100	100	100	100	100

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

25. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Tabel 2.221 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	Data	-	12	18	18	-
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	Data	-	12	18	18	-
3	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	Tidak Melakukan Pendataan	100	100	100	Tidak Melaksanakan Pendataan (COVID 19)

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

26. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Tabel 2.222 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	KLP	185	129	186	218	239
2	Jumlah kelompok kegiatan	KLP	319	347	356	347	336
3	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	57.99	37.18	52.25	62.82	71.13

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

27. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Pembinaan keluarga dalam melaksanakan fungsi pengasuhan dan tumbuh kembang anak dilakukan melalui aktifitas kelompok Bina Keluarga Balita.

Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.223 Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jiwa	2222	2448	2368	2730	2368
2	Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak	Jiwa	10447	11631	10403	10791	10874
3	Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	21.27	21.05	22.76	25.29	21.77

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

28. Rata-rata usia kawin pertama wanita

Tabel 2.224 Rata-rata usia kawin pertama wanita Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	18	18	19	19	19

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

29. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Tabel 2.225 Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,0068	0,0088	0,0058	0,0061	0,0058

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.9 Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya.

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Tabel 2.226 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kab. Luwu Timur tahun 2016– 2020

NO.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	112.155	113.426	141.090	277.291	
2	Jumlah penumpang Kereta Api	Orang	0	0	0	0	
3	Jumlah penumpang Kapal Laut	Orang	0	0	0	0	
4	Jumlah penumpang Pesawat udara	Orang	16.712	17.060	23.712	22.934	
5	Jumlah Penumpang Kapal di Danau	Orang	131.000	143.129	135.425	76.733	
6	Total jumlah penumpang	Orang	259.867	273.615	300.227	376.958	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2. Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.227 Rasio Ijin Trayek Kab. Luwu Timur Tahun 2016– 2020

NO.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Izin trayek perkotaan	Ijin	0	0	0	0	0
2	Izin trayek pedesaan	Ijin	140	40	26	43	33
3	Jumlah izin trayek	Ijin	140	40	26	43	33

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

NO.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah penduduk	Orang	281.822	287.874	293.822	300.374	302039
5	Rasio Izin Trayek	%	0,050	0,014	0,009	0.014	0,011

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Berikut adalah data uji Kir yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.228 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%
1	Mobil penumpang umum	185	129	69,73	185	67	36,22	190	63	33,16	198	64	32,32	198	70	35,35
2	Mobil Bus	110	109	99,09	117	91	77,78	130	124	95,38	145	145	100	186	183	98,39
3	Mobil Barang	1428	1094	76,61	1435	1300	90,59	1520	1457	95,86	1545	1480	95,79	1623	1612	99,32
4	Truk Sumbu II	515	510	99,03	517	455	88,01	543	469	86,37	563	526	93,43	587	556	94,72
5	Truk Sumbu III	185	180	97,30	188	184	97,87	193	189	97,93	199	190	95,48	213	219	102,82
6	Jumlah	2423	2022	83,45	2442	2097	85,87	2576	2302	89,36	2650	2405	90,75	2807	2640	94,05

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah pelabuhan laut di Kabupaten Luwu Timur yaitu, pelabuhan Lampia (kewenangan pusat), pelabuhan Malili (kewenangan provinsi), pelabuhan Wotu (kewenangan Kabupaten). Pelabuhan udara sebanyak 1 yaitu Bandara udara Soroako. Kedepannya akan dibangun bandara Di Kec. Maliwowo untuk mendukung



pengembangan pariwisata, dan aspek ekonomi lainnya. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kab. Luwu Timur selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.229 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kab. Luwu Timur Tahun 2016– 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelabuhan Laut	3	3	3	3	3
2	Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3	Terminal Bis	2	2	3	3	3
4	Jumlah Dermaga	7	7	7	8	8
4	Jumlah	13	13	14	15	15

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Tabel 2.230 Persentase Layanan Angkutan Darat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan darat	Bis	295	302	320	343	384
2	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	112155	113426	141090	277291	2099996
3	Persentase layanan angkutan darat	%	0,263	0,266	0,227	0,124	0,183

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 2.231 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	unit	401	345	274	245	167
2	Jumlah angkutan umum pada	unit	2423	2442	2576	2650	2807

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

	Tahun n						
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	16,55	14,13	10,64	9,25	5,95

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Pemasangan Rambu Rambu Jalan

Tabel 2.232 Presentase Pemasangan Rambu-rambu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu	unit	20269	25806	46113	46155	46121
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	unit	20269	25806	46113	46155	46121
3	Pemasangan Rambu rambu	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

8. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Tabel 2.233 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	Km	1889,273	1889,273	1889,273	1889,273	1889,273
2	Jumlah Kendaraan	Unit	2423	2442	2576	2650	2807
3	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	%	77,97	77,37	73,34	71,29	67,31

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

9. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.234 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum



Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang	Orang	259.867	273.615	300.227	376.958	290.241
2.	Jumlah Barang	Ton	300.227	376.958	290.241	290.241	253.796

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kab. Luwu Timur, jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal setiap tahunnya meningkat, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.235 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Orang	Brng								
1.	Dermaga	131000	47237	143129	48118	135425	39753	76733	26600	37782	13001
2.	Bandara	16712	182902	17060	161174	23712	161174	22934	28182	6018	84923
3.	Terminal	112155	20387	113426	21458	141090	21458	277291	55459	209996	41099
Jumlah		249867	250526	273615	230750	300227	222385	376958	290241	253796	139023

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.236 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu Timur

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Sepeda Motor	Unit	30.265	25.330	27.316	29.645	26.586
2	Mobil Penumpang Bukan Umum	Unit	261	237	273	371	369
3	Minibus Umum	Unit	190	139	126	110	82
4	Bus Umum	Unit	68	54	68	83	73
5	Bus Bukan Umum	Unit	99	110	81	105	136
6	Pick up Umum	Unit	8	6	7	8	7
7	Pick up Bukan Umum	Unit	1608	1543	1769	2052	2316
8	Truck Umum	Unit	209	197	209	171	142

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

9	Truck Bukan Umum	Unit	513	464	504	647	682
---	------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.237 Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Satuan	kejadian Kecelakaan lalu lintas				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecelakaan	Kejadian	267	308	252	213	206
2	Kerugian Materiil	Rupiah	550.100.000	839.200.000	497.500.000	461.950.000	373.950.000
3	Jumlah Korban	Orang	267	490	496	375	352
4	Meninggal	Orang	46	50	54	42	45
5	Luka Berat	Orang	8	11	14	0	1
6	Luka Ringan	Orang	213	429	428	333	306

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dan POLRES Luwu Timur, 2021

Tabel 2.238 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah pada tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rambu-rambu lalu lintas	949	985	985	985	985	buah
2	RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	46	46	46	46	46	buah
3	Cermin tikungan	6	6	6	6	6	buah
4	Marka jalan	14.52100	150.710	150.710	150.710	150.710	m ²
5	Traffic light (APILL)	3	3	3	4	4	unit
6	Warning Light	26	32	32	32	32	unit
7	Guard rail (pagar pengaman)	235	235	235	235	235	meter
8	Halte	21	21	21	23	23	unit
9	Lampu Penerangan Jalan Umum	0	0	0	0	0	titik

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

1. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Tabel 2.239 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	-	80,74	82,44	83,73	85,14

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Tabel 2.240 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	-	29,13	33,07	43,93	53,44

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Tabel 2.241 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	-	20,23	82,44	83,73	85,14

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Presentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Menurut tabel dibawah, Kecamatan Wotu adalah kecamatan dengan tingkat persentase aktif paling tinggi yang mencapai 100 persen, sedangkan Kecamatan Tomoni Timur adalah kecamatan dengan tingkat persentase aktif yang paling rendah, hanya 28,57 persen atau dari 7 koperasi yang ada hanya 2 koperasi yang aktif.

Tabel 2.242 Persentase Koperasi Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	Unit	159	115	120	121	125
2	Jumlah seluruh koperasi	Unit	272	157	159	160	165
3	Persentase koperasi aktif	%	58.46	73.25	75.47	75,63	75,75

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.243 Presentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kab Luwu Timur Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Akif
1	Burau	10	8	80,00
2	Wotu	14	14	100,00
3	Tomoni	13	9	69,23
4	Mangkutana	14	9	64,28
5	Tomoni Timur	7	2	28,57
6	Kalaena	11	9	81,81
7	Angkona	15	13	86,66
8	Malili	37	29	78,37
9	Wasuponda	13	11	84,62

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

10	Towuti	20	16	80,00
11	Nuha	11	5	45,45
JUMLAH		165	125	75,75

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Jumlah UKM non BPR/LKM pada Tahun 2020 sebanyak 20.179 yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. UKM non BPR/LKM didominasi sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan, adapun pertumbuhan UKM non BPR dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.244 UKM Non BPR/LKM Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	7.435	8.105	11.378	16.959	20.179
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM aktif	Unit	7.435	8.105	11.378	16.959	20.179
3	sentase UKM non BPR/aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Persentase BPR/LKM aktif

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.245 Persentase BPR/LKM Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR/LKM aktif	Unit	60	64	70	70	70
2	Jumlah seluruh BPR/LKM aktif	Unit	60	64	70	70	70
3	sentase BPR LKM aktif	%	100	100	100	100	100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Persentase Usaha Mikro Dan Kecil

Perkembangan jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2016 jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 7.051 unit dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 19.227 unit.

Tabel 2.246 Persentase Usaha Mikro dan Jumlah seluruh UMKM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 -2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	7.051	7.652	10.744	16.011	19.227
2	Jumlah Seluruh UMKM	Unit	7.435	8.105	11.378	16.959	20.179
3	Persentase Usaha Mikro dan Jumlah seluruh UMKM	%	94,84	94,41	94,42	94,41	95,28

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Tabel 2.247 Jumlah Investor PMDN/PMA Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
1	2016	Jumlah Investor	17	3	20
2	2017	Jumlah Investor	30	5	35
3	2018	Jumlah Investor	34	5	39
4	2019	Jumlah Investor	32	5	37
5	2020	Jumlah Investor	21	5	26

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2020

Semakin banyak jumlah investor, mengGrafikkan ketersediaan pelayanan



penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Tabel diatas menyatakan bahwa jumlah investor dalam negeri di Kab. luwu Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.248 Jumlah Investasi PMDN Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2016	17	560.900.000.000	17	498.800.000.000
2017	30	Rp.416.715.000	30	452.245.000.000
2018	34	646.710.000.000	34	516.916.000.000
2019	32	6.120.947.250.000	32	598.558.569.406
2020	21	1.838.630.911.080	21	1.636.201.132.539

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2020

Tabel 2.249 Jumlah Investasi PMA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	17	–	17	Rp. 498.800.000.000
2017	21	–	21	Rp. 235.225.507.125
2018	34	-	34	Rp. 396.134.523.000
2019	13	-	13	Rp.6.120.947.250.000
2020	8		8	Rp.2.185.879.358.954

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2020

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.250 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	%	3530	8448	6694	9576	7251
2	jumlah seluruh PMA/PMDN	%	17	23	33	59	26
3	Rasio daya serap tenaga kerja	%	208,5	367,3	202,8	162,3	278,9

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2019

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.251 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	
1	Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rupiah	Rp. 498.800.000.000	Rp. 452.245.000.000	Rp. 516.916.000.000	Rp. 598.558.569.406	1.636.201.132.539
2	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rupiah	409.500.000.000	433.500.000.000	456.500.000.000	470.000.000.000	483.500.000.000
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	121,81	90,67	128,51	135,45	328,19

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2019

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pembinaan pemuda dilakukan melalui pembinaan organisasi kepemudaan. Persentase organisasi pemuda yang aktif di di Kab. Luwu Timur berfluktuasi, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.252 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

1	Jumlah Persentase organisasi	%	0	28.57	43.24	40.59	40.54
---	------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2019

2. **Persentase Wirausaha Muda**

Tabel 2.253 Persentase Wirausaha Muda Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Persentase Organisasi Wirausaha	%	N/A	N/A	19	19	19

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. **Cakupan Pembinaan Olahraga**

Cakupan Pembinaan Olahraga merupakan Jumlah Cabang olahraga yang dibina dibandingkan Jumlah Cabang olahraga yang ada, selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.254 Cakupan Pembinaan Olahraga Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	Cabor	5	5	5	6	0
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	21	21	21	21	21
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	24	24	30	48	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020

4. **Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat**

Tabel 2.255 Cakupan Pembinaan Olahraga Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelatih Bersertifikat	Orang	N/A	N/A	20	40	40
2	Jumlah Seluruh Pelatih	Orang	N/A	N/A	113	153	153

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

3	Jumlah Persentase organisasi	%	N/A	N/A	17,68	26,14	26,14
---	------------------------------	---	-----	-----	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Tabel 2.256 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet pelajar yang di bina	Atlet	0	50	40	40	0
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	Atlet	0	50	40	40	40
3	Jumlah Persentase organisasi	%	0	100	100	100	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Tabel 2.257 Jumlah Atlet Berprestasi Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Atlet	N/A	27	47	64	30

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Tabel 2.258 Jumlah Prestasi Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Prestasi cabang olahraga yang menangkan dalam satu tahun	Medali	N/A	5	5	6	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.14 Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para *stakeholders*, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral.

Upaya peningkatan kualitas data Kabupaten Luwu Timur menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal, diantaranya ialah sebagai berikut.

- Terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- Adanya perbedaan persepsi suatu data yang menjadikan beberapa versi data menurut masing-masing sumbernya.
- Rendahnya kualitas data yang dihasilkan dikarenakan masih kurangnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun institusi/lembaga dalam memberikan data maupun informasi secara jujur.



➤ Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro.

Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan $n+2$, sedangkan data yang tersedia adalah $n-1$. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Upaya kedepan ditempuh melalui capaian Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik dengan indikator penilaian jumlah data statistik yang tersedia dengan perbandingan jumlah data statistik yang seharusnya tersedia diupayakan peningkatan kualitas data pembangunan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan BPS, SKPD terkait, Desa, *stakeholder* lainnya dan memperkuat forum satu data pembangunan.

Tabel 2.259 Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.260 Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.261 Buku PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Buku PDRB	Ada/Tid	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
---	-----------	---------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.15 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian.

Capaian kegiatan yang telah dilakukan untuk program persandian yaitu terlaksananya pengelolaan dan pengamanan jaringan komunikasi sandi internal Pemkab (JKS), jaringan Telepon dan Radio, sinyal frekuensi pada 21 ruang, dan koordinasi persandian dalam Forum komunikasi petugas sandi satu kali, pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah seperti tercantum dalam Tabel berikut ini.

Permasalahan dalam pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah yaitu belum optimalnya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di lingkup kabupaten Luwu Timur. Upaya kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan persandian adalah dengan meningkatkan pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan peningkatan pengamanan jaringan komunikasi pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di lingkup Kabupaten Luwu Timur melalui tercapainya pengelolaan persandian dengan indikator penilaian Jumlah jenis informasi yang diamankan sesuai dengan peraturan dan jumlah ruang yang sudah diamankan.

Tabel 2.262 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat	OPD	28	28	28	28	28



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah						
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	28	28	28	28	28
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Tabel 2.263 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	2	2	2	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.264 Jumlah Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Di Lestarkan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	0	6	10	13	15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Unit	0	71	71	71	71
3	Persentase Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	0	26	27	28	25

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.265 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	0	6	10	13	15

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.266 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	0	0	2	3	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta

murah.

Peningkatan minat baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2016 sebanyak 144.049 pengunjung, tahun 2017 sebanyak 232.199 pengunjung, tahun 2018 sebanyak 216.118 pengunjung, tahun 2019 sebanyak 221.736 pengunjung dan mengalami penurunan yang sangat drastis (pendemi covid-19) ditahun 2020 sebanyak 15.596 pengunjung, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.267 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	Orang	144.049	232.199	216.118	221.736	15.596
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	293.976	295.904	299.975	304.975	306.975
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	0,49	0,78	0,72	0,73	0,05

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.268 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Judul	9.500	8.400	13.363	13.363	13.463
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Buku	20.000	27.863	34.633	34.633	34.733
3	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	%	0,48	0,30	0,39	0,39	0,39

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.269 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	Unit	81	85	318	336	336
2	Jumlah penduduk	Jiwa	Orang	293.976	295.904	299.975	304.975
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	0,28	0,29	1,06	1,1	1,09

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.270 Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	10.131	19.350	18.010	13.112	11.962

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.271 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Judul	9.500	8.400	13.363	13.363	13.463

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.272 Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis,dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pustakawan tenaga teknis,dan penilai yang bersertifikat	Orang	2	2	2	2	3

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

2	Jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis, dan penilaian yang memiliki sertifikat	Orang	11	13	14	17	16
3	Jumlah pustakawan tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.2.18 Kearsipan

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Capaian pendampingan kepada Unit Kerja dandesa untuk menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan dalam pengelolaan arsip di SKPD tidak terlepas dari kesadaran Unit Kerja dan desa tentang pentingnya pengelolaan kearsipan. Capaian Pengelolaan Kearsipan tersebut seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.273 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	0	8	19	23	34
2	Jumlah perangkat daerah	OPD	39	39	39	39	39
3	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0	20,51	48,72	58,97	87,18

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.274 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Satuan	Tahun
----	--------	--------	-------



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

			2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Keg	2	2	2	3	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Tabel 2.275 Perkembangan Wisatawan pada Obyek Wisata Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Jumlah Pengunjung (orang)						
No	Obyek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
1	BURAU (Pantai Lemo, Gua Batu Putih, Pantai Ujung Suso, Permandian Air Panas, Kuburan Tua, Air Terjun Bonepute & Hutan Mangrove)	3.530	10281	10.795	11595	3.479
2	MANGKUTANA (Sungai Uelanti, Permandian Lopi ,Air Terjun Saloanuung & Wisata Sungai Malela)	1.287	3499	3674	2600	780
3	WOTU (Pantai Balo-Balo, Banua Pangka, Makam Puang Sanro & Hutan Mangrove)	772	1370	1439	1470	441
4	MALILI (Sumur Sawerigading, Hutan Mangrove, Air Terjun Atue & Pulau Bulu Poloe)	1.329	3406	3576	1050	315
5	TOMONI (Semoga Lestari Water Park & Batu Papan)	435	859	902	92	276
6	WASUPONDA (Wasuponda (Air Terjun Mata Buntu, Bukit Agro (Tabarano) & Kali Dingin (Wasuponda)	2.421	2800	2940	3240	972
7	TOWUTI ((Danau Mahalona & Danau Tapparang Masapi)	1.012	3192	3352	3350	1.005
8	NUHA (Danau Matano, Cagar Alam Perburuan, Mata Air Matano (Bura-Bura), Makam Mokole Lakamandiu, Pantai Ide, Pantai Pomua Dahu-Solonsa, Bumi Perkemahan Sawerigading, Pantai Kupu-Kupu-Tapu Singkole, Pantai Molino Topundau & Pantai Impian-Old Camp)	2.272	3536	3713	5700	1.710
	Jumlah	13.058	28.943	30.391	29.925	8.978

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur, 2020

Tabel 2.276 Kunjungan Pariwisata Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata sekabupaten dan kota	Orang	13.058	28.943	30.391	29.925	8.978
2	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan sekabupaten dan kota	Orang	N/A	20.000	22.000	24.500	27.500
3	Kunjungan wisata	%	N/A	144	147	122	32,6

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Lama Kunjungan Wisata

Tabel 2.277 Lama Kunjungan Wisata Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Hari	N/A	2	2	3	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.3.2 Pertanian

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Tabel 2.278 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya Per hektar Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Tanaman padi	Ton	307,265.92	308,404.19	338,836.59	327,848.46	337,293.74
2	Luas Areal Tanaman Padi	Ha	42,655.00	43,714.00	45,286.00	46,640.00	48,838.00

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Cakupan bina kelompok petani

Tabel 2.281
Cakupan Bina kelompok Tani
Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahunan	klp	-	-	126	126	126
2	jumlah kelompok tani	klp	1994	2063	2101	2162	2306
3	Cakupan bina kelompok petani	%	0	0	0.06	0.06	0.05

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.279 Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016- 2020

No	Kondisi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi padi (ton)	307,265.92	308,404.19	338,836.59	327,848.46	337,293.74
2	produksi Buah - Buahan (Kwintal)	181,081	38,546	123,917	263,801	222,817
3	Produksi sayuran tahunan (ton)	830.80	837.90	944.20	861.36	875.00
4	Produksi Biofarmaka (kg)	7,371	7,713	6,663	6,247	6322
5	Produksi Perkebunan (ton) Lada	3,819	432.92	4,174.36	3,487,51	2,751.64
	Produksi Perkebunan kakao (ton)	12,250	12,861.72	13,761.28	6.055,28	4,274.95
	Produksi Perkebunan (ton) kelapa sawit	242,702	112,301.96	91,119.93	67,977.03	59,188.86
6	Populasi ternak besar (ekor)	16,115	16,613	18,392	23,295	21,109
7	Populasi ternak kecil (ekor)	30,743	32,157	33,088	29,956	24,462
8	Populasi unggas (ekor)	1,446,812	1,514,930	1,192,231	1,304,284	849,529
9	Produksi daging (Ton)	1121.85965	607.75925	850.66	2.433	725.627

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

10	Produksi telur (Ton)	11835.185	15664.073	14790.16	14125.339	16582.336
----	----------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.280 Data Populasi Ternak Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2020

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	Ternak Besar	16,115	16,613	18,392	23,295	21,109
1	Sapi Potong	15021	15,546	17,288	22,148	20,464
2	Kerbau	1094	1,067	1,104	1,147	645
II	Ternak Kecil	30,743	32,157	33,088	29,956	24,462
3	Kambing	13454	14,060	14,500	14,978	13
4	Babi	17289	18,097	18,588	14,978	24,449
III	Ternak Unggas	1,446,812	1,514,930	1,192,231	1,304,284	849,529
	Ayam Buras	528499	440,617	239,136	240,465	210,609
	Ayam Ras Petelur	116202	124,522	126,252	130,101	140,385
	Ayam Pedaging	802111	949,791	826,843	933,718	498,535
	Itik	16895	12,253	13,452	15,743	19,166
	Itik Manila	13782	13,457	13,533	18,264	19,984

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel 2.281 SITUASI UMUM PENYAKIT HEWAN MENULAR DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 – 2020

No	Jenis Ternak	Jumlah Jenis Penyakit dan jumlah kasus penyakit (ekor)											
		2016		2017		2018		2019		2020		Rata - Rata	
		Jumlah jenis penyakit	jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	jumlah kasus (ekor)
1	Ayam	5	1944	6	2221	6	2906	2	889	2	809	4	8769
2	Sapi	9	424	9	342	9	353	7	652	7	771	8	2542
3	Kerbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Anjing	2	335	2	300	2	300	2	187	2	106	2	1228
5	Kambing	5	247	5	232	5	256	5	347	5	713	5	1795
6	Babi	5	185	5	115	5	142	4	259	2	216	4	917

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021



2.1.3.3.1 Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Tabel 2.282 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	95,82	94,89	97,07	99,8	98,91

Sumber: Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021, 2020 dan 2019 (Data Diolah)

2.1.3.3.1 Perdagangan

1. Ekspor bersih perdagangan

Ekspor perdagangan meliputi 5 komoditi yaitu lada, nikel, kakao, rumput laut dan CPO. Ekspor bersih perdagangan mengalami kenaikan dari tahun 2016 – tahun 2020. Ekspor bersih perdagangan tahun 2016 mencapai US\$ 468.926.145,86 dan tahun 2020 mencapai US\$ 773.511.973,67.

Tabel 2.283 Ekspor bersih perdagangan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	468.926.145,86	475.387.123,47	658.612.319,17	660.572.391,96	773.511.973,67.

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal merupakan pedagang/usaha informal yang dalam hal pengurusan izin usaha. Tahun 2018, realisasi cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal mengalami penurunan sebesar 75,41%. Penurunan target yang signifikan disebabkan



diberlakukannya aturan (1) Menteri perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 yang menerangkan bahwa penghapusan kewajiban pendaftaran ulang surat izin usaha perdagangan dan berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha, (2) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang pencabutan peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang retribusi izin gangguan.

Tabel 2.284 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	pedagang	2.610	2.650	585	763	1.190
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	pedagang	4.000	4.684	4.203	4.203	4.100
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	65,25	56,57	13,91	18,20	29,02

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.3.1 Perindustrian

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Tabel 2.285 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	IKM	98	98	112	74	81
2	Jumlah kelompok pengrajin	IKM	1778	1778	1778	1150	1150
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	5,51	5,51	6,34	6,47	7,04

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020



2.1.3.3.1 Transmigrasi

1. Persentase Transmigran Swakarsa

Tabel 2.286 Persentase Transmigran Swakarsa Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah transmigran swakarsa	KK	0	0	0	0	0
2	Jumlah transmigrasi	KK	1.190	1.190	1.230	1.255	1.255
3	Persentase transmigran swakarsa	%	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

1. Produksi perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target daerah dimana jumlah produksi ikan merupakan cakupan semua hasil penangkapan dan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan termasuk juga kegiatan pembenihan ikan.

Tabel 2.287 Produksi perikanan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan	Ton	315,356	317,680	319,739	320,368	325.355,71

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

2	Jumlah target daerah	Ton	315,404	317,453	318,422	319,394	320,411
3	Produksi perikanan	%	99.98	100	100	100	101

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur secara umum sangat besar dan menjanjikan. Ketersediaan lahan yang luas dan layak menunjang peningkatan produksi serta peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga memudahkan dalam pemasaran hasil-hasil perikanan dan kelautan, tidak mengherankan jika produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur relatif cukup besar dan menjanjikan. Potensi perikanan di Kabupaten Luwu Timur cukup besar karena Luwu Timur terletak di pesisir Teluk Bone sehingga tidak mengherankan jika produksi perikanan di Kabupaten ini relatif cukup besar.

2. Konsumsi ikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding target daerah. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2016 mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat Kab Luwu Timur memiliki masyarakat yang cukup tinggi dalam konsumsi ikan Hal ini mengGrafikkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga mengGrafikkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sumber Pangan dari Laut dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan. Berikut tabel data capaian konsumsi ikan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.288 Konsumsi ikan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kosumsi ikan	Kg	43.86	44.19	44.76	44.99	45.42
2	Jumlah target daerah	Kg	43,23	44,09	44,53	44,96	45,39



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

3	Konsumsi ikan	%	101	100	100	100	100
---	---------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Cakupan bina kelompok nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dibandingkan jumlah kelompok nelayan di daerah. Berikut data cakupan bina kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.289 Cakupan bina kelompok nelayan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan	Kelompok	7	11	25	11	17
2	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	122	125	128	130	134
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	5.73	8,80	19.53	8.46	12.68

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan verifikasi dan identifikasi data kelompok nelayan bahwa jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan dan masih banyak kelompok yang belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan pendampingan dari penyuluh perikanan untuk peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok secara optimal. Keberadaan penyuluh saat ini yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) sehingga perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas kegiatan dalam pembinaan kelompok nelayan. Untuk keberhasilan indikator ini maka didukung oleh program Hilirisasi Perikanan dan Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Nelayan, Koordinasi pengelolaan perikanan tangkap, Identifikasi Dan Monitoring Penerapan LogBook Kapal Perikanan dan Data Keragaan Kapal Perikanan.



4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dibandingkan jumlah produksi ikan di daerah. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah Kab. Luwu Timur telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.290 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	8.702	8.753	9.993	9.995	10.012,71
2	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	21,386	23,269	24,850	21,300.5	26.643,71
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	40.69	37.61	40.21	46.92	37.58

: Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut.

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen perencanaan RPJPD Kab. Luwu Timur telah tersedia yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan



Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur 2005 -2025.

Tabel 2.291 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA)	Ada/Tidak	Ada	-	-	-	-

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur telah tersedia. RPJMD Kab. Luwu Timur telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016 -2021.

Tabel 2.292 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	-	Ada	-	-

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Tabel 2.293 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tabel 2.294 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Dokumen Perencanaan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	-	-	-	-	-

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Tabel 2.295 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2019

NO.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program	325	425	466	467	466
2.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan	Program	366	434	472	479	479
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	88,80	97,93	98,73	97,49	97,29

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur, 2020

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Tabel 2.296 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah program APBD tahun berkenaan	Program	307	402	445	435	435
2.	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program	325	425	466	467	466
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	94,46	94,59	95,49	93,15	93,34

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur, 2020

2.1.3.4.2 Keuangan

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal dimana telah diterapkan oleh Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek – aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan serta sinergitas dalam tahap penyusunan dan penetapan laporan keuangan. Data Opini BPK Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 2.297 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2. Persentase SILPA

Tabel 2.298 Persentase SILPA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total SILPA	Rp.	116.897.939.276	156.064.014.355	104.962.745.580,05	47.504.000.000	
2	Total APBD	Rp	1.553.764.811.738	1.544.366.403.790	1.591.059.131.709,95	1.609.008.544.799,42	1.489.289.489.113,78
3	Persentase SILPA	%	7,52	10,11	6,60	2,95	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Tabel 2.299 Persentase Belanja Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Rp	330.917.120.315,70	284.673.024.086	310.555.245.732	312.312.308.825,11	313.785.939.955,00
2	Total APBD	Rp	1.553.764.811.738	1.544.366.403.790	1.591.059.131.709,95	1.609.008.544.799,42	1.489.289.489.113,78
3	Persentase belanja pendidikan	%	21,30	18,43	19,52	19,41	21,14

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Belanja kesehatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kab. Luwu Timur sudah memenuhi amanat undang undang yaitu sebesar 10 persen dari APBD. Persentase belanja kesehatan di Kab. Luwu Timur selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.300 Persentase Belanja Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan kesehatan	Rp	220.594.628.237,65	255.380.571.440,24	325.136.710.388,94	314.815.234.479,98	350.546.382.276,34
2	Total APBD	Rp	1.553.764.811.738	1.544.366.403.790	1.591.059.131.709,95	1.609.008.544.799,42	1.489.289.489.113,78
3	Persentase belanja kesehatan	%	14,20	16,54	20,44	19,57	23,62

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Tabel 2.301 Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja langsung	Rp	970.118.456.935	925.930.102.982	964.189.144.168,04	920.441.419.625,16	769.584.321.679,35
2	Belanja tidak langsung	Rp	583.646.354.803	618.436.300.808	626.869.987.541,91	688.567.125.174,26	719.705.167.434,43
3	Total APBD	Rp	1.553.764.811.738	1.544.366.403.790	1.591.059.131.709,95	1.609.008.544.799,42	1.489.289.489.113,78
4	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	62,44 : 37,56	59,96 : 40,04	60,60 : 39,40	57,21 : 42,79	56,28 : 43,72

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Penetapan APBD

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun dalam regulasi terbaru yakni PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Berdasarkan capaian 5 tahun terakhir, terlihat bahwa dalam penetapan APBD Pemerintah Kab. Luwu Timur tahun 2016 sampai dengan 2020, telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni rata-rata ditetapkan di bulan Desember tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan adanya Kordinasi dan Sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam setiap tahapan penyusunan hingga penetapan APBD Kab. Luwu Timur, serta Kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Kab. Luwu Timur sehingga APBD dapat ditetapkan tepat waktu yakni sebelum sebelum tanggal 31 Desember, Hal ini sudah menjadi komitmen bersama antara pihak eksekutif (Kepala Daerah



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

beserta jajarannya) serta DPRD Kab. Luwu Timur yang akan dipertahankan terus di tahun-tahun mendatang. Data penetapan APBD sebagai berikut :

Tabel 2.302 Penetapan APBD Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu (Perda Nomor 7 Tahun 2016, tentang perubahan APBD Tanggal 25 Oktober 2016)	Tepat Waktu (Perda Nomor 6 Tahun 2017, tentang perubahan APBD Tanggal 23 Desember 2017)	Tepat Waktu (Perda Nomor 10 Tahun 2018, tentang perubahan APBD Tanggal 15 oktober 2018)	Tepat Waktu (Perda Nomor 3 Tahun 2019, tentang perubahan APBD Tanggal 11 Oktober 2019)	Tepat Waktu (Perda Nomor 9 Tahun 2020, tentang perubahan APBD Tanggal 19 Oktober 2020)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.4.3 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1. Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan

Tabel 2.303 Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	5	5	5	5	4

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal.

Tabel 2.304 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN Yang Mengikuti pendidikan danpelatihan formal	Orang	603	1.477	2.249	2.960	3.211



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

2	JumlahTotal ASN	Orang	4.003	3.906	3.854	3.992	3.877
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	15,06	37,81	58,35	74,15	82,61

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Struktural

Tabel 2.305 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Struktural Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pejabat ASN Yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Orang	287	319	401	463	465
2	Jumlah Total Pejabat	Orang	512	497	510	550	528
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan struktural	%	56,05	64,19	80,02	84,18	88,07

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah dalam hal ini instansi daerah yaitu perangkat daerah Kab. Luwu Timur yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan Daerah, dan Lembaga teknis daerah. JPT di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas JPT madya, dan JPT pratama.

Tabel 2.306 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	26	23	27	30	27

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah



Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri atas :

- a. Jabatan administrator; dimana pejabatnya bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, atau disebut juga pejabat eselon III.
- b. Jabatan pengawas; dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, atau disebut juga pejabat eselon IV.
- c. Jabatan pelaksana; dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2.307 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	1076	755	665	802	787

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas :

- a. Jabatan fungsional keahlian; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama.
- b. Jabatan fungsional keterampilan: penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Tabel 2.308 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun
----	-----------	--------	-------

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	2415	2654	2679	2640	2572

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.309 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelitbangan yang di tindaklanjuti	Buah	N/A	N/A	N/A	N/A	2
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	Buah	N/A	N/A	N/A	N/A	12
3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	16,67

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Persentase Perangkat Daerah Yang Di Fasilitas Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Tabel 2.310 Persentase Perangkat Daerah Yang Di Fasilitas Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang di fasilitas	OPD	N/A	N/A	N/A	N/A	9
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	N/A	N/A	N/A	N/A	39
3	Persentase perangkat daerah yang di fasilitas dalam penerapan inovasi daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	23,08

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020



2.1.3.4.5 Pengawasan

1. Persentase Tindaklanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Terkait dengan adanya temuan hasil pemeriksaan dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang disebabkan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing perangkat daerah dalam memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pegawai pengelola keuangan. Angka peningkatan capaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan antara lain adanya respon dan koordinasi aktif dari perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan dan peran aktif Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan laporan keuangan dan aset.

Tabel 2.311 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	Temuan	376	284	366	383	44
2	Jumlah total temuan	Temuan	451	316	455	521	190
3	Persentase tindak lanjut temuan	%	83,37	89,87	80,44	73,51	23,16

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Tabel 2.312 Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	0	0	0	0	0
2	Jumlah total ASN	Orang	4.003	3.906	3.854	3.992	3.877
3	Persentase	%	0	0	0	0	0

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

	pelanggaran pegawai						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Jumlah Temuan BPK

Tabel 2.313 Jumlah Temuan BPK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan BPK	Temuan	9	7	6	23	8

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.3.4.6 **Sekretariat Dewan**

Kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan sampai saat ini telah menunjukkan adanya sinergitas antara program kerja pemerintah daerah dan DPRD yang diindikasikan dengan ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota
- 2.

Tabel 2.314 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Tersusun Dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi



Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP)

Tabel 2.315 Tersusun Dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusun dan terintegrasinya program program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2020

4. Terintegrasi Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Tabel 2.316 Terintegrasi Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2020



2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Tabel 2.317 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2020

No	Kelompok Makanan			
		2018	2019	2020
1	Padi-padian	75120	71073	78302
2	Umbi-umbian	5571	4305	4946
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	57916	59081	61130
4	Daging	13679	17237	22960
5	Telur dan Susu	34302	32557	36218
6	Sayur-sayuran	29659	30070	33293
7	Kacang-kacangan	8329	7947	9077
8	buah-buahan	29438	52146	41223
9	Minyak dan Kelapa	11294	10721	11522
10	Bahan minuman	18977	15770	19515
11	Bumbu-bumbuan	11322	11247	11423
12	konsumsi lainnya	10451	9700	9510
13	Makanan dan minuman jadi	131541	149819	132090
14	Rokok	74471	80383	73199
Total		512070	471673	471209

Sumber: BPS Luwu Timur Dalam Angka 2019,2020 dan 2021

2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan).

Tabel 2.318 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018- 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Kelompok Makanan			
		2018	2019	2020
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	259821	285199	312676
2	Aneka komoditas dan jasa	96361	130518	144749
3	pakaian, alas kaki dan tutup kepala	31921	42827	43357
4	Komoditas tahan lama	104373	114233	119061
5	pajak, pungutan dan asuransi	44537	59684	95941
6	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	22617	11394	25743
Total		559630	643855	741527

Sumber: BPS Luwu Timur Dalam Angka 2019, 2020 dan 2021

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Tabel 2.319 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	Km	1889,273	1889,273	1889,273	1889,273	1889,273
2	Jumlah Kendaraan	Unit	2423	2442	2576	2650	2807
3	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	%	77,97	77,37	73,34	71,29	67,31

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.320 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang	Orang	259.867	273.615	300.227	376.958	290.241
2.	Jumlah Barang	Ton	300.227	376.958	290.241	290.241	253.796

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun



Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kab. Luwu Timur, jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal setiap tahunnya meningkat, selengkapnya pada tabel berikut.



**Tabel 2.321 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020**

NO	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Orang	Brng								
1.	Dermaga	131000	47237	143129	48118	135425	39753	76733	26600	37782	13001
2.	Bandara	16712	182902	17060	161174	23712	161174	22934	28182	6018	84923
3.	Terminal	112155	20387	113426	21458	141090	21458	277291	55459	209996	41099
4	Jumlah	249867	250526	273615	230750	300227	222385	376958	290241	253796	139023

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Angka kriminalitas

Tabel 2.322 Angka Kriminalitas Tahun 2015-2019 Kabupaten Luwu Timur

No	Jenis Kriminal	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus Narkoba	15	24	6	3	4
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	2	1	3	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	20	20	12	6	6
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	217	229	59	117	56
5.	Jumlah kasus Pencurian	116	192	105	127	53
6.	Jumlah kasus Penipuan	18	50	13	0	0
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	1	1	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	386	518	197	256	119
9.	Jumlah Penduduk	280.689	283.609	295.904	299.975	300.078
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,13	0,18	0,06	0,08	0,03

Sumber : Polres Luwu Timur, 2019



b. Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.323 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Demonstrasi Politik	2	1	7
2	Demonstrasi Ekonomi	22	20	14
3	Demonstrasi Mogok Kerja	9	8	7

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Luwu Timur 2021

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Luwu Timur diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 2.324 Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Di Kabupaten Luwu Timur 2018-2020

No	Tingkat Pendidikan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Maksimum SD	55,579	47,052	
2	SLTP	29,327	21,428	
3	SLTA Umum	32,721	33,198	
4	SLTA Kejuruan	9,469	12,732	
5	Diploma	4,131	5,015	
6	Universitas	12,783	17,811	
Jumlah		150,700	143,676	157,509

Tabel 2.325 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Angka Beban Ketergantungan, dan Kelompok Umur di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 14 tahun	86,149.00	85,330	86,960	85,815	86,518
65+	12,718	13,190	14,379	14,861	14,794
15 - 64 tahun	195,111	197,384	198,636	199,698	200,727
Jumlah penduduk Usia tidak Produktif	98,867	98,520	101,339	100,676	101,312
Rasio Ketrgantungan	50.67	49.91	51.02	50.41	50.47

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Selanjutnya guna memberikan gambaran capaian kinerja RKPD tahun sebelumnya dilakukan evaluasi mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian Kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Pengusulan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 harus mencerminkan kinerja yang terukur terhadap pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah dan berbasais sistem informasi. Adapun Indikasi Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 berdasarkan IKU RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2. 326 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Capaian Kinerja tahun 2020	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Berbasis Sumber Daya dan Didukung Oleh Stabilitas Keamanan Wilayah dan Nilai Nilai Budaya. (M1)						
M1.T1	Meningkatkan produksi sektor-sektor perekonomian, kualitas kesejahteraan sosial, dan apresiasi kebudayaan daerah (T1)	Laju pertumbuhan ekonomi (Tanpa Tambang)	%	8,62	1,25	Distan, DKP2, Disdagkopukm, Distransakerin Disparbudmudora
M1.T1.S1	Meningkatnya produksi bidang-bidang usaha perekonomian (S1)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	%	8,62	1,25	Distan, DKP2, Disdagkopukm, Distransakerin Disparbudmudora
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9,29	7,23	Disdagkopukm
		Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	23	42,20	Dinas Pertanian
		Persentase Koperasi Aktif	%	85	75,75	Disdagkopukm
		Indeks Gini	Nilai	0,40-0,30	0,387 (2019) data bps 2020	Bapelitbangda
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	2,25	4,46	Distransakerin
M1.T1.S2	Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat (S2)	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	%	92,91	93,15	Dinas Sosial P3A
		PDRB Perkapita (juta Rp)	Juta Rp	114,74	70,49**	Semua SKPD
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	105,41	-	Dinas Pertanian
M1.T1.S3	Meningkatnya apresiasi nilai-nilai budaya yang mendukung perekonomian serta ketahanan budaya (S3)	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya pada tahun-n	Event	1	0	Disparbudmudora
		Jumlah Pengunjung Festival Seni Budaya	Orang	3.162	0	Disparbudmudora
M1.T1.S4	Terpeliharanya keamanan wilayah dan ketertiban umum (S4)	Persentase penegakan PERDA (%)	%	100%	84,61	Dinas Satpol PP dan Damkar
Misi 2 : Mendorong peningkatan investasi daerah (M2)						
M2.T3	Mewujudkan iklim investasi yang menarik bagi PMDN dan PMA (T3)	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN pada tahun-n	%	20	173,35	
M2.T3.S5	Meningkatnya realisasi investasi daerah (S5)	Jumlah investor PMDN	Investor	136	21	Dinas PM dan PTSP
		Nilai investasi PMDN	Juta Rp	1.034.312	1.636.201	Dinas PM dan PTSP
		Jumlah investor PMA	Investor	7	5	Dinas PM dan PTSP
		Nilai Investasi PMA	USD Ribu	146.408	166.860	Dinas PM dan PTSP
Misi 3 Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup (M3)						
M3.T4	Mengakselerasi kemajuan kawasan strategis daerah dan	Ketaatan terhadap RTRW	%	85	9,26	

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Target Capaian Kinerja tahun 2020	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
	pengendalian pemanfaatan ruang (T4)					
M3.T4.S6	Terkendalikannya pemanfaatan ruang dalam mendukung perkembangan kawasan strategis (S6)	Jumlah/luas kawasan strategis dan Kawasan cepat tumbuh yang berkembang	Kawasan	14	-	Dinas PU PR
		Ketaatan terhadap RTRW	%	85%	9,26	Dinas PU PR
M3.T5	Memelihara kelestarian lingkungan hidup, sumberdaya alam dan penanganan perubahan iklim (T5)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	%	73,00	86,87	
M3.T5.S7	Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati (S7)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)(%)	%	73,00	86,87	Dinas Lingkungan Hidup
Misi 4 Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi (M4)						
M4.T6	Meningkatkan kualitas manusia khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan (T6)	IPM	%	72,55	73,22	Bapelitbangda dan seluruh SKPD
M4.T6.S8	Meningkatnya derajat pendidikan dan derajat kesehatan (S8)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,9	8,80	Dinas Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,8	12,83	Dinas Pendidikan
		Angka Melek Huruf	%	94,82	95,30	Dinas Pendidikan
		Angka Harapan Hidup	Tahun	70,07	70,53	Dinas Kesehatan
Misi 5 Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah (M5)						
M5.T7	Menguatkan dukungan infrastruktur wilayah bagi interkoneksi dan pergerakan antar wilayah (T7)	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	%	40	40,80	
M5.T7.S9	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan dalam menghubungkan wilayah serta akses distribusi produk utama (S9)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	1.616,37	770.896	Dinas PU PR
M5.T7.S10	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perhubungan dalam pergerakan	Jumlah pengguna terminal, pelabuhan dan bandara (orang)	Orang	170.454	253.796	Dinas Perhubungan

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Target Capaian Kinerja tahun 2020	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
	manusia dan barang (S10)					
M5.T8	Menguatkan dukungan infrastruktur perumahan/permukiman dan sumberdaya air (T8)	Rasio rumah layak huni (%)	%	85,30	86,65	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
M5.T8.S11	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur sumberdaya air (S11)	Persentase rumah tangga (RT) berakses air bersih (%)	%	84,22	53,70	Dinas PU PR
M5.T8.S12	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman (S12)	Rasio rumah layak huni (%)	%	85,30	17,54	Dinas Perkimtan
		Rasio pemukiman layak huni (%)	%	87,59	75,74	Dinas Perkimtan
		Persentase rumah berakses listrik (%)	%	87,84	91,81	Dinas Perkimtan
Misi 6 Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik (M6)						
M6.T9	Menguatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik (T9)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	CC	B	
M6.T9.S13	Meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (S13)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP (2019)	BPKD beserta seluruh SKPD
		Nilai Laporan EKPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	CC	B	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	56,70	30,33 (2019)	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
M6.T9.S14	Meningkatnya kinerja pelayanan publik (S14)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik (IKM)	Nilai	Sangat baik	Sangat baik	Bapelitbangda beserta seluruh SKPD
Misi 7 Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama (M7)						
M7.T10	Mengkondisikan kehidupan religius dan berbudi pekerti serta daya rekat sosial dalam kemajemukan (T10)	Jumlah insiden terkait hubungan antar umat beragama	Kasus	0	0	
M7.T10.S15	Mengkondisikan kehidupan religius dan berbudi pekerti serta daya rekat sosial dalam kemajemukan (S15)	Cakupan pengelola rumah ibadah dan pendidikan agama yang mendapatkan bantuan/insentif	%	80	94,63	Sekretariat Daerah Bagian Kesra



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

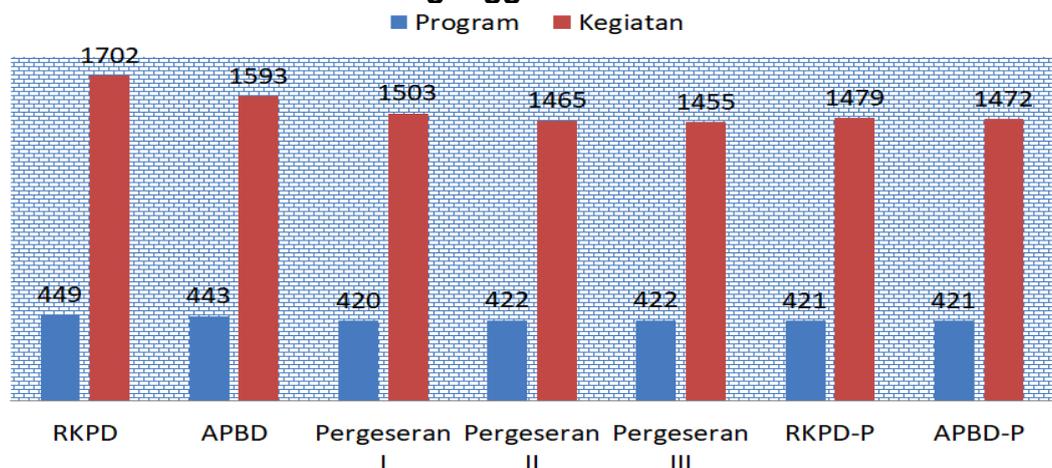
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Capaian Kinerja tahun 2020	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah insiden terkait hubungan antar umat beragama	Kasus	0	0	Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Satpol PP dan Damkar
Misi 8 Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah (M8)						
M8.T11	Mengembangkan sistem kerjasama multipihak dalam mendorong inovasi dan akselerasi pembangunan daerah (T11)	Jumlah inovasi daerah yang diterapkan pada tahun-n	Inovasi	1	1	
M8.T11.S16	Berkembangnya kerjasama daerah dengan berbagai pihak (S16)	Jumlah dokumen kerjasama dengan pihak yang terealisasi	MoU	2	2	Bapeitbangda dan Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
M8.T11.S16	Berkembangnya sistem inovasi daerah (S17)	Jumlah inovasi daerah yang diterapkan pada tahun-n	Inovasi	1	1	Bapelitbangda

Sumber: Laporan hasil evaluasi Rkpd Kab.Luwu Timur 2020

2.2.1 Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD

Secara umum dapat digambarkan proses perubahan terhadap program dan kegiatan serta alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran dari seluruh tahapan proses perencanaan dan penganggaran dengan beberapa kali melakukan *refocusing* anggaran seperti pada grafik dan tabel berikut.

Grafik 2. 18 Perubahan Jumlah Program dan Kegiatan Pada Tahapan Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Tahun 2020



2.2.2 Konsistensi Anggaran RKPD

Jumlah anggaran pendapatan yang direncanakan pada Perubahan APBD 2020 mengalami penurunan sebesar Rp49,836,768,908.87 setara 3.28% dari nilai pendapatan yang ditargetkan pada APBD Pokok sebesar Rp1,519,918,715,988.00. Adapun yang memengaruhi penurunan pendapatan ini, yakni: 1) Pendapatan Asli Daerah berkurang sebesar Rp11,358,437,011.87 setara -3,79% 2) Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp66,379,788,896.00 setara -7,72%.

Menurunnya anggaran pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Retribusi Daerah yang turun sebesar Rp2,293,571,525.00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun sebesar Rp1,664,788,000.00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah turun sebesar Rp11,190,077,486.87. sedangkan yang memengaruhi menurunnya pendapatan pada sektor Dana Perimbangan, yakni: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus turun masing-masing sebesar Rp62,842,138,000.00 (10,92%) dan Rp34,562,485,323.00 (18,43%).

Untuk anggaran belanja daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp85,794,285,127.18 (5,46%) dari rencana belanja daerah yang ditetapkan pada APBD Pokok 2020. Belanja Tidak Langsung turun sebesar Rp28,888,464,404.98 (3,86%) sedangkan Belanja Langsung turun sebesar Rp56,905,820,722.20 (6,93%). Hal ini dilakukan sebagai upaya penanganan pandemic Covid-19 di Kabupaten Luwu Timur. Refocusing bertujuan untuk memaksimalkan anggaran pada Perangkat Daerah yang disertai tugas melindungi masyarakat dimasa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) serta mengamankan daya beli masyarakat/pemulihan ekonomi daerah. Menurunnya anggaran pada Belanja Tidak Langsung, dipengaruhi oleh Belanja Pegawai yang turun signifikan sebesar Rp34,109,222,543.60 (7,56%) sedangkan menurunnya anggaran Belanja Langsung dipengaruhi akibat turunnya Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9,225,897,430.00 (1,77%) dan Belanja Modal turun sebesar Rp48,749,251,292.20 (16,28%). Pembiayaan daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp38,957,516,218.31 (59,79%).

Pada tahun anggaran 2020 mengalami 4 (empat) kali pergeseran, yakni:



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

1. Pergeseran I dilakukan pada tanggal 6 April 2020 melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
2. Pergeseran II dilakukan pada tanggal 23 April 2020 melalui melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
3. Pergeseran III dilakukan pada tanggal 10 Juli 2020 melalui melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
4. Pergeseran IV dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020 melalui melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Kelima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Untuk mengetahui keselarasan anggaran pada dokumen perencanaan dan penganggaran (pendapatan, belanja dan pembiayaan) pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 327 Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah TA. 2020

No	Uraian	Jumlah Anggaran Pendapatan	Jumlah Anggaran Belanja		Jumlah Anggaran Pembiayaan	Total Anggaran
			Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung		
1	APBD	1,519,918,715,988.00	748,593,631,839.41	821,484,440,220.55	50,159,356,071.96	1,570,078,072,059.96
2	PERGESERAN I	1,519,918,715,988.00	749,212,929,493.41	820,865,142,566.55	50,159,356,071.96	1,570,078,072,059.96
3	PERGESERAN II	1,274,026,817,087.71	740,006,475,759.00	548,222,181,182.36	14,201,839,853.65	1,288,228,656,941.36
4	PERGESERAN III	1,313,457,912,087.71	740,006,475,759.00	587,653,276,182.36	14,201,839,853.65	1,327,659,751,941.36
5	PERUBAHAN APBD	1,470,081,947,079.13	719,705,167,434.43	764,578,619,498.35	14,201,839,853.65	1,484,283,786,932.78
6	PERGESERAN IV	1,475,087,649,260.13	719,705,167,434.43	769,584,321,679.35	14,201,839,853.65	1,489,289,489,113.78

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)



2.2.3 Evaluasi Hasil Capaian RKPD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

pelaksanaan program dan kegiatan renja perangkat daerah tahun 2020 selanjutnya dilakukan Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi

anggaran tersebut maka digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 328 Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja 1 Tahun
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90%
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan keuangan kegiatan pada Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020, maka untuk tingkat capaian kinerja RKPD diperoleh nilai **94,62%**, sedangkan untuk realisasi anggaran nilainya mencapai **96,49%**. Apabila menggunakan kategori interval 1 tahun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 termasuk dalam kategori “**Sangat Tinggi**”, dan hasil realisasi anggaran termasuk pada kategori “**Sangat Tinggi**”. Namun demikian, rendahnya realisasi anggaran dan capaian kinerja tersebut disebabkan beberapa faktor, sehingga diperlukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dalam rangka percepatan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan OPD agar tidak menimbulkan SILPA dalam jumlah yang besar Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing Perangkat Daerah terlihat pada tabel 2.329 berikut :



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2. 329 Pengukuran Capaian Anggaran Dan Kinerja Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	SKPD	Rencana Belanja			Realisasi Belanja			%	Kategori	Sisa Anggaran		Capaian Kinerja	
		Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total (Rp)			Rp	%	%	Kategori
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	$9=8/5*100$	10	11=5-8	$12=11/5*100$	13	14
1	Dinas Pendidikan	179,423,194,137.00	134,362,745,818.00	313,785,939,955.00	176,624,923,407.00	140,803,769,989.00	317,428,693,396.00	101.16	ST	(3,642,753,441.00)	-1.16	99.77	ST
2	Dinas Kesehatan	68,570,574,905.00	160,828,081,399.34	229,398,656,304.34	68,083,781,770.00	145,076,270,263.22	213,160,052,033.22	92.92	ST	16,238,604,271.12	7.08	92.51	ST
3	RSUD I La Galigo	22,806,911,059.00	104,103,017,094.00	126,909,928,153.00	22,268,627,393.00	103,259,380,459.00	125,528,007,852.00	98.91	ST	1,381,920,301.00	1.09	84.09	T
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7,869,002,098.00	173,605,463,841.51	181,474,465,939.51	7,433,970,888.00	160,166,542,374.97	167,600,513,262.97	92.35	ST	13,873,952,676.54	7.65	90.68	ST
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2,564,262,285.00	22,697,638,052.00	25,261,900,337.00	2,293,944,722.00	21,735,239,858.34	24,029,184,580.34	95.12	ST	1,232,715,756.66	4.88	96.99	ST
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3,835,117,550.00	11,725,837,850.00	15,560,955,400.00	3,812,808,210.00	11,504,701,035.00	15,317,509,245.00	98.44	ST	243,446,155.00	1.56	99.18	ST
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,846,197,115.00	2,633,435,440.00	4,479,632,555.00	1,727,824,524.00	2,468,540,654.33	4,196,365,178.33	93.68	ST	283,267,376.67	6.32	99.07	ST
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	825,055,378.00	1,237,567,279.00	2,062,622,657.00	824,118,711.00	1,215,874,042.00	2,039,992,753.00	98.90	ST	22,629,904.00	1.10	97.67	ST
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,209,474,002.00	4,952,637,750.00	7,162,111,752.00	2,159,428,709.00	4,884,635,305.00	7,044,064,014.00	98.35	ST	118,047,738.00	1.65	99.31	ST
10	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	2,828,302,608.00	2,523,919,500.00	5,352,222,108.00	2,593,402,368.00	2,456,909,390.00	5,050,311,758.00	94.36	ST	301,910,350.00	5.64	97.17	ST
11	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	3,065,127,300.00	8,180,281,225.00	11,245,408,525.00	2,765,173,788.00	7,745,368,970.39	10,510,542,758.39	93.47	ST	734,865,766.61	6.53	98.37	ST
12	Dinas Lingkungan Hidup	2,504,836,500.00	5,113,381,180.00	7,618,217,680.00	2,487,645,187.00	5,006,530,284.00	7,494,175,471.00	98.37	ST	124,042,209.00	1.63	99.10	ST
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,096,736,100.00	2,581,810,041.00	4,678,546,141.00	2,053,795,107.00	2,511,362,129.00	4,565,157,236.00	97.58	ST	113,388,905.00	2.42	98.94	ST
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,982,107,879.00	2,767,153,400.00	4,749,261,279.00	1,953,685,565.00	2,566,485,114.00	4,520,170,679.00	95.18	ST	229,090,600.00	4.82	94.39	ST
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,837,289,749.00	7,236,543,850.00	9,073,833,599.00	1,789,912,166.00	6,488,294,029.00	8,278,206,195.00	91.23	ST	795,627,404.00	8.77	99.90	ST
16	Dinas Perhubungan	2,445,697,000.00	4,669,504,772.00	7,115,201,772.00	2,287,693,867.00	4,618,359,131.14	6,906,052,998.14	97.06	ST	209,148,773.86	2.94	94.41	ST
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,902,857,027.80	5,197,444,438.00	7,100,301,465.80	1,877,307,550.00	4,953,837,810.00	6,831,145,360.00	96.21	ST	269,156,105.00	3.79	97.00	ST

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

No	SKPD	Rencana Belanja			Realiasi Belanja			%	Kategori	Sisa Anggaran		Capaian Kinerja	
		Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total (Rp)			Rp	%	%	Kategori
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	$9=8/5*100$	10	11=5-8	$12=11/5*100$	13	14
7										.80		35	
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2,351,933,065.00	3,967,487,742.50	6,319,420,807.50	2,291,516,596.00	3,899,540,710.40	6,191,057,306.40	97.97	ST	128,363,501.10	2.03	65.66	S
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,074,960,175.00	1,656,923,275.00	3,731,883,450.00	1,868,608,264.00	1,495,481,468.00	3,364,089,732.00	90.14	ST	367,793,718.00	9.86	91.48	ST
20	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	3,072,980,639.00	16,068,926,576.00	19,141,907,215.00	2,550,946,594.00	14,653,981,150.82	17,204,927,744.82	89.88	T	1,936,979,470.18	10.12	94.69	ST
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,100,938,224.97	1,183,334,800.00	3,284,273,024.97	2,003,850,067.00	1,163,210,027.00	3,167,060,094.00	96.43	ST	117,212,930.97	3.57	99.95	ST
22	Dinas Pertanian	19,056,326,072.00	22,344,051,723.00	41,400,377,795.00	18,723,081,878.00	18,955,914,967.00	37,678,996,845.00	91.01	ST	3,721,380,950.00	8.99	98.29	ST
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,512,689,900.00	3,401,614,000.00	6,914,303,900.00	3,348,366,291.00	2,957,743,161.00	6,306,109,452.00	91.20	ST	608,194,448.00	8.80	91.99	ST
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	326,578,855,160.66	5,776,248,271.00	332,355,103,431.66	320,835,262,712.00	5,419,987,549.00	326,255,250,261.00	98.16	ST	6,099,853,170.66	1.84	99.53	ST
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,486,456,300.00	7,416,785,900.00	9,903,242,200.00	2,321,131,914.00	7,023,853,086.00	9,344,985,000.00	94.36	ST	558,257,200.00	5.64	85.93	T
26	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	767,758,112.00	-	767,758,112.00	677,321,850.00	-	677,321,850.00	88.22	T	90,436,262.00	11.78		
27	Sekretariat Daerah	8,482,676,268.00	21,960,783,623.00	30,443,459,891.00	7,553,819,735.00	19,453,894,918.40	27,007,714,653.40	88.71	T	3,435,745,237.60	11.29	92.38	ST
28	Sekretariat DPRD	14,651,434,175.00	16,228,555,798.00	30,879,989,973.00	13,870,912,099.00	15,620,714,281.00	29,491,626,380.00	95.50	ST	1,388,363,593.00	4.50	96.82	ST
29	Kecamatan Burau	2,049,561,830.00	730,904,688.00	2,780,466,518.00	1,990,740,033.00	715,448,685.00	2,706,188,718.00	97.33	ST	74,277,800.00	2.67	99.40	ST
30	Kecamatan Wotu	1,870,199,747.00	922,636,899.00	2,792,836,646.00	1,863,331,333.00	850,456,860.00	2,713,788,193.00	97.17	ST	79,048,453.00	2.83	95.53	ST
31	Kecamatan Tomoni	2,213,704,668.00	2,008,742,230.00	4,222,446,898.00	2,187,059,328.00	1,997,932,622.00	4,184,991,950.00	99.11	ST	37,454,948.00	0.89	98.92	ST
32	Kecamatan Mangkutana	1,862,416,710.00	584,287,900.00	2,446,704,610.00	1,780,843,477.00	577,358,720.00	2,358,202,197.00	96.38	ST	88,502,413.00	3.62	98.47	ST
33	Kecamatan Tomoni Timur	1,378,307,758.00	627,822,400.00	2,006,130,158.00	1,333,223,628.00	616,609,696.00	1,949,833,324.00	97.19	ST	56,296,834.00	2.81	96.95	ST
34	Kecamatan Kalaena	1,494,207,000.00	747,626,818.00	2,241,833,818.00	1,458,996,280.00	742,086,797.00	2,201,083,077.00	98.18	ST	40,750,741.00	1.82	99.97	ST
34	Kecamatan Angkona	1,724,294,250.00	513,017,380.00	2,237,311,630.00	1,700,951,150.00	508,213,592.00	2,209,164,742.00	98.74	ST	28,146,888.00	1.26	97.	ST

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	SKPD	Rencana Belanja			Realiasi Belanja			%	Kategori	Sisa Anggaran		Capaian Kinerja	
		Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total (Rp)			Rp	%	%	Kategori
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	$9=8/5*100$	10	11=5-8	$12=11/5*100$	13	14
5												43	
36	Kecamatan Malili	2,102,803,637.00	1,932,232,200.00	4,035,035,837.00	1,990,837,796.00	1,863,964,056.24	3,854,801,852.24	95.53	ST	180,233,984.76	4.47	67.16	S
37	Kecamatan Wasuponda	1,454,564,020.00	734,408,700.00	2,188,972,720.00	1,432,810,614.00	710,159,928.00	2,142,970,542.00	97.90	ST	46,002,178.00	2.10	100	ST
38	Kecamatan Towuti	2,109,413,800.00	1,140,731,500.00	3,250,145,300.00	2,011,397,585.00	1,096,891,783.00	3,108,289,368.00	95.64	ST	141,855,932.00	4.36	98.25	ST
39	Kecamatan Nuha	2,030,882,596.00	1,949,934,526.00	3,980,817,122.00	1,972,570,388.00	1,734,880,162.80	3,707,450,550.80	93.13	ST	273,366,571.20	6.87	89.45	T
40	Inspektorat	5,665,060,634.00	3,270,801,800.00	8,935,862,434.00	5,453,593,725.00	3,199,436,460.00	8,653,030,185.00	96.83	ST	282,832,249.00	3.17	93.07	ST
	JUMLAH	719,705,167,434.43	769,584,321,679.35	1,489,289,489,113.78	704,259,217,269.00	732,719,861,519.05	1,436,979,078,788.05	96.49	ST	52,310,410,325.73	3.51	94.62	ST

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi RKPD kab. Luwu Timur Tahun 2020

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Adapun Kendala utama atau permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja RKPD Tahun 2020 maupun realisasi keuangan sebagai berikut:

Tabel 2. 330 Permasalahan Kinerja dan Keuangan yang dihadapi Masing-masing Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
Dinas Pendidikan	
<ul style="list-style-type: none"> • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah: Realisasi kinerja yang melebihi 100% dikarenakan disesuaikan dengan jumlah orang yang pergi melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah • Kunjungan Kerja Dalam Daerah : Realisasi kinerja yang melebihi 100% dikarenakan disesuaikan dengan jumlah orang yang pergi melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah • Pembangunan sarana dan prasarana olahraga : Utang/retensi • Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah : Utang/retensi • Pelatihan kompetensi tenaga pendidik : Kegiatan pelatihan kompetensi tidak dilaksanakan karena pandemi covid 19, • Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal : Realisasi kinerja yang melebihi 100% dikarenakan penerima BOP Non formal disesuaikan dengan Jumlah peserta didik paket A, B dan C yang terdapat di dapodik • Pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit : Realisasi kinerja yang melebihi 100% dikarenakan disesuaikan dengan jumlah orang yang mengusulkan dan memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat • Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan : Pembayaran di triwulan 1 merupakan pembayaran beasiswa tahap 2 yang tidak dibayarkan pada 2019, dikarenakan realisasi yang melebihi target sehingga dialihkan ke tahun anggaran berikutnya <p>Terdapat sisa pembayaran sebanyak 710 orang yang belum dibayarkan dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Gaji dan Tunjangan : Penganggarnya melebihi target pegawai yang dibayarkan • Belanja Tambahan Penghasilan PNS : Penganggarnya melebihi target pegawai yang dibayarkan • Belanja Penghasilan Lainnya : Penganggarnya lebih rendah dibandingkan tunjangan sertifikasi yang dibayarkan • Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penggaran SKPD : terdapat SPJ yang telah di GU kan namun tidak diproses di keuangan • Pembangunan gedung sekolah : 1. Belanja pengadaan tanah/lahan untuk penambahan lokasi sekolah SDN 116 Mabasi Kec. Burau Rp 100.000.000 karena tidak terjadi kesepakatan harga dengan pemilik tanah <p>2. Untuk belanja pengadaan bangunan, terdapat sisa penawaran oleh rekanan dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 60.312.500</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana olahraga : <ol style="list-style-type: none"> 1. Utang/Retensi yang tidak diurus oleh rekanan 2. Beberapa rekanan yang melaksanakan kegiatan hilang kontak 3. Nama paket : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 2 Malili (utang perencanaan) b. Utang/retensi • Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah : 1. Utang/Retensi yang tidak diurus oleh rekanan 2. Beberapa rekanan yang melaksanakan kegiatan hilang kontak 3. Nama paket : a. Rehab rumah guru SDN 103 Lumbewe Kec. Burau b. Rehab rumah guru SDN 114 Batangnge Kec. Burau • Pelatihan kompetensi tenaga pendidik : Anggaran disediakan untuk belanja operasional persiapan kegiatan di triwulan 4, namun tidak dilaksanakan karena masih dalam pandemi covid 19.
Dinas Kesehatan	
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi : ada 3 indikator yang belum capai target yaitu: 1. Cakupan K4 (krn adanya pandemi sehingga kunjungan ibu hamil berkurang dan masih tingginya kasus abortus), 2. Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, 3. Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Jumlah ibu 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 560.000 , 2. Belanja Jasa Pelayanan Rp 149.027.732, 3. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp 12.000.000 , 4. Belanja Cetak Rp 900.000, 5. Belanja Sewa Hotel/Penginapan

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<p>bersalin yg memang kurang dibanding jumlah proyeksi sasaran)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja : ada 2 indikator yang belum capai target yaitu: 1. Cakupan kunjungan bayi (29hari - 11bulan) 2. Cakupan pelayanan kesehatan balita (12 - 59 bulan), karena adanya pandemi sehingga kunjungan bayi balita berkurang dan tidak adanya pelaksanaan posyandu • Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah : kegiatan skrining kesehatan tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19 & pemerintah menerapkan belajar dari rumah • Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah : ada 2 indikator yang belum capai target yaitu: Persentase anak sekolah dasar yang mendapat imunisasi lanjutan karena Beberapa sasaran tidak datang ke Posyandu dan Petugas tidak efektif melakukan DOFU efek Pandemi covid 19 (Pelayanan imunisasi kurang maksimal) dan Persentase anak sekolah dasar yang mendapat imunisasi BIAS karena beberapa sasaran tidak datang ke sekolah untuk divaksinasi, dengan alasan sakit, penolakan orang tua & sasaran berada di luar wilayah Luwu Timur (disebabkan anak sekolah masih belajar dari rumah). • Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 : melebihi target karena kasus covid-19 yang semakin bertambah • Pengendalian Penyakit Tidak Menular : ada 2 indikator yang belum capai target yaitu: Persentase penanganan penderita hipertensi dan Persentase penanganan penderita diabetes melitus. Karena selama masa pandemi covid 19 kunjungan ke puskesmas berkurang dan kegiatan luar gedung ditiadakan sehingga capaian skrining tidak tercapai.) • Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif : semua indikator belum capai target karena selama masa pandemi covid 19 kunjungan ke puskesmas berkurang dan kegiatan luar gedung ditiadakan sehingga capaian skrining tidak tercapai. • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan: indikator jumlah puskesmas yang re-akreditasi yang tidak capai target karena tidak terlaksananya survey akreditasi. Sdgn workshop pendukung akreditasi dan pendampingan akreditasi telah terlaksana di 17 puskesmas • Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan : Izin operasional untuk Rumah Sakit Awal Bros Sorowako belum dikeluarkan karena belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi izin operasional RS tipe C dan masih sementara proses • kemitraan asuransi kesehatan masyarakat : Adanya pengurangan kepesertaan segmen PBI yang dibiayai oleh APBD Lutim setelah dilaksanakan validasi data. Nik yang tidak valid dinonaktifkan kepesertaannya. Termasuk masyarakat yg sdh pindah, meninggal dan masy yg tidak melakukan perekaman ulang. • kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis : Banyak tenaga kontrak lulus CPNS dan Lulus pendidikan dokter ahli sehingga kontrak berhenti • Pengadaan puskesmas keliling: ada 3 unit ambulans (puskesmas keliling), 1 mobil PSC untuk di Dinkes, 1 mobil untuk PKM Angkona dan 1 mobil untuk PKM Bone Pute • Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas : Pustu Bone Pute menjadi Puskesmas Bone Pute 	<p>Rp 8.700.000 , 6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp 940.000, 7. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar rp. 152.50.000, 8. Belanja Makanan dan Minuman Pasien sebesar Rp. 40.155.000, 9. Belanja Makan dan Minum kegiatan sebesar Rp. 1.170.000, 10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 5.997.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar Rp. 1.500.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 4.925.000, 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 845.000 • Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 554.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 3.615.000 • Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah : kegiatan skrining kesehatan tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19 & pemerintah menerapkan belajar dari rumah • Pembinaan upaya kesehatan kerja : hanya satu belanja yang kurang terealisasi yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah • Pelayanan kesehatan olahraga : tidak ada satu pun belanja yang terealisasi • Pelayanan pemeliharaan kesehatan : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 2.420.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 1.505.000 • Penyemprotan/fogging sarang nyamuk : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) sebesar Rp. 1.200.000, 2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sebesar Rp. 17.487.325, 3. Belanja Jasa Upah Kerja sebesar Rp. 38.000.000, 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 16.512.025, 5. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.000.000. • Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp. 750.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 7.725.000, 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 2.190.000 • Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic : Belanja yan ada sisa: 1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar Rp. 1.500.000, 2. Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp. 900.000, 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 23.260.000, 4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 516.958. • Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)/Zoonosis : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp 1.200.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 20.164.550, 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 34.925.000. • Pengendalian Penyakit Tidak Menular : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Cetak sebesar Rp. 1.200.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 230.000, 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 2.405.000 • Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif : Belanja yang ada sisa: 1.

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu : Rehab Pustu Kasintuwu, Maliwowo, Landangi dan Bantilang • Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan : tidak dilakukan pengadaan langsung sehingga sebagian anggaran tidak terpakai • Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan : indikator Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar belum capai target, karena ada 1 pkm yang belum melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar yaitu pkm parumpanai • Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya : melebihi target karena adanya anggaran/ dana DAK untuk kegiatan pengawasan yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya. • Penyediaan jasa kebersihan kantor : ada penambahan tenaga kebersihan sebanyak 6 orang • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : setelah perubahan bertambah 96 Eksemplar, sehingga target juga bertambah menjadi 96 • Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah : Rapat koordinasi keluar daerah sangat selektif karena situasi Pandemi Covid-19 dan target berkurang menjadi 36 kali • Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis : Jumlah upah jasa bertambah 38 orang setelah perubahan, sehingga target juga bertambah menjadi 734 orang • Kunjungan kerja dalam daerah : Perjalanan dinas dibatasi dan selektif selama Pandemi Covid-19 • penyediaan makan minum : Krn peserta rapat dibatasi jumlahnya mengikuti prosedur protokol kesehatan & sebagian rapat dilaksanakan secara virtual • Pembangunan rumah dinas : Rumah dinas di PKM Lakawali dan PKM Parumpanai • Pembangunan gedung kantor : Landscape & rabat beton jalan instalasi gudang farmasi • Pengadaan kendaraan dinas/operasional : 2 motor untuk bidan desa (PKM Parumpanai & PKM Tomoni) & 3 motor trail (1 untuk bendahara barang dan 2 untuk PPK). 	<p>Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp. 2.580.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 9.570.000, 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 640.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan : Belanja yang ada sisa yaitu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 7.475.000 • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan: Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar Rp. 1.500.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 2.290.000 • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan: Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 300.000, 2. Belanja Jasa Upah Kerja sebesar Rp. 1.200.000, 3. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp. 61.400.000, 4. Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.000.000, 5. Belanja Sewa Hotel/Penginapan sebesar Rp. 12.370.000, 6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp. 26.680.000, 7. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar Rp. 1.500.000, 8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara sebesar Rp. 21.000.000, 9. Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp. 48.760.000, 10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 8.240.000, 11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 1.1460.000. Kegiatan survei Re Akreditasi tidak terlaksana karena adanya pandemi covid-19 sehingga puskesmas yang diusulkan tahun re akreditasi tahun 2020 di pending • Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan: Belanja yang ada sisa yaitu Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp. 350.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 280.000 • kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis : Belanja yang ada sisa yaitu Belanja Jasa Upah Kerja sebesar Rp. 228.500.000 • Pembangunan puskesmas pembantu : retensi • Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan: Belanja yang ada sisa yaitu Belanja Bahan Obat-Obatan sebesar Rp. 1.052.804.014 • Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp. 650.000, 2. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar Rp. 4.500.000, 3. Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp. 1.500.000, 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 33.466.650, 5. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 9.647.650 • Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Sewa Hotel/Penginapan sebesar Rp. 8.000.000, 2. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp. 83.058.000, 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 16.640.000, 4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 565.000, 5. Belanja Pengadaan Alat Kedokteran Umum sebesar Rp. 73.133.341, 6. Belanja Pengadaan Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp. 2.314.404, 7. Belanja Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat sebesar Rp. 80.286.849, 8. Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan sebesar Rp. 1.898.212.246, 9. Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Patologi sebesar Rp. 11.017.999,98 • Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Alat Tulis

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
	<p>Kantor sebesar Rp. 111.000, 2. Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp. 300.000, 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 580.000, 4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 16.305.542</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran Data Sumber Daya Manusia Kesehatan : Belanja yang ada sisa yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 5.065.000 • Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp. 480.000, 2. Belanja Paket/Pengiriman sebesar Rp. 250.000 dan belanja paket • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja air sebesar Rp. 224.4700, 2. Belanja listrik sebesar Rp. 14.144.699, belanja ini sifatnya disediakan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan • Penyediaan jasa kebersihan kantor : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih sebesar Rp 50.000, 2. Belanja Jasa Upah Kerja sebesar Rp. 58.000.000, (belanja upah tidak terealisasi karena SK upah jasa terlambat di terima sehingga tidak ada dasar untuk pembayaran) • Penyediaan Alat Tulis Kantor : Belanja alat tulis kantor sisa sebesar Rp. 7.786.013 • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja cetak sebesar Rp. 2.800.000, 2. Belanja penggandaan sebesar Rp. 2.810.800 • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) sisa sebesar Rp. 1.036.500. • Kunjungan kerja dalam daerah : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar Rp. 4.500.000, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 48.359.650 • penyediaan makan minum : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja makan minum tamu sebesar Rp. 2.170.000 , 2. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat sebesar Rp. 7.500.000 • Pengadaan kendaraan dinas/operasional : Belanja yang sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp. 19.640.000 (Sisa kontrak) • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Belanja yan ada sisa: 1. Belanja Jasa Service sebesar Rp. 10.150.000, 2. Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas sebesar Rp. 665.000, 3. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan sebesar Rp. 2.374.508 • Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja penggandaan sebesar Rp. 240.000, 2. Belanja makan minum kegiatan sebesar Rp. 1.500.000 • Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun : Belanja yang ada sisa: 1. Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 4.035.000, 2. Belanja makan minum kegiatan sebesar Rp. 1.530.000
RSUD I LAGALIGO	

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Jasa kebersihan pihak ke-3 mulai dilaksanakan mulai bulan maret 2020 karena proses pelaksanaan pihak ke-3 mulai dilaksanakan hingga penetapan penyediaanya butuh waktu, jadi sementara kegiatan kebersihan sudah berjalan sejak tanggal 1 januari sehingga utk antisipasinya dilaksanakan melalui anggaran BLUD selama 2 bulan pertama. • Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya : Jumlah tenaga upah jasa yang telah terbit SK nya adalah upah jasa yang lama (perpanjangan) = 396 orang. Penambahan 90 orang Target =386 Orang. Jumlah keseluruhan melebihi target karena kebutuhan SDM RS • Pemeliharaan & Pemulihan Pelayanan Kesehatan RS : 1. Capaian kinerja 89,45% (realisasi kinerja 19.735 shift petugas sedangkan target kinerja 22.211) hal ini disebabkan adanya pegawai diunit-unit pelayanan yang terinfeksi covid-19 sehingga ruangan/ petugas tidak memberikan pelayanan (Petugas isman) otomatis jumlah kebutuhan shift jaga berkurang. <p>2. Sedangkan pada jumlah pengantaran jenazah realisasi melampaui target yaitu 638 rujukan (110,8%) dari target 576 hal ini disebabkan angka kematian rumah sakit agak meningkat, tambahan ini adalah pasien luar daerah sebanyak 49 pasien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit : 1. Capaian kinerja kunjungan pasien HD 93,27% atau 1.840 kunjungan dengann target 1.978. Hal ini disebabkan ada kerusakan mesin HD sehingga pelayanan HD tidak optimal. <p>2. Jumlah pasien JKD terealisasi 61 pasien JKD dari target 60 pasien JKD, karena masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Transfusi Darah : Rumah sakit mengurangi kegiatan luar gedung dikarenakan adanya kasus Covid-19, dan lebih sering melaksanakan kegiatan didalam gedung • Peningkatan Kompetensi Tenaga kesehatan RS : Target kinerja belum tercapai 73%, hal ini disebabkan tenaga narasumber kegiatan tidak bersedia datang karena pandemi covid-19 belum berkurang kasusnya, direncanakan 3 kali kegiatan hanya terealisasi 2 kegiatan. • Bimbingan Teknis Workshop dan Seminar Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit : Realisasi kinerja 141,4% melampaui target hal ini disebabkan kegiatan selama pandemi lebih banyak secara zoom / webinar yang kontribusinya lebih rendah sehingga bisa penambahan jumlah peserta bimtek dari yang direncanakan • Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan : Realisasi kinerja tidak capai (50%) disebabkan adanya pandemi covid yang belum berakhir meskipun rumah sakit telah mengajukan permintaan tenaga spesialis tapi Tenga spesialis/ Bagian tidak bersedia/ menolak untuk ber MOU dengan rumah sakit. • Peningkatan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit : 1. Target kinerja tidak tercapai (59,4%) disebabkan pandemi covid-19 yang berlangsung sejak bulan maret hingga akhir tahun, sehingga rs membuat kebijakan ada pembatasan pelayanan (medis dan paramedis pemberi pelayanan juga meminta ada pengaturan pelayanan poliklinik untuk mengurangi tingkat resiko penularan di rumah sakit sehingga hari pelayanan spesialis tidak setiap har),disamping adanya kondisi masyarakat takut untuk datang berobat ke rumah sakit, 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Realisasi anggaran untuk bulan pertama dan kedua menggunakan anggaran BLUD, selanjutnya menggunakan dana APBD sesuai kontrak. • Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD : Realisasi 98,6%. Masih ada sisa pada rek perjalanan dinas dimana nilai yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan 1 (satu) kali perjalanan dinas sehingga menjadi sisa anggaran dari kegiatan. • Pemeliharaan & Pemulihan Pelayanan Kesehatan RS : Realisasi anggaran 98%, tidak maksimalnya realisasi ini ada pada rekening belanja uang lembur (shift jaga) petugas, hal ini disebabkan petugas yang jaga diperawatan (total shift jaga) berkurang akibat petugas rumah sakit banyak yang terinfeksi/ kontak dengan penderita covid-19 sehingga tugas jaga diruangan ditiadakan (petugas diliburkan/isman/dirawat). jadi serapan anggaran disesuaikan dengan shift yang dilaksanakan. • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit : Realisasi anggaran 98,5% disebabkan anggran belanja untuk covid-19 ada beberapa yang tidak terealisasi 100% seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Pada anggaran lembur petugas ruang covid-19 tidak terealisasi 100% karena ada yang sifatnya disediakan (dokter spesialis) dan jumlah petugas tidak masuk shift berkurang karena terkonfirmasi positif covid. - Disediakan Anggaran makan minum petugas selama pandemi covid namun jumlah tenaga bertugas berkurang karena ada petugasnya yang terinfeksi covid-19. • Pelayanan Transfusi Darah : Selama pandemi covid-19, kegiatan luar gedung dikurangi sehingga ada sisa anggaran perjaanan dinas. • Peningkatan Kompetensi Tenaga kesehatan RS : Realisasi anggaran 69,07%, belum capai target disebabkan ada 1 kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana karena pelaksana kegiatan tidak bersedia datang dengan • Bimbingan Teknis Workshop dan Seminar Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit : Realisasi anggaran 89,4% tidak capai 100% disebabkan kegiatan bimtek lebih banyak secara webinar dimana biaya kontribusi lebih rendah dan tidak dibayarkan biaya perjalanan dinasnya sehingga ada sisa anggaran untuk perjalanan dinas • Pembangunan dan Pengembangan Bangunan Rumah Sakit : Realisasi keuangan 98,5%, ini disebabkan adanya dana pembangunan untuk retensi sebesar 5% • Pengadaan bahan-Bahan Logistik RS : Realisasi keuangan 77,6% karena BBM anggarannya sifatnya disediakan. Saat ini kondisi dilapangan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Genset RS 1 rusak dan jarang mati lampu sehingga pemakaian BBM genset berkurang 2. Selama Pandemi Covid-19 Keg perjalanan dinas berkurang sehingga kebutuhan BBM kendaraan dinas berkurang • Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS : Realisasi anggaran 97,6%, ada sisa dari kontrak (belanja alkes untuk covid-19), hal ini disebabkan penganggaran di perubahan sehingga ada keterbatasan waktu dan ketersediaan alat dipenyedia, alat direncanakan utk

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<p>2. Realisasi pendapatan melampaui target (114,3%) disebabkan klaim rs tahun 2020 hanya minus 2 bulan (tahun 2019 klaim minus 4 bulan), selain itu tarif klaim pasien covid cukup baik sehingga mendongkrak capaian PAD BLUD, juga tahun 2020 rumah sakit menargetkan PAD BLUD agak rendah dengan melihat jumlah kunjungan.</p>	<p>dibeli kosong jadi ppk membeli alkes merk yang lain dengan fungsi yang sama dengan harga yang berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan : Realisasi anggaran tidak tercapai karena anggaran disediakan untuk 6 spesialis tapi terbayar hanya untuk 3 spesialis, pembayaran sesuai dengan tenaga spesialis yang ber MOU sehingga ada sisa anggaran (realisasi 76,3%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja : Terealisasi 44 unit dari Target 51 unit , kegiatan ini bersifat anggaran disiapkan Penyediaan Makanan dan Minuman : Terealisasi 540 kotak dari Target 720 kotak Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : Terealisasi pemeliharaan sesuai target, 1 unit kantor dinas PU-PR Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Terealisasi pemeliharaan sesuai target, 19 unit kendaraan dinas/operasional Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran : Dokumen perencanaan terealisasi 100% (6 dokumen) Pembangunan Jalan : Untuk target peningkatan jalan aspal dan beton sudah terpenuhi namun peningkatan jalan kerikil I belum terpenuhi karena masih ada pekerjaan yang belum selesai per 31 Desember 2020 Penyusunan Sistem Informasi/Database Irigrasi : Keterbasan sumber daya manusia (SDM) dan minimalnya kapasitas SDM Penguatan Peran Komisi Irigrasi : Terealisasi 2 dokumen dari Target 2 dokumen (2 kali rapat komir) Penguatan Peran Petugas O dan P Jaringan Irigrasi : batal karena pengurangan anggaran Penyusunan Sistem Informasi/data Base Jaringan Air Bersih/Air Limbah : batal karena pengurangan anggaran Pengelolaan air bersih : batal karena pengurangan anggaran Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Terealisasi 2 dokumen KHLS dari Target 2 dokumen Penyediaan Sarana Bangunan dan Lingkungan Publik : Capaian kegiatan sebesar 50,00 % ,target 2 unit dan terealisasi 1 unit , 1unit belum terealisasi yaitu pembangunan gedung pemerintahan Desa Libukan Mandiri belum Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Usaha Jasa Konstruksi : Terealisasi 58 rekomendasi dari Target 70 rekomendasi , kegiatan ini bersifat anggaran disiapkan terkait rekomendasi surat izin jasa konstruksi (SIUJK) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi : batal karena pengurangan anggaran Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengawas : batal karena pengurangan anggaran Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi : batal karena pengurangan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja : Realisasi keuangan disesuaikan dengan biaya pemeliharaan Penyediaan Makanan dan Minuman : Realisasi keuangan disesuaikan dengan jumlah kotak Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran : Realisasi belanja jilid sekitar 47,60% dan penggantian sekitar 77,35% Pembangunan Jalan : Realisasi keuangan disesuaikan dengan bobot pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi/Database Irigrasi : Anggaran perjalanan dinas tidak terealisasi 100% Penguatan Peran Komisi Irigrasi : Anggaran sewa mobilitas darat karena terbatas P3A yang hadir dan perjalanan dinas tidak terealisasi sesuai target Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Honor tim pokja penyusun dokumen KHLS tidak dapat dibayarkan karena standar biaya honor tidak ada dalam SK tim pokja penyusun dokumen KHLS
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tunjangan : Pencairan dilakukan sesuai jumlah pegawai yang ada • Tambahan Penghasilan Lainnya : pencairan tambahan penghasilan setiap bulannya dilakukan setiap awal bulan berikutnya • Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Adanya ketidaksesuaian pengklasifikasian surat masuk dan surat keluar dengan aturan pada Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2019 tentang Pola Klasifikasi Asip Daerah. • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Untuk pembayaran biaya rekening air dan listrik dibayarkan berdasarkan beban tagihan sehingga anggaran bersifat disediakan sehingga terdapat sisa anggaran. • Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja : Ketersediaan jaringan listrik dengan input tegangan yang tidak stabil menyebabkan rentannya kerusakan peralatan kerja terutama peralatan elektronik. • Penyediaan Alat Tulis Kantor : Data Persediaan Alat Tulis Kantor yang tidak update • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : Ketersediaan barang cetak dan penggandaan yang ada belum dapat sepenuhnya menunjang untuk tertib administrasi. • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : Ketersediaan jaringan listrik dengan input tegangan yang tidak stabil menyebabkan rentannya kerusakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : Pada penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan masih ada beberapa media baik koran/majalah yang belum dapat diakomodir. • Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah : Pandemi Covid-19, sehingga ada beberapa rapat-rapat dan koordinasi tidak terlaksana • Monitoring dan Evaluasi : Adanya keterbatasan SDM dan kurangnya jumlah aparatur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan monitoring dan evaluasi triwulanan kantor. • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : Dilaksanakan sesuai kebutuhan • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Biaya pemeliharaan kendaraan roda enam (sunderlift) cukup tinggi disebabkan karena umur kendaraan yang sudah lebih dari 10 tahun. • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan : Beberapa diklat dilaksanakan menggunakan anggaran BKPSDM, dan selama pandemi bimbingan teknis dilakukan via virtual sehingga realisasi keuangan hanya 29,06% • Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD : Volume makan minum rapat pada kegiatan ini yang berkurang karena jumlah peserta rapat dibatasi sesuai protokol kesehatan Covid-19, sehingga realisasi anggaran tidak mencapai 100% • Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Pengumpulan laporan yang kadang terlambat, hal ini dikarenakan kurangnya jabatan pelaksana yang ada pada sub bagian perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Pembelian materai pada tahun 2020 dibelanjakan sesuai kebutuhan, sehingga sebagian anggaran tidak terealisasi • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Untuk pembayaran biaya rekening air dan listrik dibayarkan berdasarkan beban tagihan sehingga anggaran bersifat disediakan sehingga terdapat sisa anggaran. • Penyediaan jasa kebersihan kantor : pencairan upah jasa setiap bulannya dilakukan setiap awal bulan berikutnya, sehingga anggaran pada Triwulan III terealisasi pada Triwulan IV • Penyediaan makanan dan minuman : Untuk pembayaran biaya rekening makanan dan minuman rapat dan kegiatan sehingga anggaran bersifat disediakan • Kunjungan kerja dalam daerah : Jumlah kunjungan kerja volume lebih sedikit karena kunjungan kerja dilaksanakan oleh pejabat eselon II dan eselon III, dalam rangka pendampingan bersama pejabat-pejabat terkait, sehingga untuk realisasi kinerja hanya dibawah 90% dan realisasi keuangan diatas 90% • Pengadaan perlengkapan gedung kantor : realisasi keuangan berdasarkan nilai penawaran dari penyedia yang dituangkan dalam kontrak, sehingga pada kegiatan ini ada sisa anggaran • Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD : Keterlambatan memasukkan SPJ sehingga belanja penggandaan tidak terealisasi dan volume makan minum rapat pada kegiatan ini yang berkurang karena jumlah peserta rapat dibatasi sesuai protokol kesehatan Covid-19, sehingga realisasi anggaran tidak mencapai 100% • Identifikasi area pemakaman : kegiatan ini telah terlaksana, SPJ tidak terealisasi karena Pegawai yang menangani kegiatan ini meninggal •

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan : Penyelesaian fisik kegiatan yang terlambat • Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat: Ketidak akuratan informasi dari PDAM mengenai jaringan pipa yang ada diperumahan nelayan, sehingga anggaran yang tidak terealisasi • Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Bidang Perumahan : Kurangnya jumlah aparatur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan bidang perumahan, sehingga perjalanan dinas untuk melakukan pengawasan tidak terealisasi • Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman : Pada kegiatan ini yang terlaksana DED, sedangkan untuk fisik pelaksanaannya ditunda karena ada pengurangan anggaran akibat Pandemi Covid-19 • Pembangunan Jalan Kawasan Permukiman : Pembangunan jalan melebihi target, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan fisik yang terealisasi, diprioritaskan pada pekerjaan lapis pondasi jalan seperti pengerasan dan pengkerikilan, karena situasi eksisting tidak mendukung dilaksanakan pekerjaan rapat paving • Pembangunan Jembatan Permukiman : Pembangunan jembatan melebihi target karena sebahagian rencana awal plat duicker, diestimasi 8 meter, namun lebar plat duicker terealisasi harus menyesuaikan dengan lebar jalan yang ada yaitu untuk pemukiman dengan lebar 6 meter, sehingga jumlah titik unit plat duicker melebihi target awal yang ditetapkan • Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Permukiman : pembangunan drainase melebihi target awal karena kebutuhan dimensi drainase pada lokasi di kawasan pemukiman lebih kecil dari dimensi drainase yang umum ditarget pada saat pengusulan, hal ini didesain sesuai kebutuhan debit air limbah rumah tangga pada pemukiman. Karena dimensinya mengecil sehingga berdampak pada volume dan panjang drainase yang terealisasi • Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Permukiman : Dimensi pada turap dilapangan tinggi, sehingga dibandingkan anggaran yang disediakan tidak dapat mencapai target • Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permukiman : melebihi target kerena dilapangan sebagian kondisi jalan hanya membutuhkan sedikitperbaikan, misalnya hanya permukaan jalan hanya dilapisi mortal/beton hanya 10 cm, sehingga meyebabkan realisasi bertambah • Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Permukiman : pemeliharaan jembatan melebihi target karena beberapa bangunan kerusakan hanya terletak pada platnya saja, yang awalnya estimasi dengan pondasi dan plat • Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Permukiman : pemeliharaan drainase melebihi target, karena kondisi lapangan hanya perbaikan pada permukaan hanya dilakukan plesteran saja, atau Cuma lantai drainase saja yang dikerjakan, sehingga target panjang melampaui • Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong Permukiman : yang dilaksanakan pada kegiatan ini hanya Detail Engineering Design, karena mengalami pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 • Penyusunan dan Pemutakhiran Database Perumahan dan Kawasan Permukiman : kegiatan ini 	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<p>dilaksanakan tetapi data koordinat dan tracking GPS dan Foto PSU yang terbangun belum lengkap, dikarenakan pegawai yang menagani kegiatan ini meninggal dunia, sehingga tidak dapat terealisasi baik kinerja maupun keuangannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan : Kurangnya personil dan mobil skylift untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan lampu se Kabupaten Luwu Timur • Subsidi Listrik Bagi MBR : tidak terealisasi karena terkendala SK Bupati penetapan calon penerima dan Mou dengan pihak PLN • Persertifikatan Tanah Aset Daerah : kegiatan persertifikatan melebihi target dikarenakan, anggaran yang disediakan menyesuaikan perhitungan luasan perbidang dari BPN dan biayanya berdasarkan masing-masing luas persil yang akan disertifikatkan • Penyediaan Sarana Pengamanan Tanah Aset Pemerintah Daerah : Telah terealisasi 100% • Penyelesaian Konflik Pertanahan : kegiatan ini sifatnya disediakan, berdasarkan laporan yang masuk • Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi : kegiatan ini sifatnya disediakan, berdasarkan usulan yang masuk 	
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Dalam pencapaian target kinerja sangat bergantung pada jumlah surat masuk, sehingga sulit untuk menetapkan target secara tepat. Pencapaian lebih atau kurang dari target pun tidak menggambarkan keberhasilan atau ketidakterhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini. seperti capaian tahun 2020 sebesar 1.077 surat dari target 1.000 surat atau persentase sebesar 107,7%, jika dilihat dari capaiannya sangat tinggi namun tidak bisa dikatakan berhasil. • Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat persenjataan/keamanan : Perpanjangan Surat Izin Penggunaan 5 (lima) unit senjata setiap 5 (lima) Tahun harus dilakukan dengan pemeriksaan fisik secara langsung oleh Polda SulSel di Makassar dan Mabes Polri di Jakarta. Namun dengan kebijakan larangan melaksanakan kegiatan keluar daerah akibat covid 19 sehingga pengurusan izin tidak dapat dilaksanakan ke Jakarta • Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat : Kegiatan ini merupakan Patroli dalam rangka Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan Masyarakat agar tetap dalam kondisi tertib dan tenteram. Jumlah Patroli yang dilakukan oleh Seluruh Satpol PP Kecamatan dan Patroli Khusus oleh PRC sebanyak 1.250 Kali pada Tahun 2020. dari kegiatan Patroli tersebut sebanyak 448 Patroli yang berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum. dan semua potensi gangguan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penyelesaian. dari uraian tersebut diperoleh capaian sebesar 35,84% dari target 35,00%. sehingga capaiannya melebihi target. • Penindakan Non-yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah : Pada Tahun 2020, jumlah kasus pelanggaran Perda yang diregistrasi dalam buku register Perkara sebagai laporan pelanggaran Perda sebanyak 26 kasus. Dari 26 kasus tersebut, 17 kasus telah diselesaikan melalui penindakan Non-Yustisi antara lain dengan Surat Teguran/Peringatan dan Penutupan Usaha. dari capaian tersebut diperoleh Realisasi kegiatan sesuai dengan formulasi indikator sebesar 65,38% dari Target sebesar 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Realisasi keuangan sebesar 82,75% dari Target Tahun 2020. Realisasi tersebut menyesuaikan dengan tagihan rekening (pasca-bayar) yang sifatnya disediakan. • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : Realisasi Keuangan sebesar 67,30%. Anggaran kegiatan ini sifatnya disediakan, namun untuk penyediaan belanja cetak kurang terserap karena Cetak Spanduk untuk peringatan HUT atau Hari-Hari Besar dimasa pandemi covid-19 kurang. • Penyediaan bahan logistik kantor : Realisasi Keuangan sebesar Rp554.200 dari Jumlah Anggaran sebesar Rp1.000.000 atau 55,42%. Rendahnya Realisasi keuangan disebabkan oleh karena anggaran biaya disiapkan untuk pengisian BBM Genset dan Mesin Babat, namun Peralatan tersebut jarang digunakan. selain itu pengisian tabung gas Elpiji 12Kg yang ke-4 direncanakan akhir Desember namun belum habis. • Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat persenjataan/keamanan : Anggaran kegiatan ini disiapkan untuk perpanjangan surat izin penggunaan senjata (per tahun) dengan pemeriksaan fisik oleh Polda SulSel dan Mabes Polri. Namun dengan kebijakan larangan melaksanakan kegiatan keluar daerah akibat covid 19 sehingga pengurusan izin tidak dapat dilaksanakan. • Penyusunan laporan keuangan semesteran : Realisasi Keuangan sebesar 86,06%. Anggaran yang kurang terserap adalah Belanja Penggandaan Laporan Keuangan, dari Anggaran yang disediakan sebesar Rp1.190.100,- terealisasi hanya Rp594.300,-. Kurangnya realisasi anggaran belanja penggandaan disebabkan oleh karena Dokumen Laporan Keuangan Semester I hanya digandakan untuk kebutuhan pelaporan kepada Pimpinan dan belum disampaikan kepada seluruh pejabat struktural. • Penindakan yustisial pelanggaran peraturan daerah : Pembatasan dalam masa Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa Kasus Pelanggaran Perda

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<p>50,00% sehingga diperoleh Capaian melebihi target yaitu sebesar 130,76%. Pelanggaran Perda yang tidak terselesaikan akan dilakukan dengan Penindakan Yustisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penindakan yustisial pelanggaran peraturan daerah : Pada Tahun 2020 jumlah kasus yang dapat dilimpahkan ke Pengadilan sebanyak 5 kasus. Atau capaian sebesar 19,23% dari target sebesar 36,00%. Pembatasan dalam masa Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa Kasus Pelanggaran Perda tidak dapat diselesaikan. • Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran : Masih ada kecamatan (WMK) yang belum memiliki unit pemadam kebakaran sehingga jarak posko dengan lokasi kejadian jauh mengakibatkan waktu respon 15 menit tidak dapat dicapai. Semua kejadian kebakaran yang tidak dapat mencapai waktu respon adalah kebakaran lahan, dengan peralatan dan perlengkapan yang tidak memadai serta akses jalan menuju lokasi maka sulit untuk mencapai waktu respon. selain itu jumlah petugas siaga setiap posko tidak memenuhi standar jumlah berdasarkan standar mutu SPM dengan jumlah minimal 6 Orang, namun yang terjadi banyak posko yang hanya disiagakan 5 Orang, hal ini terjadi karena dukungan anggaran yang minim untuk pemenuhan SPM. • Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran : Pengadaan Unit Pemadam Kebakaran merupakan KP 1 yang mana pada Tahun 2020 telah dianggarkan untuk pengadaan 1 (satu) unit yang pelaksanaannya telah memasuki proses pengadaan pada tahap SPPBJ, namun karena adanya Refocusing Program Kegiatan imbas dari Pandemi Covid19 sehingga dilakukan pembatalan pengadaan. oleh karena itu sisa target kembali menjadi 2 (dua) unit atau capaian sebesar 75%. • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran : Kegiatan ini dibatalkan karena adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran pada Perubahan APBD • Peningkatan Kapasitas Aparatur Satlinmas : Kegiatan ini dibatalkan akibat adanya kebijakan larangan pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang imbas dari Pandemi Covid-19. sehingga anggarannya difocusing kedalam kegiatan penanganan Covid-19. 	<p>tidak dapat diselesaikan. Anggaran yang disiapkan untuk menyelesaikan pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan Pelanggaran Perda sebanyak 8 kasus, namun sampai dengan Akhir Tahun hanya 5 kasus yang dapat dilimpahkan atau diselesaikan melalui penindakan Yustisi, sehingga Anggaran yang disediakan untuk menyelesaikan 3 Kasus sesuai dengan Rencana Aksi TW IV tidak dapat terserap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran : Jumlah Anggaran kegiatan ini sebesar Rp43.757.000,- yang terdiri dari Administrasi Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang dibatalkan Rp6.257.000,- dan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Operasional Pemadam Kebakaran pada Perubahan Anggaran sebesar Rp37.500.000,-. Untuk rencana pengadaan Motor sesuai dengan Spesifikasi senilai Pagu Anggaran namun tidak tersedia di Aplikasi, sehingga dibelanjakan Unit yang ada di Aplikasi dengan harga Rp.32.600.000,- atau 88,80% dari Pagu Anggaran. Jadi realisasi keuangan kegiatan ini menyesuaikan dengan nilai kontrak.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Jumlah surat yang masuk dan keluar tidak bisa diprediksi pada tahun 2020, sehingga dari angka yang kami targetkan 350 buah surat yang terealisasi sebanyak 362 buah menyebabkan capaian kinerja melebihi angka 100% • Penyediaan Makanan dan Minuman : untuk tahun 2020 kegiatan penyediaan makan dan minum sudah kami kurangi setengah dari anggaran pokok dan tersisa untuk persiapan rapat di bulan - bulan berikutnya namun pada akhir tahun 2020 covid-19 mulai kembali merebak di masyarakat sehingga pertemuan rapat kantor tidak rutin dilaksanakan untuk mengurangi penyebaran covid sehingga capaian kinerja tidak tercapai • Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol, Ormas, LSM dan OKP : Untuk tahun 2020 SKT yang terbit melebihi target yang telah ditentukan sebanyak 95 unit SKT dan realisasi sebanyak 100 unit, hal ini tidak bisa diprediksi karna selain ormas dan LSM yang mendaftarkan juga Kelompok tani / nelayan serta rumah ibadah semakin banyak yang terbentuk dan mendaftarkan kelompoknya ke kesbangPol untuk dibuatkan SKT. • Rencana Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik : untuk capaian kinerja 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat : untuk realisasi keuangan 100% • Penyediaan Makanan dan Minuman : karena tidak rutinya pelaksanaan rapat kantor sehingga mempengaruhi realisasi keuangan • Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol, Ormas, LSM dan OKP : untuk realisasi keuangan baik yakni di atas 90% • Rencana Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik : masih tersisa belanja penggandaan yang dananya dipersiapkan untuk menggandakan SPJ dana banpol dari 10 partai politik yang ada, tetapi dari 10 parpol tersebut telah menggandakan masing - masing SPJ nya sehingga belanja ini tidak terpakai • Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) : realisasi keuangan tidak mencapai target dikarenakan masih ada sisa anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah, yang masing - masing sisa dari belanja tersebut tidak bisa digunakan untuk 1 kali perjalanan • Pendidikan Bela Negara : untuk realisasi keuangan mencapai 98,47% karna belanja perjalanan

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) : Capaian kinerja 100% Pendidikan Bela Negara : Capaian kinerja 0%, untuk kegiatan ini rencananya dilaksanakan pada bulan maret di Kab. Gowa namun adanya covid - 19 yang muncul di awal tahun 2020 yang membatasi berkumpulnya orang banyak dan larangan keluar masuk daerah untuk sementara waktu, sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan dan anggarannya mengalami refocusing anggaran Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial : Capaian kinerja 100% 	<p>dinas dibelanjakan untuk melakukan koordinasi persiapan kegiatan bela negara</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial : kegiatan ini sifatnya dipersiapkan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang terlapor/terdata di kesbangpol, dari target 2 kali pertemuan tapi hanya 1 kali yang terlaksana sehingga anggaran pada kegiatan ini masih tersisa yakni belanja honor narasumber dan belanja makan minum rapat
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Realisasi kinerja 88.87 %, karena capaian nomor surat menyurat yang diagendakan sebanyak 1333 nomor dari target 1500 nomor surat yang diagendakan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor : Kegiatan ini Tidak dilaksanakan karena anggarannya mengalami Refocusing dalam rangka penanganan Covid 19 Pembeinaan Taruna Siaga Bencana : Kegiatan ini Tidak dilaksanakan karena anggarannya mengalami Refocusing dalam rangka penanganan Covid 19. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor : rasionalisasi anggaran Pembeinaan Taruna Siaga Bencana : rasionalisasi anggaran.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
<ul style="list-style-type: none"> Belanja Pegawai : Target output dari belanja ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 18 org dan terealisasi hanya 16 org sehingga capaian hanya 88,88 %. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi pejabat dan staf serta ASN yang meninggal dunia Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Indikator kegiatan ini adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda dengan target sebanyak 850 surat dan terealisasi 484 surat dengan capaian 56,94%. Hal ini disebabkan karena selama pandemi Covid-19, beberapa kegiatan di OPD mengalami penghapusan dan refocusing sehingga berpengaruh terhadap jumlah persuratan yang ada. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik : Indikator kegiatan ini adalah jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan dengan target sebanyak 42 rekening dan terelisasi 32 rekening dengan capaian kinerja 76,19%. Hal ini disebabkan karena rekening telepon kantor (Nomor ON CALL) terblokir sehingga tidak terbayarkan selama 10 bulan (10 rekening) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja : Indikator kegiatan adalah Jumlah ATK yang disediakan sebanyak 47 jenis dan terealisasi 35 jenis dengan capaian kinerja 74,47%. Capaian yang tidak sesuai dengan target disebabkan karena beberapa item ATK yang direncanakan sebelumnya ternyata tidak dibutuhkan namun tetap disediakan karena disesuaikan dengan peralatan kantor yang ada. Dan faktor lainnya adalah terdapat item ATK yang dibutuhkan/digunakan lebih dari yang direncanakan. Dan pemakaian ATK tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah : Target output kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi & konsultasi sebanyak 36 kali dan terealisasi sebanyak 80 kali. Realisasi yang melebihi dari target disebabkan karena terdapat beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak dibayarkan melalui APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Pegawai: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 118.372.591,- yang tidak terealisasi disebabkan karena terjadi mutasi pejabat dan staf sebanyak 3 orang dan 1 org meninggal dunia. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.848.408 terdiri dari belanja listrik Rp 4.945.393,- belanja air Rp 2.268.400,- dan belanja telepon Rp. 1.634.615,-. Realisasi keuangan yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan disebabkan karena adanya rekening telepon kantor (ON CALL) yang tidak terbayarkan karena terblokir. Sedangkan untuk pembayaran rekening listrik juga terdapat SILPA karena pemakaian token listrik untuk Gudang Logistik berkurang pemakaiannya sehingga pembiayaannya juga berkurang karena beberapa peralatan terhubung dengan aliran listrik kantor BPBD. Demikian juga halnya dengan pembayaran rekening air. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja: Penggunaan anggaran untuk perbaikan peralatan kantor disesuaikan dengan kondisi peralatan yang ada sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.267.800 yang terdiri dari belanja cetak Rp. 3.155.000,- dan belanja penggandaan Rp. 112.800,-. Realisasi keuangan yang tidak sesuai dengan target disebabkan karena selama masa pandemi, banyak kegiatan yang sebelumnya membutuhkan cetak baliho dan spanduk menjadi tertunda karena kegiatan tersebut tidak terselenggarakan. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja cetak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Penyediaan Makanan dan Minuman: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.187.500 terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat. Rp 2.177.500,- dan makanan & minuman tamu Rp 10.000,-. Hal ini disebabkan karena selama pandemi covid-19, kegiatan pertemuan/rapat yang sifatnya mengumpulkan banyak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Kerja Dalam Daerah : Target dari kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan sebanyak 253 kali dan terealisasi 460 kali. Realisasi fisik yang melebihi dari target disebabkan karena adanya efisiensi anggaran atas biaya transportasi yang dianggarkan untuk setiap orang, dimana perjalanan yang dilakukan menggunakan kendaraan dinas/operasional, hanya menggunakan biaya BBM saja. Penggunaan anggaran pada kegiatan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan persuratan yang ada. • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Kegiatan ini dihapus pada saat Refocusing Anggaran dengan pertimbangan memaksimalkan peralatan yang ada dan kegiatan ini tidak mendesak • Pembangunan Taman, lapangan/fasilitas parkir : Kegiatan ini ditambah pada saat perubahan anggaran untuk mengakomodir pembayaran Retensi 5% atas Pekerjaan Fisik Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir yang dilaksanakan pada tahun 2019 • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan : Kegiatan ini dihapus pada saat Refocusing Anggaran dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, kecil kemungkinan untuk pelaksanaan Diklat/Bimtek • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Dana Non APBD : Indikator kegiatan adalah Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan target 90% dengan realisasi 86,54 %. Target yang tidak tercapai disebabkan karena Terkendala adanya pandemi Covid 19, sehingga pengimputan e-proposal terkait Dana RR yang direncanakan dilaksanakan di Mks dan Jakarta tertunda. • Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana : Berdasarkan INPRES Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran dan PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 maka dilakukan • Penyuluhan Penyebaran Informasi Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana :Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, makan kegiatan ini dihapuskan karena kegiatan ini sangat rentan terhadap penyebaran virus Corona karena melibatkan/ mengumpulkan banyak orang. 	<p>orang intensitasnya berkurang untuk menekan penyebaran virus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah: Penggunaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan undangan • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Kegiatan ini dihapus pada saat Refocusing Anggaran dengan pertimbangan kegiatan tidak mendesak • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional: Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas/operasional • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan: Kegiatan ini dihapus pada saat Refocusing Anggaran dengan pertimbangan bahwa selama pandemi Covid-19, kecil kemungkinan untuk pelaksanaan Diklat/Bimtek Keluar Daerah • Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 651.500 yaitu belanja makanan & minuman rapat. Hal ini disebabkan karena selama masa pandemi, intensitas rapat/pertemuan dikurangi dan beberapa kegiatan rapat digabungkan dalam satu pelaksanaan. • Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 585.000 yaitu belanja makanan & minuman rapat. Hal ini disebabkan karena selama masa pandemi, intensitas rapat/pertemuan dikurangi dan beberapa pelaksanaan rapat digabungkan dalam satu kegiatan. • Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 31.821.050 yang terdiri dri belanja makanan & minuman rapat Rp 7.500.000, makanan & minuman tamu Rp 900.000, makanan & minuman kegiatan Rp 2.700.000, perjalanan dinas dalam daerah Rp 6.925.200 dan perjalanan dinas luar daerah Rp 13.755.850. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kejadian bencana. Anggaran ini disediakan untuk mengantisipasi kejadian bencana di akhir tahun. • Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana: Kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kejadian bencana. • Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 28.440.000 yang terdiri dari belanja BBM Rp 1.450.000. .Belanja cetak Rp 1.500.000, Makanan & Minuman rapat Rp 6.750.000, Makanan & Minuman tamu Rp 6.750.000, Makanan & Minuman kegiatan Rp 7.300.000 dan Perjalanan dinas dalam daerah Rp 4.710.000. Sisa anggaran yang cukup besar disebabkan karena selain kegiatan ini juga terdapat anggaran yang digunakan yaitu Dana BTT yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan Posko Covid-19. Jadi anggaran pada kegiatan ini sebagai pendamping. Selain itu anggaran ini juga disediakan untuk mengantisipasi kegiatan berposko ketika terjadi bencana yang membutuhkan pembentukan posko darurat bencana. • Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 14.703.650 yang terdiri dari belanja ATK Rp 562.500, belanja pengadaan Rp 250.000, belanja makanan & minuman rapat Rp 1.800.000 serta perjalanan dinas dalam daerah Rp 6.736.150 dan perjalanan dinas luar

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
	<p>daerah Rp 5.355.000. Sisa anggaran yang cukup besar disebabkan karena kejadian bencana tahun ini lebih di dominasi gempa bumi sehingga perjalanan dinas untuk identifikasi dan verifikasi hanya dilakukan pada beberapa kejadian bencana lainnya. Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan digunakan jika terjadi bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana: Kegiatan ini mengalami Refocusing Anggaran dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19, adapun kegiatan yang di refocusing antara lain : 1. Pelatihan Tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, 2. Sosialisasi Daerah Rawan Bencana, 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana, 4. Apel Siaga Bencana, 5. Simulasi Penanggulangan Bencana, dan 6. Pelatihan Penanggulangan tanggap darurat.
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja : Sampai bulan Desember tahun 2020, hanya 52 informasi lowongan kerja dari target 100 informasi lowongan kerja yang dilaporkan dan disebarluaskan. Hal ini disebabkan pada tahun 2020, perusahaan yang membuka lowongan (penerimaan karyawan baru) sangat terbatas • Kerjasama pendidikan dan pelatihan : Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya imbauan pemerintah tentang larangan mengadakan suatu kegiatan yang dapat mengumpulkan banyak orang dimasa pandemi Virus Covid-19 dalam rangka mencegah penularan Covid 19 • Penanganan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri: Sampai TW IV Tahun 2020, belum ada permintaan Penanganan/ Kasus TKI bermasalah asal Kab. Lutim yang dilaporkan • Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial : dari target 30 Kasus, sebanyak 34 kasus terkait perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan yang difasilitasi dan dimediasi • Pembinaan serikat pekerja : dari target 11 organisasi serikat pekerja yang dibina, sebanyak 20 serikat pekerja yang terealisasi karena adanya serikat pekerja yang baru terbentuk dan beberapa serikat pekerja yang berganti kepengurusan • Sosialisasi regulasi hubungan industrial : Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya imbauan pemerintah tentang larangan mengadakan suatu kegiatan yang dapat mengumpulkan banyak orang dimasa pandemi Virus Covid-19 dalam rangka mencegah penularan Covid 19 • Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi : Pada Tahun Ini tidak ada penempatan warga transmigran dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akibat adanya Pandemi Covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana • Penyuluhan transmigrasi lokal : Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya imbauan pemerintah tentang larangan mengadakan suatu kegiatan yang dapat mengumpulkan banyak orang dimasa pandemi Virus Covid-19 dalam rangka mencegah penularan Covid 19, serta pada tahun 2020 tidak ada penempatan warga transmigrasi baik lokal maupun asal • Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi : Pada Tahun Ini tidak ada penempatan warga transmigran dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tunjangan : Ada 3 (Tiga) Jabatan Eselon IV dan 1 Jabatan Eselon III yang masih Kosong • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : Realisasi anggaran untuk rekening listrik sesuai penggunaan (Rekening Listrik untuk Bengkel Industri mulai September di subsidi oleh Pemerintah Pusat) • pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) : perubahan target kinerja dari anggaran pokok sebanyak 40 orang menjadi 10 orang pada anggaran perubahan, serta metode Pelatihan dengan kunjungan langsung kelapangan sehingga anggaran ATK dan makan minum tidak terealisasi (terpakai) • Penanganan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri : Anggaran bersifat disediakan (Sampai TW IV, belum ada permintaan Penanganan/ Kasus TKI bermasalah asal Kab. Lutim yang dilaporkan • Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi : pada triwulan I telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 400.000 sesuai anggaran kas yang telah direncanakan. Sehingga pada saat Refocusing anggaran (pergeseran bulan April 2020) anggaran yang melekat pada kegiatan ini sesuai yang telah terealisasi karena kegiatan tidak dapat terlaksana • Penyuluhan transmigrasi lokal : pada triwulan I telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 660.000 sesuai anggaran kas yang telah direncanakan. Sehingga pada saat Refocusing anggaran (pergeseran bulan April 2020) anggaran yang melekat pada kegiatan ini sesuai yang telah terealisasi karena kegiatan tidak dapat terlaksana

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akibat adanya Pandemi Covid 19.	
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : Pada kegiatan tidak tercapai target kinerja disebabkan koran/ tablod yang tidak melakukan penagihan untuk pembayaran bulan Desember • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : Pada kegiatan ini capaian kinerja melebihi target kinerja hal ini disebabkan banyaknya kegiatan di luar daerah yang harus diikuti • Pengembangan Bibit Ikan Unggul : Pada kegiatan ini tidak tercapai indikator kinerjanya disebabkan indukan Ikan sudah tidak produktif lagi sehingga bibit ikan yang di hasilkan berkurang • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Tambak : Pada kegiatan ini capaian kinerja melebihi target disebabkan adanya kelebihan pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga • Pembangunan Jembatan Tambak dan Plat Duiker : pada kegiatan ini target kinerja tidak ada sedangkan anggaran tersedia ini disebabkan adanya pembayaran retensi atas pekerjaan tahun lalu • Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana Budidaya : pada kegiatan ini target kinerja tidak ada sedangkan anggaran tersedia ini disebabkan adanya pembayaran retensi atas pekerjaan tahun lalu • Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan : pada kegiatan ini target kinerja tidak ada sedangkan anggaran tersedia ini disebabkan adanya pembayaran retensi atas pekerjaan tahun lalu • Penyediaan keikutsertaan promosi serta pameran produk perikanan & pangan : Pada kegiatan ini target kinerja tidak ada sedangkan anggaran tersedia ini disebabkan pada saat perubahan anggaran, anggaran kegiatan ini dikurangi karena tidak ada lagi kegiatan keikutsertaan expo/ promosi dan pameran produk perikanan, namun ada pengadaan profil dinas untuk bahan pameran sudah dibuat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik : Pada kegiatan realisasi keuangan tidak mencapai 100 % karena ada tiga rekening listrik yang tidak terbayar karena bangunannya telah di sewa/dipihak ke tigakan berdasarkan hasil kesepakatan biaya tagihan listrik di bebankan ke pihak penyewa. • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : Pada kegiatan realisasi keuangan tidak mencapai 100 % disebabkan penyedia koran/ tablod yang tidak melakukan penagihan untuk pembayaran bulan Desember • Pengembangan Sarana & Prasarana Penangkap Ikan : Pada kegiatan ini ada 3 paket pekerjaan yang menggunakan anggaran DAK tidak bisa dilaksanakan kerena waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini selama 8 bulan sedangkan waktu yang ada sejak dana DAK ini dikembalikan lagi tersisa 6 bulan.
Dinas Lingkungan Hidup	
<ul style="list-style-type: none"> • Pada rogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Tidak dilaksanakan akibat adanya refocusing cofid 19 seperti Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Pembinaan dan Penghargaan Lingkungan : Tidak dilakukan penilaian Adipura oleh Tim Pusat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena adanya pandemi covid 19 tetapi pembinaan tetap dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya & Listrik : Realisasi untuk belanja listrik sebesar 82,03 % dikarenakan anggaran ini disiapkan untuk membiayai listrik kantor Dinas Lingkungan Hidup • Pada rogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Tidak dilaksanakan akibat adanya refocusing cofid 19 seperti Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/ Operasional : Realisasi untuk belanja pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional sebesar 74,15 % dikarenakan anggaran ini disiapkan untuk membiayai suku cadang, servis, belanja bahan bakar minyak/pelumas & STNK • Pembinaan Masyarakat Hukum Adat : Realisasi keuangan untuk kegiatan pembinaan MHA ada beberapa item yang kembali, seperti upah kerja untuk verifikasi MHA, mobilitas darat, mobilitas air, penggandaan, jilid, dan perjalanan dinas luar daerah karena belanja tersebut diperuntukan untuk melakukan sosialisasi ke Kecamatan terkait hasil perda tetapi tidak digunakan karena perda belum di tetapkan & studi

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
	<p>banding ke luar daerah dibatasi akibat pandemi covid +19</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Penghargaan Lingkungan : Realisasi keuangan untuk kegiatan pembinaan dan penghargaan lingkungan ada beberapa item yang kembali, seperti belanja cetak, penggandaan, & makan minum kegiatan dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk sosialisasi & pembinaan ke kecamatan tetapi karena adanya pandemi covid +19 maka kegiatan untuk bertatap muka dibatasi • Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 : Realisasi keuangan pengawasan pengelolaan limbah B3 untuk item belanja makanan & minuman rapat tidak digunakan karena rapat dilaksanakan via aplikasi • Pembinaan Sekolah Adiwiyata : Realisasi keuangan pembinaan sekolah adiwiyata untuk item belanja makanan & minuman kegiatan terpakai 16,67 % dikarenakan pertemuan tatap muka untuk melakukan pembinaan dikurangi akibat pandemi covid +19 • Penyelesaian Pengaduan Masalah Lingkungan : Sisa anggaran dari item belanja perjalanan dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pencatatan Kelahiran : Jumlah penerbitan Akta Kelahiran target 10.000 lembar realisasi 10.945 dengan capaian kinerja 109.45%, capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil bekerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit swasta terkait Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) • Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian : Jumlah Penerbitan Akta Nikah non muslim target 420 lembar realisasi 581 lembar, capaian kinerja 138,33%, capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki Akta perkawinan, meningkatnya permohonan dari Desa untuk melakukan pelayanan Desa (stelsel Aktif) khususnya penerbitan Akta perkawinan dan Jumlah penerbitan akta cerai target 20 lembar realisasi 21 lembar , capaian kinerja 105% , terjadinya peningkatan pada capaian kinerja disebabkan kondisi perceraian yang tidak bisa diprediksi yang mempengaruhi capaian kinerja menjadi tinggi • Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk : Jumlah Pemberian NIK Baru bagi Penduduk (Jiwa) target 6700 jiwa realisasi 6545 jiwa, capaian kinerja 97,70 %, capaian kinerja tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan disebabkan adanya pandemi covid 19 yang menyarankan untuk tidak mengumpulkan massa, sehingga sangat mempengaruhi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan ke Desa-Desa dan pelayanan rutin ke Kecamatan sehingga pelayanan penerbitan dokumen hanya terfokus pada pelayanan di Kabupaten yaitu pada dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan Jumlah Pencetakan KTP-el (Keping, target 27.000 keping, realisasi 35,094 Keping, capaian kinerja 129,98%, capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan hal ini dipengaruhi oleh adanya pergantian elemen biodata, pindah datang, pencari kerja, pemula atau masyarakat yang baru menginjak umur 17 tahun (wajib KTP) dan pencetakan ktp hilang dan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • -

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan Pendataan Penduduk (DAK) : 1. Jumlah pengeditan elemen biodata (Jiwa) target 62.000 realisasi 67.206, dengan capaian kinerja 108.40%, terjadinya peningkatan capaian kinerja pada indikator kinerja ini dipengaruhi oleh banyaknya permohonan pengeditan elemen biodata disebabkan pindah datang, dan perubahan status di kartu keluarga, 2. Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Lembar) target 33.300 realisasi 27.274 Lembar, capaian kinerja 81,90% capaian kinerja tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan disebabkan adanya pandemi covid 19 yang menyarankan untuk tidak mengumpulkan massa, sehingga sangat mempengaruhi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan ke Desa-Desa dan pelayanan rutin ke Kecamatan sehingga pelayanan penerbitan dokumen hanya terfokus pada pelayanan di Kabupaten yaitu pada dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, 3. Jumlah Perekaman data Bagi Penduduk (Jiwa) target 35.000 realisasi 9.45, capaian kinerja 270,23 dipengaruhi adanya perhelatan pilkada dan adanya surat dari KPU terkait masyarakat yang belum merekam dan masyarakat yang baru menginjak umur 17 tahun yang belum pernah merekam. 	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja : Realisasi melampaui target kinerja karena kondisi peralatan kerja banyak yang membutuhkan perbaikan. Penyediaan Bahan Bacaan dan Aturan Perundang-Undangan : Realisasi melampaui target disebabkan jumlah bacaan yang diterima melebihi daripada yang direncanakan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah : Realisasi melebihi dari target kinerja dikarenakan lebih banyak melakukan konsultasi dan koordinasi luar daerah dalam provinsi. Kunjungan Kerja Dalam Daerah : Realisasi tidak mencapai target dikarenakan perjalanan dinas lebih banyak dilakukan di kecamatan yang terjauh jarak dari ibukota kabupaten. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan : Untuk kegiatan Bimtek yang telah direncanakan utk diikuti tertunda karena Covid 19. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, pada program Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa, Pembentukan dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Kecamatan dan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa : Target kegiatan dihapuskan terkait Refocusing Anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman dan membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas keuangan. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan : Target kegiatan dihapuskan terkait Refocusing Anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman dan membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas keuangan. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa: Target kegiatan tdk terealisasi 100% karena 1 orang peserta Pelatihan dipersiapkan untuk Desa Arolipu namun Desa Arolipu masih dalam proses penomoran desa di kemendagri 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Untuk belanja telepon anggaran internet yang disediakan tidak dipergunakan karena internet di kantor ditangani Diskominfo Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Anggaran yang tidak terealisasi adalah anggaran belanja cetak spanduk dan baliho yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Anggaran tidak terealisasi sesuai target dikarenakan terdapat efisiensi harga barang Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : Anggaran tidak direalisasikan karena disiapkan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang rusak/ memerlukan perbaikan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan : Untuk kegiatan Bimtek yang telah direncanakan utk diikuti tertunda karena Covid 19 sehingga anggaran perjalanan dinas tidak terealisasi 100% Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, pada program Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pelatihan Penataan Aset Desa Bagi Pengurus Barang Desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan : Target anggaran dihapuskan terkait Refocusing Anggaran sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman dan membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas keuangan. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga : -perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk mengikuti peringatan HKG/hari kartini tidak dapat dilaksanakan untuk mencegah penyebaran Covid-19-Makan dan minum HKG/hari kartini tidak terealisasi karena kegiatan tidak dilaksanakan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga : Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti peringatan hari-hari besar tidak dapat terlaksana karena adanya covid-19 Program Peningkatan dan Pemanfaatan SDA, pada kegiatan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna,

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Penataan Aset Desa Bagi Pengurus Barang Desa : Target kegiatan dihapuskan terkait Refocusing Anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman dan membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas keuangan. • Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan : Target kegiatan dihapuskan terkait Refocusing Anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman dan membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas keuangan. • Pelaksanaan Lomba Desa : Target kinerja kegiatan dihapuskan karena pembatalan pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian dalam negeri sesuai dengan surat nomor 414.4/2777/SJ Perihal pembatalan penyelenggaraan lomba desa dan keluarahan serta temu karya nasional dan pekan inovasi perkembangan desa dan keluarahan tahun 2020 untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease. • Seleksi Perangkat Desa : Realisasi target melebihi, dikarenakan ada kekosongan perangkat desa sehingga dilakukan seleksi untuk mengisi kekosongan perangkat desa tersebut. • Penyusunan Regulasi Tentang Desa : Draft Rancangan Perbub Pengadaan Barang dan jasa di Desa dan Perbub tentang pendelegasian kewenangan camat telah terfasilitasi pada kantor setda Prov Sulsel dengan nomor surat 188.342/6009/B.HKm. dengan catatan bahwa draft rancangan Perbub tsb akan dikonsultasikan kepada Lembaga yang terkait dan karena kondisi Covid 19 yang semakin parah maka untuk konsultasi tertunda sehingga hanya 2 Perbub yang ditetapkan , serta 1 rancangan perbub tentang pedoman penyusunan APBDesa tidak terfasilitasi • Pendampingan Penyusunan RPMJDesa : Salah satu Desa (desa Mulyasri) melakukan PAW Kades dan kades baru hanya melanjutkan RPJMDes sebelumnya • Program Peningkatan dan Pemanfaatan SDA, pada kegiatan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna, Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan : Target kinerja kegiatan dihapuskan karena pembatalan pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian dalam negeri sesuai dengan surat nomor 414.4/2777/SJ Perihal pembatalan penyelenggaraan lomba desa dan keluarahan serta temu karya nasional dan pekan inovasi perkembangan desa dan keluarahan tahun 2020 untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease. 	<p>Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan : Anggaran dihapuskan berdasarkan pembatalan kegiatan oleh kemendagri dengan nomor surat 414.4/2777/SJ tentang pembatalan penyelenggaraan lomba desa dan keluarahan serta temu karya nasional dan pekan inovasi perkembangan Desa dan keluarahan tahun 2020</p>
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : 'Kurang cermat memprediksi kebutuhan pembayaran air dan Listrik sehingga ada sisa pelaksanaan Kegiatan yang terdiri atas : Belanja Air Rp. 5.536.100,- Belanja Listrik Rp. 182.592,- • Pengadaan kendaraan dinas/operasional : 'Sisa tender kegiatan Pengadaan DAK Fisik tidak dikembalikan diperubahan anggaran, yang terdiri atas : Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 60.000.100, Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Angkutan Barang Rp. 10.440.500 • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 'Sisa tender kegiatan Pengadaan DAK Fisik tidak dikembalikan diperubahan anggaran terdiri atas :

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
	<p>Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp. 333.500, Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Rp. 118.620.400 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telepon Rp. 144.122.200.-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data dan informasi keluarga : 'Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi sebesar Rp. 1.190.000 tidak dikembalikan diperubahan anggaran disebabkan tidak mencukupi untuk membiayai paket perjalanan dinas. • Pembinaan kampung KB : 'Diperkirakan masih dapat dilaksanakan dia akhir tahun ternyata waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi karena kondisi pandemi. sehinggga ada sisa pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas : Belanja Jasa Tenaga Ahli instruktur / Narasumber Rp. 824.000 Belanja Cetak 1.700.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp. 133.630.000 Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Rp.51.030.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair Rp. 1.250.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kumputer unit Jaringan Rp. 12.972.000
Dinas Perhubungan	
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan : Kegiatan ini dihapuskan untuk meningkatkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan membatasi pertemuan langsung dengan orang lain dalam jumlah banyak • Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan : Karena kegiatan pengadaan fasilitas keselamatan jalan berupa pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas adalah DAK maka kegiatan ini akan dihapuskan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor 900/0087/BUP tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA.2020 • Pembangunan Terminal : Dihapuskan di Anggaran Perubahan terkait rasionalisasi barang/jasa , penyesuaian APBD dalam rangka penanganan COVID-19 • Pengadaan Bus Sekolah : Karena kegiatan pengadaan Bus Sekolah adalah DAK maka kegiatan ini akan dihapuskan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor 900/0087/BUP tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA.2020 • Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran : Kegiatan ini dihapuskan untuk meningkatkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan membatasi pertemuan langsung dengan orang lain dalam jumlah banyak. 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Dinas Komunikasi dan Informatika	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Pengadaan 2 Unit perlengkapan kantor yakni: Meja dan Kursi Pejabat tidak di adakan dikarenakan anggaran di refocusing sehingga capaian kinerja tidak sampai dengan yang di harapkan (100%) • Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi : faktor eksternal - Beberapa SKPD masih mengganggu belanja bandwidth sendiri sementara Dinas Kominfo telah menyediakan bandwidth untuk SKPD tersebut. • Pengembangan Jaringan Internet Desa : faktor eksternal, 1 Desa yang tidak terkoneksi internet di 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik: Adanya pandemi covid-19 sehigga berdampak pada pengurangan pennggunaan air dan listrik • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor: Spesifikasi barang yang dipesan tidak sesuai dengan permintaan sehingga harga barang lebih rendah dari anggaran yang disediakan • Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan: anggaran di refocussing • Pemeliharaan Peralatan Pengembangan Jaringan: Monitoring jaringan di kecamatan terhambat pandemi Covid 19

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<p>akibatkan tidak tersedianya infrastruktur pendukung seperti listrik (Desa Batu Putih)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi : faktor internal, '- Kurangnya Tenaga Teknis dalam Pembangunan Aplikasi • Pengelolaan domain, portal dan website : '- Belum menggunakan SSL • Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : faktor internal : '1. Masih kurangnya tenaga peliputan di bidang IKP sehingga publikasi kegiatan pemda lebih banyak menunggu hasil liputan bagian Humas. 2. Anggaran untuk kegiatan penyebarluasan informasi masih kurang. Faktor eksternal : '1. Banyak permohonan kerjasama dari media cetak dan online yg tidak terkamodoir. • 2. Ada media yang tidak memiliki wartawan/koresponden di Luwu Timur. • 3. Publikasi kegiatan di media cetak regional masih kurang karena keterbatasan halaman media bersangkutan. • Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat : faktor internal : '1. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Pandemi covid19. Faktor eksternal : '1. Kegiatan ini sifatnya melibatkan banyak orang (kelompok) • Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi : faktor internal: 'Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Pandemi covid19, faktor eksternal: 'Kegiatan ini sifatnya melibatkan banyak orang (kelompok) • Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintahan daerah : faktor internal : '1. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Pandemi covid19, 2. PPID Lutim belum memiliki website sendiri untuk input setiap dokumen publik. Faktor eksternal: '1. PPID setiap SKPD belum berfungsi maksimal karena dianggap bukan Tupoksi , 2. Dokumen publik yang diupload setiap SKPD masih kurang , 3. PPID Pembantu di SKPD belum memahami tugas PPID. • Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi : faktor internal'1. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Pandemi covid19, 2. Tidak adanya tenaga khusus yang mengelola saluran komunikasi yang digunakan. Faktor eksternal, '1. Partisipasi publik baik kalangan ASN maupun masyarakat masih kurang dalam memberi respon setiap informasi yang dipublish pada saluran komunikasi yg dikelola • Penyusunan profil kabupaten dan profil kecamatan : faktor internal, '1. Belum memiliki tenaga/pegawai dengan keahlian mengolah data, '2. Belum mempunyai fasilitas pendukung dalam menunjang pengelolaan data.'3. Kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam penyediaan data tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan adanya penyebaran Covid-19 dan padatnya kegiatan sensus penduduk 2020 • Penyusunan Pengembangan Perekonomian : faktor internal, '1. Belum memiliki tenaga/pegawai dengan keahlian mengolah data. '2. Belum mempunyai fasilitas pendukung dalam menunjang pengelolaan data.'3. Kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam penyediaan data tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan adanya penyebaran Covid-19 dan padatnya kegiatan sensus penduduk 2020 • Penyusunan dan pengelolaan data pembangunan daerah : faktor internal, 'Kegiatan ini memiliki aplikasi yang melekat di pemerintah pusat kemendagri (SIPD-Database) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Jaringan Internet Desa: Monitoring menara dan koordinasi terkait rancangan perubahan Perda retribusi terhambat pandemi Covid 19 dan anggarannya telah refocusing • Peningkatan Kapasitas SDM Komunikasi dan Informatika: Tidak terlaksananya kegiatan dikarenakan adanya wabah Covid-19 sehingga anggaran difocusing • Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media: Tidak terlaksananya kegiatan dikarenakan adanya wabah Covid-19 sehingga anggaran difocusing • Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat: Anggaran di refocussing untuk Covid19 • Program Pengembangan Informasi dengan Mass Media mengalami Anggaran di refocussing untuk Covid19 ada beberapa point dari program tersebut antara lain, 1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, 2. Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintahan daerah, 3. Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi. • Penyusunan profil kabupaten dan profil kecamatan: Pihak Ke-3 dalam hal ini BPS, pada dasarnya bekerjasama dengan kominfo, akan tetapi anggaran yang sejatinya digunakan untuk penyusunan profil kabupaten dan kecamatan tidak semua bisa direalisasikan karena adanya perubahan pola kerjasama antara BPS dan Kominfo. • Penyusunan Pengembangan Perekonomian: Pihak Ke-3 dalam hal ini BPS, pada dasarnya bekerjasama dengan kominfo, akan tetapi anggaran yang sejatinya digunakan untuk penyusunan dokumen perekonomian tidak semua bisa direalisasikan karena adanya perubahan pola kerjasama antara BPS dan Kominfo. • Penyusunan dan pengelolaan data pembangunan daerah: pola kerjasamanya yang berubah dengan BPS sehingga mengakibatkan pada proses pencetakan buku.

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<p>yang sampai saat ini masih dalam perbaikan (maintanace), faktor eksternal, 'Kegiatan ini sedianya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau lembaga yang memiliki keahlian survey, pengumpulan data, mengolah, analisa data.</p>	
Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Anggaran yang disiapkan untuk outlet tidak terealisasi karena outlet dimanfaatkan oleh pihak ketiga, setelah perubahan anggaran outlet di alihkan ke gedung meteorologi namun realisasi dari pembayaran listrik gedung meteorologi rendah. • Pengembangan dan Pemutakhiran Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah : Pencapaian kinerja kegiatan tersebut telah melebihi target yang ditetapkan karena pendataan UMKM disinergikan dengan data usulan penerima BANPRES Produktif Usaha Mikro ke Kementerian Koperasi dan UKM • Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah : Telah dilakukan koordinasi dengan pihak LP POM MUI Prov. Sulawesi Selatan dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar terkait permintaan Narasumber namun kegiatan dimaksud batal dilaksanakan disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19, sehingga target awal 35 UKM yang mengikuti sosialisasi telah dihapus • Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi : Beberapa koperasi yang berharap diaktifkan di tahun 2020 namun berhubung masih dalam masa pandemi covid 19 sehingga oleh pengurus koperasi tersebut urung diaktifkan dan akan diaktifkan di 2021. Metode pengaktifan atau restrukturisasi pengurus wajib melalui rapat anggota sehingga koperasi yang belum aktif dan berharap diaktifkan harus melaksanakan rapat tahunan • Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi : Aggaran Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan target kinerja awal 15 koperasi namun kegiatan tersebut tidak terlaksana dikarenakan adanya rasionalisasi aggaran untuk penanganan penyebaran Covid 19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) • Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetreologian Daerah : Dikarenakan akibat pandemi covid 19 terkena WFH (covid) juga adanya edaran Kementerian Perdagangan terkait pembatasan pelayanan tera diluar kantor, sehingga pelayanan tera ulang pasar hanya dilakukan di beberapa pasar. Perusahaan juga ada yang tidak memperbolehkan masuk kelokasi selama pandemi, kegiatan Daerah Tertib Ukur (DTU) yang direncanakan untuk diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur dibatalkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia • Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor : Tidak terlaksananya kegiatan tersebut disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Listrik gedung meteorologi semula diasumsikan pembayarannya sekitar Rp400.000 perbulan ternyata hanya sekitar Rp200.000 sehingga selisih anggaran banyak yang tersisa • Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah : Adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga hanya biaya koordinasi keluar daerah yang terealisasi • Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor : Kegiatan sosialisasi pada TA.2020 tidak dilaksanakan akibat adanya refocusing anggaran, sementara untuk target keuangan terealisasi sebelum pandemi covid 19 yaitu melakukan koordinasi dengan calon narasumber

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<p>Stabilitas Sistem Keuangan, sehingga target kinerja yang direncanakan sebanyak 25 orang telah ditiadakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk : Dikarenakan adanya pandemi covid 19 dimana anggaran kegiatan pengembangan pasar mengalami refocusing anggaran, sehingga untuk tahun 2020 tidak ada pembangunan pasar, dimana target awal 3 pasar namun dikarenakan refocusing anggaran kegiatan hanya berupa pembayaran retensi tahun sebelumnya, serta hanya pembangunan sarana prasarana penunjang pasar. 	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan promosi investasi daerah : adanya musibah covid19 semua pertemuan dan kegiatan yang melibatkan banyak orang ditunda • Fasilitasi Pengaduan Penanaman Modal dan PTSP : bersifat persediaan, apabila ada pengaduan baru ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tunjangan : Kelebihan anggaran karena adanya jabatan Sekretaris Dinas dan 2 Kepala Seksi yang kosong • Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja : Kelebihan anggaran karena adanya jabatan Sekretaris Dinas dan 2 Kepala Seksi yang kosong • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : bersifat persediaan • Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja : Perawatan/maintenance software dibidang pelayanan (front office) tidak dilakukan karena adanya pandemi covid19 • Penyediaan makanan dan minuman : ada 1 kali kegiatan yang SPJ nya tidak terbayarkan karena terselip/tercecer • Penyediaan bahan logistik kantor : ada 1 kali kegiatan yang SPJ nya tidak terbayarkan karena terselip/tercecer • penyediaan barang cetak dan penggandaan : realisasi anggaran masih kurang karena adanya kegiatan cetak spanduk yang tidak dilaksanakan krn adanya pandemi covid19 • Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis : 1 upah jasa mengundurkan diri pd bulan maret dan SK pergantian terbit pada bln Juli • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : sisa penawaran harga sepeda motor • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : 1 kendaraan dinas sudah kondisi rusak berat sehingga tidak bisa dicairkan biaya perawatannya/service dan penggantian suku cadang • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan : Realisasi Anggaran berkurang disebabkan masih adanya kegiatan Perjalan Dinas yang tidak terpakai, sesuai dengan undangan • Penyusunan Pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah : Realisasi Anggaran berkurang disebabkan masih adanya sisa Perjalan Dinas yang tidak terpakai • Penyelenggaraan promosi investasi daerah : Kegiatan Pameran yang direncanakan pada akhir tahun tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid19 • pengembangan sistem, data dan informasi perizinan : ada SPJ ATK yang tidak terbayarkan krn tercecer dan sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah.
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Kurangnya kegiatan karena dampak Pandemi Covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Kurangnya kegiatan karena dampak Pandemi Covid 19

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air & Listrik : Kegiatan tersebut sifatnya sediakan, adapun biaya rekening Listrik dan Air di Lokasi GOR tidak terealisasi karena tidak ada kegiatan yang terlaksana di lokasi GOR karena Pandemi Covid • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Kegiatan tidak terealisasi karena dampak WFH dampak covid 19 dan ada penambahan upah jasa 1 org di perubahan namun tdk terbayarkan karena keterlambatan SK dari Dinas terkait • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor : Kegiatan tidak terealisasi karena WFH dampak covid 19 • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : Anggaran Biaya Koran Nasional yang telah ditetapkan DPA melebihi harga Riil dan Koran Lokal dianggarkan 2 eks dan terealisasi hanya 1 eks sehingga ada kelebihan anggaran yang tidak terealisasi sampai 100% • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : Anggaran tersebut sifatnya di sediakan sehingga realisasi anggaran berkurang, service, suku cadang kendaraan di belanjakan sesuai kebutuhan • Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan perundang2an : Kegiatan Bimtek mengikuti petunjuk dari dinas terkait(BKPSDM) dan adanya Pandemi Covid sehingga ada beberapa kegiatan bimtek yang tidak terlaksana • Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah (Lakip Kabupaten) : kegiatan tersebut capaian target terealisasi 100% namun realisasi anggaran hanya 63.99% karena kegiatan Perjalan Dinas Luar Daerah tidak terlaksana karena adanya pandemi Covid 19 • Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD : kegiatan tersebut capaian target terealisasi 100% namun realisasi anggaran hanya 69.60% karena kegiatan Perjalan Dinas Luar Daerah tidak terlaksana karena adanya pandemi Covid 19 • Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor : Kegiatan ini tidak terlaksana karena pandemi covid, sehingga seleksi dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional ditiadakan, adapun realisasi anggaran yaitu belanja ATK dan Belanja Cetak • Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi : Kegiatan ini tidak terlaksana karena pandemi covid, sehingga seleksi dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional ditiadakan • Pelatihan dan Pendidikan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) : Kegiatan ini terlaksana namun karena pandemi covid, sehingga seleksi dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional ditiadakan, adapun peserta paskib yang terelaisasi adalah peserta purna bakti paskib tahun 2019 yang direkrut untuk menjadi paskib tahun 2020 • Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga terdapat kegiatan yang di pending karena kondisi pandemi covid 19 antara lain Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga, Pelaksanaan Identifikasi Dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah, Pembinaan Cabang Olahraga Tradisional Daerah, Penyelenggaraan Seleksi Liga Pelajar dan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air & Listrik : Kegiatan tersebut sifatnya sediakan, adapun biaya rekening Listrik dan Air di Lokasi GOR tidak terealisasi karena tidak ada kegiatan yang terlaksana di lokasi GOR karena Pandemi Covid • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Kegiatan tidak terealisasi karena dampak WFH dampak covid 19 dan ada penambahan upah jasa 1 org di perubahan namun tdk terbayarkan karena keterlambatan SK dari Dinas terkait • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor : Kegiatan tidak terealisasi karena WFH dampak covid 19 • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : Anggaran Biaya Koran Nasional yang telah ditetapkan DPA melebihi harga Riil dan Koran Lokal dianggarkan 2 eks dan terealisasi hanya 1 eks sehingga ada kelebihan anggaran yang tidak terealisasi sampai 100% • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : Anggaran tersebut sifatnya di sediakan sehingga realisasi anggaran berkurang, service, suku cadang kendaraan di belanjakan sesuai kebutuhan • Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan perundang2an : Kegiatan Bimtek mengikuti petunjuk dari dinas terkait(BKPSDM) dan adanya Pandemi Covid sehingga ada beberapa kegiatan bimtek yang tidak terlaksana • Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah (Lakip Kabupaten) : kegiatan tersebut capaian target terealisasi 100% namun realisasi anggaran hanya 63.99% karena kegiatan Perjalan Dinas Luar Daerah tidak terlaksana karena adanya pandemi Covid 19 • Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD : kegiatan tersebut capaian target terealisasi 100% namun realisasi anggaran hanya 69.60% karena kegiatan Perjalan Dinas Luar Daerah tidak terlaksana karena adanya pandemi Covid 19 • Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor : Kegiatan ini tidak terlaksana karena pandemi covid, sehingga seleksi dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional ditiadakan, adapun realisasi anggaran yaitu belanja ATK dan Belanja Cetak • Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi : Kegiatan ini tidak terlaksana karena pandemi covid, sehingga seleksi dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional ditiadakan • Pelatihan dan Pendidikan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) : Kegiatan ini terlaksana namun karena pandemi covid, sehingga seleksi dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional ditiadakan, adapun peserta paskib yang terelaisasi adalah peserta purna bakti paskib tahun 2019 yang direkrut untuk menjadi paskib tahun 2020 • Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga terdapat kegiatan yang di pending karena kondisi pandemi covid 19 antara lain Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga, Pelaksanaan Identifikasi Dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah, Pembinaan Cabang Olahraga Tradisional Daerah, Penyelenggaraan Seleksi Liga Pelajar dan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga : kegiatan tersebut di pending karena recopushing akibat pandemi covid 19 sehingga yang terealisasi hanya 2 unit • Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasana Kepemudaan : kegiatan tersebut di pending karena pandemi covid 19 sehingga ada beberapa permohonan/usulan proposal mahasiswa yang di akomodir tidak dapat terlaksana sehingga mempengaruhi capaian target maupun capaian anggaran • Pengadaan Tanah Bumi dan Perkemahan : Pemilik tanah/Lahan tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh Tim Apresial sehingga mempengaruhi capaian target maupun capaian anggaran • Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air : Tidak dapat dilaksanakan secara tuntas karena masa Pandemi Virus Covid (Kegiatan kunjungan ke lokasi kegiatan dikurangi) • Inventarisasi dan dokumen kekayaan budaya : Cetak Buku tidak dapat dibuat karena tinjauan ke lokasi objek untuk pengambilan Gambar dan data objek tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Virus Covid • Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah : kegiatan pembinaan kelompok Sanggar seni yang ada wilayah Kabupaten Luwu Timur tidak terlaksana secara maksimal karena masa Pandemi Virus Covid 19 sehingga kegiatan tersebut hanya berjalan pada Triwulan I • Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan : kegiatan tersebut Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi Pandemi Covid • Penyelenggaraan festival budaya daerah : kegiatan tersebut di pending karena kondisi pandemi covid 19 • Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata : Kegiatan tersebut di pending karena pandemi covid 19 yang terealisasi yaitu belanja ATK, Penggandaan, Dokumentasi, Perjalanan Dinas dalam Daerah • Penyusunan Perencanaan Pengembangan dan Pengembangan Destinasi Wisata : kegiatan tersebut pada anggaran pokok di targetkan 4 dokumen namun pada recopushing pandemi covid 19 berubah menjadi 1 dokumen, sampai akhir Desember 2020 tidak terlaksana • Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata : kegiatan koordinasi ke tingkat nasional tidak terlaksana akibat pandemi covid 19, yang terlaksana koordnansi ke tingkat provinsi adapun belanja yang terealisasi yaitu ATK dan Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata : kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pelatihan pengembangan produk wisata seperti : - Pelatihan buat paket wisata, - Pelatihan Marketing/Pemasaran, yang Tidak terlaksana karena pandemi Covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga : kegiatan tersebut di pending karena recopushing akibat pandemi covid 19 sehingga yang terealisasi hanya 2 unit • Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasana Kepemudaan : kegiatan tersebut di pending karena pandemi covid 19 sehingga ada beberapa permohonan/usulan proposal mahasiswa yang di akomodir tidak dapat terlaksana sehingga mempengaruhi capaian target maupun capaian anggaran • Pengadaan Tanah Bumi dan Perkemahan : Pemilik tanah/Lahan tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh Tim Apresial sehingga mempengaruhi capaian target maupun capaian anggaran • Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air : Tidak dapat dilaksanakan secara tuntas karena masa Pandemi Virus Covid (Kegiatan kunjungan ke lokasi kegiatan dikurangi) • Inventarisasi dan dokumen kekayaan budaya : Cetak Buku tidak dapat dibuat karena tinjauan ke lokasi objek untuk pengambilan Gambar dan data objek tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Virus Covid • Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah : kegiatan pembinaan kelompok Sanggar seni yang ada wilayah Kabupaten Luwu Timur tidak terlaksana secara maksimal karena masa Pandemi Virus Covid 19 sehingga kegiatan tersebut hanya berjalan pada Triwulan I • Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan : kegiatan tersebut Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi Pandemi Covid • Penyelenggaraan festival budaya daerah : kegiatan tersebut di pending karena kondisi pandemi covid 19 • Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata : Kegiatan tersebut di pending karena pandemi covid 19 yang terealisasi yaitu belanja ATK, Penggandaan, Dokumentasi, Perjalanan Dinas dalam Daerah • Penyusunan Perencanaan Pengembangan dan Pengembangan Destinasi Wisata : kegiatan tersebut pada anggaran pokok di targetkan 4 dokumen namun pada recopushing pandemi covid 19 berubah menjadi 1 dokumen, sampai akhir Desember 2020 tidak terlaksana • Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata : kegiatan koordinasi ke tingkat nasional tidak terlaksana akibat pandemi covid 19, yang terlaksana koordnansi ke tingkat provinsi adapun belanja yang terealisasi yaitu ATK dan Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata : kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pelatihan pengembangan produk wisata seperti : - Pelatihan buat paket wisata, - Pelatihan Marketing/Pemasaran, yang Tidak terlaksana karena pandemi Covid 19
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Penyedissn Jasa Surat Menyurat : penetapan target yang tinggi, kurangnya surat masuk dan keluar karena pembatasan kegiatan (covid19) • Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah : penetapan target rendah, sehingga anggaran dapat diefektifkan untuk meningkatkan kinerja • kunjungan Kerja Dalam Daerah : penetapan target rendah, sehingga anggaran dapat diefektifkan untuk meningkatkan kinerja • Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan : penetapan target rendah, sehingga anggaran dapat diefektifkan untuk meningkatkan kinerja • Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah dan Desa : Realisasi kinerja melebihi target karena adanya persuratan dari OPD dan desa untuk pendampingan penataan dan pengelolaan arsip • Pengelolaan Database Kearsipan : realisasi kinerja yang melebihi 100% dari target, karena banyaknya arsip yang dikelola dari 2 OPD. • Layanan Pustaka dan Informasi/ layanan sirkulasi : realisasi kinerja melebihi target karena adanya permintaan dari desa dan kelompok literasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sehingga layanan mobile keliling melibih dari target. • Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan : realisasi kinerja yang melebihi target karena adanya Pembinaan perpustakaan desa yang masuk pada tingkat Provinsi dan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : anggaran bersifat dipersiapkan karena adanya covid19, aktifitas di kantor berkurang (WFH) sehingga berpengaruh dengan realisasi keuangan.
Dinas Pertanian	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan bahan logistik kantor : yang digunakan hanya mesin babat sedangkan genset tidak • Penyediaan makanan dan minuman : karena adanya covid-19 maka pertemuan di batasi • Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak : Karena adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedic dan medic veteriner peternakan dan juga para pemilik ternak unggas itu sendiri dan bantuan pelaksanaan kegiatan dari dinas peternakan provinsi • Perlindungan Tanaman Pangan Dari Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim : Serangan Organisme Pengganggu Tanaman pada tanaman masi dibawah ambang batas.hal ini dibuktikan dengan kurangnya gagal panen yang dialami petani. • Pengembangan/Rehabilitasi Sumber-Sumber Air : Ada 10 Unit Jaringan Irigasi Desa Yang di anggarakan di perubahan 2020 tidak Dilaksanakan disebabkan karena kondisi waktu yang sangat Kasip sekali tidak cukup untuk dilakukan pekerjaan • Pengawasan Pupuk dan Pestisida : Daya serap penggunaan pupuk bagi petani meningkat • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani : Terdapat peralihan pengerjaan fisik yang sebelumnya di rencanakan peningkatan jalan akan tetapi pada pelaksanaannya pembangunan/ pembentukan jalan. • Pembangunan dan peningkatan Jalan Produksi : Terdapat peralihan pengerjaan fisik yang sebelumnya di rencanakan peningkatan jalan akan tetapi pada pelaksanaannya pembangunan/ pembentukan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : Karena adanya Work from Home (WFH)Atau Bekerja Di Rumah akibat Vandemi Covid 19 kegiatan dan aktifitas kantor Berkurang serta masing2 BPP semua disediakan Paket Data Internetnya • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : Untuk kegiatan ini ada 6 kecamatan dibawa binaan READHSI. Yaitu Kec. Burau,Wotu,Mangkutana,Tomoni Kalaena dan Angkona sehingga sebagaiian untuk biaya cetak dan Penggandaan menggunakan dana kegiatan READSHI • Penyediaan bahan logistik kantor : Kegiatan ini sifatnya disediakan apabila terjadi pemadaman lampu secara bergilir dalam waktu hari kerja • Penyediaan makanan dan minuman : Untuk kegiatan penyediaan makan dan minum realisasi hanya 86,29% disebabkan karena pada akhir tahun berkurang tamu yang datang • Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis : Ada 4 orang Tenaga Upah jasa Penyuluh Pertanian yang Belum melaksanakan Tugas diwilayah kerja yang sudah dibagikan sehingga tidak di bayarkan • Pengadaan perlengkapan gedung kantor : kegiatan Untuk Pemasangan WIFI ini disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan dan ada satu BPP yang tidak terpasang untuk WIFI yaitu BPP Kec Towuti Terkendala Tekhnis • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : Sebagaiian anggaran Tidak Dicairkan Melihat Bangunan Yang dipelihara masih Bagus

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan teknis penyuluh pertanian : pada kegiatan ini terdapat over target di karenakan interaksi yang dilakukan dapat dilaksanakan via online • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian : disebabkan adanya pengaruh pandemic covid-19 sehingga banyak kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang untuk sosialisasi dan pertemuan - pertemuan rapat tidak bisa di laksanakan secara maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : kegiatan ini sebahagian motor sudah tidak digunakan sehingga penggunaan suku cadang tidak direalisasikan dan sebagian motor yang dibayarkan Pajak Kendaraanya RP.96.000 • Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan : kegiatan ini sifatnya disediakan menunggu dasar surat dari pusat dan propinsi • Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak : disebabkan karena adanya kegiatan vaksinasi rabies tahap II yang tidak dilaksanakan sehingga belanja upah jasa kegiatan petugas pendata HPR juga tidak direalisasikan • Fasilitasi dan pendampingan bantuan bidang peternakan : terdapat kegiatan makan minum pertemuan yg tdk dibelanjakan karena sifatnya persediaan jika sewaktu2 ada bantuan dari apbd I dan apbd yg harus disosialisasikan dan mengingat juga kondisi yg masi pandemi covid 19 • Operasional IKB : Untuk Kegiatan IKB mesin yang digunakan sekarang masi skala kecil sehingah bahan bakar yang disiapkan ada kelebihan dan sebagian untuk makan minum tidak dibelanjakan karena adanya aturan covid 19 yang dilarang pertemuan banyak orang serta lahan untuk penangkar IKB belum ada sehingga Jasa UPah Kerja yang direalisasikan hanya pada saat Proses Pengeringan Gabah • Pendampingan Kegiatan Tanaman Pangan : disebabkan adanya pengaruh pandemic covid-19 sehingga banyak kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang untuk sosialisasi dan pertemuan - pertemuan rapat tidak bisa di laksanakan • Pengembangan/Rehabilitasi Sumber-Sumber Air : Ada 10 Unit Jaringan Irigasi Desa Yang di anggarkan di perubahan 2020 tidak Dilaksanakan disebabkan karena kondisi waktu yang sangat Kasip sekali tidak cukup untuk dilakukan pekerjaan • Pengawasan Pupuk dan Pestisida : Pada kegiatan ini pertemuan dibatasi terkait adanya wabah covid, sementara perjalanan sama adanya covid sehingga pertemuan lebih banyak melalui zoom meeting dan Selain itu kegiatan ini ada sharing dengan anggaran APBN • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani : Ada 6 Unit Jalan Tani yang tidak Dilaksanakan, disebabkan adanya kesalahan Nomenklatur pada kegiatan yang dimakasud dan ada 2 unit yang kesalahan Nama Kelompok • Pembangunan dan peningkatan Jalan Produksi : ada 2 Unit kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan kerena area yang di lalui jalan tersebut adalah Hutang Lindung • Dukungan Perlindungan Perkebunan dari Serangan organisme Pengganggu Tanaman : karena serangan Organisme Pengganggu Tanaman pada tanaman perkebunan masih dibawah ambang batas pengendalian OPT dimana jumlah populasi atau intensitas serangan atau tingkat kerusakan tanaman masih dibawah ambang batas pengendalian. Pengendalian yang dilakukan oleh petani secara swadaya. • Penyusunan programa penyuluhan pertanian : Kegiatan Tidak Dapat Dilaksanakan karena kegiatan ini bersifat melibatkan Masyarakat dan Penyuluh dalam

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
	<p>jumlah yang besar sedangkan Covid 19 sampe akhir tahun masih jadi faktor penghambat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah tani (tudang sipulung) : Untuk Biaya Honorarium Narasumber tdk dibayarkan terbentur dengan aturan Daerah yang tdk bolehkan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian : Kegiatan penyuluhan tidak hadir secara Full karena Covid 19 • Pendampingan dan pemberdayaan petani (program READ-SI IFAD) : Belanja Modal Pengadaan IT untuk 6 BPP Total Rp. 180.000.000 dan Biaya Honor Narasumber yang tdk Bisa direalisasikan krn Terbentur Aturan Daeah
Sekretariat Daerah	
<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Target kinerja kurang karena adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi surat yang masuk dan keluar. • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : pada kegiatan ini target kinerja yang ditetapkan sebanyak 77 orang namun realisasi kinerja hanya 69 orang tidak mencapai target karena ada beberapa orang yang mengundurkan diri. • Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis : Target Kinerja yang ditetapkan sebanyak 69 orang namun realisasi kinerja hanya 69 orang tidak mencapai target karena ada beberapa orang yang mengundurkan diri. • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi KDH/WKDH : 'Kegiatan tidak dilaksanakan karena menunggu undangan untuk BIMTEK bagi KDH/WKDH • Legislasi Rancangan Prodk Hukum Daerah : 'pada kegiatan ini unuk perub Melebihi target karena adanya perub Tupoksi yang disusun bagian organisasi untuk setiap SKPD, dan untuk SK karena pada SKPD Satpol membentuk LINMAS dimasing-masing Desa dan Kelurahan. • Apresiasi Wisata Religi : 'Pada Kegiatan Apresiasi Wisata Religi telah dilaksanakan seleksi peserta wisata Religi namun karena pandemi COVID-19 pemberangkatan Peserta Wisata Religi dianggarkan pada tahun 2021. • Rehabilitasi sedang/berat Gedung dan Kantor : Pada Kegiatan ini capaian kinerja kurang karena kegiatan perencanaan unuk Mess Jakarta tidak dilaksanakan karena akan dialihkan di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2021 • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah jabatan Sekretariat daerah/KDH/KWDH : 'Pengadaan Bad Cover, Sprei dan Sarung kursi untuk Rujab Bupati dan Rujab Wakil Bupati ditunda pelaksanaannya. • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Mess : 'Pengadaan Bantal Kepala dan kain Pell untuk mess Jakarta tidak dilaksanakan karena mess Jakarta akan direhabilitasi. Pengadaan Springbed untuk mess makassar tidak dilaksanakan karena kondisi Springbed yang akan diganti masih layak pakai. • Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah : 'Target Perangkat Daerah yang dievaluasi adalah Satpol PP dan Damkar serta BKPSDM (untuk Merubah Tipe C menjadi Tipe B) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Belanja Perjalanan dinas dalam Daerah Rp. 3.153.900 Disiapkan Perjalanan Dinas untuk mengantar surat. • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Anggaran belanja telepon Rp. 7.174.601, Belanja Air Rp. 42.108.550 dn Belanja Listrik Rp. 117.741.091, Belanja Kawat/Listrik/TV Kabel/Internet Rp. 2.830.000 Anggaran sifatnya disiapkan. • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Anggaran Belanja Jasa Upah Kerja Rp.44.579.520, disiapkan anggaran untuk cleaning service sebanyak 25 orang namun yang terealisasi sebanyak 24 orang • Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis : Anggaran disediakan setiap bulan untuk Upah jasa sebanyak 77 orang namun realisasi sebanyak 69 orang • Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD : disediakan Anggaran untuk premi asuransi kesehatan KDH/WKDH belanja bahan/perlengkapan rumah tangga, belanja jasa pelayanan/PBB Mess Jakarta dan Mess Makassar • Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH : Sisa Anggaran Pengadaan • Dukungan Layanan Kepegawaian Internal SKPD : Disiapkan anggaran untuk iuran Porsesdasi Rp. 10.000.000 namun sampai pada akhir tahun tidak realisasi karena tidak ada Tagihan.Belanja Perjalanan dinas Rp. 3.200.000 Sifatnya disediakan untuk Koordinasi kepegawaian ke makassar. • Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD : sisa anggaran belanja makan dan minum Rp. 4.050.000,- tidak realisasi karena kegiatan Rapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Monev. • Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat : Anggaran sifatnya disediakan untuk Perjalanan Kunjungan Kerja dalam Daerah KDH/WKDH • Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri : sisa anggaran belanja Sewa Hotel/Penginapan untuk tamu Rp.10.530.000,-dan belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Rp. 4.000.000,- Disiapkan Anggaran untuk Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Organisasi Perangkat Daerah: 'target kinerja sudah tercapai namun berdasarkan peraturan daerah ada 18 OPD yang struktur kelembagaannya ditata melalui Perbub pada Triwuan IV. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Lainnya : Disiapkan Anggaran perjalanan Dinas untuk KDH/WKDH dan menyesuaikan dengan jadwal pimpinan. • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi KDH/WKDH : Anggaran disiapkan, Menunggu Undang-undang untuk Bimtek KDH/WKDH • Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) : Sisa Anggaran Belanja Tenaga Ahli/Narasumber Rp.7.500.000, Belanja Makan dan Minum Rapat Rp. 2.250.000,- Anggaran disiapkan untuk Forkofimda namun tdk terlaksana karena Covid-19. Disiapkan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 6.410.000,- tidak terealisasi karena Rapat Koordinasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dilaksanakan secara zoom meeting/Daring. • Koordinasi Realisasi Penyerapan Anggaran : Anggaran Belanja Makan dan Minum Rapat Rp. 2.400.000,- disiapkan untuk rapat koordinasi namun pelaksanaannya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Fisik. • Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah : Disiapkan Anggaran belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber Rp. 16.000.000,-, Belanja Cetak Rp.1.200.000,- Belanja Sewa Hotel/ Penginapan Rp. 3.380.000,- Belanja Makan dan Minum Rapat Rp.3.450.000,- untuk kegiatan RUPS BUMD, Pengukuhan dan Rakor Provinsi namun tidak terlaksana karena Covid-19 (Pembatasan Peserta). Belanja Perjadi dalam Daerah Rp.3.280.000,- • Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah: dialihkan ke DINKES (Recofusing Anggaran) • Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan : kegiatan tindak lanjut yang tidak terlalu efektif akibat covid 19 sehingga terdapat anggaran ATK dan penggandaan yang tidak terealisasi 100% • Pendampingan Penyelenggaraan Ibadah Haji : Kegiatan tidak terlaksana karena Pemberangkatan Jemaah Haji ditunda karena Pandemi COVID-19 dan Anggaran dikembalikan • Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan : Ada Beberapa kegiatan yang tdk dilaksanakan karena Pandemi Covid-19. • Pembinaan Kegiatan Keagamaan : Recofusing Anggaran • Apresiasi Wisata Religi : Anggaran untuk pemberangkatan peserta Wisata Religi dikembalikan dan Akan dianggarkan Tahun berikutnya • Fasilitasi Pelaksanaan MTQ : disiapkan Anggaran untuk Pelaksanaan MTQ Tk. Provinsi, belanja Belanja Bahan/Perlengkapan Kerja lapangan Rp. 45.000.000,- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber Rp. 20.250.000,- Belanja Cetak Rp. 3.480.000,- Belanja Sewa Hotel/ Penginapan Rp. 28.440.000,- Belanja sewa Sarana Mobilitas Rp.6.600.000,- Belanja Makan dan Minum Tamu Rp. 20.050.000,- Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rp. 21.560.000,- Belanja Pakaian Sipil Resmi Rp. 11. 420.000 dan belanja uang yang diberikan kepada individu/Masyarakat Rp. 37.700.000,- namun kegiatan dilaksanakan secara Virtual.

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah : Kegiatan Pembinaan Sekolah yang ditunda karena Pandemi Covid-19. • Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat : Sisa Anggaran Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 3.451.250,- tidak realisasi karena kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pembayaran Operasional Petugas Keagamaan. • Pendampingan Kasus Pengaduan Pemerintah Daerah: Belanja Makan dan Minum Rapat Rp. 11.220.000,- Anggaran sifatnya disediakan untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat. • Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADM Kecamatan dan Kelurahan : Belanja Perjalanan dinas dalam Daerah Rp. 4.386.600 tidak realisasi karena pandemi Covid-19. • Rehabilitasi sedang/berat Gedung dan Kantor : Perencanaan Mess Jakarta Tidak Dilaksanakan karena akan dialihkan ke dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2021 • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah/KDH/WKDH : Anggaran sifatnya disediakan untuk Belanja Jasa Service Rp. 28.445.000,- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Rp. 11.984.000,- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp. 96.679.285,- . • Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH : Anggaran sifatnya disediakan untuk Pemeliharaan Rujab SEKDA/KDH/WKDH • Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Kantor : Anggran disiapkan untuk Pemeliharaan Gedung Kantor • Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess : Anggaran disiapkan untuk Mess Makassar • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung dan Kantor : Anggaran sifatnya disediakan untuk penyediaan komponen Instalasi listrik bangunan gedung kantor • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah jabatan Sekretariat daerah/KDH/KWDH : 'Pengadaan Bad Cover, Sprei dan Sarung kursi untuk Rujab Bupati dan Rujab Wakil Bupati ditunda pelaksanaannya. • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Mess : Pengadaan springbed untuk mess makassar tidak terlaksana karena kondisi Springbed yang akan diganti masih layak pakai • Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH : Anggaran sifatnya disediakan untuk upah jasa Dekorasi, sewa Kursi dan Sewa Tenda. • Penataan Organisasi Perangkat Daerah: Anggaran belanja Makan dan Minum Rapat Rp. 2.600.000,- tidak realisasi karena pandemi covid-19, dengan menerapkan pembatasan peserta dan intensitas Rapat. • Penyusunan Laporan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH: Anggaran Perjalanan Dinas Luar daerah untuk penatausahaan aset mess Jakarta tidak terlaksana • Operasional Penatausahaan Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH : Anggaran

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
	Perjalanan dinas dalam Daerah sifatnya disediakan untuk pemasangan tenda Perlengkapan
Sekretariat DPRD	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bahan logistik kantor: Pada kegiatan ini target tdk mencapai 100% dikarenakan adanya rekening belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tdk mencapai target disebabkan jumlah BBM genset yang bersifat fariabel tergantung dari pemakaian operasional kantor • Kunjungan kerja dalam daerah : Dari target 85 kali yang terealisasi di tw IV hanya 48 kali. Kegiatan ini tdk mencapai target karena adanya covid-19 sehingga kegiatan ini tdk bsberjalan maksimal. • Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Pimpinan dan anggota DPRD : Dari target 30 orang yang terealisasi di tw IV hanya 20 orang .dikarenakan susahnya mengatur jadwal medical checkup anggota dewan. • Pembahasan rancangan peraturan daerah: kegiatan ini di targetkan 8 ranperda akan tetapi terealisasi hanya 7 ranperda atau sebesar 87,50% disebabkan 1 ranperda tersebut masih dalam proses pembahasan • Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah : - Realisasi target tidak mencapai 100% oleh karena padatnya jadwal kegiatan DPRD sehingga waktu untuk melakukan kunker dalam daerah terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 81,34% karena Pada rek belanja air, listrik dan telepon tagihannya bersifat fariabel, tergantung beban pemakaian operasional kantor dan rujab. • Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah : '- kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/SJ dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan Covid- 19 • Kunjungan kerja dalam daerah : realisasi anggaran untuk kegiatan ini 35,56%,di karenakan adanya covid-19 sehingga kegiatan tdk berjalan maksimal • Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Pimpinan dan anggota DPRD : realisasi anggaran untuk kegiatan ini 69,42%, dikarenakan susahnya mengatur jadwal medical checkup anggota dewan sehingga kegiatan ini tidak berjalan maksimal • Pembangunan gedung kantor : '-kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/SJ dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan Covid- 19 • Pengadaan perlengkapan rumah jabatan : realisasi anggaran untuk kegiatan ini 88,57%, dikarenakan anggaran untuk pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas disesuaikan stardar harga yang ada di Ekatalog • Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu : '- kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/SJ dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan Covid- 19 • Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan: realisasi anggaran untuk kegiatan ini 88,96%, dikarenakan adanya rekening belanja perjalanan dinas luar daerah yang tdk terealisasi di sebabkan waktu pelaksanaan bimtek ini terbentur dengan kegiatan lain sehingga kegiatan bimtek ini tdk berjalan maksimal. • Penyusunan laporan keuangan semesteran : Untuk kegiatan ini terealisasi hanya 86,00 % , di karenakan adanya rekening belanja yang tidak terealisasi seperti rekening belanja makan dan minum

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
	<p>rapat sebesar Rp 690,000,- disebabkan padatnya kegiatan yang dilaksanakan sehingga pelaksanaan rapat tdk dapat dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa konsultasi/tenaga ahli bagi pimpinan dan anggota DPRD : untuk kegiatan ini Tim pakar tdk disediakan disebabkan anggarannya di rasionalisasikan untuk penanganan covid-19 • Penyusunan perda inisiatif DPRD: -kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/SJ dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan Covid- 19 • Sosialisasi peraturan perundang-undangan : - kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/SJ dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan Covid- 19 • Rapat-rapat paripurna : - Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh rapat Paripurna Penggantian Antar Waktu tidak dilaksanakan karena pada tahun 2020 tidak ada anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan • Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah: - Realisasi target tidak mencapai 100% oleh karena padatnya jadwal kegiatan DPRD sehingga waktu untuk melakukan kunker dalam daerah terbatas • Program Peningkatan penganggaran dan pengawasan DPRD ada tiga poin kegiatan tdk berjalan karena Adanya Efisiensi Anggaran Perubahan Terkait SKB No.119/2813/SJ dan No. 117/KMK/No. 07/2020 Dalam Rangka Penanganan Covid- 19, yaitu 1. Pembahasan pelaksanaan kode etik DPRD, 2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dan 3. Pembahasan laporan semesteran dan prognosis • Pembahasan LKPJ : realisasi anggaran untuk kegiatan ini 89,14 %,di karenakan sisa anggaran belanja dari rekening belanja Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 9,460,200,- dan rekening belanja makan dan minum rapat sebesar Rp 600,000,-disebabkan waktu yang terbatas untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Burau	
<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan : Kegiatan ini tidak dilaksanakan dan anggarannya digeser saat evisiensi anggaran. • Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan: Pencapaian kinerja tidak maksimal dan tidak sesuai target namun pencapai target dan realisasi pendapatan pada kantor camat burau melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu 123 %. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan : Kegiatan ini tidak dilaksanakan dan anggarannya digeser saat evisiensi anggaran • Fasilitasi Peran Serta Perempuan Dalam Membangun Masyarakat Desa: Kegiatan ini sudah berjalan namun anggarannya untuk perjalanan dinas tidak terealisasi karena masa pandemi dan kurang kunjungan kerja dalam daerah. • Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan: sebahagian anggaran tidak terealisasi karna masih ada papan IMB 42 lembar yang tersisa/tidak terpakai di Tahun 2019 dan digunakan kembali pada tahun 2020 sehingga penambahan papan IMB pada tahun 2020 hanya 25 lembar.
Kecamatan Wotu	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Akibat adanya pandemi Covid 19 yang melanda 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Realisasi Keuangan pada kegiatan ini sangat

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<p>daerah ini sehingga mengakibatkan pembatasan kegiatan yang bersifat keramaian maka kegiatan ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah : Adanya Pembatasan Kunjungan keluar Daerah akibat adanya pandemi Covid 19 sehingga Masih ada Dana yang tersisa, Kunjungan Kerja Dalam Daerah : Adanya Pembatasan Kunjungan keluar Daerah akibat adanya pandemi Covid 19 sehingga Masih ada Dana yang tersisa, Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Adanya Kegiatan Kunjungan kerja luar daerah yang direncanakan akan tetapi sampai akhir tahun anggaran tidak dapat dilaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD : Untuk kegiatan ini yang menjadi masalah adalah masih ada dana untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang sampai akhir tahun anggaran tidak dapat digunakan disebabkan adanya pembatasan kunjungan disebabkan adanya pandemi Covid 19 Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes : Untuk Kegiatan ini yang menjadi masalah adalah tidak terlaksana beberapa perjalanan dinas dalam daerah diakibatkan adanya pembatasan kunjungan akibat adanya pandemi Covid 19. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan : Untuk Kegiatan ini yang menjadi masalah adalah tidak terlaksana beberapa perjalanan dinas dalam daerah diakibatkan adanya pembatasan kunjungan akibat adanya pandemi Covid 19. 	<p>kecil yang mana hanya 19,50 % akibat kurangnya kegiatan yang dilaksanakan dimana untuk kegiatan ini diperuntukkan untuk sewa Tenda dan Kursi</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah : Realisasi Keuangan untuk Kegiatan ini hanya sebesar 83 % disebabkan kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara keseluruhan dikarenakan adanya pandemi Covid 19 Kunjungan Kerja Dalam Daerah : Realisasi Keuangan untuk Kegiatan ini hanya sebesar 86 % disebabkan kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara keseluruhan dikarenakan adanya pandemi Covid 19 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Untuk Realisasi Keuangan pada kegiatan ini mencapai 63% akibat adanya dana untuk Kegiatan Kunjungan keluar Daerah yang sampai akhir tahun tidak dilakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD : Untuk kegiatan ini yang menjadi masalah adalah masih ada dana untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang sampai akhir tahun anggaran tidak dapat digunakan disebabkan adanya pembatasan kunjungan disebabkan adanya pandemi Covid 19 Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes : Tidak terealisasi beberapa kunjungan kerja dalam daerah sehingga masih ada dana yang tersisa. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan : Tidak terealisasi beberapa kunjungan kerja dalam daerah sehingga masih ada dana yang tersisa.
Kecamatan Tomoni	
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan : Musrenbang Kecamatan sudah dilaksanakan di TW satu Bulan Februari 2020. Pelayanan Administrasi Perizinan : Dalam Pengurusan IMB masyarakat belum benar benar memaknai dan memahami akan kewajibannya mengurus akan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan serta Izin - izin lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> -
Kecamatan Mangkutana	
<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Administrasi Perizinan: capaian kinerja sebesar 114% disebabkan karena realisasi IMB sebanyak 114 lembar dari target sebanyak 100 lembar 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : kurangnya realisasi anggaran karena pemakaian rill jasa, komunikasi sumber daya air dan listrik tidak bisa diprediksi. Adapun sisa anggaran tersebut terdiri dari : belanja air Rp382.500, belanja listrik Rp4.214.442 dan belanja internet Rp1.441.918,-
Kecamatan Tomoni Timur	
<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: kurangnya realisasi karena pemakaian rill jasa sumber daya air dan listrik tidak bisa diprediksi.
Kecamatan Kalaena	
<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> -
Kecamatan Angkona	
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas : Semula direncanakan pengadaan peralatan dapur berupa piring, sendok dan garpu serta AC 1 unit, tetapi untuk AC 	<ul style="list-style-type: none"> -

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<p>dibatalkan karena adanya pengurangan anggaran (refocusing Covid-19)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: Rencana pengadaan wireless, 2 unit AC dan 1 unit laptop dibatalkan karena adanya pengurangan anggaran terkait covid-19 • Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan: Rencana peningkatan kapasitas aparatur dengan mengikutsertakan PNS dalam diklat-diklat yang relevan dengan tupoksi batal dilaksanakan karena pengurangan anggaran sekaitan dengan pandemi yang terjadi • Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan: Kegiatan ini terlaksana pada triwulan I, sedangkan mulai triwulan II dst tidak dilaksanakan rakor tatap muka ditiadakan dan anggaran untuk triwulan II dan seterusnya dialihkan ke kegiatan lainnya. • Pelayanan administrasi perizinan: Dari target penerbitan IMB rumah tinggal sebanyak 55 lembar pada tahun 2020 di Kecamatan Angkona, terealisasi sebanyak 53 lembar, sedikit banyak hal ini dipengaruhi adanya pandemi covid yang berimbas pada penurunan ekonomi masyarakat 	
Kecamatan Malili	
<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Administrasi Perizinan: Terealisasi 100% dan Over target dari izin yang di targetkan
Kecamatan Wasuponda	
<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Permasalahan belanja rekena materai sdh mencukupi untuk pembuatan SPJ • Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes: Permasalah terkait tidak terealisasinya perjalanan dinas karena komunikasi via Telpon diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran SPPD tidak terealisasi • Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan: Permasalah terkait tidak terealisasinya perjalanan dinas karena komunikasi via Telpon diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran SPPD tidak terealisasi • Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat: Permasalahan Kasus lebih banyak diselesaikan di Desa sehingga anggaran yang disediakan tidak direalisasikan • Pelayanan Administrasi Perizinan: Permasalah terkait tidak terealisasinya perjalanan dinas karena yang dianggarkan untuk beberapa personil tetapi karena adanya pandemi Covid-19 sehingga yg kelapangan hanya dua orang saja sehingga masih ada yang tersisa perjalanan dinasnya
Kecamatan Towuti	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Disesuaikan dengan surat yang terisgrasi (surat masuk, surat keluar, surat keterangan lainnya) • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan: Terdapat beberapa peralatan yang dibutuhkan kemudian harga naik sehingga tdk ada keseimbangan antara kinerja dan keuangannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Kenaikan Pemaikaian listrik pada bulan April sampai dengan Agustus sehingga dilakukan penmabahan pagu • Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Pergesaran Pagu tidak di maksimalkan karena masih diperuntukkan kegiatan rakkoord sakiip namun tidak terlaksana karena pandemi covid 19

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan: ada pengurangan target kinerja dikarenakan pengurangan pagu anggaran (Covid 19) • Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Dinas: Terdapat peralatan Rujab seperti AC yang dipelihara dan membutuh pagu lebih • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan: Kegiatan ini Anggarannya sifat disediakan saja sehingga akan menyesuaikan dengan permintaan atau persuratan dari dinas terkait • Fasilitasi Peran Serta Perempuan Dalam Membangun Masyarakat Desa: Ada beberapa kegiatan PKK tidak terlaksana karena pandemi Covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Peran Serta Perempuan Dalam Membangun Masyarakat Desa: Anggaran Tidak terealisasi karena beberapa kegiatan PKK tidak berjalan
Kecamatan Nuha	
<ul style="list-style-type: none"> • Peny. Jasa peralatan & Perl.kantor: Pergeseran anggaran akibat Pandemi Covid- 19 • Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah: Kurangnya Perjalanan Dinas Luar daerah akibat PANDEMI COVID-19 • Bimtek Implementasi Peraturan: adanya kondisi Darurat Covid-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Peny.jasa komunikasi SDA,listrik: Penyesuaian biaya tarif listrik setiap bulannya • Peny. Jasa peralatan & Perl.kantor: pemangkasan anggaran • Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan: Penyesuaian harga satuan/exemplar jenis koran yang dibayarkan (Riil Cost) • Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah : Terdapat sisa anggaran Rp.35.666.550 karena adanya himbauan larangan untuk berkumpul menghindari Virus Covid -19 pelaksanaa rakor sesuai dengan undangan yang ada • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Terdapat sisa anggaran Rp. 8.415.000 kegiatan ini di anggarakan sebesar 17.000.000 namun tenda yang diadakan seharga 8.965.000 itu sudah spech yang bagus • Pemel.Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional: terdapat sisa anggaran pemeliharaan kendaraa dinas sebesar Rp.8.848.048 hal ini disebabkan karena pada awalnya direncanakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas namun ternyata tidak mencukupi untuk membiayai pemeliharaan tersebut sehingga anggarannya tidak terealisasi • Bimtek Implementasi Peraturan: Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11.980.000 kegiatan ini disesuaikan Undangn peserta • Fasilitasi Peran Serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa: Terdapat sisa Anggaran Perjalanan Dinas Luar daerah sebesar Rp. 15.776.105 di karenakan adanya himbauan larangan untuk melakukan kegiatan keluar daerah yang melibatkan banyak orang guna menghindari Virus Covid -19 dan sesuai undangan yang ada • Monit, Evaluasi dan Pelaporan: Terdapat sisa anggaran Sewa Kendaraan Air sebesar RP. 2.068.787 dikarenakan kesalahan kurang menginput dari Bendaahara yang mana dia tidak memasukkan ke BKU • Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat: Hampir semua kasus Pengaduan Masyarakat dapat diselesaikan di tingkat Desa maupun Kelurahan sehingga anggran makan-minum yang tersisa Rp. 2.380.900 tidak digunakan karena semuanya difasilitasi oleh Desa • Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan: Semua Pembangunan selain rumah tinggal mengurus IMB di kabupaten , juga beberapa rumah yang sudah

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
	terbangun tidak bisa diterbitkan IMB karena sempadan danau dan Pembangunan di area PT.Vale Penebitan Izinnya di Kabupaten.
Inspektorat	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Realisasi kinerja tergantung pada surat masuk dan surat keluar yang diagenda, dan target kinerja ditetapkan berdasarkan rata-rata realisasi kinerja tahun lalu • Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja: Jumlah peralatan kerja yang terpelihara melebihi target, dimana target yang ditetapkan 42 dan terealisasi 53, hal tersebut disebabkan adanya beberapa AC yang harus diperbaiki lebih dari 1x dan Realisasi kinerja jenis peralatan kerja yang terpelihara hanya terealisasi 3 dari 4 jenis yang direncanakan, karena wareless yang digunakan di inspektorat tidak pernah mengalami kerusakan sehingga tidak memerlukan perbaikan • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: Belanja cetak melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya cetakan yang tidak direncanakan, yaitu cetak blanko SPPD dan Belanja penggandaan tidak mencapai target, disebabkan karena masih ada beberapa LHP yang tidak terbit sehingga belum digandakan • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor: Jumlah komponen instalasi listrik tidak mencapai target disebabkan karena Kantor Inspektorat adalah gedung baru sehingga kondisi peralatan listrik sebagian besar masih dalam kondisi baik • Penyediaan Makanan dan Minuman: realisasi kinerja rendah, karena tamu dan pelaksanaan rapat dibatasi untuk mencegah penyebaran covid-19 • Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah: Realisasi rendah disebabkan karena adanya pembatasan kunjungan keluar daerah untuk mencegah penyebaran covid-19 dan koordinasi lebih banyak melalui virtual • Pelaksanaan Pengawasan Berdasarkan PKPT: Dari target 32 Obrik terealisasi 62 obrik, disebabkan karena pemeriksaan 11 kecamatan dialihkan pada pemeriksaan 44 desa yang terlambat penyeteroran laporan realisasi keuangannya sehingga pelaksanaan pemeriksaan reguler terutama pada pengelolaan dana desa lebih efektif dan Realisasi kinerja jumlah LHP yang terbit lebih rendah dari yang direncanakan disebabkan ada beberapa LHP yang belum terbit hingga akhir Tahun 2020 disebabkan karena masih dalam tahap finalisasi jumlah temuan terhadap obrik pemeriksaan • Pelaksanaan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah: Jumlah reviu melebihi target yang direncanakan, dimana target yang ditetapkan 8 kali dan terealisasi 13, disebabkan karena ada beberapa Reviu yang tidak pernah dilaksanakan sebelumnya namun dilaksanakan di tahun 2020, yaitu Reviu RKPD, RKPD-P, RKA, RKA-P dan reviu Probit Audit • Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Pemerintah Daerah: Adanya penambahan 2 OPD sebagai SKPD sampel penilaian SPIP oleh BPKP • Pendampingan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan perencanaan dan keuangan proyek: Jumlah pendampingan yang dilaksanakan yang tidak terealisasi adalah pendampingan BPKP dan Evaluasi proyek fisik OPD pada saat PHO dilakukan pada proyek fisik yang OPDnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Realisasi keuangan yang rendah pada kegiatan ini adalah belanja listrik, yaitu tersisa Rp. 4.366.236,00. hal ini disebabkan karena diterapkan WFH sehingga jumlah alat elektronik yang digunakan berkurang yang berdampak pada berkurangnya tagihan listrik • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional: Anggaran yang banyak tidak terealisasi adalah Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor, yaitu pembayaran pajak kendaraan roda 2, disebabkan karena kendaraan tersebut sudah didaftarkan untuk dihapuskan sehingga pajaknya tidak lagi dibayarkan • Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3: Anggaran yang tersisa terbanyak pada belanja perjalanan dinas luar daerah sebanyak Rp. 1.951.000,- disebabkan adanya pembatasan kunjungan ke provinsi untuk mencegah penyebaran covid-19

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<p>mengajukan permohonan sehingga anggaran kegiatan ini sifatnya disediakan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Hasil Temuan pengawasan: Realisasi kinerja dari kegiatan ini sangat bergantung pada berapa jumlah temuan pada saat pemeriksaan dan berapa yang ditindak lanjuti oleh obrik pemeriksaan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan: Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan dari target 10 kali hanya dilaksanakan 4 kali oleh Inspektorat Provinsi disebabkan adanya pembatasan untuk mencegah penyebaran covid-19. 	
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Capaian kinerja tercapai sebesar 100% dengan terbayarkannya rekening tagihan listrik, air dan telepon selama 12 bulan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Target kinerja tercapai 100% dengana selesainya penyusunan LAKIP 2019 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD: Target kinerja tercapai 100% Penyusunan, Updating, Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah: untuk realisasi kinerja tercapai sebesar 100%, dengan menghasilkan Output berupa 4 Laporan Penyusunan Rancangan KUA PPAS: untuk realisasi kinerja tercapai sebesar 100%, dengan menghasilkan Output berupa 4 Dokumen baik KUA dan PPAS Pokok 2021 maupun KUPA dan PPAS-P 2020 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah: Pada Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah dimana target Kinerja Berupa Tursusunnya Laporan Kelitbangan Daerah berupa empat Buah Laporan Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur: Rekomendasi /kebijakan pada kegiatan Pengkajian, penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Infastruktur Tidak Terlaksana Berupa 1 Dokumen Berisi Rekomendasi. Penguatan Sistem Inovasi Daerah: Pada Kegiatan Penguatan Inovasi Daerah dangan Target Kinerja Berupa Meningkatnya Inovasi daerah Yang di Optimalkan Berupa Replikasi Inovasi Daerah Berupa Bendera SASKIA yang akan di Replikasi di Kabupaten Luwu Timur Dimana Kabupaten Luwu Timur Menjadi Salah Satu Kabupaten yang akan Mereplikasi Inovasi Tersebut yang Di Fasilitas Oleh Provinsi Sulawesi Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Realisasi keuangan sebesar Rp 48.426.101,- atau 86,41% dari pagu anggaran yang disediakan Rp 56.040.000,-. Realisasi kegiatan ini bersifat kondisional. Besar kecilnya realisasi keuangan ditentukan oleh biaya rekening tagihan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja: Realisasi keuangan sebesar Rp 14.450.000,- atau 83,77% dari pagu anggaran yang disediakan Rp 17.250.000,-. Realisasi kegiatan ini bersifat kondisional. Besar kecilnya realisasi keuangan ditentukan oleh jenis kerusakan peralatan kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: Realisasi keuangan sebesar Rp 10.622.600,- atau 69,86% dari pagu anggaran yang disediakan Rp 15.205.000,-. Rendahnya realisasi kegiatan ini berasal dari rekening belanja cetak. Dimana tahun 2020 adalah masa pandedmi covid 19, perjalanan dinas dibatasi sehingga cetak blanko sppd berkurang Penyediaan Makanan dan Minuman: Realisasi keuangan sebesar Rp 10.632.500,- atau 70,65% dari pagu anggaran yang disediakan Rp 15.050.000,-. Rendahnya realisasi kegiatan dikeranakan selama masa pandemi covid 19 kebanyakan rapat yang dilakukan secara virtual Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas: realisasi keuangan sebesar Rp 25.159.960,- atau 64,51% dari pagu anggaran Rp 39.000.000,-. Rendahnya realisasi kegiatan ini karena biaya pemeliharaan kendaraan dinas (Kijang Innova) diambil alih oleh perwira penghubung Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: realisasi keuangan sebesar Rp 4.565.500,- atau 84,08% dari pagu anggaran Rp 5.430.000,-. Adapun pagu aggaran sebesar 15,92% yang tidak terealisasi berasal dari rekening belanja makan dan minum rapat. Dimana dalam situasi pandemi covid 19 ini kami hanya melakukan rapat singkat dengan jumlah peserta yang terbatas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD: realisasi keuangan sebesar Rp 3.711.300,- atau 85,91% dari pagu anggaran Rp 4.320.000 ,-. Adapun pagu aggaran sebesar 14,09% yang tidak terealisasi berasal dari rekening belanja makan dan minum rapat. Dimana dalam situasi pandemi covid 19 ini kami hanya melakukan rapat singkat dengan jumlah peserta yang terbatas Penyusunan, Updating, Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah: Realisasi Keuangan pada kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 83,56%, pada belanja Cetak tidak terealisasi karena anggaran tidak cukup sehingga 4 laporan hanya di foto

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
	<p>copy saja. dan pada belanja perjalanan dinas sudah tidak mencukupi untuk melakukan perjalanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rancangan KUA PPAS: untuk realisasi keuangan pada kegiatan ini terealisasi hanya sebesar 88,95%, pada item belanja makan minum rapat hal ini disebabkan adanya penyesuaian kebijakan pusat, provinsi maupun daerah terkait penerapan protokol kesehatan lingkup pemerintah daerah. Sehingga pertemuan yang sebelumnya secara intens direncanakan menghadirkan seluruh OPD terkait, dilakukan reschedule/ Penyesuaian dengan kondisi Protokol Kesehatan dimasa pandemic. rapat-rapat koordinasi selama penyusunan dokumen dilaksanakan hanya antara tim penyusun dan TAPD guna perumusan kebijakan daerah dalam penyusunan KUA dan PPAS baik pokok 2021 maupun Perubahan 2020 • Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya: Rincian belanja makanan dan minuman rapat tidak seluruhnya dapat direalisasikan (realisasi sebesar Rp 3.450.000,- atau 57,50% dari pagu anggaran Rp 6.000.000,- karena adanya rapat yang dilakukan secara virtual (menghindari pandemi covid-19) sehingga belanja makan minum tidak dipertanggungjawabkan • Koordinasi Forum Pembinaan Kabupaten Sehat: Hal ini karena rencana evaluasi kabupaten sehat oleh provinsi dan pusat tidak dapat dilakukan (diundur ke tahun 2021) akibat masih adanya pandemi covid-19, sehingga beberapa rincian belanja tidak seluruhnya dapat direalisasikan. Belanja Cetak (realisasi sebesar 0 % dari pagu anggaran Rp. 300.000,- Belanja Penggandaan (realisasi sebesar 498.000,- atau 47,43 % dari pagu anggaran Rp. 1.050.000,-), Belanja Makanan dan Minuman Rapat (realisasi sebesar 1.500.000,- atau 23,81 % dari pagu anggaran Rp. 6.300.000,-) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (realisasi sebesar 4.390.000,- atau 65,42 % dari pagu anggaran Rp. 6.710.000,-). • Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah: Pada Kegiatan koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan realisasi 72,86 % pada beberapa Item Kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal yaitu Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah Hal ini di sebabkan Oleh adanya penyesuaian kebijakan pusat, provinsi maupun daerah terkait penerapan protokol kesehatan lingkup pemerintah daerah. Pandemi Covid - 19. Pada sub Makan Minum Rapat Tidak Dapat Terealisasi hal ini Rapat yang dilaksanakan secara Virtual Meeting. • Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur: Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Pada Kajian Survey Opini Publik Tentang Kebijakan Pemerintah dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Akibat Wabah Covid-19 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, dimana tema kajian ini dianggarkan pada Anggaran Perubahan Pada APBD P Tahun 2020, sedianya kegiatan Survey ini akan di laksanakan pada Triwulan Ke IV Tahun 2020 dimana Ketua Tim dan beberapa Anggota Tim Terkonfirmasi Positif Covid -19, sehingga kegiatan ini dari sisi waktu sangat kasif untuk dilaksanakan, Pada Kegiatan Ini terealisasi sebesar 11,06 %. Dari total anggaran sebesar Rp. 211.11.000 , dimana Pada Sub Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli Tidak Terealisasi Sebesar Rp. 180.000.000 Atau Sebesar 98,36%, Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Sebesar Rp 3.200.000 Tidak Terealisasi,

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Sistem Inovasi Daerah: Pada Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan realisasi 65.56 % pada beberapa Item Kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal Oleh adanya penyesuaian kebijakan pusat, provinsi maupun daerah terkait penerapan protokol kesehatan lingkup pemerintah daerah. Pandemi Covid - 19,yaitu Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah. Pada sub Makan Minum Rapat Tidak Dapat Terealisasi hal ini Rapat - rapat yang dilaksanakan secara Virtual Meeting.
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Pemakaian listrik dan air dalam 3 bulan terakhir (Oktober s. d Desember) mengalami penurunan sehingga anggaran yang disediakan tidak terealisasi 100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan: Harga pada setiap jenis surat kabar yang berlangganan dengan kantor variatif/berbeda. Tidak semua rata sama dengan harga yang dianggarkan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnis: Dari 21 tenaga upah jasa yang ada di BPKD, ada 1 orang Tenaga upah jasa sopir yang disediakan belum terisi/belum ada, sehingga tersisa anggaran setahun u/ 1 orang tenaga upahjasa. Bimbugan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan: anggaran tersebut merupakan sisa SPJ perjalanan dinas luar daerah yang tidak digunakan karena tidak ada lagi kegiatan bimtek yang diikuti Peningkatan Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah: anggaran makan dan minum pertemuan biaya akomodasi dan sarana mobilitas dari tenaga ahli ke Luwu Timur sebagian besar tidak dapat direalisasikan karena konsultasi lebih banyak dilakukan secara online, sistem remote dan virtual (dari Makassar) sebagai akibat dari semakin meningkatnya Kasus Covid 19. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah: tersisa anggaran pada mata anggaran belanja pembelian bahan perlombaan/Plakat, dimana anggaran yang disediakan merupakan kegiatan Pemberian reward/hadiah bagi wajib pajak berprestasi. Pencairan anggaran belanja kegiatan tersebut tidak maksimal disebabkan belanja LS tidak dilakukan melalui mekanisme pengadaan mengingat waktu yang terbatas. Penghapusan Barang Milik Daerah: Belanja kegiatan penghapusan BMD tidak terealisasi 100% disebabkan Rencana Penilaian dan Pelelangan BMD jenis Kendaraan Dinas, tidak terlaksana dikarenakan Kesanggupan dan kesiapan Penilaian dan Pelelangan dari Panitia KPKNL Palopo waktunya sangat kasip(tidak cukup/tidak memungkinkan) untuk dilaksanakan diakhir Tahun 2020, sehingga anggaran tersisa/tidak digunakan pada item Belanja Jasa Publikasi (iklan), Belanja Jasa Upah Kerja Panitia dan Belanja Sewa Hotel/Penginapan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik: Realisasi sesuai target 9 rekening Beasiswa Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara: * Jumlah mahasiswa yang dianggarkan sebanyak 93 orang 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik: Anggaran kegiatan ini sifatnya disediakan dan dibayarkan sesuai tagihan yang masuk

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Masalah Kinerja	Masalah Keuangan
<p>dengan rincian: Tahun 2020 sebanyak 37 orang dan 56 orang mahasiswa lanjutan dari tahun 2015 s.d 2019</p> <p>* Yang sementara pendidikan berjumlah 56 orang dan tersisa 37 orang khusus di anggarkan di tahun 2020 dengan rincian: 1 orang tenaga umum (Teknis), 1 orang tenaga kesehatan (Dokter spesialis), dan 35 orang tenaga pendidikan (Guru), yang memenuhi syarat dan telah di SK kan sebanyak 33 orang.</p> <p>* Realisasi Tugas Belajar Tenaga Pendidikan (Guru) yang memenuhi syarat dan diberi SK Tugas Belajar berjumlah 33 orang tetapi 5 orang mengundurkan diri dengan alasan berhalangan karena ingin merawat orang tua yang sakit dan mendampingi anak sehingga total realisasi Tubel Guru 2020 sebanyak 28 orang dan di triwulan IV terealisasi 2 orang Dokter Spesialis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah: Pada Diklat SIPD dari target 40 orang yang mengikuti Diklat sebanyak 45 orang (menyesuaikan anggaran yang tersedia) • Seleksi Penerimaan Calon PNS: Terkait realisasi kinerja, dari target 250 formasi terealisasi 111 formasi dan sebanyak 110 formasi yang terisi karena terdapat 1 formasi yang tidak ada pendaftar • Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS: Total kasus di tahun 2020 yang terlapor sebanyak 18 kasus dan total kasus yang tertangani sampai dengan triwulan IV sebanyak 12 kasus • Seleksi Penerimaan PPPK: dari target 200 formasi sebanyak 190 orang yang mengikuti seleksi dan yang lulus seleksi sebanyak 113 orang • Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN: Total usulan KP yang ditindaklanjuti sebanyak 876 orang dari target 1.050 orang (usulan KP periode april 2020 sebanyak 379 orang dan usulan KP periode oktober 2020 sebanyak 497 orang • Pengolaan Pensiun dan Adminstrasi ASN lainnya: Terealisasi 76 orang dari 50 orang target, pensiun karena Atas Permintaan Sendiri dan Meninggal Dunia tidak dapat di prediksi • Penempatan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana: Dari total target 384 orang, terealisasi 283 orang ASN yang di tempatkan dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ, terkait Pilkada Serentak bahwa Penggantian dan Pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional harus dengan persetujuan tertulis KEMENDAGRI disamping itu oordinasi dan Pengusulan Izin terhambah karena Wabah Covid-19 • Seleksi Jabatan Tinggi Pratama: Masih belum ada hasil Seleksi Jabatan Tahun 2019 disebabkan Koordinasi terhambat karena Wabah COVID-19 (berdasarkan hasil koordinasi di PUSLATBANG KMP Makassar, bahwa hasil Assessment untuk 3 (tiga) JPT Pratama yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan telah selesai, sisa menunggu perampungan tanda tangan dari TIM PANSEL) • Penempatan Jabatan Struktural: Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.273/487/SJ, terkait Pilkada Serentak bahwa penggantian dan pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional harus dengan persetujuan tertulis KEMENDAGRI (Sementara menunggu Izin MENDAGRI atas usulan penggantian Pejabat Struktural). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Barang dibayarkan sesuai dengan hasil penawaran/negosiasi harga dari pihak ke-3 • Seleksi Penerimaan Calon PNS: Anggaran yang tersisa adalah biaya makan minum kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah. Biaya makan minum yang disediakan untuk 5 hari dan pelaksanaan hanya 2 hari, begitu juga dengan perjalanan dinas daerah yang disediakan untuk 7 hari sedangkan yang digunakan hanya 5 hari. perjalanan dinas luar daerah tidak dapat digunakan semua karena penetapan NIP tahun 2020 menggunakan sistem terpadu • Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS: Anggaran yang disediakan untuk mengantar tembusan SK penjatuhan Hukuman Disiplin (Netralitas PNS), karena surat keputusan tersebut tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun • Seleksi Penerimaan PPPK: Anggaran perjalnana dinas yang disiapkan untuk pengurusan nomor Induk tidak dapat digunakan karena pada akhir triwulan masih dalam proses penginputan dan kelengkapan berkas PPPK • Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai: Anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai masih ada tersisa karena Pengurusan Karis, Karsu dan Karpeg diproses sesuai usulan yang masuk dan untuk pemberian penghargaan Satya Lancana periode 2019/2020 telah diserahkan pada malam ramah tamah Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020 yang berjumlah 443 orang • Seleksi Jabatan Tinggi Pratama: Masih belum ada hasil Seleksi Jabatan Tahun 2019 disebabkan Koordinasi terhambat karena Wabah COVID-19 (berdasarkan hasil koordinasi di PUSLATBANG KMP Makassar, bahwa hasil Assessment untuk 3 (tiga) JPT Pratama yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan telah selesai, sisa menunggu perampungan tanda tangan dari TIM PANSEL) • Penempatan Jabatan Struktural: Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.273/487/SJ, terkait Pilkada Serentak bahwa penggantian dan pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional harus dengan persetujuan tertulis KEMENDAGRI (Sementara menunggu Izin MENDAGRI atas usulan penggantian Pejabat Struktural).

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil RKPD kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

2.2.4 Kesimpulan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2020, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kinerja kedepan adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian antara jumlah program dalam APBD Tahun 2020 dengan RKPD Tahun 2020. Sebagian besar eliminasi program dan kegiatan disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemic covid -19;
2. Tingkat Keselarasan jumlah anggaran APBD Tahun 2020 dengan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur dikategorikan kurang baik, karena masih ada selisih jumlah anggaran yang cukup besar antara RKPD dan APBD setelah perubahan sebesar Rp85.794.285.127,18. Hal ini refocusing anggaran untuk penanganan pandemic covid -19;
3. Berdasarkan laporan realisasi anggaran masing-masing OPD secara total persentase daya serap sampai dengan Triwulan IV mencapai **96,49%**, sehingga capaian ini dalam kategori **“Sangat Tinggi”**.
4. Jika mengacu Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV berada pada kategori **“Sangat Tinggi”** dengan nilai **94,62%**.

2.2.5 Rekomendasi Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah mengoptimalkan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga lebih dini mendeteksi permasalahan yang timbul dan mencari jalan keluarnya

2. Pengendalian dan evaluasi diharapkan mampu memberi umpan balik terhadap perbaikan kinerja organisasi. Olehnya itu, diharapkan semua level memahami indikator kinerja masing-masing
3. Rencana Kas dijadikan sebagai acuan untuk memantau realisasi keuangan
4. Mobilisasi sumber daya aparatur yang lebih terarah, tepat jumlah dan tepat mutu sehingga mengakselerasi pembangunan daerah, *the right man on the right place*.
5. Tim/lembaga/entitas/forum yang dibentuk baik ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka akselerasi pembangunan daerah, agar di optimalkan, dibina dan dikembangkan.
6. Data/informasi yang sifatnya sektoral dimutakhirkan untuk merespon cepat terhadap kebutuhan. Pengelola Data perangkat daerah harus dioptimalkan dan tentunya didukung oleh masing-masing bidang.
7. Dokumen perencanaan yang telah dibuat (rencana induk, master plan, blue print, grand design dan sejenisnya) dievaluasi kembali, apakah rekomendasinya masih relevan dengan situasi dan kondisi saat ini.
8. Inovasi daerah harus terus ditumbuh-kembangkan. Pembinaan dan pengembangan Inovasi daerah adalah keniscayaan.
9. Diperlukan komitmen, sinergitas dan kolaborasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi
10. Adanya kepedulian dari semua pihak khususnya pengampu program dan kegiatan agar target indikator kinerja dilakukan penyesuaian saat penyusunan dokumen perubahan rencana kerja perangkat daerah dan perubahan rencana kerja anggaran

Setelah menguraikan deskripsi sub-bab ini dicantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan berdasarkan format Tabel T-C.permenddagri 86 Tahun 2017 Sebagaimana terlampir pada **Daftar Lampiran RKPD Tahun 2022 kabupaten Luwu Timur** pada Tabel 2.330 yang merupakan satu kesatuan dari dokumen RKPD Tahun 2022

2.2.6 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2.331 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian SPM				
				2016	2017	2018	2019	2020
PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Dasar							
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs)	100	%	NA	NA	NA	84,99	88,19
2	Pendidikan Kesetaraan							
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	%	NA	NA	NA	75,72	51,98
3	Pendidikan Anak Usia Dini							
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100	%	NA	NA	NA	44,32	62,73
KESEHATAN								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	%	NA	NA	NA	97,05	88,34
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	%	NA	NA	NA	92,42	92,76
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	%	NA	NA	NA	96,40	96,23
4	Pelayanan Kesehatan Balita							
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	86,07	69,31
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar							
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas	100	%	NA	NA	NA	100	NA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian SPM				
				2016	2017	2018	2019	2020
	1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar							
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif							
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	44,02	23,50
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut							
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	81,26	71,84
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	30,27	28,70
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus							
	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	67,05	29,72
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	41,44	41,97
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB							
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV							
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	100	100
PEKERJAAN UMUM								
1	Penyediaan kebutuhan pokok Air minum							
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari).	100	%	NA	NA	NA	45,90	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian SPM				
				2016	2017	2018	2019	2020
	1). Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	100	%					57,48
	2). Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	100	%					31,93
2	Penyediaan pengelolaan air limbah domestic							
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)	100	%	NA	NA	NA	76,07	
	1.Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Dasar	100	%					97,91
	2. Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses aman	100	%					7,31
	PERUMAHAN RAKYAT							
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten							
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	NA	NA	NA	100	NA
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah							
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	%	NA	NA	NA	NA	NA
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	%	NA	NA	NA	100	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	NA	NA	NA	NA	18,05
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	NA	NA	NA	NA	14,41
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	NA	NA	NA	NA	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan	100	%	NA	NA	NA	100	100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian SPM				
				2016	2017	2018	2019	2020
	dan Evakuasi Korban Kebakaran							
	SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti							
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	NA	NA	NA	100	95
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti							
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	NA	NA	NA	100	50
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti							
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	NA	NA	NA	100	97
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti							
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	NA	NA	NA	NA	NA
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten							
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	%	NA	NA	NA	NA	184

2.2.7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDG) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/ SDGs telah di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/ SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/ MDGs) yang merupakan komitmen global dan Nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan;

Upaya pencapaian TPB/ SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten. Target-target SDGs ditingkat Kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2020 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan mencapai target Nasional sejumlah 17 Tujuan (Goals) sejumlah 75 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten sejumlah 220 indikator, namun untuk Kabupaten Luwu Timur sendiri telah melaksanakan sekitar 120 indikator dari berbagai OPD yang terkait. Capaian target indikator 17 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 332 Pencapaian Indikator (TPB/SDGs) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN				
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN				
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.				
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DINAS SOSIAL & P3A	%	7.26
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	75.00
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	100
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro				
1.4.1.(a)	Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan .	Dinas Kesehatan	%	90.00
1.4.1.(b)	Persentase Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	50
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	77,21
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	81.92%
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	95,58
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	80.71
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	67.59
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik PLN dan Bukan PLN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	80
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	PM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
1.5.1.(a)	Jumlah Lokasi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	1
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	342,370,000
1.5.3*	Dokumen Strategi pengurangan resiko bencana (PRB) Tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0
1.a.2*	Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial)	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	27.01
TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN				
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN				
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.				
2.1.1*	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (Prevalence of undernourishment)	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	%	5.71
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	%	12,69
2.1.2*	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat berdasarkan pada.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	%	8,66
2.1.2.(a)	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Dibawah 1400 kkal/kapita/hari	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	%	12,69
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.				
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	9.99
2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	%	9.99
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	%	1
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	%	8.67
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	%	74.92
2.2.2.(c)	Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	%	89.7
Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.				
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian		PM
TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA				
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA				
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.				
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	%	87.99
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	%	90.00
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses	Dinas Kesehatan	%	90.00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
	melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.			
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.				
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	%	1.6
3.2.2*	Angka kematian neonatal(AKN) Per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	5.2
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	PER 100.000 PENDUDUK	7.99
3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	92
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.				
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	<1
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per 100.000 pddk	70
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	per 1000 org	<1
3.3.3.(a)	Jumlah Kecamatan Yang mencapai eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan	Kec	11
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	%	80
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi terhadap penyakit Tropis Yang terabaikan	Dinas Kesehatan	orang	0
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan		PM
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan		PM
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.				
3.4.1.(a)	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	PM
3.4.1.(b)	Prevalensi Tekanan Darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	PM
3.4.1.(c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk umur 18 Tahun	Dinas Kesehatan	%	PM
3.4.2*	Angka Kematian (insidens rate) Akibat Bunuh Diri	Dinas Kesehatan	%	PM
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	%	0
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.				
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	SEKOLAH	PM
3.5.2*	Konsumsi Alkohol (Liter Perkapita) Oleh penduduk Umur 15 tahun dalam satu tahun.	Dinas Kesehatan	liter per kapita	PM
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.				
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15 -49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	77,21
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	77,21
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	24,55

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
3.7.2*	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-49 tahun (Age Specific Fertiliti)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	11,36
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	2,76
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.				
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	PM
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	%	75.00
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	75.00
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.				
3.9.3.(a)	Proporsi Kematian Akibat Keracunan	Dinas Kesehatan	%	0
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.				
3.a.1*	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 15 tahun	Dinas Kesehatan		PM
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.				
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	90
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.				
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	2.63
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS				
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA				
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.				
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan	%	100
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	31,80
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	48,00
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	102.3
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	103.02
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	7.88
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan penguasaan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.				
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	%	39.02
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.				
4.4.1*	proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi .	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.				
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan / Laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/MTS/Sederajat; (3) SMA/SMK/MA/Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi	Dinas Pendidikan	%	1:1
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.				
4.6.1.(a)	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 tahun	Dinas Pendidikan	%	95.07
4.6.1.(b)	persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan	%	94.06
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.				
4.a.1*	Proporsi Sekolah Dengan Akses ke : (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran (c) komputer untuk tujuan pengajaran (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa	Dinas Pendidikan	%	70
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.				
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan	%	TK : 63.00 SD : 30.00 SMP : 50.00
TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER				
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN				
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.				
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	0
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.				
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	30
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.				
5.3.1.(b)	Angka Kelahiran Pada Perempuan umur 15-19 tahun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	83,46%
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.				
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	3.33
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang	16.25
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.				
5.6.1.(a)	unmet need KB (kebutuhan keluarga berencana/ KB yang terpenuhi)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	11,76

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
5.6.1. (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	88,95
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.				
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Orang	PM
TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK				
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA				
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.				
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	81.92%
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	23,50
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.				
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	79.71
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	127
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	127
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten	0
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RT	0
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.				
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten	0
6.3.1. (b)	Proporsi Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan Lumpur Tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RT	0
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Dinas Lingkungan Hidup		
	1. Matano		Pij	-
	2. Old Camp		Pij	-
	3. Towuti Saumil		Pij	-
	4. Sumasang		Pij	-
	5. Towuti Dermaga		Pij	-
6.3.2.(b)	Kualitas Air sungai sebagai Sumber Air Baku	Dinas Lingkungan Hidup		
	1. Sungai Angkona		Pij	-
	2. Sungai Kalaena		Pij	-
	3. Sungai Lagego		Pij	-
	4. Sungai Malili		Pij	-
	5. Sungai Tomoni		Pij	-
	6. Sungai Wasuponda		Pij	-
	7. Sungai Mantadulu		Pij	-
	8. Sungai Mantabuntu		Pij	-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI				
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA				
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.				
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Juta	1.62%
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	81.72
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.				
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	33.56
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	33.56
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Perdagangan koperasi dan UKM	%	40%
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.				
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rupiah	55,500
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	2.58
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.				
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	75.00
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.				
8.9.1*	Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	%	PM
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Orang	20
8.9.1.(b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Orang	20,000
8.9.1. (c)	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	%	0.28
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.				
8.10.1*	Jumlah Kantor Bank dan ATM Per 100.000 penduduk Dewasa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	JKB: 0,014 JATM: 22,96

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
8.10.1.(a)	Rata-Rata Jarak lembaga keuangan (BANK umum)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	km	5
8.10.1.(b)	Proporsi Kredit UMKM terhadap total Kredit	Dinas Perdagangan koperasi dan UKM	%	70
TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR				
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI				
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.				
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	9
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.				
9.2.1*	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB Dan perkapita.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM
9.2.1.(a)	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM
9.2.2*	Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.				
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	4.14
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.				
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	PM
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.				
9.c.1*	Proporsi Penduduk Yang Terlayani mobile Broadband	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki Telepone Genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM
9.c.1.(b)	Proporsi Individu Yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN				
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA				
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.				
10.1.1*	Koefisien Gni	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penduduk	<0,4
10.1.1.(a)	Persentase Penduduk Yang Hidup Dibawah Garis kemiskinan Nasional, menurut jenis	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	7.26
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Yang Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	PM
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	PM
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	7.26
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.				
10.4.1.(b)	Proporsi Peserta Program jaminan Sosial Bidang Ketenaga Kerjaan	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	100
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN				
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.				
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	23
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.				
11.5.1*	Jumlah Korban meninggal, Hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	PM
11.5.1.(a)	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Skor	202.00
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	PM
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.				
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	%	15.5
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.				
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0
TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB				
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN				
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.				
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	-
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.				
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	-
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.				
12.6.1.(a)	Jumlah Perusahaan Yang menetapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Perusahaan	1
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM				
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA				
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.				
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
13.1.2*	Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena dampak Bencana per 100.000 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	PM
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH				
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan				
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.				
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan Pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kantor Kesatuan Bangsa dan Poilitik	Kasus	1
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik pe 100.000 penduduk	Kantor Kesatuan Bangsa dan Poilitik	%	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Poilitik	%	0
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	kesatuan bangsa poilitik	%	0
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.				
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat		PM
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.				
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelola Keuangan Daerah		87678.16577
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	%	100
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Sekretariat Daerah	%	100
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	%	100
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	%	100
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.				
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	3.33
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	16.00
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.				
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	75
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	32.
			Jiwa	96.76
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jiwa	293,978
			%	67.59
			Jiwa	74,2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
			Jiwa	109,808
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.				
16.10.2.(c)	Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Untuk mengukur Kualitas PPID dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Orang	0
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN				
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.				
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	4.80
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	4.80
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.				
17.6.2.(b)	Tingkat Penetrasi Akses Tetap Pita Lebar	Dinas Komunikasi dan Informatika	KK	belum terjangkau
17.6.2.(c)	Proporsi Penduduk Yang terlayani Mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	orang	No Data
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.				
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	24% (68.229)
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.				
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	89.94
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	89.94
17.18.1.(c)	Jumlah Metadata Kegiatan Statistik dasar, Sektoral Dan Khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		PM
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	28.00
Target 17.9 : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.				
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	96.7
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengunjung	5,888
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Badan Perencanaan Penelitian dan	%	89.94

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian (2020)
		Pengembangan Daerah		

2.2.8 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.333 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
2	Pertumbuhan PDRB	1,58	3,07	3,39	1,17	1,46		
3	Laju inflasi	2,74	3,95	4,19	1,91	1,21		
4	PDRB per kapita Berlaku	Rp 61.723,60	Rp 63.712,89	Rp 69.409,01	Rp 70.057,09	Rp 70.495,47		
5	PDRB per kapita Konstan	Rp 52.736,52	Rp 53.213,27	Rp 53.902,71	Rp 53.468,10	Rp 53.230,28		
6	Indeks Gini	0,434	0,411	0,398	0,387	0,405		
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	92,48%	92,34%	92,77%	93,02%	93,15%		
8	Indeks Pembangunan Manusia	70,95	71,46	72,16	72,80	73,22		
9	Angka melek huruf	94,06	93,72	94,8	95,72	95,30		
10	Angka rata-rata lama sekolah	7,88	8,20	8,45	8,54	8,80		
11	Angka usia harapan hidup	69,71	69,79	70,03	70,38	70,53		
	Persentase balita gizi buruk	0,0045	0,0045	0,0044	0,01	0,02		
	Prevalensi balita gizi kurang	0,23	1,4	2,15	2,18	2,02		
	Cakupan desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100		
	Angka partisipasi angkatan kerja	138,367	138,367	150,700	143,700	157,500		
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,03%	70,03%	71,21%	67,48%	72,36%		
	Tingkat pengangguran terbuka	2,58%	2,58%	2,18%	3,81%	4,46%		
	Rasio penduduk yang bekerja	97,42%	97,42%	97,18%	96,19%	95,54%		
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,25%	0,49%	1,06%	0,88%	0,60%		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,19	78,46	81,81	83,43	84,31		
	Persentase PAD terhadap pendapatan	12,52	18,67	18,06	20,71	22,76		
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	-		
	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	89,7	92,2	97,5	95,8	92		
	Penguatan cadangan pangan	12205	3,000	3,000	3,000	3,000		
	Produksi sektor perkebunan							
	Kakao	0,83	0,87	0,91	1,01	0,74		
	Kelapa Sawit	20,46	20,58	21	22,7	12,46		
	lada							
A29SPEK DAYA SAING DAERAH								
	angka3 kriminalitas	0,18	0,06	0,08	0,03	-		
	rasio ketergantungan	50,67	49,91	51,02	50,41	50,47		
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
	Pendidikan							
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	38,39	38,39	39,79	45,71	46,11		
	Angka Partisipasi Kasar							
	Angka Pendidikan yang ditamatkan							
	Angka Partisipasi Murni							
	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/Paket A	99,18	99,02	92,03	92,39	92,54		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	93.47	80.8	95.73	95.97	95.99		
	Angka Partisipasi Sekolah							
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99.69	95.26	91.93	95.93	95.95		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	98.76	96.55	95.51	98.37	98.49		
	Angka Putus Sekolah :							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0.12	0.12	0.1	0.1	0.07		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	0.32	0.32	0.23	0.21	0.2		
	Angka Kelulusan:							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99,62	99,62	99,55	99,75		
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99,20	99,28	98,82	99,50		
	Angka Melanjutkan							
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,2	89,81	95,74	95,75	95,76		
	Fasilitas Pendidikan:							
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	79,27	78,04	78,35	71,78	72,27		
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	83,46	82,34	78,85	77	78,51		
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	48,18	50,17	48,12	48,50	48,23		
	rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	397	406	376	363	399		
	proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	60.46	103.46	96.84	97.21	92.99		
	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	99,56%	99,58%	99,78%	99,84%	99,37%		
	penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	54.729	55.497	56.624	57.591	57.591		
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1477	1450	1464	1552	1548		
	Kesehatan							
	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7.56	6.11	7.34	8.03	8.16		
	angka kelangsungan hidup bayi	92.45	93.89	92.67	91.98	91.85		
	angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	1.76	0.87	1.40	0.89	0.72		
	angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	5.27	5.24	5.07	0.06	4.61		
	angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	87.89	69.87	87.35	142.67	108.74		
	rasio posyandu per satuan balita	12.13	12.04	10.82	11.08	11.16		
	rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk	0.28	0.28	0.29	0.28	0.33		
	rasio rumah sakit per satuan penduduk	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007		
	rasio dokter per satuan penduduk	16.03	13.40	13.23	14.51	14.24		
	rasio tenaga medis per satuan penduduk	29.21	29.21	26.44	33.16	33.16		
	cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	82.49	81.68	81.68	83.97	35.88		
	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94.07	95.73	95.24	92.9	92.76		
	cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96	96	92.13	99.21	88.98		
	cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100		
	persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	98.73	95.51	34.84	105.89	96.85		
	non polio AFP rate per 100,000 penduduk	2.21	4.38	4.44	3.31	4.45		
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	9.08	8.88	0.3	0.2	7.64		
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	93,70	111,16	146,69	148,15	103,31		
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,0012	0,0011	0,00044	0,00052	0,00011		
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	72,25	87,91	93,29	96,30	67,09		
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	93,15	96,56	97,44	97,07	97,74		
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100		
	Penderita diare yang ditangani	192,76	172,05	156,49	159,15	99,79		
	Angka kejadian Malaria	<1	<1	<1	<1	0		
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<0,007	<0,024	<0,027	<0,013	<0,013		
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	4,13	9,64	24,19	31,61	0,19		
	Cakupan kunjungan bayi	97,95	99,02	99,44	97,71	88,52		
	Cakupan puskesmas	136,36	145,45	154,55	154,55	154,55		
	Cakupan pembantu puskesmas	47,24	48,82	50,39	57,48	57,48		
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95,02	96,50	95,53	97,05	88,34		
	Cakupan pelayanan nifas	92,61	95,73	93,13	92,37	92,71		
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	49,88	30,08	54,97	54,81	46,78		
	Cakupan pelayanan anak balita	88,53	90,09	91,41	88,26	66,39		
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	87,8	90,3	96	97	97,7		
	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	99,82	100	0		
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	132,35	124,45	132,29	130,79	74,30		
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100		
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Pekerjaan Umum							
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,591	0,615	0,624	0,396	0,400		
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,067	0,0065	0,0064	0,0062	0,0062		
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	62,69	61,45	62,37	39,59	40,00		
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,113	0,114	0,114	0,133	0,133		
	Persentase rumah tinggal bersantasi	70,34	87,86	93,88	97,43	97,91		
	Persentase drainase dalam kondisi baik	80	80	83,19	84,93	84,64		
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	43,37	45,09	47,37	50,34	50,72		
	Rasio Jaringan Irigasi	3,085	4,621	5,516	6,844	7,482		
	Persentase penduduk berakses air minum	32	36	47,55	49,59	57,48		
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	79,15	82,05	82,00	89,41	-		
	Persentase areal kawasan kumuh perkotaan	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04		
	Penataan Ruang:							
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,11	0,12	0,13	0,14	0,13		
	Ruang publik yang berubah peruntukannya	8,86	9,05	9,13	9,26	9,36		

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Rasio rumah layak huni	18.83	16.81	16.94	17.43	17.74		
	Rasio permukiman layak huni	71.94	74.95	74.98	74.98	75.74		
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	81.69	80.81	82.46	84.56	86.65		
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	47.91	48.52	51.71	54.92	58.12		
	Persentase permukiman yang tertata	71.94	74.95	74.98	74.98	75.74		
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04		
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	5,02	5,21	5,22	2,24	2,24		
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	18,31	19,19	16,41	15,06	13,35		
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	44,88	46,46	53,54	59,06	67,02		
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	11.33	10.62	9.32	12.7	9,13		
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	61.82	63.33	74.55	100	100		
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7.63	12.71	15.26	20.34	25,64		
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	62.16	76.6	73.03	75.15	91.18		
	Persentase Penegakan PERDA	82.35	82.93	77.55	78.43	84.61		
	Sosial							
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0	38.23	42.15	3.57	30.9		
	Persentase PMKS yang tertangani	0	38.81	36.94	36.59	26.39		
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		35.06	34.91	32.2	28.32		
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0	0	62.5	77.78	100		
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0	0	0	44.44	70		
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	0	100	100	100	100		
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0	100	100	100	100		
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0	9.28	8.24	7.71	7.39		
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar Tenaga Kerja							
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	7.25%	9.09%	11.76%	11.38%	22.82%		
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10.00%	20.00%	16.67%	0	8.82%		
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	23.01%	26.72%	42.40%	37.31%	45.87%		
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100%	100%	100%	100%	100%		
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0		
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70.97%	73.33%	73.42%	73.83	75.75%		

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDA R	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melamp ai (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	-	100%	100%	100%	100%		
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	-	100%	100%	100%	100%		
	Rasio lulusan S1/S2/S3	374.08	394.15	424.77	448.31	483.81		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0.00	70.51	70.04	75.72	76.02		
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	3.33	3.33	3.33	3.33	6.67		
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0.00	29.49	29.96	24.28	23.98		
	Rasio KDRT	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03		
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0	6.96	7.03	11.83	12.44		
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	0.00	100	100	100	100		
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	0.00	100	100	100	100		
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.00	67	90	89	94		
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0.00	67	90	89	94		
	Pangan							
	Ketersediaan pangan utama	52.9	56.9	71.11	68.55	69.61		
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	5,947.42	3,457.15	4,383.08	3,731.26	3,258.86		
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	61.5	70	69.2	55.5	0		
	Pertanahan							
	Persentase luas lahan bersertifikat	0	37.65	38.28	38.29	39.65		
	Penyelesaian kasus tanah Negara	83.33	100	100	100	100		
	Penyelesaian izin lokasi	100	0	0	100	100		
	Lingkungan Hidup							
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0		
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0	0	0	0	0		
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	1	0	0	1	0		
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	0	46.25	50	53.8	0		
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	0	50.08	50.9	51.6	0		
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	0	70.24	70.24	70.24	0		
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	0	50	50	50	0		
	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0		

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDA R	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melamp au (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	1	0		
	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	1	3		
	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0	1	3		
	Penetapan hak MHA	0	0	0	1	0		
	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	1	1	1	1	0		
	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	0	4	1	2	0		
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	1	1	1	1	0		
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	0	1	1	0	0		
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	3	5	5	13	0		
	Timbulan sampah yang ditangani	0	12.118	19.345	25.915	22.535,10		
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0	5,09	11,46	11,06	5,34		
	Persentase cakupan area pelayanan	0	0	0	0	0		
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	15,5	30,04	47,02	60,41	51,51		
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	1	1	1	1	0		
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan	0	0	0	0	0		
	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.90	0.91	0.96	0.97	1.00		
	Rasio bayi berakte kelahiran	0.90	0.92	0.92	0.93	0.96		
	Rasio pasangan berakte menikah	0.16	0.19	0.24	0.33	0.41		
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada		
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah		
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	89.78	91.31	95.68	96.86	99.71		
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	89.79	92.02	92.36	93.48	95.54		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100		
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	135	135	135	135	135		
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	340	350	365	365	365		
	Persentase LPM Berprestasi	1	2	2	2	2		
	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	139		
	Persentase Posyandu aktif	265	267	270	273	273		
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.05	1.66	1.63	1.99	1.99		
	Total Fertility Rate (TFR)	2.76	2.31	2.21	2.21	2.21		
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0	31.25	56.25	56.25	56.25		

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	1001	100	100	100	100		
	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	1		
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	4	4	4		
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	0	0	1	1		
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	2	2	2	2		
	Ratio Akseptor KB	77.21	74.49	71.53	73.89	72.47		
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	77.21	74.49	71.53	73.89	72.47		
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	69.7%	69.4%	69.2%	67.7	67.7		
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Tidak Melakukan Pendataan	2.28	2.03	2.98	Tidak Melaksanakan Pendataan (pandemi COVID 19)		
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	11.76	13.23	14.85	14.18	15.61		
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24.55	23.54	23.86	24.79%	24.98		
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	29.55	34.22	37.21	26.66	37.98		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	88.41	86.91	84.73	84.04	79.90		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	81.71	82.47	82.35	82.11	85.33		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	88.69	85.54	85.26	81.13	81.19		
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0	9.09	9.09	9.09		
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	418.18	445.45	418.18	445.55	436.36		
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100		
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	1.03	0.94	0.88	0.86	0.86		
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100		
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100		
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap des	Tidak Melakukan Pendataan	100	100	100	Tidak Melaksanakan Pendataan (COVID 19)		
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0	0	0			
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	57.99	37.18	52.25	62.82	71.13		
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	21.27	21.05	22.76	25.29	21.77		
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	18	18	19	19	19		
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0.0068	0.0088	0.0058	0.0061	0.0058		
	Perhubungan							
	jumlah arus penumpang angkutan umum	259.867	273.615	300.227	376.958	290.241		
	Rasio ijin trayek	0.050	0.014	0.009	0.014	0.011		
	Jumlah uji kir angkutan umum	2022	2097	2302	2405	2640		
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	13	13	14	15	15		
	Persentase Layanan angkutan darat	0.263	0.266	0.227	0.124	0.183		
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	16.55	14.13	10.64	9.25	5.95		
	Pemasangan Rambu -rambu	100	100	100	100	100		
	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	77,97	77,37	73,34	71,29	67,31		
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	259.867	273.615	300.227	376.958	290.241		
	jumlah orang/barang melalui dermaga/bendara/terminal per tahun	300.227	376.958	290.241	290.241	253.796		
		249867	273615	300227	376958	253796		
		250526	230750	222385	290241	139023		
	Komunikasi dan Informatika							
	Persentasi penduduk yang menggunakan HP/telpon	-	80.74	82.44	83.73	85.14		
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	29.13	33.07	43.93	53.44		
	proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	20.23	82.44	83.73	85.14		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	Persentase Koperasi aktif	58.46	73.25	75.47	75.63	75,75		
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100		
	persentase BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100		
	Persentase Usaha Mikro dan kecil	94,84	94,41	94,42	94,41	95,28		
	Penanaman Modal							
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	20	35	39	37	26		
	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Rp. 498.800.000	Rp. 452.245.000.000	Rp. 516.916.000.000	Rp. 598.558.569.406	Rp. 1.636.201.132.539		
	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	Rp. 498.800.000	Rp.235.225.507.125	Rp.396.134.523.000	Rp.6.120.947.250.000	Rp.2.185.879.358.954		
	Rasio daya serap tenaga Kerja	208,5	367,3	202,8	162,3	278,9		
	kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	121,81	90,67	128,51	135,45	32,19		

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Kepemudaan dan Olahraga							
	persentase wirausaha muda	data tidak tersedia	data tidak tersedia	19	19	19		
	Cakupan pembinaan olahraga	24	24	30	48	0		
	Cakupan pelatih yang bersertifikat	data tidak tersedia	data tidak tersedia	20	40	40		
	Cakupan pembinaan atlet muda	0	40	40	40	0		
	Jumlah atlet berprestasi	data tidak tersedia	27	47	64	30		
	Jumlah prestasi olahraga	data tidak tersedia	5	5	6	0		
	Statistik							
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada		
	Buku "Kabupaten dalam Angka"	ada	ada	ada	ada	ada		
	Buku "PDRB"	ada	ada	ada	ada	ada		
	Persandian							
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	-	100	100	100	100		
	Kebudayaan							
	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	1	2	2	2	0		
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	6	10	13	15		
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	15	29	47	47		
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	0	2	3	3		
	Perpustakaan							
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0.49	0.78	0.72	0.73	0.05		
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0.48	0.30	0.39	0.39	0.39		
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.28	0.29	1.06	1.1	1.09		
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	10,131	19,350	18,010	13,112	11,962		
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	9,500	8,400	13,363	13,363	13,463		
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	100	100	100	100	100		
	Kearsipan							
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0	20.51	48.72	58.97	87.18		
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	2	2	3	4		
	Layanan Urusan Pilihan							
	Pariwisata							
	Kunjungan wisata	13,058	28,943	30,390	32,950	32,457		
	Lama kunjungan wisata	0	2	2	3	3		
	PAD sektor pariwisata	0.31	0.36	0.37	0.45	0.41		
	Pertanian							
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	7.16	7.21	7.44	7	7.1		
	Cakupan bina kelompok petani	0	0	0.06	0.06	0.06		
	Energi dan Sumber Daya Mineral							
	Persentase rumah tangga pengguna listrik	95,82	94,89	97,07	99,8	98,91		
	Perdagangan							
	Ekspor Bersih Perdagangan	468.926.145,86	475.387.123,47	658.612.319,17	660.572.391,96	773.511.973,67		
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	65.25	56.57	13.91	18.20	29.02		
	Perindustrian							
	Cakupan bina kelompok pengrajin	5.51%	5.51%	6.34%	6.47%	7.04%		
	Transmigrasi							
	Persentase transmigrasi swakarsa	Tidak ada Penempatan Transmigrasi Swakarsa Tahun 2016-2020						
	Kelautan dan Perikanan							
	Produksi perikanan	99.98	100	100	100	101		
	Konsumsi ikan	101	100	100	100	100		
	Cakupan bina kelompok nelayan	5.73	8,80	19.53	8.46	12.68		

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Produksi perikanan kelompok nelayan	40.69	37.61	40.21	46.92	37.58		
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	1.21	1.22	1.25	1.25	1.25		
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0.30	0.30	0.30	0.23	0.23		
	Penunjang Urusan							
	Perencanaan Pembangunan							
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	-	-	-	-		
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	-	Ada	-	-		
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	-	-		
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	88,80	97,93	98,73	97,49	97,29		
	Penjabaran Konsistensi Program RKPMD kedalam APBD	94,46	94,59	95,49	93,15	93,34		
	Keuangan							
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	-		
	Persentase SILPA	7.52	10.11	6.6	2.95			
	Persentase SILPA terhadap APBD	11.35	7.41	3.13	1.72	1.72		
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	24.07	21.06	22.21	20.54	20.54		
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	16.04	18.03	21.39	20.71	20.71		
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	60,34/39,66	58,70/41,30	59,38/40,62	58,28/43,72	56,28/43,72		
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	9515864320.96	9349409599.00	14604670000.00	14009007471.00	17262101969.00		
	Penetapan APBD	Tepat Waktu (Perda Nomor 7 Tahun 2016, tentang perubahan APBD Tanggal 25 Oktober 2016)	Tepat Waktu (Perda Nomor 6 Tahun 2017, tentang perubahan APBD tanggal 23 Desember 2017)	Tepat Waktu (Perda Nomor 10 Tahun 2018, tentang perubahan APBD Tanggal 15 oktober 2018)	Tepat Waktu (Perda Nomor 3 Tahun 2019, tentang perubahan APBD Tanggal 15 oktober 2018)	Tepat Waktu (Perda Nomor 9 Tahun 2020, tentang perubahan APBD Tanggal 19 Oktober 2020)		
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari	4 Hari		
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15.06%	37.81%	58.35%	74.15%	82.61%		
	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	56.05%	64.19%	80.02%	84.18%	88.07%		
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26 Orang	23 Orang	27 Orang	30 Orang	27 Orang		
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1076 Orang	755 Orang	665 Orang	802 Orang	787 Orang		
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2415 Orang	2654 Orang	2679 Orang	2640 Orang	2572 Orang		
	Penelitian dan Pengembangan							
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Penerapan SIDA	N/A	N/A	N/A	N/A	16,67		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDA R	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melamp ai (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	N/A	N/A	N/A	N/A	23,08		
	Pengawasan							
	Persentase tindak lanjut temuan	83.37	89.87	80.44	73.51	23.16		
	Persentase pelanggaran pegawai	0	0	0	0	1		
	Jumlah temuan BPK	9	7	6	23	8		

2.3 Permasalahan Pembangunan Pembangunan Daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 merupakan RKPD transisi dan merupakan pelaksanaan tahun pertama memasuki masa periode RPJMD 2021-2026. Pelaksanaan Pembangunan tahun 2022 sudah harus mengintegrasikan Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 yang mana saat ini masih dalam proses penyusunan, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan target pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Rumusan Permasalahan pembangunan kabupaten Luwu Timur tahun 2022 merupakan hasil identifikasi dan analisis gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah sampai dengan tahun 2020 yang dirangkum meliputi:

1. Kemiskinan Dan Taraf Hidup Masyarakat;

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur saat ini menempati peringkat keempat di Sulawesi Selatan (kota dan kabupaten) dengan nilai 72,16 (2018), 72,80 (2019) dan 73,22 (2020). Meskipun nilai IPM ini merupakan peringkat tertinggi di antara semua Kabupaten, namun tetap merupakan tantangan untuk mencapai tingkat kualitas manusia yang lebih tinggi. Masalah terkait peningkatan kualitas manusia adalah penguasaan pengetahuan yang diukur dengan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah; peluang berumur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup; dan daya

beli yang diukur dengan pengeluaran perkapita. Pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,80 tahun, angka harapan lama sekolah sebesar 12,83 tahun, angka harapan hidup sebesar 70,53 tahun dan pengeluaran perkapita sebesar Rp. 12.814 juta/orang/tahun. Meskipun IPM sudah di atas rata-rata Provinsi dan Nasional serta PDRB/kapita yang mencapai 70,50 juta/orang/tahun yang tergolong cukup tinggi, namun jika dihubungkan dengan angka kemiskinan sebagai salah satu indikator taraf hidup, persentase penduduk miskin masih cukup tinggi yakni 6,85% (20,82 ribu orang), dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 350.576/kapita/bulan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antar lapisan masyarakat (Gini Ratio = 0,405), sehingga di balik derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli yang cukup tinggi, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan porsinya terbilang masih cukup besar.

2. Pertumbuhan Perekonomian Daerah Yang Fluktuatif.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur berfluktuasi dalam lima tahun terakhir (3,39% pada tahun 2018 dan 1,46% pada tahun 2020). Ini berarti bahwa produktivitas sektor-sektor perekonomian yang umumnya berbasis sumberdaya alam, baik tambang maupun non tambang, belum terkelola dengan optimal. Aktivitas sektor pertanian dalam arti umum belum menghasilkan nilai tambah yang cukup untuk berkembangnya rantai pasok yang memberi nilai kepada pelaku yang lebih banyak, begitu pula dalam arti penyerapan tenaga kerja (tingkat pengangguran terbuka 4,46% pada tahun 2020). Perekonomian daerah juga ditandai oleh distribusi hasil nafkah cenderung timpang antar lapisan masyarakat, dimana gini ratio mencapai 0,405.

3. Belum Optimalnya Cakupan Dan Kualitas Infrastruktur Daerah

Pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan dalam mendukung koneksitas antar wilayah, baik dalam menunjang aliran barang untuk perekonomian daerah maupun dalam memperlancar pelayanan publik, masih bermasalah dalam hal pemeliharaan dan peningkatan kualitas. Dalam hal komunikasi dan informasi, infratraktur untuk menjamin akses internet pada seluruh sebaran wilayah belum terpenuhi semua, sementara hal ini sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek

pelayanan. Keterpenuhan prasarana dan sarana umum pada sejumlah kawasan pemukiman juga belum terpenuhi sesuai spatandar. Dalam pengelolaan sumberdaya air, infrastruktur irigasi serta pengelolaan sumberdaya air lainnya masih menghadapi tantangan.

4. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Memuaskan.

Pokok masalah adalah reformasi birokrasi melalui delapan area belum sepenuhnya mencapai target ideal. Akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan nilai SAKIP belum mencapai nilai tinggi, begitu pula dalam administrasi umum dan administrasi keuangan masih terdapat sejumlah temuan pengawas. Masalahnya adalah aplikasi teknologi informasi berbasis digital belum efektif dalam terwujudnya sistem yang mengintegrasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan kinerja. Pada aspek lain, penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) belum semuanya terpenuhi 100%. SPM berlaku untuk pelayanan dasar urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta sosial. Menurut PP 02/2018 dan Permendagri 100/2019, kinerja untuk pelayanan dengan SPM harus mencapai 100%. Akar masalahnya adalah belum akuratnya data tentang target penerima layanan SPM pada urusan terkait

5. Degradasi Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam.

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Luwu Timur cenderung membaik pada tahun 2020 yakni 86,87, ini meningkat dari nilai IKLH pada tahun 2018 (58,351) dan pada tahun 2019 (70,56). Namun demikian, tetap harus diantisipasi ancaman degradasi lingkungan, karena perbaikan kualitas lingkungan pada tahun 2020 kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya aktivitas manusia disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Salah satu masalah adalah degradasi tutupan lahan, yang akar masalahnya adalah berkurangnya luas hutan karena aktivitas manusia baik karena perambahan maupun karena ekspansi kegiatan pertanian. Kualitas lahan juga cenderung menurun karena praktek pertanian intensif yang menggunakan pupuk sintetis, meskipun di

daerah ini ada gerakan untuk kembali kepada pertanian organik. Akar masalah lainnya adalah semakin besarnya volume sampah dari aktivitas rumah tangga, pasar, rumah sakit, kawasan bangunan pelayanan public, sementara sistem pengelolaan sampah belum cukup canggih untuk menanganinya. Adanya perubahan iklim, terutama pergeseran musim dan fenomena kekeringan ataupun banjir, juga menjadi akar masalah terkait degradasi lingkungan.

6. Masih Adanya Potensi Gangguan Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

Masalah pokok adalah cukup besarnya angka kriminalitas dan gangguan ketenteraman serta ketertiban umum. Jumlah kejadian criminal biasa pada tahun 2020 adalah 225 kasus. Perkara perdata pada tahun 2020 sebanyak 147 kasus. Pelanggaran lalu lintas pada tahun 2020 sebanyak 1.141 kasus. Masalah yang menyebabkan kasus-kasus ini adalah kesadaran masyarakat atas norma hukum dan norma sosial yang belum memadai. Masalah yang juga perlu diantisipasi adalah potensi disharmoni sosial yang berpangkal pada cukup tingginya heterogenitas sosial masyarakat. Struktur sosial dalam masyarakat Kabupaten Luwu Timur disusun oleh berbagai kelompok sosial yang asul-usulnya berbeda, termasuk pada kawasan bekas transmigrasi. Bila kesenjangan sosial diantara mereka melebar dan itu berimpit dengan perbedaan etnis/suku maka potensi konflik sosial terbuka.

7. Tantangan Untuk Merawat Nilai-Nilai Agama Dan Budaya ditengah ere Transformasi Digital yang semakin berkembang.

Masyarakat Luwu Timur dikenal sebagai masyarakat yang beradab. Keberadaban ini bertumpu pada kesadaran terhadap pentingnya nilai-nilai agama dan budaya di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini perlu dilestarikan ditengah semakin berkembangnya era digitalisasi saat ini, tantangan tersebut perlu untuk segera disikapi dengan baik. Penguatan Nilai-nilai agama dan budaya tersebut tumbuh dan berkembang sejalan dengan keberagaman latar sosial masyarakat Luwu Timur. Daerah ini dihuni oleh berbagai pemeluk agama dan keyakinan. Juga mereka memiliki nilai-nilai budaya yang beragam. Perbedaan dan keberagaman

dimaksud memiliki tantangan tersendiri, dan sekaligus menjadi potensi bagi terciptanya masyarakat yang beragam dalam kesatuan. Dalam konteks inilah, maka upaya yang berkesinambungan dalam merawat nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Luwu Timur memiliki makna yang strategis. Fakta menunjukkan bahwa ketika keberagaman nilai-nilai agama dan budaya tersebut dirawat dengan baik, maka keberagaman ini menjadi kekuatan didalam mengatasi berbagai macam problem pembangunan

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Permasalahan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal;
- Penempatan tenaga pendidik (guru) belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara kawasan pedesaan dan perkotaan;
- Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 108,74 per seratus ribu kelahiran hidup pada tahun 2020, dan Angka Kematian bayi (AKB) sebesar 4,61 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2020;
- Masih meningkatnya kejadian balita gizi buruk pada tahun 2020 sebanyak 3 orang;
- Perlunya Peningkatan standar pelayanan Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat meningkatkan mutu secara berkesinambungan;

- Belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Luwu Timur;
- Keterbatasan akses pelayanan kesehatan rujukan karena minimnya ketersediaan pelayanan kesehatan Rujukan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

- Masih ada spesifikasi jalan belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- Belum lengkapnya data kondisi jalan dan jembatan;
- Besarnya cakupan layanan irigasi;
- Belum lengkapnya data kondisi sarpras irigasi;
- Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku;
- Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu sistem irigasi;
- Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase;
- Kesadaran masyarakat tentang prosedur dan pentingnya IMB masih kurang;
- Ketersediaan fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang;
- Sumber daya manusia pengelola sampah, limbah dan pertamanan publik serta kapasitas kelembagaan yang kurang memadai;
- Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan terpadu;
- Banyaknya penyedia layanan laboratorium konstruksi dan alat berat;
- Terbatasnya peralatan yang dimiliki dan Kualitas alat berat yang dimiliki kurang memadai.

b. Penataan Ruang

- Masih terbatasnya regulasi RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis;

- Belum tercapainya SPM bidang Penataan Ruang;
- Pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya
- Pengelolaan data tata ruang belum optimal;
- Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
- Belum jelasnya kebijakan insentif-desinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang;
- Belum optimalnya sistem informasi penataan ruang.
-

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- Masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog);
- Masih rendahnya alokasi anggaran bantuan sosial untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Keterbatasan pengembang yang memenuhi kriteria teknis program Bantuan PSU Perumahan Umum;
- Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah;
- Belum termanfaatkannya ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
- Terdapat kawasan dan permukiman kumuh di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan;
- Belum ditetapkannya kawasan kumuh dibawah 10 Ha, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Luwu Timur;
- Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidental yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
- Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah;
- Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik mobil damkar maupun APAR;
- Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran;
- Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran;
- Belum optimalnya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
- Masih banyaknya masyarakat di daerah rawan bencana dan belum optimalnya kapasitas masyarakat yang dapat menyebabkan risiko bencana tinggi;
- Belum optimalnya peran fasilitasi dan koordinasi pelayanan penanggulangan bencana;
- Penyeragaman kapasitas BPBD Kabupaten yang satu dengan yang lain.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Belum validnya data base Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga jumlah PPKS yang tertangani masih sangat terbatas;
- Belum termanfaatkannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam program penanggulangan kemiskinan oleh seluruh pihak;
- Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level.

2.3.2.2. Permasalahan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga melemahkan daya saing pada dunia kerja;
- Masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja;
- Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
- Terbatasnya akses sumber daya pembangunan karena pendekatan pembangunan pemberdayaan perempuan masih mengabaikan isu kesetaraan dan keadilan;
- Belum maksimalnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan;
- Ketersediaan data terpilah terbatas dan data terpilah belum menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan;
- Masih adanya kekerasan terhadap ibu dan anak dalam rumah tangga (KDRT).

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras;
- Harga bahan pangan masih fluktuatif;
- Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Belum teridentifikasinya seluruh tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Masih terjadinya perselisihan sengketa pertanahan milik Negara dan masyarakat;
- Sebagian besar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;
- Belum maksimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembuatan sertifikat tanah masyarakat.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- Masih terjadinya kerusakan lingkungan, berakibat pada peningkatan luasan lahan yang perlu dikonservasi;
- Peran serta sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- Lemahnya validitas informasi dan data base kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur;
- Belum sebandingnya jumlah kegiatan yang harus diawasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan;
- Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan;
- Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan persampahan sejak dari sumber sampai ke Tempat Pengolahan Akhir sampah;
- Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; reuse, reduce and recycle);
- Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan;

- Kondisi kualitas lingkungan khususnya air badan air di wilayah Kabupaten Luwu Timur masih belum dapat memenuhi baku mutu.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku industri pengolahan terhadap dampak pencemaran lingkungan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam perekaman biometrik KTP elektronik, penerbitan akta kematian dan penerbitan akta kelahiran;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan;
- Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, karena cakupan jangkauan wilayah Kabupaten Luwu Timur yang luas.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- Masih lemahnya up-dating data profil desa/kelurahan sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PADes;
- Belum optimalnya BUMDes yang terbentuk;
- Masih rendahnya status Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur;
- Masih rendahnya pemahaman Aparatur Pemerintah desa dalam memahami regulasi.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Masih tingginya unmet need;
- Wilayah sasaran program KB memiliki topografi dan tingkat kesulitan yang berbeda;
- Jumlah dan Kualitas SDM di lini lapangan masih terbatas;

- Kasus pernikahan usia dini masih tinggi;
- Persalinan remaja masih cukup tinggi;
- Kasus perceraian cenderung meningkat;
- Angka kemiskinan masih tinggi;
- Masih terbatasnya kemampuan sebagian besar kader bina keluarga.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- Masih minimnya penyediaan terminal, pelabuhan dan bandara sebagai pusat pergerakan manusia dan barang serta konektivitas antar daerah;
- Belum maksimalnya pemenuhan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas di jalan Kabupaten;
- Masih terbatasnya penyediaan sarana transportasi massal bagi masyarakat;
- Belum optimalnya penyediaan kendaraan angkutan umum yang memenuhi uji KIR.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pemenuhan kegiatan komunikasi dan informatika;
- Masih minimnya sumber daya manusia pengelolaan Informatika dan Telematika di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan E – Government;
- Masih minimnya akses internet bagi masyarakat pada ruang-ruang publik di Kabupaten Luwu Timur;
- Masih terbatasnya jangkauan jaringan internet di beberapa wilayah Kabupaten Luwu Timur.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

- Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM;
- Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas;
- Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri di Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan data peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan;
- Sistem pengelolaan usaha ritel/toko koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela yang mempengaruhi usaha ritel koperasi;
- Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM;
- Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- Masih minimnya regulasi yang mendukung peningkatan penanaman modal;
- Kurangnya data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Instansi Pemerintah dan dunia usaha;
- Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- Rata-rata waktu penerbitan dokumen perizinan belum sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

- Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada;
- Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda;
- Belum tersedianya sarana kepemudaan sebagai wadah pengembangan potensi kepemudaan;
- Masih rendahnya minat olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- Masih minimnya prestasi kepemudaan dan bidang olah raga di tingkat Provinsi dan Nasional.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Keterbatasan SDM dan kapasitas pengelola data statistik;
- Belum terpusatnya penyediaan data statistik sektoral;
- Keterbatasan anggaran pengelolaan data statistik sektoral.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Keterbatasan SDM;
- Keterbatasan sarana dan prasarana;
- Keterbatasan anggaran.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- Belum optimalnya implementasi penguatan pewarisan nilai-nilai sejarah dan budaya luhur, hal ini dipengaruhi oleh faktor belum adanya petunjuk teknis;
- Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya ketersediaan sarana dan prasarana budaya;
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya pembinaan kapasitas tenaga pelatihan, pembinaan maupun pelaku budaya;
- Masih rendahnya daya saing dan semangat kompetisi dalam berkarya budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya

pemahaman dan keterampilan dalam mengolah dan mengembangkan budaya.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Masih kurangnya minat dan budaya baca masyarakat;
- Masih terbatasnya koleksi buku di perpustakaan, baik perpustakaan umum maupun desa;
- Masih belum optimalnya penyediaan fasilitas ruang perpustakaan di kewilayahan sebagai sasaran pembinaan;
- Kurangnya sarana operasional berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK);
- Masih terbatasnya tenaga pustakawan daerah.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Keterbatasan tenaga arsiparis yang tersedia, sehingga perlu adanya penambahan tenaga fungsional arsiparis;
- Masih rendahnya pengetahuan tentang tata kearsipan pada aparatur sehingga penataan berkas/arsip belum tertib baik arsip aktif, in aktif maupun statis;
- Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada.

2.3.2.3. Permasalahan Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Masih maraknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan;
- Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan;
- Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
- Belum optimalnya produksi olahan ikan;
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Promosi kepariwisataan belum dilakukan secara optimal, khususnya pada tingkat Nasional dan Internasional;
- Masyarakat sekitar obyek wisata belum berperan secara aktif dalam pengembangan obyek wisata setempat;
- Lemahnya akurasi data kepariwisataan secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata;
- Materi atau bahan pameran produk unggulan dari para pelaku jasa usaha pariwisata masih terbatas;
- Pengembangan sektor pariwisata belum berpadu sehingga pengembangannya cenderung berjalan ditempat/stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung.;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan obyek wisata potensial seperti Danau Matano dan obyek wisata potensial lainnya.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat padapenurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian;
- Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani;
- Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi;
- Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi;
- Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan;

- Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target;
- Penurunan kualitas sumberdaya lahan akibat erosi, bencana alam, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dan pencemaran lingkungan menyebabkan penurunan produksi pertanian dan mutu produk pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air;
- Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi;
- Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak;
- Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha tani;
- Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;
- Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar;
- Masih rendahnya daya saing produk perkebunan terhadap produk impor;
- Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan;
- Kurang tersedianya benih unggul yang bermutu;
- Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- Keterbatasan akses permodalan bagi peternak;
- Kurangnya betina produktif (sapi), inbreeding dan belum luasnya capaian hasil program Inseminasi Buatan dan Embrio Transfer;
- Masih banyaknya pemotongan ilegal di luar RPH;
- Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan belum tangguh dan mandiri;

- Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian;
- Kurangnya ketersediaan infrastruktur;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan, dan teknologi alsintan;
- Belum optimalnya infrastruktur Pertanian;
- Menurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan degradasi lahan;
- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah;
- Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi;
- Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki;
- Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan Ekspor dan Impor.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- Masih rendahnya produktifitas IKM;
- Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM;
- Belum terjalannya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM;
- Masih rendahnya pendidikan dan ketrampilan pelaku IKM.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

- Belum optimalnya aksesibilitas transportasi ke daerah transmigrasi;
- Masih minimnya dukungan infrastruktur penunjang pada wilayah transmigrasi;
- Belum sepenuhnya kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan oleh para pihak;
- Tingkat kompetensi calon transmigran belum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tujuan.

2.3.2.4. **Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

a. Unsur Sekretariat Daerah

- Banyaknya program dan kegiatan yang terkait Kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan terkendala dengan payung hukum atau regulasi terkait;
- Masih kurangnya koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah, terkait program maupun kegiatan yang menjadi objek untuk menjadi bahan dalam menyusun rancangan kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
- Belum tertibnya administrasi data usul rancangan produk hukum daerah;
- Masih lambatnya penyelarasan dan penyesuaian produk hukum daerah yang ada dengan perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan tingkat pusat;
- Belum tersedianya alat (tool) yang efektif dan efisien untuk memantau dokumen rancangan produk hukum daerah yang sedang diproses;
- Masih lambatnya pembentukan produk hukum daerah;
- Belum optimalnya kinerja pegawai dalam penyelesaian pembentukan produk hukum daerah akibat terbatasnya SDM di Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pengelola JDIH;
- Pengawasan internal dalam pembentukan produk hukum daerah masih belum optimal;
- Masih lemahnya pengertian tentang bantuan hukum pada Perangkat Daerah dalam penanganan perkara gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dan Perdata;
- Masih lambannya pengolahan dan pelaporan data terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pada Perangkat Daerah;

- Belum ada pustakawan yang mengelola arsip dan belum ada staf yang mengikuti pendidikan dan latihan khusus JDIH;
- Evaluasi kelembagaan belum diterapkan secara berkala;
- Pola tata hubungan kerja belum terkoordinasi antara sekretariat daerah dengan perangkat daerah;
- Kebijakan pelayanan publik belum diimplementasikan secara maksimal;
- Belum tersusunya peta proses bisnis (Probis);
- Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
- Rencana aksi delapan area perubahan pada reformasi birokrasi belum sepenuhnya optimal;
- Belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi lingkup pemerintah Kabupaten;
- Kematangan kelembagaan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan kualitas tata kelola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum optimal, dimulai dari tahap perencanaan anggaran, tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak;
- Penguatan regulasi terhadap sistem dan mekanisme pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkup Pemerintah Kabupaten belum terwujud sesuai standar;
- Ketersediaan SDM pengelolaan P Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terkait kuantitas dan kualitas yang belum memadai di lingkungan pemerintah Kabupaten;
- Belum optimalnya capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD dan masih lambatnya pengumpulan data pendukung IKK LPPD dari tiap-tiap perangkat daerah;
- Kurangnya Kapasitas SDM & Tenaga Ahli dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Belum optimalnya pengawasan internal dalam hal mengimplementasikan penyelenggaraan kerja sama;

- Kurangnya Kapasitas SDM & Tenaga Ahli dalam Penyelenggaraan Bina Wilayah.
- b. Unsur Sekretariat DPRD
- Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
 - Masih terbatasnya SDM di Sekretariat DPRD terhadap penyusunan legal drafting;
 - Masih Kurangnya pelayanan sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD khususnya di bidang informasi dan Tehnologi.

2.3.2.5. Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Unsur Perencanaan
- Kurangnya SDM perencana;
 - Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;
 - Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan.
- b. Unsur Keuangan
- Kurangnya jumlah dan kualitas personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
 - Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas;
 - Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal;
 - Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan obyek pajak masih rendah;
 - Kesadaran wajib pungut pajak masih rendah;
 - Jumlah SDM yang mengelola pendapatan masih kurang;
 - Ruang pelayanan pajak kurang representative.
- c. Unsur Kepegawaian
- Keterbatasan SDM pelayanan kepegawaian;
 - Berkurangnya jumlah pegawai setiap tahunnya karena pensiun;
 - Keterbatasan rekrutmen CPNS setiap tahunnya.
- d. Unsur Pendidikan Dan Pelatihan

- Database kediklatan yang belum memadai;
 - Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya;
 - Belum tersedianya data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat.
- e. Unsur Penelitian Dan Pengembangan
- Belum optimalnya pengembangan penelitian untuk kepentingan pembangunan;
 - Belum adanya keserasian pemanfaatan hasil-hasil penelitian daerah;
 - Belum tersedianya pejabat fungsional khusus peneliti.

2.3.2.6. Permasalahan Unsur Kewilayahan

- Kecamatan
 - Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas;
 - Belum sepenuhnya dilakukan pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh Camat;
 - Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Kecamatan dengan luas wilayah.

2.3.2.7 . Permasalahan Unsur Pemerintahan Umum

- Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Belum optimalnya pola koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi maupun dengan Instansi Vertikal;
 - Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
 - Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama.

2.3.2.8. Permasalahan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

- Inspektorat Daerah
 - Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal pemeriksa;
 - Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal;
 - Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten;
 - Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodic;
 - Belum terpenuhinya 6 elemen kapabilitas APIP di level 3

2.4 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, dan mendesak, dalam menentukan tujuan Jangka Panjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan isu didasarkan pada permasalahan pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021 yang masih relevan dan RPJMD 2021-2026 serta permasalahan pembangunan secara global, nasional maupun lokal di tahun berjalan maupun pada beberapa tahun terakhir, dengan memperhatikan permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD serta merujuk pada arah kebijakan pada rancangan RKP tahun 2022 Adapun isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian antara lain :

(1) Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia di dunia. Tidak hanya pada aspek kesehatan, pandemic ini juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan sebagainya. Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah yang signifikan terpapar Covid, selain itu berbagai sektor perekonomian mengalami perlambatan, terutama

sektor jasa, perdagangan dan pariwisata. Isu terkait hal ini adalah pemulihan ekonomi dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai ketidakpastian karena dampak pandemi.

(2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGs adalah wacana pembangunan global yang telah disepakati untuk berlaku pada semua negara, termasuk Indonesia. Dalam SDGs terdapat 17 tujuan yang indikator dan target capaiannya secara nasional telah ditetapkan. Hasil analisis isu strategis untuk Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa seluruh tujuan SDGs tersebut relevan sehingga perlu menjadi perhatian dalam lima tahun kedepan, Adapun isu-isu terkait SDGs di Luwu Timur adalah kemiskinan, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, kesehatan, pendidikan inklusif dan pembelajaran sepanjang hayat, kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak, air bersih dan sanitasi, energy terbarukan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja, infrastruktur tangguh dan industri inklusif serta inovasi, kesenjangan dan ketimpangan, pemukiman, produksi dan konsumsi berkelanjutan, perubahan iklim, kelautan dan perikanan, kehutanan, lahan dan keanekaragaman hayati, inklusifitas dan perdamaian, serta kerjasama pembangunan.

(2) Standar Pelayanan Minimal

Kebijakan nasional yang juga akan sangat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah PP 02/2018 dan Permendagri 100/2019 terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar. SPM tersebut mencakup berbagai unsur layanan pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan

Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

- a. SPM Bidang Pendidikan;
- b. SPM Bidang Kesehatan;
- c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
- f. SPM Bidang Sosial.

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pada pedoman SPM tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan menetapkan kebijakan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

(3) Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah semakin nyata membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, terutama pada sektor pertanian dan kelautan. Kabupaten Luwu Timur yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian merupakan daerah yang cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim. Apalagi secara ekologi daerah ini memiliki kespesifikan yakni keberadaan danau dan potensi tambang.

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, perubahan pola penyakit (DBD, Malaria), kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam

menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

(4) Tranformasi Digital

Saat ini kehidupan manusia semakin dipengaruhi oleh aplikasi teknologi digital. Bukan hanya dalam perekonomian seperti munculnya sejumlah startup serta perdagangan on-line, tetapi juga di dunia pemerintahan dalam bentuk penyelenggaraan layanan dan administrasi pemerintahan yang semakin bergantung pada teknologi digital dan online.

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional. Namun disisi lain, perkembangan TIK dan revolusi industri 5.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia, Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi.

Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara. Isu spesifik terkait hal ini adalah pemanfaatan teknologi digital untuk pengelolaan sistem administrasi yang mengintegrasikan perencanaan, kordinasi, keuangan dan pelaporan kinerja.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan periode yang lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah selama satu periode Kabupaten Luwu Timur. Analisis tersebut memuat kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan kerangka pendanaan masa lalu untuk melihat posisi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, sebagai landasan dalam memproyeksi kemampuan keuangan daerah untuk satu periode ke depan.

Dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah yang memuat belanja wajib dan mengikat, belanja kebutuhan aparatur dan belanja prioritas perencanaan pembangunan, dibutuhkan sebuah analisa kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang

tertuang dalam tahun rencana dengan melihat kinerja dan realisasi capaian dari APBD Kabupaten Luwu Timur selama 5 Tahun yaitu tahun 2016 - 2020, yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sturuktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami perubahan yang dimulai T.A 2021, secara tekhnis pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan dan Penganggaran, Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu sistim yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yang dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis web yang memuat Infromasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah menjadi satu kesatuan data yang terintegrasi. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah.

RKPD Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 ini, pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang sangat terkait dengan proses Penetapan arah perencanaan pembangunan dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Dalam merumuskan Perencanaan strategis, di perlukan perencanaan anggaran yang memastikan bahwa sumber daya keuangan diarahkan untuk

mendanai Program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan, serta memberikan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Salah satu kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Luwu Timur adalah kinerja pelaksanaan APBD selama lima tahun terakhir yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang perkembangan kapasitas atau kemampuan pendapatan, belanja dan pembiayaan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah dan sebagai pengendali defisit anggaran. Struktur Pendapatan pada tahun 2016-2020 yang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain.

Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016-2020*

No	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
1	Pendapatan Asli Daerah	177,018,897,819.76	254,902,886,906.53	264,769,982,685.12	313,564,038,877.42	340,369,469,283.45	20,19
11	Pajak Daerah	87,262,964,488.00	139,811,835,913.00	135,222,909,760.46	168,433,208,386.50	192,720,735,828.60	21,91
12	Retribusi Daerah	6,231,131,540.12	6,234,833,296.20	48,676,217.00	4,187,811,316.00	450,593,586.09	(7,78)
13	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20,417,954,358.00	32,076,032,045.41	25666782331,00	26,214,125,742.00	23,835,212,109.00	3,94
14	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	63,106,847,433.64	76,780,185,651.92	99,012,669,586.66	114,728,893,432.92	119,307,589,259.76	23,82

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited*

Dari Tabel 3.1 diatas, untuk Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Proporsi tertinggi dalam capaian realisasi PAD ada pada Pajak Daerah dengan Proporsi mencapai 50 persen dari total Pendapatan Asli Daerah. disamping itu capaian tertinggi selama Lima tahun terakhir, untuk tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan cukup signifikan. untuk pajak daerah naik sebesar 60 Persen, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 57 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar 21 persen.

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana ini terdiri dari 3 jenis, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Untuk Komposisi Pendapatan daerah, Dana Perimbangan menempati Proporsi yang terbesar. Hal ini menunjukkan untuk Pendapatan Daerah, Kabupaten Luwu Timur masih tergantung dari dana perimbangan.

Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016-2020*

No	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
2	Dana Perimbangan	932,434,270,075.00	786,407,535,589.00	873,706,953,349.00	834,360,290,818.00	766,923,342,007.00	-4,77
2.1	Dana Bagi Hasil	190296048420,00	73570711179,00	107080369038,00	116175746971,00	105117724030,00	(13,79)
2.2	DAU	550,581,811,000.00	545,609,968,000.00	545,609,968,000.00	557,933,304,000.00	508,456,665,000.00	(1,97)
2.3	DAK	191,556,410,655.00	167,226,856,410.00	221,016,616,311.00	160,251,239,847.00	153,348,952,977.00	(5,41)

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited*

Untuk Dana Perimbangan Tahun 2016-2020, capaian realisasinya sangat fluktuatif dan cenderung menurun. Capaian realisasi yang sangat signifikan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 ke tahun 2017 dengan penurunan sebesar 16 persen. penurunan ini sangat di pengaruhi oleh komponen Pendapatan Bagi Hasil dengan penurunan sebesar 61 persen dan DAK sebesar 13 persen, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, yang pada tahun 2017 terjadi penurunan target pennerimaan negara yang berimplikasi kepada pemotongan anggaran belanja pada Kementrian dan Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. meskipun capaian realisasi 3 tahun berikutnya ada kenaikan namun tidak begitu signifikan. hal ini sangat berpengaruh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

pada realisasi belanja, mengingat Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur masih di dominasi oleh Sektor Dana perimbangan yang proporsinya masih 50 Persen dari total pendapatan daerah.

C. Lain-lain pendapatan daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. 3 Capaian Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2016-2020*

No	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	304,605,664,411.00	323,862,359,644.00	327,676,023,789.00	366,072,229,488.66	359,363,444,708.20	4,22
3.1	Pendapatan Hibah	39,749,245,251.00	41,631,529,908.00	80,243,269,681.00	37,356,141,726.00	74,620,684,158.00	17,05
3.2	DBH Pajak dari Provinsi dan PDL.	118,953,266,431.00	132,392,915,316.00	10,571,752,211.00	145,421,716,362.66	134,014,732,222.20	3,03
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	145,903,152,729.00	149,837,914,420.00	14,171,523,297.00	183,294,371,400.00	150,728,028,328.00	82.00

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) *Anaudited**

Untuk Capaian realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2016-2020, cenderung mengalami kenaikan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,22 persen. kenaikan sangat signifikan dipengaruhi oleh Pendapatan Hibah, dimana kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2018 yang mencapai 92,75 persen dan tahun 2020 sebesar 99,75 persen. sedangkan untuk DBH pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya kenaikan signifikan hanya pada tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

2017 sebesar 11,30 persen. signifikannya capaian pada dua komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah ini, Karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Provinsi.

Tabel 3. 4 Proporsi Realisasi Jenis Pendapatan terhadap Total Pendapatan Tahun 2016-2020*

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*
1	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	PAD	12,52	18,67	18,06	20,71	24,70
1.2	Dana Perimbangan	65,94	57,60	59,59	55,11	51,28
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah Yang sah	21,54	23,72	22,35	24,18	24,03

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited*

Dari tabel 3.4 diatas, selama lima tahun terakhir proporsi capaian realisasi jenis pendapatan terhadap total realisasi pendapatan, masih di dominasi oleh Dana perimbangan. Namun data menunjukkan selama lima tahun terakhir trend proporsi capaian realisasi untuk dana perimbangan mengalami penurunan. Sedangkan untuk proporsi capaian realisasi untuk PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan trend kenaikan. ini menunjukkan potensi Kabupaten Luwu Timur untuk tidak tergantung begitu besar terhadap Dana perimbangan dari pemerintah Pusat Cukup besar, sehingga ke depannya di perlukannya kebijakan dan strategi dalam meningkatkan capaian Sektor PAD.

Tabel 3. 5 Proporsi Realisasi Rincian Pendapatan terhadap Jenis Pendapatan Tahun 2016-2020*

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*
1	PAD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	Pajak Daerah	49,30	54,85	51,07	53,72	52,17
1.2	Retribusi Daerah	3,52	2,45	1,84	1,34	1,22

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	11,53	12,58	9,69	8,36	6,45
1.4	Lain-lain PAD yang sah	35,65	30,12	37,40	36,59	40,15
2.	Dana Perimbangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1	Dana Bagi Hasil	20,41	9,36	12,26	13,92	13,71
2.2	DAU	59,05	69,38	62,45	66,87	66,30
2.3	DAK	20,54	2,26	25,30	19,21	20,00
3.	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1	Pendapatan Hibah	13,05	12,85	24,49	10,20	20,76
3.2	DBH Pajak dari provinsi dan PDL	39,05	40,88	32,26	39,72	37,29
3.3	Dana penyesuaian dan otonomi Khusus	47,90	46,27	43,25	50,07	41,94

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited*

Pada tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk sektor PAD, Rincian belanja yang berpengaruh besar terhadap capaian PAD ada pada sektor Pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Untuk dana perimbangan masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum sedangkan untuk Lain-lain pendapatan daerah yang sah di dominasi oleh Dana penyesuaian dan otonomi khusus serta Dana Bagi Hasil pajak provinsi dan Pemerintah daerah lainnya. Di periode selanjutnya diperlukan kebijakan dan strategi dalam memaksimalkan pencapaian pada sektor rincian pada Jenis Pendapatan Asli Daerah dengan membuka Ruang Fiskal selebar-lebarnya untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan. Mengingat adanya pembiayaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diharuskan menggunakan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.1.1.2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga.
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Untuk Tahun 2020, daya serap mengalami penurunan yang di akibatkan oleh dengan adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada sektor ekonomi secara global yang juga berimplikasi pada ekonomi nasional dan daerah, dengan terbitnya peraturan menteri Keuangan nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU dan DID tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid19), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahu 2020 tentang percepatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebabkan pemerintah daerah melakukan *Refocusing* Anggaran belanja dalam penanganan Covid 19. Serapan belanja tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3. 6 Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020*

No	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
1	Belanja Tidak Langsung	545.275.504.158,96	584.857.285.599,00	617.514.870.234,00	664.617.796.016,00	704.259.217.269,00	6,61
1.1	Belanja Pegawai	374.763.155.128,00	373.587.185.653,00	397.203.737.409,00	413.363.367.514,00	406.616.470.053,00	2,06
1.2	Belanja Hibah	4.200.352.000,00	14.670.150.000,00	17.141.000.000,00	25.017.900.000,00	69.606.738.049,00	101,76
1.3	Belanja Bantuan Sosial	9.314.000.000,00	14.407.460.000,00	14.405.460.000,00	15.560.279.924,00	14.080.300.000,00	10,88
1.4	Belanja Bagi Hasil	9.515.864.320,96	9.349.409.599,00	14.604.670.000,00	14.009.007.471,00	17.262.101.969,00	16,05
1.5	Belanja Bantuan Keuangan	147.482.132.710,00	172.843.080.347,00	173.477.591.347,00	196.667.241.107,00	194.985.075.098,00	7,23
1.6	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	682.411.478,00	0,00	1.708.532.100,00	25,79

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) *Anaudited**

Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2016-2020, cenderung mengalami kenaikan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan 6,61 persen. kenaikan belanja tidak langsung selain banyak dipengaruhi oleh belanja pegawai, juga di pengaruhi oleh belannja hibah khususnya dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020, dengan kenaikan masing 7,74 persen dan 64,05 persen. sedangkan untuk belanja tidak terduga, capaian realisasi selama 5 tahun terakhir hanya ada pada tahun 2018 dan 2020. untuk tahun 2018, Belanja Tidak Terduga untuk membiayai rehabilitasi pasca bencana alam di Kabupaten Luwu Timur dan tahun 2020 untuk program Pencegahan dan penanganan Covid-19.

Tabel 3. 7 Capaian Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016-2020*

No	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
2	Belanja Langsung	829.617.253.067,35	831.416.765.316,24	902.594.570.599,57	855.681.861.264,14	732.710.092.584,38	(3,06)
2.1	Belanja Pegawai	7.750.648.064,00	5.494.807.166,00	3.844.253.000,00	1.933.629.000,00	3.631.250.000,00	(17,27)
2.2	Belanja Barang dan Jasa	321.776.994.038,00	433.169.228.885,54	474.307.446.910,00	516.360.837.104,71	492.112.794.417,33	11,21
2.3	Belanja Modal	500.089.610.965,35	392.752.729.264,70	424.442.870.689,57	337.387.395.159,43	236.966.048.167,05	(17,03)

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited*

Untuk Capaian Realisasi Belanja Langsung dari Tahun 2016-2020, cenderung fluktuatif dengan pertumbuhan (3,06) persen. Untuk belanja barang dan jasa cenderung mengalami kenaikan untuk empat tahun terakhir dengan rata-rata kenaikan 11,21 persen. Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 4,70 persen, dan untuk belanja modal mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 29,76 persen dibanding tahun 2019.

Dalam capaian realisasi belanja dalam kurun waktu 2016-2020, Realisasi belanja Kabupaten Luwu Timur rata-rata mencapai 90 persen dibandingkan dengan anggaran belanja, yang berarti memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menjaga postur APBD selama lima tahun masih dalam keadaan yang normal. Hal itu dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3. 8 Realisasi Belanja dibandingkan Anggaran Belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	(%)
2016	1,553,764,811,738.00	1,374,892,757,226.31	88.49
2017	1,544,366,403,790.00	1,416,274,050,915.24	91.71
2018	1,591,059,131,709.95	1,520,109,440,833.57	95.54

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

2019	1,609,008,544,799.42	1,520,299,657,280.14	94.49
2020	1,489,289,489,113.78	1,436.969.309.853,38	96,49

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited*

3.1.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
- 3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meletakkan Penerimaan Pembiayaan dalam rangka untuk menutupi defisit anggaran dilakukan secara cermat, hati-hati dan rasional. Mengingat tingginya target Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan trend penurunan yang berarti dalam pembiayaan program kegiatan terserap secara maksimal sesuai dengan target perencanaan yang telah di tetapkan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, kebijakan pemerintah dalam melakukan Invesatasi dalam bentuk penyertaan Modal ke Bank Sulselbar dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). untuk melihat capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam kurun waktu 5 Tahun, dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini.

**Tabel 3. 9 Capaian Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Tahun 2016-2020***

No	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	116.897.939.	156.064.014.355,86	104.961.418.960,15	47.504.937.949,70	26.201.839.853,65	(31,19)
2.1	Pengeluaran Pembiayaan	276,000,00	0,00	3.500.000.000,00	15.000.000.000,00	12.000.000.000,00	85,16

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited*

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tabel 3. 10 Capaian Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2016-2020*

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	PENDAPATAN	1.414.058.832.305,76	1.365.172.782.139,53	1.466.152.959.823,12	1.513.996.559.184,08	1.495.670.435.578,65	1,41
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	177.018.897.819,76	254.902.886.906,53	264.769.982.685,12	313.564.038.877,42	369.383.648.863,45	20,19
1.1.1	Pajak Daerah	87.262.964.488,00	139.811.835.913,00	135.222.909.760,46	168.433.208.386,50	192.720.735.828,60	21,91
1.1.2	Retribusi Daerah	6.231.131.540,12	6.234.833.296,20	4.867.621.007,00	4.187.811.316,00	4.505.935.086,09	(7,78)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.417.954.358,00	32.076.032.045,41	25.666.782.331,00	26.214.125.742,00	23.835.212.109,00	3,94
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.106.847.433,64	76.780.185.651,92	99.012.669.586,66	114.728.893.432,92	148.321.765.839,76	23,82
1.2	DANA PERIMBANGAN	932.434.270.075,00	786.407.535.589,00	873.706.953.349,00	834.360.290.818,00	766.923.342.007,00	(4,77)
1.2.1	Dana Bagi Hasil	190.296.048.420,00	73.570.711.179,00	107.080.369.038,00	116.175.746.971,00	105.117.724.030,00	(13,79)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	550.581.811.000,00	545.609.968.000,00	545.609.968.000,00	557.933.304.000,00	508.456.665.000,00	(1,97)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	191.556.410.655,00	167.226.856.410,00	221.016.616.311,00	160.251.239.847,00	153.348.952.977,00	(5,41)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304.605.664.411,00	323.862.359.644,00	327.676.023.789,00	366.072.229.488,66	359.363.444.708,20	4,22
1.3.1	Pendapatan Hibah	39.749.245.251,00	41.631.529.908,00	80.243.269.681,00	37.356.141.726,00	74.620.684.158,00	17,05
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	118.953.266.431,00	132.392.915.316,00	105.717.522.011,00	145.421.716.362,66	134.014.732.222,20	3,03
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	145.903.152.729,00	149.837.914.420,00	141.715.232.097,00	183.294.371.400,00	150.728.028.328,00	0,82
2	BELANJA	1.374.892.757.226,31	1.416.274.050.915,24	1.520.109.440.833,57	1.520.299.657.280,14	1.436.969.309.853,38	1,11
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	545.275.504.158,96	584.857.285.599,00	617.514.870.234,00	664.617.796.016,00	704.259.217.269,00	6,61

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
2.1.1	Belanja Pegawai	374.763.155.128,00	373.587.185.653,00	397.203.737.409,00	413.363.367.514,00	406.616.470.053,00	2,06
2.1.3	Belanja Hibah	4.200.352.000,00	14.670.150.000,00	17.141.000.000,00	25.017.900.000,00	69.606.738.049,00	101,76
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	9.314.000.000,00	14.407.460.000,00	14.405.460.000,00	15.560.279.924,00	14.080.300.000,00	10,88
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.515.864.320,96	9.349.409.599,00	14.604.670.000,00	14.009.007.471,00	17.262.101.969,00	16,05
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	147.482.132.710,00	172.843.080.347,00	173.477.591.347,00	196.667.241.107,00	194.985.075.098,00	7,23
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	682.411.478,00	0,00	1.708.532.100,00	25,79
2.2	BELANJA LANGSUNG	829.617.253.067,35	831.416.765.316,24	902.594.570.599,57	855.681.861.264,14	732.710.092.584,38	(3,06)
2.2.1	Belanja Pegawai	7.750.648.064,00	5.494.807.166,00	3.844.253.000,00	1.933.629.000,00	3.631.250.000,00	(17,27)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	321.776.994.038,00	433.169.228.885,54	474.307.446.910,00	516.360.837.104,71	492.112.794.417,33	(11,21)
2.2.3	Belanja Modal	500.089.610.965,35	392.752.729.264,70	424.442.870.689,57	337.387.395.159,43	236.966.048.167,05	(17,03)
	SURPLUS / (DEFISIT)	39.166.075.079,45	(51.101.268.775,71)	(53.956.481.010,45)	(6.303.098.096,06)	58.701.125.725,27	10,65%
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	116.897.939.276,00	156.064.014.355,86	26.201.839.853,65	47.504.937.949,70	26.201.839.853,65	(31,19)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	116.897.939.276,00	156.064.014.355,86	104.961.418.960,15	47.504.937.949,70	26.201.839.853,65	(31,19)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	3.500.000.000,00	15.000.000.000,00	12.000.000.000,00	85,16
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	3.500.000.000,00	15.000.000.000,00	12.000.000.000,00	85,16
	PEMBIAYAAN NETTO	116.897.939.275,31	156.064.014.355,86	108.461.418.960,15	32.504.937.949,70	14.201.839.853,65	(40,96)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN	156.064.014.355,86	104.962.745.580,15	101.461.418.960,15	26.182.083.168,60		(100,00)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
	BERKENAAN						
	Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	47.504.937.949,70		72.902.965.578,92	

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited*

3.1.2. Neraca Keuangan Daerah

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Perkembangan neraca daerah menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Luwu Timur selama periode pencatatan 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 11 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020*

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	4,77
1.1.	ASET LANCAR	(2,34)
1.1.1.	Kas	(17,33)
1.1.2.	Piutang	5,40
1.1.3.	Persediaan	34,47
1.1.4.	Investasi Jangka Panjang	15,62
1.2.	ASET TETAP	4,76
1.3.1.	Tanah	2,85
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	7,80
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	11,16
1.3.4.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	8,96
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	19,19
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	8,28
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	17,29
1.3.	ASET LAINNYA	8,76
1.4.1.	Aset Tidak Berwujud	(8,55)
1.4.2.	Aset Lain-lain	9,18
	Jumlah Aset	4,77
2.	KEWAJIBAN	(20,55)
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	(20,55)
2.1.1.	Pendapatan diterima di muka	(12,29)
2.1.3.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	(100)
2.1.4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	(22,63)
2.1.5.	Beban yang Masih Harus Dibayar	111,09

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.	EKUITAS DANA	5,41
3.1	Ekuitas Dana	5,41
	Jumlah kewajiban dan Ekuitas Dana	4,77

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited*3.1.2.1 Aset

Analisis yang terkait dengan Aset Daerah dapat di Kategorikan menjadi 3 (tiga) bagian. Aset Lancar, Aset tetap dan Aset Tetap Lainnya. Aset lancar merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang mudah dicairkan dalam bentuk uang dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.yang terdiri dari kas, piutang, persediaan dan Investasi Jangka Panjang. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, Aset Kabupaten Luwu Timur tumbuh secara positif sebesar 4,77 Persen.

3.1.2.1 Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata pertumbuhannya negatif, yang berarti utang Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Pihak Ketiga tidak begitu besar dan signifikan.

3.1.2.2 Ekuitas

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, yang menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selama periode

2016-2020, menunjukkan trend positif dengan rata-rata pertumbuhan yang mencapai 5,41 persen setiap tahunnya. Sedangkan akumulasi kewajiban dan ekuitas juga menunjukkan trend positif setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai 4,77 Persen. hal ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai modal yang cukup dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.1.3. Rasio Likuiditas, Ratio Solvabilitas dan Ratio Aktivitas

Dari neraca daerah dapat diketahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

3.1.3.1 Rasio Likuiditas atau *Liquidity Ratio*

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek dengan melihat aktiva lancar utang lancar. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rasio lancar (*Current Ratio*) dan Ratio Cepat (*Quick Ratio*). Rasio Lancar atau *Current Ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya sedangkan Ratio Cepat (*Quick Ratio*) adalah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik.

3.1.3.2 Rasio Solvabilitas.

Rasio solvabilitas adalah perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki dengan banyaknya hutang yang harus ditanggung dan dibayarkan. Dari rasio solvabilitas tersebut, bisa diketahui kemampuan untuk melunasi hutang.

3.1.3.3 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan semua sumber daya atau asset (aktiva) yang dimiliki.

**Tabel 3. 12 Ratio Likuiditas, Ratio Solvabilitas dan Ratio Aktivitas
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016-2020***

Tahun	Ratio Likuiditas		Ratio Solvabilitas		Ratio Aktivitas	
	Ratio Lancar (Current Ratio)	Ratio Cepat (Quick Ratio)	Ratio Total Hutang (Debt Ratio)	Ratio Hutang Modal (Debt To Equity Ratio)	Lama Piutang	Lama Persediaan
2016	2,30	2,11	0,04	3,69	4,27	1,09
2017	5,13	4,42	1,24	1,26	7,35	1,14
2018	4,48	3,77	1,23	1,25	4,60	1,02
2019	4,20	3,12	1,12	1,13	3,78	1,20
2020*	4,57	3,21	1,31	1,33	4,48	1,21

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited

Dari tabel 3.4 diatas pada Ratio Likuiditas, untuk Ratio lancar dalam kurun waktu 2016-2020 berada di nilai 2,30- 4,57 dan Ratio Cepat berada di nilai 2,11- 3,21, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat.

Pada Ratio Solvabilitas, untuk Ratio Total Hutang dan Ratio Hutang Modal dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada nilai 0.04- 1,31 dan 3,69-1,33 yang berarti Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur Mampu melunasi hutang dengan aset yang tersedia dan mampu melunasi hutang dengan modal yang tersedia.

Sedangkan Untuk Ratio Aktivitas untuk lama Piutang dan Lama Persediaan, dalam rentang waktu lima tahun terakhir, lama piutang bernilai 4,27 -4,48 dan Lama persediaan bernilai 1,09-1,21. Yang berarti rata-rata lama piutang membutuhkan waktu 5,05 hari untuk merubah piutang menjadi kas, dan

rata-rata umur persediaan membutuhkan waktu sekitar 1,14 dalam penggunaan persediaan untuk pelayanan publik.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur seperti yang tergambar dalam APBD selama periode 2016-2020, menguraikan dua hal penting yaitu Proporsi Penggunaan Anggaran dan Hasil Analisis Pembiayaan yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan terkait dengan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah, yang terintegrasi dengan tujuan dan sasaran dari rencana pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan. Penguatan Kapasitas Fiskal dalam pembiayaan terhadap pelayanan publik untuk membangun kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor terutama untuk urusan wajib seperti Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. Selain itu, penguatan kapasitas fiskal dalam pembiayaan Program-Program yang termuat dalam Visi Misi Kepala Daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pada sisi pendapatan daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal serta meningkatkan ruang fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai ruang fiskal utama dalam memenuhi alokasi belanja untuk prioritas pembangunan daerah. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kapasitas fiskal juga di topang oleh peningkatan dana bagi hasil daerah (DBH), baik melalui pengelolaan pajak maupun melalui pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya. Kebijakan pendapatan daerah juga dipengaruhi oleh kebijakan keuangan oleh pemerintah pusat melalui Regulasi.

Adapun Kebijakan Optimisasi Sumber pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan optimalisasi Obyek-obyek

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Optimalisasi Kinerja BUMD, dan Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan alat MPOS yang berbasis Online sebagai bagian dari rencana Aksi KPK dan di terbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur pada PT.Bank Sulselbar.

3.2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan Keuangan Masa lalu untuk Kebijakan belanja di arahkan selaian dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Mengikat yaitu Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang harus memenuhi standar dari Mandatori Spanding, juga di Arahkan kepada belanja kebutuhan Aparatur.

Tabel 3. 13 Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2020*

No	Uraian	2018	2019	2020*
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	345.599.329.599,00	366.814.935.894,00	365.356.456.300,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	231.585.256.919,00	255.004.023.049,00	262.054.425.123,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	102.945.222.088,00	100.677.434.878,00	93.723.886.560,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5.892.000.000,00	5.892.000.000,00	4.336.666.650,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	5.176.850.592,00	5.241.477.967,00	5.241.477.967,00
B	Belanja Langsung	104.337.791.959,00	102.635.417.850,00	69.590.467.300,00
1	Belanja Honorarium PNS**)	1.239.365.000,00	1.221.565.000,00	126.800.000,00
2	Belanja Uang Lembur**)	1.072.938.000,00	1.072.938.000,00	1.077.075.000,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.661.483.306,00	2.741.679.958,00	2.981.945.000,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	9.488.225.058,00	6.737.554.297,00	2.041.105.607,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	2018	2019	2020*
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Belanja premi asuransi kesehatan	4.521.245.958,00	4.521.245.958,00	7.800.000.000,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai****)	4.718.121.750,00	4.718.121.750,00	4.718.121.750,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	412.515.000,00	412.515.000,00	387.222.000,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	5.941.464.955,00	5.941.464.955,00	2.462.835.000,00
9	Belanja perjalanan dinas**)	5.282.432.932,00	75.268.332.932,00	47.995.362.943,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-
12	Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	-	-	-
	TOTAL	449.937.121.558,00	469.450.353.744,00	434.946.923.600,00

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited

Dalam Penyelenggaraan pemerintahan, Pembiayaan pemenuhan kebutuhan aparatur adalah belanja yang perlu mendapatkan prioritas dalam menunjang pelayanan pemerintahan, Sehingga dalam perumusan proporsi belanja APBD, perlu memperhitungkan seberapa besar porsi Belanja untuk Kebutuhan Aparatur. Untuk melihat realisasi dan prosentase porsi belanja kebutuhan aparatur dibanding dengan total pengeluaran Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini.

Tabel 3. 14 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Timur 2018-2020*

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2018	449.937.121.558,00	1.523.109.440.833,57	29,37
2	Tahun Anggaran 2019	469.450.353.744,00	1.535.299.657.280,14	30,58

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

3	Tahun 2020	Anggaran	434.946.923.600,00	1.448.979.078.788,05	30,02
---	---------------	----------	--------------------	----------------------	-------

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited

Selain Proporsi belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur menjadi salah satu prioritas dalam belanja daerah, belanja wajib mengikat serta prioritas utama adalah salah satu prioritas dalam pemenuhan utama dalam belanja daerah. belanja wajib mengikat adalah belanja wajib yang harus terpenuhi dalam pembiayaan daerah. belanja wajib mengikat kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 3 Tahun (2018-2020) dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini.

**Tabel 3. 15 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur Kabupaten Luwu Timur 2018-2020***

No	Uraian	(Rp)2018	(Rp)2019	(Rp) 2020**	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	533.681.590.946,00	577.535.913.396,00	577.603.633.367,00	2,67%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	334.530.479.007,00	355.681.457.927,00	355.778.311.683,00	2,07%
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5.892.000.000,00	5.892.000.000,00	4.336.666.650,00	-9,71%
3	Belanja Bunga	-	-	-	
4	Belanja bagi hasil	188.082.261.347,00	210.720.977.502,00	212.247.177.067,00	4,11%
5	Biaya Penungutan Pajak dan Retribusi Daerah	294.851.559,00	217.095.287,00	217.095.287,00	-9,70%
6	Belanja Biaya Pemungutan Pajak dan Bangunan	4.881.999.033,00	5.024.382.680,00	5.024.382.680,00	0,96%
B	Pembiayaan Pengeluaran	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00%
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	(Rp)2018	(Rp)2019	(Rp) 2020**	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00%
	TOTAL (A+B)	545.681.590.946,00	592.535.913.396,00	589.603.633.367,00	2,61%

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited

3.2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Analisis proporsi penggunaan anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Luwu Timur pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya dilakukan melalui analisis proporsi realisasi belanja daerah dibandingkan anggaran dan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang masing-masing dapat dilihat pada tabel 3.6 dan tabel 3.7 yang disajikan sebelumnya.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil.

Dalam Kurun waktu 3 Tahun, Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur dalam meletakkan perencanaan pembiayaan daerah, didasari dengan perhitungan yang cermat khususnya dalam melakukan asumsi dalam penerimaan pembiayaan sebagai penutup defisit APBD. Selain itu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dianggarkan dalam memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, realisasi pembiayaan dalam 3 tahun yakni 2018-2020, menunjukkan trend yang positif, dimana Pelaksanaan Defisit jauh lebih rendah dari asumsi defisit yang di rencanakan.

Sedangkan untuk Sisa Lebih Pembiayaan tahun bekenaan selama 3 tahun terakhir juga menunjukkan hal yang positif, dimana defisit riil mampu ditutupi oleh Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur mampu menjaga Postur APBD dan Pelaksanaan APBD dalam kondisi normal. Untuk melihat kinerja pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2018-2020, dapat dilihat pada tabel 3.16 di bawah ini.

Tabel 3. 16 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2020*

NO	Uraian	2018	2019	2020*
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.466.152.959.823,12	1.513.976.802.499,03	1.497.026.241.782,53
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.520.109.440.833,57	1.520.299.657.280,14	1.436.979.078.788,05
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.500.000.000,00	15.000.000.000,00	12.000.000.000,00
A	Defisit riil	(57.456.481.010,45)	(21.322.854.781,11)	48.047.162.994,48
	Ditutupi oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:	-	-	-
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	104.961.418.960,15	47.504.937.949,70	26.201.839.853,65
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	104.961.418.960,15	47.504.937.949,70	26.201.839.853,65

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	Uraian	2018	2019	2020*
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	47.504.937.949,70	26.182.083.168,59	21.845.323.140,83

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited

Tabel 3. 17 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-202*

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	(1,82)	(222)	54
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(82,68)	(122,79)	45

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited

Dari Tahun 2018-2020, Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Luwu Timur menunjukkan trend yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,15 persen selama tiga tahun. Hal itu dapat dilihat pada tabel 3.18 di bawah ini.

Tabel 3. 18 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2018-2020*

No.	Uraian	2018		2019		2020*		Rata-rata pertumbuhan*)
		Rp	% dari SiL PA	Rp	% dari SiL PA	Rp	% dari SiL PA	
	Jumlah SiLPA	47.504.937.949,70	86,71	26.201.839.853,65	165,04	72.907.296.644,25	124,65	0,15
1	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	7.654.098.287,19	29,21	38.125.828.257,32	52,29	1,23
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.263.941.992,00	11,08	-	-	9.436.182.789,00	12,94	0,21
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	35.928.676.887,39	75,63	35.588.597.743,83	135,82	43.313.844.073,41	59,41	0,06
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Anaudited

1.3. KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menyajikan Proyeksi Pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun 2022. Untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran. Tujuan dari perhitungan asumsi makro adalah untuk mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam lima tahun kedepan.

Dalam menyajikan proyeksi pendapatan dan belanja, dengan melihat realisasi pendapatan lima tahun terakhir, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi asumsi pendapatan dan belanja selama 2 tahun terakhir serta kondisi ekonomi dua tahun terakhir yang sedikit terganggu dikarenakan adanya pandemic Covid-19.

3.3.1 Asumsi Makro Ekonomi, Sosial dan kebijakan Fiskal Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana yang tertuang dalam rancangan RPJMD tahun 2021-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel 3. 19 Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kab. Luwu Timur Tahun 2022

No	Indikator	Target	Proyeksi
		2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi DT (%)	1.50	2,00 - 2.50
2	Tingkat Pengangguran (%)	3.80	3.30
3	Inflasi (%)	1.21	1.50
4	PDRB Per Kapita (Rp juta)	70,90	71,45
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6.84	6.64
6	Indeks Pembangunan Manusia	73.50	73.80
7	Gini Ratio	0.377	0.277

Sumber: Data diolah Angka Proyeksi

Asumsi makro ekonomi daerah Kab. Luwu Timur disusun mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi perekonomian terkini baik domestik maupun global, dimana dampak pandemi covid 19 diperkirakan masih akan dirasakan dampaknya terhadap perekonomian global, pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap

pemulihan ekonomi dalam negeri sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

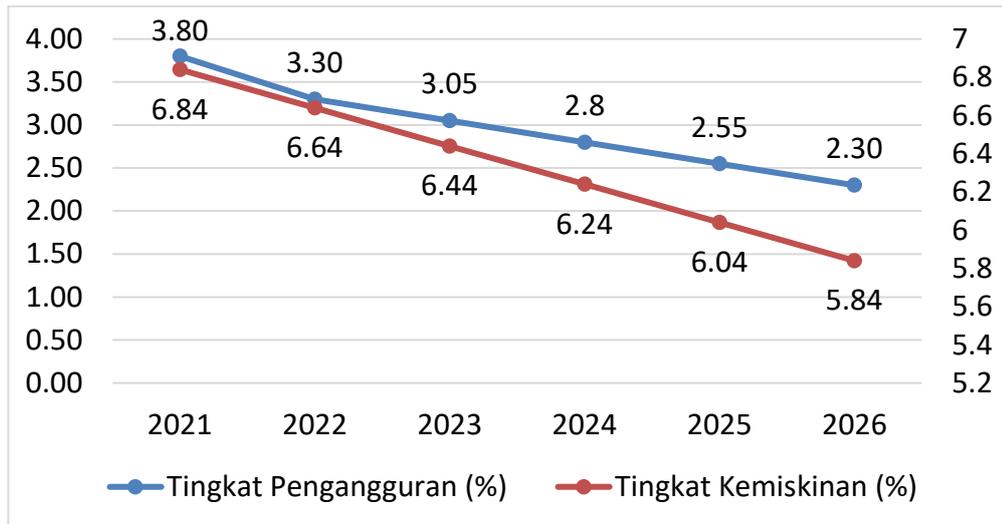
Pertumbuhan ekonomi Kab.Luwu Timur sangat tergantung terhadap share sub sektor pertambangan Nikel yang mendominasi hampir kurang lebih 40% terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga Nikel dunia, hal ini terbukti pertumbuhan ekonomi Luwu timur dimasa pandemic ini tetap bertumbuh Positif, disaat kab/Kota di sulsel mengalami penurunan pertumbuhan hingga mencapai minus, selanjutnya sektor pertanian yang memberikan share terbesar kedua (30%) dengan semakin membaiknya perekonomian dalam negeri dan upaya pemerintah provinsi dalam pemulihan ekonomi utamanya pembangunan sektor pertanian sehingga pemerintah daerah tetap optimis share sektor ini dapat memberikan pertumbuhan yang positif. Demikian halnya dengan subsector lainnya dengan upaya yang keras dari pemerintah daerah mengoptimalkan program-program pembangunan daerah dalam RPJMD sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat bertumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Penetapan target asumsi makro ekonomi menggambarkan bahwa daerah tetap optimis dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kab. Luwu Timur lima tahun ke depan , adapun asaumsi makro dimaksud mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik.

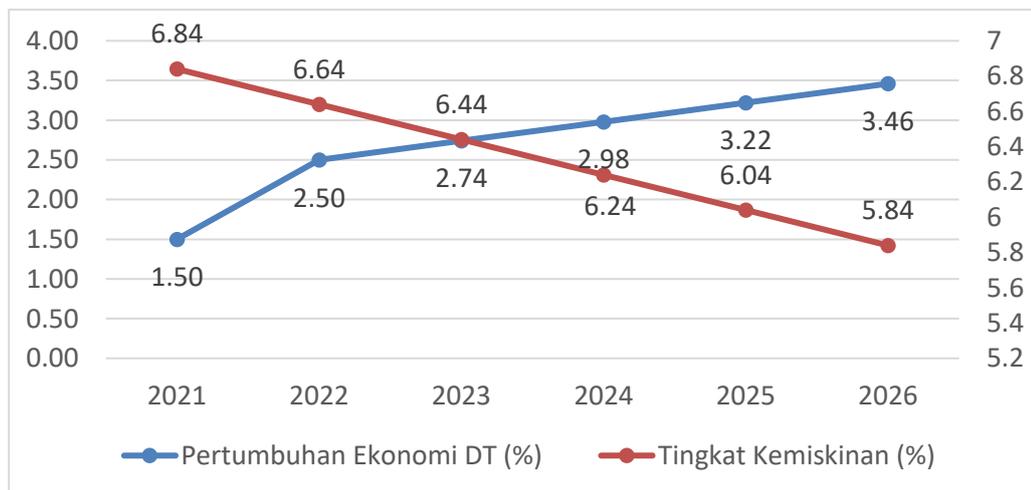
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Berikut akan disajikan Grafik Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan dan Perbandingan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan

Grafik 3. 1 Perbandingan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan



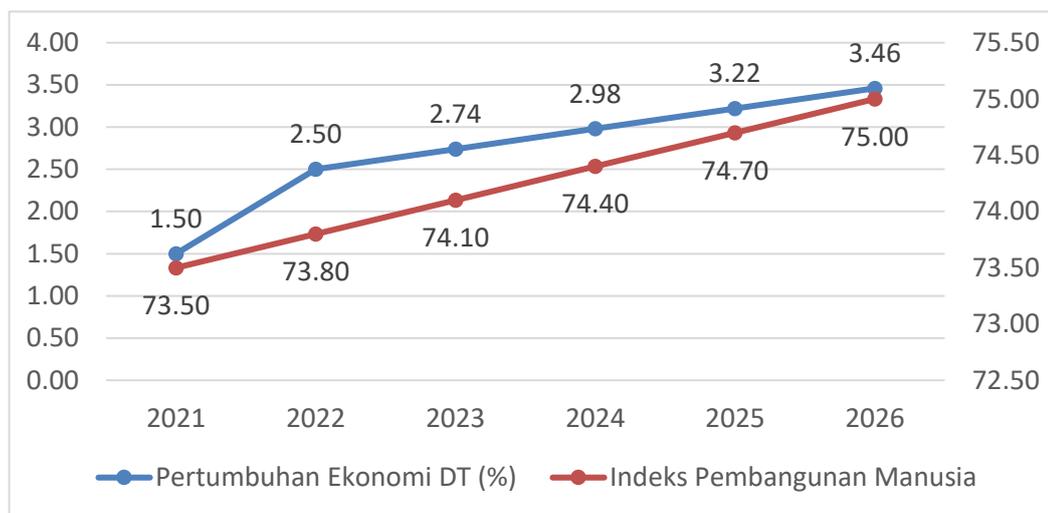
Grafik 3. 2 Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan



Pertumbuhan ekonomi daerah Kab. Luwu Timur untuk lima tahun ke depan diasumsikan dapat bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan

menjadi lebih inklusif dan berkualitas sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Grafik 3. 3 Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi dengan Pertumbuhan IPM



Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kab. Luwu Timur akan terus membaik, bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga secara relative dan diharapkan tetap lebih baik dari Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kab. Luwu Timur juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia Kab. Luwu Timur yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan

angka IPM yang semakin membaik, berada pada peringkat ke 4 (empat) dengan daerah-daerah maju lainnya di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan menunjukkan trend positif. Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 3,33 persen per tahun dengan kecenderungan yang meningkat. Sedangkan, Dana Transfer Pusat diperkirakan bertumbuh rata-rata 3,38 persen selama periode 2021-2026 dengan kecenderungan yang melambat. Perkiraan melambatnya pertumbuhan Dana Transfer Pusat bersumber dari pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target sebagai dampak perkembangan Pandemi covid 19 yang diperkirakan masih akan berpengaruh terhadap perekonomian global dalam lima tahun mendatang.

Tabel 3. 20 Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

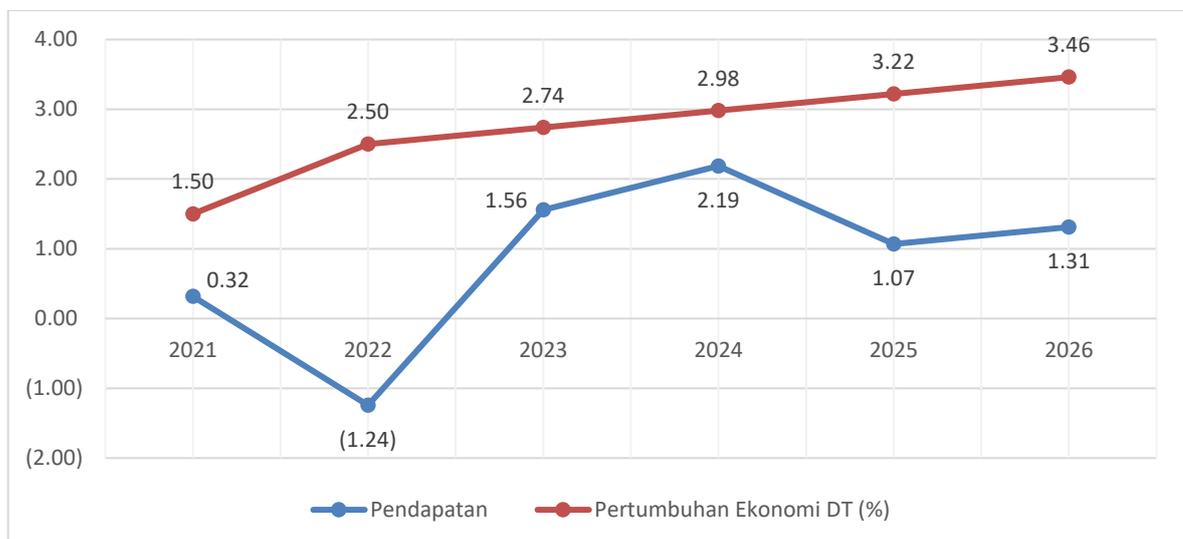
N	Indikator	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan PAD	12.43	0.35	2.53	2.04	1.47	1.17
2.	Pertumbuhan Dana Transfer Pusat:	18.50	(2.31)	0.99	2.03	0.55	0.53
a.	Pertumbuhan DBH	(26.15)	2.36	1.81	1.44	1.03	5.00
b.	Pertumbuhan DAU	1.30	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00
c.	Pertumbuhan DAK	110.63	(7.25)	2.09	5.24	0.98	0.00

Sumber : BPKD Kab Luwu Timur

Grafik 3. 4 Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi dengan Pertumbuhan PAD



Grafik 3. 5 Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Total Pendapatan



3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

3.3.2.1 Proyeksi Pendapatan

Pendapatan dalam persepektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dengan melihat capaian realisasi dan pertumbuhan pendapatan lima tahun yang lalu. Selain itu proyeksi pendapatan untuk lima tahun kedepan setidaknya memperhatikan empat determinan yaitu (1) Asumsi Indikator Ekonomi Makro, (2) Kebijakan Keuangan negara, khususnya perubahan kebijakan untuk dana transfer pusat ke daerah, (3) Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Keuangan Daerah dan (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah.

Rendahnya Proyeksi Pendapatan untuk tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2021 dengan penurunan sebesar 1,24 persen, di sebabkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk satu alokasi untuk sektor kesehatan yang tidak memungkinkan untuk di capai, sehingga berpengaruh terhadap total pendapatan untuk proyeksi tahun 2022. Disamping itu, kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid 19 menjadi salah satu indikator dalam meletakkan proyeksi pendapatan untuk tahun 2022.

Capaian realiasi pendapatan untuk sektor PAD selalu melampaui target yang di tetapkan dalam RPJMD sedangkan untuk dana Transfer Pusat dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah capaian realisasinya di antara 80 – 90 Persen.

Berikut di sajikan Target Pendapatan untuk tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan Untuk Tahun 2022.

Tabel 3. 21 Analisis Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026

URAIAN	TARGET	PROYEKSI
	2021*)	2022
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah	324.224.809.425,00	325.368.347.170,00
Pajak Daerah	163.677.500.000,00	170.201.950.000,00
Retribusi Daerah	5.747.309.425,00	6.166.397.170,00



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	33.800.000.000,00	25.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	121.000.000.000,00	124.000.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.090.315.663.000,00	1.075.605.776.000,00
Transfer Pemerintah Pusat	946.715.663.000,00	924.825.776.000,00
Dana Transfer Umum	946.715.663.000,00	924.825.776.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	519.015.708.000,00	519.015.708.000,00
Dana Bagi Hasil	94.974.998.000,00	97.220.421.000,00
Dana Transfer Khusus	332.724.957.000,00	308.589.647.000,00
Transfer Antar Daerah	143.600.000.000,00	150.780.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	143.600.000.000,00	150.780.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	65.235.520.000,00	60.408.630.400,00
Hibah Dari Pemerintah Pusat	43.835.520.000,00	38.408.630.400,00
Hibah Dari Badan Usaha LN Dan DL	21.400.000.000,00	22.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.479.775.992.425,00	1.461.382.753.570,00

Sumber : BPKD Kab.Luwu Timur



3.3.2.2 Proyeksi Belanja

Sebagaimana Proyeksi Pendapatan, Proyeksi Belanja di asumsikan dengan memperhatikan kemampuan Pendapatan sehingga Alokasi belanja kedepan tetap memperhatikan postur APBD yang Ideal dengan mengacu kepada Kebijakan Arah Pembangunan untuk lima tahun kedepan untuk membiyai Standar Pelayanan Dasar yang di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang mencakup sektor pendidikan, pelayanan kesehatan dan Infrastruktur. Selain itu kebijakan belanja juga memperhatikan belanja wajib mengikat serta prioritas utama sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan aparatur sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Selain pemenuhan Standar Pelayanan dasar sebagai belanja wajib dan belanja Pemenuhan kebutuhan aparatur. Alokasi belanja di arahkan untuk membiyai Program yang memuat Visi Misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pencapaiannya untuk lima tahun kedepan.

Proyeksi belanja tetap memperhatikan Proyeksi Pendapatan sehingga Postur APBD tetap menjaga besaran defisit untuk tetap melampaui batas yang telah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana capaian Realisasi pendapatan, belanja dan defisit lima tahun terakhir tetap di bawah ambang batas sehingga postur APBD dan pelaksanaannya tetap konsisten dengan defisit yang telah di tetapkan.

Proyeksi Belanja Untuk Tahun 2022 mengalami penurunan dibanding target pada tahun 2021 khususnya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal. Sedangkan untuk belanja transfer mengalami peningkatan sebesar 39 Persen dikarenakan dalam belanja transfer memuat salah Satu Program dari Visi Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Sehingga untuk belanja transfer dari tahun 2022 diproyeksikan pertumbuhannya sebesar 1,26 persen. Berikut di sajikan Target Belanja untuk tahun 2021 dan Proyeksi Belanja Untuk Tahun 2022 .



Tabel 3. 22 Analisis Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026

URAIAN	TARGET	PROYEKSI
	2021	2022
BELANJA	1,479,775,992,425	1,461,382,753,570
BELANJA OPERASI	1,037,389,631,024	906,876,161,902
Belanja Pegawai	478,867,337,150	489,327,071,237
Belanja Barang dan Jasa	478,380,377,881	358,725,645,665
Belanja Subsidi	200,000,000	200,000,000
Belanja Hibah	61,728,475,723	40,000,000,000
Belanja Bantuan Sosial	18,213,440,270	18,623,445,000
BELANJA MODAL	281,731,182,526	247,110,314,723
Belanja Modal Tanah	800,000,000	850,000,000
Belanja Modal Peralatan Mesin	53,034,947,098	45,423,411,503
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,677,488,558	79,524,356,207
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	132,018,746,870	121,132,547,013
Belanja Modal Aset tetap lainnya	200,000,000	180,000,000
BELANJA TIDAK TERDUGA	2,500,000,000	2,000,000,000
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,000,000,000
BELANJA TRANSFER	195,149,829,450	320,070,266,437
Belanja Bagi Hasil	16,210,182,450	16,210,182,450
Belanja Bantuan Keuangan	178,939,647,000	179,860,083,987
Belanja Bantuan Keuangan Khusus		124,000,000,000
JUMLAH BELANJA	1,516,770,643,000	1,476,056,743,062

Sumber : BPKD Kab.Luwu Timur

3.3.2.3 Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan yang memuat Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di asumsikan dengan mempertimbangkan besaran defisit antara Pendapatan dan belanja dan arah kebijakan Invesatasi Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2022.

Penerimaan Pembiayaan untuk target 2021 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) dengan asumsi untuk membiayai defisit dengan besaran dalam kategori sedang yaitu 2,6 persen, dan diproyeksikan besaran defisit lima tahun ke depan makin kecil yang berparalel dengan Penerimaan Pembiayaan untuk lima tahun kedepan, Pemerintah Daerah



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

kabupaten Luwu Timur sangat berhati-hati dalam meletakkan Asumsi Silpa di karenakan besaran Penerimaan Pembiayaan melalui Silpa menunjukkan Kinerja keuangan daerah khususnya serapan belanja. Makin besar Silpa mengindikasikan banyaknya program kegiatan yang tidak terlaksana yang berimplikasi pada perencanaan.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan arah kebijakan pemerintah daerah kabupaten luwu timur dalam bentuk Investasi/Penyertaan Modal ke PT.Bank Sulselbar dengan peningkatan Penyertaan Modal yang direncanakan setiap tahunnya selama lima tahun ke depan, sehingga di harapkan dengan Penyertaan Modal bisa memberikan Income dalam bentuk deviden ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2026. Berikut di sajikan Target Pembiayaan untuk tahun 2021 dan Proyeksi pembiayaan Untuk Tahun 2022.

Tabel 3. 23 Analisis Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TARGET	PROYEKSI
	2021	2022
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	39.994.647.000	17.673.889.492
Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (Silpa)	39.994.647.000	17.673.889.492
Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	3.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi)	3.000.000.000	3.000.000.000
Sisa lebih pembiayaan Tahun berkenaan	36.994.647.000	14.673.889.492

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur



Tabel 3. 24 Analisis Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TARGET	PROYEKSI
	2021*)	2022
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah	324,224,809,425	325,368,347,170
Pajak Daerah	163,677,500,000	170,201,950,000
Retribusi Daerah	5,747,309,425	6,166,397,170
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	33,800,000,000	25,000,000,000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	121,000,000,000	124,000,000,000
Pendapatan Transfer	1,090,315,663,000	1,075,605,776,000
Transfer Pemerintah Pusat	946,715,663,000	924,825,776,000
Dana Transfer Umum	946,715,663,000	924,825,776,000
Dana Alokasi Umum (DAU)	519,015,708,000	519,015,708,000
Dana Bagi Hasil	94,974,998,000	97,220,421,000
Dana Transfer Khusus	332,724,957,000	308,589,647,000
Transfer Antar Daerah	143,600,000,000	150,780,000,000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	143,600,000,000	150,780,000,000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	65,235,520,000	60,408,630,400
Hibah Dari Pemerintah Pusat	43,835,520,000	38,408,630,400
Hibah Dari Badan Usaha LN Dan DL	21,400,000,000	22,000,000,000
JUMLAH PENDAPATAN	1,479,775,992,425	1,461,382,753,570
BELANJA	1,479,775,992,425	1,461,382,753,570
BELANJA OPERASI	1,037,389,631,024	906,876,161,902
Belanja Pegawai	478,867,337,150	489,327,071,237
Belanja Barang dan Jasa	478,380,377,881	358,725,645,665
Belanja Subsidi	200,000,000	200,000,000
Belanja Hibah	61,728,475,723	40,000,000,000
Belanja Bantuan Sosial	18,213,440,270	18,623,445,000
BELANJA MODAL	281,731,182,526	247,110,314,723
Belanja Modal Tanah	800,000,000	850,000,000
Belanja Modal Peralatan Mesin	53,034,947,098	45,423,411,503
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,677,488,558	79,524,356,207
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	132,018,746,870	121,132,547,013
Belanja Modal Aset tetap lainnya	200,000,000	180,000,000
BELANJA TIDAK TERDUGA	2,500,000,000	2,000,000,000
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,000,000,000
BELANJA TRANSFER	195,149,829,450	320,070,266,437
Belanja Bagi Hasil	16,210,182,450	16,210,182,450
Belanja Bantuan Keuangan	178,939,647,000	179,860,083,987
Belanja Bantuan Keuangan Khusus		124,000,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

URAIAN	TARGET	PROYEKSI
	2021*)	2022
JUMLAH BELANJA	1,516,770,643,000	1,476,056,743,062
SURPLUS/DEFISIT	(36,994,650,575)	(14,673,989,492)
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	39,994,647,000	17,673,889,492
Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000	3,000,000,000
Sisa lebih pembiayaan Tahun berkenaan	36,994,647,000	14,673,889,492

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur; *) APBD Tahun Berjalan

3.3.3 Kerangka Pendanaan Pengeluaran Priodik dan Prioritas Utama dan Kapasitas Riil.

Setelah mendapatkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja serta Pembiayaan untuk Tahun 2022 dengan Mempertimbangkan dinamika kondisi keuangan Tahun rencana, maka dilanjutkan dengan melakukan proyeksi belanja terhadap Pembiayaan wajib dan mengikat. Analisis ini dilakukan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan melakukan penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kerangka pendanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Berdasarkan data realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama yang diuraikan sebelumnya, maka dibuat proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti yang tersaji berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tabel 3. 25 Analisis Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib Dan mengikat serta prioritas Utama Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)2021	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi
				Tahun 2022 (Rp)
A	Belanja Operasi	619,962,664,525.00	2.27	754,150,657,531.24
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	402,541,739,208.00	3.11	411,744,055,057.24
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	15,747,078,867.00	-	15,747,078,867.00
3	Belanja Bunga	-	-	-
B	Belanja Transfer			
4	Belanja bagi hasil	195,149,829,450.00	1.29	320,070,266,437.00
5	Biaya Penugutan Pajak dan Retribusi Daerah	6,524,017,000.00	1.50	6,589,257,170.00
6	Belanja Biaya Pemungutan Pajak dan Bangunan	-	-	-
C	Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000.00	29.74	3,000,000,000.00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	29.74	3,000,000,000.00
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	622,962,664,525.00	2.43	757,150,657,531.24

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tabel 3. 26 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Uraian	Proyeksi
		Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan	1.461.382.753.570,00
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	14.673.989.492,00
	Total penerimaan	1.476.056.743.062,00
	Dikurangi:	
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	757.150.657.531,24
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	718.906.085.530,76

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tabel 3. 27 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

KELOMPOK PRIORITAS RPJMD 2021-2026	TAHUN 2022	%
Kapasitas riil kemampuan keuangan	718.906.085.530,76	
KP 1	757.150.657.531,24	51,30
KP 2	474.734.630.363,64	32,16
KP 3	244.171.455.167,12	16,54
JUMLAH	1.476.056.743.062,00	100

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Luwu Timur

Keterangan :

Prioritas Pertama : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;

Prioritas Kedua : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah

Prioritas Ketiga : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diatas, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam 3 (tiga) kategori prioritas (KP). Yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, **Prioritas I** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. **Prioritas II** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan **Prioritas Iii** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan Pemerintahan.

Untuk Tahun 2022, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar khususnya pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini diharapkan untuk mendukung target



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengacu pada RPJMD Daerah dengan menekankan target Prioritas Pembangunan yang diarahkan pada pemantapan pencapaian Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026” **LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA**” dalam mewujudkan masyarakat yang semakin Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Program Prioritas yaitu program yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM. Program Prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi :

- Prioritas I** : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. serta ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah.
- Prioritas II** : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I.
- Prioritas III** : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan Pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target Sasaran Pembangunan Daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi Prioritas Pembangunan Daerah, disesuaikan dengan keterbatasan anggaran dan kemendesakan identifikasi masalah dan korelasinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Suatu prioritas pembangunan di masa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, terkecuali hal yang sangat mendesak dan memiliki daya ungkit besar terhadap

capaian kinerja Pemerintah Daerah dan berdampak luas bagi masyarakat yang tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*) selain itu pula dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional maupun Provinsi hal ini guna tercapainya harmonisasi antar perencanaan pembangunan .

Bagan alir perumusan awal prioritas pembangunan daerah dan program digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Bagan alir proses perumusan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah tahunan



Adapun Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020–2024 serta menyikapi Kebijakan Pembangunan Nasional;
2. Memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi dalam RPJMD 2018–2023 serta menyikapi Kebijakan Pembangunan RKPD Provinsi Tahun 2022;
3. Perwujudan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
4. Memperhatikan hasil Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi serta Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
5. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;
6. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan Kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota;

8. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan seluruh stakeholder;
9. Memantapkan kondusifitas wilayah/daerah sebagai dukungan terhadap pembangunan sektor lainnya melalui Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri bersama unsur terkait;
10. Merupakan perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
11. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah dengan meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/produktif yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
12. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah dan mendukung Sistem Inovasi Daerah;
13. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat serta sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
14. Merupakan respon relevan terhadap Isu Strategis dan masalah mendesak yang faktual di hadapi pada Tahun 2022;
15. Program dan kegiatan terpilih merupakan program dan kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang berkembang dalam masyarakat; dan
16. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target Pembangunan Nasional.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis dan dikompilasikan dengan penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam permendagri 86 tahun 2017 bahwa Penyusunan RKPD yang mengacu pada RPJMD, yang mana fokus pembangunan di arahkan pada Pembangunan Daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian peningkatan daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Guna mewujudkan Prioritas Pembangunan tersebut maka ditetapkan 6 Misi yang saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan visi daerah yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;

2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya;

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.

Pembangunan pada Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Tahun Pertama RPJMD 2021-2026, fokus pembangunan diarahkan kepada penajaman pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPJMD. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Daerah berdasarkan RPJPD 2005-2025, RKPD Tahun 2022 telah disusun dengan mengintegrasikan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang saat ini sedang dalam Tahap proses Penyusunan Sehingga diharapkan dapat terwujud sinergi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Berdasarkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi yang merupakan kerangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arahan yang jelas yang akan dilaksanakan guna menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pembangunan memberikan arahan yang jelas kepada para pemangku kepentingan dan para stakeholder dalam proses pelaksanaannya. Selain itu memberikan arahan pelaksanaan bagi setiap Urusan Pemerintahan Daerah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan dalam mendukung Misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah yang dirumuskan secara spesifik, realistis dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2019 dan tahun berjalan 2020 serta perumusan permasalahan dan tantangan pembangunan yang mungkin dihadapi pada Tahun 2022 baik internal maupun eksternal, serta dengan memperhatikan kerangka pendanaan daerah dan capaian Kinerja Pembangunan Daerah, guna memaksimalkan pencapaian Tujuan dan sasaran dalam kerangka penajaman perwujudan pencapaian Visi

Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Keterkaitan hubungan antara pokok visi dan rumusan misi sebagaimana yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Penjelasan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p>“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”</p>	<p>Berkelanjutan</p>	<p>mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p>



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lebih maju	mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.
	Berlandas nilai agama dan budaya	mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan



**Tabel 4. 2 Keterkaitan Pokok Visi dan Misi serta Penjelasan Misi RPJMD
Kabupaten Luwu Timur 2021-2026**

No.	Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Berkelanjutan	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh	dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum agar masyarakat Luwu Timur semakin meningkat kesejahteraan dan taraf hidupnya dengan ditandai oleh meningkatnya PDRB per kapita, menurunnya angka pengangguran, menurunnya rasio jumlah penduduk miskin, meningkatnya indeks pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya daya beli masyarakat
		Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas	dimaksudkan sebagai upaya umum agar perekonomian Luwu Timur terus berkembang. Selain itu juga memiliki kapasitas daya saing yang berbasis pada pertanian olahan mendukung hilirisasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah, serta menguatkan struktur ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Perekonomian Luwu Timur tersebut diupayakan berkembang dengan rantai pasok yang luas karena memiliki berbagai jaringan dalam konteks regional, nasional dan global
2.	Lebih Maju	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Luwu Timur didorong untuk menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini ditandai dengan upaya-upaya untuk terkelolanya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No.	Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
			partisipatif, serta pengembangan kerjasama yang fungsional dan produktif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta dengan berbagai pihak. Misi ini juga mencakup upaya perluasan jangkauan dan intensitas layanan public serta meningkatkan pendapatan asli daerah
		Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas	dimaksudkan sebagai upaya umum dalam menyediakan infrastruktur wilayah pada berbagai sektor sehingga ketersediaanya lebih memadai dan terakses sampai pada daerah terisolasi. Misi ini juga mencakup upaya dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana. Misi ini termanifestasikan dalam bentuk meningkatnya indeks lingkungan hidup, terciptanya kepatuhan multipihak terhadap Rencana Tata ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), serta peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas ketersediaan infrastruktur wilayah
3	Berlandas nilai agama dan budaya	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketentraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat seperti mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan.
		Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada	dimaksudkan agar pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No.	Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		agama dan budaya	pembangunan dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan pembangunan di masa depan. Misi ini mengasumsikan bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lebih prospektif lagi bagi masa depan Luwu Timur ketika proses atau pelaksanaan pembangunan didasari dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya tersebut menjadi sangat penting artinya. Ini telah ditunjukkan oleh sejarah perkembangan Luwu Timur di masa lalu yang masyarakatnya hidup dan berkembang dengan keberagaman yang kuat serta penghayatan dan praktik budaya yang tinggi. Nilai-nilai agama dan budaya ini juga relevan dalam konteks keberlanjutan pembangunan, karena dari keduanya para penyelenggara pembangunan dapat termotivasi untuk mengendalikan diri terhadap berbagai kemungkinan rusaknya tatanan keluarga, masyarakat, dan lingkungan fisik manusia

Berdasarkan hubungan antara Pokok Visi, Misi, Selanjutnya di lakukan penajaman melalui penepatan tujuan dan sasaran Pembangunan yang hendak dicapai dalam RPJMD. Hal ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi melalui perencanaan operasional Tahunan RPJMD yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Tahunan atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . Sasaran RPJMD ini kemudian dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk tahun rencana. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

sasaran pada RKPD Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 berdasarkan Target RKPD Kabupaten Luwu Timur 2022

No.	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target	
				2020	2021	2022
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	Tujuan-1: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (T1)	PDRB/kapita (juta)	70,49	70,90	71,45
		Sasaran-1: Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (S1)	Angka kemiskinan (%)	6,85	6,84	6,64
		Sasaran-2: Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (S2)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,22	73,50	73,80
2.	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)	Tujuan-2: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara merata (T2)	Rasio Gini	0,386	0,377	0,277
		Sasaran-3: Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah (S3)	Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE)	1,47	1,50	2,50
		Sasaran-4: Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha (S4)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,46	3,80	3,30
3.	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	Tujuan-3: Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah (T3)	Indeks daya saing infrastruktur daerah			
		Sasaran-5: Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S5)	Predikat indeks kepuasan layanan infrastruktur			
		Tujuan-4: Menjaga ketahanan lingkungan hidup (T4)	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup			
		Sasaran-6: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S6)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	86,87	87,00	87,55



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No.	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target	
				2020	2021	2022
4.	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	Tujuan-5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T5)	Indeks reformasi birokrasi (IRB)			
		Sasaran-7: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S7)	Nilai SAKIP Daerah	B	B	BB
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		Sasaran-8: Meningkatnya kualitas pelayanan public (S8)	IKM Pelayanan SPM (Nilai)			
IKM Pelayanan perizinan dan non perizinan (Nilai)	78, 73		80,15	82,21		
5.	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)	Tujuan-6: Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T6)	Angka kriminalitas			
		Sasaran-9: Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S9)	Nilai Kepuasan Masyarakat atas Kondisi Keamanan dan Ketertiban			
6.	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	Tujuan-7 Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya (T7)	Cakupan penerapan nilai agama dan budaya dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari (%)	94	95	95
		Sasaran-10: Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S10)	Indeks kerukunan umat beragama	75,67	75,70	75,89
			Indeks pembangunan kebudayaan			

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022.

Dalam penentuan Prioritas Pembangunan Daerah haruslah mempertimbangkan pencapaian tujuan umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Pelayanan Umum, serta mampu Meningkatkan Daya Saing Daerah.



Selain berpedomanan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Prioritas Pembangunan Daerah juga mempertimbangkan Isu Strategis Pembangunan Daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan Prioritas Pembangunan Daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti Kebijakan Pembangunan Provinsi dan Nasional serta perkembangan Ekonomi Regional.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa dalam merumuskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah selain berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 juga memperhatikan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, hal ini dimaksudkan guna terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berkesesuaian secara Nasional pada seluruh level tingkat pemerintahan.

4.2.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional serta Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down*. Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua Sasaran dan Prioritas serta Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua Pemangku Kepentingan.

Tema Pembangunan RKP 2022 disusun dengan mempertimbangkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2020-2024, hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Tahun 2020 serta Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Dengan terjadinya Pandemi Global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian Perekonomian Dunia dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

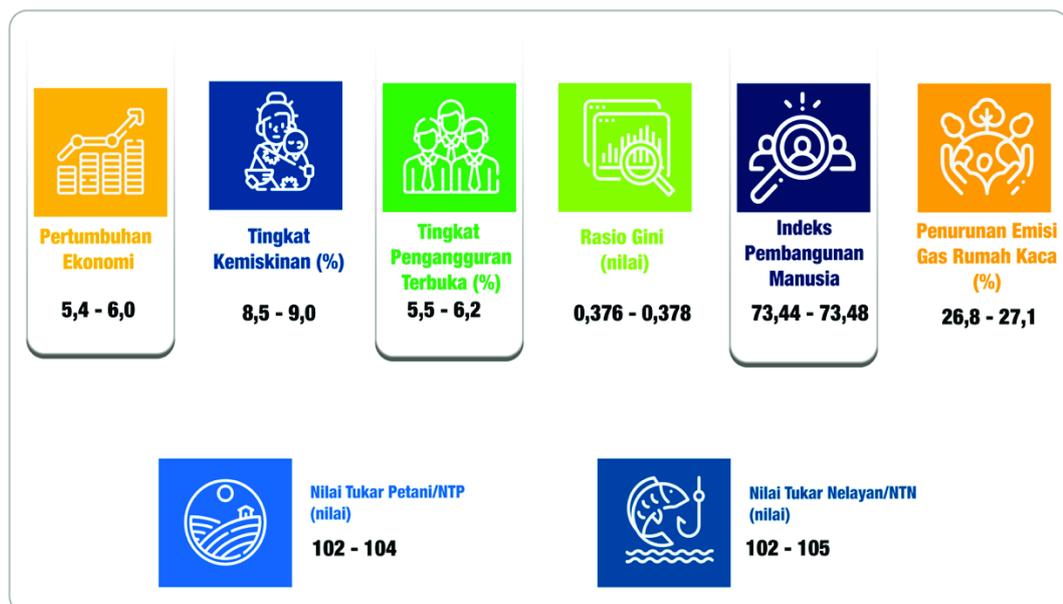
pada Tahun 2020, maka Tema Pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada proses Pemulihan Pembangunan Nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, dengan fokus Pada Dua Hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan ekonomi diterjemahkan sebagai upaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi

Adapun Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dengan Indikator (A) Pertumbuhan Ekonomi, (B) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitik beratkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.2:

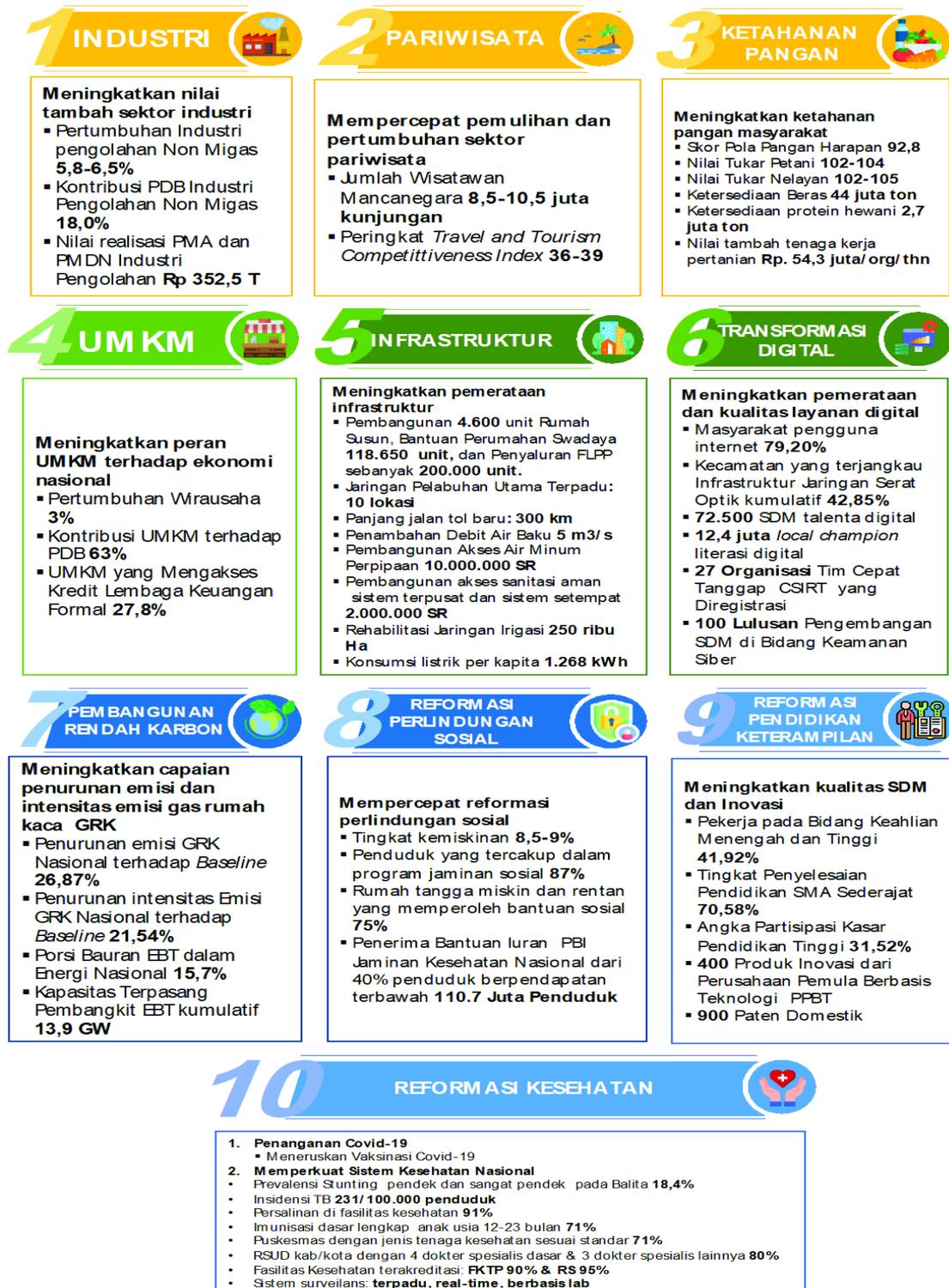


Gambar 4. 2 indikator sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022

Dengan Mengacu pada Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan tersebut diatas, maka Arah Kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi structural melalui pemulihan daya beli masyarakat dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun 10 (sepuluh) strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi GRK, (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19. Pelaksanaan strategi tersebut diukur melalui indikator-indikator yang menjadi penekanan pada setiap strategi di tahun 2022. Lebih lanjut target dan indikator strategi pembangunan nasional tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 4.3.

Gambar 4. 3 Strategi Pembangunan Nasional RKP Tahun 2022



Sumber: Ranwal RKP Tahun 2022 Kementerian Bappenas/PPN

Untuk mendukung Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 4.3.

Gambar 4. 4 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022



Sumber: Ranwal RKP Tahun 2022 kementerian Bappenas/PPN

4.2.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 mengusung Tema “Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam Untuk

Kebangkitan Ekonomi” dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 meliputi :

1. Pemantapan reformasi birokrasi
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial
4. Percepatan Pembangunan Sumber daya Manusia yang berkarakter dan Berbudaya;
5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan diatas guna terjaminnya arah pembangunan yang akan dilaksanakan maka prioritas tersebut diterjemahkan kedalam fokus pembangunan berdasarkan prioritas tersebut sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi difokuskan pada:
 - a. Peningkatan dan pengembangan SDM aparatur;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan public;
 - c. Penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses bisnis birokrasi yang sederhana, cepat, dan terintegrasi.
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan. difokuskan Pada:
 - a. Peningkatan kemantapan dan ketersediaan infrastruktur jalan yang menjadi jalur perekonomian dan daerah-daerah terisolir;
 - b. Peningkatan cakupan layanan irigasi pendukung ketahanan pangan;
 - c. Penyediaan transportasi pelabuhan, dan elektrifikasi daerah-daerah kepulauan.
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial difokuskan Pada:
 - a. Pengembangan komoditas sektor unggulan;
 - b. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian

- daerah;
- c. Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan;
 - d. Penanganan dan pencegahan meningkatnya penyebaran covid-19;
 - e. Memperluas social safety net untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industry.
4. Percepatan Pembangunan Sumber daya Manusia yang berkarakter dan Berbudaya, difokuskan Pada:
- a. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah
 - b. Peningkatan daya saing lulusan SMK
 - c. Mendorong Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun, penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS),
 - d. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang ditekankan pada meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, status gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup bersih dan sehat,
 - e. Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional (Rumah sakit Regional).
 - f. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya Sulawesi Selatan
5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup difokuskan pada:
- a. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam;
 - b. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Adapun Target Indikator Makro Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : **4,62-5,98**;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) : **5,90**;
3. Tingkat Kemiskinan (%) : **8,10**;
4. Rasio Gini (Indeks) : **0,381**;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 72,57;
6. Pdrb Perkapita (Rp) : 62,43.

berdasarkan Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan tersebut diatas, maka Arah Kebijakan yang akan ditempuh pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagaimana yang disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4 Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
1	Pemantapan reformasi birokrasi	Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas
2	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Peningkatan Pemenuhan Layanan Infstruktur Wilayah
3	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social	Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan mikro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru
		Peningkatan produktivitas, keterampilan tenaga kerja dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan
		Pengembangan dan Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
4	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	Peningkatan akses layanan social kan yang merata dan berkualitas.
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
		Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam Pembangunan.
		Mendorong kesalehan dan tanggung jawab social masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai keagamaan serta pemberdayaan Lembaga keagamaan,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

		pesantren, dan penyelenggara keagamaan
5	Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan produktivitas melalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan
		Penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang energi, lahan, limbah, dan industri
		Peningkatan upaya pencegahan, pelestarian, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sumber: Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

4.2.3 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 upaya pembangunan semakin di akselerasikan untuk kemandirian dan daya saing daerah. Sebagaimana arahan RPJP Kabupaten Luwu Timur 2005-2025 dimana pada tahapan ke IV RPJMD diharapkan Kabupaten Luwu Timur diharapkan telah berkembang menjadi daerah berdaya saing tinggi, berbasis agama dan kearifan lokal dengan tingkat kesejahteraan pada level menengah. Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan yang berkeadilan menjadi prioritas utama.

4.2.3.1 Tema Pembangunan.

Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dengan mengintegrasikan Rancangan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah RPJMD 2021-2026, hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Tahun 2020 serta Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Dengan terjadinya Pandemi Global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian Perekonomian Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi daerah pada Tahun 2020, meskipun pertumbuhan ekonomi Luwu Timur menunjukkan kinerja yang membaik namun hal ini tidak dirasakan dampaknya secara merata di masyarakat, oleh karena sub sektor

pertambangan masih mendominasi kontribusi pembentuk nilai Pdrb daerah. Hal ini berdampak pada fluktuatifnya Nilai pertumbuhan ekonomi Luwu Timur dimana nilainya sangat tergantung pada gejolak harga Nikel dipasar global, Sehingga jika melihat struktur pembentuknya maka dapat dipastikan bahwa sub sector lainnya sangat merasakan dampak dari situasi pandemic covid 19 ini. dimana diperkirakan dampaknya masih akan dirasakan dalam lima tahun yang akan datang. Untuk itu maka Tema Pembangunan RKPD Tahun 2022 diarahkan kepada proses Pemulihan Pembangunan Daerah guna mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah **“Peningkatan Daya Saing Daerah untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi daerah yang berkualitas”**. Dengan fokus pada peningkatan daya saing daerah dan pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas. Peningkatan daya saing daerah diterjemahkan sebagai upaya dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan yang ditempuh melalui upaya (1) meningkatkan kualitas hidup manusia; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan produk lokal; dan (3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi daerah, serta Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diterjemahkan sebagai upaya mendukung Pemulihan ekonomi daerah dengan upaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan Produktifitas dunia usaha dalam mendukung peningkatan Produktifitas sub sektor lainnya selain pertambangan.

4.2.3.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran dalam RKPD adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan/Tema, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang hendak diwujudkan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Berdasarkan tema tersebut maka sasaran Makro pembangunan yang akan diwujudkan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

1. Peningkatan Kualitas dan daya saing Sumber daya manusia dengan indikator (a) Indeks Pembangunan Manusia; (b) Tingkat Kemiskinan
2. Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan indikator (a) Laju Pertumbuhan Ekonomi; (b) Gini Ratio; (c) Pdrb Perkapita ; (d) Tingkat Pengangguran terbuka;

Berdasarkan sasaran makro tersebut adapun target dari indikator yang akan dicapai sebagaimana pada gambar 4.5 dibawah:

Gambar 4. 5 Indikator Sasaran MAkro Pembangunan RKPD tahun 2022



Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Pembangunan Daerah tahun 2020, serta target penetapan kinerja Tahun 2021 dan 2022 serta isu strategis daerah yang mungkin dihadapi pada Tahun 2022 kebijakan pembangunan tahun 2021 masih relevan untuk dilanjutkan. maka target sasaran makro pembangunan Daerah tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a) Skenario Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun

2022 diproyeksikan sebesar 1,5 – 2,50% dengan asumsi **Pertama**, pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi akan kembali Mengalami Pertumbuhan Pasca imbas dari situasi Ekonomi Global yaitu Pandemi covid 19 **Kedua**, *diharapkan* kondisi pemulihan ekonomi dunia yang sudah semakin stabil, dan semakin meningkatnya kinerja sektor pertanian dengan meminimalisir faktor struktural yang dapat menghambat pergerakan pada sektor ini (benih, pupuk, sarana produksi pertanian) dan perubahan pola iklim serta cuaca; Melalui kebijakan meningkatkan arus investasi didaerah yang berkeadilan; perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi; kemudahan ijin usaha; penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan penerapan teknologi tepat guna.

- b) Demikian halnya dengan Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kinerja semakin membaik dari tahun ke tahun, 6,98 % pada tahun 2019 menjadi 6,85 % pada tahun 2020, perkembangan angka kemiskinan di kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada kisaran 7 persen, berdasarkan hal tersebut untuk Tahun 2022 angka kemiskinan di proyeksikan dapat mencapai 6,84-6,64 % yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan intervensi program/kegiatan sektoral berdimensi kewilayahan, mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas tingkat kemiskinan tinggi (*polaquickwin*). Peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga melalui:
- Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara

Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;

- Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih, sanitasi, penyediaan bantuan dan jaminan sosial serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan;
 - Peningkatan kerjasama yang melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
 - Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan;
 - Peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan Pemberdayaan masyarakat Sekitar hutan;
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja melalui penyusunan standar bakulembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi calon naker ,peningkatan jumlah, kapasitas asesor kompetensi dan revitalisasi BLK;
 - Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi;
 - Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial
- c) Pembangunan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan termasuk bagi warga miskin, PMKS termasuk penyandang disabilitas, peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, perluasan fasilitas anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal, pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan relevansi

pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja, memperkuat peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah, peningkatan budaya baca masyarakat serta pembangunan mental dan karakter anak didik;

- d) Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan masyarakat miskin, pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbaikan gizi masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran swasta serta masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, peningkatan mutu tenaga kesehatan dengan pelatihan, sertifikasi dan penguatan kompetensi dan optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, peningkatan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- e) Peningkatan kemampuan inovasi dan penerapan Iptek guna mendukung peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan interaksi dan pemanfaatan sumberdaya perguruan tinggi, lembaga penelitian, praktisi dan dunia usaha; pengembangan klaster inovasi dan pengetahuan sebagai *centre of excellence*;
- f) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana, fokus pada:
- Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui pelibatan serta peran aktif masyarakat;
 - Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan Kelembagaan masyarakat dan Penegakan hukum;
 - Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;

- Peningkatan konservasi sungai, dan danau untuk meningkatkan ketersediaan dan Keberlangsungan sumber daya air;
 - Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan produktif;
 - Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan masyarakat;
 - Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan Penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.
- g) Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tatakelola pemerintahan dan penciptaan kondusifitas wilayah, fokus pada:
- Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan kelembagaan;
 - Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik, optimalisasi layanan terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi, Optimalisasi Pencapaian SPM;
 - Pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;
 - Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju- *government*;
- h) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,30–3,80% pada Tahun 2022 melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi penyerapan tenaga kerja disektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi, perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan, penguatan

hubungan industrial serta perlindungan terhadap tenaga kerja melalui skema BPJS Ketenagakerjaan;

- i) Mengurangi disparitas infrastruktur antar wilayah, peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan jaringan irigasi, prasarana sumberdaya air, pelabuhan, pengembangan moda transportasi, sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan antarwilayah;
- j) Pembangunan Pertanian dalam arti luas guna mendukung kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui program Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, teknologi, akses pasar, serta pengendalian alih fungsi dalam mendukung program nasional lahan pangan berkelanjutan;
- k) Pengembangan kawasan pesisir dan sentra perikanan melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar perikanan, penegakan hukum terkait *unregulated and unreported fishing*; dukungan pengaturan penangkapan di kawasan *overfishing*, rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan.
- l) Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga sesuai kewenangan Kabupaten;
- m) Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan sebagai upaya pemantapan kesiapan dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- n) Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan

Pemulihan Perekonomian Daerah dimasa pandemi covid 19 melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM, perlindungan terhadap produk dalam negeri, pembinaan dan pemberdayaan KUMKM-IKM, sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja, mendayagunakan program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha, membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyerderhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi, serta dukungan infrastruktur;

- o) Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan melibatkan seluruh stakeholder dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme *check and balances*;
- p) Dalam rangka pengelolaan pembangunan perdesaan perlu diperhatikan:
- Dukungan pembangunan perdesaaan melalui kebijakan bantuan keuangan Khusus kepada pemerintah desa guna terwujudnya kemandirian desa
 - Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten yaitu rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa harus sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 ;
 - Pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan skala lokal desa kepada Desa;
 - Pelaksanaan program sektoral yang masuk kedesa harus terinformasi dan terintegrasi dengan rencana pembangunan desa.
 - Pembangunan perdesaaan berbasis kearifan lokal perdesaan,

dan difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang prioritas dan mendesak untuk diselesaikan pada skala desa.

- q) Akselerasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur;
- r) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas belanja langsung berbasis kinerja dengan mengedepankan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik produktif yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- s) Pengusulan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 harus mencerminkan kinerja yang terukur terhadap pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah dan berbasis Sistem Informasi Perencanaan pembangunan (SIPD).

Selanjutnya guna menjamin konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar dokumen maka sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 Target Sasaran RKPD tahun 2022 disajikan secara lengkap sebagaimana pada tabel 4.5 berikut:



Tabel 4. 5 Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2021-2026

No.	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
				2021	2022
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	Tujuan-1: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (T1)	PDRB/kapita (juta)	70,90	71,45
		Sasaran-1: Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (S1)	Angka kemiskinan (%)	6,84	6,64
		Sasaran-2: Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (S2)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,50	73,80
2.	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)	Tujuan-2: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara merata (T2)	Rasio Gini	0,377	0,277
		Sasaran-3: Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah (S3)	Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE)	1.50	2.50
		Sasaran-4: Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha (S4)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.80	3.30
3.	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	Tujuan-3 Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah (T3)	Indeks daya saing infrastruktur daerah		
		Sasaran-5: Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S5)	Predikat indeks kepuasan layanan infrastruktur		
		Tujuan-4: Menjaga ketahanan lingkungan hidup (T4)	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup		
		Sasaran-6: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S6)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	87,00	87,55
4.	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	Tujuan-5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T5)	Indeks reformasi birokrasi (IRB)		
		Sasaran-7: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S7)	Nilai SAKIP Daerah	B	BB
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No.	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
				2021	2022
		Sasaran-8: Meningkatnya kualitas pelayanan public (S8)	IKM Pelayanan SPM (Nilai)		
			IKM Pelayanan perizinan dan non perizinan (Nilai)	80,15	82,21
5.	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)	Tujuan-6: Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T6)	Angka kriminalitas	0,03	0,04
		Sasaran-9: Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S9)	Nilai Kepuasan Masyarakat atas Kondisi Keamanan dan Ketertiban		
6.	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	Tujuan-7: Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya (T7)	Cakupan penerapan nilai agama dan budaya dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari (%)	95	95
		Sasaran-10: Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S10)	Indeks kerukunan umat beragama	75,70	75,89
			Indeks pembangunan kebudayaan		

Sumber: Rancangan RPJMD 2021-2026

4.2.3.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategi Pembangunan Tahun 2022

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2022, maka arah kebijakan umum pembangunan Luwu Timur untuk tahun 2022 adalah *Peningkatan Daya Saing Daerah untuk mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas* melalui Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia, pemulihan daya beli masyarakat dan membangkitkan produktifitas dunia usaha, serta didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur daerah, pemanfaatan potensi SDA yang berkelanjutan, reformasi birokrasi serta keamanan dan ketertiban wilayah.

Dalam mewujudkan tercapainya arah kebijakan umum tersebut selanjutnya dituangkan dalam Strategi yang menggambarkan rangkaian

tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 guna menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah, dimana kedudukan RKPD tahun 2022 merupakan dokumen Operasional tahunan dari RPJMD. Adapun strategi pembangunan daerah berdasarkan RPJMD untuk periode RKPD tahun rencana 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Strategi Pembangunan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh			
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat(T1)	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (S1)	Meningkatkan pendapatan Masyarakat (St1)
			Meningkatkan perlindungan sosial (St2)
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (S2)	Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya (St3)
			Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik dalam Preventif , Represif, maupun Kuratif melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis Berkualitas (St4)
Misi 2 Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas			
2	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara merata (T2)	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah (S3)	Menguatkan kelembagaan serta daya saing Koperasi, UKM, dan IKM (St5)
			Meningkatkan peluang investasi daerah (St6)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha (S4)	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja (St7)
Misi 3			
Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas			
3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah (T3)	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S5)	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah serta penataan ruang bagi interkoneksi intra dan antar wilayah (St8)
4	Menjaga ketahanan lingkungan hidup (T4)	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S6)	Meningkatkan pengelolaan Lingkungan (St9)
Misi 4			
Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik			
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T5)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S7)	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (St10)
		Meningkatnya kualitas pelayanan public (S8)	Meningkatkan sistem pelayanan Publik (St11)
Misi 5			
Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat			
6	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T6)	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S9)	Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan yang kondusif (St12)
Misi 6			
Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya			
7	Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya (T7)	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S10)	Meningkatkan Kualitas Kerukunan intra dan antar umat beragama (St13)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Meningkatkan pelestarian terhadap nilai kekayaan budaya dan keragaman budaya (St14)

Sumber: Rancangan RPJMD Kab. Luwu Timur 2021-2026.

4.2.3.4 Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022

Berdasarkan Tema, Tujuan, Sasaran serta Arah umum kebijakan dan strategi pembangunan daerah RKPD tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Daerah (PD). Kelima (PD) tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2016 –2021 dan tetap dipertahankan pada RKPD Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan Rancangan RPJMD 2021-2026 sebagai langkah awal dalam pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan periode selannjutnya dalam lima tahun kedepan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun prioritas pembangunan RKPD Tahun 2022 disinergikan Prioritas Pembangunan Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata. (PN1;PP3&5)
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (PN3;PP4)
3. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. (PN2&5; PP2)
4. Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. (PN6;PP5)
5. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik. (PN7;PP1)

Prioritas Pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mempedomani Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dengan fokus pada Pencapaian target Program Prioritas Pembangunan Daerah guna menjamin konsistensi Perencanaan pembangunan;
- 2) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2022 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
- 3) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan RKPD Tahun 2022;
- 4) Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2020 dan rencana target capaian Tahun 2021 dan kerangka kapasitas fiskal Daerah Tahun 2022 ;
- 5) Difokuskan pada penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
- 6) Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;

4.2.3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dalam mendukung Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tujuan pembangunan yang diratifikasi lebih dari 200 negara di dunia. SDGs ini merupakan program pembangunan kelanjutan dari program Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah berakhir pada tahun 2015. Inti dari pembangunan ini adalah pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus memperhatikan generasi berikutnya. Pembangunan saat ini tidak boleh mengorbankan generasi yang akan datang. Selain itu pada SDGs juga menekankan tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *No-one Left Behind* dari pembangunan yang dilaksanakan.

Paradigma pembangunan SDGs memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan paradigma pembangunan sebelumnya (MDGs). Beberapa perbedaan tersebut diantaranya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

1. Paradigma SDGs bersifat dari bawah (*bottom up*) dan partisipatif. Sedangkan paradigma MDGs cenderung dari atas (*top down*)
2. Paradigma SDGs menawarkan solusi yang menyeluruh karena semua aspek disentuh. Sehingga wajar jika terdapat 17 tujuan yang ingin disasar. Sedangkan paradigma MDGs lebih bersifat solusi parsial atau hanya sebagian saja. Tujuan yang disasar MDGs hanya 8 dan hanya menyentuh kemiskinan dan gejala kemiskinan. Sedangkan masalah ekologi, lingkungan dan ketimpangan tidak mendapat banyak perhatian dalam MDGs.
3. Target SDGs adalah 100 persen pada 2030. Sedangkan untuk MDGs biasanya hanya 50 persen tercapai pada 2015. Akibatnya beberapa negara sudah tercapai targetnya bahkan sebelum tahun 2000.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sudah menjadikan SDG's sebagai salah satu referensi pembangunan Luwu Timur tahun 2022. Secara detail, sinkronisasi Tujuan SDG's dan Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 tersaji pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4. 7 Sinkronisasi Tujuan SDG's dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
1.	Menghapus Kemiskinan	1.	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif;	1.	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat	1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		2.	Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan	2.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan non pemerintah dan efektivitas kordinasi dalam perlindungan, pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin serta PMKS	2.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
		3.	Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.			3.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
						4.	Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
						5.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
						6.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
						7.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
						8.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2.	Mengakhiri Kelaparan	1.	Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok,	1.	Tersedianya Pangan Strategis	1.	Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan
		2.	Stabilisasi harga bahan pangan,	2.	Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
		3.	Perbaiki kualitas konsumsi pangan			3.	Program Peningkatan Produksi dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
			dan gizi masyarakat,				Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan
		4.	Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan,			4.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
		5.	Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.				
3.	Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan	1.	Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas,	1.	Meningkatnya derajat pendidikan dan derajat kesehatan	1.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		2.	Mempercepat perbaikan gizi masyarakat,			2.	Program Peningkatan Pelayanan Jenazah
		3.	Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,			3.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
		4.	Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan,			4.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		5.	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas,			5.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		6.	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas,			6.	Program Pelayanan Kesehatan Olahraga
		7.	Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan,			7.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
		8.	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan			8.	Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
		9.	Meningkatkan pengawasan obat dan makanan,			9.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS
		10.	Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.			10.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
						11.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
						12.	Program Pelayanan Kesehatan Kerja
						13.	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
						14.	Program Pengawasan Obat dan Makanan
						15.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
						16.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
						17.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
						18.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
						19.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
						20.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
						21.	Program Peningkatan Pelayanan Rekam Medik Rumah Sakit
						22.	Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit
						23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
						24.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
						25.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
						26.	Program Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
						27.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
						28.	Program Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga PLKB
						29.	Program Peningkatan Advokasi KIE Pengendalian



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
							Penduduk dan Keluarga Berencana
						30.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat
						31.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
						32.	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga
						33.	Program Keluarga Berencana
						34.	Program Pelayanan Kontrasepsi
						35.	Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga
4.	Pendidikan Bermutu	1.	Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun,	1.	Meningkatnya derajat pendidikan dan derajat kesehatan	1.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		2.	Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas,			2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		3.	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan,			3.	Program Pendidikan Non Formal
		4.	Memperkuat jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) <i>pelayanan pendidikan,</i>			4.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		5.	Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya,			5.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		6.	Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel,				
		7.	Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru				
		8.	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi,				
		9.	Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi,				
		10.	Meningkatkan				



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
			relevansi dan daya saing pendidikan tinggi,				
		11.	Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.				
5.	Kesetaraan Gender	1.	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan,	1.	Meningkatnya kesetaraan gender	1.	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
		2.	Menekankan peran perempuan di bidang politik,			2.	Koordinasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
		3.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).				
6.	Akses Air Bersih dan Sanitasi	1.	Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi,	1.	Meningkatnya Akses Air Bersih dan Sistem Sanitasi	1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		2.	Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat,	2.	Meningkatnya Akses Air Bersih dan Sistem Sanitasi	2.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		3.	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi,				
		4.	Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya				
		5.	Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat				
		6.	Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif				
		7.	Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
			mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim				
		8.	Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.				
7.	Energi Bersih dan Terjangkau	1.	Meningkatkan produksi energi primer	1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman	1.	Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman
		2.	Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi				
		3.	Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi				
		4.	Meningkatkan aksesibilitas energi				
		5.	Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik				
		6.	Memfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.				
8.	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	1.	Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri	1.	Meningkatkan produksi bidang-bidang perekonomian	1.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
		2.	Pemasaran pariwisata nasional			2.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
		3.	Pembangunan			3.	Program Peningkatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
			industri pariwisata				Produksi Hasil Peternakan
		4.	Pembangunan kelembagaan pariwisata			4.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
		5.	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja			5.	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
		6.	Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial			6.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
		7.	Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan			7.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
		8.	Kebijakan keuangan mikro inklusif			8.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
		9.	Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank			9.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
		10	Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.			10.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan
						11.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
						12.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
						13.	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
						14.	Program Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)
						15.	Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian
						16.	Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Pelaku Utama
						17.	Program Pengembangan Kemitraan
						18.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
						19	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
						20	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
						21	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
						22	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
						23	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
						24	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
						25	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Perikanan
						26	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
						27	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
						28	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
						29	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
						30	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
						31	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
						32	Program Penataan Struktur Industri
						33	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
9.	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	1.	Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur	1.	Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik	1.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
		2.	Pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur	2.	Meningkatnya infrastruktur Irigasi, Pengaman Sungai dan Pantai	2.	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
		3.	Implementasi prinsip <i>Value for Money</i> (VfM)	3.	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Industri Kecil dan	3.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
					Menengah		Jaringan Pengairan Lainnya
		4.	Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur	4.	Terwujudnya penguatan sistem inovasi daerah	4.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		5.	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan			5.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensia
		6.	Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi			6.	Program Inovasi Pelayanan Publik
		7.	Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam			7.	Program Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
		8.	Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar				
		9.	Pembangunan taman tekno dan taman Sains				
		10.	Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang				
		11.	Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur				
		12.	Akselerasi pertumbuhan pariwisata				
		13.	Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif				
		14.	Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.				
10.	Mengurangi Ketimpangan	1.	Menciptakan pertumbuhan Inklusif	1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UKM	1.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
		2.	Memperbesar investasi padat kerja	2.	Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja	2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		3.	Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro			3.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		4.	Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal			4.	Program Pelatihan dan Peningkatan SDM
		5.	Meningkatkan dan				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
			memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu				
		6.	Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian				
		7.	Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.				
11.	Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	1.	Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN),	1.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	1.	Program Pengembangan Perumahan
		2.	Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP),	2.	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		3.	Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana,	3.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman	3.	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		4.	Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal,			4.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5.	Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.			5.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
						6.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
12.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1.	Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.		Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan
						2.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura
13.	Penanganan Perubahan Iklim	1.	Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	1.	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
		2.	Mengembangkan	2.	Meningkatnya	2.	Program Pengendalian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
			pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim		infrastruktur Irigasi, Pengaman Sungai dan Pantai		Banjir
		3.	Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana)			3.	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
		4.	Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan,				
		5.	Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses				
14.	Menjaga Ekosistem Laut	1.	Percepatan pengembangan ekonomi kelautan	1.	Menguatkan aturan dan peran serta masyarakat dalam memelihara keragaman hayati dan mengembangkan ekowisata	1.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
		2.	Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut,				
		3.	Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan				
		4.	Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.				
15.	Menjaga Ekosistem Darat	1.	Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis,	1.	Menguatkan aturan dan peran serta masyarakat dalam memelihara keragaman hayati dan mengembangkan	1.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
			dan sumber daya genetik		ekowisata		
		2.	Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak	2.			
		3	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.	3.			
16.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat	1.	Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil	1.	Meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Program Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dan Kepala Daerah
		2.	Memperbaiki perundang-undangan bidang politik	2.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	2	Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
		3.	Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik			3	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		4.	Penerapan <i>egovernment</i> untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan reintegrasi			4	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		5.	Penerapan <i>open Governmen</i>			5	Program Penanganan Masalah Hukum dan HAM
		6.	Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis				
		7.	Penerapan				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Daerah	Program		
		manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis nefrit				
		8. Peningkatan kualitas pelayanan Publik				
		9. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik				
		10. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan Memanfaatkannya				
		11. Meningkatkan kualitas penegakan hukum				
		12. Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM				
		13. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat				
		14. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak				
		15. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi				
		16. Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi				
		17. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi				
		18. Meningkatkan pencegahan korupsi				
		19. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan				
		20. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan				



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
		21.	Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal				
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1.	Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif	1.	Memperbaiki budaya birokrasi dalam memudahkan sistem perizinan dan memperbaiki iklim investasi	1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		2.	Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global	2	Menjalin hubungan kemitraan yang baik antara pemerintah dan swasta/perusahaan, ma-syarikat dan swasta/perusahaan serta pekerja dan perusahaan	2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		3.	Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular			3	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		4.	Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran				
		5.	Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband				
		6.	Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)				
		7.	Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis				
		8.	Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik				
		9.	Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi				
		10.	Reformasi penerimaan				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs		Arah Kebijakan Nasional		Arah Kebijakan Daerah		Program	
			perpajakan yang komprehensif				
		11.	Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya.				

4.2.3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dalam mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG).

A. Kebijakan

Dalam hal kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur, maka ada beberapa tahapan regulasi yang dibuat untuk penguatan kebijakan sebagai dasar hukum dan pijakan pelaksanaan PUG bagis seluruh elemen baik itu organisasi perangkat daerah ataupun lembaga masyarakat, akademisi/perguruan tinggi, media dan dunia usaha. Semua unsur pelaksana PUG tersebut sangat penting untuk senantiasa dilibatkan demi mencapai sebuah hasil yang lebih komprehensif.

Kebijakan PUG di Kabupaten Luwu Timur yang telah menjadi acuan pelaksanaan PUG ada 2, yaitu :

1. Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107),
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Selanjutnya diikuti oleh beberapa kebijakan sectoral dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti Perda larangan Merokok, Perda ASI, Perda Ketenagakerjaan, dsb. Dan berbagai kebijakan seperti surat edaran kepala OPD dalam hal pelaksanaan PUG dan PPRG.



B. Kelembagaan

Kelembagaan PUG di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan cukup baik ini dibuktikan dengan dibentuknya kelembagaan Pokja PUG Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 93 / II / Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur. Pokja PUG Kabupaten Luwu Timur diketuai oleh Bappelitbangda Kabupaten Luwu Timur dan dibagi ke dalam beberapa tim teknis kelompok kerja yaitu Bidang Pendidikan Agama, Bidang Kesehatan dan Lingkungan, Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja, Bidang Politik, Hukum dan Perlindungan Perempuan, Bidang Sosial Budaya, dimana anggotanya adalah seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Lembaga/Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi/Akademisi, Dunia Usaha dan Media.

Kelembagaan Pokja PUG Kabupaten Luwu Timur dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas Pokja PUG sebagai berikut:

- A. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- B. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
- C. Menyusun program kerja setiap tahun;
- D. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- E. Menyusun rencana kerja Pokja PUG tiap tahun;
- F. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- G. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- H. Menyusun profil gender kabupaten;
- I. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi
- J. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah
- K. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten; dan
- L. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Selain itu, telah dibentuk pula Tim Focal Point PUG di 39 OPD/Unit kerja lingkup Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD dan diperbaharui setiap tahun. Tim Focal Point PUG ini mejadi ujung tombak pelaksanaan PUG di OPD dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- Mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada unit kerja;
- Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsive gender;
- Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
- Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- Memfasilitasi penyusunan data gender.

Kelembagaan PUG di Kabupaten Luwu Timur juga dikuatkan melalui pembentukan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender melalui Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 115/III/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggaran yang Responsif Gender Kabupaten Luwu Timur dengan tugas yang disesuaikan bidang masing-masing OPD teknis ARG.

BAPELITBANGDA Kabupaten Luwu Timur sebagai unit kerja yang menangani perencanaan pembangunan sekaligus sebagai ketua Pkja PUG bertugas :

- Memfasilitasi penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, KUA-PPAS, Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah Responsif Gender;
- Melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS, dan Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah yang responsive gender;
- Melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan yang responsive gender;
- Mengkoordinasikan hal terkait penyusunan dokumen perencanaan yang responsid gender.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai unit kerja yang memiliki bidang tugas PPPA dan juga sebagai sekretaris pokja PUG bertugas:

- Meningkatkan kapasitas dan pendampingan PPRG bagi para perencana dan Focal Point PUG di Perangkat Daerah;
- Melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah yang responsif gender bersama perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
- Melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait penyusunan PPRG di daerah; dan
- Mengkoordinasikan hal terkait penyusunan dan pelaksanaan PPRG Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unit kerja keuangan dan anggaran daerah bertugas :
 - Menyusun kebijakan teknis tentang penganggaran yang responsive gender;
 - Melaksanakan telaah dokumen GBS dari perangkat daerah;
 - Melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait penganggaran yang responsive gender; dan
 - Mengkoordinasikan hal terkait penyusunan penganggaran yang responsive gender.

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai unit kerja yang menangani pengawasan, bertugas :

- Membuat pedoman pengawasan PPRG;
- Melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan dari pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di perangkat daerah;
- Memberikan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut;
- Melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait pengawasan PPRG; dan
- Mengkoordinasikan hal terkait pengawasan PPRG.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya guna mengoperasional arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 dituangkan melalui program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah tahun 2022 dengan berpedoman pada target dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. adapun kebijakan umum dan prioritas program pembangunan daerah RKPD kabupaten luwu timur tahun 2022 disajikan pada tabel 4.8 berikut:

**Tabel 4. 8 Kebijakan Umum Dan Prioritas Program Pembangunan Daerah
RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Tahun-2021	Tahun-2022			
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)						
1	1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (T1)	PDRB/kapita (Rp (juta))	70.9	71.45		
1	1	1	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (S1)	Angka kemiskinan (Persen)	6.84	6.64	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah ketersediaan pangan utama setara pangan pokok ((Ton))	245,426	205,774	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan (lokasi)	6	6	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah lokasi yang rawan dan rentan pangan yang intervensi (lokasi)	0	3	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	0	100	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pengembangan Objek Pariwisata (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Persen)	95	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pembinaan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Persen)	95	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	13	12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Tahun-2021	Tahun-2022			
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang bertanda tera sah (%)	90	90	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	5.56	6.08	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Usaha Industri yang terdata dalam SIINAS (%)	100	100	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran (%)	100	100	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)	340	120	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	1	2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (S2)	Indeks Pembangunan Manusia (Persen)	73.5	73.8	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	46.51	46.91	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Masyarakat putus/belum sekolah pada Lembaga Pendidikan non formal (%)	54.56	54.58	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	103.23	103.33	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	103.57	103.58	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk (%)	0.02	0.02	DINAS KESEHATAN
				Angka kematian ibu (per 100000 KH)	126.17	108.14	
				Angka kematian Bayi (per 1000 KH)	8.11	7.93	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%) (%)	80.86	81.66	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan (%)	68	70	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa)	127	127	DINAS KESEHATAN



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)	30	36	RSUD I LAGALIGO
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDM (%)	0	100	RSUD I LAGALIGO
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang diberikan bantuan sosial (%)	36.52	40.23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani (%) (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang tertangani (%)	41.23	44.93	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)	22.38	22.41	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yang ditangani (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit) (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase OPD yang memenuhi indikator 7 prasyarat PUG (%)	90	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	72.73	81.82	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pembelajaran keluarga (%)	0.14	0.14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Tahun-2021	Tahun-2022			
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO (%)	0	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD) (Nilai)	4	4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) (persen)	65	66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai)	35.02	35.52	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase gugus depan yang aktif (persen)	95	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka (%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (%) (Persentase)	95	95	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
2	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas(M2)						
2	2	2	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara merata (T2)	Rasio Gini (Persen)	0.38	0.28	
2	2	3	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah (S3)	Laju Pertumbuhan ekonomi (Persen)	1.50	2.50	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang terbit izin usaha simpan pinjam koperasi (%)	0	2.5	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
					USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	60.24	41.25	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi (%)	50.72	53.25	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan (%)	13.15	21.2	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi (%)	0	2.15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	3.37	3.8	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan skala usaha mikro (%)	1.13	1.83	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Ton)	100,659.0 0	101,659.0 0	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	310,800.0 0	315,565.0 0	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (Persen)	92	94	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan (Ton)	312	322	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	presentase dan sarana pertanian yang dibangun (%)	100	100	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Layanan Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian (%)	100	100	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (%)	100	100	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian (%)	100	100	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				DINAS PERTANIAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Tahun-2021	Tahun-2022			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	presentase penyuluhan yang meningkat kapasitasnya (%)	100	100	DINAS PERTANIAN		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat yang dimanfaatkan (%)	90	90	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah ekspor perdagangan (Ton)	76,000.00	78,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan (Kawasan)	1	1	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
2	2	4	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha (S4)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3.8	3.3	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Orang)	158,500.00	158,900.00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	75.75	75.75	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (%)	70.48	70.98	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	22.82	22.82	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional (Angka)	35	40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase rencana Investasi Penanaman Modal (%)	15	20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)	75	80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
3			Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)				
3	3		Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah (T3)	Indeks daya saing infrastruktur daerah (indeks)	0	0	
3	3	5	Meningkatnya daya guna	indeks kepuasan layanan	Memuaskan	Memuaskan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
	dan hasil guna infrastruktur daerah (S5)	infrastruktur (Predikat)	n	n	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi (%)	7.98	8.41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	60.13	62.59	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	0	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten kondisi baik (%)	41.14	42.04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	31.37	41.89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Rasio proyek yang menjadi kewenangannya tanpa kecelakaan kerja (%)	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rata rata penyelenggaraan penataan ruang (%)	75	78	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah	24.94	43.88	DINAS PERUMAHAN,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Tahun-2021	Tahun-2022		
		10 ha yang ditangani (%)			KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Rasio rumah layak huni ()	18.04	18.34		
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	2.81	2.89	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU (%)	21.05	42.1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Angkutan Yang Layak (%)	0.72	0.73	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Yang disediakan (%)	41.8	64.88		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di Danau dan sungai (%)	1.35	1.35	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di laut (%)	0.07	0.07		
4	Menjaga ketahanan lingkungan hidup (T4)	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Persen)	0	0		
4	4	6	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S6)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (Persen)	87	87.55
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	39.85	40.15	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Tahun-2021	Tahun-2022			
					DAN PERTANAHAN		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan (Persen)	0	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (Persen)	50	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Jumlah MHA)	3	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang dibina (Persen)	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (Persen)	50	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)	70	70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
4	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)						
4	5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T5)	Indeks reformasi birokrasi (IRB) (Persen)	0	0		
4	5	7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S7)	Nilai SAKIP Daerah (Peredikat)	WTP	WTP	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
	KABUPATEN/KOTA				SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	95	95.3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	92	94	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95	95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95	95	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	INSPEKTORAT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	RSUD I LAGALIGO
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	SEKRETARIAT DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	ANGKONA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BURAU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	KALAENA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	MALILI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	MANGKUTANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	NUHA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	TOMONI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	TOMONI TIMUR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	WASUPONDA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	WOTU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	TOWUTI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pelaksanaan kegiatan kebijakan perekonomian (%)	50	55	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan perda Yang Difasilitasi (%)	80	83	SEKRETARIAT DPRD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Tahun-2021	Tahun-2022			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	96.5	96.7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat Daerah)	90	90	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah (%)	97.2	97.5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Aparatur (%) (Persentase)	90	90	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				INSPEKTORAT		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				INSPEKTORAT		
4	5	8	Meningkatnya kualitas pelayanan public (S8)	IKM Pelayanan SPM (Persen)	0	0	
				IKM Pelayanan perizinan dan non perizinan (Persen)	80.15	82.21	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan (persentase)	99.06	99.22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (persentase)	85.85	86.31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)	65	75	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Yang baik penataan desanya (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib administrasi (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola (persen (%))	80	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah (persen (%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Kinerja program Pelayanan Penanaman Modal (%)	100	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid (Angka)	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (persen (%))	90	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen (%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan (%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Presentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)	0	25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Besaran Rekomendasi Izin Usaha Industri yang dihasilkan (%)	10	10	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan (%)	80	80	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	ANGKONA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam	100	100	ANGKONA

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	ANGKONA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	ANGKONA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	BURAU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	BURAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	BURAU
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	BURAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	MALILI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	MALILI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	MALILI
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	MALILI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	MANGKUTANA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	MANGKUTANA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	MANGKUTANA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan	100	100	MANGKUTANA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
		ketentuan perundangan yang berlaku (%)			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	NUHA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	NUHA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	NUHA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	NUHA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	TOMONI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	TOMONI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	TOMONI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	TOMONI TIMUR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	TOMONI TIMUR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	TOMONI TIMUR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	TOMONI TIMUR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	WASUPONDA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	WASUPONDA

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Tahun-2021	Tahun-2022			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	WASUPONDA		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	WASUPONDA		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	WOTU		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	WOTU		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	WOTU		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	WOTU		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	TOWUTI		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	TOWUTI		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	TOWUTI		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	TOWUTI		
5	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)						
5	6	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T6)	Angka kriminalitas (Persen)	0	0		
5	6	9	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S9)	Nilai Kepuasan Masyarakat atas Kondisi Keamanan dan Ketertiban (Persen)	0	0	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan dasar penanggulangan bencana (%)	33.54	33.57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun berjalan (kasus)	50	45	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah kegiatan yang terlaksana pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Kegiatan)	120	120	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	0	100	ANGKONA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	BURAU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	MALILI
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	0	100	MANGKUTANA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	NUHA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	TOMONI TIMUR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	WASUPONDA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	WOTU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	0	100	TOWUTI
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target Capaian Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Tahun-2021	Tahun-2022		
6	7	Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya (T7)	0	0		
6	7	1 0	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S10)	Indeks kerukunan umat beragama (Persen)	75,50	
			Indeks pembangunan kebudayaan (Persen)	0	0	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Seni dan Kebudayaan Daerah yang di Lestarkan (Persen)	80	85	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Seni dan Kebudayaan Daerah yang di Lestarkan (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)	45.33	43.75	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sumber: Rancangan RPJMD Kab. Luwu Timur 2021-2026



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi. SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan serta dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatifnya untuk tahun rencana. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya dalam Renja SKPD 2022.

Perhitungan Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah haruslah benar – benar dinalisis secara cermat dan terukur. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah, ,

5.1. Kerangka Pendanaan

Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menyajikan Proyeksi Pedapatan dan belanja daerah untuk Tahun 2022. Untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran. Tujuan dari perhitungan asumsi makro adalah untuk

mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam lima tahun kedepan.

Dalam menyajikan proyeksi pendapatan dan belanja, dengan melihat realisasi pendapatan lima tahun terakhir, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi asumsi pendapatan dan belanja selama 2 tahun terakhir serta kondisi ekonomi dua tahun terakhir yang sedikit terganggu dikarenakan adanya pandemic Covid-19.

5.1.1 Asumsi Makro Ekonomi, Sosial dan kebijakan Fiskal Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana yang tertuang dalam rancangan RPJMD tahun 2021-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel 5. 1 Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kab. Luwu Timur Tahun 2022

No	Indikator	Target	Proyeksi
		2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi DT (%)	1.50	2,00 - 2.50
2	Tingkat Pengangguran (%)	3.80	3.30
3	Inflasi (%)	1.21	1.50
4	PDRB Per Kapita (Rp juta)	70,90	71,45
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6.84	6.64
6	Indeks Pembangunan Manusia	73.50	73.80
7	Gini Ratio	0.377	0.277

Sumber: Data diolah Angka Proyeksi

Asumsi makro ekonomi daerah Kab. Luwu Timur disusun mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan

perkembangan dan kondisi perekonomian terkini baik domestik maupun global, dimana dampak pandemi covid 19 diperkirakan masih akan dirasakan dampaknya terhadap perekonomian global, pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap pemulihan ekonomi dalam negeri sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

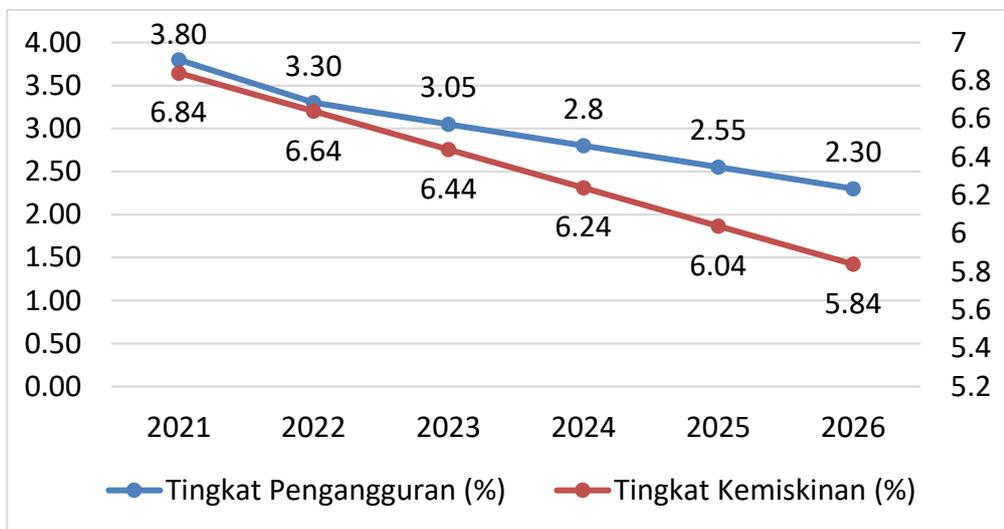
Pertumbuhan ekonomi Kab.Luwu Timur sangat tergantung terhadap share sub sektor pertambangan Nikel yang mendominasi hampir kurang lebih 40% terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga Nikkel dunia, hal ini terbukti pertumbuhan ekonomi Luwu timur dimasa pandemic ini tetap bertumbuh Positif, disaat kab/Kota di sulsel mengalami penurunan pertumbuhan hingga mencapai minus, selanjutnya sektor pertanian yang memberikan share terbesar kedua (30%) dengan semakin membaiknya perekonomian dalam negeri dan upaya pemerintah provinsi dalam pemulihan ekonomi utamanya pembangunan sektor pertanian sehingga pemerintah daerah tetap optimis share sektor ini dapat memberikan pertumbuhan yang positif. Demikian halnya dengan subsector lainnya dengan upaya yang keras dari pemerintah daerah mengoptimalkan program-program pembangunan daerah dalam RPJMD sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat bertumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Penetapan target asumsi makro ekonomi menggambarkan bahwa daerah tetap optimis dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kab. Luwu Timur lima tahun ke depan, adapun asumsi makro dimaksud mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara

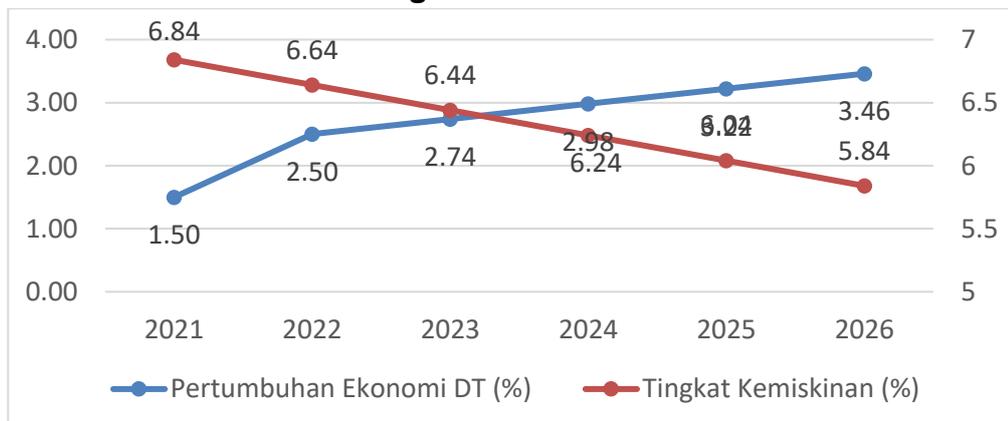
tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik.

Berikut akan disajikan Grafik Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan dan Perbandingan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan

Grafik 5.1 Perbandingan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan



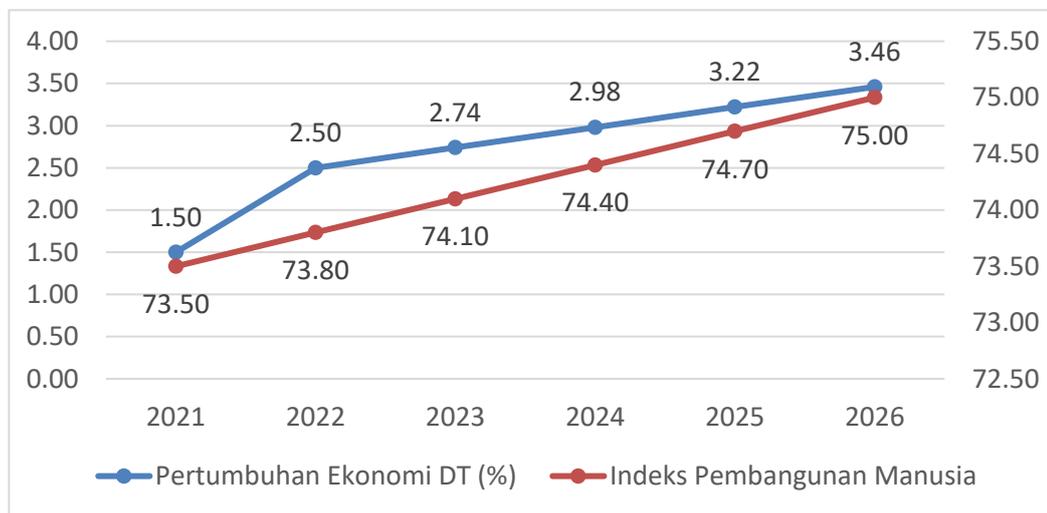
Grafik 5.2 Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan



Pertumbuhan ekonomi daerah Kab. Luwu Timur untuk lima tahun ke depan diasumsikan dapat bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan

ekonomi Nasional dan Provinsi. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Grafik 5.3
Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi dengan Pertumbuhan IPM



Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kab. Luwu Timur akan terus membaik, bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga secara relative dan diharapkan tetap lebih baik dari Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kab. Luwu Timur juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksesibilitas ekonomi yang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia Kab. Luwu Timur yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, berada pada peringkat ke 4 (empat) dengan daerah-daerah maju lainnya di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan menunjukkan trend positif. Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 3,33 persen per tahun dengan kecenderungan yang meningkat. Sedangkan, Dana Transfer Pusat diperkirakan bertumbuh rata-rata 3,38 persen selama periode 2021-2026 dengan kecenderungan yang melambat. Perkiraan melambatnya pertumbuhan Dana Transfer Pusat bersumber dari pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target sebagai dampak perkembangan Pandemi covid 19 yang diperkirakan masih akan berpengaruh terhadap perekonomian global dalam lima tahun mendatang.

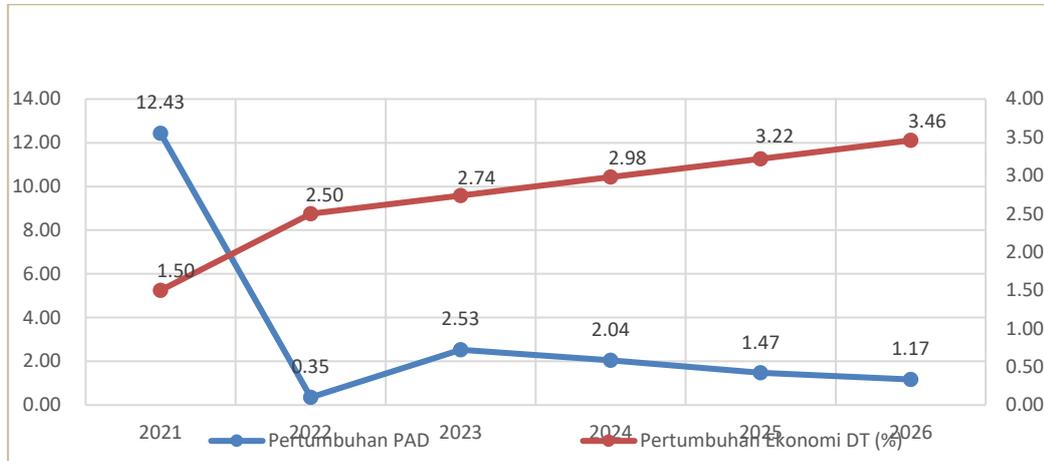
Tabel 5. 2 Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

N	Indikator	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan PAD	12.43	0.35	2.53	2.04	1.47	1.17
2.	Pertumbuhan Dana Transfer Pusat:	18.50	(2.31)	0.99	2.03	0.55	0.53
a.	Pertumbuhan DBH	(26.15)	2.36	1.81	1.44	1.03	5.00
b.	Pertumbuhan DAU	1.30	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00
c.	Pertumbuhan DAK	110.63	(7.25)	2.09	5.24	0.98	0.00

Sumber : BPKD Kab Luwu Timur

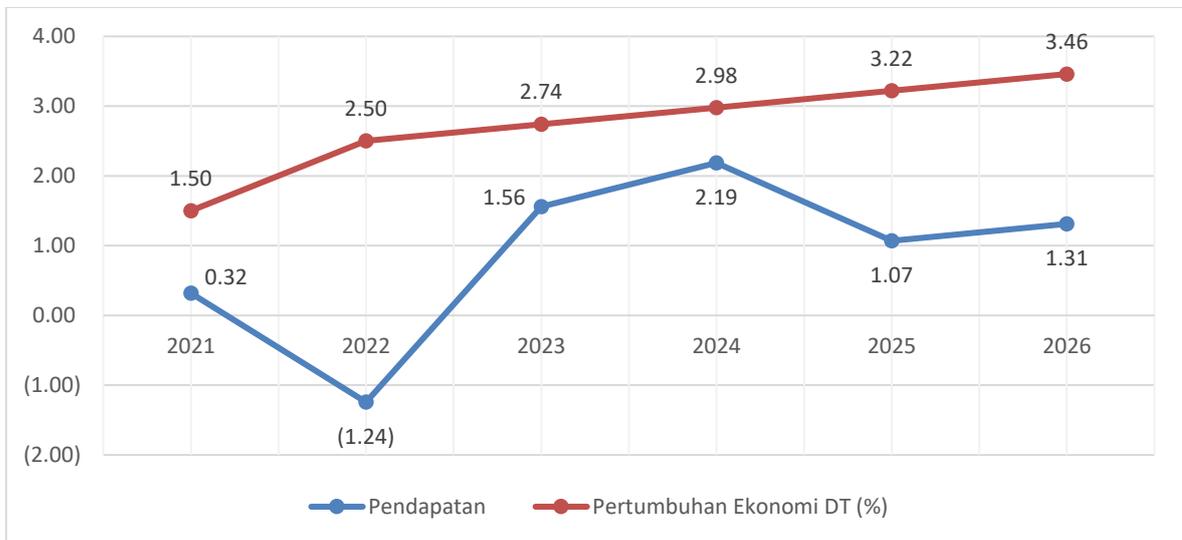
Grafik. 5.4

**Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi dengan
Pertumbuhan PAD**



Grafik. 5.5

**Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Total
Pendapatan**



5.1.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.2.1 Proyeksi Pendapatan

Pendapatan dalam persepektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dengan melihat capaian realisasi dan pertumbuhan pendapatan lima

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

tahun yang lalu. Selain itu proyeksi pendapatan untuk lima tahun kedepan setidaknya memperhatikan empat determinan yaitu (1) Asumsi Indikator Ekonomi Makro, (2) Kebijakan Keuangan negara, khususnya perubahan kebijakan untuk dana transfer pusat ke daerah, (3) Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Keuangan Daerah dan (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah.

Rendahnya Proyeksi Pendapatan untuk tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2021 dengan penurunan sebesar 1,24 persen, di sebabkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk satu alokasi untuk sektor kesehatan yang tidak memungkinkan untuk di capai, sehingga berpengaruh terhadap total pendapatan untuk proyeksi tahun 2022. Disamping itu, kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid 19 menjadi salah satu indikator dalam meletakkan proyeksi pendapatan untuk tahun 2022.

Capaian realiasi pendapatan untuk sektor PAD selalu melampaui target yang di tetapkan dalam RPJMD sedangkan untuk dana Transfer Pusat dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah capaian realisasinya di antara 80 – 90 Persen.

Berikut di sajikan Target Pendapatan untuk tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan Untuk Tahun 2022.

Tabel 5. 3 Analisis Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026

URAIAN	TARGET	PROYEKSI
	2021*)	2022
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah	324.224.809.425,00	325.368.347.170,00
Pajak Daerah	163.677.500.000,00	170.201.950.000,00
Retribusi Daerah	5.747.309.425,00	6.166.397.170,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	33.800.000.000,00	25.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	121.000.000.000,00	124.000.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.090.315.663.000,00	1.075.605.776.000,00
Transfer Pemerintah Pusat	946.715.663.000,00	924.825.776.000,00
Dana Transfer Umum	946.715.663.000,00	924.825.776.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	519.015.708.000,00	519.015.708.000,00
Dana Bagi Hasil	94.974.998.000,00	97.220.421.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Dana Transfer Khusus	332.724.957.000,00	308.589.647.000,00
Transfer Antar Daerah	143.600.000.000,00	150.780.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	143.600.000.000,00	150.780.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	65.235.520.000,00	60.408.630.400,00
Hibah Dari Pemerintah Pusat	43.835.520.000,00	38.408.630.400,00
Hibah Dari Badan Usaha LN Dan DL	21.400.000.000,00	22.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.479.775.992.425,00	1.461.382.753.570,00

Sumber : BPKD Kab.Luwu Timur

5.1.2.2 Proyeksi Belanja

Sebagaimana Proyeksi Pendapatan, Proyeksi Belanja di asumsikan dengan memperhatikan kemampuan Pendapatan sehingga Alokasi belanja kedepan tetap memperhatikan postur APBD yang Ideal dengan mengacu kepada Kebijakan Arah Pembangunan untuk lima tahun kedepan untuk membiyai Standar Pelayanan Dasar yang di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang mencakup sektor pendidikan, pelayanan kesehatan dan Infrastrukur. Selain itu kebijakan belanja juga memperhatikan belanja wajib mengikat serta prioritas utama sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan aparatur sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Selain pemenuhan Standar Pelayanan dasar sebagai belanja wajib dan belanja Pemenuhan kebutuhan aparatur. Alokasi belanja di arahkan untuk membiyai Program yang memuat Visi Misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pencapaiannya untuk lima tahun kedepan.

Proyeksi belanja tetap memperhatikan Proyeksi Pendapatan sehingga Postur APBD tetap menjaga besaran defisit untuk tetap melampaui batas yang telah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana capaian Realisasi pendapatan, belanja dan defisit lima tahun terakhir tetap di bawah ambang batas sehingga postur APBD dan pelaksanaannya tetap konsisten dengan defisit yang telah di tetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Proyeksi Belanja Untuk Tahun 2022 mengalami penurunan dibanding target pada tahun 2021 khususnya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal. Sedangkan untuk belanja transfer mengalami peningkatan sebesar 39 Persen dikarenakan dalam belanja transfer memuat salah Satu Program dari Visi Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Sehingga untuk belanja transfer dari tahun 2022 diproyeksikan pertumbuhannya sebesar 1,26 persen. Berikut di sajikan Target Belanja untuk tahun 2021 dan Proyeksi Belanja Untuk Tahun 2022 .

Tabel 5. 4 Analisis Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TARGET	PROYEKSI
	2021	2022
BELANJA	1,479,775,992,425	1,461,382,753,570
BELANJA OPERASI	1,037,389,631,024	906,876,161,902
Belanja Pegawai	478,867,337,150	489,327,071,237
Belanja Barang dan Jasa	478,380,377,881	358,725,645,665
Belanja Subsidi	200,000,000	200,000,000
Belanja Hibah	61,728,475,723	40,000,000,000
Belanja Bantuan Sosial	18,213,440,270	18,623,445,000
BELANJA MODAL	281,731,182,526	247,110,314,723
Belanja Modal Tanah	800,000,000	850,000,000
Belanja Modal Peralatan Mesin	53,034,947,098	45,423,411,503
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,677,488,558	79,524,356,207
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	132,018,746,870	121,132,547,013
Belanja Modal Aset tetap lainnya	200,000,000	180,000,000
BELANJA TIDAK TERDUGA	2,500,000,000	2,000,000,000
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,000,000,000
BELANJA TRANSFER	195,149,829,450	320,070,266,437
Belanja Bagi Hasil	16,210,182,450	16,210,182,450
Belanja Bantuan Keuangan	178,939,647,000	179,860,083,987
Belanja Bantuan Keuangan Khusus		124,000,000,000
JUMLAH BELANJA	1,516,770,643,000	1,476,056,743,062

Sumber : BPKD Kab.Luwu Timur

5.1.2.3 Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan yang memuat Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di asumsikan dengan mempertimbangkan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

besaran defisit antara Pendapatan dan belanja dan arah kebijakan Invesatasi Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2022.

Penerimaan Pembiayaan untuk target 2021 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) dengan asumsi untuk membiayai defisit dengan besaran dalam kategori sedang yaitu 2,6 persen, dan diproyeksikan besaran defisit lima tahun ke depan makin kecil yang berparalel dengan Penerimaan Pembiayaan untuk lima tahun kedepan, Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur sangat berhati-hati dalam meletakkan Asumsi Silpa di karenakan besaran Penerimaan Pembiayaan melalui Silpa menunjukkan Kinerja keuangan daerah khususnya serapan belanja. Makin besar Silpa mengindikasikan banyaknya program kegiatan yang tidak terlaksana yang berimplikasi pada perencanaan.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan arah kebijakan pemerintah daerah kabupaten luwu timur dalam bentuk Investasi/Penyertaan Modal ke PT.Bank Sulselbar dengan peningkatan Penyertaan Modal yang direncanakan setiap tahunnya selama lima tahun ke depan, sehingga di harapkan dengan Penyertaan Modal bisa memberikan Income dalam bentuk deviden ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2026. Berikut di sajikan Target Pembiayaan untuk tahun 2021 dan Proyeksi pembiayaan Untuk Tahun 2022.

Tabel 5. 5 Analisis Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TARGET	PROYEKSI
	2021	2022
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	39.994.647.000	17.673.889.492
Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (Silpa)	39.994.647.000	17.673.889.492
Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	3.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi)	3.000.000.000	3.000.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Sisa lebih pembiayaan Tahun berkenaan	36.994.647.000	14.673.889.492
--	-----------------------	-----------------------

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tabel 5. 6 Analisis Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TARGET	PROYEKSI
	2021*)	2022
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah	324,224,809,425	325,368,347,170
Pajak Daerah	163,677,500,000	170,201,950,000
Retribusi Daerah	5,747,309,425	6,166,397,170
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	33,800,000,000	25,000,000,000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	121,000,000,000	124,000,000,000
Pendapatan Transfer	1,090,315,663,000	1,075,605,776,000
Transfer Pemerintah Pusat	946,715,663,000	924,825,776,000
Dana Transfer Umum	946,715,663,000	924,825,776,000
Dana Alokasi Umum (DAU)	519,015,708,000	519,015,708,000
Dana Bagi Hasil	94,974,998,000	97,220,421,000
Dana Transfer Khusus	332,724,957,000	308,589,647,000
Transfer Antar Daerah	143,600,000,000	150,780,000,000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	143,600,000,000	150,780,000,000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	65,235,520,000	60,408,630,400
Hibah Dari Pemerintah Pusat	43,835,520,000	38,408,630,400
Hibah Dari Badan Usaha LN Dan DL	21,400,000,000	22,000,000,000
JUMLAH PENDAPATAN	1,479,775,992,425	1,461,382,753,570
BELANJA	1,479,775,992,425	1,461,382,753,570
BELANJA OPERASI	1,037,389,631,024	906,876,161,902
Belanja Pegawai	478,867,337,150	489,327,071,237
Belanja Barang dan Jasa	478,380,377,881	358,725,645,665
Belanja Subsidi	200,000,000	200,000,000
Belanja Hibah	61,728,475,723	40,000,000,000
Belanja Bantuan Sosial	18,213,440,270	18,623,445,000
BELANJA MODAL	281,731,182,526	247,110,314,723
Belanja Modal Tanah	800,000,000	850,000,000
Belanja Modal Peralatan Mesin	53,034,947,098	45,423,411,503
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,677,488,558	79,524,356,207
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	132,018,746,870	121,132,547,013
Belanja Modal Aset tetap lainnya	200,000,000	180,000,000
BELANJA TIDAK TERDUGA	2,500,000,000	2,000,000,000
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,000,000,000
BELANJA TRANSFER	195,149,829,450	320,070,266,437

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

URAIAN	TARGET	PROYEKSI
	2021*)	2022
Belanja Bagi Hasil	16,210,182,450	16,210,182,450
Belanja Bantuan Keuangan	178,939,647,000	179,860,083,987
Belanja Bantuan Keuangan Khusus		124,000,000,000
JUMLAH BELANJA	1,516,770,643,000	1,476,056,743,062
SURPLUS/DEFISIT	(36,994,650,575)	(14,673,989,492)
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	39,994,647,000	17,673,889,492
Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000	3,000,000,000
Sisa lebih pembiayaan Tahun berkenaan	36,994,647,000	14,673,889,492

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur; *) APBD Tahun Berjalan*

5.1.3 Kerangka Pendanaan Pengeluaran Priodik dan Prioritas Utama dan Kapasitas Riil.

Setelah mendapatkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja serta Pembiayaan untuk Tahun 2022 dengan Mempertimbahngkan dinamika kondisi keuangan Tahun rencana, maka dilanjutkan dengan melakukan proyeksi belanja terhadap Pembiayaan wajib dan mengikat. Analisis ini dilakukan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan melakukan penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kerangka pendanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Berdasarkan data realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama yang diuraikan sebelumnya, maka dibuat proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti yang tersaji berikut.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tabel 5. 7 Analisis Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib Dan mengikat serta prioritas Utama Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)2021	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi
				Tahun 2022 (Rp)
A	Belanja Operasi	619,962,664,525.00	2.27	754,150,657,531.24
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	402,541,739,208.00	3.11	411,744,055,057.24
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	15,747,078,867.00	-	15,747,078,867.00
3	Belanja Bunga	-	-	-
B	Belanja Transfer			
4	Belanja bagi hasil	195,149,829,450.00	1.29	320,070,266,437.00
5	Biaya Penungutan Pajak dan Retribusi Daerah	6,524,017,000.00	1.50	6,589,257,170.00
6	Belanja Biaya Pemungutan Pajak dan Bangunan	-	-	-
C	Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000.00	29.74	3,000,000,000.00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	29.74	3,000,000,000.00
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	622,962,664,525.00	2.43	757,150,657,531.24

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tabel 5. 8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Uraian	Proyeksi
		Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan	1.461.382.753.570,00
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	14.673.989.492,00
	Total penerimaan	1.476.056.743.062,00
	Dikurangi:	
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	757.150.657.531,24
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	718.906.085.530,76

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tabel 5. 9 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

KELOMPOK PRIORITAS RPJMD 2021-2026	TAHUN 2022	%
Kapasitas riil kemampuan keuangan	718.906.085.530,76	
KP 1	757.150.657.531,24	51,30
KP 2	474.734.630.363,64	32,16
KP 3	244.171.455.167,12	16,54
JUMLAH	1.476.056.743.062,00	100

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Luwu Timur

Keterangan :

Prioritas Pertama : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;

Prioritas Kedua : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah

Prioritas Ketiga : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diatas, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam 3 (tiga) kategori prioritas (KP). Yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, **Prioritas I** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. **Prioritas II** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan **Prioritas Iii** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan Pemerintahan.

Untuk Tahun 2022, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar khususnya pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang ditandai dengan penurunan tingkat

kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Selanjutnya, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut disesuaikan dengan kondisi analisis standar biaya tahun rencana dan dialokasikan untuk program/kegiatan prioritas dan program kegiatan baru yang memiliki daya ungkit yang besar terhadap capaian kinerja pembangunan yang ditetapkan. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas Nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

5.2. Renja Program dan Kegiatan.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggung jawab.

Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas, realistik dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Kerangka pendanaan Rencana program prioritas dan program lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam masa periode Tahun 2021-2026, selain bersumber dari APBD Kabupaten, juga diupayakan sharing pembiayaan dari sumber lainnya seperti APBD I, APBN, Dana Pinjaman, serta melibatkan Stakeholders lainnya maupun swasta. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu Tahun 2022 yang disajikan berdasarkan urusan dan SKPD penanggung jawab sebagaimana terlampir pada daftar Lampiran RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disajikan pada tabel 5.10. (***Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022***).

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur dalam memberikan gambaran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Luwu Timur lima tahun ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6. 1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target RKPD 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,00-2,50%
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,79 %
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	>20%
4	Persentase Koperasi Aktif	100%
5	Indeks Gini	<0,4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Kinerja Utama	Target RKPD 2022
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,30-2,16%
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	94,00 %
8	PDRB Perkapita (juta Rp)	122.967.581
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,58
10	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya pada tahun-n	1
11	Jumlah Pengunjung Festival Seni Budaya	3.400 Orang
12	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %
13	Persentase penegakan PERDA (%)	100 %
14	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN pada tahun-n (%)	20 %
15	Jumlah investor PMDN (investor)	151
16	Nilai investasi PMDN (Juta Rp)	1.241.174
17	Jumlah investor PMA (investor)	7
18	Nilai Investasi PMA (USD Ribu)	152.039
19	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90 %
20	Jumlah/luas kawasan strategis dan Kawasan cepat tumbuh yang berkembang (Kawasan)	16
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)(%)	74 %
22	Nilai TPA (Program Adipura)	
23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,95
24	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,16
25	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,06
26	Angka Melek Huruf (%)	95,01 %
27	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,16
28	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	>63
29	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)	1.697,19 km
30	Jumlah pengguna terminal, pelabuhan dan bandara (orang)	173.863 org

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Kinerja Utama	Target RKPD 2022
31	Rasio rumah layak huni (%)	85,88 %
32	Persentase rumah tangga (RT) berakses air bersih (%)	84,80 %
33	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	96,33 %
34	Rasio pemukiman layak huni (%)	87,81 %
35	Persentase rumah berakses listrik (%)	91,17 %
36	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
37	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
38	Nilai Laporan EKPPD	Tinggi
39	Indeks Reformasi Birokrasi	58,05
40	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik (IKM)	Sangat baik
41	Jumlah insiden terkait hubungan antar umat beragama	0
42	Cakupan pengelola rumah ibadah dan pendidikan agama yang mendapatkan bantuan/insentif	90 %
43	Jumlah inovasi daerah yang diterapkan pada tahun-n	1
44	Jumlah dokumen kerjasama dengan pihak yang terealisasi	2

Sumber: RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026

6.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Luwu Timur tersebut secara rinci disajikan pada tabel 6.2 sebagai berikut :

Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,46	1,50	2,50	3,46
	Laju inflasi	%	1,21	1,21	1,20	1,15
	PDRB per kapita Berlaku	Juta	70,49	70,90	71,45	73,65
	PDRB per kapita Konstan	Juta	53,23	53,25	53,27	54,00
	Rasio Gini	Angka	0,405	0,397	0,389	0,217
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,15	93,16	93,36	94,16
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,22	73,50	73,80	75,00
	Angka melek huruf	%	95,50	95,60	95,70	96,10
	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,80	9,00	9,20	10,00
	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,53	70,43	70,63	71,23
	Persentase balita gizi buruk	%	0,02	0,02	0,02	0,01
	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,02	2,02	2,01	1,96
	Cakupan desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	157,5	158,5	150	158,7
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,36	70,48	70,98	72,38
	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,46	3,80	3,30	2,30
	Rasio penduduk yang bekerja	%	95,54	95,61	95,92	97,05
	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	%	0,0180	0,0179	0,0184	0,0197
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	0,60	0,60	0,65	0,89
	Proporsi Tenaga Kerja yang berusaha Sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	3,39	1,99	2,01	2,18
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I	%	17.829	17.8	17.75	17.6
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,31	83,21	84,00	87,00
	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	22,76	21,49	22,48	25,53
	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP
	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai/Skor	92	90	92	95
	Penguatan cadangan pangan	Kg	3	8	3	3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	48,03	65,66	77,23	95,00
	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	0,34	0,50	0,75	1,50
	Kontribusi Sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	5,81	5,83	5,85	6,25
	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	12,46	12,50	12,52	12,95
	Produksi sektor perkebunan	ton				
	Kakao		0,74	0,85	0,97	1,45
	Kelapa Sawit		12,46	12,50	12,52	12,95
	Lada		0,93	0,96	0,97	1,05
	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	44,95	44,95	44,94	43,00
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	N/A	N/A	2,81	2,76
	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	1,06	1,06	1,07	1,11
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,10	4,35	4,50	5,10
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	3,67	3,82	3,85	3,98
	Pertumbuhan Industri	%	-	4,40	4,70	5,45
	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
	Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga per kapita	Rupiah	9.135.975	9.200.000	9.500.000	10.000.000
	Nilai Tukar Petani	%		97,50	97,52	97,60
	Persentase Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Per Kapita	%	61,14	61,24	61,45	61,92
	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total desa	%	1,6	2,42	2,42	9,68
	angka kriminalitas yang Tertangani	Kasus	7,89	7,38	6,43	4,29
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	Layanan Urusan Wajib Dasar					
	Pendidikan					
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%				
	Angka Partisipasi Kasar	%	67,80	68,00	68,20	69,00
	Angka Pendidikan yang ditamatkan					

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	APT SD/ sederajat	%	26,39	26,37	26,35	26,27
	APT SMP/ sederajat	%	16,04	16,02	16,00	15,92
	Angka Partisipasi Murni					
	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/ Paket A	%	102,45	102,50	102,55	102,75
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ Paket B	%	107,63	107,68	107,73	107,93
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	62,73	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	89,11	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	86,38	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	51,98	100	100	100
	Angka Partisipasi Sekolah					
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/ Paket A	%	99,10	99,15	99,20	99,40
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/ Paket B	%	97,70	97,75	97,80	98,00
	Angka Putus Sekolah :					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,37	0,35	0,33	0,25
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,15	1,10	1,05	0,85
	Angka Kelulusan:					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,75	99,76	99,77	99,81
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,50	99,51	99,52	99,56
	Angka Melanjutkan (AM)					
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	93,35	93,40	93,45	93,65
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	92,87	92,89	93,01	93,09
	Fasilitas Pendidikan:					
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	72,27	72,67	73,07	74,77

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	78,51	80,01	81,51	86,51
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	59,93	59,94	59,95	59,98
	rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	691.32	693.82	696.32	706.32
	Rasio Guru/ murid perkelas rata-rata Sekolah Dasar	%	48.14	50.11	52.46	61.49
	Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas rata-rata	%	648.12	648.82	649.52	652.32
	proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	91.71	92.01	92.31	93.42
	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	%	99.32	99.37	99.42	99.62
	penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	96.94	96.99	97.04	97.24
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88.98	89.48	89.98	91.98
	Kesehatan					
	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	0.89	0.89	0.88	1.26
	Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	88,34	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92,76	100	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	96,23	100	100	100
	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	69,31	100	100	100
	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	59,57	100	100	100
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	%	71,84	100	100	100

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Kesehatan sesuai standar					
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100
	Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100
	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	8,16	8,16	8,11	7,39
	Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	91,85	0,9918	0,9919	0,9926
	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	0,72	0,90	0,82	0,54
	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	4,61	5,59	5,40	4,67
	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	108,74	108,74	126,17	90,12
	Rasio posyandu per satuan balita	1/1000	11,03	11,03	11,03	11,03
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1/100000	0,33	5,35	5,35	5,35
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1/100000	0,007	0,006	0,006	0,009
	Rasio dokter per satuan penduduk	Jumlah	14,24	14,23	14,89	21,52
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1/100000	33,16	24,50	26,81	39,06
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jiwa	35,88	80%	81%	85%
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga anjangan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jiwa	92,76	92%	93%	95,0%
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jiwa	88,98	90%	91%	93%
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Jiwa	100	100	100	100

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Jiwa	96,85	94	95	97
	Non polio AFP rate per 100,000 penduduk		4,45	2	2	2
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Jiwa	7,64	100	100	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jiwa	100	100	100	100
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,00011	<2	<2	<2
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Kasus	67,09	472 org	472 org	504 org
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Kasus	97,74	95	95	95
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jiwa	100	100	100	100
	Penderita diare yang ditangani	Jiwa	99,79	100	100	100
	Angka kejadian Malaria	Jiwa	0	<1	<1	<1
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Jiwa	<0,013	0,1	0,1	0,1
	Proporsi jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS	Orang	0	600 Org	600 Org	600 Org
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	0,19	4,8	4,7	4,4
	Cakupan kunjungan bayi	%	88,52	90	91	95
	Cakupan puskesmas	%	154,55	164	164	164
	Cakupan pembantu puskesmas	%	57,48	105	105	105
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	88,34	90	91	95
	Cakupan pelayanan nifas	%	92,71	92	93	95
	Cakupan anjangan dengan komplikasi yang ditangani	%	46,78	45	46	50
	Cakupan pelayanan anak balita	%	66,39	75	76	80
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	1/100	39,4	41	43	50
	Cakupan penjarangan anjangan siswa SD dan	%	0	100	100	100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	setingkat					
	Cakupan pelayanan anjangan dasar masyarakat miskin	%	74,30	106,763	106,763	106,763
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana anjangan (RS)	%	100	100	100	100
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	95	95	95
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pekerjaan Umum					
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	40,00	41,143	42,043	44,742
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	50,72	51,39	52,12	54,33
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0	0	0	0
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,4000	0,41143	0,42043	0,44742
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,00626	0,00623	0,00613	0,00587
	Persentase Kawasan Pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4	%	100	100	100	100
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	40,00	41,14	42,04	44,74
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,133	0,133	0,133	0,133
	Persentase Sempadan jalan yang dipakai kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0,0154028	0,01606	0,01673	0,01871
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,37	973,807	973,896	974,152
	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	2,318,362	231,836	231,836	231,836
	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	83,61	84,02	84,21	87,07

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Tidak terjadi genangan 2 kali setahun	%	82,85	81,6	79,28	72,2
	Persentase Pembangunan Turap diwilayah Jalan penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%	37,50	41,53	44,76	54,44
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,65	52,64	53,38	55,59
	Rasio Jaringan Irigasi	Angka	7,482	7,977	8,41	9,71
	Persentase penduduk berakses air minum	%	57,17	59,51	61,03	65,33
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	57,17	595,099	610,296	65,33
	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah diperkotaan	Unit	16	0	8	7
	Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk	%				
			0,2407	0,2394	0,2383	0,2354
	Penataan Ruang:					
	Rasio Ruangan terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	Angka	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027
	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota / Kawasan Perkotaan	%	0,256	0,256	0,261	0,266
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Angka	0,13	0,1415	0,142	0,1432
	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	37,73	39,4	42,72	60,97
	Rasio Luas Kawasan tertutup pepohonan berdasarkan Hasil Pemotretan citra satelit dan survai foto udara terhadap luas daratan	%	76,48	70,44	70,74	71,25
	Ketaatan terhadap RTRW	%	81,63	83,26	84,90	91,43
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100
	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/kota yang ditangani	%	2,24	2,24	2,19	1,99
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasaran, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0	0	21,05	19,30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Rasio rumah layak huni	%	0,175	0,177	0,180	0,192
	Rasio permukiman layak huni	%	0,757	0,757	0,760	0,772
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	86,65	86,65	87,35	90,15
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	58,12	58,12	59,62	65,62
	Persentase pemukiman yang tertata	%	75,74	75,74	76,04	77,24
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,04	0,04	0,04	0,06
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	2,24	2,24	2,19	1,99
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	13,35	13,35	13,20	12,60
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	%	67,72	0,00	21,05	100,00
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
	Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	84,61	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	91,18	92,77	93,97	98,79
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	9,13	9,13	10,00	10,00
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)	%	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	22,89	40,69	45,21	63,30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	kabupaten/kota					
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	91,18	92,77	93,97	98,79
	Persentase Penegakan PERDA	%	84,61	100	100	100
	Sosial					
	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	%	40,78	41,23	44,93	46,07
	Persentase PMKS yang tertangani	%	36,52	36,52	40,23	40,69
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	40,13	40,13	42,88	43,29
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	70	70	70	100
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	70	70	70	100
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	%	100	100	100	100
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	%	100	100	100	100



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	dasarnya diluar panti					
	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
	Tenaga Kerja					
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	75,75	75,75	75,60	76,55
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 perusahaan	22,51	9,93	9,93	9,27
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	8,82	13,33	13,33	15,38
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	45,87	41,87	41,98	43,98
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	100	100	100	100
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	0
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	75,75	75,75	75,60	76,55
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100	100	100
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100
	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	483,81	488,81	498,76	510,23
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	85,71	95	95	95
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	39,36	40	41	42,5
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartip,Strukturskala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	90	91	92	95

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten /kota	%	45,8	41,87	41,98	43,98
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	76,02	76,02	75,25	74,58
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	6,60	10	10	17,14
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	23,98	23,98	24,75	25,42
	Rasio KDRT	%	0,03	0,13	0,13	0,11
	Persentase jumlah tenaga Kerja di bawah Umur	%	0	0	0	0
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	12,23	12,21	12,34	12,72
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100
	Cakupan perempuan dan anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP / A dan PPT / PKT di rumah Sakit	Orang	0	0	0	0
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100
	Cakupan Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	10	20	30
	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100
	Pangan					
	Persentase Ketersediaan pangan utama	%	69,61	70	70	70
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Gram/perkapita/hari	3.258,86	2.463	2.463	2.463
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	0	70	71	74
	Pertanahan					
	Persentase luas lahan bersertifikat	%	39,65	39,65	39,85	40,85
	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penyelesaian izin lokasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	Lingkungan Hidup					
	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai/Skor	86,87	86,87	86,87	86,87
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		0	1	1	1
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota		0	60	80	0
	Terselenggaranya KLHSuntuk K/R/P tingkat daerah provinsi		0	1	1	1
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		0	27,00	27,50	28,50
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		0	29,50	29,55	29,70
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan		0	30,50	30,50	30,50
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		0	50	50	50

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		0	1	1	1
	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	0	3	3	3
	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional		3	3	3	3
	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional		3	1	1	1
	Penetapan hak MHA	MHA	0	1	1	1
	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		0	11	11	11
	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana		0	1	1	1
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		0	11	11	11
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		0	1	1	1
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.		0	5	5	5
	Timbulan sampah yang ditangani		22.535,10	32,339	32,558	33,397
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	5,34	25,68	26,33	30,89
	Persentase cakupan area pelayanan	%	0	0	0	0
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	51,51	74,06	73,10	70,66
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		0	1	1	1
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan	%	0	0	0	0
	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	0
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Perekaman KTP elektronik	%	99,71	99,76	99,83	99,94

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Kepemilikan akta kelahiran	%	84,61	87,14	89,59	97,38
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja	%	2,56	7,69	12,82	46,15
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1,00	1,00	1,00	1,00
	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,96	0,96	0,97	0,99
	Rasio pasangan berakte menikah	Rasio	0,41	0,44	0,47	0,53
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	sudah	Sudah	Sudah
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,71	99,76	99,83	99,94
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	95,54	96,05	96,55	98,62
	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	15,52	30	45	100
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	2,56	7,69	12,82	46,15
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	93	97,5	100	100
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,6	10,4	14,5	32,2
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	123	125	125	125
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	135	135	135	135
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	365	365	365	370
	Persentase LSM Aktif	%	0	0,4	0,4	0,04
	Persentase LPM Berprestasi	%	2	10	10	20
	Persentase PKK aktif	%	139	140	140	140
	Persentase Posyandu aktif	%	273	274	274	274
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	80	80	80	80
	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan	%	80	80	80	80

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	masyarakat					
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,99	1,88	1,79	1,57
	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,21	2,66	2,60	2,40
	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan Lima Aspek	Dok	0	0	1	0
	Persentase Sektor tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ Indeks pembangunan berwawasan kependudukan)	%	0	61,53	69,23	100
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	56,25	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100
	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/perkada	1	2	2	2
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	4	4	4	4
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	1	1	3	4
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,04	2,03	2,02	2,00
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	72,47	57,20	58,00	60,50

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	67,70	29,91	28,16	24,63
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 tahun	%	0	2,99	2,98	2,95
	Ratio Akseptor KB	%	72,47	57,20	58,00	60,50
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,61	13,46	12,88	11,67
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,98	36,64	37,89	41,22
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	37,98	37,60	37,50	36,80
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	79,90	79,95	79,98	81,05
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	85,33	85,36	85,46	85,80
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	81,19	81,22	81,38	81,63
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09	9,09	9,09	18,18
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	436,36	436,40	437,00	438,00
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	0,86	0,90	0,95	1,19
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	113,76	100	100	100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	0	100	100	100
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0	0
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	71,13	71,18	72,22	72,62
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	21,10	21,80	21,85	22,00
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	19	20	20	21
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,0058	0,0059	0,0061	0,0063
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	72,47	57,20	58,00	60,50
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	15,61	13,46	12,88	11,67
	Perhubungan					
	jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	290.241	258.809	263.985	280.143
	Rasio ijin trayek	%	0,011	0,011	0,011	0,011
	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	2640	2981,35	3561	6116
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	15	15	15	15
	Persentase Layanan angkutan darat	%	0,183	0,143	0,151	0,194
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	5,95	0,37	0,44	0,74
	Pemasangan Rambu - rambu	%	100	0	30,20	100,00
	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	%	67,31	46,20	38,70	22,60
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Org,brg	544.037	400.612	408.624	433.635
	jumlah orang/barang	Org,brg	392.819	400.612	408.624	433.635

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	melalui dermaga/bendara/terminal per tahun					
	Komunikasi dan Informatika					
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	Kelompok	0	100	100	100
	Cakupan layanan Telekomunikasi	Desa/kelurahan	0	79,55	86,24	95,10
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	%	85,14	86,25	87,30	85,28
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	53,44	54,67	60,17	90,11
	proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	85,14	85,17	85,20	86,19
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
	Persentase Koperasi aktif	%	75,75	53,41	53,92	57,53
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	94,56	94,86	95,75
	persentase BPR/LKM aktif	%	100	95,76	95,85	97,14
	Persentase Usaha Mikro dan kecil	%	95,28	95,71	99,18	98,25
	Penanaman Modal					
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	26	26	30	45
	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Rupiah	3.822.080.000	3.000.000.000	500.000.000	500.000.000.000
	Rasio Daya serap Tenaga Kerja	%	278,9	160,01	170,01	200,01
	Kenaikan Penurunan Nilai realisasi PMDN(Milyar rupiah)	Rupiah	1.511.201.000	25.000.000.000	50.000.000.000	125.000.000.000
	Kepemudaan dan Olahraga					
	Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	jumlah	74	74	74	74
	Persentase organisasi Pemuda yang aktif	%	40,54	33,71	39,33	61,80
	persentase wirausaha muda	%	19	32,36	35,60	42,07
	Cakupan pembinaan	%	0	100	100	100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	olahraga					
	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	40	43,71	55,71	100
	Cakupan pembinaan atlet muda	%	0	22,86	22,86	22,86
	Jumlah atlet berprestasi		30	10	10	20
	Jumlah Prestasi Olahraga		0	3	4	7
	Statistik					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Buku "PDRB"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Persandian					
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	100	100	100	100
	Kebudayaan					
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	45	50	55	80
	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Kali	0	1	1	2
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	15	3	4	5
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	47	75	75	85
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	3	2	3	4
	Perpustakaan					
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	53,62	53.83	54.33	56.83
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	158	121	123	163
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	0,39	0,44	0,45	0,46



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	1,11	1,10	1,10	1,09
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	11.962	12.02	12.205	162.2
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	9.946	10.742	11.415	13.642
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	100	100
	Kearsipan					
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	87,18	20,51	12,82	25,64
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		4	8	104	110
	Layanan Urusan Pilihan					
	Pariwisata					
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%			2,81	2,76
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD		0,41	1,27	1,12	1,44
	Kunjungan wisata		32.457	10	12	32
	Lama kunjungan wisata		3	3	3	7
	PAD sektor pariwisata		0,41	1,27	1,12	1,44
	Pertanian					
	Kontribusi Sektor pertanian atau perkebunan terhadap PDRB	%	7,10	7,10	7,13	7,22
	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB					
	Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	0,74	0,85	0,97	1,45
	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB					
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		7,10	7,10	7,13	7,22
	Cakupan bina kelompok petani		58,15	58,26	58,57	58,87
	Perdagangan					
	Ekspor Bersih Perdagangan		773.511.973,67	600.000.000	750.000.000	850.000.000
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		29,02	10	15	22
	Perindustrian					
	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	7,04	5,56	6,08	6,08

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	50	50	50	50
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) Kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	50	50	50	50
	Persentase jumlah hasil pemntauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industry(IPUI) Kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Kawasan industry (IUK) dan izin perluasan Kawasan industry(IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	0	0	0	0
	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	Ada/Tida ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Kelautan dan Perikanan					
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)					
	Produksi perikanan		101	100	100	100
	Konsumsi ikan		100	100	100	100
	Cakupan bina kelompok nelayan		12,68	12,00	13,00	17,00
	Produksi perikanan kelompok nelayan		37,58	42,00	42,00	42,00
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		1,25	1,26	1,27	1,31
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		0,23	0,23	0,23	0,23
	Nilai Tukar Nelayan		105,05	105,15	106,01	109,45
	Penunjang Urusan					
	Perencanaan Pembangunan					

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	97,61	100	100	100
	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	97,29	100	100	100
	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	93,15	100	100	100
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai/tidak sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
	Keuangan					
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%				
	Rasio PAD	%				
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase SILPA	%		3	3	3
	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,72	2	2	2
	Persentase Program / kegiatan yang tidak terlaksana	%	100	100	100	100
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	20,54	21	21	21
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	20,71	15	15	15



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung.					
	a. Belanja Operasi terhadap total Belanja	%		68,39	59,50	60,19
	b. Belanja Modal terhadap Total Belanja	%		18,57	19,57	18,20
	c. Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja	%		0,16	0,13	0,06
	d. Belanja Transfer terhadap Total Belanja	%		12,87	20,80	21,55
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		17.262.101.969	16.210.182.450	16.210.182.450	19.780.954.775
	Penetapan APBD		Tepat waktu (perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan APBD Tanggal 19 Oktober 2020	60 hari	60 hari	60 hari
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	82,61	3,26	13,23	35,00
	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	88,07	4,07	10,55	53,00
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		27 Orang	33 Orang	35 Orang	35Orang
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		787 Orang	787 Orang	750 Orang	500 Orang
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		2572 Orang	2800 Orang	3300 Orang	3900 Orang
Penelitian dan Pengembangan						
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan	%	48,71	50	50	70
	Persentase Implementasi rencana kelibangan	%	48,71	50	50	70
	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	48,71	50	50	70



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	
	Persentase kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	%	48,71	50	50	70
	Pengawasan					
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	3	3	3
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3
	Persentase tindak lanjut temuan	%	23.16	88	90	95
	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0	0	0
	Jumlah temuan BPK	%	8	25	22	8
	Sekretariat Dewan					
	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten/ Kota	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan Perda, dan fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun Dokumen rencana tahunan RKPD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada

Sumber: RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tabel 6. 3 Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

NO	Bidang Urusan/ jenis Pelayanan/ Indikator	Target Nasional (%)	Target (%)	
			Tahun	Tahun
			2021	2022
1	Pendidikan			
1.1	Pendidikan Dasar			
1	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)	%	100	100
2	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)	%	100	100
3	Persentase Jumlah anak usia 7-15 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	%	100	100
1.2	Pendidikan Kesetaraan			
1	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100
2	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100
3	Persentase Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	%	100	100
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini			
1	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	100	100
2	Persentase Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	%	100	100
3	Persentase Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	%	100	100
2	KESEHATAN			
1.1	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100
1.3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100
1.4	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100
1.5	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100
1.6	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	100	100
1.7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	100	100
1.8	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100
1.9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus	%	100	100
1.1	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100
1.1	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	%	100	100
1.1	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Teninfeksi HIV	%	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.1	Persentase Penyediaan kebutuhan pokok Air minum	%	100	100
1.2	Persentase Penyediaan pengelolaan air limbah domestik	%	100	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	Bidang Urusan/ jenis Pelayanan/ Indikator	Target Nasional (%)	Target (%)	
			Tahun	Tahun
			2021	2022
	Persentase Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	%	100	100
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1.1	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100
1.2	Persentase Pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100
1.3	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100
1.4	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100
1.5	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100
6	Sosial			
1.1	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	%	100	100
1.2	Persentase Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	%	100	100
1.3	Persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	%	100	100
1.4	Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	%	100	100
1.5	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	%	100	100

Sumber: RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026

Tabel 6. 4 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) TAHUN 2022

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN						
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	RPJMD	%	6.85	6.84	6.64
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang	Dinas Kesehatan	%	97	97	97.01

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
	Kesehatan.					
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	100	100	100
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial & P3A	%	25	25	30
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial & P3A	Orang	7,253	7,253	7,500
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
1.4.1.(a)	Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan .	Dinas Kesehatan	%	92.76	92	93
1.4.1.(b)	Persentase Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	88.98	78	80
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	72.47	72.47	72.48

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	57.17	59.51	61.03
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	57.17	59.51	61.03
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	92.54	105.5	105.75
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	95.99	99.64	99.89
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	81.53	87.14	89.59
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik PLN dan Bukan PLN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	43.45	43.45	41.28
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		8.61	PM	PM
1.5.1.(a)	Jumlah Lokasi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	3	0	4
1.5.1.(e)	Indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	202	202	202

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	#####	PM	PM
1.5.3*	Dokumen Strategi pengurangan resiko bencana (PRB) Tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	1
TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN						
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN						
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	%	2.02	3	2.8
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	6.2	7	6.8
2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	%	8	8	7.7
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	%	2.5	2.5	2.3
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	%	12	12	11.5
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI	Dinas Kesehatan	%	65	65	66

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
	eksklusif.					
TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA						
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA						
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	%	108.74	108.74	126.17
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	%	92.76	93	93.5
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	92.76	92	93
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Per 1000 kelahiran hidup	0.72	0.9	0.82
3.2.2*	Angka kematian neonatal(AKN) Per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per 1000 kelahiran hidup	4.61	5.59	5.4
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Per 1000 kelahiran hidup	8.16	8.16	8.11
3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	88.98	80	83
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	0.013	0.1	0.1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per 100.000 pddk	100	157.3	157.3
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	per 1000 org	0	<1	<1
3.3.3.(a)	Jumlah Kecamatan Yang mencapai eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan	Kec	11	11	11
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi terhadap penyakit Tropis Yang terabaikan	Dinas Kesehatan	orang	20	20	20
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Kabupaten	1	1	1
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Kabupaten	1	1	1
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1.(a)	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	NA	5.4	5.4
3.4.1.(b)	Prevalensi Tekanan Darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	NA	28	27.5
3.4.1.(c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk umur 18 Tahun	Dinas Kesehatan	%	NA	19	18
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.						
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	%	NA	0	0

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
3.5.2*	Konsumsi Alkohol (Liter Perkapita) Oleh penduduk Umur 15 tahun dalam satu tahun.	Dinas Kesehatan	liter per kapita	NA	0	0
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	NA	72.47	72.48
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	NA	57.2	58
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	24.98	36.64	37.89
3.7.2*	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertiliti)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	67.7	29.91	28.16

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	2.21	2.66	2.6
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	96	96	96.5
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	%		2.98	3.28
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS						
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA						
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i)	Dinas Pendidikan	%	96.25	96.25	96.28

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
	membaca, (ii) matematika.					
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	68.72	74.59	82.16
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	63.08	76.81	82.6
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	103.13	114.03	114.3
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	103.56	139.02	139.2
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	8.8	9	9.2
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	%	46.11	68	68.2
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan / Laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/MTs/ Sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi	Dinas Pendidikan	%	RAPM SD : 100, RAPM SMP :100	RAPM SD : 100, RAPM SMP :100	RAPM SD : 100, RAPM SMP :100
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
4.6.1.(a)	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 tahun	Dinas Pendidikan	%	96.99	96.99	97.04

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
4.6.1.(b)	persentasi angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan	%	PAMH 15-24 : 99.45	PAMH 15-24 : 99.45	PAMH 15-24 : 99.50
				PAMH 15-59: 95.98	PAMH 15-59: 95.98	PAMH 15-59: 96.3
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.						
4.a.1*	Proporsi Sekolah Dengan Akses ke : (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran (c) komputer untuk tujuan pengajaran (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa	Dinas Pendidikan	%	PSDAF(a): 97.56	PSDAF(a): 97.56	PSDAF(a): 97.58
				PSDAF(b): 53.65	PSDAF(b): 53.65	PSDAF(b): 53.67
				PSDAF(c):3 9.02	PSDAF(c):3 9.02	PSDAF(c):3 9.04
				PSDAF(d):1 .21	PSDAF(d):1 .21	PSDAF(d):1 .23
				PSDAF(f):9 5.12	PSDAF(f):9 5.12	PSDAF(f):9 5.14
				PSDAF(g):7 9.26	PSDAF(g):7 9.26	PSDAF(g):7 9.28
				PSDAF(h): 97.56	PSDAF(h): 97.56	PSDAF(h): 97.58
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan	%	TK : 73.33	TK : 73.33	TK : 73.38
				SD : 65.30	SD : 65.30	SD: 65.35
				SMP: 67.47	SMP: 67.47	SMP: 67.52
TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER						
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN						
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kebijakan	5	5	6
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0.01	0.01	0.02
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	14	14	20
5.2.2.*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0.01	0.01	0.01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	100	100
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	6.67	6.67	6.67
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari						

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
konferensi-konferensi tersebut.						
5.6.1.(a)	unmet need KB (kebutuhan keluarga berencana/ KB yang terpenuhi)	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	%	15.61	13.46	12.88
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	%	65	65	70
TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK						
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA						
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	57.17	59.51	61.03
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	57.17	59.51	61.03
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	67.71	67.71	70.86

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	97.37	97.38	97.39
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	86	127	128
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	127	127	128
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten	1	1	1
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	0	0	0.040575
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten	1	1	1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
6.3.1.(b)	Proporsi Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan Lumpur Tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	0	0	0.040575
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Dinas Lingkungan Hidup				
	1. Towuti		IKA	-	87.78	87.8
			Pij	-	0-≤5	0-≤5
	2. Mahalona		IKA	-	90.15	90.17
			Pij	-	0-≤5	0-≤5
6.3.2.(b)	Kualitas Air sungai sebagai Sumber Air Baku	Dinas Lingkungan Hidup				
	1. Sungai Angkona		IKA		81.31	81.33
			Pij		0-≤5	0-≤5
	2. Sungai Kalaena		IKA		81.36	81.38
			Pij		0-≤5	0-≤5
	3. Sungai Lagego		IKA		81.1	81.12
			Pij		0-≤5	0-≤5
	4. Sungai Malili		IKA		83.4	83.42
			Pij		0-≤5	0-≤5
	5. Sungai Tomoni		IKA		81.7	81.72
			Pij		0-≤5	0-≤5
	6. Sungai Wasuponda		IKA		85.5	85.52
			Pij		0-≤5	0-≤5
TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI						
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA						
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	RPJMD	%	1.46	PM	PM
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	RPJMD	Juta Rupiah	70.5	70.9	71,45
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	42.51	42.51	42.33
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rupiah	20,000	20,000	20,400
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	RPJMD	%	4.46	4.39	4.28
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	%	10	PM	PM
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
8.9.1*	Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	%	NA	PM	PM
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Orang	10,000	10,000	12,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
8.9.1.(b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Orang	3	3	3
8.9.1.(c)	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	%	1.27	1.27	1.12
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.						
8.10.1*	Jumlah Kantor Bank dan ATM Per 100.000 penduduk Dewasa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	NA	PM	PM
8.10.1.(a)	Rata-Rata Jarak lembaga keuangan (BANK umum)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Km	NA	PM	PM
8.10.1.(b)	Proporsi Kredit UMKM terhadap total Kredit	Dinas Perdagangan koperasi dan UKM	%			
TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR						



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI						
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	8	8	8
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1*	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB Dan perkapita.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	3.82	3.82	3.85
9.2.1.(a)	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	4.4	4.4	4.7
9.2.2*	Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	16.8	16.8	17.25
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.						
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	29.83	29.83	29.85

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	21.5	21.5	21.8
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.						
9.c.1*	Proporsi Penduduk Yang Terlayani mobile Broadband	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	53.44	PM	PM
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang mengasai/memiliki Telepone Genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	85.14	PM	PM
9.c.1.(b)	Proporsi Individu Yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	53.44	PM	PM
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN						
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA						
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1*	Koefisien Gini	RPJMD	%	0.405	0.377	0.277
10.1.1.(a)	Persentase Penduduk Yang Hidup Dibawah Garis kemiskinan Nasional, menurut jenis	BPS	%	6.85	6.84	6.64
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Yang Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	13	13	6
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	3	3	3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.						
10.4.1.(b)	Proporsi Peserta Program jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	100	100	100
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN						
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN						
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	88.8	88.8	87.39
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.						
11.5.1*	Jumlah Korban meninggal, Hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	8,61	PM	PM
11.5.1.(a)	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	202	202	202
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit	2	0	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	#####	PM	PM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	%			
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.						
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	1
TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB						
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN						
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.						
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	1,500	1,500	1,550
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	3,000	3,000	3,500
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.						
12.6.1.(a)	Jumlah Perusahaan Yang menetapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Perusahaan	1	1	1
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM						
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA						
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	1
13.1.2*	Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena dampak Bencana per 100.000 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	2,32	PM	PM
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh						
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN						
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan Pembunuhan pada satu tahun terakhir	Polres	Kasus	NA	PM	PM
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik pe 100.000 penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	%	0	0	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	%	NA	PM	PM
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	%	NA	PM	PM
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.						
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	%	NA	PM	PM



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	95.95	95.95	96.25
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	Skor	61.06 (B)	65.00 (B)	71.00 (BB)
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Sekretariat Daerah	%	34.43	55	60
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	Kab	100	100	100
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	%	100	100	100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	6.67	6.67	6.67
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	13.79	17.24	17.24
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	96.05	96.05	96.55
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	87.14	87.14	89.59
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	87.14	87.14	89.59
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.						
16.10.2.(c)	Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Untuk mengukur Kualitas PPID dalam	Dinas Komunikasi dan Informatika	Orang	NA	5	5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
	Menjalankan Tugas Dan Fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.					
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN						
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%			
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%			
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.6.2.(c)	Proporsi Penduduk Yang terlayani Mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	53.44	PM	PM
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.						
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	53.44	PM	PM
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data	BPS	%	89	89	89.5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian	
					2021	2022
	statistik.					
17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	87	87	87.5
17.18.1. (c)	Jumlah Metadata Kegiatan Statistik dasar, Sektorial Dan Khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	Unit	6	6	6
17.18.1. (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	55	55	60
Target 17.19 : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada
17.19.2. (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	9,745	11,166	11,500
17.19.2. (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	81	81	81.5

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ke-1 (pertama) atau merupakan tahun terakhir dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, RKPD Tahun 2022 ini diharapkan dapat memperkuat capaian kinerja dalam mewujudkan prioritas pembangunan RPJMD 2021-2026. Selain itu pula RKPD Tahun 2022 diselaraskan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKP nasional, hal ini di maksudkan guna menjamin sinergitas pembangunan antar level pemerintahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Nasional. Pada Bab penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini mencakup tiga sub Bab yaitu : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, serta kesimpulan.

7. 1. Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan hingga akhir Tahun 2022. Untuk mendukung capaian indikator sasaran pembangunan dalam RKPD, Pelaksanaan Program dan kegiatan Prioritas berdasarkan pentahapan pembangunan dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, dimana semua SKPD wajib untuk menerapkan Prinsip – prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif dalam pelaksanaannya. Dokumen ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) , serta Bagi seluruh stakeholders pembangunan daerah dalam membangun sinergitas yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta, guna

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di Tahun 2022.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, maka upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya dalam perencanaan dan penganggaran disusun dan dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran yang telah disepakati bersama oleh seluruh komponen yang terlibat didalamnya.

Dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD merupakan dokumen acuan rencana operasional pembangunan Tahun 2022, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2022. dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2022, maka seluruh SKPD wajib menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang mengacu pada RKPD.
2. Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi dan sinergitas antara RKPD dengan Renja-PD dengan tetap memperhatikan target capaian IKU RPJMD, IKK, SPM, TPB/SDGs.
3. Uraian program dan kegiatan prioritas yang direncanakan setiap SKPD harus terkait dan mendukung secara langsung terhadap pencapaian indikator sasaran setiap prioritas kebijakan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022.
4. Dalam menyusun program kerja tahunan, seluruh pemangku kepentingan serta dunia usaha agar berkontribusi dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan Perencanaan, Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

pelaksanaan RKPD dan setiap SKPD berkewajiban melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD.

6. Seluruh Organisasi kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, Bapelitbangda menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2022. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2022 menjadi dasar bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022.
7. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2022, RKPD dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur.
8. Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Secara proaktif, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2022 serta menghimpun dan menganalisa laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati .
9. Penyusunan RKPD Tahun 2022, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur secara bertahap dan berkesinambungan.
10. Kepada seluruh SKPD diharapkan untuk memperhatikan dan melaksanakan kaidah pelaksanaan ini dengan penuh rasa tanggungjawab.

7.2 Kesimpulan.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 yaitu : **“PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS”**, Sehingga diharapkan program dan kegiatan di SKPD mengarah kepada pencapaian sasaran sebagaimana tema yang telah ditetapkan tersebut. Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian pembangunan pada tahun rencana.

RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dalam pelaksanaannya disinergiskan dengan perencanaan pembangunan Nasional, dan Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka ditempuh kebijakan sharing pembiayaan pembangunan antara pemerintah kabupaten Luwu Timur dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik berupa Cost sharing maupun activity sharing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber-sumber pendanaan lainnya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ini disusun untuk dijadikan sebagai Landasan, Pedoman, dan Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

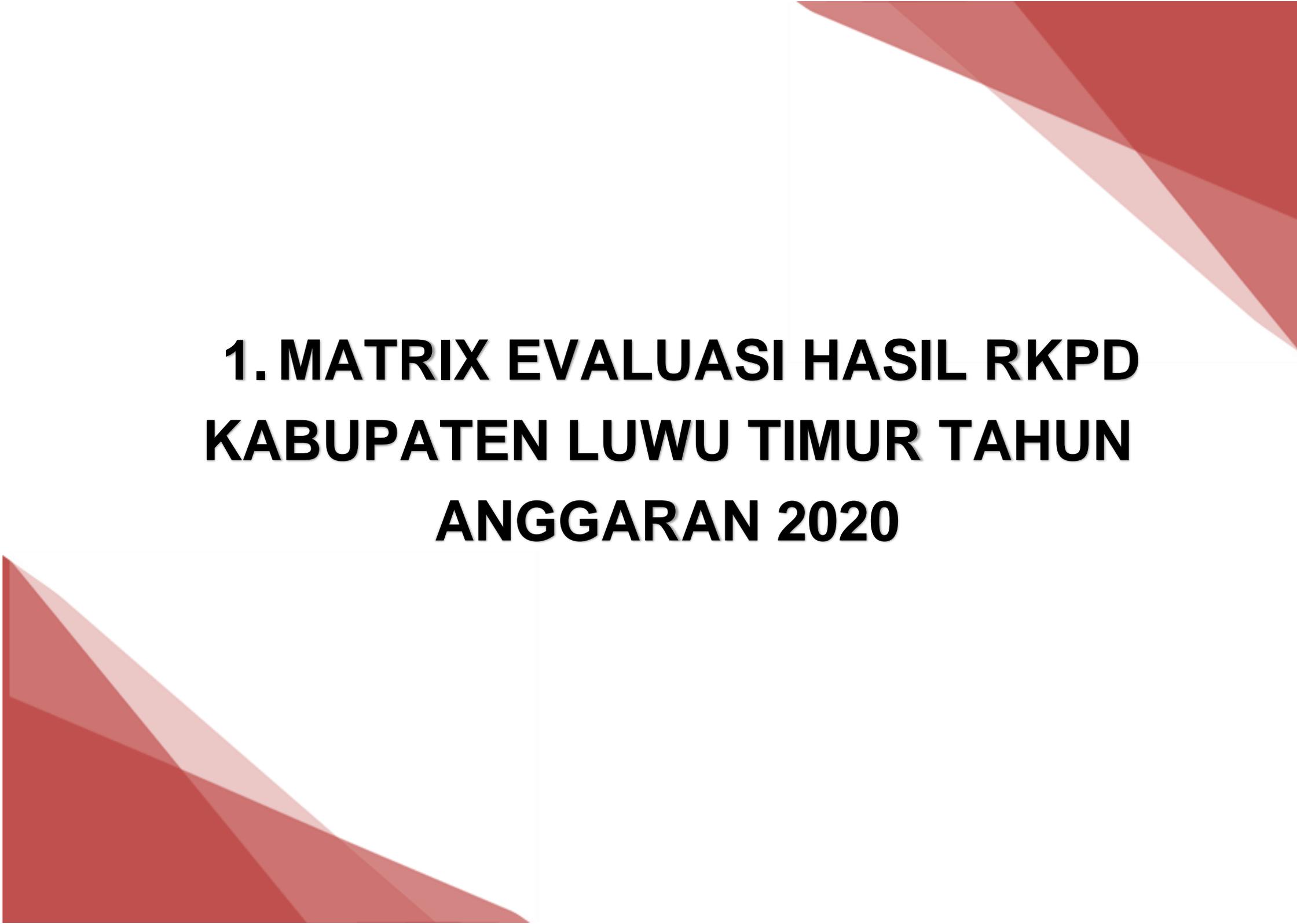
Malili, 1 Juli 2021

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN



DAFTAR LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR



1. MATRIX EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
				7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	100.00	29,671,934,870	100.00	2,525,148,060	100	2,560,067,810									100	1,778,482,515	100.00%	69.47%	200.00	#####	200.00%	14.50%	Dinas Pendidikan		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yg di agenda (surat)	3200.00	9,600,000			3200	8,283,000	493	2,570,750	454	171,250	1,120	4,971,000	1,133	570,000	3,200	8,283,000	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan (rekening)	18.00	321,420,000			2	97,464,000	2	33,463,773	2	19,538,680	2	18,970,532	2	25,490,611	2	97,463,596	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)	2.00	62,697,250			3	101,797,500	3	17,250,000	3	17,250,000	3	17,250,000	3	50,047,500	3	101,797,500	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumah peralatan kerja yang dipelihara (jenis)	92.00	69,000,000			8	109,500,000	8	18,000,000	8	18,000,000	8	16,500,000	8	57,000,000	8	109,500,000	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	1.00	162,592,000			1	118,967,000	1	38,492,900	1	38,493,100	1	23,535,600	1	18,445,400	1	118,967,000	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang di jilid (eks)	45.00	122,000,000			100	87,000,000	35	30,246,500	-	29,799,000	32	19,376,500	33	7,578,000	100	87,000,000	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
			Jumlah foto copy (lbr)				296000			70,000		70,020		69,200		86,780		296,000		100.00%						Dinas Pendidikan		
			Jumlah blanko di cetak dan surat yang digandakan (buah)				23			10		8		3		2		23		100.00%						Dinas Pendidikan		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (buah)	200.00	24,000,000			283	17,660,000	85	4,910,000	83	4,918,000	55	4,914,000	60	2,918,000	283	17,660,000	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks)	18.00	20,100,000			732	73,380,000	18	2,050,000	18	2,060,000	24	2,050,000	672	67,220,000	732	73,380,000	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (kotak)	10686.00	158,720,000			6440	117,525,000	3,200	38,550,000	500	5,580,000	1,650	25,474,000	1,090	47,921,000	6,440	117,525,000	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)	82	376,355,000			31	99,220,900	-	11,153,000	33	73,398,700	66	192,291,819	130	376,064,419	100.00%	99.92%							Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (orang)	31.00	378,000,000			28	354,000,000	28	60,000,000	28	85,500,000	28	57,000,000	28	151,500,000	28	354,000,000	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun (dokumen)	4.00	34,680,560			4	19,440,000	1	-	1	-	1	7,237,000	1	12,203,000	4	19,440,000	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan (kali)	1800.00	297,908,000			1368	297,408,000	335	74,010,200	-	33,943,900	218	37,812,400	908	151,635,500	1,461	297,402,000	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
									1,778,779,500											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.98%					Dinas Pendidikan	
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Dinas Pendidikan	
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%) (%)	100.00	7,920,657,400	100.00	1,834,680,200	100	1,370,000,000									100	923,422,550	100.00%	67.40%	200.00	#####	200.00%	34.82%	Dinas Pendidikan		
		pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	4.00	80,000,000			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan	Lain(DiHilangkan diperubahan)	
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)	26.00	100,000,000			18	593,638,200	-	7,200,000	-	7,190,000	-	7,195,000	18	569,723,200	18	591,308,200	100.00%	99.61%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (paket)	1.00	50,000,000			1	154,230,000	1	14,996,500	1	14,980,000	1	-	1	124,253,500	1	154,230,000	100.00%	100.00%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	121.00	200,000,000			67	180,210,000	30	27,055,140	20	26,681,010	10	9,676,640	7	114,471,560	67	177,884,350	100.00%	98.71%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()	
									928,078,200											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.50%					Dinas Pendidikan	

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWP Penanggungjawab	Keterangan												
				5		6		7		8		9			10		11		12				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah informasi yang disosialisasikan (kall)	4.00	192,585,250			2	38,715,000					1	4,785,000			1	31,985,000			2	36,770,000	100.00%	94.98%					Dinas Pendidikan	Tidak Ada()			
									6,200,418,360																						Dinas Pendidikan			
																																Dinas Pendidikan		
																																	Dinas Pendidikan	
	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	% Ruang Kelas Rusak berkurang (%)	6.00	556,467,097,565	12.73	110,158,909,575	6	128,056,589,575													13	86,719,456,314	212.17%	67.72%	25.46	#####	424.33%	35.38%	Dinas Pendidikan				
			% SD Memiliki Gedung Perpustakaan (%)	90.00		81.09		90															81									Dinas Pendidikan		
			Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (unit)	176.00		184.00		176															184									Dinas Pendidikan		
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia SD/MI (sek/10.000 penduduk)	65.13		51.87		65.13															52									Dinas Pendidikan		
			% SMP Memiliki Gedung Perpustakaan (%)	98.00		81.81		98															82									Dinas Pendidikan		
			Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi Bangunan Baik (unit)	94.00		363.00		94															-									Dinas Pendidikan		
			% SMP Memiliki Lab. Komputer (%)	80.00		48.78		80															49									Dinas Pendidikan		
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia SMP/MTs (sek/10.000 penduduk)	43.49		41.16		43.49															41									Dinas Pendidikan		
			% SMP Memiliki Lab. IPA (%)	90.00		59.09		90															59									Dinas Pendidikan		
		Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Unit Sekolah Baru SMP yang dibangun (unit)	0.00	4,000,000,000			3	394,675,200	3	95,295,200	-	-	139,067,500	-	-	-	-	-	-	-	3	234,362,700	100.00%	59.38%						Dinas Pendidikan	Tidak Ada()		
			Jumlah kantor SD sederajat yang dibangun (unit)					1		1												1		100.00%							Dinas Pendidikan			
		Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah guru SMP yang dibangun (unit)	10.00	3,523,200,000			2	1,288,747,700	-	-	-	-	435,920,000	-	-	-	-	2	427,826,200		2	1,283,493,600	100.00%	99.59%						Dinas Pendidikan	Tidak Ada()		
			Jumlah rumah guru SD yang dibangun (unit)					5		-	-	-	-	-	-	-	-	5				5		100.00%						Dinas Pendidikan				
		Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah RKB SD sederajat yang dibangun (RKB)	40.00	12,584,000,000			11	3,084,204,320	-	265,207,507	-	-	105,556,000	-	1,663,162,500	11	1,024,449,700	11	3,058,375,707	100.00%	99.16%								Dinas Pendidikan	Tidak Ada()			
		Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru SD yang dibangun (unit)	4.00	1,500,000,000			4	900,859,520	-	-	-	-	23,958,000	-	560,235,200	4	272,043,600	4	856,236,800	100.00%	95.05%								Dinas Pendidikan	Tidak Ada()			
		Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah Laboratorium Komputer SMP sederajat yang dibangun (unit)					1	394,808,600	-	-	-	-	-	-	158,652,000	1	236,077,600	1	394,729,600	100.00%	99.98%									Dinas Pendidikan	Tidak Ada()		
		Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana olah raga SMP yg terbangun (dok)	2.00	440,000,000			0	15,972,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan	Lain-lain(Utan g/retensi)			
			Jumlah sarana olah raga SD yg terbangun (dok)					0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%						Dinas Pendidikan				
		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata (paket)	4.00	1,800,000,000			7	5,211,262,200	-	-	-	-	125,690,000	-	-	7	5,061,130,000	7	5,186,820,000	100.00%	99.53%								Dinas Pendidikan	Tidak Ada()			
			Jumlah halaman sekolah SD yang ditata (paket)					25		-	-	-	-	-	-	-	25		25			25		100.00%						Dinas Pendidikan				
		Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	2.00	3,135,000,000			12	1,038,192,500	-	-	-	-	700,710,000	-	-	12	330,309,000	12	1,031,019,000	100.00%	99.31%								Dinas Pendidikan	Tidak Ada()			
		Pembangunan ruang ibadah	Jumlah ruang ibadah SMP yang dibangun (dok)	3.00	810,000,000			0	43,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan	Lain-lain(Utan g/retensi)			
			Jumlah ruang ibadah SD yang dibangun (dok)					0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%						Dinas Pendidikan				
		Pembangunan pepustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun (unit)					2	428,000,000	-	-	-	-	-	-	172,000,000	2	256,000,000	2	428,000,000	100.00%	100.00%								Dinas Pendidikan	Tidak Ada()			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWP Penanggungjawab	Keterangan						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah WC peserta didik SD yang dibangun (unit)			8	927,686,900					152,670,000		263,100,000	8	431,279,700	8	847,049,700	100.00%	91.31%				Dinas Pendidikan	Tidak Ada()				
			Jumlah WC peserta didik SMP yang dibangun (unit)			1								1		1		100.00%						Dinas Pendidikan					
		Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah ijazah dan/atau SKHUN Sekolah dasar dan paket A (eks)			6500	188,794,000			6,500	98,953,600		78,000,000		10,800,000	6,500	187,753,600	100.00%	99.45%				Dinas Pendidikan	Tidak Ada()					
			Jumlah raport peserta didik SMP kelas 7 yang diadakan (eks)			0												0.00%					Dinas Pendidikan						
			Jumlah buku-buku koleksi di sediakan (eks)			1156				1,156						1,156		100.00%					Dinas Pendidikan						
			Jumlah raport peserta didik SD yang disediakan (eks)			0												0.00%					Dinas Pendidikan						
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat Peraga Seni peserta didik yang diadakan (paket)			7	3,265,229,000				396,611,000	7	1,107,389,777		1,670,898,331	7	3,174,899,108	100.00%	97.23%				Dinas Pendidikan	Tidak Ada()					
			Jumlah alat Peraga Olah Raga peserta didik yang diadakan (paket)			40						40				40		100.00%					Dinas Pendidikan						
			Jumlah alat praktik Lab. IPA peserta didik yang diadakan (paket)			76						76				76		100.00%					Dinas Pendidikan						
			Jumlah alat Peraga Matematika peserta didik yang diadakan (paket)			109						109				109		100.00%					Dinas Pendidikan						
			Jumlah alat praktik dan Peraga IPS peserta didik yang diadakan (paket)			25						25				25		100.00%					Dinas Pendidikan						
		Pengadaan mebelur sekolah	Jumlah mobilier SMP yang diadakan (paket)	21.00	2,013,000,000	20	1,509,370,000			13	362,849,300		230,923,000	7	914,890,500	20	1,508,662,800	100.00%	99.95%				Dinas Pendidikan	Tidak Ada()					
			Jumlah mobilier SD yang diadakan (paket)			25				8				17		25		100.00%					Dinas Pendidikan						
		Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah SMP yang diadakan (paket)	246.00	14,340,000,000	12	6,111,440,000	12			3,701,518,100		2,349,897,000		57,440,000	12	6,108,855,100	100.00%	99.96%				Dinas Pendidikan	Tidak Ada()					
			Jumlah laptop guru yang diadakan (unit)			300		300							300		100.00%						Dinas Pendidikan						
			Jumlah perlengkapan sekolah SD yang diadakan (paket)			20		20							20		100.00%						Dinas Pendidikan						
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan gedung SMP yang direhab. (dok)	0.00	240,000,000	0	134,390,000				39,563,400		41,957,300		46,757,300		128,278,000	0.00%	95.45%				Dinas Pendidikan	Tidak Ada()					
			Jumlah bangunan gedung SD yang direhab. (unit)			1								1		1		100.00%					Dinas Pendidikan						
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah guru SD yang direhab (dok)	3.00	220,000,000	0	9,987,650											0.00%	0.00%				Dinas Pendidikan	lain-lain(Utan g/Retensi)					
			Jumlah rumah guru SMP yang direhab (unit)			0												0.00%					Dinas Pendidikan						
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)	12.00	1,654,819,998	27	3,310,982,500				975,679,600		943,048,000	27	1,344,605,600	27	3,263,333,200	100.00%	98.56%				Dinas Pendidikan	Tidak Ada()					
			Jumlah ruang kelas SMP yang direhab (unit)			11								11		11		100.00%					Dinas Pendidikan						
		Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru SD yang direhab (unit)	1.00	270,000,000	1	66,340,000							1	63,700,000	1	63,700,000	100.00%	96.02%				Dinas Pendidikan	Tidak Ada()					
			Jumlah ruang guru SMP yang direhab (unit)			0												0.00%					Dinas Pendidikan						
		Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah laboratorium SMP yang di rehab (unit)			2	228,976,000				4,500,000		105,262,500	2	115,212,500	2	224,975,000	100.00%	98.25%				Dinas Pendidikan	Tidak Ada()					
		Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan SD yang direhab (unit)	2.00	480,000,000	7	1,073,990,000				29,964,000		400,000,000	7	639,964,000	7	1,069,928,000	100.00%	99.62%				Dinas Pendidikan	Tidak Ada()					
			Jumlah perpustakaan SMP yang direhab (unit)			2								2		2		100.00%					Dinas Pendidikan						
		Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah WC SD yang direhab (unit)	6.00	880,000,000	6	55,640,000				1,560,000		20,800,000	6	33,269,800	6	55,629,800	100.00%	99.98%				Dinas Pendidikan	Tidak Ada()					
			Jumlah WC SMP yang direhab (unit)			0												0.00%					Dinas Pendidikan						

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWPD Penanggungjawab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	100.00	48,980,365,843	100.00		100	10,236,530,513									97.19	9,567,129,017	97.19%	93.46%	197.19	#####	197.19%	19.53%	Dinas Kesehatan		
		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pelayanan surat menyurat yang disediakan (jenis)					2222	1,900,000	400	-	500	390,000	600	600,000	1,222	180,000	2,722	1,170,000	100.00%	61.58%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan (rekening)					84	149,400,000	84	-	84	47,415,466	84	25,135,916	84	60,461,219	84	133,010,601	100.00%	89.03%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan yg terbayarkan (orang)					17	377,400,000	17	-	17	157,250,000	17	94,350,000	17	125,800,000	17	377,400,000	100.00%	100.00%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih kantor yang disediakan (jenis)					13	559,104,000	13	102,000,000	13	80,983,000	13	129,399,000	13	188,672,000	13	501,054,000	100.00%	89.62%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()	
			jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)					46		40	-	-		6		-		46		100.00%						Dinas Kesehatan	Jumlah cleaner bertambah 6 orang setelah perubahan APBD, sehingga target bertambah menjadi 46 orang	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)					36	28,500,000	9	-	9	11,310,000	9	7,690,000	9	9,465,000	36	28,465,000	100.00%	99.88%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)					46	30,159,013	46	-	46	5,054,000	46	16,998,000	46	321,000	46	22,373,000	100.00%	74.18%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (buah)					115	28,500,000	25	-	30	5,418,800	30	12,998,900	30	4,471,500	115	22,889,200	100.00%	80.31%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)					10	8,282,500	10	-	10	1,169,200	10	1,793,000	10	4,283,800	10	7,246,000	100.00%	87.49%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksampler)					96	10,200,000	21	-	21	3,600,000	21	2,050,000	33	4,510,000	96	10,160,000	100.00%	99.61%					Dinas Kesehatan	setelah perubahan bertambah 96 Eksemplar, sehingga target juga bertambah menjadi 96	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)					36	165,910,000	9	-	-	46,324,587	18	37,897,050	22	67,744,229	49	151,965,866	100.00%	91.60%					Dinas Kesehatan	Rapat koordinasi keluar daerah sangat selektif karena situasi Pandemi Covid-19 dan target berkurang menjadi 36 kali	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga teknis perkantoran yang terbayarkan (orang)			734	8,649,750,000	576	2,010,750,000	-	1,368,250,000	38	2,035,750,000	-	2,731,750,000	614	8,146,500,000	83.65%	94.18%					Dinas Kesehatan	Jumlah jasa bertambah 38 orang setelah perubahan, sehingga target juga bertambah menjadi 734 orang				
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan (kali)			840	182,820,000	100	-	32	62,103,550	43	8,951,800	137	58,905,000	312	129,960,350	37.14%	71.09%					Dinas Kesehatan	Perjalanan dinas dibatasi dan selektif selama Pandemi Covid-19				
		Penyediaan makan minum	Jumlah makan minum yang disediakan (kontak)			2523	44,605,000	350	-	184	-	700	24,720,000	816	10,215,000	2,050	34,935,000	81.25%	78.32%					Dinas Kesehatan	peserta rapat dibatasi jumlahnya mengikuti prosedur protokol kesehatan & sebagian rapat dilaksanakan secara virtual				
							10,236,530,513																	Dinas Kesehatan					
																								Dinas Kesehatan					
																								Dinas Kesehatan					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	42,361,186,377	100.00	-	100	2,117,853,642							100	2,006,697,983	100.00%	94.75%	200.00	#####	200.00%	4.74%	Dinas Kesehatan					
		Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun (unit)			2	956,156,792	-	-	-	31,963,500	-	252,818,186	2	603,246,387	2	888,028,073	100.00%	92.87%					Dinas Kesehatan	Rumah dinas di PKM Lakawali dan PKM Parumpurai				
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun (paket)			1	243,890,000	-	-	-	31,619,500	-	-	1	211,484,434	1	243,103,934	100.00%	99.68%					Dinas Kesehatan	Landscaping & rabat beton jalan instalasi gudang farmasi				
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diadakan (unit)			0	158,440,000	-	-	-	-	-	-	-	138,800,000	-	138,800,000	0.00%	87.60%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%			16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K
1	Terpenuhiya Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi rumah tangga yang terbins (%)	50.00	394,991,630	50.00	-	50.00	271,656,000	-	-	-	-	-	-	-	50	251,454,600	100.00%	92.56%	100.00	#####	200.00%	63.66%	Dinas Kesehatan	
		Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang terbins (sarana) jumlah sarana produksi rumah tangga yang terbins (sarana)					36	271,656,000	2	-	62,628,600	28	30,320,000	21	158,506,000	51	251,454,600	100.00%	92.56%					Dinas Kesehatan	jadanya anggaran / dana
								75		15		18		16		76	125	100.00%						Dinas Kesehatan	DAK untuk kegiatan	
									271,656,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	92.56%				Dinas Kesehatan	
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Dinas Kesehatan	
	Terpenuhiya Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase KK yang berPHBS (%)	78.00	6,264,114,768	78.00	-	77	80,300,000								77.07	79,225,000	100.09%	98.66%	155.07	#####	198.81%	1.26%	Dinas Kesehatan	
			Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan SMP (%)	100.00		100.00		100									-	0.00%	0.00%	100.00					Dinas Kesehatan	
		Upaya pelayanan kesehatan sekolah	persentase pelayanan skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar (%)					100	15,675,000	-	-	-	11,275,000	-	4,250,000	-	-	15,525,000	0.00%	99.04%					Dinas Kesehatan	kegiatan skrining kesehatan tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19 & pemerintah menerapkan belajar dari rumah. Dan ini merupakan salah satu target SPM, jadi target tidak tercapai
			persentase sekolah yang melaksanakan UKS (%)					80		81		81		81		81		100.00%							Dinas Kesehatan	
		Pengembangan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah KK yang ber-PHBS (KK)					38000	43,410,000	43,202	-	43,202	23,390,000	44,196	-	44,527	19,725,000	43,782	43,115,000	100.00%	99.32%				Dinas Kesehatan	Tidak Ada()
			persentase desa yang melaksanakan KTR (%)					60		69		69		69		70		69	100.00%						Dinas Kesehatan	
		Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat	jumlah posyandu aktif (posyandu)					265	21,215,000	265	-	265	-	266	15,370,000	269	5,215,000	266	20,585,000	100.00%	97.03%				Dinas Kesehatan	Tidak Ada()
			jumlah puskesmas yang melaksanakan SBH (PKM)					12		12		12		12		12		12	100.00%						Dinas Kesehatan	
			persentase desa/ kelurahan siaga aktif (%)					93		100		100		100		100		100	100.00%						Dinas Kesehatan	
									80,300,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	90.24%	98.66%				Dinas Kesehatan	
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Dinas Kesehatan	
	Terpenuhiya Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita kurus (%)	3.00	3,473,712,913	3.00	-	3.00	57,799,000								1.40	52,600,000	214.29%	91.01%	4.40	#####	146.67%	1.51%	Dinas Kesehatan	
			Persentase ibu hamil KEK (%)	7.00		7.00		9.00									9	100.00%	100.00%	16.00					Dinas Kesehatan	
		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)					100	27,195,000	100	-	100	2,870,000	100	6,480,000	100	16,840,000	100	26,190,000	100.00%	96.30%				Dinas Kesehatan	Tidak Ada()
			persentase ibu hamil KEK yang mendapat PMT (%)					86		99		97		100		100		99	100.00%						Dinas Kesehatan	
			persentase balita kurus yang mendapat PMT (%)					86		75		99		99		99		93	100.00%						Dinas Kesehatan	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat	persentase RT mengkonsumsi garam beryodium (%) cakupan ASI Eksklusif (%)			90	30,604,000	93	-	93	7,735,000	95	-	95	18,675,000	94	26,410,000	100.00%	86.30%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()				
						60		43		67		67		69		61		100.00%					Dinas Kesehatan						
							57,799,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	91.03%				Dinas Kesehatan					
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Dinas Kesehatan					
Terpenuhiya Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (%)	50.00	3,046,512,807	50.00	50.00	2,017,928,500								61.41	2,007,184,100	122.82%	99.47%	111.41	#####	222.82%	65.88%	Dinas Kesehatan						
	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat	persentase sarana air minum/sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan (%) jumlah desa/ kelurahan ODF (desa/ kel) persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (%) persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi sanitasi dasar (%) persentase kecamatan yang menyelenggarakan tatanan sehat (%) persentase tempat pengelolaan makanan yang memiliki laik hygiene sanitasi (%)			91	2,017,928,500	90	-	-	54,098,600	1	593,825,000	1	1,359,260,500	91	2,007,184,100	100.00%	99.47%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()					
					90		79		1		6		11		97		100.00%						Dinas Kesehatan						
					89		90		-		3		-		93		100.00%						Dinas Kesehatan						
					90		86		-		2		2		90		100.00%						Dinas Kesehatan						
					100		100		100		100		100		100		100.00%						Dinas Kesehatan						
					36		32		-		7		0		40		100.00%						Dinas Kesehatan						
						2,017,928,500												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.47%				Dinas Kesehatan					
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Dinas Kesehatan					
Terpenuhiya Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi dan baduta yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan lanjutan (%) Persentase kasus HIV yang ditangani (%) Cakupan penanganan penyakit malaria sesuai standar (%) Cakupan penanganan penyakit DBD sesuai standar (%) Cakupan kasus rabies yang ditangani (%) Cakupan penanganan kasus TB Paru (%)	95.00	13,805,350,040	95.00	95.00	12,593,182,226								87.90	7,412,387,642	92.53%	58.86%	187.90	#####	187.90%	53.69%	Dinas Kesehatan						
					60.00		60.00		100.00						100		100.00%				178.00			Dinas Kesehatan					
					100.00		100.00		100.00						100		100.00%				100.00			Dinas Kesehatan					
					100.00		100.00		100.00						100		100.00%				100.00			Dinas Kesehatan					
					100.00		100.00		100.00						100		100.00%				100.00			Dinas Kesehatan					
					78.00		78.00		100.00						100		100.00%				100.00			Dinas Kesehatan					
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	persentase penanganan vektor kasus malaria yang terindikasi KLB (%) persentase penanganan vektor kasus DBD yang terindikasi KLB (%)			100	181,509,500	100	-	100	32,528,675	100	-	100	73,181,475	100	105,710,150	100.00%	58.24%					Dinas Kesehatan	kasus DBD yang kurang sehingga kegiatan penyemp					
					100		100		100		100		100		100		100.00%						Dinas Kesehatan						
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (%)			94	60,938,500	24	-	21	21,903,000	25	4,045,700	28	30,658,500	97	56,607,200	100.00%	92.89%					Dinas Kesehatan	Tidak Ada()					

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/G tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Terpenuhinya Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan pada penderita DM sesuai standar (%)	30.00	8,511,525,481			30.00	37,956,500							29.70	21,230,000	99.00%	55.93%	29.70	#####	99.00%	0.25%	Dinas Kesehatan					
			Persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar (%)	30.00				30.00								28.70		95.67%						Dinas Kesehatan					
			Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa sesuai standar (%)	90.00				90.00								98.00		108.89%						Dinas Kesehatan					
			Persentase skrining risiko PTM pada usia produktif (15-59 tahun) (%)	40.00				40.00								23.50		58.75%						Dinas Kesehatan					
		Pengendalian Penyakit Tidak Menular	persentase penanganan penderita hipertensi (%)					30	17,501,500	24		-	1	12,070,000	2	1,556,000	2		29	13,626,000	95.67%	77.86%			Dinas Kesehatan	selama pandemi covid 19			
			persentase penanganan penderita diabetes melitus (%)					30		20			1			8		1	30		99.00%			Dinas Kesehatan	selama pandemi covid 19				
			persentase penanganan penderita orang dengan gangguan jiwa (%)					90		98			98			98		98	98		100.00%			Dinas Kesehatan	selama pandemi covid 19				
		Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif	persentase skrining faktor risiko gangguan indera pada usia 15-59 tahun (%)					40	20,455,000	2		-	1		1	7,604,000	5		7,604,000	11.98%	37.17%			Dinas Kesehatan	selama pandemi covid 19 kunjungan ke PKM berkurang & kegiatan luar gedung ditadakan sehingga capaian skrining tidak tercapai				
			persentase skrining faktor risiko hipertensi pada usia 15-59 tahun (%)					40		4			7		1		11		24		58.75%			Dinas Kesehatan	selama pandemi covid 19 kunjungan ke PKM berkurang & kegiatan luar gedung ditadakan sehingga capaian skrining tidak tercapai				
			persentase desa yang melaksanakan posbindu (%)					90		88			88		88		88		88		97.98%			Dinas Kesehatan	tidak ada pembentukan posbindu baru km selama pandemi kegiatan luar gedung ditadakan & anggaran dialihkan ke covid				

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (%)			95		22		23		25		22		92		96.95%				Dinas Kesehatan	Jumlah ibu bersalin yg memang kurang dibanding jumlah proyeksi sasaran	
			cakupan K4 (%)			90		21		22		21		24		88		98.16%				Dinas Kesehatan	krn adanya pandemi sehingga kunjungan ibu hamil berkurang dan masih tingginya kasus abortus	
			cakupan penanganan komplikasi obstetri (%)			80		21		15		17		28		80		100.00%				Dinas Kesehatan		
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja	cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)			43	18,625,000	11	-	10	855,000	25	720,000	-	9,780,000	46	11,355,000	100.00%	60.97%			Dinas Kesehatan	Tidak Ada()	
			cakupan kunjungan bayi (29hr-11bin) (%)			90		26		14		20		27		87		96.17%				Dinas Kesehatan	krn adanya pandemi sehingga kunjungan bayi berkurang & tidak dilaksanakannya posyandu	
			cakupan pemberian tablet FE pada remaja (%)			70		75		15		-		17		107		100.00%				Dinas Kesehatan		
			cakupan pelayanan kesehatan balita (12-59 bulan) (%)			75		20		7		13		26		66		88.48%				Dinas Kesehatan	krn adanya pandemi sehingga kunjungan balita berkurang & tidak dilaksanakannya posyandu	
			cakupan KN lengkap (%)			95		23		26		23		24		97		100.00%				Dinas Kesehatan		
			persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan remaja (%)			80		88		88		88		88		88		100.00%				Dinas Kesehatan		
							599,780,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	98.50%	59.66%		Dinas Kesehatan		
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah		Dinas Kesehatan		
	Terpenuhinya Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100.00	906,476,000	5.00	109,779,500								5.00	87,401,458	100.00%	79.62%	5.00	#####	5.00%	9.64%	Dinas Kesehatan	
		Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang berprestasi (orang)			0	83,771,000	-	-	-	46,179,458	-	987,000	-	19,308,000	-	66,474,458	0.00%	79.35%			Dinas Kesehatan	Tidak Ada()	
			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang terlatih (orang)			2		-		2		-		-	2		100.00%				Dinas Kesehatan			
		Pemutakhiran Data Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah profil deskripsi SDM yang di mutakhirkan (dokumen)			1	26,008,500	-	-	-	-	-	1,562,000	1	19,365,000	1	20,927,000	100.00%	80.46%			Dinas Kesehatan	Tidak Ada()	
			Persentase kepemilikan SIR/SIP bagi tenaga kesehatan (%)			95		20		25		25		25		95		100.00%				Dinas Kesehatan		
							109,779,500											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	61.85%	79.62%		Dinas Kesehatan		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
			Jumlah jembatan yang dipelihara (Unit)					3						2				1		3		100.00%						Dinas PUPR			
								2,793,230,000														88.42%	99.28%					Dinas PUPR			
																													Dinas PUPR		
																													Dinas PUPR		
		Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong yang dipelihara (km)					0.05	621,000,000	-	-	-	-	0	299,411,000	0	317,427,912	0	616,838,912	100.00%	99.33%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
									621,000,000													100.00%	99.33%						Dinas PUPR		
																													Dinas PUPR		
		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Penyusunan sistem informasi/data base jalan					3	602,710,800	-	-	-	-	-	13,080,000	3	583,121,800	3	596,201,800	100.00%	98.92%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Jumlah Dokumen Data Base jalan Berbasis Kecamatan (Dokumen)						602,710,800													100.00%	98.92%						Dinas PUPR		
																													Dinas PUPR		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat					5	384,889,513	2	61,710,000	4	58,690,000	3	73,055,758	3	185,855,000	3	379,310,758	60.00%	98.55%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Jumlah alar berta yang dipelihara (unit)						384,889,513													60.00%	98.55%						Dinas PUPR		
																													Dinas PUPR		
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Pembangunan pintu air					2	375,141,145	-	1,025,000	-	1,505,000	1	1,440,000	1	339,899,000	2	343,869,000	100.00%	91.66%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi					0.4	1,030,158,000	-	917,500	0	118,532,500	0	2,540,000	1	889,832,053	1	1,011,822,053	100.00%	98.22%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai					32	1,206,413,500	5	32,046,000	12	266,935,750	-	192,603,000	42	707,857,000	60	1,199,441,750	100.00%	99.42%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Pembangunan jaringan irigasi					11.75	15,776,751,069	-	140,610,250	5	2,608,790,729	4	5,971,089,219	4	6,213,215,954	13	14,933,706,152	100.00%	94.66%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Penyusunan sistem informasi database jaringan irigasi					5	27,050,000	-	-	-	-	2	1,880,000	-	2,030,000	2	3,910,000	40.00%	14.45%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Penguatan Peran Komisi Irigasi					1	9,830,000	-	-	1	-	-	-	1	5,390,000	1	5,390,000	100.00%	54.83%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Pembangunan Bendung					4	2,958,722,550	-	1,950,000	-	427,494,168	1	703,232,222	3	1,609,754,443	4	2,742,430,833	100.00%	92.69%									Dinas PUPR	Tidak Ada()
			Penguatan Peran Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi																										Dinas PUPR	Tidak Ada()	
									21,384,066,264																				Dinas PUPR		
																													Dinas PUPR		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah					1821	3,535,403,649	-	18,411,001	-	109,327,500	1,483	1,807,411,912	338	1,553,366,094	1,821	3,488,516,507	100.00%	98.67%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah					1200	17,271,870,000	-	25,044,929	-	206,503,000	-	3,958,585,580	3,212	12,768,856,247	3,212	16,958,989,756	100.00%	98.19%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah					3	1,277,561,591	-	-	-	-	151,885,000	3	856,891,211	3	1,008,776,211	100.00%	78.96%									Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Pengembangan sistem distribusi air minum					21.83	11,781,813,446	-	101,421,301	-	59,478,616	-	526,977,164	21	11,069,393,678	21	11,757,270,759	98.29%	99.79%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum					350	646,900,000	-	-	-	-	6,480,000	1,296	599,024,000	1,296	605,504,000	100.00%	93.60%									Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Penyusunan Sistem Informasi/data Base Jaringan Air Bersih/Air Limbah					0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Bersih					1	344,005,000	-	6,325,000	-	350,000	-	123,998,500	1	211,565,000	1	342,238,500	100.00%	99.49%								Dinas PUPR	Tidak Ada()	

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
		Pengelolaan Air Bersih	Jumlah kegiatan pendampingan yang dilakukan (kegiatan)			0														0.00%	0.00%					Dinas PUPR	Tidak Ada()		
							34,857,553,686													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99.42%	98.00%					Dinas PUPR		
		Program Pengendalian Banjir																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Dinas PUPR		
		Pembangunan prasarana pengamanan pantai	Panjang seawall yang di bangun (Meter)			37.5	814,001,489					210,000	10	223,600,446	29	520,103,969	39	743,914,415	100.00%	91.39%	#DIV/0!	#####	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas PUPR	Tidak Ada()		
							814,001,489													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	91.39%					Dinas PUPR		
		Program Pemanfaatan Ruang																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Dinas PUPR		
		Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan dan pemanfaatan ruang (Buah)			11	47,160,000						11	41,200,000		1,820,000	11	43,020,000	100.00%	91.22%						Dinas PUPR	Tidak Ada()		
							47,160,000													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	91.22%					Dinas PUPR		
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Dinas PUPR		
		Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen RDR yang disusun (Dokumen)			2	933,920,000		6,555,000					170,742,000		737,658,000	2	914,955,000	100.00%	97.97%						Dinas PUPR	Tidak Ada()		
		Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah laporan pengawasan pemanfaatan ruang yang disusun (laporan)			4	100,400,000	1	4,850,000	1	21,095,000	1	31,791,400	1	39,000,000	4	96,736,400	100.00%	96.35%						Dinas PUPR	Tidak Ada()			
		Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidp Strategis	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun (Dokumen)			2	269,766,600		6,280,000		200,000		1,455,000	2	191,891,000	2	199,826,000	100.00%	74.07%						Dinas PUPR	Tidak Ada()			
							1,304,086,600													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	92.90%					Dinas PUPR		
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Dinas PUPR		
		Pengembangan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Publik Wilayah Perkotaan	Jumlah prasarana dan sarana ruang terbuka publik yang dikembangkan (unit)			1	15,067,507,178		22,840,000		2,942,928,675		4,779,824,057	1	7,279,644,946	1	15,025,237,678	100.00%	99.72%						Dinas PUPR	Tidak Ada()			
		Penyediaan Prasarana Bangunan dan Lingkungan Publik Perkotaan	Jumlah prasarana bangunan dan lingkungan yang di bangun (unit)			2	1,164,762,037		95,435,705		50,283,400		66,818,000	1	846,373,414	1	1,058,910,519	50.00%	90.91%						Dinas PUPR	Tidak Ada()			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Publik	Luas taman tematik yang di pelihara (HA)			0.04	108,000,000						0		0	106,321,000	0	106,321,000	100.00%	98.45%					Dinas PUPR	Tidak Ada()			
							16,340,269,215													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	96.44%	99.08%					Dinas PUPR		
		Program Pembiayaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Dinas PUPR		
		Pengaturan dan Penyelenggaraan izin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah rekomendasi SIUK yang diterbitkan (Rekomendasi)			70	50,370,000	21	6,395,000	18	8,965,000	1	7,305,000	18	25,590,000	58	48,255,000	82.86%	95.80%						Dinas PUPR	Tidak Ada()			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi																							Dinas PUPR	Tidak Ada()			
		Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan jasa konstruksi yang diawasi (paket)			50	9,140,000			7		38	3,820,000	5	5,190,000	50	9,010,000	100.00%	98.58%						Dinas PUPR	Tidak Ada()			
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengawas																							Dinas PUPR	Tidak Ada()			
		Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Teknis Penyedia dan pengguna Jasa Konstruksi yang dilatih (orang)			100															0.00%	0.00%				Dinas PUPR	Tidak Ada()		
							59,510,000													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	85.49%	96.23%					Dinas PUPR		
		Program Penataan Ruang																		Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Tinggi					Dinas PUPR		
		Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Jumlah Rekomendasi kesesuaian ruang yang dikeluarkan (Rekomendasi)			20	98,815,000	4	3,030,000	8	20,150,000	7	9,535,000	4	59,650,000	23	92,365,000	100.00%	93.47%						Dinas PUPR	Tidak Ada()			
							98,815,000													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	93.47%					Dinas PUPR		
							173,605,463,841													Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		90.68%	92.26%						
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															3,822,724,331	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perkimta n			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (surat)			500	2,431,000	358	540,000	142	918,600	218	364,000	616	200,000	1,334	2,022,600	100.00%	83.20%					Dinas Perkimta n	Lain-Pem belian materai pada tahun 2020 dibelanjakan sesuai kebutuhan, sehingga sebagian anggaran tidak terealisasi		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar setiap bulan (Rekening)			3	2,983,784,664	3	710,953,736	3	940,530,043	3	749,278,741	3	577,980,665	3	2,978,743,185	100.00%	99.83%					Dinas Perkimta n	lain-lain(Untuk pembayaa n biaya rekening air dan listrik dibayarkana n berdasarkan beban tagihan sehingga anggaran bersifat disediakan sehingga terdapat sisa anggaran .)		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga upah jasa kebersihan kantor (orang)			2	28,000,000	2	4,570,000	2	7,430,000	2	7,400,000	2	8,600,000	2	28,000,000	100.00%	100.00%					Dinas Perkimta n	Tidak Ada(penc airan upah jasa setiap bulannya dilakukan setiap awal bulan berikutnya, sehingga anggaran pada Triwulan III terealisasi pada Triwulan IV)		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (unit)			56	35,420,000	14	6,810,000	11	7,050,000	10	12,700,000	21	8,735,000	56	35,295,000	100.00%	99.65%					Dinas Perkimta n	Lain(Keter sediaan jaringan listrik dengan input tegangan yang tidak stabil menyebab kan rentannya kerusakan peralatan kerja terutama peralatan elektronik.)				
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)			30	29,977,456	30	6,862,500	30	8,126,228	30	7,494,364	30	7,449,000	30	29,932,092	100.00%	99.85%					Dinas Perkimta n	Lain(Data Persedian Alat Tulis Kantor yang tidak update)				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan (jenis)			8	23,690,000	4	3,160,000	8	11,168,000	8	4,110,100	9	5,204,400	7	23,642,500	90.63%	99.80%					Dinas Perkimta n	Lain(Keter sediaan barang cetak dan penggandaan yang ada belum dapat sepenuhnya menunjang untuk tertib andiminst rasi.)				
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang diadkan (%)			100	4,800,000	-	-	50	1,850,000	30	1,990,000	20	925,000	100	4,765,000	100.00%	99.27%					Dinas Perkimta n	Lain(Keter sediaan jaringan listrik dengan input tegangan yang tidak stabil menyebab kan rentannya kerusakan kompone n instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor.)				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan (eksemplar)			60	7,740,000	18	1,020,000	15	2,790,000	15	1,980,000	15	1,900,000	63	7,690,000	100.00%	99.35%					Dinas Perkimta n	Lain-lain(Pada penyediaan bahan bacaan dan perundangan masih ada beberapa media baik koran/majalah yang belum dapat diakomodir.)				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (kotak)			605	10,835,000	132	-	268	7,090,000	21	504,000	160	3,110,000	581	10,704,000	96.03%	98.79%					Dinas Perkimta n	Lain-lain(Untuk pembayaran biaya rekening makanan dan minuman rapat dan kegiatan sehingga anggaran bersifat disediakan sehingga terdapat sisa anggaran.)				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kali)			48	196,120,000	24	37,632,954	3	45,057,600	13	53,492,450	12	58,742,450	52	194,925,454	100.00%	99.39%					Dinas Perkimta n	Lain-lain(Pandemi Covid 19, sehingga ada beberapa rapat-rapat dan koordinasi tidak terlaksana)				
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah upah jasa yang dibayarkan (orang)			23	378,000,000	23	66,000,000	23	94,500,000	23	94,500,000	23	123,000,000	23	378,000,000	100.00%	100.00%					Dinas Perkimta n	Tidak Ada()				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/G tahun 2021		SWPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1		Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Bidang Perumahan	Persentase rumah ber-IMB (%)			55	31,919,500	-	-	3,010,000	-	1,140,000	55	5,645,000	55	9,795,000	100.00%	30.69%					Dinas Perkimta n	Lain-lain(Kurangnya jumlah aparaturnya dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan bidang perumahan, sehingga perjalanan dinas untuk melakukan pengawasan tidak maksimal.					
							4,641,374,500										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	90.35%	93.67%				Dinas Perkimta n						
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Dinas Perkimta n						
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman														16,445,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perkimta n						
		Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah areal pemakaman yang direhab/ dibangun (Titik)			1	16,500,000	-	-	16,445,000	-	-	-	-	-	16,445,000	0.00%	99.67%					Dinas Perkimta n	Lain-lain(Pada kegiatan ini yang terlaksana adalah DED, sedangkan untuk fisik pelaksanaannya ditunda karena ada pengurangan anggaran akibat Pandemi Covid-19)					
		Identifikasi areal pemakaman	Jumlah laporan identifikasi Areal Pemakaman yang disusun (Dokumen)			1	6,510,250	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100.00%	0.00%					Dinas Perkimta n	Lain-lain(kegiatan ini telah terlaksana, SPJ tidak direalisasikan karena Pegawai yang menangan kegiatan ini meninggal)					
							23,010,250										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	28.29%	71.47%				Dinas Perkimta n						
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sedang				Dinas Perkimta n						
		Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman														10,865,924,417	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perkimta n						

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1		Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Permukiman	Panjang drainase/gorong-gorong yang direhab (Meter)			750	508,000,000			790	73,701,000			234,270,000	1,758	177,192,500	2,548	485,163,500	100.00%	95.50%					Dinas Perkotaan	Lain-lain/pemeliharaan drainase melebihi target, karena kondisi lapangan hanya perbaikan pada permukaan hanya dilakukan plesteran saja, atau Cuma lantai drainase saja yang dikerjakan, sehingga target panjangan melampaui.			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong Permukiman	Panjang turap/talud/bronjong yang direhab (Meter)			0	56,000,000				47,905,000							47,905,000	0.00%	85.54%					Dinas Perkotaan	Lain-lain yang dilaksanakan pada kegiatan ini hanya Detail Engineering Design, karena mengalami pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19			
		Penyusunan dan Pemutakhiran Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (Aplikasi)			1	5,539,800												0.00%	0.00%					Dinas Perkotaan	Lain-lain/kegiatan ini dilaksanakan tetapi data koordinat dan tracking GPS dan Foto PSU yang terbangun belum lengkap, dikarenakan pegawai yang menangani kegiatan ini meninggal dunia, sehingga tidak dapat			
							11,120,604,182																		Dinas Perkotaan				
																									Dinas Perkotaan				
		Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman																2,094,623,445	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perkotaan				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Dokumen)			1	3,240,000	1	1,485,000	-	1,000,000	-	650,000	-	-	1	3,135,000	100.00%	96.76%							Satpol PP dan Damkar	Tidak Ada()		
							8,240,100																						
				</																									

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWP Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1		Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana (orang)	29	778,525,000	30	85,500,000	29	218,757,700	29	176,367,850	29	247,657,850	29	728,283,400	100.00%	93.55%									BPBD	Tidak Ada()		
					1,194,866,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	90.11%									BPBD			
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi													716,108,231	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!					BPBD			
		Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarpras Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana (dokumen)	1	20,187,500	1	-	1	2,727,850	1	1,256,000	1	1,500,000	1	5,483,850	100.00%	27.16%									BPBD	Tidak Ada()		
		Pengendalian banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pasca Bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun (unit)	1	224,855,405	-	-	-	9,735,762	-	9,919,643	1	205,002,935	1	224,658,340	100.00%	99.91%									BPBD	Tidak Ada()		
		Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi (unit)	2	463,977,002	-	-	-	31,977,002	-	-	2	431,626,230	2	463,603,232	100.00%	99.92%									BPBD	Tidak Ada()		
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Dana Non APBD	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (persen)	90	23,255,000	28.74	7,425,000	-	-	-	-	57.81	14,937,809	86.55	22,362,809	96.17%	96.16%									BPBD	Tidak Ada()		
					732,274,907										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99.88%	97.79%									BPBD			
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					BPBD			
		Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana (orang)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									BPBD	Tidak Ada()		
		Pelatihan Tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (orang)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									BPBD	Tidak Ada()		
		Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana (orang)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									BPBD	Tidak Ada()		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan (unit)	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									BPBD	Tidak Ada()		
		Apel Staga Bencana	Jumlah apel staga bencana yang dilaksanakan (kali)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									BPBD	Tidak Ada()		
		Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan (kali)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									BPBD	Tidak Ada()		
		Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat (orang)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									BPBD	Tidak Ada()		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%												
					2,633,435,440										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah	99.07%	93.95%										
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													460,284,242	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!					Kantor Kesbangol			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat keluar masuk yang diagendakan (Buah)	350	1,440,000	170	360,000	19	360,000	105	360,000	68	360,000	362	1,440,000	100.00%	100.00%									Kantor Kesbangol	Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDk dan listrik yang terbarkarkan (rekening)	36	28,005,000	9	7,283,485	9	4,915,380	9	8,229,636	9	7,390,749	36	27,819,250	100.00%	99.34%									Kantor Kesbangol	Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbarkarkan (orang)	1	17,515,000	-	1,493,500	-	526,000	1	8,958,000	1	6,535,000	2	17,512,500	100.00%	99.99%									Kantor Kesbangol	Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)	14	9,800,000	7	3,650,000	2	800,000	2	1,780,000	3	3,550,000	14	9,780,000	100.00%	99.80%									Kantor Kesbangol	Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	40	14,065,479	10	2,284,000	10	811,000	10	4,394,529	10	6,570,519	40	14,060,048	100.00%	99.96%									Kantor Kesbangol	Tidak Ada()		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
							I		II		III		IV								12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)			3	14,718,000	3	3,570,000	2	1,941,500	3	3,028,500	3	5,939,700	11	14,479,700	100.00%	98.38%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)			7	2,845,250	2	682,000	-	-	3	1,351,800	2	795,000	7	2,828,800	100.00%	99.42%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (ekemplar)			60	6,180,000	10	1,020,000	13	310,000	26	2,650,000	21	2,140,000	70	6,120,000	100.00%	99.03%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan (Dosa)			510	9,375,000	134	3,937,000	-	413,000	-	224,000	168	3,688,000	302	8,262,000	59.22%	88.13%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan (kali)			30	110,575,000	3	14,055,693	-	-	15	61,581,207	9	33,461,844	27	109,098,744	90.00%	98.66%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis yang terbayarkan (orang)			12	162,000,000	12	25,000,000	12	42,500,000	12	40,500,000	12	54,000,000	48	162,000,000	100.00%	100.00%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)			438	86,990,800	45	19,379,600	27	11,255,000	64	18,546,800	259	37,701,800	395	86,883,200	90.18%	99.88%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
							463,509,529											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	94.95%	99.30%					Kantor Kesbangol	
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kantor Kesbangol	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															107,090,500	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!		Kantor Kesbangol	
		pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional (Unit) (unit)			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan (Unit) (unit)			12	60,728,000	9	36,248,000	-	-	3	24,480,000	-	-	12	60,728,000	100.00%	100.00%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit) (unit)			1	29,895,000	1	11,985,000	-	17,910,000	-	-	-	-	1	29,895,000	100.00%	100.00%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (Unit) (unit)			4	16,727,250	1	425,000	-	-	4	5,060,000	4	10,982,500	9	16,467,500	100.00%	98.45%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
							107,350,250											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.76%					Kantor Kesbangol	
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kantor Kesbangol	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															2,530,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!		Kantor Kesbangol	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang) (orang)			1	2,530,000	1	2,530,000	-	-	-	-	-	-	1	2,530,000	100.00%	100.00%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
							2,530,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	100.00%					Kantor Kesbangol	
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kantor Kesbangol	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															4,930,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!		Kantor Kesbangol	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)			2	2,510,000	-	-	1	-	-	1,255,000	1	1,255,000	2	2,510,000	100.00%	100.00%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (Dokumen)			1	2,420,000	1	1,353,500	-	-	-	466,500	-	600,000	1	2,420,000	100.00%	100.00%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	
							4,930,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	100.00%					Kantor Kesbangol	
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kantor Kesbangol	
		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD															4,520,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!		Kantor Kesbangol	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat (dokumen) (dokumen)			9	4,520,000	3	1,250,000	-	-	2	1,140,000	4	2,130,000	9	4,520,000	100.00%	100.00%					Kantor Kesbangol	Tidak Ada()	

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/G tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan (Rekening)			36	50,400,000	9	9,120,856	9	14,598,511	9	9,201,742	9	11,770,967	36	44,692,076	100.00%	88.67%					Dinas Transnakerin	Realisasi anggaran untuk rekening listrik sesuai penggunaan (Rekening Listrik untuk Bengkel Industri mulai September di subsidi oleh Pemerintah Pusat)		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang terbayarkan (Orang)			1	17,000,000	1	2,750,000	1	3,750,000	1	3,750,000	1	6,750,000	1	17,000,000	100.00%	100.00%					Dinas Transnakerin			
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)			19	15,800,000	6	3,950,000	6	3,930,000	3	3,930,000	4	3,990,000	19	15,800,000	100.00%	100.00%					Dinas Transnakerin			
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Di Kantor Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian yang tersedia (jenis)			31	19,005,000	31	5,000,000	31	5,000,000	31	5,000,000	31	4,005,000	31	19,005,000	100.00%	100.00%					Dinas Transnakerin			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia (jenis)			7	12,250,800	7	4,298,000	7	3,212,000	7	3,231,000	7	1,509,600	7	12,250,600	100.00%	100.00%					Dinas Transnakerin			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)			5	3,000,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	1,500,000	5	3,000,000	100.00%	100.00%					Dinas Transnakerin			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Eksemplar)			60	7,260,000	15	-	15	3,040,000	15	1,810,000	15	2,400,000	60	7,250,000	100.00%	99.86%					Dinas Transnakerin			
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah belanja makan minum untuk Rapat dan Tamu yang tersedia (kotak)			494	12,240,000	214	4,410,000	94	2,610,000	126	3,120,000	60	2,100,000	494	12,240,000	100.00%	100.00%					Dinas Transnakerin			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan (kali)			25	179,675,000	10	32,386,210	-	-	10	68,115,400	5	79,163,150	25	179,664,760	100.00%	99.99%					Dinas Transnakerin			
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (orang)			18	234,000,000	18	39,000,000	18	58,500,000	18	58,500,000	18	78,000,000	18	234,000,000	100.00%	100.00%					Dinas Transnakerin			
		Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulan yang disusun (Dokumen)			4	37,425,000	1	720,000	1	8,390,000	1	10,233,300	1	17,899,800	4	37,243,100	100.00%	99.51%					Dinas Transnakerin			
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)			150	58,510,000	45	10,375,500	37	7,243,300	34	24,995,450	34	15,788,000	150	58,402,250	100.00%	99.82%					Dinas Transnakerin			
							647,540,800											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.07%			Dinas Transnakerin				
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Dinas Transnakerin				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terselesaikan	100.00	1,229,028,558	100.00	983,675,556	100	116,651,000							100	110,261,319	100.00%	94.52%	200.00	#####	200.00%	89.01%	Dinas Transnakerin			
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)			3	29,000,000	-	-	-	-	1	6,000,000	2	20,328,000	3	26,328,000	100.00%	90.79%					Dinas Transnakerin			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)			1	20,151,000	1	7,540,000	1	1,911,000	1	-	1	10,698,000	1	20,149,000	100.00%	99.99%					Dinas Transnakerin			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)			21	67,500,000	7	20,415,120	7	14,541,700	5	10,324,500	2	18,502,999	21	63,784,319	100.00%	94.50%					Dinas Transnakerin			
							116,651,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	94.52%			Dinas Transnakerin				
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Dinas Transnakerin				

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%			16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp
4	Meningkatnya Nilai Produksi IKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase industri kecil dan menengah yang dibina	27.55	2,360,535,237	16.50	1,001,118,400	5.51	344,595,000							4.86	335,911,944	88.20%	97.48%	21.36	#####	77.53%	56.64%	Dinas Transnakerin			
	Kerjasama Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Multi Pihak	Jumlah Produk IKM yang menembus pasar lintas kabupaten/propinsi (IKM)						1	18,410,000	-	-	-	-	1	3,730,000	-	14,580,000	100.00%	99.46%					Dinas Transnakerin			
	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Sektor Handycraf	Jumlah IKM sector handycraft yang dibina (IKM)						25	178,135,000	25	160,241,944	-	8,895,000	-	-	-	5,905,000	100.00%	98.26%					Dinas Transnakerin			
	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Sektor Pangan	Jumlah IKM sector pangan yang dibina (IKM)						20	30,175,000	20	4,985,000	-	7,855,000	-	6,765,000	-	8,765,000	100.00%	94.02%					Dinas Transnakerin			
	Penyusunan dan Pemutakhiran Database IKM	Jumlah data base IKM yang disusun dan dimutakhirkan (IKM)						220	52,170,000	55	6,215,000	55	5,710,000	55	10,660,000	55	28,525,000	100.00%	97.97%					Dinas Transnakerin			
	Perlindungan Usaha Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan binaan Good Manufacturing Practice (IKM)						10	33,825,000	-	-	-	-	10	32,430,000	-	20,000	100.00%	95.93%					Dinas Transnakerin			
	Penguatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Koordinasi kerja dewan kerajinan nasional daerah (kegiatan)						1	31,880,000	-	-	-	3,880,000	1	8,740,000	-	18,010,000	100.00%	96.08%					Dinas Transnakerin			
									344,595,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	97.48%					Dinas Transnakerin		
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Dinas Transnakerin		
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra-sentra industri potensial yang dikembangkan	4.00	821,183,500	2.00	311,340,748	1	31,045,000								1	30,877,100	100.00%	99.46%	3.00	#####	75.00%	41.67%	Dinas Transnakerin		
		Pembinaan Sentra Industri Potensial	Jumlah IKM yang mengikuti Pembinaan (IKM)					25	31,045,000	-	360,000	15	16,653,100	5	3,554,000	5	10,310,000	100.00%	99.46%					Dinas Transnakerin			
									31,045,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.46%					Dinas Transnakerin		
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Dinas Transnakerin		
		Transmigrasi																							Dinas Transnakerin		
5	Meningkatnya Penempatan warga transmigran yang berkualitas dan mandiri	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Wilayah Transmigran yang dikembangkan	1.00	861,340,450	1.00	737,706,340	1	194,775,900								1	194,313,881	100.00%	99.76%	1.00	#####	100.00%	108.21%	Dinas Transnakerin		
		Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah MoU yang direalisasikan (MoU)					0	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	-	400,000	0.00%	100.00%					Dinas Transnakerin		
		Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah DED dan gambar yang dibuat (Paket)					5	116,371,900	-	-	5	820,000	-	-	-	115,354,900	100.00%	99.83%					Dinas Transnakerin			
		Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Dana Dekonsentrasi/Dana Pembantuan	Jumlah laporan keuangan dan barang yang disusun (Dokumen)					2	78,004,000	-	23,729,981	1	9,210,000	-	18,320,000	1	26,479,000	100.00%	99.66%					Dinas Transnakerin			
									194,775,900									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99.79%	99.76%					Dinas Transnakerin		
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Dinas Transnakerin		
		Program Transmigrasi Lokal	Persentase Transmigran Lokal yang ditempatkan (%)	100.00	424,119,000	100.00	142,877,040	100	660,000									660,000	0.00%	100.00%	100.00	#####	100.00%	33.84%	Dinas Transnakerin		
		Penyuluhan transmigrasi lokal	Jumlah transmigran yang mendapatkan penyuluhan (KK)					0	660,000	-	-	-	660,000	-	-	-	-	660,000	0.00%	100.00%					Dinas Transnakerin		
		Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang diseleksi (KK)					0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Dinas Transnakerin		
									660,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	100.00%					Dinas Transnakerin	
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					Dinas Transnakerin	
		Program Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi	Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina	100.00	1,114,862,500	100.00	758,200,093	100	128,140,000									100	126,338,060	100.00%	98.59%	200.00	#####	200.00%	79.34%	Dinas Transnakerin	
		Inventarisasi Lahan Usaha Transmigrasi	Panjang penegasan batas lahan Transmigrasi yang dikonstruksi (meter)					1500	114,255,000	-	9,287,660	-	8,700,000	-	4,235,000	1,500	91,240,400	100.00%	99.31%					Dinas Transnakerin			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWP Penanggungjawab	Keterangan	
							I		II		III		IV		12		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17											
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (Orang)			15	180,000,000	13	29,000,000	13	43,500,000	13	58,000,000	15	49,500,000	14	180,000,000	90.00%	100.00%					DLH	Tidak Ada()		
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)			285	62,702,700	50	6,919,025	50	15,064,600	50	11,736,000	135	28,889,975	285	62,609,600	100.00%	99.85%					DLH	Tidak Ada()		
						602,749,150																		DLH			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															54,708,450	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			DLH	
		pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					DLH	Tidak Ada()		
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan (unit)			14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					DLH	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)			2	19,859,050	2	19,859,050	-	-	-	-	-	-	2	19,859,050	100.00%	100.00%					DLH	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)			8	47,000,000	2	1,615,000	2	7,040,000	2	6,449,950	2	19,744,450	8	34,849,400	100.00%	74.15%					DLH	Tidak Ada()		
						66,859,050																		DLH			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															31,968,600	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			DLH	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (Orang)			3	32,520,000	2	-	1	23,940,800	-	8,027,800	-	-	3	31,968,600	100.00%	98.30%					DLH	Tidak Ada()		
						32,520,000																		DLH			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															7,316,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			DLH	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)			2	1,585,000	-	-	1	-	-	-	1	1,585,000	2	1,585,000	100.00%	100.00%					DLH	Tidak Ada()		
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dokumen)			1	5,731,000	1	2,294,000	-	-	-	2,018,000	-	1,419,000	1	5,731,000	100.00%	100.00%					DLH	Tidak Ada()		
						7,316,000																		DLH			
		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD															2,126,100	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			DLH	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)			6	2,126,100	1	340,000	2	900,000	2	886,100	1	-	6	2,126,100	100.00%	100.00%					DLH	Tidak Ada()		
						2,126,100																		DLH			
		Lingkungan Hidup																							DLH		
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam															268,333,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			DLH	
		Rehabilitasi hutan dan lahan	Luas lahan yang direhabilitasi (Ha)			37	72,894,200	-	-	-	3,033,000	-	-	37	65,830,000	37	68,863,000	100.00%	94.47%					DLH	Tidak Ada()		
		Pembinaan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MHA yang dibina (MHA)			3	202,826,200	-	7,250,000	-	87,905,000	-	16,035,000	3	54,035,000	3	165,225,000	100.00%	81.46%					DLH	Tidak Ada()		
		Kegiatan Sungai dan Danau Bersih	Jumlah Sungai dan Danau yang dibersihkan (Sungai / Danau)			3	9,910,000	1	1,970,000	1	4,930,000	1	-	-	2,910,000	3	9,810,000	100.00%	98.99%					DLH	Tidak Ada()		
		Pembinaan dan Penghargaan Lingkungan	Jumlah Penghargaan yang diterima (penghargaan)			1	27,850,000	-	-	-	4,180,000	-	13,965,000	-	6,290,000	-	24,435,000	0.00%	87.74%					DLH	Tidak Ada()		
						313,480,400																		DLH			
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)															79,033,150	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			DLH	
		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah RTH yang dipelihara (RTH)			8	80,260,000	-	-	5	17,608,000	3	61,425,150	-	-	8	79,033,150	100.00%	98.47%					DLH	Tidak Ada()		
						80,260,000																		DLH			
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan															3,702,043,770	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			DLH	

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SWP Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%			16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang diadakan (jenis)	11	182,402,880	8	-	3	182,402,880	-	-	-	-	11	182,402,880	100.00%	100.00%					DLH	Tidak Ada()			
		Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah yang dibina (Jumlah Bank Sampah yang dibina)	100	32,135,000	40	-	20	4,590,000	20	10,870,000	20	16,610,000	100	32,070,000	100.00%	99.80%					DLH	Tidak Ada()			
		Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah usaha penghasil limbah B3 yang diawasi (usaha/kegiatan)	20	20,740,000	5	3,246,600	5	6,182,400	5	8,436,000	5	210,000	20	18,075,000	100.00%	87.15%					DLH	Tidak Ada()			
		Operasional Persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi pengelola dan masyarakat (Orang)	129	2,891,434,600	129	445,258,050	129	688,811,550	129	960,082,950	129	785,640,900	129	2,879,793,450	100.00%	99.60%					DLH	Tidak Ada()			
		Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana yang dipelihara (unit)	58	591,000,000	58	68,120,000	58	187,346,050	58	133,164,390	58	201,072,000	58	589,702,440	100.00%	99.78%					DLH	Tidak Ada()			
					3,717,712,480											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.58%					DLH			
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					DLH			
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup														132,651,300	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	DLH			
		Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina (Sekolah)	17	28,120,000	4	653,900	5	6,344,100	5	14,096,350	3	3,459,950	17	24,554,300	100.00%	87.32%					DLH	Tidak Ada()			
		Peningkatan Kinerja Laboratorium	Jumlah sampel penguji kualitas lingkungan (sampel)	176	65,909,000	30	10,979,000	58	9,010,000	58	14,817,000	30	24,810,000	176	59,616,000	100.00%	90.45%					DLH	Tidak Ada()			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan (jenis)	3	49,854,200	-	-	1	29,490,000	1	18,991,000	1	-	3	48,481,000	100.00%	97.25%					DLH	Tidak Ada()			
					143,883,200											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	92.19%					DLH			
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					DLH			
		Program Penataan Lingkungan Hidup														102,166,650	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	DLH			
		Penilaian Penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai (dokumen)	20	16,264,900	5	1,203,000	5	9,145,250	5	1,353,000	5	4,360,000	20	16,061,250	100.00%	98.75%					DLH	Tidak Ada()			
		Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen IKLH yang dihasilkan (dokumen)	1	88,225,000	-	4,481,500	-	9,506,000	-	6,321,800	1	65,796,100	1	86,105,400	100.00%	97.60%					DLH	Tidak Ada()			
					104,489,900											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	97.78%					DLH			
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					DLH			
		Program Penataan Lingkungan Hidup														39,306,650	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	DLH			
		Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan (Usaha / Kegiatan)	20	11,280,000	5	3,696,500	5	4,257,200	5	3,035,000	5	-	20	10,988,700	100.00%	97.42%					DLH	Tidak Ada()			
		Pengawasan Kinerja Usaha dan Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	Jumlah usaha dan kegiatan yang tatap pada izin lingkungan (Usaha / Kegiatan)	50	20,289,900	10	7,390,700	15	7,613,950	15	4,525,000	10	-	50	19,529,650	100.00%	96.25%					DLH	Tidak Ada()			
		Penyelesaian Pengaduan Masalah Lingkungan	Jumlah masalah lingkungan yang difasilitasi (masalah)	2	10,415,000	2	210,000	-	-	-	7,698,300	-	880,000	2	8,788,300	100.00%	84.38%					DLH	Tidak Ada()			
					41,984,900											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	93.62%					DLH			
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					DLH			
					5,113,381,180											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	99.10%	97.91%								
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														967,901,351	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Dukcapil			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan surat Keluar yang diagendakan (Lembar)	300	1,350,000	150	900,000	150	450,000	-	-	-	-	300	1,350,000	100.00%	100.00%					Dinas Dukcapil	Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (Rekening)	24	87,079,992	6	22,383,953	6	17,423,802	6	16,837,464	6	21,956,932	24	78,602,151	100.00%	90.26%					Dinas Dukcapil	Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan kebersihan yang disediakan (jenis)	15	27,508,321	-	4,876,000	12	6,876,000	1	6,200,000	2	9,553,000	15	27,505,000	100.00%	99.99%					Dinas Dukcapil	Tidak Ada()			
			Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang dibayar (orang/bulan)	24		6		6		6		6	24		100.00%							Dinas Dukcapil				
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (Unit)	77	40,620,000	18	4,990,000	18	13,550,000	18	11,050,000	23	11,030,000	77	40,620,000	100.00%	100.00%					Dinas Dukcapil	Tidak Ada()			
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang diadakan (Jenis)	26	20,138,000	7	2,763,000	6	10,914,100	2	476,200	11	5,982,000	26	20,135,300	100.00%	99.99%					Dinas Dukcapil	Tidak Ada()			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Lembar barang yang digandakan (Lembar)	14500	7,350,000	10,000	2,000,000	4,000	3,920,000	500	900,000	-	528,000	14,500	7,348,000	100.00%	99.97%					Dinas Dukcapil	Tidak Ada()			
			Jumlah Jenis barang cetakan (Jenis)	1		1		1		1		1	1		100.00%							Dinas Dukcapil				
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (Jenis)	6	4,734,500	2	106,000	2	1,846,100	1	2,139,700	1	642,200	6	4,734,000	100.00%	99.99%					Dinas Dukcapil	Tidak Ada()			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/G tahun 2021		SWPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)			3	5,000,000											3	4,988,000	100.00%	99.76%						Dinas Dalduk KB	
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun (dokumen)			1	2,790,000	1	-	-	2,790,000	-	-	-	-	-	-	1	2,790,000	100.00%	100.00%						Dinas Dalduk KB	
							7,790,000																					
		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	95.00	44,844,900	0.00	12,000,000	95	13,000,000									95,00	6,894,800	#VALUE!	53.04%	#VALUE!	#####	#VALUE!	42.13%		Dinas Dalduk KB	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang disusun (dokumen)			6	6,959,800	-	-	2	1,304,000	2	2,418,000	2	3,172,800	6	6,894,800	100.00%	99.07%								Dinas Dalduk KB	
							6,959,800																					
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (Persen)	83.25	9,307,380,644	0.00	1,116,015,000	83.25	3,116,722,884									67,70	2,261,027,707	#VALUE!	72.55%	#VALUE!	#####	#VALUE!	36.28%		Dinas Dalduk KB	
			Rata-rata jumlah anak per-keluarga (orang)	2.75		0.00		2.75										1,75										Dinas Dalduk KB
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (persen)	13.15		0.00		13.15										15,28										Dinas Dalduk KB
		Kegiatan Pelayanan KB Daerah Tertinggal, Terperenc, Perbatasan	Jumlah akseptor yang terlayani (orang)					105	8,925,000	35	-	-	763,500	45	5,567,800	25	2,199,350	105	8,530,650	100.00%	95.58%							Dinas Dalduk KB
		Operasional Penyuluhan KB	Jumlah balai yang mendapat dukungan operasional pembiayaan (balai)					12	2,315,090,000	12	173,699,132	12	245,033,879	12	470,304,500	12	1,343,507,796	12	2,232,505,307	100.00%	96.43%							Dinas Dalduk KB
		Pelayanan KB bagi Masyarakat	Jumlah akseptor aktif (AA) dan akseptor baru (AB) yang dilayani (orang)					35126	20,590,000	35,126	2,948,600	35,126	8,194,500	35,126	2,713,900	35,126	6,134,750	35,126	19,991,750	100.00%	97.09%							Dinas Dalduk KB
		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MJP) (Persen)	32.80	257,660,900	0.00	73,227,500	32.8	74,227,500									25,07	33,783,250	#VALUE!	45.51%	#VALUE!	#####	#VALUE!	41.53%		Dinas Dalduk KB	
			Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (persen)	100.00		0.00		100										100										Dinas Dalduk KB
		Pelayanan KB medis operasi	Jumlah KB dengan metode operasi (WANTA DAN PRIA) yang terlayani (orang)					1	10,335,000	-	-	-	5,903,700	-	440,000	-	3,430,000	1	9,773,700	100.00%	94.57%							Dinas Dalduk KB
		Pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi	Jumlah klinik yang mendapatkan distribusi alokan (link)					10	24,340,000	10	5,045,000	10	6,691,550	10	1,830,000	10	10,443,000	10	24,009,550	100.00%	98.64%							Dinas Dalduk KB
		Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	Persentase jumlah kelompok UPPKS yang dibina (persen)	100.00	320,000,000	0	155,000,000	100	165,000,000									100	40,439,300	100.00%	24.51%	100.00	#####	100.00%	61.07%		Dinas Dalduk KB	
		Identifikasi dan pembentukan kelompok UPPKS	Jumlah kelompok yang teridentifikasi dan terfasilitasi (kelompok)					2	7,480,000	-	381,000	-	-	2	7,085,700	-	-	2	7,466,700	100.00%	99.82%							Dinas Dalduk KB
		Pembinaan dan pengembangan UPPKS	Jumlah kelompok yang dibina (kelompok)					6	34,718,000	-	525,000	-	2,210,000	6	26,250,000	-	3,987,600	6	32,972,600	100.00%	94.97%							Dinas Dalduk KB
		Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	Persentase jumlah kelompok yang dibina (Persen)	100.00	2,047,000,000	0.00	1,012,000,000	100	1,035,000,000									100	256,772,800	100.00%	24.81%	100.00	#####	100.00%	61.98%		Dinas Dalduk KB	
		Peningkatan Pembinaan Bina Keluarga Balita	Jumlah kelompok bkb yang dibina (kelompok)					8	50,181,500	-	1,994,500	8	17,994,500	-	26,112,250	-	4,047,700	8	50,148,950	100.00%	99.94%							Dinas Dalduk KB
		Peringatan Pembinaan Keluarga Remaja	Jumlah kelompok bkr yang dibina (kelompok)					8	13,888,500	-	-	-	1,800,000	8	-	-	11,756,650	8	13,556,650	100.00%	97.61%							Dinas Dalduk KB
		Peningkatan pembinaan keluarga lansia	Jumlah kelompok BKL yang dibina (kelompok)					5	14,095,000	-	-	-	3,575,000	5	7,910,900	-	2,485,000	5	13,970,900	100.00%	99.12%							Dinas Dalduk KB
		apresiasi hari keluarga nasional	Jumlah kategori lomba (kategori)					11	45,506,900	8	12,219,950	3	-	-	2,620,000	-	29,962,150	11	44,802,100	100.00%	98.45%							Dinas Dalduk KB

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWPD Penanggungjawab	Keterangan					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	95.00	12,339,647,950	95.00	2,927,533,000	95	2,178,113,550	95.00	448,994,121	95.00	659,816,730	95.00	398,504,174	95.00	636,629,888	95	2,143,944,913	100.00%	98.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)					1200	3,150,000	300	786,000	300	750,000	300	822,000	300	792,000	1,200	3,150,000	100.00%	100.00%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan (Rekening)					36	45,420,000	9	9,727,708	9	10,786,430	9	7,803,024	9	14,663,538	36	42,980,700	100.00%	94.63%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang.bulan)					12	15,000,000	3	480,000	3	1,020,000	3	3,300,000	3	10,200,000	12	15,000,000	100.00%	100.00%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)					38	10,950,000	9	3,850,000	10	2,860,000	10	2,395,000	9	1,750,000	38	10,855,000	100.00%	99.13%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)					30	29,936,000	30	5,536,000	30	11,651,000	30	5,617,000	30	7,132,000	30	29,936,000	100.00%	100.00%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)					3	24,321,000	3	3,086,500	3	6,927,000	3	4,350,000	3	9,191,500	3	23,555,000	100.00%	96.85%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)					3	4,040,000	3	859,000	3	1,985,000	3	373,000	3	820,000	3	4,037,000	100.00%	99.93%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)					72	7,860,000	18	1,270,000	18	1,905,000	18	1,905,000	18	2,540,000	72	7,620,000	100.00%	96.95%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)					1	349,257,550	1	171,255,000	1	76,370,000	1	35,300,000	1	65,975,000	1	348,900,000	100.00%	99.90%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (keas)					406	6,600,000	170	961,000	85	836,000	85	1,790,000	66	2,986,000	406	6,573,000	100.00%	99.59%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)					40	245,010,000	15	58,701,963	-	12,745,000	10	34,698,550	15	137,340,200	40	243,485,713	100.00%	99.38%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (orang)					61	1,024,500,000	58	171,000,000	60	250,500,000	60	251,500,000	60	323,000,000	60	996,000,000	97.54%	97.22%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun (Dokumen)					4	18,481,000	1	2,660,000	1	5,563,500	1	5,430,000	1	4,692,500	4	18,346,000	100.00%	99.27%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)					300	393,588,000	75	18,820,950	75	275,917,800	75	43,220,600	75	55,547,150	300	393,506,500	100.00%	99.98%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
									2,178,113,550											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	98.84%	98.43%							Dinas Perhubungan			
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							Dinas Perhubungan			
1	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)	95.00	4,400,316,500	95.00	1,106,132,000	95	371,883,287	95.00	3,622,000	95.00	188,582,948	95	13,027,000	95	166,357,842	95	371,589,790	100.00%	99.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dinas Perhubungan	
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)					4	32,100,000	2	-	-	8,999,000	-	-	2	23,100,000	4	32,099,000	100.00%	100.00%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)					2	10,973,500	2	-	2	5,120,000	2	-	2	5,835,000	2	10,955,000	100.00%	99.83%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)					9	328,809,787	9	3,622,000	9	174,463,948	9	13,027,000	9	137,422,842	9	328,535,790	100.00%	99.92%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
									371,883,287											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.92%							Dinas Perhubungan			
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							Dinas Perhubungan			
1	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	10.00	174,850,000	13.00	40,000,000	5	43,310,000	-	-	-	-	2	4,380,000	3	36,625,000	5	41,005,000	100.00%	94.68%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dinas Perhubungan	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (orang)					5	43,310,000	-	-	-	-	2	4,380,000	3	36,625,000	5	41,005,000	100.00%	94.68%									Dinas Perhubungan	Tidak Ada()	
									43,310,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	94.68%							Dinas Perhubungan			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWP Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase rata-rata Pencapaian pelayanan administrasi perkantoran (%)	90.00	3,772,725,404	90.00	933,842,850	90	905,359,300									90	888,451,519	100.00%	98.13%	100.00	#####	200.00%	48.30%	Dinas Kominfo			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi peranko dan benda pos yang tersedia (Lembar)					450	3,900,000	150	747,000	163	1,001,000	163	952,000	-	1,177,000	476	3,877,000	100.00%	99.41%					Dinas Kominfo	Realisasi kinerja melebihi dari target yang ditetapkan		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayarkan (Rekening)					36	103,440,000	9	19,692,301	9	15,830,951	9	23,294,233	9	30,224,253	36	89,041,738	100.00%	86.08%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (Orang)					2	27,818,000	2	4,896,500	2	6,304,000	2	6,299,000	2	10,236,500	2	27,736,000	100.00%	99.71%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (Unit)					41	18,500,000	12	1,500,000	13	2,010,000	6	5,600,000	10	9,150,000	41	18,260,000	100.00%	98.70%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)					35	25,268,800	35	2,924,000	35	9,234,500	35	4,984,000	35	8,003,000	35	25,145,500	100.00%	99.51%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)					3	14,200,000	3	2,675,400	3	3,719,100	3	2,049,000	3	5,606,300	3	14,049,800	100.00%	98.94%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (buah)					3	3,000,000	3	245,000	-	-	3	1,005,000	3	1,670,000	2	2,920,000	75.00%	97.33%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan (Exemplar)					60	6,120,000	15	1,530,000	15	1,530,000	15	1,530,000	15	1,530,000	60	6,120,000	100.00%	100.00%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan bakar genset dan mesin pemotong rumput yang tersedia (Liter)					1165	8,497,500	-	-	291	1,493,800	-	1,502,600	874	5,354,400	1,165	8,350,800	100.00%	98.27%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan yang disediakan (Kotak)					1659	32,175,000	214	6,283,000	243	6,583,000	26	1,389,000	1,176	17,728,000	1,659	31,983,000	100.00%	99.40%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan (Kali)					65	324,160,000	9	48,834,856	2	13,168,800	19	36,246,200	35	225,792,025	65	324,041,881	100.00%	99.96%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (Orang)					19	282,000,000	19	47,000,000	19	70,500,000	19	70,500,000	19	93,000,000	19	281,000,000	100.00%	99.65%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Monitoring dan evaluasi	Jumlah monitoring dan evaluasi triwulan yang disusun (Dokumen)					4	15,000,000	1	1,260,000	1	4,417,000	1	1,400,000	1	7,581,000	4	14,658,000	100.00%	97.72%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)					144	41,280,000	18	8,157,200	3	1,522,800	47	6,074,600	76	25,513,200	144	41,267,800	100.00%	99.97%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
									905,359,300											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99.92%	98.13%				Dinas Kominfo			
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Dinas Kominfo			
1	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase rata-rata Capaian Kinerja sarana dan Prasarana Aparatur (%)	95.00	3,334,403,977	95.00	163,000,000	95	262,697,800									95	256,086,250	100.00%	97.48%	100.00	#####	200.00%	12.57%	Dinas Kominfo			
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)					19	219,575,000	-	-	9	101,575,000	-	55,000,000	8	62,561,000	17	219,136,000	89.47%	99.80%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)					2	14,000,000	2	-	2	3,449,500	2	-	2	6,712,500	2	10,162,000	100.00%	72.59%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)					7	29,122,800	7	4,898,000	7	6,657,500	7	8,532,750	7	6,700,000	7	26,788,250	100.00%	91.98%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
									262,697,800											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	91.20%	97.48%				Dinas Kominfo			
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Dinas Kominfo			
1	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Rata-rata Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100.00	479,000,000	62.22	130,000,000	100	3,065,000									100	3,065,000	100.00%	100.00%	162.22	#####	162.22%	27.78%	Dinas Kominfo			
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan (Orang)					1	3,065,000	1	3,065,000	-	-	-	-	-	-	1	3,065,000	100.00%	100.00%					Dinas Kominfo	Tidak Ada()		
									3,065,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	100.00%				Dinas Kominfo			
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Dinas Kominfo			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia (Unit)	48.00	30,000,000			38	26,300,000	21	4,550,000	5	5,100,000	6	8,120,000	7	8,530,000	39	26,300,000	100.00%	100.00%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	40.00	25,000,000			39	18,361,000	39	3,289,000	39	4,546,000	39	5,645,000	39	4,881,000	39	18,361,000	100.00%	100.00%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	8.00	16,000,000			10	17,115,000	10	4,770,000	10	2,115,000	10	4,230,500	10	5,980,000	10	17,095,500	100.00%	99.89%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Intansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia (Jenis)	5.00	6,000,000			5	3,100,000	5	973,000	5	1,520,000	5	600,000	5	-	5	3,093,000	100.00%	99.77%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Kotak)	880.00	27,000,000			1680	26,300,000	420	4,875,000	420	2,688,000	420	4,945,000	420	13,780,000	1,680	26,288,000	100.00%	99.95%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Eksampler)	60.00	6,240,000			60	6,240,000	15	820,000	15	1,530,000	15	2,210,000	15	1,640,000	60	6,200,000	100.00%	99.36%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan (kali)	70.00	280,000,000			49	181,810,000	13	30,229,200	-	20,797,750	24	16,645,100	20	114,074,200	57	181,746,250	100.00%	99.96%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah upah jasa yang dibayarkan (orang)	11.00	162,000,000			12	180,000,000	12	27,000,000	12	42,000,000	12	46,500,000	14	64,000,000	13	179,500,000	100.00%	99.72%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disusun (Dokumen)	4.00	46,000,000			1	16,476,000	-	-	-	-	-	-	1	16,476,000	1	16,476,000	100.00%	100.00%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja yang dilakukan (kali)	300.00	45,000,000			149	52,040,000	77	12,036,200	42	6,145,650	75	12,064,400	41	21,707,600	235	51,953,850	100.00%	99.83%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		penyebarluasan informasi penyelenggaraan kegiatan SKPD	Jumlah kegiatan pameran yang dilakukan (Hari)	10.00	60,000,000			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
								663,452,000												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99.90%	98.13%			Dinas Perustakaan & Kearsipan			
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Dinas Perustakaan & Kearsipan			
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)	100.00	4,035,036,080	100.00	770,000,000	100	1,046,000,000										113,400,540	0.00%	10.84%	100.00	#####	100.00%	21.89%	Dinas Perustakaan & Kearsipan			
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	50.00	220,000,000			5	31,600,000	-	-	3	10,700,000	-	-	2	20,900,000	5	31,600,000	100.00%	100.00%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (Unit)	2.00	76,000,000			2	30,000,000	2	-	2	18,043,540	2	-	2	11,947,000	2	29,990,540	100.00%	99.97%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Unit)	4.00	50,000,000			5	55,200,000	5	3,755,000	5	10,705,000	5	12,160,000	5	25,190,000	5	51,810,000	100.00%	93.86%					Dinas Perustakaan & Kearsipan	Tidak Ada()		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (jenis) (Jenis)			3	45,495,800	3	2,427,500	3	7,126,750	3	10,296,000	3	14,587,700	3	34,437,950	100.00%	75.69%							Dinas Pertanian	Untuk kegiatan ini ada 6 kecamatan dibawakan binaan READHSL Yaitu Kec. Baru, Wotu, Mangkutana, Tomoni, Kalana dan Angkona sehingga digunakan untuk biaya cetak dan penggandaan menggunakan dana kasiatan		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (Jenis) (Jenis)			15	11,468,000	3	2,820,000	4	2,855,000	4	2,284,000	4	3,215,000	15	11,174,000	100.00%	97.44%							Dinas Pertanian			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Eksemplar) (Eksemplar)			216	22,200,000	75	1,260,000	25	4,860,000	25	4,860,000	91	10,980,000	216	21,960,000	100.00%	98.92%							Dinas Pertanian			
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis) (Jenis)			2	2,060,400	1	-	-	-	1	554,400	-	-	2	554,400	100.00%	26.91%							Dinas Pertanian	Kegiatan ini sifatnya disediakan apabila terjadi pemadaman lampu secara bergilir dalam waktu hari kerja		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan (kotak) (kotak)			536	12,760,000	75	2,700,000	25	1,420,000	210	970,000	142	5,920,000	452	11,010,000	84.33%	86.29%							Dinas Pertanian	Untuk kegiatan penyediaan makan dan minum realisasi hanya 86,29% disebabkan karena pada akhir tahun berkurang tamu yang datang		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan luar daerah yang dilaksanakan (kali) (kali)			104	449,710,000	23	147,191,061	10	28,979,000	25	22,560,400	30	249,410,054	88	448,140,515	84.62%	99.65%							Dinas Pertanian			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWPD Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (orang) (Orang)			36	312,000,000	21	44,000,000	21	66,000,000	21	66,000,000	34	107,000,000	34	283,000,000	94.44%	90.71%					Dinas Pertanian	Ada 4 orang Tenaga Ujrah Jasa Penyuluh Pertanian yang Belum melakukan akan Tugas diwilayah kerja yang sudah dibagikan sehingga tidak di bayarkan		
		Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun (Dokumen) (Dokumen)			4	42,260,000	1	9,857,450	1	7,366,150	1	6,645,650	1	17,842,800	4	41,712,050	100.00%	98.70%					Dinas Pertanian			
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali) (Kali)			857	180,810,000	87	36,290,700	369	63,202,500	116	31,181,950	277	49,731,350	849	180,406,500	99.07%	99.78%					Dinas Pertanian			
							1,353,816,450											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	92.44%	93.33%				Dinas Pertanian			
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Dinas Pertanian		
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)	95.00	6,739,208,803	0.00	1,363,200,000	95	1,863,200,000								98.88	1,014,102,134	104.08%	54.43%	98.88	#####	104.08%	35.28%	Dinas Pertanian		
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun (Paket) (Paket)			10	64,236,000	-	-	2	63,200,000	8	-	-	-	10	63,200,000	100.00%	98.39%					Dinas Pertanian			
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit) (Unit)			15	191,000,000	-	-	7	34,608,000	-	60,801,084	7	59,100,000	14	154,509,084	93.33%	80.89%					Dinas Pertanian	kegiatan Untuk Pemasangan WiFi ini disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan dan ada satu BPP yang tidak terpasang untuk WiFi yaitu BPP ke: Fowuti, Terkendala Tekhnis		
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit) (Unit)			14	81,700,000	-	-	-	-	-	-	14	76,649,000	14	76,649,000	100.00%	93.82%					Dinas Pertanian			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) (Unit)			3	70,000,000	-	-	2	29,950,000	1	20,000,000	-	10,000,000	3	59,950,000	100.00%	85.64%					Dinas Pertanian	Sebagian anggaran Tidak dicairkan Melihat Bangunan Yang dipelihara masih Bagus		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit) (unit)			185	368,470,000			15	-	47	119,693,000		60	54,568,600		185	129,056,950		185	303,318,550	100.00%	82.32%					Dinas Pertanian	kegiatan ini sebagian motor sudah tidak digunakan sehingga penggunaan suku cadang tidak direalisasikan dan sebagian motor yang dibayarkan Pajak Kendaraan Rp.96.000	
		Pembangunan taman, lapangan/fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan/fasilitas parkir yang dibangun (paket) (Paket)			2	364,550,000			1	-	1	24,030,000		-	-		-	332,445,500		2	356,475,500	100.00%	97.79%					Dinas Pertanian		
							1,139,956,000																							Dinas Pertanian	
																														Dinas Pertanian	
																														Dinas Pertanian	
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase capaian peningkatan kapasitas aparatur (%)	95.00	535,561,105	0.00	100,000,000	95	100,000,000												100	30,226,000	105.26%	30.23%	100.00	#####	105.26%	24.32%	Dinas Pertanian		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar, perundang-undangan (orang) (Orang)			6	46,390,000			4	14,566,000	-	-	2	8,400,000	-	7,260,000		6	30,226,000	100.00%	65.16%							Dinas Pertanian	kegiatan ini difasilitasi oleh pusat dan propinsi	
							46,390,000																							Dinas Pertanian	
																														Dinas Pertanian	
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	98.00	164,587,600	0.00	45,000,000	98	45,000,000												100	26,618,000	102.04%	59.15%	100.00	#####	102.04%	43.51%	Dinas Pertanian		
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun yang disusun (dokumen) (Dokumen)			3	5,988,000			-	-	1	-	1	2,994,000	-	2,919,000		3	5,913,000	100.00%	98.75%							Dinas Pertanian		
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dokumen) (Dokumen)			1	20,875,000			-	8,345,000	1	3,640,000	-	-	-	8,720,000		1	20,705,000	100.00%	99.19%							Dinas Pertanian		
							26,863,000																							Dinas Pertanian	
																														Dinas Pertanian	
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	95.00	69,699,800	0.00	25,000,000	95	25,000,000												100	29,059,800	105.26%	116.24%	100.00	#####	105.26%	77.56%	Dinas Pertanian		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun (Dokumen) (Dokumen)			6	29,289,800			1	2,643,800	4	660,000	1	3,766,000	-	21,990,000		6	29,059,800	100.00%	99.21%							Dinas Pertanian		
							29,289,800																							Dinas Pertanian	

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/G tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11			12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															5,100,427,758	0.00%	0.00%	0.00	#####	0.00%	0.00%			Sekretari at Daerah				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar (lembar)			5000	21,540,000	1,314	4,908,700	662	3,720,000	1,001	3,958,900	895	5,608,500	3,872	18,196,100	77.44%	84.48%							Sekretari at Daerah				
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan (rek)			552	1,065,300,000	103	190,412,823	78	244,550,103	146	271,690,562	114	188,792,270	441	895,445,758	79.89%	84.06%							Sekretari at Daerah				
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)			25	380,603,000	22	54,040,000	22	76,785,200	24	84,228,150	24	120,728,080	24	335,781,430	96.00%	88.22%							Sekretari at Daerah				
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan (jenis)			37	60,000,000	37	9,884,600	37	12,085,700	37	24,010,500	37	14,018,000	37	59,998,800	100.00%	100.00%							Sekretari at Daerah				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lembar penggandaan (lembar)			80500	79,750,000	13,524	9,856,100	2,304	8,160,000	26,365	19,569,600	36,947	34,844,200	79,140	72,429,900	98.31%	90.82%							Sekretari at Daerah				
			Jumlah jenis barang cetakan (jenis)			9		4		2		2		1	9		100.00%									Sekretari at Daerah				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu (orang)			12830	683,265,000	3,531	114,311,000	3,054	129,918,081	4,137	180,106,400	2,048	256,903,412	12,770	681,238,893	99.53%	99.70%							Sekretari at Daerah				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah yang dilaksanakan (kali)			206	1,050,318,000	95	251,853,926	29	79,240,856	98	247,580,057	35	455,293,694	257	1,033,968,533	124.76%	98.44%							Sekretari at Daerah				
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis yang terbayarkan (orang)			77	1,125,000,000	68	167,000,000	69	252,500,000	66	243,500,000	67	321,500,000	69	984,500,000	89.61%	87.51%							Sekretari at Daerah				
		Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Jumlah Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (jenis)			6	905,643,300	2	130,220,000	2	159,839,674	1	238,260,000	1	194,050,000	6	722,369,674	100.00%	79.76%							Sekretari at Daerah				
		Monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan yang disusun (laporan)			4	10,020,000	1	-	1	2,885,000	1	2,844,000	1	3,950,000	4	9,679,000	100.00%	96.60%							Sekretari at Daerah				
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah yang dilaksanakan (kali)			888	287,244,000	194	61,411,850	226	85,391,370	347	100,910,500	114	39,105,950	881	286,819,670	99.21%	99.85%							Sekretari at Daerah				
							5,668,683,300											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	74.08%	89.98%						Sekretari at Daerah				
																		Predikat Kinerja	Sedang	Tinggi						Sekretari at Daerah				
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																53,660,000	0.00%	0.00%	0.00	#####	0.00%	0.00%			Sekretari at Daerah			
		Pengadaan Pakain Dinas KDH/WKDH	Jumlah Pengadaan Pakain Dinas KDH/WKDH (pasang)			8	23,150,000	-	-	-	-	-	-	8	14,000,000	8	14,000,000	100.00%	60.48%							Sekretari at Daerah				
		Dukungan Layanan Kepegawaian Internal SKPD	Jumlah Dokumen kepegawaian yang terealisasi tepat waktu (dokumen)			10	52,860,000	3	3,200,000	2	29,420,000	3	6,717,000	2	323,000	10	39,660,000	100.00%	75.03%							Sekretari at Daerah				
							76,010,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	70.60%						Sekretari at Daerah				
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang						Sekretari at Daerah				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																8,990,000	0.00%	0.00%	0.00	#####	0.00%	0.00%			Sekretari at Daerah			
		Bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan (orang)			3	9,120,000	3	8,990,000	-	-	-	-	-	-	3	8,990,000	100.00%	98.57%							Sekretari at Daerah				
							9,120,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	98.57%						Sekretari at Daerah				
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						Sekretari at Daerah				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																29,222,000	0.00%	0.00%	0.00	#####	0.00%	0.00%			Sekretari at Daerah			
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)			3	15,610,000	1	-	-	5,490,000	1	996,000	1	7,695,000	3	14,181,000	100.00%	90.85%							Sekretari at Daerah				

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
		Dokumentasi dan Publikasi Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Informasi Kedinasan KDH/WKDH yang didokumentasikan/publikasikan (kegiatan)			300	330,245,000			108	19,288,430	65	37,265,430	83	82,809,110	98	170,212,425	354	309,575,395	118.00%	93.74%							Sekretari at Daerah	
							875,331,700													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	95.57%					Sekretari at Daerah		
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Sekretari at Daerah		
		Program Fasilitas Keagamaan dan Masyarakat																		8,118,472,900	0.00%	0.00%	0.00	#####	0.00%	0.00%	Sekretari at Daerah		
		Pendampingan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jumlah jamaah haji yang difasilitasi (orang)			0	-														0.00%	0.00%					Sekretari at Daerah		
		Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah Kegiatan hari-hari besar keagamaan yang difasilitasi (kegiatan)			4	122,786,000	4	-	4	-	4,200,000	-	3,200,000	-	30,109,950	4	37,509,950	100.00%	30.55%							Sekretari at Daerah		
		Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi (kegiatan)			0	-														0.00%	0.00%					Sekretari at Daerah		
		Apresiasi Wisata Religi	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Wisata Religi (orang)			0	14,919,000														0.00%	100.00%					Sekretari at Daerah		
		Fasilitas Pelaksanaan MTQ	Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ (orang)			58	1,721,935,000	58	654,654,950	-	112,246,500	-	415,233,000	-	343,416,400	58	1,525,550,850	100.00%	88.60%									Sekretari at Daerah	
		Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang difasilitasi Pembinaannya (sekolah)			4	60,367,100														4	34,798,250	100.00%	57.64%				Sekretari at Daerah	
		Dukungan Pembiayaan Operasional Petugas	Jumlah Petugas Keagamaan yang diberikan Insentif (orang)			1514	6,547,813,500	1514	-	1514	1,634,648,150	1514	3,260,298,150	1514	1,635,748,550	1514	6,530,694,850	100.00%	99.74%									Sekretari at Daerah	
							8,467,820,600														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	96.17%					Sekretari at Daerah	
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Sekretari at Daerah	
		Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat																			29,998,750	0.00%	0.00%	0.00	#####	0.00%	0.00%	Sekretari at Daerah	
		Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Monev Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial yang disusun (laporan)			4	35,900,000	1	18,921,200	1	1,596,800	1	8,398,150	1	1,082,600	4	29,998,750	100.00%	83.56%									Sekretari at Daerah	
							35,900,000														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	83.56%					Sekretari at Daerah	
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi					Sekretari at Daerah	
		Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																			239,095,600	0.00%	0.00%	0.00	#####	0.00%	0.00%	Sekretari at Daerah	
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang disusun (laporan)			2	85,980,000	2	32,584,600	-	10,065,000	-	30,000,000	-	9,389,800	2	82,039,400	100.00%	95.42%									Sekretari at Daerah	
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan EKPPD yang disusun (laporan)			3	36,440,000															3	33,508,600	100.00%	91.96%				Sekretari at Daerah
		Pendampingan Kasus Pengaduan Pemerintah Daerah	Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti (Persen)			100	65,896,500	100	21,409,500	100	3,960,000	100	16,542,400	100	10,833,000	100	52,744,900	100.00%	80.04%									Sekretari at Daerah	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADM Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Monev yang dibuat (laporan)			4	21,310,500	1	8,446,500	1	-	1	4,950,700	1	2,499,500	4	15,896,700	100.00%	74.60%									Sekretari at Daerah	
		Peningkatan Kerjasama Multi Pihak	Jumlah MOU yang difasilitasi (MOU)			6	56,436,000	8	9,227,500	4	3,490,000	6	11,395,000	10	30,793,500	28	54,906,000	466.67%	97.29%									Sekretari at Daerah	
							266,063,000														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	89.86%					Sekretari at Daerah	
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi					Sekretari at Daerah	
		Program Penegasan Batas Daerah																			217,890,938	0.00%	0.00%	0.00	#####	0.00%	0.00%	Sekretari at Daerah	
		Penegasan Batas Wilayah dalam Kab / Kec / Desa	Jumlah Dokumen Penegasan Batas Wilayah Kab/Kec/Desa yang disusun (dokumen)			1	238,133,000															1	217,890,938	100.00%	91.50%				Sekretari at Daerah
							238,133,000														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	91.50%					Sekretari at Daerah	

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWP Penawar Unggulan	Keterangan								
										I		II		III		IV					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																														
		Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan (kegiatan)					1	123,095,000	-	-	-	3,624,000	1	104,054,000	-	13,330,000	1	121,008,000	100.00%	98.30%											
									123,095,000																							
		Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN																														
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan yang disusun (dokumen)					1	44,070,000	-	-	-	5,769,000	1	-	-	34,890,000	1	40,659,000	100.00%	92.26%											
		Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab, ABK yang disusun (dokumen)					1	225,942,000	-	29,108,000	-	13,374,500	1	151,185,000	-	31,209,000	1	224,876,500	100.00%	99.53%											
									270,012,000																							
		Program Penguatan Akuntabilitas																														
		Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP Pemerintah Daerah yang disusun (dokumen)					1	94,633,000	1	31,749,360	-	13,254,000	-	6,535,000	-	41,616,000	1	93,154,360	100.00%	98.44%											
									94,633,000																							
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH																														
		Rehabilitasi/Sedang Berat Gedung dan Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi sedang/berat (paket)					4	394,500,000	-	-	3	18,678,000	-	-	-	-	3	18,678,000	75.00%	4.73%											
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)					63	826,345,000	63	90,683,480	36	141,139,000	36	42,456,050	63	408,820,993.50	63	683,099,523.50	100.00%	82.67%											
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara (unit)					4	191,000,000	4	21,063,000	3	17,860,000	3	31,700,000	3	86,375,000	4	156,998,000	100.00%	82.20%											
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Kantor	Jumlah Gedung dan Kantor yang dipelihara (unit)					2	117,334,523	-	-	1	3,809,000	2	22,330,000	-	69,381,523.90	2	95,520,523.90	100.00%	81.41%											
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung dan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung dan Kantor yang dipelihara (Jenis)					1	50,000,000	1	5,500,000	1	17,361,000	1	11,150,000	1	15,750,000	1	49,761,000	100.00%	99.52%											
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas / Mess	Jumlah Rumah Dinas/Mess yang dipelihara (unit)					1	35,000,000	-	-	1	3,004,500	1	2,101,520	-	2,112,000	1	7,218,020	100.00%	20.62%											
									1,614,179,523																							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH																														
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung dan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung dan Kantor yang diadakan (jenis)					5	155,700,000	-	-	-	-	2	61,674,800	3	78,762,400	5	140,437,200	100.00%	90.20%											
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung dan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Gedung dan Kantor yang disediakan (Jenis)					9	31,495,000	9	4,366,000	9	3,155,000	9	6,313,000	9	13,364,500	9	27,198,500	100.00%	86.36%											

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Program Penataan Wilayah Kelurahan															10,610,000	0.00%	0.00%	0.00	#####	0.00%	0.00%	Sekretari at Daerah					
		Facilitasi Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi (Kelurahan)			3	10,610,000	3	10,610,000								3	10,610,000	100.00%	100.00%					Sekretari at Daerah				
							10,610,000																		Sekretari at Daerah				
																									Sekretari at Daerah				
		Program Perencanaan dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH																77,268,533	0.00%	0.00%	0.00	#####	0.00%	0.00%	Sekretari at Daerah				
		Penyusunan Laporan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah Laporan Aset yang Terdata (laporan)			6	65,669,000	1	5,445,000	2	3,760,000	1	4,305,500	2	13,071,800	6	26,582,300	100.00%	40.48%						Sekretari at Daerah				
		Operasional Penatausahaan Perengkapan dan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Persentase Dukungan Operasional dan Penatausahaan Aset SETDA/KDH/WKDH (persen)			85	56,420,000	15	12,892,800	25	20,091,300	20	12,608,133	25	5,094,000	85	50,686,233	100.00%	89.84%						Sekretari at Daerah				
							122,089,000																						
							21,960,783,623																						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																3,093,578,200	HDIV/01	HDIV/01	0.00	#####	HDIV/01	HDIV/01	Sekretari at DPRD				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dihasilkan (Lembar)			120	10,190,000	30	3,750,000	30	2,105,000	30	1,644,000	30	2,672,000	120	10,171,000	100.00%	99.81%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa Komunikasi, SD, dan listrik yang terbayarkan (Rekening)			36	500,112,000	9	115,609,331	9	116,751,429	9	85,184,564	9	89,232,192	36	406,777,516	100.00%	81.34%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di asuransikan (unit)			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang disediakan (Jenis)			2	295,270,000	2	51,567,000	2	71,775,000	2	103,625,000	2	66,300,000	2	293,267,000	100.00%	99.32%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
			Jumlah Tenaga Kebersihan yang Terbayarkan (Orang)			21		21		21		21		20	21			98.81%							Sekretari at DPRD				
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihar (Unit)			146	110,250,000	36	18,760,000	29	22,465,000	10	24,470,000	59	44,480,000	134	110,175,000	91.78%	99.93%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan (Jenis)			33	81,133,000	33	21,431,500	33	16,957,500	33	13,357,000	33	29,387,000	33	81,133,000	100.00%	100.00%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penunjang administrasi Kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (Jenis)			2	66,300,100	2	19,608,750	2	8,971,250	2	7,420,000	2	30,300,000	2	66,300,000	100.00%	100.00%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)			9	40,000,000	9	10,000,000	9	5,160,000	9	4,805,000	9	19,694,000	9	39,659,000	100.00%	99.15%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan yang disediakan (ekemplar)			47220	201,900,000	11,805	33,650,000	11,805	50,650,000	11,805	58,800,000	11,805	58,800,000	47,220	201,900,000	100.00%	100.00%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik Rumah Jabatan yang disediakan (Jenis)			2	646,050,500	2	71,200,000	2	147,250,000	2	189,290,000	2	211,035,600	2	618,775,600	100.00%	95.78%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
			Jumlah BBM yang disediakan (Liter) (Liter)			8419		1,465		569		1,475		2,910	6,419			76.24%							Sekretari at DPRD				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum tamu, rapat yang disediakan (Kecak)			2125	258,250,000	1,000	49,146,000	1,000	61,225,000	125	78,625,000	-	68,803,000	2,125	257,799,000	100.00%	99.83%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
			Jumlah Prasmanan makan minum tamu, rapat yang disediakan (Porsi)			5950		893		1,307		1,450		2,300	5,950			100.00%							Sekretari at DPRD				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (Kali) (Kali)			69	426,850,000	23	98,852,500	3	12,082,934	4	9,784,000	39	305,440,700	69	426,160,134	100.00%	99.84%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (Org)			37	430,000,000	31	68,000,000	30	101,000,000	33	101,000,000	37	142,000,000	37	412,000,000	100.00%	95.81%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Penyediaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disiapkan (Kali)			2	8,250,000	2	2,634,000	2	984,000	2	3,120,000	2	1,400,000	2	8,138,000	100.00%	98.64%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang tersusun (Dok) (Dokumen)			4	15,231,000	1	2,144,500	1	2,853,200	1	4,411,400	1	5,810,400	4	15,219,500	100.00%	99.92%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)			85	59,462,250	5	1,282,400	7	4,130,800	21	7,533,850	15	8,198,800	48	21,145,850	56.47%	35.56%						Sekretari at DPRD	Tidak Ada()			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan general check-up (Org)	30	180,000,000	-	-	-	-	-	-	20	124,957,600	20	124,957,600	66.67%	69.42%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
					3,329,248,850																		Sekretari at DPRD				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													2,035,915,283	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			Sekretari at DPRD			
		Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan Pimpinan DPRD, wakil Ketua DPRD yang terbangun (unit/paket) (Unit/Paket)	3	1,480,990,000	1	58,125,953	2	491,325,302	-	330,644,722	-	591,303,075	3	1,471,399,052	100.00%	99.35%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah prasarana gedung kantor yang disediakan (Unit/Paket)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah prasarana rumah jabatan yang disediakan (Unit/Paket)	3	96,000,000	-	-	-	-	-	-	3	85,025,000	3	85,025,000	100.00%	88.57%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Buah/unit/paket)	11	47,000,000	-	-	-	-	-	-	11	46,024,000	11	46,024,000	100.00%	97.92%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan,gedung,taman dan halaman rujab yang dipelihara (Unit)	3	130,000,000	-	-	-	-	2	34,759,000	1	94,556,500	3	129,315,500	100.00%	99.47%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung,taman,halaman gedung jumlah pemeliharaan gedung,taman,halaman gedung kantor yang dipelihara yang dipelihara (Unit)	2	140,557,450	1	15,418,000	-	37,133,000	-	17,225,000	1	69,863,500	2	139,639,500	100.00%	99.35%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan berfungsi baik (Unit)	11	167,000,000	5	35,234,595	2	9,986,911	-	52,179,773	4	67,110,952	11	164,512,231	100.00%	98.51%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
					2,061,547,450																		Sekretari at DPRD				
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur													244,492,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			Sekretari at DPRD			
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD (psg/paket) (Psg/Paket)	30	246,000,000	-	-	-	-	30	198,792,000	-	45,700,000	30	244,492,000	100.00%	99.39%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan (Psg)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
					246,000,000																		Sekretari at DPRD				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													238,681,174	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			Sekretari at DPRD			
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan,bimtek,dan diklat (orang)	19	268,303,200	6	66,920,000	5	-	-	-	8	171,761,174	19	238,681,174	100.00%	88.96%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
					268,303,200																		Sekretari at DPRD				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													8,530,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			Sekretari at DPRD			
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Dokumen)	2	5,000,000	-	-	1	867,000	-	2,138,000	1	1,295,000	2	4,300,000	100.00%	86.00%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dok) (Dokumen)	1	4,230,000	1	4,230,000	-	-	-	-	-	-	1	4,230,000	100.00%	100.00%					Sekretari at DPRD	Tidak Ada()				
					9,230,000																		Sekretari at DPRD				
		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD													6,725,100	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			Sekretari at DPRD			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															3,610,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Burau					
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun (Dokumen) (Dokumen)	Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun (Dokumen) (Dokumen)			1	4,000,000	-	-	1	-	-	3,610,000	-	-	1	3,610,000	100.00%	90.25%					Kecamatan Burau	Tidak Ada()				
							4,000,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	90.25%					Kecamatan Burau					
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Burau					
		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD															5,496,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Burau					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)			6	5,496,300	2	-	1	-	2	-	1	5,496,000	6	5,496,000	100.00%	99.99%					Kecamatan Burau	lain-lain				
							5,496,300										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.99%					Kecamatan Burau					
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Burau					
			Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang																					Kecamatan Burau					
		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa															57,703,400	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Burau					
		Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Mucyawarah Perencanaan Pembangunan	Rasio Persentase Keterwakilan Perempuan dan Laki-laki dalam pelaksanaan Mucranbang Kecamatan (Persentase)			0.4	16,699,700	0	11,306,700	-	-	5,195,000	-	-	-	0	16,501,700	100.00%	98.81%					Kecamatan Burau	Tidak Ada()				
		Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (Persentase)	Persentase Desa yang difasilitasi Rancangan APBDes (Persentase)			100	2,350,000	50	-	-	-	-	1,080,000	50	-	100	1,080,000	100.00%	45.96%					Kecamatan Burau	Tidak Ada()				
		Fasilitasi Peran Serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa	Persentase PKK Desa yang dibina (Persentase)			100	46,521,700	25	4,430,000	25	-	25	9,297,650	25	26,394,050	100	40,121,700	100.00%	86.24%					Kecamatan Burau	lain-lain				
							65,571,400										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	88.00%					Kecamatan Burau					
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Burau					
		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan															41,246,600	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Burau					
		Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Persentase)			100	25,550,000	30	8,457,000	-	-	30	8,428,600	40	8,307,000	100	25,192,600	100.00%	98.60%					Kecamatan Burau	Tidak Ada()				
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun (Dokumen) (Dokumen)			4	16,084,900	1	-	1	-	1	5,651,000	1	10,403,000	4	16,054,000	100.00%	99.81%					Kecamatan Burau	Tidak Ada()				
							41,634,900										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.07%					Kecamatan Burau					
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Burau					
		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban															12,276,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Burau					
		Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti (Persentase)			100	12,276,000	25	2,949,000	25	4,280,200	25	2,890,100	25	2,156,700	100	12,276,000	100.00%	100.00%					Kecamatan Burau	Tidak Ada()				
							12,276,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	100.00%					Kecamatan Burau					
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Burau					
		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum															5,655,316	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Burau					
		Pelayanan Administrasi Perizinan	Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan (lembar) (Lembar)			140	7,956,088	11	-	3	2,080,000	16	1,040,000	54	2,535,316	84	5,655,316	60.00%	71.08%					Kecamatan Burau	lain-lain				
							7,956,088										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	60.00%	71.08%					Kecamatan Burau					
																	Predikat Kinerja	Rendah	Sedang					Kecamatan Burau					
							730,904,688										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			99.40%	97.88%			Kecamatan Burau					
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Kecamatan Burau					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					556,865,000										503,508,300			90.42%	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Wotu				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Di Agendakan (Lembar)			336	2,000,000	100	605,000	80	450,000	-	-	156	917,000	336	1,972,000	100.00%	98.60%					Kecamatan Wotu					

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis terbayarkan (Orang) (Orang)	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (Orang) (Orang)			4	54,000,000	4	9,000,000	4	13,500,000	4	13,500,000	4	18,000,000	4	54,000,000	100.00%	100.00%					Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali) (Kali)			662	99,674,000	225	27,962,250	92	8,096,950	215	37,497,600	130	26,082,800	662	99,639,600	100.00%	99.97%					Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
							456,129,500																	Kecamatan Mangkutana					
																								Kecamatan Mangkutana					
																								Kecamatan Mangkutana					
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)	100.00	774,966,672	100.00	156,950,000	100	166,950,000							100	31,308,930	100.00%	18.75%	200.00	#####	200.00%	24.29%	Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan (Unit) (Unit)			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit) (Unit)			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara (Unit) (Unit)			1	2,542,000	-	-	1	2,542,000	-	-	-	-	1	2,542,000	100.00%	100.00%					Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) (Unit)			1	4,434,000	-	-	1	4,434,000	-	-	-	-	1	4,434,000	100.00%	100.00%					Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara (Unit) (Unit)			3	24,140,000	3	980,000	3	6,960,000	3	7,360,000	3	8,282,930	3	23,582,930	100.00%	97.69%					Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dipelihara (Unit) (Unit)			1	750,000	-	-	1	450,000	-	-	-	300,000	1	750,000	100.00%	100.00%					Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
							31,866,000																	Kecamatan Mangkutana					
																								Kecamatan Mangkutana					
																								Kecamatan Mangkutana					
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang tingkatan kapasitasnya (Orang)	2.00	29,000,000	2.00	4,000,000	2	4,000,000							2	-	100.00%	0.00%	4.00	#####	200.00%	13.79%	Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) (Orang)			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
																								Kecamatan Mangkutana					
																								Kecamatan Mangkutana					
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu (Nilai)	100.00	9,204,000	100.00	2,325,000	100	2,325,000							100	4,249,700	100.00%	182.78%	200.00	#####	200.00%	71.43%	Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kinerja instansi pemerintah yang disusun (Dokumen) (Dokumen)			1	4,253,500	1	4,249,700	-	-	-	-	-	-	1	4,249,700	100.00%	99.91%					Kecamatan Mangkutana	Tidak Ada()				
							4,253,500																	Kecamatan Mangkutana					
																								Kecamatan Mangkutana					

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWP Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (%) (%)	95.00	102,000,000	95.00	17,500,000	95	17,500,000							95		100.00%	0.00%	190.00	#####	200.00%	17.16%	Kecamatan Tomtim			
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, shop seminar perundang-undangan (orang)					0	-									0.00%	0.00%					Kecamatan Tomtim	Tidak Ada()		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%			Kecamatan Tomtim			
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Kecamatan Tomtim			
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu (%)	95.00	28,496,000	90.00	9,590,000	95	9,590,000							90	5,370,000	94.74%	56.00%	180.00	#####	189.47%	52.50%	Kecamatan Tomtim			
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang disusun (dokumen)					1	5,430,000			1	3,070,000		1	-	1	-	1	2,300,000					Kecamatan Tomtim	Tidak Ada()	
									5,430,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	98.90%			Kecamatan Tomtim			
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Kecamatan Tomtim			
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (%)	95.00	41,428,200	95.00	10,647,000	95	10,647,000							95	13,682,500	100.00%	128.51%	190.00	#####	200.00%	58.73%	Kecamatan Tomtim			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)					6	13,690,000			-	-		-	6	11,392,500		100.00%	99.95%					Kecamatan Tomtim	Tidak Ada()	
									13,690,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.95%			Kecamatan Tomtim			
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Kecamatan Tomtim			
			Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang																						Kecamatan Tomtim		
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa	persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa (%)	95.00	280,126,500	95.00	70,925,000	95	70,925,000							95	60,525,000	100.00%	85.34%	190.00	#####	200.00%	46.93%	Kecamatan Tomtim			
		Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (rasio)	Rasio persentase keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan musyawarah kecamatan (rasio)					0.4	13,680,000			0	13,680,000		-	-	-	-	-	0	13,680,000					Kecamatan Tomtim	Tidak Ada()
		Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Cakupan desa yang terfasilitasi terkait rancangan APBDesnya (desa)					8	9,472,500			2	-		2	1,043,750		2	3,575,250							Kecamatan Tomtim	Tidak Ada()
		Fasilitasi Peran Serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa	Persentase PKK desa yang dibina (%)					95	37,900,000			25	5,550,000		10	1,200,000		35	9,300,000							Kecamatan Tomtim	Tidak Ada()
									61,052,500									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.14%			Kecamatan Tomtim			
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Kecamatan Tomtim			
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	persentase capaian kinerja pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan (%)	95.00	244,107,500	95.00	58,235,000	95	59,585,000							95	26,220,000	100.00%	44.00%	190.00	#####	200.00%	34.60%	Kecamatan Tomtim			
		Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (%)					95	16,093,500			25	6,600,000		-	-	55	900,000		15	8,040,000					Kecamatan Tomtim	Tidak Ada()
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun (dokumen) (dokumen)					4	10,810,000			1	-		-	2	3,330,000		1	7,350,000						Kecamatan Tomtim	Tidak Ada()
									26,903,500									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	97.46%			Kecamatan Tomtim			
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Kecamatan Tomtim			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWP Penanggungjawab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban (%)	95.00	60,014,500	95.00	9,497,250	95	9,497,250									95	10,000,000	100.00%	105.29%	100.00	#####	200.00%	32.49%	Kecamatan Tomtim		
		Fasilitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah kasus dan pengaduan masyarakat yang terfasilitas (%)				95	10,000,000	50	-	-	-	35	1,125,000	10	8,875,000	95	10,000,000	100.00%	100.00%					Kecamatan Tomtim	Tidak Ada()		
								10,000,000																	Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			
																									Kecamatan Tomtim			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWP Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)			10	3,616,000	2	1,060,000	2	844,000	3	760,000	3	925,000	10	3,589,000	100.00%	99.25%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Eksemplar)			60	7,920,000	15	1,980,000	15	1,980,000	15	1,980,000	15	1,980,000	60	7,920,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)			2	1,752,000	2	397,000	2	597,000	2	78,500	2	635,500	2	1,708,000	100.00%	97.49%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Kcal)			2821	74,985,000	795	15,999,000	528	11,798,000	365	10,133,000	893	36,952,000	2,581	74,882,000	91.49%	99.86%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan (Kali)			6	27,420,000	2	10,630,000	-	-	1	2,231,000	3	14,531,550	6	27,392,550	100.00%	99.90%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (Orang)			4	54,000,000	4	9,000,000	4	13,500,000	4	13,500,000	4	18,000,000	4	54,000,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)			460	74,965,000	118	28,718,900	117	11,168,500	145	12,364,750	53	22,711,900	433	74,964,050	94.13%	100.00%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
							360,377,100											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	96.53%	99.40%						Kecamatan Angkona			
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						Kecamatan Angkona			
Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi (%)		100.00	1,434,709,927	0.00	308,416,020	100	312,009,172								59,961,280	0.00%	19.22%	0.00	#####	0.00%	25.68%			Kecamatan Angkona			
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan (Unit)			3	2,450,000	3	2,450,000	-	-	-	-	-	-	3	2,450,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Meter)			72	18,000,000	-	-	72	18,000,000	-	-	-	-	72	18,000,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara (Unit)			1	9,800,000	1	9,800,000	-	-	-	-	-	-	1	9,800,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)			1	9,989,880	-	-	1	9,988,500	-	-	-	-	1	9,988,500	100.00%	99.99%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Unit)			6	20,250,000	6	5,560,000	6	2,682,500	6	5,085,350	6	5,044,930	6	18,372,780	100.00%	90.73%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dipelihara (Unit)			4	1,350,000	1	450,000	2	450,000	-	-	1	450,000	4	1,350,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
							61,839,880											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	96.96%						Kecamatan Angkona			
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						Kecamatan Angkona			
Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang di tingkatkan Kapasitasnya (%)		95.00	50,976,800	0.00	15,000,000	95	15,000,000								-	0.00%	0.00%	0.00	#####	0.00%	29.43%			Kecamatan Angkona			
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (Orang)			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
							-											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						Kecamatan Angkona			
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						Kecamatan Angkona			
Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang disusun Tepat Waktu (%)		100.00	13,252,320	0.00	3,764,200	100	3,840,620								1,717,100	0.00%	44.71%	0.00	#####	0.00%	41.36%			Kecamatan Angkona			
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun (Dokumen)			1	1,738,000	1	1,090,500	-	626,600	-	-	-	-	1	1,717,100	100.00%	98.80%							Kecamatan Angkona	Tidak Ada()		
							1,738,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	98.80%						Kecamatan Angkona			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Predikat Kinerja							
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang disusun Tepat Waktu ((%))	100.00	30,263,850	0.00	8,508,500	100	8,559,350											5,216,000	0.00%	60.94%	0.00	#####	0.00%	45.35%	Kecamatan Angkona
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Dokumen)					7	5,254,000	3	523,500	1	993,000	2	1,243,000	1	2,456,500	7	5,216,000	100.00%	99.28%					Kecamatan Angkona	Tidak Ada()
									5,254,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.28%				Kecamatan Angkona	
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Kecamatan Angkona	
				Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang																							
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa ((%))	95.00	355,786,110	0.00	95,294,100	95	95,823,510											47,368,600	0.00%	49.43%	0.00	#####	0.00%	40.10%	Kecamatan Angkona
		Facilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Muayawah Perencanaan Pembangunan	Rasio persentase keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan Musrenbang kecamatan (Rasio)					0.40	10,705,200	0.40	10,696,700	-	-	-	-	-	-	0.40	10,696,700	100.00%	99.92%					Kecamatan Angkona	Tidak Ada()
		Facilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Cakupan desa yang terfasilitasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes nya (%)					100	13,370,200	100	5,009,100	100	4,127,000	100	1,457,000	100	2,761,000	100	13,354,100	100.00%	99.88%					Kecamatan Angkona	Tidak Ada()
		Facilitasi Peran Serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa	Persentase PKK desa yang dibina (%)					100	23,402,200	100	4,520,000	100	930,000	100	13,704,800	100	4,163,000	100	23,317,800	100.00%	99.64%					Kecamatan Angkona	Tidak Ada()
									47,477,600											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.77%					Kecamatan Angkona
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Kecamatan Angkona	
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan ((%))	95.00	258,680,632	0.00	66,971,968	95	71,169,164											23,945,100	0.00%	33.65%	0.00	#####	0.00%	35.15%	Kecamatan Angkona
		Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (%)					100	10,153,200	100	6,285,100	-	3,035,100	-	285,100	-	297,100	100	9,902,400	100.00%	97.53%					Kecamatan Angkona	Tidak Ada()
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun (Dokumen)					4	14,142,700	1	1,385,900	1	10,135,900	1	275,900	1	2,245,000	4	14,042,700	100.00%	99.29%					Kecamatan Angkona	Tidak Ada()
									24,295,900											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	98.56%					Kecamatan Angkona
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Kecamatan Angkona	
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketertarikan dan Keterlibatan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketertarikan dan Keterlibatan ((%))	95.00	66,149,400	0.00	10,934,000	95	11,027,400											2,708,700	0.00%	24.56%	0.00	#####	0.00%	20.62%	Kecamatan Angkona
		Facilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti (%)					100	2,908,700	100	140,000	100	-	100	1,513,800	100	1,054,900	100	2,708,700	100.00%	93.12%					Kecamatan Angkona	Tidak Ada()
									2,908,700											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	93.12%					Kecamatan Angkona
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Kecamatan Angkona	
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum ((%))	95.00	118,352,000	0.00	58,896,000	95	59,456,000											9,071,000	0.00%	15.26%	0.00	#####	0.00%	57.43%	Kecamatan Angkona
		Pelayanan Administrasi Perizinan	Jumlah administrasi perizinan yang diterbitkan (izin)					55	9,126,200	15	1,365,500	17	2,831,500	14	2,678,700	5	2,195,300	51	9,071,000	92.73%	99.40%					Kecamatan Angkona	Tidak Ada()
									9,126,200											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	92.73%	99.40%					Kecamatan Angkona
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Angkona
									513,017,380												97.43%	99.06%					
																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SWP Penanggungjawab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi (%)	98.00	5,461,512,621	98.00	1,079,411,694	98	1,104,936,157									98	873,190,600	100.00%	79.03%	196.00	#####	200.00%	35.75%	Kecamatan Malili	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat (Surat)			2400	9,265,000	600	2,302,000	600	1,747,000	600	165,000	-	5,051,000	1,800	9,265,000	75.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
			Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat (Surat)			2400		600		600			-		1,200			50.00%								Kecamatan Malili	Tidak Ada()
			Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat (Surat)			2400		46		66			-		111			4.64%								Kecamatan Malili	Tidak Ada()
			Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat (Surat)			2400		600		600			600		600		2,400	100.00%								Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan SDA, Listrik & Internet (Rek)			16	121,740,000	4	21,873,437	4	13,547,642	4	8,629,540	3	77,689,381	15	121,740,000	93.75%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)			4	4,550,000	4	1,825,000	4	-	2	575,000	2	2,150,000	3	4,550,000	75.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya Tenaga Kebersihan Kantor dan Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih (Orang)			3	53,125,000	3	10,657,500	3	2,628,000	3	3,869,000	3	35,970,500	3	53,125,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (Unit)			11	15,750,000	11	3,020,000	11	2,400,000	8	2,585,000	3	7,745,000	8	15,750,000	75.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Pada Kantor Camat (Buah)			579	15,410,000	144	3,646,500	145	2,127,500	144	1,548,000	146	8,088,000	579	15,410,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar)			140000	34,228,600	35,000	4,616,800	35,000	3,885,000	35,000	2,387,800	35,000	23,339,000	140,000	34,228,600	100.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor (Jenis)			20	6,197,000	5	1,673,000	5	1,643,000	5	1,174,000	5	1,707,000	20	6,197,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan (Eksemplar)			20	9,420,000	5	1,490,000	5	2,040,000	5	810,000	5	5,080,000	20	9,420,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Liter)			310	5,040,000	78	1,016,050	77	886,700	77	404,100	78	2,733,150	310	5,040,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pada Kegiatan Rapat - Rapat (Kotak)			4649	98,260,000	1,161	15,747,000	1,163	4,917,000	1,161	5,429,000	1,164	72,167,000	4,649	98,260,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi yang diikuti (Kali)			33	119,360,000	8	26,777,200	8	-	7	10,111,050	10	82,471,750	33	119,360,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Terbayarnya tenaga upah jasa sebagai pendukung administrasi teknis (orang)			28	321,000,000	28	53,500,000	28	-	28	26,750,000	28	240,750,000	28	321,000,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi antar Pemerintah Desa dan Kecamatan (Kali)			700	59,845,000	175	7,599,150	175	2,801,600	175	2,155,800	175	47,288,450	700	59,845,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Malili	Tidak Ada()
							873,190,600											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	98.10%	100.00%						Kecamatan Malili	
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	
																										Kecamatan Malili	

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/G tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
							I		II		III		IV							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan (Kali) (kali)			4	3	1	-	-	4	100.00%	96.90%				Kecamatan Wasuponda	Tidak Ada()		
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung/administrasi teknis yang terbayarkan (orang) (OB)			9	9	9	9	9	9	100.00%	92.86%				Kecamatan Wasuponda	Tidak Ada()		
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali) (kali)			635	219	30	53	333	635	100.00%	99.93%				Kecamatan Wasuponda	Tidak Ada()		
						555,593,900											Kecamatan Wasuponda			
																	Kecamatan Wasuponda			
																	Kecamatan Wasuponda			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Kecamatan Wasuponda			
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit) (unit)			8	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%				Kecamatan Wasuponda	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara (unit) (unit)			1	1	-	-	-	1	100.00%	100.00%				Kecamatan Wasuponda	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) (unit)			1	1	-	-	-	1	100.00%	100.00%				Kecamatan Wasuponda	Tidak Ada()		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit) (unit)			10	10	10	10	10	10	100.00%	94.40%				Kecamatan Wasuponda	Tidak Ada()		
						101,253,550											Kecamatan Wasuponda			
																	Kecamatan Wasuponda			
																	Kecamatan Wasuponda			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															Kecamatan Wasuponda			
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (Orang) (orang)			4	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%				Kecamatan Wasuponda	Tidak Ada()		
																	Kecamatan Wasuponda			
																	Kecamatan Wasuponda			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															Kecamatan Wasuponda			
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dokumen) (Dokumen)			1	1	-	-	-	1	100.00%	100.00%				Kecamatan Wasuponda	Tidak Ada()		
						2,829,900											Kecamatan Wasuponda			
						2,829,900											Kecamatan Wasuponda			
																	Kecamatan Wasuponda			
																	Kecamatan Wasuponda			
		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD															Kecamatan Wasuponda			
																	Kecamatan Wasuponda			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SWP Penawar Unggulan	Keterangan							
				5		6		7		8		9		10		11		12			13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp		
										734,408,700				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				100.00%	96.70%								
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di agendakan (lembar)			1000	3,767,850	375	832,000	80	210,000	300	1,899,900	245	825,950	1,000	3,767,850	100.00%	100.00%							Kecamatan Nuh	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan (rekening)			48	70,061,500	12	9,032,000	12	11,975,000	12	18,244,500	12	18,186,500	48	57,438,000	100.00%	81.98%							Kecamatan Nuh	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sewa (jenis)			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Kecamatan Nuh	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang terbayarkan (Orang)			1	32,995,175	1	5,569,300	1	6,271,100	1	7,737,550	1	13,417,225	1	32,995,175	100.00%	100.00%							Kecamatan Nuh	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (jenis)			20	12,100,000	5	2,840,000	4	459,000	7	2,075,000	4	6,594,650	20	11,968,650	100.00%	98.91%							Kecamatan Nuh	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (buah)			50	21,293,217	50	3,701,975	50	1,462,875	50	7,249,670	50	7,288,325	50	19,702,845	100.00%	92.53%							Kecamatan Nuh	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lapis)			14	19,206,400	4	3,433,400	4	756,000	4	7,281,800	2	6,664,000	14	18,135,200	100.00%	94.42%							Kecamatan Nuh	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)			9	7,088,700	9	1,314,950	9	-	9	1,696,200	9	3,534,100	9	6,545,250	100.00%	92.33%							Kecamatan Nuh	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan (Eksampler)			60	9,465,000	15	825,000	15	1,425,000	15	2,825,000	15	2,900,000	60	7,975,000	100.00%	84.26%							Kecamatan Nuh	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan (Kotak/porsi)			3884	188,050,000	971	32,750,000	299	1,156,000	1,217	44,264,000	1,397	99,440,000	3,884	177,610,000	100.00%	94.45%							Kecamatan Nuh	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah yg dilaksanakan (kali) (kali)			20	104,105,000	3	7,550,000	-	7,656,000	4	15,872,700	5	37,359,750	12	68,438,450	60.00%	65.74%							Kecamatan Nuh	
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga administrasi teknis yang terbayarkan (orang)			8	219,000,000	8	36,500,000	8	36,500,000	8	73,000,000	8	73,000,000	8	219,000,000	100.00%	100.00%							Kecamatan Nuh	
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)			610	142,781,600	85	24,571,100	99	12,861,900	131	43,727,100	106	59,789,150	421	140,949,250	69.02%	98.72%							Kecamatan Nuh	
							829,914,442											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	89.65%	92.12%						Kecamatan Nuh	
																		Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Tinggi						Kecamatan Nuh	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																89,754,854	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			Kecamatan Nuh
		pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakaan (unit)			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Kecamatan Nuh	
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan (Unit)			5	49,500,000	-	-	-	-	-	-	5	41,085,000	5	41,085,000	100.00%	83.00%							Kecamatan Nuh	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/Mess	Jumlah rumah jabatan/dinas yang dipelihara (unit)			5	10,000,000	-	-	-	-	5	5,000,000	-	4,908,000	5	9,908,000	100.00%	99.08%							Kecamatan Nuh	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)			2	8,500,000	-	-	-	-	2	-	-	8,441,000	2	8,441,000	100.00%	99.31%							Kecamatan Nuh	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)			9	38,197,400	9	4,310,000	9	340,000	9	10,164,500	9	14,534,854	9	29,349,354	100.00%	76.84%							Kecamatan Nuh	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara (unit)			3	1,075,000	-	-	-	-	-	-	3	971,500	3	971,500	100.00%	90.37%							Kecamatan Nuh	
							107,272,400											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	83.67%						Kecamatan Nuh	
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi						Kecamatan Nuh	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																14,280,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!			Kecamatan Nuh
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek,diklat,worshop,seminar perundang-undangan (orang)			5	19,120,000	-	-	1	7,140,000	1	7,140,000	-	-	2	14,280,000	40.00%	74.69%							Kecamatan Nuh	
							19,120,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	40.00%	74.69%						Kecamatan Nuh	
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sedang						Kecamatan Nuh	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%			16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															3,231,750	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Nuha		
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di susun (dokumen)			1	3,310,075	1	1,578,450	-	1,473,300	-	180,000	-	-	1	3,231,750	100.00%	97.63%					Kecamatan Nuha		
							3,310,075										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	97.63%					Kecamatan Nuha		
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Nuha		
		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD															12,687,700	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Nuha		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang di susun (dokumen)			6	12,760,257	2	2,404,000	2	1,692,700	1	2,719,325	1	5,871,675	6	12,687,700	100.00%	99.43%					Kecamatan Nuha		
							12,760,257										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	99.43%					Kecamatan Nuha		
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Nuha		
		Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang																						Kecamatan Nuha		
		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa															425,476,435	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Nuha		
		Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Rasio Persentase Keterwakilan Perempuan dan Laki-laki dalam Pelaksanaan Musrenbang (rasio)			0.38	16,845,975	0	16,777,975	-	-	-	-	-	0	16,777,975	100.00%	99.60%					Kecamatan Nuha			
		Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Cakupan Desa yang terfasilitasi Rancangan Perdes ApBdesnya (%)			100	3,021,975	100	-	-	-	270,000	100	2,726,000	100	2,996,000	100.00%	99.14%					Kecamatan Nuha			
		Fasilitasi Peran Serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa	Persentase PKK Desa yang dibina (%)			95	69,954,565	95	12,712,360	95	680,000	95	14,691,525	95	27,094,575	95	55,178,460	100.00%	78.88%					Kecamatan Nuha		
		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja (orang)			22	93,685,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Kecamatan Nuha			
		Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (orang)			22	154,507,500	-	-	-	-	22	64,487,500	-	89,985,000	22	154,472,500	100.00%	99.98%					Kecamatan Nuha		
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat	Jumlah pendidikan dan Pelatihan Tenaga kerja berbasis Masyarakat (l)			140	173,933,000	-	-	-	-	140	49,878,000	-	109,215,000	140	159,093,000	100.00%	91.47%					Kecamatan Nuha		
		Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah pembinaan keluarga berencana (orang)			35	7,440,500	-	-	-	-	35	7,390,500	-	-	35	7,390,500	100.00%	99.33%					Kecamatan Nuha		
		Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah pengembangan Minat dan budaya baca (jenis)			11	29,568,000	-	-	-	-	11	29,568,000	-	-	11	29,568,000	100.00%	100.00%					Kecamatan Nuha		
							548,956,515										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	82.93%	77.51%					Kecamatan Nuha		
																	Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi					Kecamatan Nuha		
		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan															37,521,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Nuha		
		Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	persentase rekomendasi yang di tindak lanjut (%)			95	19,976,675	95	6,310,350	95	-	95	6,600,000	95	6,795,625	95	19,705,975	100.00%	98.64%					Kecamatan Nuha		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun (dokumen)			4	19,883,812	1	-	1	2,000,000	1	6,521,650	1	9,293,375	4	17,815,025	100.00%	89.60%					Kecamatan Nuha		
							39,860,487										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	94.13%					Kecamatan Nuha		
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Nuha		
		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban															84,420,400	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Nuha		
		Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	persentase kasus pengaduan yang di tindak lanjut (%)			95	8,743,800	95	1,160,000	95	-	95	1,890,850	95	3,312,050	95	6,362,900	100.00%	72.77%					Kecamatan Nuha		
		Pengendalian Keamanan Lingkungan	-			2	52,817,500	-	-	-	-	2	5,545,000	-	47,197,500	2	52,742,500	100.00%	99.86%					Kecamatan Nuha		
		Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah penyuluhan Informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang dibina (kegiatan)			2	25,360,000	-	-	-	-	2	5,445,000	-	19,870,000	2	25,315,000	100.00%	99.82%					Kecamatan Nuha		
							86,921,300										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	97.12%					Kecamatan Nuha		
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Nuha		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan yang diadakan (Unit)			5	31,200,000							5	30,950,000	5	30,950,000	100.00%	99.20%					Kecamatan Towuti	Tidak Ada()				
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg diadakan (Unit)			8	40,250,000							8	40,200,000	8	40,200,000	100.00%	99.88%					Kecamatan Towuti	Tidak Ada()				
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan/dinas yang dipelihara (Unit)			1	12,000,000						1	11,885,000			1	11,885,000	100.00%	99.04%					Kecamatan Towuti	Tidak Ada()			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)			2	21,000,000	1	1,000,000				1	10,500,000		9,450,000	2	20,950,000	100.00%	99.76%					Kecamatan Towuti	Tidak Ada()			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)			14	103,000,000	5	13,316,120	3	5,265,000	4	28,450,000	2	53,069,930	14	100,101,050	100.00%	97.19%					Kecamatan Towuti	Tidak Ada()				
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara (Unit)			8	3,000,000			2	1,500,000	3	450,000	2	1,050,000	7	3,000,000	87.50%	100.00%					Kecamatan Towuti	Tidak Ada()				
		Pembangunan taman, lapangan/fasilitas parkir	Jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun (Unit)			0	-											0.00%	0.00%					Kecamatan Towuti	Tidak Ada()				
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi sedang (1 unit) (unit) (Unit)			1	-											0.00%	0.00%					Kecamatan Towuti	Tidak Ada()				
							210,450,000																	Kecamatan Towuti					
																								Kecamatan Towuti					
																								Kecamatan Towuti					
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	95.00	102,400,000	100.00	35,000,000	95	27,400,000									0.00%	0.00%	100.00	#####	105.26%	34.18%	Kecamatan Towuti					
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yg mengikuti bimtek,diklat,workshop,seminar perundang-undangan (Orang)			4	5,000,000											0.00%	0.00%					Kecamatan Towuti	Kegiatan ini Anggaran nya sifat disediakan saja sehingga akan menyesuaikan dengan permintaan atau persuratan dari dinas terkait				
							5,000,000																	Kecamatan Towuti					
																								Kecamatan Towuti					
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu (%)	100.00	17,060,700	100.00	5,086,350	100	5,530,350									100	11,157,550	100.00%	201.75%	200.00	#####	200.00%	95.21%	Kecamatan Towuti			
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (Dokumen)			1	16,960,000	1	3,960,000		1,320,000		200	5,877,350	1	11,157,550	100.00%	65.79%							Kecamatan Towuti	Tidak Ada()			
							16,960,000																	Kecamatan Towuti					
																								Kecamatan Towuti					
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun tepat waktu (%)	100.00	41,304,960	100.00	12,251,547	100	12,795,413									100	13,610,000	100.00%	106.37%	200.00	#####	200.00%	62.61%	Kecamatan Towuti			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)			6	13,633,000	1	696,000	1	3,365,000	2	3,185,100	2	6,363,900	6	13,610,000	100.00%	99.83%							Kecamatan Towuti	Tidak Ada()		
							13,633,000																	Kecamatan Towuti					
																								Kecamatan Towuti					
																								Kecamatan Towuti					

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWP Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
		Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang																											
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa (%)	95.00	380,593,658	98.54	97,077,029	95	97,444,129										94.44	62,921,200	99.41%	64.57%	192.98	#####	203.14%	42.04%	Kecamatan Towuti		
		Facilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Rasio keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan (%)			0.4	18,456,000	0.55	18,456,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	18,456,000	100.00%	100.00%					Kecamatan Towuti	Tidak Ada()	
		Facilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Cakupan desa yang terfasilitasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesnya (%)			100	6,594,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	6,589,200	100	6,589,200	100.00%	99.92%					Kecamatan Towuti	Tidak Ada()
		Facilitasi Peran Serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa	Persentase PKK Desa yang dibina (%)			100	52,446,000	100	9,280,000	33	2,160,000	100	13,085,000	100	13,351,000	83.33	37,876,000	83.33%	72.22%									Kecamatan Towuti	Ada beberapa kegiatan PKK tidak terlaksana karena pandemi Covid 19
							77,496,200												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		88.72%	81.19%					Kecamatan Towuti		
																			Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi					Kecamatan Towuti		
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan (%)	95.00	251,992,450	100.00	67,361,000	95	67,695,450										100	40,967,000	105.26%	60.52%	200.00	#####	210.53%	42.99%	Kecamatan Towuti		
		Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (%)			100	25,171,600	100	3,460,000	100	5,900,000	100	4,850,000	100	10,889,000	100	25,099,000	100.00%	99.71%									Kecamatan Towuti	Tidak Ada()
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun (Dokumen)			2	15,868,000	-	-	-	-	1	8,340,000	1	7,528,000	2	15,868,000	100.00%	100.00%									Kecamatan Towuti	Tidak Ada()
							41,039,600												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.82%					Kecamatan Towuti		
																			Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Towuti		
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban (%)	95.00	90,191,224	60.63	12,698,000	95	12,775,224										100	13,370,000	105.26%	104.66%	160.63	#####	169.08%	28.90%	Kecamatan Towuti		
		Facilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti (%)			100	13,526,000	100	2,965,000	100	1,490,000	100	4,205,000	100	4,710,000	100	13,370,000	100.00%	98.85%									Kecamatan Towuti	Tidak Ada()
							13,526,000												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	98.85%					Kecamatan Towuti		
																			Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Towuti		
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum	Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum (%)	95.00	162,492,032	71.67	75,990,250	95	86,501,782										100	13,254,000	105.26%	15.32%	171.67	#####	180.71%	54.92%	Kecamatan Towuti		
		Pelayanan Administrasi Perizinan	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (Lembar)			100	13,330,000	12	1,109,000	19	715,000	25	390,000	44	11,040,000	100	13,254,000	100.00%	99.43%									Kecamatan Towuti	Tidak Ada()
							13,330,000												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.43%					Kecamatan Towuti		
																			Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Kecamatan Towuti		
							1,140,731,500												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		98.25%	96.16%							
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	646,004,472	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!		Inspektoral		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)			1200	7,210,000	355	1,375,000	176	2,185,000	291	672,000	223	2,740,000	1,045	6,972,000	87.08%	96.70%									Inspektoral	Tidak Ada()
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA & Listrik yang terbayarkan (Rek/Bin)			24	50,400,000	6	13,672,797	6	4,679,187	6	14,795,264	6	11,461,716	24	44,608,964	100.00%	88.51%									Inspektoral	Tidak Ada()
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar (orang/Bin)			2	27,962,500	2	3,000,000	2	7,950,000	2	7,010,000	2	8,982,000	2	26,942,000	100.00%	96.35%									Inspektoral	Tidak Ada()

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%								16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289

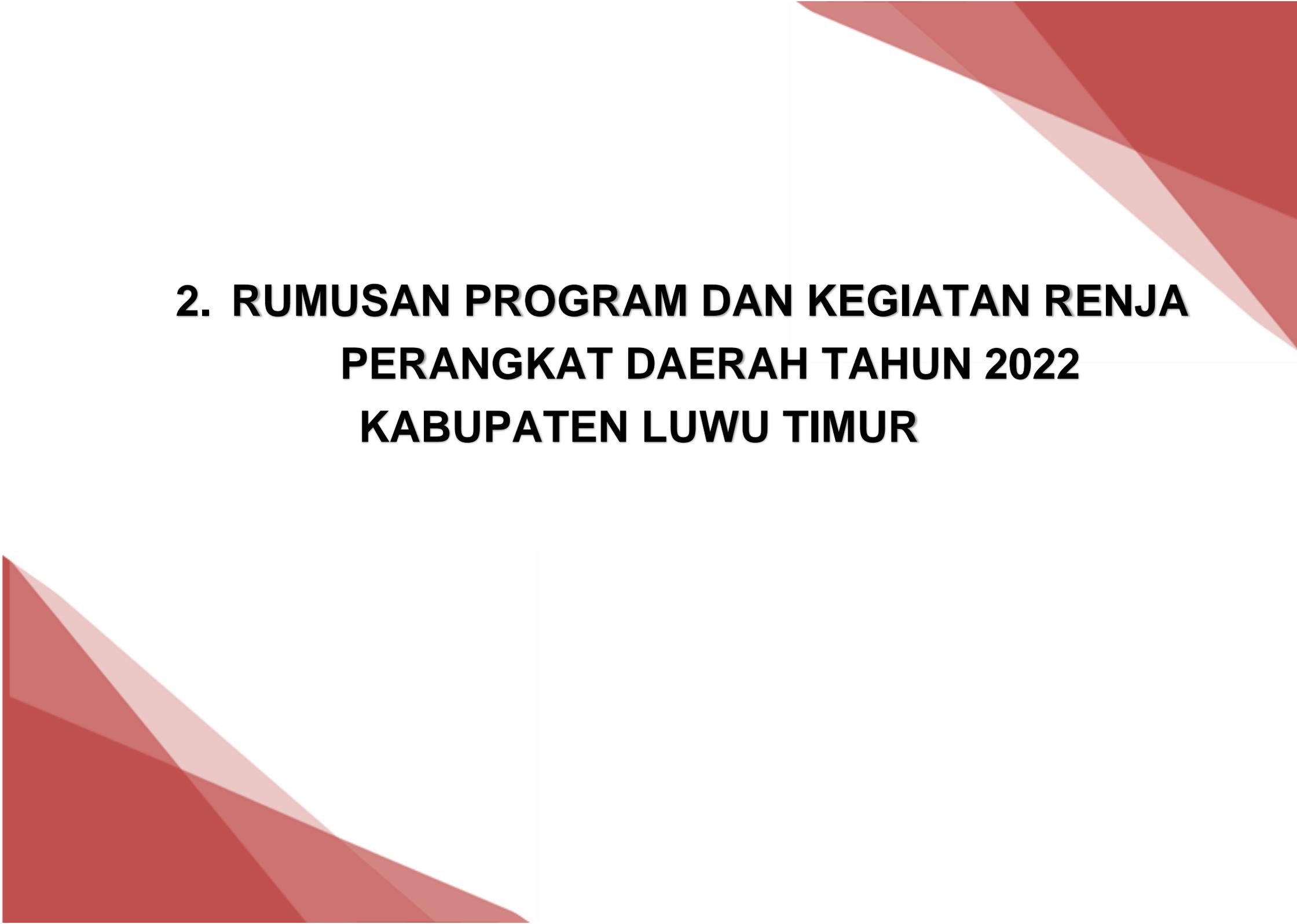
No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	Keterangan					
							I		II		III		IV												
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan dan akhir tahun yang dibuat (Dokumen)			2	1,960,000	1	830,000	-	640,000	1	490,000	-	-	2	1,960,000	100.00%	100.00%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (Dokumen)			1	5,430,000	1	440,000	-	960,000	-	2,228,000	-	937,500	1	4,565,500	100.00%	84.08%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
							7,390,000																		
		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD															3,711,300	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Bapelitba ngda	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (Dokumen)			6	4,320,000	1	930,000	2	-	1	1,307,700	2	1,473,000	6	3,711,300	100.00%	85.91%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
							4,320,000																		
		Perencanaan Pembangunan																							
		Program Pengembangan data/informasi															61,902,900	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Bapelitba ngda	
		Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi SIPD yang menyajikan data pokok dan informasi (Aplikasi)			1	53,959,000	-	691,000	-	2,755,000	-	7,135,000	1	41,967,900	1	52,548,900	100.00%	97.39%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
		Penyusunan, Updating, Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Laporan)			4	11,194,000	1	-	1	397,000	1	6,080,000	1	2,877,000	4	9,354,000	100.00%	83.56%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
							65,153,000																		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah															722,378,500	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Bapelitba ngda	
		Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen teknokratik RPJMD yang disusun sesuai peraturan (Dokumen)			1	367,700,000	-	5,315,000	-	3,900,000	-	35,985,000	1	294,078,000	1	339,278,000	100.00%	92.27%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
		Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada (Dokumen)			2	156,010,000	-	12,660,000	-	8,400,000	-	43,365,000	2	88,520,000	2	152,945,000	100.00%	98.04%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
		Perencanaan musrenbang RKPD	Jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan (Dokumen)			5	86,845,000	2	15,000,000	3	50,204,000	-	19,600,000	-	-	5	84,804,000	100.00%	97.65%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ bupati yang disusun (Dokumen)			1	49,730,000	-	13,017,000	1	15,558,000	-	18,000,000	-	2,400,000	1	48,975,000	100.00%	98.48%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
		Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen nota kesepahaman KUA dan PPAS yang di susun (Dokumen)			4	62,230,000	-	-	2	-	-	20,561,000	2	34,544,000	4	55,105,000	100.00%	88.55%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
		Penyusunan Perencanaan Dana Alokasi	Jumlah dokumen usulan dana alokasi khusus (Dokumen)			4	53,041,000	1	1,174,000	1	-	1	1,947,000	1	37,150,500	4	40,271,500	100.00%	75.93%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
							775,556,000																		
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi															282,655,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	Bapelitba ngda	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi yang Disediakan (Laporan)			4	51,763,000	1	1,810,000	1	10,057,200	1	17,533,000	1	18,607,000	4	48,007,200	100.00%	92.74%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
		Rural Empowerment and Agriculture Development- Scalling up Initiative (READ-SI)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas READ-SI yang Disediakan (Laporan)			4	21,060,000	1	-	1	-	1	6,050,000	1	14,770,000	4	20,820,000	100.00%	98.86%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
		Koordinasi Investasi dan Promosi	Jumlah Laporan Keikutsertaan dalam Event Promosi (Pameran/Expo/Exhibisi) yang Disediakan (Laporan)			1	520,000	1	520,000	-	-	-	-	-	-	1	520,000	100.00%	100.00%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
		Koordinasi Pengembangan Produk Komoditi Unggulan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengembangan Produk Komoditi Unggulan Daerah yang Disediakan (Dokumen)			4	29,570,000	1	150,000	1	-	1	9,504,000	1	19,436,000	4	29,090,000	100.00%	98.38%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		
		Penyusunan Regulasi Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah regulasi pembangunan ekonomi daerah yang disusun (Dokumen)			1	180,305,000	-	4,945,000	-	52,998,000	-	687,000	1	119,951,800	1	178,581,800	100.00%	99.04%			Bapelitba ngda	Tidak Ada()		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SWP Penanggungjawab	Keterangan		
							I		II		III		IV			12			14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17								
		Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan DBH Pajak Rokok yang Disediakan (Laporan)			4	6,530,000	1	390,000	1	-	1	1,169,000	1	4,075,000	4	5,634,000	100.00%	86.28%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
							289,748,000											100.00%	97.55%			Bapelbita ngda		
		Program Perencanaan Sosial Budaya																						
		Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah laporan kinerja TKPKD dan dokumen pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (Laporan)			2	40,730,000	-	8,620,000	1	2,393,000	-	5,740,000	1	19,360,000	2	36,113,000	100.00%	88.66%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah laporan perencanaan bidang sosial dan budaya (Laporan)			4	115,023,000	1	2,055,000	1	8,095,000	1	36,892,000	1	61,281,500	4	108,323,500	100.00%	94.18%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
		Penyelenggaraan Musrenbang Anak	Laporan musrenbang anak yang dibuat (Laporan)			1	56,230,000	-	41,140,000	1	8,450,000	-	6,249,200	-	-	1	55,839,200	100.00%	99.30%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
		Koordinasi Forum Pembinaan Kabupaten Sehat	Jumlah laporan forum pembinaan kabupaten sehat yang dihasilkan (Laporan)			1	23,152,000	-	400,000	-	-	-	1,500,000	1	13,013,000	1	14,913,000	100.00%	64.41%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
		Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah laporan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang dihasilkan (Laporan)			1	19,750,000	-	2,755,000	-	-	-	3,760,000	1	11,975,000	1	18,490,000	100.00%	93.62%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
							254,885,000											100.00%	91.68%			Bapelbita ngda		
		Program Penelitian dan Pengembangan																						
		Koordinasi Penelitian dan pengembangan Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi ltbang daerah (Laporan)			4	53,883,000	1	-	1	7,875,000	1	17,830,000	1	13,553,000	4	39,258,000	100.00%	72.86%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
		Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Jumlah dokumen kajian, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan infrastruktur (Dokumen)			1	211,119,000	-	6,994,000	-	11,260,000	-	-	-	5,105,000	-	23,359,000	0.00%	11.06%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
		Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen kajian, penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya (Dokumen)			1	58,820,000	-	-	-	-	-	440,000	1	53,300,000	1	53,740,000	100.00%	91.36%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
							323,822,000											34.80%	35.93%			Bapelbita ngda		
		Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah																						
		Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Laporan)			4	65,590,000	1	7,900,000	1	340,000	1	11,381,000	1	44,963,900	4	64,584,900	100.00%	98.47%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
		Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan aturan (Dokumen)			2	41,686,000	-	9,211,000	1	-	-	24,975,000	1	7,490,000	2	41,676,000	100.00%	99.98%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
							107,276,000											100.00%	99.05%			Bapelbita ngda		
		Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah																						
		Koordinasi Penanganan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	umlah laporan hasil penanganan air minum dan sanitasi masyarakat (Laporan)			4	35,000,000	1	3,279,000	1	4,720,000	1	10,760,000	1	3,379,000	4	22,138,000	100.00%	63.25%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
		Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah laporan pengembangan infrastruktur dan wilayah yang dihasilkan (Laporan)			4	44,650,000	1	11,084,000	1	3,235,000	1	14,782,000	1	13,205,000	4	42,306,000	100.00%	94.75%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	
		Koordinasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	Jumlah laporan kawasan perdesaan prioritas nasional yang didampingi (Laporan)			4	15,516,000	1	732,000	1	-	1	685,000	1	7,520,000	4	8,937,000	100.00%	57.60%			Bapelbita ngda	Tidak Ada()	

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)			36	45,000,000	8	9,076,371	9	7,186,182	9	4,579,260	9	9,925,571	35	30,767,384	97.22%	68.37%					BKPSDM	Lain-lain(Anggaran kegiatan ini sifatnya disediakan dan dibayarkan sesuai tagihan yang masuk)				
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa yang terbayarkan (Orang)			2	32,780,000	2	5,320,000	2	7,835,000	2	6,000,000	2	12,990,000	2	32,145,000	100.00%	98.06%					BKPSDM	Tidak Ada()				
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (Unit)			44	30,000,000	2	4,350,000	4	3,000,000	3	2,250,000	31	18,125,000	40	27,725,000	90.91%	92.42%					BKPSDM	Tidak Ada()				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat kantor yang disediakan (Jenis)			32	30,000,000	48	5,408,000	31	8,263,000	25	5,300,000	20	11,029,000	31	30,000,000	96.88%	100.00%					BKPSDM	Tidak Ada()				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Jenis/Blok)			3	18,650,000	3	3,177,600	3	5,545,000	2	946,600	3	8,025,800	3	17,695,000	100.00%	94.88%					BKPSDM	Tidak Ada()				
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)			7	14,480,000	10	-	6	3,545,000	6	-	6	10,935,000	7	14,480,000	100.00%	100.00%					BKPSDM	Tidak Ada()				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Kotak)			470	12,400,000	145	2,273,000	-	1,575,000	117	-	325	8,240,000	587	12,088,000	100.00%	97.48%					BKPSDM	Tidak Ada()				
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar koran lokal, nasional yang disiapkan sebagai bahan bacaan yang disiapkan (Eksemplar)			48	5,520,000	8	840,000	12	1,260,000	12	1,160,000	16	1,800,000	48	5,060,000	100.00%	91.67%					BKPSDM	Tidak Ada()				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)			84	488,280,000	20	69,950,600	-	37,438,727	32	73,690,000	33	260,566,138	85	441,645,465	100.00%	90.45%					BKPSDM	Tidak Ada()				
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis (Orang)	Jumlah tenaga upah jasa yang terbayarkan setiap tahun (Orang)			17	222,000,000	17	37,000,000	17	55,500,000	17	55,500,000	17	74,000,000	17	222,000,000	100.00%	100.00%					BKPSDM	Tidak Ada()				
		Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulan yang tersusun (Dokumen)			4	8,600,800	1	973,000	1	2,884,150	1	1,697,600	1	3,026,350	4	8,581,100	100.00%	99.77%					BKPSDM	Tidak Ada()				
		Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)			45	12,368,000	41	5,694,150	-	2,445,150	14	819,150	2	3,406,150	57	12,364,600	100.00%	99.97%					BKPSDM	Tidak Ada()				
							927,463,800																	BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					
																								BKPSDM					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
		Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah formasi jabatan yang akan diterima CPNS (Formasi)					250	777,996,000	111	259,215,100	-	30,574,000	-	16,998,000	-	304,882,299	111	611,669,399	44.40%	78.62%					BKPSDM	Lain-lain* Terkait realisasi kinerja, dari target 250 formasi/orang yang disetujui oleh Kementerian RB sebanyak 111 formasi dan formasi yang terisi sebanyak 110 formasi karena terdapat 1 formasi
		Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Persentase jumlah kasus yang tertangani (Persen)					80	54,660,000	13	3,380,000	66	8,290,000	69	20,280,000	67	10,130,000	67	42,080,000	83.28%	76.98%					BKPSDM	Lain-lain* Terkait realisasi kinerja, total kasus di tahun 2020 yang terlapor sebanyak 18 kasus dan total kasus yang tertangani sampai dengan triwulan IV sebanyak 12 kasus * Terkait realisasi keuangan
		Seleksi Penerimaan PPPK	Jumlah formasi PPPK yang akan diterima (Formasi)					200	54,340,000	-	-	-	5,731,000	-	-	190	36,734,000	190	42,465,000	95.00%	78.15%					BKPSDM	Lain-lain* Terkait realisasi kinerja, dari target 200 formasi yang disetujui oleh Kementerian RB sebanyak 190 orang yang mengikuti seleksi dan yang lulus seleksi sebanyak 113 orang * Terkait

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021		SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
										I		II												III		IV			
										K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						Tinggi	Sangat Tinggi												
								1,484,283,786,932,78		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PERANGKAT DAERAH						94.62%	96.81%												
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PERANGKAT DAERAH						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												



2. RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 KABUPATEN LUWU TIMUR

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
							Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1			288,950,987,500							317,137,726,503			
1	1				288,950,987,500						317,137,726,503			
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	125,162,461,999				100 %	125,162,461,999	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	196,054,590				100 %	196,054,590	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	7 dok	111,557,111			0	7 dok	111,557,111	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dok	84,497,479	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	10 dok	84,497,479	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	121,380,803,015				100 %	121,380,803,015	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	1883 orang	121,242,232,715	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1883 orang	121,242,232,715	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	18 dok	138,570,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	18 dok	138,570,300	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %	1,058,354,244				100 %	1,058,354,244	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		70,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	1	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	3 laporan	29,882,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	3 laporan	29,882,350	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.2.1.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			486,744,954		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0		486,744,954	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.1.2.1.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	401 orang	324,066,940		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	401 orang	324,066,940	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	10 orang	147,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	10 orang	147,660,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 %	1,858,277,150						100 %	1,858,277,150	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	324 jenis	17,694,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	324 jenis	17,694,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	73 unit	10,015,000				2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	73 unit	10,015,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	37 jenis	26,097,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	37 jenis	26,097,750	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan	3 jenis	109,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	3 jenis	109,800,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	84 eks	8,220,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	84 eks	8,220,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	3000 orang	138,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	3000 orang	138,820,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	1676 kali	1,547,630,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1676 kali	1,547,630,400	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 1 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	22 unit	94,040,000						22 unit	94,040,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 1 2.1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	22 unit	94,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	22 unit	94,040,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	352,283,000						100 %	352,283,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	3200 surat	10,283,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	3200 surat	10,283,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	2 rek	150,000,000				2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 rek	150,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	3 orang	192,000,000				2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	3 orang	192,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	222,650,000						100 %	222,650,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	67 unit	115,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	67 unit	115,550,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	78 unit	62,100,000				2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	78 unit	62,100,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 unit	45,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	68.2 %	163,788,525,501						68.2 %	191,975,264,504	Dinas Pendidikan Dan
	APK SD/MI/PAKET A	114.3 %	114.3 %									
	APK SMP/MTS/PAKET B	139.2 %	139.2 %									
	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.31 %	0.31 %									
	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	79.86 %	79.86 %									
	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah											Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2	Pengelolaan Pemukiman Sekolah Dasar	Presentase SD/MI terakreditasi minimal B	82.16 %	93,099,851,287						82.16 %	115,099,127,314	Pendidikan Dan Kebudayaan
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD /MI	62.4 nilai							62.4 nilai		
1.1.2.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD yang dibangun	1 unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun	15 unit	3,118,159,549		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	15 unit	3,118,159,549	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/ TU SD yang dibangun	2 unit	490,507,260		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 unit	500,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	5 unit	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	5 unit	3,600,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SD yang dibangun	2 unit	528,004,340		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 unit	550,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Halaman SD yang ditata	7 paket	1,500,000,000					0	7 paket	6,700,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Jumlah Lab Komputer/TIK SD yang dibangun	2 unit					2 unit				
		Jumlah ruang ibadah SD yang dibangun	3 unit					3 unit				
		Jumlah WC SD yang dibangun	16 unit					16 unit				
		Panjang pagar SD yang dibangun	1000 meter					1000 meter				
1.1.2.2.7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun	6 unit	500,000,000					0	6 unit	750,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)	6 unit	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	6 unit	2,500,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah gedung Kantor SD yang direhab	1 unit	100,000,000					0	1 unit	200,000,000	Dinas Pendidikan Dan
		Jumlah WC SD yang direhab	2 unit					2 unit				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SD yang direhab	3 unit	200,000,000					0	3 unit	250,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel SD yang diadakan	15 paket	990,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	15 paket	1,000,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan	30 unit	2,000,000,000					0	30 unit	12,000,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah seragam peserta didik SD sederajat yang diadakan	6500 pasang	1,842,212,373		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	6500 pasang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah bangunan sekolah SD yang terpelihara	154 sekolah	1,000,000,000					0	154 sekolah	2,000,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan	15 paket	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	15 paket	2,200,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			523,420,811		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0		523,420,811	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima Bosda	812 orang	53,443,598,371		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	812 orang	53,443,598,371	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional Jumlah KKG SD yang di bina	60 orang 45 orang 35 KKG	99,022,630		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	60 orang 45 orang 35 KKG	99,022,630	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan perundang-undangan	1100 orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1100 orang	100,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat	167 sekolah	22,564,925,953	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	167 sekolah	22,564,925,953	Dinas Pendidikan Dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						DAK Non Fisik - BOS Reguler		manusia				
1 1 2 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.97 %	55,742,369,581						0.97 %	61,929,832,557	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	94.8 %							94.8 %		
		Presentase SMP terakreditasi minimal B	82.6 %							82.6 %		
		Rata-rata nilai ujian sekolah SMP/MTs	48.95 %							48.95 %		
1 1 2 2 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP yang dibangun	15 unit	3,522,158,170		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	15 unit	3,522,158,170	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 2 2 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU SMP yang dibangun	2 unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 2 2 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP yang dibangun	5 unit	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	5 unit	500,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 2 2 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun	2 unit	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 unit	1,300,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 2 2 6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium IPA SMP yang dibangun	1 unit	1,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 unit	1,400,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Jumlah Laboratorium komputer SMP yang dibangun	3 unit							3 unit		
1 1 2 2 9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMP yang dibangun	2 unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 unit	500,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1 1 2 2 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Halaman SMP yang ditata	5 paket	800,000,000				2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	5 paket	2,000,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Jumlah ruang ibadah SMP yang dibangun	1 unit							1 unit		
		Jumlah WC SMP yang dibangun	2 unit							2 unit		
		Panjang pagar SMP yang dibangun	1000 m							1000 m		
1 1 2 2 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah bangunan kantor SMP yang direhab	2 unit	150,000,000					0	2 unit	200,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	6 unit	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	6 unit	1,200,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru SMP yang di rehab	3 unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	3 unit	200,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium SMP yang direhab	1 unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 unit	150,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMP yang direhab	2 unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 unit	200,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang ibadah SMP yang direhab	1 unit	50,000,000				2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 unit	50,000,000	Dinas Pendidikan Dan
		Jumlah WC SMP yang direhab	1 unit							1 unit		
1.1.2.2.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel SMP yang diadakan	9 paket	660,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	9 paket	660,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah media pendidikan SMP yang diadakan	28 unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	28 unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan	6000 pasang	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	6000 pasang	1,000,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah bangunan sekolah SMP yang terpelihara	36 sekolah	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	36 sekolah	1,000,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan	15 paket	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	15 paket	125,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat bakat tingkat Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan	5 lomba	524,883,436		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	5 lomba	524,883,436	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang menerima Bosda	269 orang	27,296,445,280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	269 orang	27,296,445,280	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba	30 orang	173,882,695		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	30 orang	173,882,695	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional	30 orang							30 orang		
		Jumlah MGMP yang di bina	11 MGMP							11 MGMP		
1.1.2.2.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0		100,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP sederajat	52 sekolah	13,090,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	52 sekolah	17,827,462,976	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
						DAK Non Fisik - BOS Reguler						
1.1.2.2.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	54.09 %	10,809,946,405						54.09 %	10,809,946,405	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Presentase TK terakreditasi minimal B	63.49 %							63.49 %		
1.1.2.2.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	4 unit	524,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	4 unit	524,300,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Halaman TK yang ditata	2 paket	346,925,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 paket	346,925,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Jumlah UKS TK yang dibangun	5 unit							5 unit		
		Jumlah WC TK yang dibangun	2 unit							2 unit		
		Panjang pagar TK yang dibangun	100 meter							100 meter		
1.1.2.2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab	4 unit	63,772,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	4 unit	63,772,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara	11 sekolah	188,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	11 sekolah	188,160,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
							Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Kelas/Ruang Guru PAUD		108,400,000				Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			108,400,000	Dan Kebudayaan				
1	1	2	2	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel TK yang diadakan	2 paket	58,580,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 paket	58,580,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	2	2	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan	13200 Eks	214,950,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	13200 Eks	214,950,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	2	2	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga dalam ruangan Siswa TK yang diadakan	6 paket	160,320,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	6 paket	160,320,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga dalam ruangan Siswa TK yang diadakan	28 paket								28 paket		
1	1	2	2	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang menerima Bosda	189 orang	4,170,727,200			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	189 orang	4,170,727,200	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	2	2	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikuti lomba	15 org	76,033,005			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	15 org	76,033,005	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
						Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional	10 org								10 org		
						Jumlah KKG TK yang di bina	23 KKG								23 KKG		
1	1	2	2	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lomba gebyar PAUD yang dilaksanakan	6 lomba	170,405,000			Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	6 lomba	170,405,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	2	2	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah TK yang menerima BOP PAUD	171 sekolah	4,835,474,200			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	171 sekolah	4,835,474,200	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	2	2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kelulusan warga belajar paket A, B, dan C	96.3 %	4,136,358,228							96.3 %	4,136,358,228	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
					Persentase PKBM terakreditasi minimal B	50 %								50 %			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah TUTOR penyelenggara dan pengelola yang dilatih	43 orang	43,558,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	43 orang	43,558,600	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)	60 orang	115,739,628		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	60 orang	115,739,628	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2.2.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP Non Formal/Kesetaraan	8 PKBM	3,977,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	8 PKBM	3,977,060,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				400,000,000						365,000,000	
2.22.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan Kebudayaan Daerah (%)	80 %	170,000,000						80 %	170,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.2.2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengeloalan kebudayaan(%)	80 %	40,000,000						80 %	40,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.2.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek Pemajuan yang di manfaatkan (kegiatan dialog)	2 keg	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 keg	40,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.2.2.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelestarian Kesenian tradisional	80 %	30,000,000						80 %	30,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.2.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek Pemajuan yang di kembangkan (Festival Kebudayaan)	1 even	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 even	30,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.2.2.2	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kab/kota	80 %	100,000,000						80 %	100,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.2.2.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana budaya Daerah yang dibangun/ diadakan	2 unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 unit	100,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.22.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan Kesenian Tradisional (%)	100 %	30,000,000						100 %	30,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.3.2	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase SDM, Lembaga dan Pranata yang di bina	100 %	30,000,000						100 %	30,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.3.2.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni dan Paduan Suara yang dibina dan dikembangkan	25 sanggar seni	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	25 sanggar seni	30,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Sejarah yang di bina	100 %	80,000,000						100 %	60,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.4.2	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sejarah Lokal dalam daerah Kab/Kota yang di bina	100 %	80,000,000						100 %	60,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.4.2.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Presentase Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kab/Kota yang di bina	100 %	40,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	100 %	40,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.4.2.3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Presentase Masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah	50 %	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	50 %	20,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100 %	120,000,000						100 %	105,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.5.2	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Situs, Cagar Budaya yang dilestarikan	1 lokasi	40,000,000						1 lokasi	40,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.5.2.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang di register	2 lokasi	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 lokasi	40,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.22.5.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelestarian Citus, Cagar dan Seni Budaya yang dilestarikan	100 %	80,000,000									Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.5.2.1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang di lindungi	1 lokasi	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 lokasi	25,000,000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.5.2.2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang di kembangkan	1 lokasi	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 lokasi	40,000,000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			174,134,212,990						195,022,183,716			
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	93,338,294,207						100 %	99,537,205,716	Dinas Kesehatan	
										100 %			
1.2.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	16 Dokumen	91,710,361							16 Dokumen	5,098,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ("%)	100 %								100 %		
1.2.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2 Dokumen	20,119,054	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	30,000,000		Dinas Kesehatan
1.2.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dokumen	16,692,110	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	18,000,000		Dinas Kesehatan
1.2.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dokumen	4,102,807	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	5,000,000,000		Dinas Kesehatan
1.2.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10 Dokumen	50,796,390	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	50,000,000		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)	100 %	88,318,271,300						100 %	88,388,243,043	Dinas Kesehatan
		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							100 %		
1.2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	818 Orang	88,138,271,300	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta laporan Keuangan	818 Orang	88,138,243,043	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18 Dokumen	180,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta laporan Keuangan	18 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan	100 %	92,187,960						100 %	85,500,000	Dinas Kesehatan
		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100 %							100 %		
1.2.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	92,187,960	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Laporan barang milik daerah Dinas Kesehatan	4 Dokumen	85,500,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	2400000000 Rp	13,677,960						2400000000 Rp	15,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100 %							100 %		
1.2.1.2.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	13,677,960	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Laporan pendapatan Dinas Kesehatan	4 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	150,884,533						100 %	150,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (steling)	1484 pasang		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan laporan kepegawaian	1484 pasang		Dinas Kesehatan
1.2.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12 Dokumen	85,884,533	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan laporan kepegawaian	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	5 orang	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan laporan kepegawaian	5 orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ("%)	100 %	1,183,775,345						100 %	1,570,300,000	Dinas Kesehatan
		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %							100 %		
1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	5 Jenis	5,835,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan	5 Jenis	7,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	3 Unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan	3 Unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	15 Jenis	4,796,925	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan	15 Jenis	7,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	30,100,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan	3 Jenis	30,100,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	96 Eksamplar	10,200,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan	96 Eksamplar	10,200,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	121 orang	7,425,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan	121 orang	6,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	698 Kali	1,115,417,920	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan	698 Kali	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	15 Unit	1,112,815,500						15 Unit	1,379,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ("%)	100 %							100 %		
1.2.1.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	22,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan	3 Unit	75,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	5 Unit	1,000,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan	5 Unit	1,224,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	3 Unit	20,315,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan	3 Unit	30,000,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	7 Unit	50,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan	7 Unit	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	5 Unit	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan	5 Unit	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2,051,971,248						100 %	2,428,162,673	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	444 Surat	36,371,248	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan gedung kantor Dinas Kesehatan	444 Surat	37,098,673	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	60 Rekening	183,600,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan gedung kantor Dinas Kesehatan	60 Rekening	166,464,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	180 orang	1,832,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur dan gedung kantor Dinas Kesehatan	180 orang	2,224,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	60 Unit	323,000,000						60 Unit	423,000,000	Dinas Kesehatan
					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100 %								100 %		
1	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	23 Unit	189,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kendaraan dinas Operasional dan gedung kantor serta peralatan kerja Dinas Kesehatan	23 Unit	189,800,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	43 Unit	33,200,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kendaraan dinas Operasional dan gedung kantor serta peralatan kerja Dinas Kesehatan	43 Unit	33,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kendaraan dinas Operasional dan gedung kantor serta peralatan kerja Dinas Kesehatan	1 Unit	200,000,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
							Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian Bayi (per 1000 KH) 8.11 per 1000 KH Angka kematian ibu (per 100000 KH) 126,17 per 100000 KH Prevalensi gizi buruk ("%) 0.02 %	8.11 per 1000 KH 126,17 per 100000 KH 0.02 %	75,329,543,083					8.11 per 1000 KH 126,17 per 100000 KH 0.02 %	89,649,300,000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia 176 Buah Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten kota ("%) 70 %	176 Buah 70 %	14,449,769,270				176 Buah 70 %	27,278,700,000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung rumah sakit serta sarana dan prasarana pendukung (Unit) 1 Unit	5,050,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Atue	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana pelayanan kesehatan	1 Unit	10,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah gedung rumah sakit serta sarana dan prasarana pendukung (Unit) 0	0				Sarana pelayanan kesehatan	0	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang di bangun 1 Unit	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana pelayanan kesehatan	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun (Unit) 1 Unit	400,000,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sarana pelayanan kesehatan	1 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan prasarananya (Unit) 3 Unit	200,000,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpanai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana pelayanan kesehatan	3 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang di tingkaykan dan dikembangkan 1 unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana pelayanan kesehatan	1 unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang rehabilitasi dan di pelihara (Unit) 5 Unit	400,000,000	Kab. Luwu Timur, Angkona, Solo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Sarana pelayanan kesehatan	5 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang rehabilitas dan di pelihara (Unit) 1 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana pelayanan kesehatan	1 Unit	250,000,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 2 2 2 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			0					Sarana pelayanan kesehatan		0	Dinas Kesehatan
1 2 2 2 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	4 Unit	650,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana pelayanan kesehatan	4 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan	
						DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar						
1 2 2 2 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki mutu dan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	14 PKM	1,250,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana pelayanan kesehatan	14 PKM	3,500,000,000	Dinas Kesehatan	
						DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar						
1 2 2 2 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat yang kalibrasi dan dipelihara (Unit)	390 Buah	175,210,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana pelayanan kesehatan	390 Buah	178,700,000	Dinas Kesehatan	
						DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1 2 2 2 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	73 %	3,064,201,759	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana pelayanan kesehatan	73 %	3,500,000,000	Dinas Kesehatan	
						DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian						
1 2 2 2 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan bahan medis habis pakai di Puskesmas	77 %	2,507,360,121	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana pelayanan kesehatan	77 %	2,750,000,000	Dinas Kesehatan	
						DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian						
1 2 2 2 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar	76 %	352,997,390	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sarana pelayanan kesehatan	76 %	100,000,000	Dinas Kesehatan	
						DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar (%)	66.04 %	60,764,773,813						66.04 %	62,250,600,000	
1.2.2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (100 %	246,499,549	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	230,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan peayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %	2,590,298,094	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %	30,675,741	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	30,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	70,683,675	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	110,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	62,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	62,500,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (100 %	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	76,500,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (100 %	80,137,405	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	88,600,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung			
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
							Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	2	2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	32,010,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	32,010,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	50,890,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	75,625,698	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	81,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi HIV sesuai standar	100 %	70,866,028	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	54,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase pelayanan kesehatan dasar pada korban pasca bencana	100 %	200,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	275,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil KEK	8.85 %	170,979,054	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	8.85 %	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	100 %	70,188,700	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	49,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	60 %	180,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	60 %	200,000,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase desa / kelurahan yang menerapkan kebijakan germas () Persentase KK yang ber-PHBS ()	25 % 81 %	170,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	25 % 81 %	189,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	mlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Asuhan mandiri kesehatan tradisional dan Akupresur kerjanya	17 PKM	45,279,055	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	17 PKM	46,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	95 %	45,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	95 %	75,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Calon Jamaah Haji yang mendapat pelayanan kesehatan	160 orang	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	160 orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penyakit menular yang di tangani	100 %	470,980,314	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	100 %	685,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD () Persentase Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD Integrasi ()	22.83 % 30.15 %	54,050,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	22.83 % 30.15 %	54,075,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan dana hibah	2 lembaga	400,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas ,kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	2 lembaga	400,000,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.2.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kecamatan yang melaksanakan tatanan sehat	11 kecamatan	125,650,500	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	11 kecamatan	118,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas)	18 sarana	150,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	18 sarana	250,000,000	Dinas Kesehatan
						DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1.2.2.2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang di-akreditasi	11 PKM	975,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	11 PKM	975,000,000	Dinas Kesehatan
						DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas						
1.2.2.2.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	18 PKM	170,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor	18 PKM	200,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase kegawatdaruratan yang tertangani	100 %							100 %		
1.2.2.2.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase data sarana dan prasarana FKTP yang dimutakhirkan ("%)	65 %	45,000,000						65 %	90,000,000	
1.2.2.2.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah data sarana dana prasarana FKTP yang di dokumentasikan (Dokumen)	3 Dokumen	45,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Data sarana kesehatan	3 Dokumen	90,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase surat rekomendasi izin rumah sakit yang diterbitkan ("%)	50 %	70,000,000						50 %	30,000,000	
1.2.2.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah surat rekomendasi izin mendirikan rumah sakit yang diterbitkan	1 Dokumen	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Rumah sakit	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
		Jumlah surat rekomendasi izin operasional rumah sakit yang diterbitkan (Surat)	1 Dokumen							1 Dokumen		
1.2.3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%)	80,86 %	4,746,000,000						80,86 %	5,159,100,000	Dinas Kesehatan
	Pemberian Izin Praktik Tenaga	Jumlah SIK / SIP yang di keluarkan	265 Lembar							265 Lembar		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	2	Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase kepemilikan SIK/ SIP bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan ("%)	100 %	25,000,000						100 %	25,600,000		
1	2	3	2	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah SIK / SIP yang di keluarkan	746 Lembar	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga kesehatan	746 Lembar	25,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase rata - rata distribusi pemerataan sumber daya manusia kesehatan	75 %	4,571,000,000						75 %	4,971,000,000		
1	2	3	2	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga SDM non ASN yang di tempatkan secara merata sesuai kompetensinya (Orang)	239 orang	4,571,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga kesehatan non ASN	239 orang	4,971,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2	Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	10 %	150,000,000						10 %	162,500,000		
					Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya ("%)	100 %		100 %								
1	2	3	2	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga SDM yang ditingkatkan kompetensinya	600 orang	150,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga kesehatan teladan, aparatur	600 orang	162,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan ("%)	68 %	650,375,700						68 %	600,378,000		
1	2	4	2	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan ("%)	95 %	100,401,000						95 %	100,401,000		
					Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	49 %		49 %								
1	2	4	2	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang melakukan pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (Sarana kefarmasian)	52 sarana	100,401,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Apotik dan toko obat	52 sarana	100,401,000	Dinas Kesehatan
										DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	2	4	2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	40 %	549,974,700						40 %	499,977,000		
					Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan ("%)	42 %		42 %								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
							Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	4	2	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	Jumlah sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan (Sarana IRTP)	75 sarana	549,974,700	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	PIRT	75 sarana	499,977,000	Dinas Kesehatan	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif ("%")	0 [?]	70,000,000						0 [?]	76,200,000	Dinas Kesehatan	
1	2	5	2		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa)	127 Desa	70,000,000						127 Desa	76,200,000		
1	2	5	2	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah posyandu aktif (Posyandu)	272 Posyandu	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	UKBM	272 Posyandu	76,200,000		Dinas Kesehatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,597,001,792							0		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	[?] Angka kematian bayi (per 1000 KH) Angka kematian ibu (per 100000 KH) Prevalensi gizi buruk	0 [?] 8.11 per 1000 KH 126,17 per 100000 KH 0.02 %	2,597,001,792						0 [?] 0 [?] 8.11 per 1000 Kh 126.17 per 100000KH		0	Dinas Kesehatan
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar	1 PKM	2,597,001,792						1 PKM	0		
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas Persentase pengelolaan dana non kapitasi di Puskesmas	100 % 100 %	1,494,416,575	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %			0	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat izin operasional	1 PKM	1,102,585,217	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	1 PKM			0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
						DAK Non Fisik - BOKKB - BOK										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2			3,622,194,872							4,900,000,000					
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	[?] Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu (Per 100000 KH) Prevalensi Gizi Buruk (%)	0 [?] 8.11 Per 1000 KH 126.17 Per 100000 KH 0.02 %	3,622,194,872					0 [?] 8.11 Per 1000 KH 126.17 Per 100000 KH 0.02 %	4,900,000,000	Dinas Kesehatan			
1	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar	1 Pkm	3,622,194,872				1 Pkm	4,900,000,000	Dinas Kesehatan			
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas Persentase Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas	100 % 100 %	2,100,000,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 % 100 %	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Mendapat Izin Operasional	1 Pkm	1,522,194,872	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1 Pkm	1,900,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2			3,402,568,165							4,500,000,000					
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	[?] Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) Angka Kematian Ibu (per 100000 KH) Prevalensi gizi buruk (%)	0 [?] 8.11 per 1000 KH 126,17 per 100000 KH 0.02 %	3,402,568,165					0 [?] 0 [?] 8.11 per 1000 KH 126.17 per 100000 KH	4,500,000,000	Dinas Kesehatan			
1	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar	1 PKM	3,402,568,165					1 PKM	4,500,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
							Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas	66.04 %	1,790,850,635	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	66.04 %	4,500,000,000	Dinas Kesehatan	
						Persentase pengelolaan dana nonkapitasi di Puskesmas	100 %							100 %			
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat izin operasional	1 PKM	1,611,717,530	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1 PKM	2,000,000,000	Dinas Kesehatan	
										Lain-lain PAD Yang Sah							
										DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,842,260,624	3,400,000,000				
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi (Per 1000 KH)	0.81 Per 1000 kh	2,842,260,624							0.81 Per 1000 kh	3,400,000,000	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Ibu (Per 100000 Kh)	126.17 Per 100000 Kh								126.17 Per 100000 Kh			
					Prevalensi Gizi Buruk (%)	0.02 %								0.02 %			
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai Standar.	1 PKM	2,842,260,624						1 PKM	3,400,000,000		
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persentase pengelolaan dana kapitasi di puskesmas	100 %	1,652,352,733	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten kota	100 %	1,900,000,000	Dinas Kesehatan	
						persentase pengelolaan dana Non kapitasi di puskesmas	100 %							100 %			
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah puskesmas yang mendapatkan izin operasional	1 PKM	1,189,907,891	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten kota	1 PKM	1,500,000,000	Dinas Kesehatan	
										LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
										DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,549,790,232	2,950,000,000				
					Angka Kematian Bayi (per 1000KH)	8.11 per 1000 Kh								8.11 per 1000 Kh			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (per 100000 KH)	126.17 per 100000 KH	2,549,790,232					126.17 per 100000 KH	2,950,000,000	Dinas Kesehatan			
				Prevalensi Gizi Buruk (%)	0.02 %						0.02 %					
1	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar	66.04 %	2,549,790,232				66.04 %	2,950,000,000				
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1,251,653,745				Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota	1,450,000,000	Dinas Kesehatan			
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		1,298,136,487	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota	1,500,000,000	Dinas Kesehatan			
							PENDAPATAN TRANSFER									
							LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH									
							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,513,335,432	3,200,000,000			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	8.11 Per 1000 KH	2,513,335,432						8.11 Per 1000 KH	3,200,000,000	Dinas Kesehatan		
				Angka Kematian Ibu (Per 100000 KH)	126.17 Per 100000 KH							126.17 Per 100000 KH				
				Prevalensi Gizi Buruk	0.02 %							0.02 %				
1	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang Melakukan Pelayanan UKM dan UKP Sesuai Standar (%)	66.04 %	2,513,335,432					66.04 %	3,200,000,000			
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas	100 %	1,196,269,400	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	1,400,000,000	Dinas Kesehatan
					Persentase Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas	100 %	100 %									
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Mendapat Izin Operasional	1 PKM	1,317,066,032	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1 PKM	1,800,000,000	Dinas Kesehatan
														PENDAPATAN TRANSFER		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
						DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Berdaya Saing		Kabupaten/Kota							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2			3,163,148,086							4,226,321,500					
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	[?]	0 [?]	3,163,148,086				0 [?]	4,226,321,500	Dinas Kesehatan			
1	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar	1 PKM	3,163,148,086				1 PKM	4,226,321,500				
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persentase pengelolaan dana kapitasi di puskesmas	100 %	1,908,599,950	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota.	100 %	2,420,321,500	Dinas Kesehatan
					persentase pengelolaan dana Non kapitasi di puskesmas	100 %							100 %			
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah puskesmas yang mendapatkan izin operasional	1 pkm	1,254,548,136	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota.	1 pkm	1,806,000,000	Dinas Kesehatan
										DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2			2,044,735,290								2,505,800,000				
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar	66.04 %	2,044,735,290					66.04 %	2,505,800,000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar	1 PKM	2,044,735,290					1 PKM	2,505,800,000			
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas	100 %	855,850,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	100 %	1,005,800,000	Dinas Kesehatan
					Persentase Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas	100 %								100 %		
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Mendapat Izin Operasional	1 PKM	1,188,885,290	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 PKM	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
									Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
									Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Pantai								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
				1,883,612,507							2,460,000,000		
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	8.11 per 1000	1,883,612,507							8.11 per 1000	2,460,000,000	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu (Per 1000 KH)		126.17 Per 1000	126.17 Per 1000										
Prevalensi Gizi Buruk (%)		0.02 %	0.02 %										
1 2 2 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP Yang Melakukan Pelayanan UKM dan UKP Sesuai Standar	1 PKM	1,883,612,507							1 PKM	2,460,000,000	
1 2 2 2 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas	100 %	501,905,102	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota	100 %	860,000,000	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pengelolaan Dana Nonkapitasi di Puskesmas	100 %		Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpanai					100 %			
1 2 2 2 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat izin operasional	1 PKM	1,381,707,405	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota	1 PKM	1,600,000,000	Dinas Kesehatan	
					Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpanai					Lain-lain PAD Yang Sah			
										DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
				3,696,997,795							4,820,000,000		
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi (per 1000 KH)	8.11 per 1000	3,696,997,795							8.11 per 1000	4,820,000,000	Dinas Kesehatan
Angka kematian ibu (per 100000 KH)		126.17 Per 1000	126.17 Per 1000										
Prevalensi gizi buruk (%)		0.02 %	0.02 %										
1 2 2 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai	1 PKM	3,696,997,795							1 PKM	4,820,000,000	
1 2 2 2 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			2,317,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten kota		2,320,000,000	Dinas Kesehatan	
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan izin operasional	1 PKM		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	2) Peningkatan	Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	1 PKM		Dinas	
				Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	Lain-lain PAD Yang Sah								
				Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		1,379,997,795	Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	kualitas sumber daya manusia	untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten kota		2,500,000,000	Dinas Kesehatan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,034,080,743						2,680,000,000			
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	[?] Angka kematian bayi (per 1000 KH) angka kematian ibu (per 100000 KH) Prevalensi gizi buruk (%)	0 [?] 8.11 per 1000 126.17 Per 1000 0.02 %					0 [?] 8.11 per 1000 126.17 Per 1000 0.02 %	2,680,000,000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai Standar	1 PKM	2,034,080,743					1 PKM	2,680,000,000		
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas Persentase pengelolaan dana non kapitasi di Puskesmas	100 % 100 %	732,001,200	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Pasipasi	PENDAPATAN TRANSFER Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten kota	100 % 100 %	840,000,000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat izin operasional	1 PKM	1,302,079,543	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Pasipasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten kota	1 PKM	1,840,000,000	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,773,986,161						2,900,000,000			
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	[?] Angka Kematian Bayi (1000 KH) Angka Kematian Ibu (Per 100000 KH) Prevelensi Gizi Buruk (%)	0 [?] 8.11 Per 1000 Kh 126.17 Per 100000 KH 0.02 %	2,773,986,161					0 [?] 8.11 Per 1000 Kh 126.17 Per 100000 KH 0.02 %	2,900,000,000	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 2 2 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang Melakukan Pelayanan UKM dan UKP Sesuai Standart	1 PKM	2,773,986,161							1 PKM	2,900,000,000	
1 2 2 2 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas	100 %	1,448,986,161	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Ledu Ledu	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota	100 %	1,500,000,000	Dinas Kesehatan	
	Persentase Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas	100 %											
1 2 2 2 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Ijin Operasional	1 PKM	1,325,000,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Ledu Ledu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota	1 PKM	1,400,000,000	Dinas Kesehatan	
					Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Tabarano	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							
					Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda								
					Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Balambano								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	8.11 Per 1000 KH	2,398,932,594						8.11 Per 1000 KH	3,200,000,000	Dinas Kesehatan	
		Angka Kematian Ibu (Per 100000 KH)	126.17 Per 100000 KH							126.17 Per 100000 KH			
		Prevalensi Gizi Buruk	0.02 %							0.02 %			
1 2 2 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar	1 PKM	2,398,932,594						1 PKM	3,200,000,000		
1 2 2 2 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pengelolaan dana kapitasi dipuskesmas	100 %	1,200,000,000		PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten kota	100 %	1,200,000,000	Dinas Kesehatan	
		Persentase pengelolaan dana non kapitasi dipuskesmas	100 %										
1 2 2 2 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapat izin operasional	100 %	1,198,932,594	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten kota	100 %	2,000,000,000	Dinas Kesehatan	
						DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
				2,964,525,402							3,373,916,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung						
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
							Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	100%	2,964,525,402					100%	3,373,916,000	Dinas Kesehatan					
1	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP Yang Melakukan Pelayanan UKM dan UKP sesuai Standar	1 PKM	2,964,525,402				1 PKM	3,373,916,000						
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas	100 %	1,303,277,998	Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan				
				Persentase Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas	100 %													
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang mendapat Izin Operasional	1 PKM	1,661,247,404	Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan				
									Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya	PENDAPATAN TRANSFER								
									Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK								
									Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka									
								Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,390,389,858						
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	[?]	0 [?]	1,913,431,575							Dinas Kesehatan					
			Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	0 [?]	0 [?]													
			Prevelensi gizi buruk (%)	0 [?]	0 [?]													
1	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Puskesmas	1,913,431,575							Dinas Kesehatan					
			Angka Kematian Bayi 9per 1000 KH)	1 Puskesmas														
			Angka Kematian Ibu (per 100000 KH)	8.11 Per 1000kh														
			Prevelensi gizi buruk (%)	126.17 per 100000 KH														
				persentase pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat	100 %		Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan	2) Peningkatan	layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
							Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 2 2 2 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			630,389,858	Kab. Luwu Timur, Towuti, Pekalooa		Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten Luwu Timur		790,389,858	Dinas Kesehatan		
1 2 2 2 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	persentase puskesmas yang mendapat izin operasioanal	1 puskesmas	1,283,041,717	Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu Kab. Luwu Timur, Towuti, Pekalooa Kab. Luwu Timur, Towuti, Matompi	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten Luwu Timur	1 puskesmas	1,600,000,000	Dinas Kesehatan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,952,609,599								2,200,000,000		
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	100%	1,952,609,599								100%	2,200,000,000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,952,609,599									2,200,000,000	
1 2 2 2 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pengelolaan dana kapitasi di puskesmas Persentase pengelolaan dana nonkapitasi di Puskesmas	100 % 100 %	952,609,599	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona Kab. Luwu Timur, Towuti, Tole Kab. Luwu Timur, Towuti, Libukan Mandiri Kab. Luwu Timur, Towuti, Kalosi Kab. Luwu Timur, Towuti, Buangin	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		100 % 100 %	1,000,000,000	Dinas Kesehatan		
1 2 2 2 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat izin operasional	1 Puskesmas	1,000,000,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona Kab. Luwu Timur, Towuti, Tole Kab. Luwu Timur, Towuti, Libukan Mandiri Kab. Luwu Timur, Towuti, Kalosi Kab. Luwu Timur, Towuti, Buangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Puskesmas	1,200,000,000	Dinas Kesehatan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,302,312,592								3,000,000,000		
		Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	8.11 per 1000 KH									8.11 per 1000 KH		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung							
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
							Nasional	Daerah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (Per 100000 KH)	126.17 Per 100000 KH	2,302,312,592					126.17 Per 100000 KH	3,000,000,000	Dinas Kesehatan						
				Prevalensi Gizi Buruk (%)	0.02 %						0.02 %								
1	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang melakukan Pelayanan UKM dan UKP sesuai Standard	1 Puskesmas	2,302,312,592				1 Puskesmas	3,000,000,000							
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas	100 %	1,024,169,736	Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100 %	1,500,000,000	Dinas Kesehatan			
					Persentase pengelolaan dana nonkapitasi di Puskesmas	100 %													
									Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang										
									Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku										
									Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin										
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang mendapat Ijin Operasional	1 Puskesmas	1,278,142,856	Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1 Puskesmas	1,500,000,000	Dinas Kesehatan			
									Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK									
									Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang										
									Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku										
									Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,462,538,792	2,200,000,000						
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	porsentase pemenuhan upaya kesehatan pererangan dan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama	100 %	2,462,538,792							100 %	2,200,000,000	Dinas Kesehatan				
				Porsentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama	100 %														
1	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 %	2,462,538,792						100 %	2,200,000,000	Dinas Kesehatan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2.2.2.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persentase pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi di puskesmas	100 %	1,062,538,792	Kab. Luwu Timur, Burau, Bonepute	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	layanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 %	1,100,000,000	Dinas Kesehatan	
1.2.2.2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah puskesmas yang mendapat izin operasional	1 PKM	1,400,000,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Bonepute	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	layanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	1 PKM	1,100,000,000	Dinas Kesehatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				116,413,836,342							151,687,349,002		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	107,741,512,342						100 %	129,382,225,234	RSUD I LAGALIGO	
1.2.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	36,075,000						100 %	40,000,000		
		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100 %							100 %			
1.2.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	8 Dokumen	25,370,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara	8 Dokumen	20,000,000	RSUD I LAGALIGO	
1.2.1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP rumah sakit (dokumen)	1 Dokumen	10,705,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	20,000,000	RSUD I LAGALIGO	
1.2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100 %	26,753,736,342						100 %	29,221,376,934	RSUD I LAGALIGO	
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							100 %			
1.2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	217 Orang	26,745,236,342	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit	217 Orang	29,211,376,934	RSUD I LAGALIGO	
1.2.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	7 Dokumen	8,500,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit	7 Dokumen	10,000,000	RSUD I LAGALIGO	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani (%)	100 %	0					100 %	13,000,000			
1	2	1	2.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana disiplin pegawai (%)	5 %	0	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur Sipil Negara	5 %	0	RSUD I LAGALIGO
1	2	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan (pasang)	614 Pasang	0	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara	614 Pasang	13,000,000	RSUD I LAGALIGO
1	2	1	2.1									5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
1	2	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (%)	70 %	8,000,000							70 %	8,000,000	
1	2	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip aktif dan non aktif	5 Jenis	8,000,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	5 Jenis	8,000,000	RSUD I LAGALIGO
1	2	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi (%)	100 %	0							100 %	291,030,000	
1	2	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	124 Unit	0	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	124 Unit	291,030,000	RSUD I LAGALIGO
1	2	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (%)	100 %	7,518,600,000							100 %	8,835,551,015	
1	2	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	434 Orang	7,518,600,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	434 Orang	8,835,551,015	RSUD I LAGALIGO
1	2	1	2.1									5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
1	2	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara dengan baik (%)	100 %	0							100 %	310,305,980	
1	2	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	119 Unit	0	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	119 Unit	310,305,980	RSUD I LAGALIGO
1	2	1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD yang berjalan dengan Baik (%)	9 %	73,425,101,000						9 %	90,662,961,305	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Tingkat Pelayanan BLUD	70 %							70 %		
1 2 1 2.1 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan pelayanan & penunjang pelayanan BLUD (%)	55.55 %	73,425,101,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Luwu Timur	55.55 %	90,662,961,305	RSUD I LAGALIGO
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	30 %	8,422,324,000						30 %	21,378,123,768	RSUD I LAGALIGO
1 2 2 2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit (%)	85 %	5,250,000,000						85 %	10,551,883,868	RSUD I LAGALIGO
1 2 2 2 5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang dibangun/ dikembangkan (unit)	4 Unit	1,000,000,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Luwu Timur	4 Unit	422,004,753	RSUD I LAGALIGO
1 2 2 2 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana rumah sakit (Unit)	1 Unit	250,000,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Luwu Timur	1 Unit	2,120,000,000	RSUD I LAGALIGO
1 2 2 2 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/ Kedokteran rumah sakit (unit)	238 Unit	4,000,000,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Luwu Timur	238 Unit	5,957,995,247	RSUD I LAGALIGO
1 2 2 2 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yang dipelihara (unit)	30 Unit	0	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Luwu Timur	30 Unit	668,143,670	RSUD I LAGALIGO
1 2 2 2 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana yang dipelihara (Unit)	7 Unit	0	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Luwu Timur	7 Unit	688,907,960	RSUD I LAGALIGO
1 2 2 2 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	441 Unit	0	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Luwu	441 Unit	604,837,738	RSUD I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	20	Kesehatan/ Alat/ Meningkatkan/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Timur		9,853,239,900	LAGALIGO	
1	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan yang dilayani (%) Terlaksananya layanan kesehatan rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya layanan spesialis dirumah sakit (%)	100 % 98 % 100 %	3,022,324,000				100 % 98 % 100 %	9,853,239,900	RSUD I LAGALIGO	
1	2	2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Mou kemitraan rumah sakit (Spesialis)	10 Spesialis	3,022,324,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Luwu Timur	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	10 Spesialis	9,853,239,900	RSUD I LAGALIGO
1	2	2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya Data dan Informasi Kesehatan Pada Sistem Informasi Rumah Sakit Tersedianya SIM-RS yang efektif dan terintegrasi (%)	1 Tahun 85 %	150,000,000					1 Tahun 85 %	973,000,000	RSUD I LAGALIGO
1	2	2	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya data rumah sakit sesuai standar dan tepat waktu (%)	100 %	150,000,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	100 %	623,000,000	RSUD I LAGALIGO
1	2	2	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terlaksananya pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan rumah sakit (%)	100 %	0	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	100 %	350,000,000	RSUD I LAGALIGO
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	[?] Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDM Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDM (%) Persentasi tenaga kesehatan mengikuti pelatihan/ bimtek (%)	0 [?] 0 % 0 [?] 0 [?]	250,000,000					0 [?] 0 % 0 [?] 0 [?]	927,000,000	RSUD I LAGALIGO
1	2	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Persentasi tenaga kesehatan mengikuti pelatihan atau bimtek (%)	135 Orang 100 %	250,000,000					135 Orang 100 %	927,000,000	RSUD I LAGALIGO
1	2	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ bimtek/ inhouse training (Orang)	208 Orang	250,000,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	208 Orang	927,000,000	RSUD I LAGALIGO
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			182,857,700,403							182,767,700,403	
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	12,741,387,869							12,741,387,869	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			165,845,418							165,845,418	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	23,947,956		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 Dokumen	23,947,956	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	16 Dokumen	41,897,462		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		16 Dokumen	41,897,462	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,098,073,993							9,098,073,993	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	88 Orang	9,023,073,993		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		88 Orang	9,023,073,993	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		18 Dokumen	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			34,439,055							34,439,055	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	34,439,055		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		4 Dokumen	34,439,055	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			240,258,044							240,258,044	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	135 Pasing	87,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		135 Pasing	87,850,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi yang dimuktahirkan	2 Kali	23,978,044		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 Kali	23,978,044	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti workshop, seminar perundang-undangan	5 Aparatur	13,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		5 Aparatur	13,690,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, perundangan-undangan	13 Aparatur	114,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		13 Aparatur	114,740,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			679,920,050							679,920,050	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	46 Buah	3,583,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		46 Buah	3,583,150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	10 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		10 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	29 Jenis	26,163,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		29 Jenis	26,163,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	28,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		7 Jenis	28,125,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	72 buah	15,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		72 buah	15,840,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan/minum yang disiapkan	560 Kotak	20,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		560 Kotak	20,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	100 Kali	435,608,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100 Kali	435,608,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,169,239,600							1,169,239,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	3 Unit	61,699,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 Unit	61,699,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat berat (Tandem Roller) yang diadakan	1 Unit	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Unit	900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	142 Unit	184,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			142 Unit	184,940,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	26 Unit	22,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		26 Unit	22,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			349,234,509							349,234,509	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diagendakan	800 Surat	16,835,657		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		800 Surat	16,835,657	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	96 Rekening	89,398,852		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		96 Rekening	89,398,852	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	19 Orang	243,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		19 Orang	243,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,004,377,200							1,004,377,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	18 Kendaraan	186,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		18 Kendaraan	186,090,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	2 Kendaraan	109,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 Kendaraan	109,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	5 Alat	556,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		5 Alat	556,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang dipelihara	73 Buah	68,837,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		73 Buah	68,837,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	1 Gedung	83,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Gedung	83,850,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			27,993,067,921							27,993,067,921	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			12,897,859,897							12,897,859,897	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.9	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang di bangun	0.13 KM	539,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		0.13 KM	539,999,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang di bangun	1.37 KM	7,171,346,578		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.37 KM	7,171,346,578	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang di bangun	1 KM	444,319,545		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 KM	444,319,545	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang di bangun	0.076 KM	2,089,200,074		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		0.076 KM	2,089,200,074	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.2.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang di pelihara	0.08 KM	323,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		0.08 KM	323,999,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang di pelihara	0.108 KM	539,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0.108 KM	539,999,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang di pelihara	1 Unit	107,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Unit	107,990,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang di pelihara	0.025 KM	324,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		0.025 KM	324,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang di Normalisasi	53.4 KM	1,357,005,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				53.4 KM	1,357,005,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			15,095,208,024							15,095,208,024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.3	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang di bangun	2 Unit	1,524,828,912		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 Unit	1,524,828,912	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	3 Km	10,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 Km	10,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.2.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang di rehabilitasi	2.6 KM	1,702,259,787		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2.6 KM	1,702,259,787	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang di pelihara	0.45 KM	1,055,335,055		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		0.45 KM	1,055,335,055	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang di pelihara	5 Unit	710,096,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		5 Unit	710,096,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Laporan Informasi Musim Tanam	2 Laporan	92,674,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 Laporan	92,674,640	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.2.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Laporan Informasi Musim Tanam	2 Laporan	10,013,630		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 Laporan	10,013,630	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			9,916,965,928							9,916,965,928	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			9,916,965,928							9,916,965,928	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen aatabase air Iminum	1 Dokumen	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Dokumen	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.3.2.4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perdesaan yang dibangun	3 SPAM	659,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 SPAM	659,225,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2.5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan	1 SPAM	839,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 SPAM	839,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2.6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang ditingkatkan	8 SPAM	2,092,922,998		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		8 SPAM	2,092,922,998	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan SPAM yang Terlaksana	1 Kegiatan	75,057,930		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Kegiatan	75,057,930	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM			50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan			800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.2.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Akses (SR) melalui SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	1500 SR	3,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1500 SR	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			850,001,646							850,001,646	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.4.2	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			850,001,646							850,001,646	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.4.2.3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/-3R/TPS yang dibangun	1 Unit	150,001,646		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Unit	150,001,646	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.4.2.4	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dipelihara	1 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.4.2.6	Penyediaan Sarana Persampahan	jumlah sarana persampahan yang diadakan	2 Unit	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.4.2.8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			15,218,458,444							15,218,458,444	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.5.2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			15,218,458,444							15,218,458,444	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.5.2.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen database air limbah domestik	1 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.5.2.6	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah yang dibangun	1500 SR	13,818,458,444		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1500 SR	13,818,458,444	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik							
1.3.5.2.7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik			100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.5.2.9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik			50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.5.2.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			300,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.5.2.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah kontainer sampah yang diadakan	1 Unit	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah motor sampah yang diadakan	1 Unit			1 Unit						
		Jumlah tempat sampah terpilah	1 Unit			1 Unit						
		Jumlah truk sampah yang diadakan	1 Unit			1 Unit						
1.3.5.2.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			2,000,000,000							2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.6.2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			2,000,000,000							2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.6.2.2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan			300,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.6.2.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang dibangun	2.3379 km	1,500,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2.3379 km	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.6.2.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang dipelihara	0.1 Km	200,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0.1 Km	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			500,000,000							500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.7.2	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			500,000,000							500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.7.2.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang diadakan	35 Unit	500,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	35 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			8,877,674,370							8,877,674,370	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 3 8 2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			8,877,674,370							8,787,674,370	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 8 2 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi IMB yang diberikan oleh Pemda	20 IMB	60,734,370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		20 IMB	60,734,370	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 8 2 3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung Kabupaten yang disusun	1 Dokumen	16,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	16,940,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 8 2 4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dibangun	1 Unit	8,700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Unit	8,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 8 2 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara	1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Unit	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			27,697,948,500							27,697,948,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 9 2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			27,697,948,500							27,697,948,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 9 2 3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan publik yang dibangun	3 Unit	27,319,248,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan		3 Unit	27,319,248,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah RTH publik yang ditata	3 Unit							3 Unit		
1 3 9 2 4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan publik yang dipelihara	1 Unit	378,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan		1 Unit	378,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah RTH publik yang dipelihara	1 Unit							1 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			74,502,768,572							74,502,768,572	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 10 2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			74,502,768,572							74,502,768,572	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 10 2 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			250,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 10 2 4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			100,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 10 2 5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan Aspal	10 KM	59,135,563,707		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			10 KM	59,135,563,707	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan beton	3 KM	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3 KM							
	Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan kerikil	5 KM			5 KM							
1 3 10 2 6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan-Aspal	1 KM	8,499,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 KM	8,499,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Panjang jalan yang dilebarkan-Beton	1 KM			1 KM							
	Panjang jalan yang dilebarkan-Kerikil	1 KM			1 KM							
1 3 10 2 9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	2 KM	498,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 KM	498,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 3 10 2 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	4 Unit	5,092,454,865		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		4 Unit	5,092,454,865	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 10 2 17	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang dilebarkan	1 Unit	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 10 2 18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	2 Unit	427,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			2 Unit	427,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			499,076,430							499,076,430	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 11 2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			200,000,000							200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 11 2 4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga teknis yang bersertifikat	100 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100 Orang	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 11 2 6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi			50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 11 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			54,772,344							54,772,344	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.11.2.1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan SIPJAKI yang di Update	5 Layanan	54,772,344		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		5 Layanan	54,772,344	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.11.2	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			110,453,286							110,453,286	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.11.2.2	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah tenaga teknis penyedia yang dilatih	100 Orang	50,863,386		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100 Orang	50,863,386	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.11.2.3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi	200 Orang	59,589,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		200 Orang	59,589,900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.11.2	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			133,850,800							133,850,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.11.2.2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Jasa Konstruksi yang di awasi	50 Paket	58,850,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		50 Paket	58,850,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.11.2.3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pekerjaan konstruksi yang diawasi	200 Paket	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		200 Paket	75,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			2,060,350,723							2,060,350,723	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.12.2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			1,740,123,610							1,740,123,610	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.12.2.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perbup RDTR yang di hasilkan	2 Dokumen	344,783,610		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 Dokumen	344,783,610	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.12.2.3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen RRTR yang di hasilkan	2 Dokumen	1,395,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 Dokumen	1,395,340,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.12.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			10,208,160							10,208,160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.12.2.3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi yang di laksanakan	2 Kali	10,208,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 Kali	10,208,160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.12.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			70,490,000							70,490,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.12.2.2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Papan Hibauan/Papan Informasi Penataan Ruang	8 Unit	70,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		8 Unit	70,490,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.12.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			239,528,953							239,528,953	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.12.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pengawasan Penataan Ruang yang di hasilkan	4 Laporan	53,667,703		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		4 Laporan	53,667,703	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.12.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Keterangan Kesesuaian Ruang yang di terbitkan	25 Surat	185,861,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		25 Surat	185,861,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7,012,990,943						30,158,660,000		
1.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	5,748,490,943							8,982,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,000,000							130,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	3 dokumen	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 dokumen	25,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 dokumen	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 dokumen	25,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 dokumen	25,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		10 dokumen	55,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,775,264,693							3,060,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjagannya terbayarkan	22 pegawai	2,725,344,693	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		22 pegawai	3,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 dokumen	49,920,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		18 dokumen	60,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13,624,020							14,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 dokumen	13,624,020	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		4 dokumen	14,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			1,000,000							1,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen laporan pengelolaan retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	1,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		4 dokumen	1,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			108,646,072							270,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	55 Paket	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		55 Paket	35,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	12 %	24,661,518	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		12 %	25,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI	5 Orang	24,661,518	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		5 Orang	70,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 orang	24,661,518	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		5 orang	70,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	22 Orang	24,661,518	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		22 Orang	70,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			159,610,100							438,500,000	
1.4.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	4,056,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 Jenis	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	24,305,100	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 Unit	25,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.2.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1,000,000				3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			1,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 jenis	8,521,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		20 jenis	15,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 Jenis	25,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	72 eksemplar	7,740,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		72 eksemplar	8,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	100 Orang	8,988,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100 Orang	9,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	451 Kali	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		451 Kali	350,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	245,000,000							752,000,000	
1.4.1.2.1.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 unit	27,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2 unit	200,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 unit	600,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 unit	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		5 unit	60,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 unit	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		4 unit	65,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,236,356,058							4,118,500,000	
1.4.1.2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	500 surat	3,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		500 surat	3,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang terbayarkan	3 Rekening	2,118,756,058	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 Rekening	4,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum	9 orang	114,600,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		9 orang	115,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168,990,000							198,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	51,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		13 unit	55,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	57,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 Unit	60,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	57 unit	50,990,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		57 unit	51,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		2 unit	32,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	100%	453,500,000						100%	2,060,080,000	
1.4.2.2	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			20,000,000							50,000,000	
1.4.2.2.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	4 laporan	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		4 laporan	25,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.2.2.6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dimanfaatkan sebagai bahan Informasi perumahan	4 laporan	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		4 laporan	25,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.2.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			250,000,000							1,719,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.2.2.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	100 %	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100 %	109,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.2.2.4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase rumah korban bencana yang dibangun	100 %	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100 %	1,100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.2.2.5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah khusus bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun	100 %	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100 %	510,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.2.2.1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			166,500,000							235,000,000	
1.4.2.2.1.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola	8 lokasi	166,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		8 lokasi	235,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.2.2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			17,000,000							56,080,000	
1.4.2.2.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang diterbitkan	3 rekomendasi	17,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 rekomendasi	56,080,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio rumah layak huni	17,74	599,000,000							4,060,000,000	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100%									
1.4.3.2	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			42,000,000							140,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.3.2.2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun	1 dokumen	17,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 dokumen	110,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.3.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi	4 kegiatan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		4 kegiatan	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			557,000,000							3,920,000,000	
1.4.3.2.1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Master Plan Peremajaan/Pemugaran Permukiman	3 dokumen	10,000,000				3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 dokumen	310,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.3.2.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	200 Unit	500,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		200 Unit	510,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.3.2.6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan kabupaten	3 kawasan	47,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 kawasan	3,100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			20,000,000							56,080,000	
1.4.4.2	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000							56,080,000	
1.4.4.2.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh diluar kawasan pemukiman kumuh	200 unit	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		200 unit	56,080,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			192,000,000							15,000,000,000		
1 4 5 2	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			192,000,000							15,000,000,000		
1 4 5 2 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU	10 Lingkungan	192,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		10 Lingkungan	15,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			5,828,732,250								12,756,000,000	
2 10 4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			15,000,000							53,000,000		
2 10 4 2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			15,000,000							53,000,000		
2 10 4 2 2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus yang ditangani	5 kasus	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		5 kasus	53,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2 10 5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			5,250,000,000							12,000,000,000		
2 10 5 2	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5,250,000,000							12,000,000,000		
2 10 5 2 1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n	330 m2	5,250,000,000				3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		330 m2	12,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2 10 8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			50,000,000							165,000,000		
2 10 8 2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			50,000,000							165,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.8.2.1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana (papan pengumuman / patok batas)	15 bidang	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		15 bidang	165,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			15,000,000							38,000,000	
2.10.9.2	Penerbitan Izin Membuka Tanah			15,000,000							38,000,000	
2.10.9.2.2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	jumlah izin lokasi yang ditangani	3 izin	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3 izin	38,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			498,732,250							500,000,000	
2.10.10.2	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			498,732,250							500,000,000	
2.10.10.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Luas lahan bersertifikat yang difasilitasi	5300000 m2	498,732,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		5300000 m2	500,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	5,772,201,012						100 persen	8,538,525,100	
1.5.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 persen	114,783,705						100 persen	126,262,062	
1.5.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu	2 dokumen	29,783,705	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	2 dokumen	32,762,062	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	3 Dokumen	27,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat waktu	8 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	8 Dokumen	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 persen	4,611,432,657						100 persen	5,303,179,923	
1.5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	43 Orang	4,539,472,657	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	43 Orang	5,224,023,923	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Honorariumnya	4 Orang	36,960,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	4 Orang	40,656,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	12 Dokumen	2,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	4 Dokumen	2,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	1 Dokumen	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	16,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tanggapan pemeriksaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	12 Dokumen	11,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 Dokumen			2 Dokumen						
		Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen			4 Dokumen						
1.5.1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100 persen	19,150,000						100 persen	22,065,000	
1.5.1.2.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun Tepat waktu	2 dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	2 dokumen	2,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang disusun Tepat waktu	1 dokumen	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 dokumen	6,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun tepat Waktu	12 Dokumen	11,650,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	12 Dokumen	12,815,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persePersentase Pegawai PD yang dilayani	100 persen	215,880,000						100 persen	237,468,000	
1.5.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas	266 orang	133,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	266 orang	146,300,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	4 dokumen	7,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	4 dokumen	8,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pegawai yang disusun	12 Dokumen	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	12 Dokumen	16,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sesuai tugas dan fungsi	18 orang	23,100,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	18 orang	25,410,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	43 Orang	6,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	43 Orang	6,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	31,280,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	4 orang	34,408,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 persen	298,554,000						100 persen	328,409,400	
1.5.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	200 buah	7,149,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	200 buah	7,864,450	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	169 buah	10,048,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	169 buah	11,052,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan Logistik Kantor yang disediakan	11 jenis	5,656,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	11 jenis	6,222,150	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	11,400,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	10 jenis	12,540,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60 eksemplar	7,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	60 eksemplar	8,580,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	100 orang	6,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	100 orang	7,150,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan/diikuti	300 kali	250,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	300 kali	275,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 persen	192,065,650						100 persen	2,155,272,215	
1.5.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	20 unit	57,065,650	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	20 unit	62,772,215	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	2,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 unit	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	75,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 Unit	82,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 persen	95,000,000						100 persen	118,000,000	
1.5.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2500 Surat	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	2500 Surat	5,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik, dan Air yang terbayarkan setiap bulan	36 rekening	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	36 rekening	82,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor	1 orang	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 orang	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 persen	225,335,000						100 persen	247,868,500	
1.5.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	15,100,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 unit	16,610,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 5 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 unit	120,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	30 unit	132,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 unit	31,460,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	100 unit	34,606,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.1 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1 unit	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 unit	22,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit	24,375,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	2 unit	26,812,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/terehabilitasi	7 jenis	14,400,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	7 jenis	15,840,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100 persen	6,557,987,645						100 persen	7,213,786,410	
1 5 2 2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umu yang tertangani	100 persen	6,315,882,894						100 persen	6,947,471,184	
1 5 2 2 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	8030 kali	5,524,740,895	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	8030 kali	6,077,214,985	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani	448 Gangguan	75,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	448 Gangguan	82,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah rapat Koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tingkat kabupaten yang dilaksanakan	4 kali	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	4 kali	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.2.2.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa/Kelurahan dengan Satlinmas aktif (desa/kelurahan)	127 Satuan	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	127 Satuan	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP dan Satgas Linmas yang mengikuti pelatihan	266 Orang	303,641,999	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	266 Orang	334,006,199	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kerjasama (MoU) Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	2 Dokumen	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	2 Dokumen	27,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Trantibum yang diadakan Jumlah Sarana dan Prasarana Trantibum yang dipelihara	100 unit 100 unit	275,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	100 unit 100 unit	302,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun/Revisi	10 sop	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	10 sop	5,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	0 Orang	7,500,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	0 Orang	8,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	100 Persen	209,146,421						100 Persen	230,061,063	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada memuat sanksi yang disosialisasikan	10 Perda/Perkada	29,404,681	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	10 Perda/Perkada	32,345,149	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang memuat Sanksi diawasi	5 Perda/Perkada	60,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	5 Perda/Perkada	66,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda atau Perkada yang Tertangani	50 Kasus	119,741,740	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	50 Kasus	131,715,914	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2.2	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran perda yang tertangani dengan baik oleh PPNS	100 persen	32,958,330						100 persen	36,254,163	
1.5.2.2.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang dikembangkan Kapasitas dan Karirnya	7 Orang	32,958,330	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	7 Orang	36,254,163	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,945,196,707						100 %	0	
1.5.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100 %	75,000,000						100 %	0	
1.5.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	2 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 Dokumen	12,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	2 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 Dokumen	12,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	2 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.5.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	10 Dokumen		0	Badan Penanggung an Bencana Daerah
1.5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	2,090,956,232						100 %		0	
1.5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	20 orang	2,050,956,232	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, Upah jasa dan Laporan Keuangan OPD	20 orang		0	Badan Penanggung an Bencana Daerah
1.5.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	40,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, Upah jasa dan Laporan Keuangan OPD	18 Dokumen		0	Badan Penanggung an Bencana Daerah
1.5.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang diadministrasi sesuai standar	100 %	15,000,000						100 %		0	
1.5.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	4 Dokumen		0	Badan Penanggung an Bencana Daerah
1.5.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai perangkat daerah yang dilayani	100 %	50,400,000						100 %		0	
1.5.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	24 stel	15,400,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Upah Jasa	24 stel		0	Badan Penanggung an Bencana Daerah
1.5.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	10 orang	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Upah Jasa	10 orang		0	Badan Penanggung an Bencana Daerah
1.5.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 %	384,245,000						100 %		0	
		Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %							100 %			
1.5.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	12,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran	8 Jenis		0	Badan Penanggung an Bencana Daerah
1.5.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran	20 Jenis		0	Badan Penanggung an Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	35,625,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran	3 Jenis		0
1.5.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 exemplar	6,120,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran	60 exemplar		0
1.5.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	275 orang	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran	275 orang		0
1.5.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	50 kali	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran	50 kali		0
1.5.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya BMD perangkat daerah	100 %	120,000,000						100 %		0
1.5.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 unit	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Perlengkapan kantor	5 unit		0
1.5.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	10 unit	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Perlengkapan kantor	10 unit		0
1.5.1.2.1.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	80,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Perlengkapan kantor	1 unit		0
1.5.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan perkantoran	100 %	89,595,475						100 %		0
1.5.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	500 surat	4,195,475	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Upah jasa & Kantor BPBD	500 surat		0
1.5.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Bulanan Telepon, Air dan Listrik Kantor yang terbayarkan	36 Rekening	64,400,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Upah jasa & Kantor BPBD	36 Rekening		0
1.5.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 orang	21,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Upah jasa & Kantor BPBD	2 orang		0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 5 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD penunjang urusan	100 %	120,000,000						100 %	0	
1 5 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	90,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	13 unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	97 unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	2 unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	(1) Persentase penanganan pra bencana, (2) Persentase penanganan tanggap darurat bencana, (3) Persentase penanganan pasca bencana	100 %	1,620,000,000						100 %	0	
1 5 3 2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	300 orang 0.2 %	70,000,000						300 orang 0.2 %	0	
1 5 3 2 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0.2 %	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat di daerah rawan bencana	0.2 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 3 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	770 org	560,000,000						770 org	0	
1 5 3 2 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 %	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.5.3.2.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	20 unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	20 unit		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.2.6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	4 Desa	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	4 Desa		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.2.7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	1 Dokumen	60,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	1 Dokumen		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	1 Dokumen							1 Dokumen			
1.5.3.2.8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terlatih dalam penanggulangan bencana	50 orang	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	50 orang		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.2.9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 %	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	100 %		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.2.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	0.31 %	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	0.31 %		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	970,000,000						100 %		0	
1.5.3.2.2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	750,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Warganegara korban bencana	100 %		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.2.3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Warganegara korban bencana	100 %		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.5.3.2.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah korban bencana yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	60,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Warganegara korban bencana	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.3.2.5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	100 %	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Warganegara korban bencana	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.3.2.6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100 %	60,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Warganegara korban bencana	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.3.2	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase rata-rata capaian kinerja penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	20,000,000						100 %	0		
		Persentase regulasi dan manajemen kebencanaan yang disusun	100 %							100 %			
1.5.3.2.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun	3 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Regulasi dan manajemen kebencanaan	3 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			7,578,878,450							21,237,293,000		
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	3,187,992,590							100 persen	6,311,617,500	
1.5.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 persen	52,000,000							100 persen	129,500,000	
1.5.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	2 dokumen	27,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.5.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun	1 dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 dokumen	5,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 dokumen	5,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	1 dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 dokumen	5,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 dokumen	3,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	3 dokumen	12,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	3 dokumen	27,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	8 dokumen	55,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 persen	2,384,152,590						100 persen	2,773,944,000	
1.5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	21 orang	2,331,652,590	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	21 orang	2,626,828,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Honorariumnya	4 orang	33,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	4 orang	77,616,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 5 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	12 dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	12 dokumen	5,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun	4 dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	4 dokumen	5,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1 dokumen	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 dokumen	31,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	18 dokumen	7,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	18 dokumen	22,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	4 dokumen	2,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	4 dokumen	5,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100 persen	14,360,000						100 persen	44,000,000	
1 5 1 2 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	2 dokumen	1,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	2 dokumen	5,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	1 dokumen	2,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	1 dokumen	16,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 5 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	12 dokumen	11,360,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	12 dokumen	22,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan
1 5 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 persen	98,780,000						100 persen	541,500,000	
1 5 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	10 Set	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	10 Set	200,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12 laporan	7,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	12 laporan	16,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai yang disusun	12 dokumen	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	12 dokumen	55,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	2 orang	200,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 orang	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	21 orang	20,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	4 orang	31,280,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	4 orang	50,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 persen	140,700,000						100 persen	366,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 5 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	150 buah	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	150 buah	25,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 buah	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	100 buah	25,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11 jenis	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	11 jenis	25,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	10 jenis	11,400,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	10 jenis	24,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	60 eksamplar	7,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	60 eksamplar	21,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	100 orang	6,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	100 orang	21,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang diikuti	120 kali	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	120 kali	225,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1 5 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 persen	260,000,000						100 persen	1,825,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.2.1.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit	37,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 unit	550,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 unit	37,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 unit	75,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	12 Jenis	85,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	12 Jenis	275,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 unit	750,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 unit	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	5 unit	25,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 unit	150,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 persen	56,500,000						100 persen	143,423,500	
1.5.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1500 surat	1,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1500 surat	15,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 rekening	40,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	36 rekening	105,923,500	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	1 orang	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 orang	22,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 persen	181,500,000						100 persen	488,250,000	
1.5.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 unit	35,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit	120,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	12 unit	250,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	30 unit	65,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1 unit	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 unit	50,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	10 unit	55,750,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.2.1.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	7 jenis	9,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	7 jenis	32,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 persen	4,390,885,860						100 persen	14,925,675,500	
1.5.4.2	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran pada Wilayah Manajemen Kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14.5 menit 15 menit	4,254,695,375						14.5 menit 15 menit	13,563,252,000	
1.5.4.2.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang siaga 24 jam di posko	150 orang	3,890,610,375	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	150 orang	5,590,875,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebakaran yang ditangani oleh pemadam kebakaran	100 kejadian	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	100 kejadian	262,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	100 kali	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	100 kali	102,102,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang ditangani	2 kali	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	2 kali	15,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah laporan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang disusun	4 dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	4 dokumen	20,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.4.2.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Perlindungan diri yang diadakan	10 unit	150,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	10 unit	7,078,835,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang mengikuti Diklat Kompetensi	5 orang	45,285,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	5 orang	300,840,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah laporan informasi kebakaran dan penyelamatan yang ditangani	100 kejadian	43,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	100 kejadian	157,300,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah kerjasama (MoU) pelayanan kebakaran yang dilakukan	1 dokumen	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	1 dokumen	36,300,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	5 persen	5,000,000						5 persen	100,000,000	
1.5.4.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran yang didata	30 gedung	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bangunan gedung	30 gedung	50,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang dinilai	30 gedung	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bangunan gedung	30 gedung	50,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi	100 persen	5,000,000						100 persen	29,523,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.4.2.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah investigasi kebakaran yang dilakukan	10 kejadian	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat/korban kebakaran	10 kejadian	29,523,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran	25.78 persen	56,190,485						25.78 persen	116,740,500	
1.5.4.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Instansi /Kelompok Masyarakat yang mengikuti penyuluhan, Penyebaran Informasi dan peringatan bahaya kebakaran	22 kelompok	31,190,485	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	22 kelompok	37,740,500	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Satuan Relawan Kebakaran yang dibentuk dan dibina	11 unit	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	11 unit	79,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 persen	70,000,000						100 persen	1,116,160,000	
1.5.4.2.1.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia yang dilaksanakan	10 kejadian	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	10 kejadian	60,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana SAR yang diadakan	3 unit	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	3 unit	871,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.5.4.2.1.4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang mengikuti Pelatihan SAR	1 orang	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	1 orang	185,160,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7,128,421,192						10,402,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	3,601,649,342				5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	100%	4,497,000,000	
1.6.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			88,500,000							105,500,000	
1.6.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		2 dokumen	40,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		2 dokumen	10,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5,500,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		10 dokumen	50,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,714,149,342							2,570,000,000	
1.6.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	21 orang	2,647,549,342		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		21 orang	2,500,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	16 dokumen	66,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		16 dokumen	70,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0							5,000,000	
1.6.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		4 dokumen	5,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			60,000,000							106,000,000	
1.6.1.2.1.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan	44 stell	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		44 stell	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 dokumen	6,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	10 orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		10 orang	65,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 6 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			459,000,000							459,000,000	
1 6 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3,500,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3,500,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 6 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		00	0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		00	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 6 1 2.1 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 6 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			30,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			30,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 6 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 6 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6,500,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			6,500,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			400,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0							900,000,000	
1.6.1.2.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 unit	900,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	0 jenis	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0 jenis	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	0 jenis	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0 jenis	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang di adakan (unit)	1 unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 unit	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (jenis)	0 jenis	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0 jenis	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			123,000,000							128,000,000	
1.6.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	84 rekening	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		84 rekening	75,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			51,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			51,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			157,000,000							223,500,000	
1.6.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11 unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		11 unit	125,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			28,500,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 unit	70,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1,811,771,850							3,500,000,000	
1.6.2.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1,811,771,850							3,500,000,000	
1.6.2.2.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	27 kelompok	1,811,771,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		27 kelompok	3,500,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			60,000,000							0	
1.6.3.2	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			60,000,000							0	
1.6.3.2.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			995,000,000							1,410,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 6 4 2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			995,000,000							1,410,000,000	
1 6 4 2 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang memperoleh permakanan (Rastra/BPNT) / (KPM)	11532 KK	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		11532 KK	950,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 6 4 2 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan fisik mental dan spritual (orang)	140 orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		140 orang	240,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 6 4 2 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, pengemis gelandangan, penyandang penyakit sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan bimbingan (orang)	20 orang	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		20 orang	70,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 6 4 2 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah pmks yang memperoleh layanan	0 orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0 orang	150,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			400,000,000							620,000,000	
1 6 5 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			400,000,000							620,000,000	
1 6 5 2 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	31997 KK	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		31997 KK	300,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.5.2.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Miskin yang difasilitasi bantuan kesejahteraan sosial	7500 KK	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		7500 KK	320,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			200,000,000							305,000,000	
1.6.6.2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			200,000,000							250,000,000	
1.6.6.2.1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan makanan (KK)	150 KK	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		150 KK	250,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.6.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			0							55,000,000	
1.6.6.2.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina (orang)	70 orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		70 orang	55,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			60,000,000							70,000,000	
1.6.7.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			60,000,000							70,000,000	
1.6.7.2.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		3 unit	70,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN				767,659,000						1,015,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			190,000,000							290,000,000	
2 8 2 2	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			70,000,000							100,000,000	
2 8 2 2 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	39 skpd	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		39 skpd	100,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 2 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			120,000,000							190,000,000	
2 8 2 2 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	180 orang	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		180 orang	45,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 2 2 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	39 kelompok	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		39 kelompok	145,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			387,659,000							475,500,000	
2 8 3 2	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			50,000,000							5,500,000	
2 8 3 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/ perempuan yang mengikuti rapat kordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	60 orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		60 orang	5,500,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 8 3 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			337,659,000							400,000,000	
2 8 3 2 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	50 orang	337,659,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		50 orang	400,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 3 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0							70,000,000	
2 8 3 2 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	10 jenis	0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		10 jenis	70,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			50,000,000							60,000,000	
2 8 4 2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50,000,000							60,000,000	
2 8 4 2 3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)	100 orang	50,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		100 orang	60,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			20,000,000							30,000,000	
2 8 5 2	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000							30,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 8 5 2 1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen)	1 profil	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 profil	30,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			120,000,000							160,000,000	
2 8 6 2	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			30,000,000							35,000,000	
2 8 6 2 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 kali	35,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 6 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			90,000,000							125,000,000	
2 8 6 2 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten kota	1 lembaga	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 lembaga	125,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				7,128,883,238						8,547,700,000	
2 11 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	3,517,227,876						0 [?]	3,836,200,000	
2 11 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	57,321,000						2 Dokumen	68,000,000	
2 11 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3 Dokumen	32,925,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup	3 Dokumen	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)"Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5,488,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktuJumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dokumen	1,288,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	1,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10 Dokumen	17,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup	10 Dokumen	25,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan nya terbayarkan	27 Orang	2,985,767,453						27 Orang	3,051,500,000	
2.11.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	27 Orang	2,934,427,453		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup	27 Orang	3,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18 Dokumen	51,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup	18 Dokumen	51,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	16,164,950						4 Dokumen	25,000,000	
2.11.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktuJumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	16,164,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Barang milik daerah	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	66,462,870						4 Orang	152,000,000	
2.11.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapan yang diadakan	48 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup	48 Orang	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (Laporan)	1 Dokumen	17,522,870		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)	2 Orang	25,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup	2 Orang	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	23,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup	4 Orang	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	184,573,315						3 Jenis	212,000,000	
2.11.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	3 Jenis	1,348,315		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Perlengkapan umum/logistik kantor	3 Jenis	1,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Jenis	5,135,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Perlengkapan umum/logistik kantor	12 Jenis	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	8,446,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Perlengkapan umum/logistik kantor	5 Jenis	3,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	1440 Eksamplar	4,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Perlengkapan umum/logistik kantor	1440 Eksamplar	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	196 Orang	8,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Perlengkapan umum/logistik kantor	196 Orang	7,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	172 Kali	156,024,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Perlengkapan umum/logistik kantor	172 Kali	190,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2 Unit	0						2 Unit	110,000,000	
2.11.1.2.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	2 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	12 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	2 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening jasa komunikasi, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	138,838,288						36 Rekening	142,700,000	
2.11.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1000 Surat	1,498,520		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pelayanan umum kantor	1000 Surat	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36 Rekening	85,139,768		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pelayanan umum kantor	36 Rekening	88,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	4 Orang	52,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pelayanan umum kantor	4 Orang	52,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	68,100,000						2 Unit	75,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.1.2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	46,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Barang Milik Daerah	8 Unit	47,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaJumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	32 Unit	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Barang Milik Daerah	32 Unit	13,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Barang Milik Daerah		15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan				
2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	[?]	0 [?]	0						0 [?]	0	
2.11.2.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	0						2 Dokumen	0	
2.11.2.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Usaha dan atau kegiatan	2 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	[?]	0 [?]	310,000,000						0 [?]	478,000,000	
2.11.3.2	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	72 Laporan	270,000,000						72 Laporan	405,500,000	
2.11.3.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen lingkungan yang dihasilkan (Dokumen)	4 Dokumen	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur	4 Dokumen	113,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.3.2.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang di hasilkan (Laporan)	176 Laporan	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur	176 Laporan	292,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.3.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	40,000,000						37 Ha	72,500,000	
2.11.3.2.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan yang direncanakan untuk direhabilitasi (Ha)	37 Ha	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Lahan yang akan di rehabilitasi	37 Ha	72,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	[?]	0 [?]	62,713,122						0 [?]	150,000,000	
2.11.4.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang di pelihara	5 RTH	62,713,122						5 RTH	150,000,000	
2.11.4.2.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang ditangani (RTH)	5 RTH	62,713,122		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Keanekaragaman hayati	5 RTH	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	[?]	0 [?]	30,000,000						0 [?]	33,000,000	
2.11.5.2	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3/medis yang diawasi	30 Usaha	30,000,000						30 Usaha	33,000,000	
2.11.5.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi (Usaha)	30 Usaha	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Usaha penghasil limbah B3	30 Usaha	33,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	[?]	0 [?]	71,798,240						0 [?]	73,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.6.2	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	10 Usaha/ Kegiatan	71,798,240						10 Usaha/ Kegiatan	73,500,000	
2.11.6.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang di fasilitasi (Usaha/Kegiatan)	10 Usaha/ Kegiatan	16,256,465		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	10 Usaha/ Kegiatan	16,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.6.2.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	20,282,465			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	30 Usaha/ Kegiatan	21,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.6.2.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi	2 Usaha/ Kegiatan	35,259,310		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	2 Usaha/ Kegiatan	36,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	[?]	0 [?]	50,000,000						0 [?]	100,000,000	
2.11.7.2	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah data/dokumen terkait PPMHA	3 MHA	50,000,000						3 MHA	100,000,000	
2.11.7.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah data / dokumen terkait PPMHA (MHA)	3 MHA	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Luwu Timur	3 MHA	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	[?]	0 [?]	35,000,000						0 [?]	55,000,000	
2.11.9.2	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	35,000,000						1 Penghargaan	55,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.9.2.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan yang di berikan (Penghargaan)	1 Penghargaan	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat, dunia usaha dan pemerintah	1 Penghargaan	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	[?]	0 [?]	10,414,000						0 [?]	12,000,000	
2.11.10.2	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,414,000						2 Masalah	12,000,000	
2.11.10.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,414,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat, lingkungan dan usaha atau kegiatan	2 Masalah	12,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	[?]	0 [?]	3,041,730,000						0 [?]	3,810,000,000	
2.11.11.2	Pengelolaan Sampah	Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank Sampah	3,041,730,000						127 Bank Sampah	3,810,000,000	
2.11.11.2.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang di tangani (Ton)	21.5 Ton	2,920,060,000				4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	21.5 Ton	3,650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang dibina (Bank Sampah)	127 Bank Sampah	26,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	127 Bank Sampah	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakanJumlah prasarana dan sarana persampahan yang di sediakan (Jenis)	13 Jenis	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	13 Jenis	130,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN			5,742,064,825						6,716,274,804		
2.12.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	4,590,247,228						100 persen	5,358,797,401	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.12.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17 Dokumen	41,489,117							17 Dokumen	43,634,519	
2.12.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Yang disusun	3 Dokumen	2,789,575	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	3 Dokumen	3,000,000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD yang disusun	2 Dokumen	11,536,650	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	2 Dokumen	12,113,483		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	2,371,125	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	2 Dokumen	2,489,681		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	4 Dokumen	2,340,443	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	4 Dokumen	2,457,465		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	22,451,324	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disdukcapil	10 Dokumen	23,573,890		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 Persen	2,586,456,566						100 Persen	2,679,184,134		
2.12.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan	21 orang	2,560,348,516	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	disdukcapil	21 orang	2,651,770,681		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	18 Dokumen	26,108,050	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	disdukcapil	18 Dokumen	27,413,453		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar	100 Persen	13,386,095						100 Persen	14,055,400		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	4 dokumen	13,386,095	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	4 dokumen	14,055,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang dilayani	100 Persen	178,414,010						100 Persen	211,339,340	
2.12.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan	3 paket	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	3 paket	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian yang disusun	12 Dokumen	8,179,010	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	12 Dokumen	8,342,590	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparat Desa yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	127 Desa 6 orang	81,595,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	127 Desa 6 orang	85,674,750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek implementasikan peraturan perundangan	6 orang	73,640,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	6 orang	77,322,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,111,625,950						100 %	1,167,207,248	
2.12.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	6 jenis	6,964,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	6 jenis	7,312,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	6 Jenis	593,458,543	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	6 Jenis	559,125,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	14 jenis	5,897,950	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	14 jenis	6,192,848	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan atau penggandaan yang diadakan	2 Jenis	12,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	2 Jenis	12,600,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	84 eksemplar	8,520,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	84 eksemplar	8,946,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	123 orang	8,420,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	123 orang	8,841,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan "	533 kali	476,365,457	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	533 kali	564,190,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 persen	38,261,457						100 persen	620,000,000	
2.12.1.2.1.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Jabatan yang diadakan	1 unit	0	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	1 unit	500,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	6 Unit	30,325,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	6 Unit	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan "	12 Unit	7,936,457	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	12 Unit	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	487,236,760						100 Persen	487,236,760	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan	600 Lembar	11,647,960	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil dan Masyarakat kab. Luwu timur	600 Lembar	11,647,960	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening internet, TV, Listrik dan air yang terbayarkan	3 Rekening	203,908,800	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil dan Masyarakat kab. Luwu timur	3 Rekening	203,908,800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	3 orang	271,680,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil dan Masyarakat kab. Luwu timur	3 orang	271,680,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 persen	133,377,273						100 persen	136,140,000	
2.12.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	4 Unit	33,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	4 Unit	35,490,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lain yang dipelihara (Unit)	83 Unit	60,650,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	83 Unit	60,650,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 paket	38,927,273	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Disdukcapil	1 paket	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan	99.06 %	202,540,000						99.06 %	242,300,000	
2.12.2.2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan Kartu keluarga	93.3 persen	202,540,000						93.3 persen	242,300,000	
		persentase penerbitan KTP Elektronik	99.83 Persen							99.83 Persen		
2.12.2.2.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pengeditan elemen biodata	63000 Editan	78,640,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Luwu Timur	63000 Editan	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
		Jumlah pencetakan Kartu Identitas Anak	10000 keping							10000 keping		
		Jumlah pencetakan KTP-el	24000 keping							24000 keping		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah penerbitan kartu keluarga	28000 Lembar				Pelayanan Publik			28000 Lembar		Sipil
		Jumlah Perekaman Data bagi penduduk	3800 Jiwa							3800 Jiwa		
2.12.2.2.4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran dan pendistribusian dokumen KK,KTP dan KIA secara mobiling (kegiatan)	6 Kegiatan	78,640,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Luwu Timur	6 Kegiatan	92,300,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2.2.5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Penduduk pindah datang	100 persen	45,260,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Luwu Timur	100 persen	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penduduk pindah Keluar	100 persen									
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan sipil	85,85 Persen	182,879,557						85,85 Persen	267,750,000	
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan sipil	85,85 Persen									
2.12.3.2	Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase penerbitan akta kelahiran	96.55 Persen	140,000,000						96.55 Persen	217,750,000	
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	100 Persen									
2.12.3.2.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan Akta cerai Non muslim	20 Lembar	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat Kab Luwu Timur	20 Lembar	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	11000 Lembar									
		Jumlah penerbitan Akta Kematian	1600 Lembar									
		jumlah penerbitan akta perkawinan non muslim	600 Lembar									
2.12.3.2.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan pendistribusian dokumen, akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian secara mobile	4 Kegiatan	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat Kab Luwu Timur	4 Kegiatan	117,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 Persen	42,879,557						100 Persen	50,000,000	
2.12.3.2.9	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah MOU dengan Organisasi Kemasyarakatan	1 MOU	42,879,557	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Luwu Timur	1 MOU	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65 %	65,775,990						65 %	93,774,250	
2.12.4.2	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Lembaga/Instansi pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga	20,990,990						5 Lembaga	30,000,000	
2.12.4.2.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah PKS dengan Lembaga/Instansi Pengguna	5 PKS	20,990,990	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	OPD dan Lembaga/Instansi lainnya	5 PKS	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase sosialisasi urusan administrasi kependudukan yang difasilitasi	100 persen	44,785,000						100 persen	63,774,250	
2.12.4.2.5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah media yang digunakan dalam penyebaran informasi kependudukan (Jenis)	2 jenis	44,785,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Luwu Timur	2 jenis	63,774,250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	700,622,050						100 Persen	753,653,153	
2.12.5.2	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Propil Kependudukan yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	700,622,050						1 Dokumen	753,653,153	
2.12.5.2.1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kependudukan yang disusun	3 Dokumen	700,622,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Luwu Timur	3 Dokumen	753,653,153	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2.13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100% 100 %	3,524,100,143							4,091,235,985	
2.13.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	10 dok	71,000,000						10 dok	171,562,428	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dok	40,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	3 Dok	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	7,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	2 Dok	9,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	6,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	2 Dok	78,462,428	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	18,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	10 Dok	23,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	22 Orang	2,534,489,981						22 Orang	2,725,206,062	
2.13.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	22 Orang	2,492,089,981	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	22 Orang	2,671,521,604	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	42,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	18 Dok	53,684,458	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD yang disusun tepat waktu	4 Dok	10,000,000						4 Dok	7,900,000	
2.13.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dok	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili			5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	4 Dok	7,900,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah terpenuhi	100 %	98,307,000						100 %	118,000,000	
		persentase capaian administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100 %							100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	42 psg	28,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	42 psg	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dok	4,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	12 Dok	4,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	27,492,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	2 Orang	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 Org	16,985,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	5 Org	21,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek peraturan perundang-undangan	3 Orang	21,330,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	3 Orang	27,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase rata-rata capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	334,540,050						100 %	504,555,000	
2.13.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	18 bh	2,540,050	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	18 bh	2,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 buah	3,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	22 buah	3,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	16 Jenis	7,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	16 Jenis	9,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	7,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	4 jenis	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 eksp	8,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	60 eksp	10,920,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	13 Org	6,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	13 Org	8,535,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	35 kali	300,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	35 kali	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentase penataan arsip dinamis	100 %	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	100 %	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	19 unit	257,833,112						19 unit	295,000,000	
2.13.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	11 unit	12,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	11 unit	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	7 unit	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	7 unit	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	195,333,112	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	1 unit	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi	100 %	115,930,000						100 %	107,512,495	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk surat keluar yang diagendakan	1717 surat	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	1717 surat	4,512,495	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang terbayarkan	36 rek	48,930,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	36 rek	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Org	63,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	4 Org	63,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	3 jenis	102,000,000						3 jenis	161,500,000	
2.13.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	32,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	13 unit	41,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 unit	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	31 unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 gedung	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	2 gedung	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.1.2.1.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1 Gedung	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPMD	1 Gedung	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.2	PROGRAM PENATAAN DESA	persentase desa yang baik penataan wilayah desanya	100 %	140,000,000						100 %	140,000,000	
2.13.2.2	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa persiapan	1 desa	140,000,000						1 desa	140,000,000	
2.13.2.2.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah perda yang dibuat terkait pemekaran desa	1 Perda	140,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	desa se-lutum	1 Perda	140,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib administrasi	100 %	645,000,000						100 %	1,196,151,718	
2.13.4.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib adminstrasi	100 %	645,000,000						100 %	1,196,151,718	
2.13.4.2.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	2 Kali	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa se-luwu timur	2 Kali	26,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.4.2.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah peraturan-peraturan daerah yang ditetapkan terkait tentang desa	4 Perbub	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa se-luwu timur	4 Perbub	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.4.2.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang menyusun perencanaan desa (RKP) tepat waktu	124 Desa	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa se-luwu timur	124 Desa	192,257,355	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah Desa yang menyusun RPJMDes tepat waktu	62 Desa										
2.13.4.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun peraturan desa tentang APBDesa	124 Desa	40,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa se-luwu timur	124 Desa	73,193,664	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.4.2.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti peningkatan kapasitas	372 Orang	200,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa se-luwu timur	372 Orang	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.4.2.7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang membuat LKPJ dan LKPPD desa tepat waktu	124 Desa	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa se-luwu timur	124 Desa	22,708,661	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.4.2.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang melaksanakan seleksi perangkat desa	15 Desa	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa se-luwu timur	15 Desa	41,992,038	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.4.2.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat provinsi	1 Desa	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa se-luwu timur	1 Desa	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.4.2.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Peningkatan	124 Orang	140,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa se-luwu timur	124 Orang	140,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah Rapat Koordinasi BPD yang dilaksanakan	1 Kali				1 Kali						
2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan	100 %	879,495,873						100 %	1,224,827,427	
2.13.5.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan	5 klpk	879,495,873						5 klpk	1,224,827,427	
2.13.5.2.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas Pamsimas	3 Desa	120,809,194	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bumdesa, kelompok masyarakat	3 Desa	147,966,034	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah Kader Posyandu yang Mendapatkan Pembinaan	548 Kader	548 Kader									
2.13.5.2.5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pelaku usaha ekonomi desa yang mendapatkan pendampingan dalam pengembangan hasil usaha untuk meningkatkan PAD desa	124 Desa	63,200,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bumdesa, kelompok masyarakat	124 Desa	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.5.2.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi tepat guna	11 Klp	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bumdesa, kelompok masyarakat	11 Klp	296,185,545	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.5.2.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kelembagaan Perempuan yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan	139 Klp	595,486,679	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bumdesa, kelompok masyarakat	139 Klp	700,675,848	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah kelompok kelembagaan perempuan yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan	139 Klp	139 Klp									
	Jumlah Kelompok PKK yang dimonitoring dan evaluasi	139 Klp	139 Klp									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			8,970,570,431							10,094,490,607	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,081,127,061						100 %	3,708,820,000	
2.14.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	65,000,000						100 %	90,500,000	
2.14.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	29,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	3 dokumen	14,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	2 dokumen	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	6,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	2 dokumen	7,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	8 dokumen	59,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	2,290,973,946						100 %	2,335,000,000	
2.14.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	18 orang	2,261,573,946	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 orang	2,300,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	10 dokumen	29,400,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 dokumen	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100 %	15,000,000						100 %	20,000,000	
2.14.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun	4 dokumen	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Barang Milik Daerah / Aset	4 dokumen	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60,000,000						100 %	75,500,000	
2.14.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	38 orang	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen Administrasi Kepegawaian	38 orang	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	8 dokumen	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen Administrasi Kepegawaian	8 dokumen	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 orang	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 orang	15,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 %	432,853,515						100 %	441,220,000	
2.14.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	3,266,350	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik	2 Jenis	3,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	203 Jenis	5,841,765	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik	203 Jenis	5,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	7,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik	3 Jenis	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 eksemplar	6,120,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik	60 eksemplar	6,120,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	125 orang	5,625,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik	125 orang	6,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	411 kali	404,500,400	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik	411 kali	410,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	15,000,000						100 %	500,000,000	
2.14.1.2.1.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengadaan Barang Milik Daerah	1 unit	500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	109,299,600						100 %	113,600,000	
2.14.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	600 surat	15,199,600	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Jasa Pelayanan Umum)	600 surat	16,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, air yang terbayarkan	48 rekening	56,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Jasa Pelayanan Umum)	48 rekening	60,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum kantor yang dibayarkan	3 orang	37,600,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Jasa Pelayanan Umum)	3 orang	37,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	93,000,000						100 %	133,000,000	
2.14.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	96 unit	76,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kendaraan Dinas, Peralatan Kerja, Gedung Kantor	96 unit	89,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	7,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kendaraan Dinas, Peralatan Kerja, Gedung Kantor	3 unit	14,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kendaraan Dinas, Peralatan Kerja, Gedung Kantor	2 unit	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4 OPD	187,000,000						4 OPD	380,500,000	
2.14.2.2	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	2 dokumen	75,000,000						2 dokumen	135,500,000	
2.14.2.2.1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap program KKBPK yang diserasikan	2 dokumen	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Sekolah, Mitra, Perangkat Daerah/Lintas Sektor	2 dokumen	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2.2.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	3 sekolah	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Sekolah, Mitra, Perangkat Daerah/Lintas Sektor	3 sekolah	51,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2.2.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi	24 orang	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Sekolah, Mitra, Perangkat Daerah/Lintas Sektor	24 orang	21,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2.2.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta rapat	130 orang	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Sekolah, Mitra, Perangkat Daerah/Lintas Sektor	130 orang	28,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.2.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa	100 %	112,000,000						100 %	245,000,000	
2.14.2.2.3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Profil kependudukan yang disusun	1 dokumen	27,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Kampung KB, Balai Penyuluhan, PLKB/PKB, Kader	1 dokumen	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2.2.8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang dibentuk	5 rumah data	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Kampung KB, Balai Penyuluhan, PLKB/PKB, Kader	5 rumah data	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2.2.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah jenis data keluarga yang ada	3 jenis	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Kampung KB, Balai Penyuluhan, PLKB/PKB, Kader	3 jenis	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2.2.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta/orang yang mendapatkan pembinaan	110 orang	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat, Kampung KB, Balai Penyuluhan, PLKB/PKB, Kader	110 orang	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	14,71 %	4,776,443,370						14,71 %	5,285,615,052	
2.14.3.2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 persen	1,135,498,000						100 persen	1,158,800,000	
2.14.3.2.1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK	40 orang	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Stakheldor, Mitra Kerja, PUS, sekolah dan Masyarakat	40 orang	21,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE	935 orang	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Stakheldor, Mitra Kerja, PUS, sekolah dan Masyarakat	935 orang	56,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.3.2.3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	Jumlah Sarana KIE yang disediakan	8 Jenis	168,562,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Stakhedor, Mitra Kerja, PUS, sekolah dan Masyarakat	8 Jenis	170,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Balai Penyuluhan yang mendapatkan dukungan operasional pembiayaan	12 balai penyuluhan	916,936,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Stakhedor, Mitra Kerja, PUS, sekolah dan Masyarakat	12 balai penyuluhan	911,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100 persen	1,817,715,052						100 persen	1,815,815,052	
2.14.3.2.3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang dibina	110 orang	104,500,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader PPKBD/Sub PPKBD	110 orang	95,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan	581 orang	1,713,215,052	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader	581 orang	1,720,815,052	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Jumlah sarana pelayanan KB yang tersedia Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	30 unit 25 %	1,225,982,318						30 unit 25 %	1,691,000,000	
2.14.3.2.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokon	21 fasilitas kesehatan	77,074,318	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas Kesehatan/Klinik KB, PUS	21 fasilitas kesehatan	91,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP	11500 akseptor	740,008,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas Kesehatan/Klinik KB, PUS	11500 akseptor	775,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.6	Penyediaan Sarana Penunjang	Jumlah sarana tersedia	32 unit	202,900,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas Kesehatan/Klinik KB	32 unit	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.3.2.0	Pelayanan KB			55,500,000			DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Kualitas sumber daya manusia	Kesehatan/Klinik KB, PUS		600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan operasional pelayanan KB bergerak	11 kecamatan	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas Kesehatan/Klinik KB, PUS	11 kecamatan	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	23 Stakholder/mitra	597,248,000						23 Stakholder/mitra	620,000,000	
2.14.3.2.4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	24 kampung KB	597,248,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Organisasi Kemasyarakatan, Stakholder, Mitra Kerja	24 kampung KB	620,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Yang telah dibina dengan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga	50,94 %	926,000,000						50,94 %	719,555,555	
2.14.4.2	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	71.18 %	891,000,000						71.18 %	667,555,555	
		Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat yang dibina melalui kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	111 kelompok							111 kelompok		
2.14.4.2.1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok yang terbentuk	6 kelompok	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat	6 kelompok	28,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4.2.2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Sarana Kelompok yang tersedia	30 unit	606,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya	Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik	30 unit	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.4.2.3	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			000,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		Kualitas sumber daya manusia	Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat		200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4.2.3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan	60 kelompok	95,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat	60 kelompok	142,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4.2.7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi	35 kelompok	95,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat	35 kelompok	155,555,555	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4.2.8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta promosi sosialisasi	25 orang	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat	25 orang	36,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4.2.9	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah kebijakan pendukung tercapainya IPK	1 dokumen	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat	1 dokumen	36,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4.2.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta advokasi dan promosi	40 orang	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat	40 orang	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4.2.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Peserta sosialisasi	40 orang	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat	40 orang	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran serta organisasi masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75.01 %	35,000,000						75.01 %	52,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
							Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.14.4.2.3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Mitra	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Mitra Kelompok Kegiatan dan Organisasi masyarakat	15 Mitra	27,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.14.4.2.4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi	20 orang	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Mitra Kelompok Kegiatan dan Organisasi masyarakat	20 orang	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				14,317,180,400							14,317,180,400			
2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	95 %	4,125,473,410									95 %	4,125,473,410
2.15.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17 Dokumen	73,015,535									17 Dokumen	73,015,535
2.15.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	3 dokumen	18,854,975	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		0	3 dokumen	18,854,975	Dinas Perhubungan		
							3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah							
2.15.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 dokumen	3,846,965	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		0	2 dokumen	3,846,965	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	4,074,784	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		0	2 dokumen	4,074,784	Dinas Perhubungan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	46,238,811	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	10 dokumen	46,238,811	Dinas Perhubungan
2.15.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	95 %	2,864,793,790						95 %	2,864,793,790	
2.15.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2,802,709,847		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0		2,802,709,847	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 dokumen	62,083,943	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	18 dokumen	62,083,943	Dinas Perhubungan
2.15.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	95 % 95 %	10,451,502						95 % 95 %	10,451,502	
2.15.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 dokumen	10,451,502	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	4 dokumen	10,451,502	Dinas Perhubungan
2.15.1.2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	95 %	11,112,310						95 %	11,112,310	
2.15.1.2.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	11,112,310	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	4 dokumen	11,112,310	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	95 %	127,654,768						95 %	127,654,768	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	95 paket	58,600,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	95 paket	58,600,000	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 dokumen	20,534,768	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	12 dokumen	20,534,768	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	48,520,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	5 orang	48,520,000	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	95 %	435,417,020						95 %	435,417,020	
2.15.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	5,543,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	5 jenis	5,543,000	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	4,962,220	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	8 jenis	4,962,220	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	2 Jenis	30,848,200	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	2 Jenis	30,848,200	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	20,030,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	3 jenis	20,030,000	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	72 eksemplar	7,620,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	72 eksemplar	7,620,000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	30 orang	4,500,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	30 orang	4,500,000	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	150 kali	361,913,600	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	150 kali	361,913,600	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang ditiadakan	12 Unit	274,740,000						12 Unit	274,740,000	
2.15.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	8 unit	19,740,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	8 unit	19,740,000	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	3 unit	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	3 unit	30,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	225,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	1 unit	225,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	135,046,685						95 %	135,046,685	
2.15.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1200 surat	28,073,385	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	1200 surat	28,073,385	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 rekening	48,223,300	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	36 rekening	48,223,300	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	6 orang	58,750,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	6 orang	58,750,000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	95 %	193,241,800						95 %	193,241,800	
2.15.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	42,920,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	1 unit	42,920,000	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	115,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	7 unit	115,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38 unit	15,660,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	38 unit	15,660,000	Dinas Perhubungan
2.15.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	19,661,800	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	2 unit	19,661,800	Dinas Perhubungan
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Angkutan Yang Layak;Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Yang disediakan	0.72;41.8 %	9,362,585,774						0.72;41.8 %	9,362,585,774	
2.15.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	% perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik (1 tahun)	95 %	289,968,983						95 %	289,968,983	
2.15.2.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang disediakan	70 unit	124,763,155	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	70 unit	124,763,155	Dinas Perhubungan
2.15.2.2.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara	48 Unit	165,205,828	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	48 Unit	165,205,828	Dinas Perhubungan
2.15.2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah orang yang terangkut melalui terminal per tahun	218427 Orang	5,694,415,005						218427 Orang	5,694,415,005	
2.15.2.2.2	Pembangunan Gedung Terminal	Persentase Terminal yang dibangun	53.61 %	5,654,599,139	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	53.61 %	5,654,599,139	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.2.2.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang dipelihara	3 Unit	39,815,866	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	3 Unit	39,815,866	Dinas Perhubungan
2.15.2.2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan	15 Titik	21,600,000						15 Titik	21,600,000	
2.15.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			21,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0		21,600,000	Dinas Perhubungan
2.15.2.2.1	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			193,000,000							193,000,000	
2.15.2.2.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang disediakan	1 Set/Unit	122,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	1 Set/Unit	122,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.2.2.1.3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor			47,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0		47,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.2.2.1.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara	11 Unit	24,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	11 Unit	24,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.2.2.1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan	22 Rekomendasi	157,000,000						22 Rekomendasi	157,000,000	
2.15.2.2.1.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Manejemen Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan	18 Kali	145,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	18 Kali	145,000,000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.2.2.1.5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Forum LL Kab (1 Tahun)	4 Kali	12,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	4 Kali	12,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.2.2.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda (1 tahun)	302400 Org / Kg	2,865,972,911						302400 Org / Kg	2,865,972,911	
2.15.2.2.1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan yang disediakan (Bus Sekolah atau Kendaraan Angkutan Barang untuk Daerah Transmigrasi)	1 Unit	2,865,972,911	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	1 Unit	2,865,972,911	Dinas Perhubungan
		Jumlah Kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara oleh Pemda untuk Jasa Angkutan Orang (Bus Sekolah)	28 Unit							28 Unit		
2.15.2.2.1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			140,628,875							140,628,875	
2.15.2.2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek)	24 Kali	140,628,875	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	24 Kali	140,628,875	Dinas Perhubungan
2.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di Danau dan sungai; Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di laut	1.35;0.07 %	829,121,216						1.35;0.07 %	829,121,216	
2.15.3.2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota			141,200,000							141,200,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha	Jumlah Kapal yang difasilitasi Pengurusan Izin (1 Tahun)	250 Kali		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	3) Peningkatan kualitas layanan		250 Kali		Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2 15 3 2 2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut Lampia dan Pelayanan Kapal Motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata	24 Kali	141,200,000			Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	24 Kali	141,200,000	Dinas Perhubungan	
2 15 3 2	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Kapal yang difasilitasi pengurusan kelaiklautan	5 Unit	221,951,160						5 Unit	221,951,160		
2 15 3 2 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Terhadap Pelabuhan dan Angkutan ASDP	24 Kali	221,951,160		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	24 Kali	221,951,160	Dinas Perhubungan	
2 15 3 2.1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah orang / barang yang terangkut melalui dermaga ASD per tahun	39299 Org / Kg	465,970,056						39299 Org / Kg	465,970,056		
2 15 3 2.1 2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelabuhan yang dibangun	1 Unit	424,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	1 Unit	424,000,000	Dinas Perhubungan	
		Jumlah pelabuhan yang dibangun (1 Tahun)	1 Unit							1 Unit			
2 15 3 2.1 3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan yang dioperasikan/dipelihara	1 Unit	41,970,056	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	1 Unit	41,970,056	Dinas Perhubungan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			6,179,425,600								9,102,064,970	
2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	3,337,017,400								95 %	3,985,408,528
2 16 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %	71,226,428								100 %	85,462,393
		persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang tersedia	100 %									100 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	35,868,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 dokumen	40,868,755	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	2 dokumen	3,238,755	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 dokumen	3,238,755	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	2 dokumen	3,336,800	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 dokumen	3,336,800	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	28,782,873	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	10 dokumen	38,018,083	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	100 %	2,534,815,123						100 %	2,534,815,123	
2.16.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai/PNS yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	20 orang	2,490,576,840	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	20 orang	2,490,576,840	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	18 dokumen	44,238,283	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	18 dokumen	44,238,283	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase administrasi barang milik daerah yang tersusun persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 % 100 %	13,392,645						100 % 100 %	18,392,645	
2.16.1.2.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	4 dokumen	13,392,645	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	4 dokumen	18,392,645	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.1.2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persentase dokumen administrasi pendapatan daerah yang disusun tepat waktu	100 %	41,159,195						100 %	126,159,285	
2.16.1.2.2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan retribusi daerah yang tersusun	1 dokumen	20,377,300	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 dokumen	60,377,300	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Menara Telekomunikasi yang menjadi obyek retribusi	140 Menara	20,781,895	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	140 Menara	65,781,985	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian yang tersusun	100 %	13,218,280						100 %	163,358,280	
2.16.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan dikelola	12 dokumen	13,218,280	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	12 dokumen	13,218,280	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang melaksanakan Bimbingan teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	0	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20 orang	150,140,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	238,874,277						100 %	308,886,650	
2.16.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	3 jenis	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 jenis	1,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 jenis	11,114,250	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 jenis	11,114,250	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 jenis	9,300,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 jenis	19,300,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undang yang disediakan	60 eksemplar	2,534,700	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	60 eksemplar	6,120,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi/dilayani	20 orang	4,975,327	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	20 orang	10,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	181 kali	209,450,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	181 kali	260,052,400	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	100	150,920,000						100	455,100,000	
		persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	100 %							100 %		
2.16.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	5 unit	0	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	5 unit	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	3 unit	20,920,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 unit	46,920,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan	2 set	130,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 set	398,180,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	229,534,152						100 %	229,534,152	
2.16.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan jasa surat menyurat yang terlaksana	18 kali	3,900,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	18 kali	3,900,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan	36 rekening	103,234,152	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	36 rekening	103,234,152	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor yang dibayarkan	1 tahun	122,400,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 tahun	122,400,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	100 %	43,877,300						100 %	63,700,000	
2.16.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	7 unit	28,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	7 unit	28,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	22 unit	10,377,300	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	22 unit	20,200,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang terpelihara	2 unit	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 unit	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	80 %	975,255,200						80 %	2,309,061,501	
2.16.2.2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat	100 %	975,255,200						100 %	2,309,061,501	
2.16.2.2.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dikelola	5 Saluran	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	5 Saluran	65,205,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.2.2.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang mengikuti sosialisasi	166 Orang	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	166 Orang	71,925,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.2.2.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah mass media yang menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	26 Media	900,034,200	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	26 Media	1,979,814,501	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.2.2.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibentuk/dibina	71 Kelompok	25,135,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	71 Kelompok	152,655,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.2.2.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah organisasi yang terlibat dalam penyebarluasan informasi	3 Organisasi	15,086,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 Organisasi	39,462,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah	39 opd	1,867,153,000						39 opd	2,807,594,941	
2.16.3.2	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan domain dan koneksi jaringan internet OPD se Kabupaten Luwu Timur	100 %	1,605,490,000						100 %	2,266,939,941	
2.16.3.2.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain dan sub domain yang dibina dalam pengelolaan konten website	39 OPD	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	39 OPD	115,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.3.2.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	96 Titik	1,505,490,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	96 Titik	2,151,939,941	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmet	100 %	261,663,000						100 %	540,655,000	
2.16.3.2.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan	4 Aplikasi	140,143,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	4 Aplikasi	278,155,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.3.2.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi yang mendukung program smart city luwu timur	14 OPD	101,520,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	14 OPD	215,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.3.2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Aparat yang dilatih	194 Orang	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	194 Orang	47,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			54,428,000								163,019,624
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	90 %	54,428,000								163,019,624
2.20.2.2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase statistik sektoral yang diselenggarakan	100 %	54,428,000								163,019,624
2.20.2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data/informasi/statistik sektoral yang tersusun	13 Dokumen	39,450,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	13 Dokumen	118,036,482	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.20.2.2.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	14,978,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Dokumen	44,983,142	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			45,000,000								116,000,000
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	45,000,000								116,000,000
2.21.2.2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang diselenggarakan	100 %	45,000,000								116,000,000
2.21.2.2.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat, Aplikasi dan Informasi yang diamankan	26 Aplikasi	45,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	26 Aplikasi	116,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4,307,311,131								6,112,500,000
2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100 %	3,059,512,899								3,892,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.18.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	17 dokumen	67,147,125							17 dokumen	84,800,000	
2.18.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dsusun tepat waktu	3 dokumen	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		3 dokumen	30,600,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlag Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	10,773,641	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		2 dokumen	11,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	6,373,484	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		2 dokumen	6,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		10 dokumen	36,700,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rat Capaian Kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,321,643,922							100 %	2,800,000,000	
2.18.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya yang terbayarkan	24 Orang	2,221,643,922	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		24 Orang	2,700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	18 dokumen	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		18 dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.18.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang ditatausahakan	100 %	10,000,000							100 %	15,000,000	
2.18.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		4 dokumen	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD Perangkat Daerah	250000000 Rp	9,000,000							250000000 Rp	12,000,000	
2.18.1.2.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		4 dokumen	12,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	98,789,552							100 %	160,500,000	
2.18.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	43 stel	20,600,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		43 stel	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	4 dokumen	8,829,552	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		4 dokumen	9,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		2 Orang	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Mrngikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		4 Orang	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	10 Orang	39,360,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	10 Orang	61,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	329,932,300						100 %	460,200,000	
2.18.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	5,857,300	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	12 Jenis	6,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	3 unit	3,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 unit	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang disediakan	2 Jenis	8,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 Jenis	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	13,675,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 Jenis	14,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 eksamplar	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	60 eksamplar	6,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi kunjungannya	150 Orang	5,400,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	150 Orang	9,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	300 Kali	286,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	300 Kali	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit	14,000,000						2 Unit	90,000,000	
2.18.1.2.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	0	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/mesin lainnya	4 unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	4 unit	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Jenis	4,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 Jenis	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	144,000,000						100 %	160,000,000	
2.18.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Surat Menyurat yang disediakan	1200 surat	14,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1200 surat	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang terbayarkan	60 reknin g	58,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	60 reknin g	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan yang terbayarkan	4 Orang	72,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	4 Orang	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang dipelihara	10 Unit	65,000,000						10 Unit	110,000,000	
2.18.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	9 unit	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Masin lainnya yang dipelihara	47 unit	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	47 unit	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 unit	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 unit	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	30 Investor	305,000,000						30 Investor	950,000,000	
2.18.2.2	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMDN/PMA yang terfasilitasi	90 %	155,000,000						90 %	600,000,000	
2.18.2.2.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERDA Penanaman Modal yang dibuat	1 PERDA	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 PERDA	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.2.2.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Evaluasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	55,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili			5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 Kegiatan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Potensi yang tersedia	100 %	150,000,000						100 %	350,000,000	
2.18.2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Peluang Investasi kabupaten Luwu Timur	1 dokumen	150,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 dokumen	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Rencana Investasi Penanaman Modal	15 %	225,105,588						15 %	450,000,000	
2.18.3.2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan	90 %	225,105,588						90 %	450,000,000	
2.18.3.2.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	3 Media	25,105,588	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 Media	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.3.2.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan	3 Event	200,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 Event	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal	100 %	320,323,933						100 %	400,000,000	
2.18.4.2	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	100 %	320,323,933						100 %	400,000,000	
2.18.4.2.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang dilayani secara elektronik	2250 Izin	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2250 Izin	370,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.4.2.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	5 pengaduan	20,323,933	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	5 pengaduan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (PMA dan PMDN)	500.000.000.000 Rp	367,368,711						500.000.000.000 Rp	370,000,000	
2.18.5.2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	100 %	367,368,711						100 %	370,000,000	
2.18.5.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Pemantauan kepada Pelaku Usaha PMDN dan UKM	7 Kegiatan	53,198,163	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	7 Kegiatan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.5.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimtek/Sosialisasi Kemudahan Berusaha kepada PMA/PMDn dan UKM	8 Kegiatan	215,381,723	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	8 Kegiatan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.5.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Pengawasan kepada Pelaku Usaha PMDn dan UKM	13 Kegiatan	98,788,825	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	13 Kegiatan	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah database Penanaman Modal yang Valid	1 dokumen	30,000,000						1 dokumen	50,000,000	
2.18.6.2	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100 %	30,000,000						100 %	50,000,000	
2.18.6.2.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data yang disediakan	2 dokumen	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3,805,671,349						4,974,996,646	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.23.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,460,415,794						100 %	4,278,607,875	
2.23.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %	84,857,219						100 %	85,555,927	
2.23.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	33,960,755	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Dokumen	37,110,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5,948,137	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Dokumen	5,497,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	7,497,600	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Dokumen	5,497,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	37,450,727	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 Dokumen	37,450,727	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN gaji dan tunjangan yang terbayarkan	25 Orang	2,512,548,834						25 Orang	2,786,470,448	
2.23.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	25 Orang	2,476,468,834	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25 Orang	2,750,390,448	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	36,080,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18 Dokumen	36,080,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	16,400,000						100 %	20,000,000	
2.23.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	16,400,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah	4 Dokumen	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.23.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	75,240,000						100 %	113,400,000	
2.23.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya	41 Stell	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41 Stell	32,750,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 Orang	45,240,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7 Orang	80,650,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	158,469,800						100 %	295,681,500	
2.23.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	7,790,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6 Jenis	7,790,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	14 Jenis	9,579,500	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14 Jenis	9,579,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	8 Jenis	7,900,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8 Jenis	8,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	60 eksamplar	6,120,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60 eksamplar	6,120,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	700 Orang	28,500,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	700 Orang	34,250,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	175 Kali	98,580,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	175 Kali	229,942,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	219,688,076						100 %	479,000,000	
2.23.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	45 Unit	86,788,076	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah	45 Unit	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.23.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 Unit	34,900,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah	9 Unit	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	0	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 Unit	98,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	15 Unit	179,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjangurusan PD	100 %	289,951,865						100 %	377,000,000	
2.23.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	600 Surat	6,951,865	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	600 Surat	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	60 Rekening	160,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60 Rekening	160,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Orang	123,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8 Orang	207,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara dengan baik	100 %	103,260,000						100 %	121,500,000	
2.23.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	5 Unit	61,450,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Unit	65,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	20,360,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33 Unit	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	21,450,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Unit	31,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	[?] Indeks pembangunan literasi masyarakat	0 [?] 0.2 %	345,255,555						0 [?] 0.2 %	696,388,771	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.23.2.2	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang dilakukan	100 %	176,963,755						100 %	465,388,771	
2.23.2.2.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jenis layanan perpustakaan elektronik	1 Jenis	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	SD, SMP, Pemustaka/Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Jenis	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.2.2.4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dibina	20 Pengelola	16,963,780	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	SD, SMP, Pemustaka/Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20 Pengelola	63,635,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.2.2.7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah hari kegiatan pameran Jumlah kunjungan perpustakaan keliling Jumlah pengunjung ke perpustakaan	5 hari 50 Kali 12200 Orang	120,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	SD, SMP, Pemustaka/Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 hari 50 Kali 12200 Orang	220,781,771	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.2.2.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diadakan Jumlah buku yang dilestarikan	50 Judul 200 eksemplar	14,999,975	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SD, SMP, Pemustaka/Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50 Judul 200 eksemplar	120,972,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.2.2.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya pendataan tenaga pengelola perpustakaan	2 Orang	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	SD, SMP, Pemustaka/Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Orang	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100 %	168,291,800						100 %	231,000,000	
2.23.2.2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Peserta dalam sosialisasi budaya baca dan literasi	200 Orang	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	SD, SMP, Umum dan Desa	200 Orang	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.2.2.3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba minat baca yang dilaksanakan Jumlah perpustakaan yang dinilai	3 Lomba 22 perpustakaan	98,580,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SD, SMP, Umum dan Desa	3 Lomba 22 perpustakaan	168,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.2.2.4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan binaan yang berbasis inklusi sosial	10 perpustakaan	14,711,800	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	SD, SMP, Umum dan Desa	10 perpustakaan	18,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.23.2.2.5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta duta baca yang dilombakan	33 Orang	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	SD, SMP, Umum dan Desa	33 Orang	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			283,797,485							415,137,006	
2.24.2.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	100 %	221,275,479						100 %	350,350,000	
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	100 %							100 %		
2.24.2.2.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan data arsip	50 %	80,311,026						50 %	95,500,000	
2.24.2.2.1.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			47,626,026					OPD, Desa dan Sekolah		60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.2.2.3.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dan Desa yang diawasi kearsipannya	54 OPD dan Desa	32,685,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	OPD, Desa dan Sekolah	54 OPD dan Desa	35,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.2.2.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100 %	15,000,000						100 %	30,000,000	
2.24.2.2.2.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas	1000 berkas	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah (OPD dan Desa)	1000 berkas	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.2.2.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan	100 %	125,964,453						100 %	224,850,000	
2.24.2.2.2.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola arsip OPD, sekolah dan Desa yang dibina	45 Pengelola	125,964,453	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD, Desa dan Sekolah	45 Pengelola	224,850,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah pengelola arsip yang difasilitasi	100 Pengelola							100 Pengelola		
2.24.3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	[?] tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	0 [?]	40,522,006						0 [?]	39,787,006	
			100 %							100 %		
2.24.3.2.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip sesuai NSPK	2000 Dokumen	40,522,006						2000 Dokumen	39,787,006	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.24.3.2.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah dokumen arsip yang dinilai dan penetapan pemusnahannya	2000 Dokumen`	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2000 Dokumen`	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.3.2.2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip usul musnah	2000 Dokumen`	35,522,006	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2000 Dokumen`	36,787,006	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	25 %	22,000,000						25 %	25,000,000	
2.24.4.2	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penerbitan surat izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	20 surat	22,000,000						20 surat	25,000,000	
2.24.4.2.1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah penyusunan dan penetapan SOP yang bersifat tertutup	20 SOP	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	OPD, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi)	20 SOP	13,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.4.2.2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar Surat Izin Pengguna Arsip	20 Surat	12,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi)	20 Surat	12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4,030,227,205						7,039,750,000	
2.9.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	4,030,227,205						100 Persen	5,305,400,000	
2.9.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	16 Dokumen	74,922,874						16 Dokumen	89,200,000	
2.9.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	2 Dokumen	29,478,533		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	2 Dokumen	31,000,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	3,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	1 Dokumen	3,700,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29123	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD perubahan yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	3,500,000				1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Perikanan
29124	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	2 Dokumen	4,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	2 Dokumen	7,000,000	Dinas Perikanan
29125	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD perubahan yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	4,000,000				1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Perikanan
29127	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	30,444,341			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	10 Dokumen	40,000,000	Dinas Perikanan
2912	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3,070,145,490						100 %	4,080,000,000	
29121	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	31 Orang	3,000,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	31 Orang	4,000,000,000	Dinas Perikanan
29127	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	70,145,490			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	18 Dokumen	80,000,000	Dinas Perikanan
2912	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahaka	100 %	26,094,801						100 %	22,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29126	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	26,094,801		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	4 Dokumen	22,000,000	Dinas Perikanan
2912	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Perangkat Daerah	100 %	6,841,245						100 %	7,000,000	
29127	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	6,841,245		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	4 Dokumen	7,000,000	Dinas Perikanan
2912.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	132,150,920						100 %	160,000,000	
2912.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	0 Paket	37,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	0 Paket	40,000,000	Dinas Perikanan
2912.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	24,910,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	12 Dokumen	30,000,000	Dinas Perikanan
2912.1.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 Orang	23,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	7 Orang	30,000,000	Dinas Perikanan
2912.1.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	7 Orang	23,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	7 Orang	30,000,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 Orang	22,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	7 Orang	30,000,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	331,034,475						100 %	481,700,000	
2.9.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	6,832,575		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	12 Jenis	7,000,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	3,000,000				1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	4 Jenis	3,000,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	3,841,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	4 Jenis	4,000,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 Jenis	7,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	4 Jenis	8,000,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Eksamp lar	6,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	48 Eksamp lar	6,100,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	160 Orang	3,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	160 Orang	3,600,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	200 Kali	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	200 Kali	450,000,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang diadakan	100 %	33,677,400						100 %	35,000,000	
2.9.1.2.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 Unit	0				1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	1 Unit	0	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit	8,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	2 Unit	9,000,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	25,477,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	4 Unit	26,000,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	239,660,000						100 %	314,800,000	
2.9.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN		4,000,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	10 Rekening	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	10 Rekening	154,200,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Orang	156,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	8 Orang	156,600,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	115,700,000						100 %	115,700,000	
2.9.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23 Unit	74,210,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	23 Unit	74,210,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara	5 Unit	2,500,000				1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	5 Unit	2,500,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	13,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	5 Unit	13,990,000	Dinas Perikanan
2.9.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	ASN	3 Unit	25,000,000	Dinas Perikanan
2.9.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			0							926,650,000	
2.9.2.2	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0							926,650,000	
2.9.2.2.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	562,800,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 9 2 2 2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang dibangun	1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	348,950,000	Dinas Perikanan
2 9 2 2 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	6 Kali	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Kali	14,900,000	Dinas Perikanan
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			0							703,700,000	
2 9 3 2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			0							186,900,000	
2 9 3 2 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen hasil analisis Neraca Bahan Makanan yang dihasilkan	1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	45,000,000	Dinas Perikanan
2 9 3 2 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	40 Kali	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Kali	20,000,000	Dinas Perikanan
2 9 3 2 4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan dari pemantauan	4 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	21,200,000	Dinas Perikanan
2 9 3 2 5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terlaksananya satgas pangan daerah	2 Kali	0						2 Kali	30,500,000	Dinas Perikanan
2 9 3 2 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terlaksananya Distribusi TTI ke masyarakat	5 Gapoktan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Gapoktan	70,200,000	Dinas Perikanan
2 9 3 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			0							75,000,000	
2 9 3 2 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten setara beras	3 Kg	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Kg	50,000,000	Dinas Perikanan
2 9 3 2 4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi peremajaan cadangan pangan pemerintah	4 Kali	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kali	25,000,000	Dinas Perikanan
2 9 3 2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			0							441,800,000	
2 9 3 2 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Angka Kecukupan Gizi	92 Persen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				92 Persen	21,800,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 9 3 2 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang dilakukan	1 Kali	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kali	420,000,000	Dinas Perikanan
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			0							82,000,000	
2 9 4 2	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			0							55,000,000	
2 9 4 2 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	55,000,000	Dinas Perikanan
2 9 4 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			0							27,000,000	
2 9 4 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27,000,000	Dinas Perikanan
2 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			0							22,000,000	
2 9 5 2	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			0							22,000,000	
2 9 5 2 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang direkomendasikan aman untuk dikonsumsi	5 Jenis	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Jenis	22,000,000	Dinas Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	100659 Ton	1,634,225,525						100659 Ton	1,923,600,000	
3 25 3 2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang disalurkan	240 Unit	1,322,877,160						240 Unit	1,025,000,000	
3 25 3 2 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan	1 Dokumen	22,877,160		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat Nelayan	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 25 3 2 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/Rehap	1 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat Nelayan	1 Unit	500,000,000	Dinas Perikanan
3 25 3 2 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana Usaha Perikanan ikan yang diberikan Ke Masyarakat	7 Paket	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat Nelayan	7 Paket	500,000,000	Dinas Perikanan
3 25 3 2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan mendapatkan pemberdayaan	35 Orang	161,348,365						35 Orang	175,000,000	
3 25 3 2 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan purse saine yang telah dilatih	20 Orang	76,105,295		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat Nelayan	20 Orang	80,000,000	Dinas Perikanan
3 25 3 2 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan	12 Kelompok	69,922,525		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat Nelayan	12 Kelompok	75,000,000	Dinas Perikanan
3 25 3 2 3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah persil lahan nelayan yang disertifikatkan	80 Persil	15,320,545		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat Nelayan	80 Persil	20,000,000	Dinas Perikanan
3 25 3 2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah tempat pelelangan ikan yang dibangun/rehab	2 Unit	150,000,000						2 Unit	723,600,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 25 3 2 1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab	2 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat	2 Unit	723,600,000	Dinas Perikanan
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	310800 Ton	2,114,620,875						310800 Ton	4,150,000,000	
3 25 4 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok tani pembudidaya ikan yang mendapatkan pemberdayaan	60 Kelompok	115,000,000						60 Kelompok	250,000,000	
3 25 4 2 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya yang diberdayakan	30 Kelompok	50,000,000				1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	30 Kelompok	100,000,000	Dinas Perikanan
3 25 4 2 3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah persil lahan pembudidaya ikan disertifikatkan	100 Persil	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	100 Persil	30,000,000	Dinas Perikanan
3 25 4 2 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/ APBD	30 Kelompok	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	30 Kelompok	120,000,000	Dinas Perikanan
3 25 4 2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	30 Paket	1,999,620,875						30 Paket	3,900,000,000	
3 25 4 2 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan	4 Dokumen	155,446,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya	4 Dokumen	200,000,000	Dinas Perikanan
3 25 4 2 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jalan produksi Tambak yang dibangun Jumlah Jembatan tambak yang disediakan Jumlah Prasarana di BBI yang dibangun	2 Km 2 Unit 1 Unit	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya	2 Km 2 Unit 1 Unit	1,400,000,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 25 4 2 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia	10 Kelompok	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya	10 Kelompok	2,000,000,000	Dinas Perikanan
3 25 4 2 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan	30 Orang	44,174,875		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya	30 Orang	100,000,000	Dinas Perikanan
3 25 4 2 6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan	80 Ekor	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya	80 Ekor	200,000,000	Dinas Perikanan
3 25 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	92 %	50,000,000						92 %	80,000,000	
3 25 5 2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	2 Kelompok	50,000,000						2 Kelompok	80,000,000	
3 25 5 2 1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap	24 Kali	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat Pesisir/Kelompok masyarakat pengawas	24 Kali	80,000,000	Dinas Perikanan
3 25 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan	312 Ton	644,507,458						312 Ton	870,250,000	
3 25 6 2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah masyarakat/kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan	110 Unit	138,538,050						110 Unit	250,000,000	
3 25 6 2 1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	4 Dokumen	138,538,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat/Kelompok usaha Pengolahan Hasil Perikanan	4 Dokumen	250,000,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 25 6 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha perikanan yang dibina	11 Kelompok	86,925,550						11 Kelompok	120,250,000	
3 25 6 2 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	5 Kali	86,925,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat/Kelompok Pengolahan ikan	5 Kali	120,250,000	Dinas Perikanan
3 25 6 2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	4 Laporan	419,043,858						4 Laporan	500,000,000	
3 25 6 2 2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang dibangun/diberikan	5 Unit	419,043,858		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Masyarakat/Kelompok Pengolahan Ikan	5 Unit	500,000,000	Dinas Perikanan
		Jumlah Sarana Pengolahan ikan yang di berikan bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	6 Unit				6 Unit					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			23,162,243,745								56,667,253,220
2 19 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	4,068,243,745							5,408,620,483	
2 19 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45,000,000							74,000,000	
2 19 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	29,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	37,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 Dokumen	3,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	11,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 Dokumen	3,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	11,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Dokumen	15,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.19.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,007,863,864							3,578,228,075	
2.19.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	26 orang	2,979,863,864	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		26 orang	3,505,320,050	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	28,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Dokumen	72,908,025	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			17,379,881							18,379,881	
2.19.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	17,379,881	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Dokumen	18,379,881	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			143,500,000							177,170,093	
2.19.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			21,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			40,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	87,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Dokumen	87,170,093	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	7 orang	35,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		7 orang	50,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			446,000,000							749,931,650	
2.19.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 Jenis	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		17 Jenis	28,472,950	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Unit	1,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Unit	150,736,300	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	7,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Jenis	11,303,500	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.19.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Jenis	30,999,900	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	72 Eks	7,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		72 Eks	7,500,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	2500 Kota k	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2500 Kota k	26,245,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	785 Kali	390,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				785 Kali	494,674,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	75 Kali							75 Kali		
2.19.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			60,000,000							415,191,784	
2.19.1.2.1.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang diadakan	3 Unit	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Unit	100,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 unit	115,191,784	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan/dibangun	1 UNIT	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 UNIT	200,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			301,500,000							302,999,000	
2.19.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2000 Surat	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2000 Surat	3,999,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	48 Rek/Bl n	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		48 Rek/Bl n	50,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.19.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	18 Orang	249,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		18 Orang	249,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47,000,000							92,720,000	
2.19.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Unit	27,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Unit	48,220,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 Unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		60 Unit	18,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	26,500,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1,291,000,000							2,962,490,804	
2.19.2.2	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			932,000,000							2,602,490,804	
2.19.2.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pemudi yang mengikuti Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah Peserta utusan Kab. Luwu Timur yang mengikuti kegiatan seleksi Pertukaran Pemuda antar Provinsi (PPAP) di tingkat provinsi	2 Orang 4 Orang	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		2 Orang 4 Orang	82,314,901	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2.2.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah kegiatan pameran yang di laksanakan/ ikuti	1 Keg.	3,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Keg.	50,227,796	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2.2.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan BINLAT Calon Polisi Tk. Kab	30 Orang	3,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		30 Orang	200,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.19.2.2.6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang di bangun/disediakan	1 Unit	120,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit	350,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2.2.9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan pelatihan paskiba TK. Kecamatan/Tk. Kabupaten	817 Orang	800,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		817 Orang	1,919,948,107	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.2.2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			359,000,000							360,000,000	
2.19.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	35 OKP	359,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		35 OKP	360,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			17,488,000,000							47,296,141,933	
2.19.3.2.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			16,750,000,000							44,783,840,000	
2.19.3.2.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tiap kecamatan di bangun	10 Unit	16,750,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		10 Unit	44,783,840,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.2.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			12,000,000							918,484,541	
2.19.3.2.2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Olahraga berbakat yang dilaksanakan /diikuti	1 Cabor	7,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Cabor	414,992,881	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kegiatan Olahraga Unggulan daerah yang dilaksanakan/diikuti	1 Cabor							1 Cabor		
2.19.3.2.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Pelajar yang mengikuti Event Liga Pelajar	40 Orang	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		40 Orang	503,491,660	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Peserta Olahraga Pelajar yang mengikuti Event Olahraga Pelajar di Tk. Kabupaten dan Provinsi	40 Orang							40 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.19.3.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			10,000,000							132,496,530	
2.19.3.2.3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pelajar yang mengikuti pembinaan cabang olahraga berprestasi	40 Orang	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		40 Orang	119,999,230	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah dokumen Inventarisasi Organisasi dan sarana prasarana olahraga	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	12,497,300	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.2	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			461,000,000							1,135,997,327	
2.19.3.2.2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3 Cabor	61,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		3 Cabor	135,997,327	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.2.3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah organisasi olahraga yang dikerjasamakan dengan lembaga terkait	4 Cabor	400,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		4 Cabor	1,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			255,000,000							325,323,535	
2.19.3.2.1.2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dilaksanakan	1 Cabor	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Cabor	57,600,724	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.2.1.4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah kegiatan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat yang dilaksanakan/diikuti	1 Cabor	200,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Cabor	152,531,027	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.2.1.5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah event Olahraga Tradisional Daerah yang dilaksanakan	5 Cabor	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		5 Cabor	115,191,784	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			315,000,000							1,000,000,000	
2.19.4.2	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			315,000,000							1,000,000,000	
2.19.4.2.2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah gugus depan yang dibina	100 Gugus Depan	305,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		100 Gugus Depan	500,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.19.4.2.6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana Prasarana yang dibangun/diadakan	2 unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		2 unit	500,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			0							1,749,597,477	
2.22.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			0							1,448,597,860	
2.22.2.2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0							400,787,860	
2.22.2.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Event budaya yang diselenggarakan (Event)	5 Event		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan		5 Event	400,787,860	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kegiatan dialog kebudayaan yang dilaksanakan	2 Dialog						2 Dialog			
2.22.2.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0							250,000,000	
2.22.2.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Festival Kebudayaan yang Diselenggarakan/ diikuti	1 Event		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan		1 Event	250,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.2.2	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0							797,810,000	
2.22.2.2.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah alat-alat dan Pakaian bercorak kesenian yang diadakan	7 Unit		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan		7 Unit	797,810,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya Daerah yang dibangun/diadakan (Unit)	1 Unit						1 Unit			
2.22.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			0							225,999,911	
2.22.3.2	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0							225,999,911	
2.22.3.2.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni dan Paduan Suara yang dibina dan dikembangkan	25 Sanggar Seni		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan		25 Sanggar Seni	225,999,911	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			0							74,999,706	
2.22.5.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			0							74,999,706	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.22.5.2.1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Kekayaan Budaya Daerah yang di lestari	1 Lokasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan		1 Lokasi	74,999,706	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1,460,620,119						4,512,607,683	
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				899,000,000						2,949,809,055	
3.26.2.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				39,000,000						449,809,055	
3.26.2.2.3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Master Plan dan rencana bisnis destinasi pariwisata yang dibuat	4 Dokumen	39,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata		4 Dokumen	449,809,055	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.2.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				860,000,000						2,500,000,000	
3.26.2.2.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun tiap tahun	20 Paket	860,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata		20 Paket	2,500,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				432,500,000						997,653,469	
3.26.3.2	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				432,500,000						997,653,469	
3.26.3.2.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis kegiatan pameran dan promosi pariwisata yang diikuti/dilaksanakan tiap tahun	6 Jenis	350,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata		6 Jenis	630,796,236	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.3.2.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pariwisata yang diikuti/dilaksanakan tiap Tahun	5 Event	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata		5 Event	259,998,768	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 26 3 2 3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			2,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata			25,889,685	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3 26 3 2 4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Destinasi Parwisata yang Koordinasikan kemitraan Pembangunannya	1 Lokasi	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata		1 Lokasi	80,968,780	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			129,120,119							565,145,159	
3 26 5 2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			129,120,119							565,145,159	
3 26 5 2 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang dibentuk dan dibina	4 Kelompok	86,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata		4 Kelompok	376,145,159	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3 26 5 2 5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	4 Kelompok	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata		4 Kelompok	39,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3 26 5 2 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	4 Kelompok	23,120,119	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata		4 Kelompok	150,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1,202,603,287						1,524,803,287	
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah ketersediaan pangan utamam setara pangan pokok	245,426.00 ton	667,800,000						245,426.00 ton	890,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 9 2 2	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan yang Dibangun	6 unit	667,800,000						6 unit	890,000,000	
2 9 2 2 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun (unit)	1 unit	370,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	1 unit	490,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 2 2 2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang dibangun	1 unit	250,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 unit	350,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 2 2 5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (dokumen)	1 Dokumen	47,800,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan	6 lokasi	438,853,287						6 lokasi	538,853,287	
2 9 3 2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kebutuhan Pangan Pokok	24.5 ton/kapita/hari	157,581,955						24.5 ton/kapita/hari	157,581,955	
2 9 3 2 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen hasil analisis Neraca Bahan Makanan yang dihasilkan	1 dokumen	40,735,910	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat kab. Luwu timur	1 dokumen	40,735,910	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3 2 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan (kali)	40 kali	16,120,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat kab. Luwu timur	40 kali	16,120,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 9 3 2 4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan dari pemantauan (dokumen)	4 Dokumen	20,726,045	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	masyarakat kab. Luwu timur	4 Dokumen	20,726,045	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3 2 5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terlaksananya Satgas Pangan Daerah (Kegiatan)	2 kegiatan	30,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat kab. Luwu timur	2 kegiatan	30,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3 2 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terlaksananya distribusi (Gapoktan) TTI ke masyarakat (Kegiatan)	5 kegiatan	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat kab. Luwu timur	5 kegiatan	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan yang Dikelola	7000 Kg	59,706,405						7000 Kg	59,706,405	
2 9 3 2 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten setara beras (kg)	3000 kg	44,906,405	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3000 kg	44,906,405	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3 2 4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi peremajaan cadangan pangan pemerintah (kali)	4 kali	14,800,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 kali	14,800,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3 2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pencapaian target konsumsi	1 dokumen	221,564,927						1 dokumen	321,564,927	
2 9 3 2 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Angka Kecukupan Gizi	92 %	21,564,927	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	92 %	21,564,927	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 3 2 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang dilakukan (masyarakat)	1 dokumen	200,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 dokumen	300,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah lokasi yang rawan dan rentan pangan yang intervensi	3 lokasi	62,000,000						3 lokasi	62,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2 9 4 2	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terpetakannya Lokasi Rawan Pangan dan Rentan Pangan Kecamatan	1 Dokumen	47,800,000						1 Dokumen	47,800,000		
2 9 4 2 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	1 Dokumen	47,800,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	1 Dokumen	47,800,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2 9 4 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten kota	5 Kali	14,200,000						5 Kali	14,200,000		
2 9 4 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	5 kali	14,200,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 kali	14,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	presentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100 %	33,950,000						100 %	33,950,000		
2 9 5 2	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pangan segar asal tumbuhan yang di uji	5 jenis	33,950,000						5 jenis	33,950,000		
2 9 5 2 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang direkomendasikan aman untuk dikonsumsi	5 kali	33,950,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 kali	33,950,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				41,633,506,850							52,944,598,412	
3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	24,109,516,202						0 [?]	25,770,607,764		
		presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %							100 %			
3 27 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	181,000,000						100 %	181,000,000		
3 27 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	73,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	3 Dokumen	73,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 27 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perangkat daerah	2 Dokumen	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	2 Dokumen	6,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	2 Dokumen	7,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	2 Dokumen	95,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	21,144,805,297						100 %	22,605,896,859	
		presentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %							100 %		
3 27 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	193 orang	21,136,805,297	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	193 orang	22,597,896,859	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	18 Dokumen	8,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	presentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	5,000,000						100 %	5,000,000	
3 27 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	4 Dokumen	5,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	174,000,000						100 %	174,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
3	27	1	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12 dokumen	26,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	12 dokumen	26,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	2 orang	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	20 orang	98,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	20 orang	98,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	100 %	713,301,432						100 %	913,301,432	
						presntase rata -rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %							100 %		
3	27	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	18 jenis	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	18 jenis	15,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	81 unit	138,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	81 unit	138,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	2 jenis	4,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 27 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	3 jenis	45,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	220 eks	22,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	220 eks	22,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di fasilitasi kunjungannya	500 orang	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	500 orang	12,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	98 Kali	477,301,432	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	98 Kali	677,301,432	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	794,000,000						100 %	794,000,000	
		Presntase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %							100 %		
3 27 1 2.1 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 unit	550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	1 unit	550,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	12 unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	12 unit	30,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 27 1 2.1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan / mesin lainnya yang diadakan	2 unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	2 unit	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana yang diadakan	10 unit	164,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	10 unit	164,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	100 %	418,159,473						100 %	418,159,473	
		presentase rata - rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							100 %		
3 27 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang disediakan	2500 Surat	2,759,473	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	2500 Surat	2,759,473	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	444 Rekening	155,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	444 Rekening	155,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor	28 orang	260,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	28 orang	260,400,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	679,250,000						100 %	679,250,000	
		presntase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %							100 %		
3 27 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	186 unit	424,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	186 unit	424,450,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 27 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	81 unit	54,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	81 unit	54,800,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	19 unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	19 unit	200,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
						DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penggunaan-Pembangunan/Re novasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian						
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	presentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	6,114,000,000						100 %	7,564,000,000	
3 27 2 2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	persentase dan sarana pertanian yang dibangun	100 %	1,005,000,000						100 %	1,005,000,000	
		presentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 %							100 %		
		Presentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %							100 %		
3 27 2 2 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	presentase capaian penggunaan brigade alsintan	95 %	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	95 %	130,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		presentase tersalurannya pupuk subsidi sesuai kuota dan tepat sasaran	95 %		95 %							
3 27 2 2 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Presentase capaian kegiatan bantuan sarana pertanian yang didampingi	95 %	875,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	95 %	875,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 2 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme kewenangan kabupaten kota	100 %	2,610,000,000						100 %	1,740,000,000	
		presentase prasarana dan sarana pertanian yang dibangun	100 %							100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 27 2 2 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Sara dan prasaran pendukung IB yang diadakan	4 Jenis	540,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	4 Jenis	540,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 2 2 3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Luas lahan tanaman kakao yang diektensifikasi/direhap/diremajakan (Ha)	100 Ha	2,070,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	100 Ha	1,200,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 2 2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prasarana dan saran pertanian yang dibangun	100 %	499,000,000						100 %	699,000,000	
		presentase peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten /kota	100 %							100 %		
3 27 2 2 2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih padi yang di produksi	8000 Kg	499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	8000 Kg	699,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah bibit hortikultura yang dibagikan	1000 Pohon							1000 Pohon		
		Jumlah bibit jagung yang dibagikan	5000 Kg							5000 Kg		
		persentase peredaran bahan pakan/pakan,benih/bibit hijauan pakan ternak yang diawasi	100 %							100 %		
3 27 2 2.1	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase prasarana dan saran pertanian yang dibangun	100 %	2,000,000,000						100 %	4,120,000,000	
		presentase penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota lain	100 %							100 %		
3 27 2 2.1 1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah sapi betina yang diadakan	100 Ekor	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan	0	100 Ekor	4,120,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah ternak sapi yang di gemukkan	50 Ekor							50 Ekor		
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	[?]	0 [?]	7,829,000,000						0 [?]	13,629,000,000	
		presentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100 %							100 %		
3 27 3 2	Pengembangan Prasarana	presentase prasarana pertanian yang dikembangkan	100 %	135,000,000						100 %	135,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pertanian	presentase prasarana yang dibangun	100 %	135,000,000						100 %	135,000,000	
3 27 3 2 1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	jumlah luas lahan pertanian pangan yang disertifikatkan	14000 Ha	135,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan	0	14000 Ha	135,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah perda yang diterbitkan	1 Dokumen							1 Dokumen		
3 27 3 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	presentase pembangunan prasarana pertanian	100 %	7,694,000,000						100 %	13,494,000,000	
		presentase pembnaguanan prasarana pertanian	100 %							100 %		
		Presentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100 %							100 %		
		Presentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %							100 %		
3 27 3 2 1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah jaringan irigasi yang dibangun	2.5 KM	1,115,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	2.5 KM	1,615,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah sumber-sumber Air yang dibangun/rehab	20 unit			DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Re novasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				20 unit		
		Panjang jides yang dibangun/rehab	2750 meter							2750 meter		
3 27 3 2 2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	jumlah embung yang dibangun	5 unit	129,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	5 unit	129,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Re novasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian						
		jumlah jalan usaha tani yang dibangun	58347 meter		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				58347 meter		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 27 3 2 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah panjang jalan produksi yang dibangun/ditingkatkan	23135 meter	6,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Re novasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	23135 meter	11,000,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 3 2 4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	jumlah dam parit yang dibangun	5 unit	412,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	5 unit	712,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 3 2 6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	jumlah pintu air yang dibangun	20 unit	38,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	20 unit	38,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	100 %	334,000,000						100 %	434,000,000	
3 27 4 2	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten /kota	100 % 3 %	229,000,000						100 % 3 %	329,000,000	
3 27 4 2 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah hewan yang terlayani kesehatannya	30500 ekor	229,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	30500 ekor	329,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			100 %							100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 27 4 2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	presentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner Presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	100 % 100 %	105,000,000						100 % 100 %	105,000,000	
3 27 4 2 1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pjumlah capaian statistik peternakan	1 dokumen	105,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	1 dokumen	105,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian	100 %	480,000,000						100 %	680,000,000	
3 27 5 2	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 %	480,000,000						100 %	680,000,000	
3 27 5 2 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	persentase luas serangan opt yang dikendalikan	95 %	480,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	95 %	680,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase penyuluhan pertanian	100 %	2,766,990,648						100 %	4,866,990,648	
3 27 7 2	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Presentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	2,766,990,648						100 % 100 % 100 %	4,866,990,648	
3 27 7 2 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen program yang disusun jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah penyuluh yang mengikuti sosialisasi bimtek/diklat Jumlah petugas inseminator yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah rekomendasi teknis yang ditindak lanjuti	11 Dokumen 75 orang 200 orang 5 orang 6 Dokumen	208,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	11 Dokumen 75 orang 200 orang 5 orang 6 Dokumen	308,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 7 2 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan	Jumlah data base kepenyuluhan yang disusun jumlah kelompok tani yang dilatih	2 Dokumen 126 kelompok	2,558,990,648	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan	0	2 Dokumen 126 kelompok	4,558,990,648	Dinas Pertanian dan Ketahanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
							Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	dan Desa	Jumlah kelompok tani yang dilatih	12 kelompok					Ketertarikan dan Pengembangan pariwisata		12 kelompok		Perencanaan Pangan		
		Jumlah musyawarah tani (tudang sipulung) yang dilaksanakan	19 kali							19 kali				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			4,161,540,303								5,427,796,908		
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,718,833,759								100 %	4,236,647,291	
2 17 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	73,770,469								100 %	78,355,469	
2 17 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 dokumen	27,063,751	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 dokumen	28,673,751	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2 17 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	2,272,003	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 dokumen	2,272,003	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2 17 1 2 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA perangkat daerah	1 dokumen	2,272,003	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	2,272,003	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2 17 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1,996,803	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 dokumen	1,996,803	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2 17 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA perangkat daerah	1 dokumen	1,525,369	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	1,525,369	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2 17 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	38,640,540	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	10 dokumen	41,615,540	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian		
2 17 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	2,910,227,678								100 %	2,934,822,635	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	23 PNS	2,873,891,778	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	23 PNS	2,895,606,735	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran	18 dokumen	36,335,900	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	18 dokumen	39,215,900	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100 %	19,626,310						100 %	26,626,310	
2.17.1.2.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah perangkat daerah	2 dokumen	3,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 dokumen	6,800,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah perangkat daerah yang dibina, diawasi dan dikendalikan	7 unit	1,300,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 unit	7,300,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah perangkat daerah	2 dokumen	5,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 dokumen	2,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	9,026,310	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 dokumen	10,026,310	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100 %	6,865,500						100 %	21,275,500	
2.17.1.2.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi daerah perangkat daerah	60 juta	1,100,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	60 juta	15,510,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	5,765,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	4 dokumen	5,765,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	97,339,869						100 %	173,198,444	
2.17.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai perangkat daerah	33 orang	13,621,425	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	33 orang	14,630,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan TUSI	4 ASN	47,750,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	4 ASN	72,600,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memahami peraturan perundangan	3 orang	4,598,444	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 orang	46,598,444	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundangan	10 orang	31,370,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	10 orang	39,370,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 %	347,901,100						100 %	502,608,100	
2.17.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	10 jenis	2,498,100	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	10 jenis	2,498,100	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 unit	2,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	7 unit	2,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	1 unit	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 unit	8,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	28 jenis	3,263,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	28 jenis	6,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	12,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 jenis	14,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 exemplar	7,320,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	60 exemplar	8,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	200 orang	4,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	200 orang	10,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	294 kali	310,020,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	294 kali	447,110,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis perangkat daerah	50 dokumen	2,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	50 dokumen	5,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	16,019,236						100 %	94,019,500	
2.17.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 unit	3,499,736	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	5 unit	47,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	7 unit	10,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	7 unit	40,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	2,019,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 unit	6,019,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	139,963,597						100 %	185,741,333	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	1500 surat	14,763,597	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1500 surat	21,763,597	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air terbayarkan	5 rekening	68,400,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	5 rekening	80,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35 unit	1,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	35 unit	23,977,736	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 orang	55,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	4 orang	60,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	107,120,000						100 %	220,000,000	
2.17.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	58,850,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	10 unit	90,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	54 unit	28,270,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	54 unit	70,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 unit	60,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang terbit izin usaha simpan pinjam koperasi	0 %	20,000,000						0 %	39,017,790	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.2.2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	6 %	20,000,000						6 %	39,017,790	
2.17.2.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang difasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan cabang koperasi	5 KSP/USP	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	5 KSP/USP	39,017,790	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	60.24 %	29,139,000						60.24 %	130,207,000	
2.17.3.2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	39.98 %	29,139,000						39.98 %	130,207,000	
2.17.3.2.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi	100 koperasi	29,139,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	100 koperasi	130,207,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi	50.72 %	66,854,936						50.72 %	85,958,040	
2.17.4.2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi sehat yang dilakukan penilaian kesehatan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	31.25 %	66,854,936						31.25 %	85,958,040	
2.17.4.2.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi sehat	22 KSP/USP	66,854,936	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	22 KSP/USP	85,958,040	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan	13.15 %	93,445,354						13.15 %	192,021,377	
2.17.5.2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	19.32 %	93,445,354						19.32 %	192,021,377	
2.17.5.2.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian	10 koperasi	93,445,354	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	10 koperasi	192,021,377	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	0 %	10,000,000						0 %	41,243,790	
2.17.6.2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	3 %	10,000,000						3 %	41,243,790	
2.17.6.2.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	4 koperasi	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	4 koperasi	41,243,790	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	3.37 %	133,267,254						3.37 %	440,941,870	
2.17.7.2	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru berskala mikro	114 WUB	133,267,254						114 WUB	440,941,870	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.7.2.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang terdata	3000 UMK	42,722,534	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	3000 UMK	79,075,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.7.2.2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra	55 UMK	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	55 UMK	42,906,925	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.7.2.3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi	45 UMK	25,544,720	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	45 UMK	37,978,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.7.2.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	70 UMK	35,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	70 UMK	167,423,445	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.7.2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah konsultan UMKM	2 konsultan	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	2 konsultan	113,557,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan skala usaha mikro	1.13 %	90,000,000						1.13 %	261,759,750	
2.17.8.2	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1.33 %	90,000,000						1.33 %	261,759,750	
2.17.8.2.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan	Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi sertifikasi jaminan produk halal dan hak merek	35 UMK	90,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Belaku UMK	35 UMK	261,759,750	Dinas Perdagangan, Koperasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			30,000,000			Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata			201,733,730	Koperasi, UKM Dan Perindustrian
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				841,796,579						6,646,600,000		
3	30	3								90 %	5,150,000,000	
3	30	3	2							5 pasar	5,000,000,000	
3	30	3	2	1						5 pasar	5,000,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	3	2							100 %	150,000,000	
3	30	3	2	1						0	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	4								13 %	676,600,000	
3	30	4	2							100 %	646,600,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 30 4 2 2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah informasi jurnal harga dari kecamatan	132 jurnal	85,485,420	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	132 jurnal	96,600,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3 30 4 2 3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar	1800 RTM	229,488,479	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	1800 RTM	550,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3 30 4 2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100 %	26,899,736						100 %	30,000,000	
3 30 4 2 3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah bahan pokok, bahan penting dan barang dalam pengawasan yang diawasi	3 komoditi	26,899,736	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	0	3 komoditi	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3 30 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah ekspor perdagangan	7800 ton	119,616,303						7800 ton	670,000,000	
3 30 5 2	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk yang diekspor atau diperdagangkan antar pulau	90 %	119,616,303						90 %	670,000,000	
3 30 5 2 1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah buku produk potensi unggulan daerah	25 buku	14,151,525	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku ekspor	25 buku	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3 30 5 2 2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional	1 produk	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku ekspor	1 produk	20,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 30 5 2 2	Pameran Dagang Nasional			20,000,000					Pelaku ekspor		300,000,000	Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3 30 5 2 4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah produk ekspor unggulan yang didaftarkan untuk misi dagang	1 produk	50,112,718	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku ekspor	1 produk	300,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3 30 5 2 6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang mengetahui prosedur dan dokumen kegiatan ekspor/impor	25 badan usaha	35,352,060	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Pelaku ekspor	25 badan usaha	40,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang bertanda tera sah	90 %	60,306,641						90 %	150,000,000	
3 30 6 2	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang akurat	533 UTTP	60,306,641						533 UTTP	150,000,000	
3 30 6 2 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang diuji	550 UTTP	60,306,641	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Para pedagang di pasar		150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			187,061,382							685,000,000	
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang berkembang	5.51 %	166,326,096						5.51 %	600,000,000	
3 31 2 2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina	60 IKM	166,326,096						60 IKM	600,000,000	
3 31 2 2 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber	Jumlah IKM Pangan/Handicraft dan Produk IKM Pangan/handycraft yang dibina dan dipromosikan	10 produk	110,441,075		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi	IKM	10 produk	350,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
3 31 2 2 4	Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM Sektor Pangan dan handicraft yang dibina Jumlah kegiatan rapat kerja Dekranasda	50 IKM 2 kegiatan	110,441,075				kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	IKM	50 IKM 2 kegiatan	350,000,000	Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3 31 2 2 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM dalam sentra yang dibina dan dikembangkan	30 IKM	35,591,863	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	IKM	30 IKM	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3 31 2 2 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Pangan yang mendapatkan binaan GMP	10 IKM	20,293,158	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	IKM	10 IKM	100,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pendataan Data Base IKM	90 %	20,735,286						90 %	85,000,000	
3 31 4 2	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data IKM yang dihasilkan dan diidentifikasi	110 IKM	20,735,286						110 IKM	85,000,000	
3 31 4 2 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data ikm yang dihasilkan setelah pengidentifikasian	110 IKM	20,735,286	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	IKM	110 IKM	85,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5,130,934,190						7,153,719,750	
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,859,403,190						100 %	4,905,355,000	
2 7 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	63,400,000						100 %	85,000,000	
2 7 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	5,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	8,500,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	6,500,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 7 1 2 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	2,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	2,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	2 Dokumen	2,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	4,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	45,900,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10 Dokumen	53,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 % 100 %	3,230,023,190						100 % 100 %	3,611,655,000	
2 7 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan	30 Orang	3,185,023,190	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	30 Orang	3,564,655,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	19 Dokumen	45,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	19 Dokumen	47,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100 % 100 %	14,500,000						100 % 100 %	20,000,000	
2 7 1 2 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	12,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	16,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
			100 %							100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
			4	5	6	7	Nasional	Daerah		8	9		10
2 7 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	55,500,000							100 %	94,000,000	
2 7 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang diadakan	49 pasang	0			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	49 pasang	37,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
2 7 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	30,900,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	32,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
2 7 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-undangan	7 Orang	24,600,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7 Orang	25,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
2 7 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	256,900,000						100 %	331,700,000		
2 7 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5 Jenis	1,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5 Jenis	1,700,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
2 7 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13 Jenis	3,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13 Jenis	3,500,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
2 7 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	7 Jenis	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7 Jenis	18,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
2 7 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	72 Eksemplar	7,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	72 Eksemplar	8,500,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
2 7 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi Kunjungannya	100 Orang	9,900,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100 Orang	10,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
2 7 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan	35 Kali	220,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	35 Kali	290,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan	120 Kali	120 Kali										
2 7 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100 %	25,000,000						100 %	535,000,000		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 7 1 2.1 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Unit	375,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2.1 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Unit	100,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1 Unit	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Unit	10,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2.1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang diadakan	2 Unit	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Unit	50,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	123,200,000						100 %	126,000,000	
		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %							100 %		
2 7 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan	1500 Surat	17,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1500 Surat	19,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan	36 Rekening	48,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	36 Rekening	48,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan	3 Orang	58,200,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Orang	59,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	90,880,000						100 %	102,000,000	
		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	80 %							80 %		
2 7 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 Unit	61,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	21 Unit	65,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	15,880,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	26 Unit	17,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 7 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	14,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Unit	20,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75.75 %	534,000,000						75.75 %	820,500,000	
2 7 3 2	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	65 Orang	534,000,000						65 Orang	730,500,000	
2 7 3 2 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3	35 Orang		534,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Calon Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan	35 Orang		730,500,000
2 7 3 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dokumen Perizinan keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang menjadi mitra binaan Pemerintah	1 Dokumen	0							1 Dokumen	
2 7 3 2 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 %							100 %		
2 7 3 2 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	3 LPKS	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Calon Tenaga Kerja Laki-laki dan Perempuan	3 LPKS	90,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.48 %	249,800,000						70.48 %	633,000,000	
2 7 4 2	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	41.98 %	185,800,000						41.98 %	265,000,000	
2 7 4 2 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pemantauan terhadap Perusahaan Pemberi Kerja yang melakukan penempatan tenaga kerja baik melalui AKL maupun AKAD	50 Perusahaan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan	50 Perusahaan	20,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 4 2 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	330 Orang	60,500,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan	330 Orang	80,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 4 2 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan	40 Orang	125,300,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan	40 Orang	165,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 7 4 2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0						1 Dokumen	15,000,000	
2 7 4 2 2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Dokumen LPTKS yang diberikan Izin serta diberikan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang direkrut dan ditempatkan	1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			LPTKS	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 4 2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase terlaksananya penyebarluasan informasi sistem pelayanan ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja	100 %	26,000,000						100 %	243,000,000	
2 7 4 2 1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase terpeliharanya sistem pelayanan ketenagakerjaan dan kegiatan operasional sistem informasi pasar kerja online	100 %	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Calon Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan	100 %	12,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 4 2 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	100 Info Loker	26,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Calon Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan	100 Info Loker	31,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 4 2 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Perusahaan Pemberi Kerja yang membuka lowongan kerja untuk mengikuti pameran lowongan kerja kepada para pencari kerja	10 Perusahaan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Calon Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan	10 Perusahaan	200,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 4 2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	100 %	38,000,000						100 %	100,000,000	
2 7 4 2 1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	4 Orang	38,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja Migran Indonesia (PMI)	4 Orang	50,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 4 2 2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran yang mendapatkan pelayanan	3 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pekerja Migran Indonesia (PMI)	3 Orang	50,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 4 2.1	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang di perpanjang ijinnya dengan lokasi kerjanya 1 (satu) Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi	2 Orang	0						2 Orang	10,000,000	
2 7 4 2.1 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang di perpanjang ijinnya dengan lokasi kerjanya 1 (satu) Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi	2 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan	2 Orang	10,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	22.82 %	487,731,000						22.82 %	794,864,750	
2 7 5 2	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program Jamsostek	100 %	115,130,000						100 %	195,000,000	
2 7 5 2 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB	15 Perusahaan	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha	15 Perusahaan	65,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 5 2 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang dibina	45 Perusahaan	95,130,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha	45 Perusahaan	130,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 5 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi dan dimediasi	100 %	372,601,000						100 %	599,864,750	
2 7 5 2 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	4 Kasus	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha	4 Kasus	110,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 5 2 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun yang di fasilitasi dan dimediasi	10 Kasus	90,500,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha	10 Kasus	146,455,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 5 2 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina	32 OPP	51,136,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha	32 OPP	64,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2 7 5 2 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	4 Rekomendasi	110,735,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha	4 Rekomendasi	150,345,250	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 7 5 2 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan	1 Dokumen	110,230,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha	1 Dokumen	129,064,500	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	[?]	0 [?]	0						0 [?]	600,000,000	
3 31 2 2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM Pangan yang mendapatkan binaan GMP	10 IKM	0						10 IKM	600,000,000	
3 31 2 2 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM Pangan/Handicraft beserta produknya yang dibina dan dipromosikan	8 IKM	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Industri Kecil dan Menengah (IKM)	8 IKM	400,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
		Jumlah IKM sektor handicraft yang dibina	20 IKM							20 IKM		
		Jumlah IKM Sektor Pangan yang dibina	30 IKM							30 IKM		
		Jumlah kegiatan rapat kerja Dekranasda	2 IKM							2 IKM		
3 31 2 2 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM dalam sentra yang dibina dan dikembangkan	30 IKM	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Industri Kecil dan Menengah (IKM)	30 IKM	120,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
3 31 2 2 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Pangan yang mendapatkan binaan GMP	10 IKM	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Industri Kecil dan Menengah (IKM)	10 IKM	80,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
3 31 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	[?]	0 [?]	0						0 [?]	55,000,000	
3 31 3 2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			0							55,000,000	
3 31 3 2 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang dibina terkait izin usaha industri	5 IKM	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Industri Kecil dan Menengah (IKM)	5 IKM	55,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	[?]	0 [?]	0						0 [?]	137,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 31 4 2	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data IKM yang dihasilkan dan diidentifikasi	110 IKM	0						110 IKM	137,000,000	
3 31 4 2 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data ikm yang dihasilkan dan diidentifikasi	110 IKM	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Industri Kecil dan Menengah (IKM)	110 IKM	82,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
3 31 4 2 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah perusahaan industri yang dipantau	2 Perusahaan	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2 Perusahaan	55,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			333,000,000							585,000,000	
3 32 2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penetapan Kawasan Transmigrasi	100 %	40,000,000						100 %	45,000,000	
3 32 2 2	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas Kawasan Transmigrasi yang dicanangkan	60 Ha	40,000,000						60 Ha	45,000,000	
3 32 2 2 1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	1 Kawasan	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Warga Transmigran	1 Kawasan	20,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
3 32 2 2 3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	60 Ha	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Warga Transmigran	60 Ha	25,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
3 32 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)	120 Ha	173,000,000						120 Ha	260,000,000	
3 32 3 2	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK warga Transmigran yang ditempatkan	60 KK	173,000,000						60 KK	260,000,000	
3 32 3 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang direalisasikan	3 MoU	120,000,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Warga Transmigran	3 MoU	160,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
3 32 3 2 2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi pembangunannya	30 Unit	16,000,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Warga Transmigran	30 Unit	20,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3 32 3 2 4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Warga Transmigran yang diseleksi	80 KK	17,000,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Warga Transmigran	80 KK	25,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
3 32 3 2 5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan	80 KK	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Warga Transmigran	80 KK	35,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
3 32 3 2 6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Pelatihan	50 Orang	0	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Warga Transmigran	50 Orang	20,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
3 32 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan	1 Kawasan	120,000,000						1 Kawasan	280,000,000		
		Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan	1 Kawasan							1 Kawasan			
3 32 4 2	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina	100 %	120,000,000						100 %	280,000,000		
3 32 4 2 1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya	50 Orang	40,000,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Warga Transmigran	50 Orang	50,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
3 32 4 2 2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Panjang Batas Penegasan Batas Lahan Transmigran yang diBangun	1000 Meter	80,000,000	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Warga Transmigran	1000 Meter	230,000,000	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 1	SEKRETARIAT DAERAH			60,554,898,900								73,657,284,548	
4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	30,499,824,607							29,581,265,386		
4 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			153,491,056							159,640,856		
4 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dok	46,998,194	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 dok	46,998,194	Sekretariat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 dok	24,998,177	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 dok	24,998,177	Sekretariat Daerah
4 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 dok	19,996,685	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 dok	19,996,685	Sekretariat Daerah
4 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	9 dokumen	61,498,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		9 dokumen	67,647,800	Sekretariat Daerah
4 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11,664,898,900							11,667,398,900	
4 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	85 orang	11,614,898,900	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		85 orang	11,614,898,900	Sekretariat Daerah
4 1 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang diverifikasi	20 kegiatan	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		20 kegiatan	27,500,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 dokumen	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		18 dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			125,300,000							125,300,000	
4 1 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	125,300,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 dokumen	125,300,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			20,000,000							20,000,000	
4 1 1 2 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	12 dokumen	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			188,111,000							188,111,000	
4 1 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12 dok	55,836,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 dok	55,836,000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.1.2.1.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	12 orang	24,200,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 orang	24,200,000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	21 orang	108,075,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		21 orang	108,075,000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,035,010,600							4,265,284,465	
4.1.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	80,855,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Jenis	80,855,000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 unit	223,960,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		8 unit	223,960,000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	10 unit	262,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 unit	275,000,000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Jenis	491,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		8 Jenis	495,000,000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis	78,500,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		9 Jenis	78,500,000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	7630 Eksemplar	355,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		7630 Eksemplar	372,813,000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	12000 orang	667,642,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12000 orang	667,642,000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 1 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	540 kali	1,850,993,600	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		540 kali	2,046,014,465	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang ditata	50 dokumen	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		50 dokumen	25,500,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			595,000,000							1,460,000,000	
4 1 1 2.1 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Unit	0	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	850,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	20 unit	110,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		20 unit	120,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/ Mesin yang diadakan	15 unit	275,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		15 unit	240,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	210,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 unit	250,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,274,154,000							2,377,825,012	
4 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diadministrasikan	5000 surat	29,254,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5000 surat	29,254,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	552 rek	1,035,900,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		552 rek	1,139,571,012	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang terbayarkan	106 orang	1,209,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		106 orang	1,209,000,000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 1 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,701,110,724							1,824,610,724	
4 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	53 unit	905,909,350	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		53 unit	905,909,350	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	2 unit	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 unit	70,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	10 unit	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 unit	35,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	173 unit	152,657,500	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		173 unit	152,657,500	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	3,522,543,874	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Unit	661,043,874	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3,746,693,112							4,204,697,273	
4 1 1 2.1 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan	2 orang	767,758,112	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 orang	838,533,923	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH /WKDH	14 Pasang	81,500,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		14 Pasang	81,500,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah peserta yang melaksanakan medical Check Up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	8 orang	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		8 orang	160,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	4 kegiatan	2,797,435,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 kegiatan	3,124,663,350	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1,290,000,000							966,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 1 1 2.1 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	2 Jenis	765,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Jenis	441,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	2 Jenis	510,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Jenis	510,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	1 Jenis	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Jenis	15,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1	Penataan Organisasi	Jumlah Organisasi lingkup Pemerintahan yang ditata	6 OPD	963,658,059						6 OPD	1,580,000,000	
4 1 1 2.1 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang melaksanakan analisis jabatan	15 OPD	402,509,944	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		15 OPD	500,000,000	Sekretariat Daerah
		Jumlah OPD yang tepat fungsi	15 OPD							15 OPD		
4 1 1 2.1 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur yang dihasilkan	39 SOP	108,290,115	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		39 SOP	230,000,000	Sekretariat Daerah
		Jumlah ID Card yang dicetak	800 ID Card							800 ID Card		
		Jumlah inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	4 Inovasi							4 Inovasi		
4 1 1 2.1 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 laporan	242,396,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 laporan	400,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	84 nilai	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		84 nilai	150,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	135,462,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 1 2.1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			742,397,156							742,397,156	
4 1 1 2.1 1	Fasilitasi Keprotokolanan	Jumlah kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	300 kegiatan	274,314,256	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		300 kegiatan	274,314,256	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.1.2.1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	300 kegiatan	86,270,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		300 kegiatan	86,270,000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.1	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah informasi kedinasan KDH/WKDH yang didokumentasikan/ publikasikan	300 kegiatan	381,812,900	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		300 kegiatan	381,812,900	Sekretariat Daerah
4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			28,657,395,393							41,782,184,231	
4.1.2	Administrasi Tata Pemerintahan			494,401,100							543,841,210	
4.1.2.2	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan administrasi pemerintahan yang ditata	4 dok	183,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 dok	201,300,000	Sekretariat Daerah
4.1.2.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah administrasi pemerintahan yang dikelola	1 dokumen	107,312,700	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 dokumen	118,043,970	Sekretariat Daerah
4.1.2.2	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan otonomi daerah yang difasilitasi	3 dokumen	204,088,400	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 dokumen	224,497,240	Sekretariat Daerah
4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			27,481,126,493							40,469,674,441	
4.1.2.2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Bina Mental Spritual yang difasilitasi	7 kegiatan	11,577,432,552	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		7 kegiatan	24,565,980,500	Sekretariat Daerah
4.1.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang disusun	4 Laporan	15,524,968,941	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Laporan	15,524,968,941	Sekretariat Daerah
4.1.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4 Laporan	378,725,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Laporan	378,725,000	Sekretariat Daerah
4.1.2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			489,247,800							522,522,580	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 1 2 2 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan Perbub yang difasilitasi Penyusunannya	40 Perbub	181,500,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		40 Perbub	200,000,000	Sekretariat Daerah
		Jumlah rancangan Perda yang difasilitasi Penyusunannya	10 Perda							10 Perda		
		Jumlah rancangan SK yang difasilitasi Penyusunannya	350 SK							350 SK		
4 1 2 2 2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Permasalahan hukum yang di Fasilitasi Penyelesaiannya	100 %	160,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	160,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 2 2 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Perda yang didokumentasikan	10 Perda	147,747,800	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Perda	162,522,580	Sekretariat Daerah
		Jumlah pPerbub yang didokumentasikan	40 Perbub							40 Perbub		
		Jumlah SK yang didokumentasikan	350 SK							350 SK		
4 1 2 2	Fasilitasi Kerjasama Daerah			192,620,000							246,146,000	
4 1 2 2 1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MOU yang difasilitasi	8 MOU	89,620,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		8 MOU	98,582,000	Sekretariat Daerah
4 1 2 2 2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah MOU Luar negeri yang difasilitasi	1 MOU	57,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 MOU	85,954,000	Sekretariat Daerah
4 1 2 2 3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerjasama yang dievaluasi	2 MOU	45,500,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 MOU	61,610,000	Sekretariat Daerah
4 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1,397,678,900							2,293,834,931	
4 1 3 2	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			210,132,600							303,727,480	
4 1 3 2 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang difasilitasi	4 BUMD/ BLUD	60,683,200	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 BUMD/ BLUD	72,500,000	Sekretariat Daerah
4 1 3 2 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan pengendalian dan distribusi perekonomian yang disusun	1 Laporan	105,996,400	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Laporan	153,568,800	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 1 3 2 3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang disusun	1 Laporan	43,453,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Laporan	77,658,680	Sekretariat Daerah
4 1 3 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			112,199,700							112,199,700	
4 1 3 2 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Presentase realisasi serapan anggaran SKPD	90 %	63,412,700	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		90 %	63,412,700	Sekretariat Daerah
4 1 3 2 3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan fisik yang terlaksana	4 Laporan	48,787,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Laporan	48,787,000	Sekretariat Daerah
4 1 3 2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			991,459,600							1,750,000,000	
4 1 3 2 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket kegiatan pengadaan yang terlaksana melalui fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa	250 paket	190,741,500	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		250 paket	200,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 3 2 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah aplikasi digital pendukung layanan pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses oleh perangkat daerah, pelaku usaha, dan UMK	7 Aplikasi	762,175,500	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		7 Aplikasi	750,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 3 2 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	38,542,600	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Laporan	800,000,000	Sekretariat Daerah
4 1 3 2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			83,887,000							127,907,751	
4 1 3 2 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi dan Evaluasi kebijakan pertanian,kehutanan, kelaitan dan perikanan	1 laporan	45,187,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 laporan	73,307,751	Sekretariat Daerah
4 1 3 2 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi dan evaluasipertambangan dan lingkungan hidup yang disusun	1 laporan	38,700,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 laporan	54,600,000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4 2	SEKRETARIAT DPRD				32,301,158,350						33,123,571,190	
4 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	22,543,932,120						100 %	22,964,301,203	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4 2 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan ,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Yang Tersusun Tepat Waktu Dan Termanfaatkan	17 Dokumen	44,596,290							17 Dokumen	46,829,085	
4 2 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	28,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	29,000,000	Sekretariat DPRD	
		Jumlah tenaga upah jasa administrasi perencanaan daerah yang terbayarkan	3 orang							3 orang			
4 2 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	6,298,145	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	6,424,108	Sekretariat DPRD	
4 2 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 D	4,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	2 D	4,100,000	Sekretariat DPRD	
4 2 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	6,298,145	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	10 Dokumen	7,304,977	Sekretariat DPRD	
4 2 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Dearah Yang Tersusun Tepat waktu Dan Termanfaatkan	49 Orang	3,018,260,786						49 Orang	3,028,178,244		
4 2 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayarkan	26 Orang	2,943,895,236	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	26 Orang	2,952,471,013	Sekretariat DPRD	
4 2 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Honorarium PPK Keuanga SKPD dan Jumlah Honorarium Bendahara Pengeluaran Yang terbayarkan	2 Orang	74,365,550	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	2 Orang	75,707,231	Sekretariat DPRD	
		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat daerah yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen							18 Dokumen			
		Jumlah Tenaga Upah Jasa Administrasi Keuangan yang Terbayarkan	3 Orang							3 Orang			
4 2 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu Dan Termanfaatkan	4 Dokumen	17,600,000						4 Dokumen	18,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung			
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
4	2	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Honorarium Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Barang yang Terbayarkan	2 Orang	17,600,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	2 Orang	18,000,000	Sekretariat DPRD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan barang Milik Daerah SKPD yang tersusun Tepat waktu	4 Dokumen							4 Dokumen			
4	2	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		114 Orang	519,409,079					114 Orang	526,995,160		
4	2	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya Yang Disediakan	63 Orang	39,900,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	63 Orang	40,698,000	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	4 Dokumen	328,307,129	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	4 Dokumen	329,047,132	Sekretariat DPRD	
					Jumlah Tenaga administrasi kepegawaian yang terbayarkan	25 Orang							25 Orang			
4	2	1	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	151,201,950	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	26 Orang	157,250,028	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Umum Perangkat daerah Yang Terpenuhi	100 Persen	1,217,303,500					100 Persen	1,175,390,440		
4	2	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Jenis	36,026,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	9 Jenis	37,467,040	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Unit	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	5 Unit	71,400,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Jenis	7,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	2 Jenis	7,200,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	2 Jenis	141,046,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	2 Jenis	141,046,500	Sekretariat DPRD
									Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 2 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	2 Jenis	45,900	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1895 Eksa mplar	212,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	1895 Eksa mplar	212,100,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	1000 Ora ng	331,130,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	1000 Ora ng	331,130,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	111 Kali/ Orang	375,001,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	111 Kali/ Orang	375,001,000	Sekretariat DPRD
Jumlah Upah Jasa Sopir yang terbayarkan		6 Orang	6 Orang									
4 2 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Diadakan	11 Unit	400,000,000						11 Unit	420,910,000	
4 2 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 unit	40,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	3 unit	41,200,000	Sekretariat DPRD
										5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		
4 2 1 2.1 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 unit	200,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	2 unit	216,510,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Paket	60,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	3 Paket	61,200,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 unit	100,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	3 unit	102,000,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi	100 Perse n	878,672,000						100 Perse n	919,546,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 2 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diadministrasikan	2400 Surat	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	2400 Surat	51,250,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik yang Terbayarkan	36 Rekening	497,472,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	36 Rekening	530,472,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa yang terbayarkanOPD	1 Orang	331,200,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	1 Orang	337,824,000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan yang Terbayarkan	21 Orang							21 Orang		
		Jumlah Tenaga Jasa Pengamanan yang Terbayarkan	1 Orang							1 Orang		
4 2 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	213 Unit	407,800,000						213 Unit	415,876,000	
4 2 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya	11 Unit	143,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	11 Unit	146,676,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	190 Unit	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	190 Unit	71,400,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan	6 Unit	54,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	6 Unit	55,000,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	3 Unit	71,400,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD	3 unit	71,400,000	Sekretariat DPRD
										5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		
4 2 1 2.2	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Kebutuhan Lpaoran Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD Yang disusun Tepat waktu	30 Orang	14,661,290,465						30 Orang	15,005,996,274	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 2 1 2.2 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulanan Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terbayarkan	30 Orang	14,235,290,465	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	30 Orang	14,519,996,274	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.2 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapan yang diadakan	30 Orang	246,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	30 Orang	286,000,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.2 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Melakukan Medical Chek-up	30 Orang	180,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	30 Orang	200,000,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.2	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah laporan Keuangan DPRD Yang Disusun Tepat waktu Dan Termanfaatkan	100 Perse n	1,379,000,000						100 Perse n	1,406,580,000	
4 2 1 2.2 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Dan Konsultasi DPRD Yang Diselenggarakan	80 Kali	131,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	80 Kali	133,620,000	Sekretariat DPRD
4 2 1 2.2 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Bahan/Perlengkapan Rumah tangga Yang Disediakan	3 Unit	1,248,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	3 Unit	1,272,960,000	Sekretariat DPRD
4 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi Yang Difasilitasi	80 %	9,757,226,230						80 %	10,159,269,987	
4 2 2 2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Ranperda Yang Telah Dibahas Dan Disetujui Untuk Diperdakan	27 Ranper da	1,906,010,214						27 Ranper da	2,005,061,425	
4 2 2 2 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda Inisiatif Yang Difasilitasi	1 Ranperda	62,560,550	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPRD dan Sekretariat DPRD	1 Ranperda	63,811,761	Sekretariat DPRD
4 2 2 2 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda Yang Difasilitasi	13 Ranper da	1,603,449,664	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPRD dan Sekretariat DPRD	13 Ranper da	1,696,449,664	Sekretariat DPRD
								5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2.2.2.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Yang Terlaksanakan	13 Ranperda	240,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	DPRD dan Sekretariat DPRD	13 Ranperda	244,800,000	Sekretariat DPRD
4.2.2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang Tersusun Tepat Waktu	7 Dokumen	897,185,950						7 Dokumen	924,995,670	
4.2.2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama	2 Nota Kesepakatan	129,822,290	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	SKPD	2 Nota Kesepakatan	132,418,736	Sekretariat DPRD
							5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
4.2.2.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama	2 Nota Kesepakatan	122,822,290	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	SKPD	2 Nota Kesepakatan	124,744,736	Sekretariat DPRD
							5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
4.2.2.2.3	Pembahasan APBD	Jumlah Ranperda yang disetujui	1 Dokumen	103,672,190	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	SKPD	1 Dokumen	105,745,634	Sekretariat DPRD
							5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
4.2.2.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Ranperda Perubahan Yang Disetujui	1 Dokumen	270,434,590	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	SKPD	1 Dokumen	276,043,282	Sekretariat DPRD
							5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
4.2.2.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Yang Disetujui	1 Dokumen	270,434,590	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	SKPD	1 Dokumen	286,043,282	Sekretariat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
4	2	2	2	0	APBD							280,043,202	DPRD			
4	2	2	2		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu	25 Rekomendasi	2,358,838,160				25 Rekomendasi	2,432,041,114			
4	2	2	2	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	4 Dokumen	605,870,234	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	SKPD dan DPRD	4 Dokumen	617,987,690	Sekretariat DPRD
4	2	2	2	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Dokumen	544,277,910	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	SKPD dan DPRD	4 Dokumen	555,163,468	Sekretariat DPRD
4	2	2	2	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Dokumen	754,282,446	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	SKPD dan DPRD	4 Dokumen	769,368,095	Sekretariat DPRD
4	2	2	2	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rekomendasi LHP Yang Ditindaklanjuti	3 Rekomendasi	227,203,785	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	SKPD dan DPRD	3 Rekomendasi	255,921,861	Sekretariat DPRD
4	2	2	2	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Yang Dihasilkan	10 Rekomendasi	227,203,785	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	SKPD dan DPRD	10 Rekomendasi	233,600,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Terpenuhi Dan Termanfaatkan	40 Orang	1,164,507,450						40 Orang	1,187,797,599	
4	2	2	2	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek Yang Diikuti Oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	775,366,200	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	790,873,524	Sekretariat DPRD
4	2	2	2	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar dan Tim Ahli Yang Disediakan	3 Orang	133,221,250	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Orang	135,885,675	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4 2 2 2 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tim Ahli Fraksi Yang Terbayarkan	6 Orang	252,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Orang	257,040,000	Sekretariat DPRD	
4 2 2 2 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Laporan Program Kerja DPRD Yang Tersusun Tepat Waktu	1 Dokumen	3,920,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	3,998,400	Sekretariat DPRD	
4 2 2 2.1	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		15 Kali	1,499,604,181						15 Kali	1,529,716,265		
4 2 2 2.1 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Fikiran Yang Terserap	12 Kali	4,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Kali	4,200,000	Sekretariat DPRD	
4 2 2 2.1 3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses Perseorangan Yang Dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	1,495,604,181	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	1,525,516,265	Sekretariat DPRD	
4 2 2 2.1	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Penegakan Kode Etik	3 Kali	37,818,810						3 Kali	38,575,187		
4 2 2 2.1 2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Penegakan Kode Etik DPRD	3 Kali	37,818,810	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	38,575,187	Sekretariat DPRD	
4 2 2 2.1	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah	5 Jenis	878,560,000						5 Jenis	896,131,200		
4 2 2 2.1 2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Kegiatan Yang Dipublikasikan	5 Jenis	878,560,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	5 Jenis	896,131,200	Sekretariat DPRD	
4 2 2 2.1	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	202 Kali	1,014,701,465						202 Kali	1,144,951,527		
4 2 2 2.1 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dilaksanakan	150 Kali	1,000,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	150 Kali	1,129,956,032	Sekretariat DPRD	
Jumlah Rapat-Rapat Paripurna		40 Kali	40 Kali										
4 2 2 2.1 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus Yang difasilitasi	12 Kali	14,701,465	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Kali	14,995,495	Sekretariat DPRD	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5 1	PERENCANAAN				7,743,366,600							9,338,049,448	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,744,951,750						100 %	6,006,228,448	
5 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100 %	70,000,000						100 %	73,000,000	
5 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	33,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi BAppelitbangda	3 Dokumen	35,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi BAppelitbangda	2 Dokumen	5,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi BAppelitbangda	2 Dokumen	5,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	27,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi BAppelitbangda	2 dokumen	28,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3,508,832,750						100 %	4,461,018,448	
5 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	32 Orang	3,450,802,850	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	32 Orang	4,401,976,944	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen	58,029,900	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	18 Dokumen	59,041,504	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang dihasilkan tepat waktu	100 %	12,697,000						100 %	13,015,000	
5 1 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	12,697,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	bappelitbangda	4 Dokumen	13,015,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	162,900,000						100 %	197,175,000	
5 1 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang diadakan	49 stel	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	49 stel	37,105,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12 Laporan	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	12 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12 Orang	137,900,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	12 Orang	150,070,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	418,205,000						100 %	428,205,000	
5 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 Jenis	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	8 Jenis	5,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	0 Unit	0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	9,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	20 Jenis	9,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	25,200,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 Jenis	25,200,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Eksemplar	6,180,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	60 Eksemplar	6,180,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	605 Dos	22,825,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	605 Dos	22,825,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	285 Kali	350,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	285 Kali	360,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 %	356,000,000						100 %	610,000,000	
5 1 1 2.1 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 yang diadakan	2 Unit	51,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 Unit	470,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 Unit	35,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	5 Unit	40,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	15 Unit	70,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	15 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.2.1.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	200,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Unit	0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	131,937,000						100 %	133,285,000	
5.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	850 Surat	27,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Bappelitbangda	850 Surat	27,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan tv kabel yang terbayarkan	36 Rekening	53,937,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Bappelitbangda	36 Rekening	55,285,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga upah jasa kebersihan dan keamanan yang terbayarkan	3 Orang	51,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Bappelitbangda	3 Orang	51,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	90 %	84,380,000						90 %	90,530,000	
5.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	9 Unit	39,260,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	9 Unit	43,950,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 1 2.1 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	0 Unit		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	0 Unit	0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	40 Unit	25,120,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	40 Unit	26,580,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Unit	20,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	1,561,385,450						100 %	1,719,821,000	
5 1 2 2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun sesuai Regulasi	8 Dokumen	1,027,229,626						8 Dokumen	1,154,821,000	
5 1 2 2 1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun	1 Laporan	160,132,470	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya	1 Laporan	180,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
5 1 2 2 2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	1 Dokumen	124,363,493	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya	1 Dokumen	164,821,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2 3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen Berita Acara Forum Konsultasi Publik	1 Dokumen	106,519,609	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya	1 Dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 2 2 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	1 Dokumen	99,202,471	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya	1 Dokumen	130,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun	1 Dokumen	151,705,504	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya	1 Dokumen	160,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2 6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	umlah Laporan Bahan Musrenbang Kecamatan	1 Laporan	53,472,103	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya	1 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah	2 Dokumen	331,833,976	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya	2 Dokumen	350,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang berbasis aplikasi	1 Aplikasi	109,497,198						1 Aplikasi	125,000,000	
5 1 2 2 1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun	1 Laporan	51,702,563	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase perangkat daerah yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	100 %	46,193,635	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	100 %	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 2 2 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah Kab. Luwu Timur yang disusun	1 Buku	11,601,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Buku	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5 1 2 2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang disusun sesuai regulasi	9 Dokumen	424,658,626							9 Dokumen	440,000,000	
5 1 2 2 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	2 Dokumen	224,402,667	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 Dokumen	230,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 1 2 2 2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu	1 Laporan	31,418,466	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Laporan	35,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 1 2 2 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	6 Laporan	168,837,493	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	6 Laporan	175,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	1,437,029,400						100 %	1,612,000,000		
5 1 3 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase laporan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	100 %	566,809,392						100 %	665,000,000		
5 1 3 2 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Laporan	65,739,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	4 Laporan	70,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 1 3 2 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	1 Laporan	75,700,392	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Laporan	80,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 3 2 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	4 Laporan	193,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	4 Laporan	230,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	4 Laporan	77,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	4 Laporan	85,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	4 Laporan	154,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	4 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase laporan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100 %	462,532,256						100 %	507,000,000	
5 1 3 2 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang disusun	4 Laporan	71,013,201	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian yang disusun	4 Laporan	24,851,662	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan	27,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang disusun	4 Laporan	99,408,969	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan	105,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun	4 Laporan	188,581,989	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 3 2 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun	4 Laporan	78,676,435	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase laporan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun	100 %	407,687,752						100 %	440,000,000	
5 1 3 2 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disusun	4 Laporan	79,462,983	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah lingkup Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disusun	4 Laporan	62,086,232	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah lingkup Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	70,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang disusun	4 Laporan	53,155,009	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah lingkup Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	55,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 1 3 2 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang disusun	4 Laporan	212,983,528	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah lingkup Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	215,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			475,641,000							510,000,000	
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan	100 %	475,641,000						100 %	510,000,000	
5 5 2 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dihasilkan	100 %	135,345,000						100 %	150,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 5 2 2 2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah kelitbangn bidang pemerintahan umum yang difasilitasi, dilaksanakan dan dievaluasi	1 Unit		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 Unit		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 2 5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset daerah, reformasi birokrasi yang dihasilkan	1 Dokumen	135,345,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun	100 %	143,079,000						100 %	150,000,000	
5 5 2 2 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang di hasilkan	1 Dokumen	143,079,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 2 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen kajian, penelitian dan pengembangan pariwisata yang disusun	1 Dokumen		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Dokumen		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi pembangunan yang dihasilkan	100 %	146,946,000						100 %	150,000,000	
5 5 2 2 1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kopersi usaha kecil menengah yang di hasilkan	1 Dokumen	146,946,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 2 4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen kajian, penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan yang disusun	1 Dokumen		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Dokumen		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang dihasilkan	100 %	50,271,000						100 %	60,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 5 2 2 2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah inovasi daerah yang dioptimalkan	1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah	1 Paket	0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 2 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan	2 kelitbangan	50,271,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah	2 kelitbangan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5 2	KEUANGAN			367,533,519,650						250,763,152,472		
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,30 Per sen	42,531,635,829						95,30 Per sen	47,089,974,559	
5 2 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 Per sen	161,338,693						100 Per sen	270,555,945	
5 2 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	50,296,465	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen perencanaan	3 dokumen	100,595,465	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	22,270,736	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen perencanaan	2 dokumen	33,989,986	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan	1 dokumen	15,750,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	11,056,908	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen perencanaan	2 dokumen	44,440,908	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan	1 dokumen	12,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	52,714,584	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen perencanaan	10 dokumen	63,779,586	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Per sen	40,438,025,444						100 Per sen	43,091,736,475	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	46 orang	39,818,825,686	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai BPKD	46 orang	42,466,447,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	95 %	137,302,675	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai BPKD	95 %	165,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1 dokumen	69,139,350	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai BPKD	1 dokumen	69,139,350	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan	95 %	32,132,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai BPKD	95 %	33,739,125	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	19 dokumen	230,805,233	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai BPKD	19 dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	4 dokumen	149,820,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai BPKD	4 dokumen	157,311,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	98 Persen	12,583,298						98 Persen	13,000,000	
5 2 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun	4 dokumen	12,583,298	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	4 dokumen	13,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100 Persen	85,587,654						100 Persen	94,146,419	
5 2 1 2 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	4 dokumen	85,587,654	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pendapatan daerah	4 dokumen	94,146,419	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	493,120,050						100 Persen	649,299,750	
5 2 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	70 stel	44,950,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPKD	70 stel	45,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	98 %	85,587,654	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili			5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Lingkup BPKD	98 %	98,589,750	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 1 2.1 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti peraturan perundang-undangan	450 orang	62,772,396	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Lingkup BPKD	450 orang	81,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	46 orang	299,810,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Lingkup BPKD	46 orang	424,710,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95 Persen	578,170,690						95 Persen	1,210,570,000	
5 2 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	14,978,425	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perlengkapan umum/logistik kantor	10 jenis	21,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	4 unit	2,187,565	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perlengkapan umum/logistik kantor	4 unit	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	25 jenis	9,883,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perlengkapan umum/logistik kantor	25 jenis	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 jenis	43,610,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perlengkapan umum/logistik kantor	3 jenis	335,470,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	132 eksemplar	13,920,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perlengkapan umum/logistik kantor	132 eksemplar	28,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	2500 orang	54,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perlengkapan umum/logistik kantor	2500 orang	55,600,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	250 kali	439,141,200	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perlengkapan umum/logistik kantor	250 kali	750,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	97 Persen	190,100,000						97 Persen	631,500,000	
5 2 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	20 unit	28,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	62,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 1 2.1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 unit	146,400,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	0	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	8 unit	15,200,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit	19,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	348,710,000						100 Persen	652,005,970	
5 2 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	6000 surat	40,910,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan umum kantor	6000 surat	69,405,970	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	37 rekening	216,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan umum kantor	37 rekening	450,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	5 orang	91,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan umum kantor	5 orang	132,600,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95 Persen	224,000,000						95 Persen	477,160,000	
5 2 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	19 unit	86,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	19 unit	140,930,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	75 unit	88,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	75 unit	176,230,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	1 unit	160,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96,70 Per sen	324,270,165,383						96,70 Per sen	202,607,968,643	
5 2 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	10 Minggu	1,487,023,383						10 Minggu	1,649,553,655	
5 2 2 2 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	1 dokumen	70,458,722	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	APBD dan APBD Perubahan	1 dokumen	77,504,594	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	1 dokumen	65,586,968	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	APBD dan APBD Perubahan	1 dokumen	72,145,665	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	1 dokumen	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	APBD dan APBD Perubahan	1 dokumen	12,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	1 dokumen	19,024,606	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	APBD dan APBD Perubahan	1 dokumen	20,927,067	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	1 dokumen	19,024,606	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	APBD dan APBD Perubahan	1 dokumen	20,900,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	2 dokumen	555,616,670	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	APBD dan APBD Perubahan	2 dokumen	611,178,337	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	2 dokumen	543,361,811	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	APBD dan APBD Perubahan	2 dokumen	597,697,992	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang tersusun	15 dokumen	59,600,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	APBD dan APBD Perubahan	15 dokumen	65,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	4 Laporan	94,350,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	APBD dan APBD Perubahan	4 Laporan	103,700,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 2 2 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan penganggaran daerah kabupaten/kota	65 Laporan	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	APBD dan APBD Perubahan	65 Laporan	68,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	97 Persen	417,023,025						97 Persen	547,637,600	
5 2 2 2 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan pengelolaan kas daerah yang telah direkonsiliasi	36 laporan	68,521,650	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penatausahaan keuangan daerah	36 laporan	103,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD perangkat daerah yang diterbitkan	236 SPD	20,350,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penatausahaan keuangan daerah	236 SPD	21,367,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 dokumen	150,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penatausahaan keuangan daerah	12 dokumen	183,652,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah kerjasama transaksi non tunai yang dilaksanakan dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	4 Laporan	65,279,275	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penatausahaan keuangan daerah	4 Laporan	89,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah laporan penatausahaan kas daerah	24 Laporan	67,732,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penatausahaan keuangan daerah	24 Laporan	92,118,600	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran OPD yang telah direkonsiliasi	708 Laporan	45,140,100	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penatausahaan keuangan daerah	708 Laporan	58,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	97 Persen	1,062,646,975						97 Persen	1,339,216,000	
5 2 2 2 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi	12 dokumen	79,486,110	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan keuangan daerah	12 dokumen	245,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 2 2 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan yang telah direkonsiliasi	224 dokumen	50,455,740	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan keuangan daerah	224 dokumen	63,478,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun	18 dokumen	154,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan keuangan daerah	18 dokumen	170,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan	18 dokumen	99,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan keuangan daerah	18 dokumen	109,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Ranperda dan Ranperbup yang tersusun	2 dokumen	439,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan keuangan daerah	2 dokumen	483,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut LHP yang tersusun	1 dokumen	35,358,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan keuangan daerah	1 dokumen	44,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditangani	3 Laporan	33,558,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan daerah	3 Laporan	35,236,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah regulasi kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun	2 dokumen	31,218,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan keuangan daerah	2 dokumen	32,779,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan akuntansi	2 Laporan	140,069,625	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan keuangan daerah	2 Laporan	156,523,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan	95 Persen	321,202,982,000						95 Persen	198,958,071,388	
5 2 2 2 2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen investasi yang dihasilkan	4 dokumen	29,373,275	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Belanja dana darurat dan mendesak dan dana transfer	4 dokumen	51,841,938	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 2 2 3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	2 dokumen	23,779,275	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Belanja dana darurat dan mendesak dan dana transfer	2 dokumen	56,400,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah belanja transfer ke desa	125 Desa	319,149,829,450	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Belanja dana darurat dan mendesak dan dana transfer	125 Desa	195,149,829,450	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dokumen dana darurat dan mendesak yang dikelola	3 dokumen	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Belanja dana darurat dan mendesak dan dana transfer	3 dokumen	3,700,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 2 2.1	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	100,490,000						2 Dokumen	113,490,000	
5 2 2 2.1 3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah sistem yang diupgrade	3 Laporan	100,490,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sistem informasi pemerintah daerah	3 Laporan	113,490,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik	58 Perangkat Daerah	731,718,438						58 Perangkat Daerah	1,065,209,270	
5 2 3 2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	90 Persen	731,718,438						90 Persen	1,065,209,270	
5 2 3 2 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga	2 dokumen	35,300,035	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	2 dokumen	53,889,150	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3 2 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen SBMD dan SKBMD yang tersusun	64 dokumen	30,411,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang milik daerah	64 dokumen	44,532,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3 2 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah	2 dokumen	30,816,400	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	2 dokumen	42,857,220	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3 2 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan berita acara pengelolaan barang milik daerah yang dibuat	1 laporan	35,715,003	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang milik daerah	1 laporan	42,495,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 3 2 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun	2 dokumen	90,962,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	2 dokumen	142,760,100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3 2 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun	3 dokumen	31,973,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	3 dokumen	37,771,650	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3 2 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan berita acara serah terima BMD yang dilakukan	20 Laporan	45,503,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	20 Laporan	68,778,150	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3 2 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian BMD yang disusun	2 dokumen	75,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	2 dokumen	145,941,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3 2 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian	4 dokumen	34,737,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	4 dokumen	46,974,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3 2 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD yang optimal	2 dokumen	45,653,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	2 dokumen	74,186,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3 2 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah berita acara rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan	1 laporan	30,453,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	1 laporan	35,125,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3 2 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	1 laporan	30,983,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	1 laporan	41,980,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 2 3 2 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	2 laporan	214,210,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	2 laporan	287,920,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5 2		KEUANGAN		12,267,803,648							13,700,436,863		
5 2 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	8,738,486,253						95 Persen	10,056,500,000	
5 2 1 2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 Persen	106,467,250						100 Persen	111,000,000	
5 2 1 2 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50,299,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Renstra, Renja, Lap.monev	3 Dokumen	52,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2 2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11,719,250	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Renstra, Renja, Lap.monev	2 Dokumen	12,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2 4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	33,384,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Renstra, Renja, Lap.monev	2 Dokumen	35,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	11,065,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Renstra, Renja, Lap.monev	10 Dokumen	12,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	98 Persen	7,404,965,800						98 Persen	8,655,000,000	
5 2 1 2 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	29 Orang	7,300,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gaji dan tunjangan ASN	29 Orang	8,500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2 3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	95 Persen	34,662,550	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Gaji dan tunjangan ASN	95 Persen	35,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2 7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	19 Dokumen	70,303,250	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Gaji dan tunjangan ASN	19 Dokumen	120,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	98 Persen	11,774,873						98 Persen	15,000,000	
5 2 1 2 6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	11,774,873	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	4 Dokumen	15,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 Persen	133,279,828						95 Persen	210,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	29 stel	0	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	29 stel	0	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	98 Persen	38,003,515	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	98 Persen	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	15,276,313	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	100 Orang	20,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	29 Orang	80,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	29 Orang	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95 Persen	482,833,820						95 Persen	374,500,000	
5 2 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	10 jenis	5,315,805	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan umum PD	10 jenis	6,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2 unit	2,187,565	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan umum PD	2 unit	2,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	25 jenis	5,059,250	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan umum PD	25 jenis	6,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 jenis	150,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan umum PD	3 jenis	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	132 exam pler	13,920,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan umum PD	132 exam pler	15,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1000 Ora ng	11,250,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan umum PD	1000 Ora ng	15,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	150 kali	295,101,200	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan umum PD	150 kali	130,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	97 Persen	187,200,000						97 Persen	210,000,000	
5 2 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	10 unit	34,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	10 unit	35,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	150,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	3 unit	170,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	3,200,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	2 unit	5,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	219,295,970						100 Persen	275,000,000	
5 2 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	3000 surat	28,495,970	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Upah jasa	3000 surat	30,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 rekening	150,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Upah jasa	36 rekening	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	3 Orang	40,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Upah jasa	3 Orang	45,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95 Persen	192,668,712						95 Persen	206,000,000	
5 2 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	8 unit	54,930,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	8 unit	56,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	88,230,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	40 unit	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	49,508,712	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	1 unit	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97,50 Persen	3,529,317,395						97,50 Persen	3,643,936,863	
5.2.4.2	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	95 Persen	3,529,317,395						95 Persen	3,643,936,863	
5.2.4.2.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan yang disusun	4 Dokumen	172,121,196	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer	4 Dokumen	180,727,000	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun	6 Dokumen	167,830,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili				Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer	6 Dokumen	176,221,000	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya kepatuhan wajib pajak	80 Persen	168,945,316		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer	80 Persen	170,634,769	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata	130 Wajib pajak	246,158,800	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer	130 Wajib pajak	258,466,740	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 4 2 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah PBB P2 yang ditetapkan	114000 O bjek pajak	1,831,572,326	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer	114000 O bjek pajak	1,868,203,772	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4 2 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase meningkatnya kepatuhan wajib pajak	80 Persen	316,976,300	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer	80 Persen	332,825,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4 2 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang terfasilitasi	87 Persen	73,198,650	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer	87 Persen	76,858,582	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4 2 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berita acara rekonsiliasi penerimaan retribusi dan pajak daerah Jumlah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah	264 Berita acara 12 Laporan	189,546,500	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain	264 Berita acara 12 Laporan	199,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 2 4 2 11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97 Persen	362,968,307	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer	97 Persen	381,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5 3	KEPEGAWAIAN			8,963,906,941						9,207,096,094		
5 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	4,098,063,597							5,100,828,150	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 3 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36,500,000							39,500,000	
5 3 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	2,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	5,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Dokumen	12,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,120,250,224							3,916,704,377	
5 3 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	34 Orang	3,075,170,224		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		34 Orang	3,871,624,377	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.3.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	45,080,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		18 Dokumen	45,080,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9,550,000							9,550,000	
5.3.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	9,550,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	9,550,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			107,150,000							86,430,000	
5.3.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			2,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.2.1.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang	38,350,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Orang	15,340,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.2.1.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	26,960,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Orang	15,340,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	39,340,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Orang	53,250,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 3 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			369,368,850							581,399,250	
5 3 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	10,220,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		6 Jenis	10,220,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	35,038,850	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		3 Unit	35,038,850	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	18 Jenis	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		18 Jenis	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Jenis	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Exemplar	5,100,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		48 Exemplar	5,100,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	600 Orang	18,600,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		600 Orang	18,600,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.3.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	130 Kali	250,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		130 Kali	462,030,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.2.1.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			20,410,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			20,410,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			166,266,128							166,266,128	
5.3.1.2.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 Unit	26,266,128	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	26,266,128	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.2.1.5	Pengadaan Mebel			50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.2.1.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 3 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			212,721,195							224,721,195	
5 3 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1500 Surat	35,841,195	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1500 Surat	35,841,195	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	50,880,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		36 Rekening	50,880,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	9 Orang	126,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		9 Orang	138,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76,257,200							76,257,200	
5 3 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas tau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	22,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	22,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	9,860,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Unit	9,860,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.3.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnyab yang dipelihara	34 Unit	29,130,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		34 Unit	29,130,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.2.1.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	15,267,200	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	15,267,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			4,865,843,344							4,106,267,944	
5.3.2.2.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			659,588,000							2,265,990,000	
5.3.2.2.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			50,078,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			50,078,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.2.2.3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Usulan Calon PNS dan PPPK yang akan diterima	1092 Orang	400,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1092 Orang	1,985,457,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.2.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Usulan Pemberhentian ASN yang ditindaklanjuti	50 Orang	84,055,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		50 Orang	105,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.2.2.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dimutakhirkan data kepegawaiannya	4000 Orang	125,455,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4000 Orang	125,455,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 3 2 2	Mutasi dan Promosi ASN			616,288,844							616,288,844	
5 3 2 2 1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan dalam jabatan struktural, pelaksana dan fungsional	250 Orang	229,679,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		250 Orang	229,679,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kenaikan pangkat ASN tepat waktu	800 Orang	316,609,844	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		800 Orang	316,609,844	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2 3	Pengelolaan Promosi ASN			70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			70,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2	Pengembangan Kompetensi ASN			3,313,282,900							916,516,900	
5 3 2 2 2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Assesment	30 Orang	454,877,900	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		30 Orang	564,877,900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	93 Orang	2,797,795,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		93 Orang	291,029,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	50 Orang	60,610,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		50 Orang	60,610,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			276,683,600							307,472,200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 3 2 2 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	4000 Orang	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4000 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan reward	300 Orang	80,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		300 Orang	80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2 7	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase jumlah kasus yang tertangani	80 %	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		80 %	80,788,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2 9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			38,425,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			38,425,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 3 2 2 10	Evaluasi Disiplin ASN			58,258,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			58,258,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,740,827,109						5,418,380,000	
5 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1,740,827,109						5,418,380,000	
5 4 2 2	Pengembangan Kompetensi Teknis				600,000,000						1,200,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 4 2 2 3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			560,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1,120,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 4 2 2 4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional	3 Dokumen	40,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Dokumen	80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 4 2 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1,140,827,109							4,218,380,000	
5 4 2 2 1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional	7 Dokumen	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		7 Dokumen	56,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 4 2 2 3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi	10 Orang	50,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 4 2 2 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti PKP, PKA, PKN, Pelatihan dasar dan kompetensi fungsional	150 Orang	1,080,827,109	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia		150 Orang	4,112,380,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6 1	INSPEKTORAT DAERAH				11,685,707,950						13,555,117,408	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	8,168,231,776						0 [?]	9,885,117,408	
6 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			93,111,247							140,000,000	
6 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	29,554,070		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen perencanaan Inspektorat	2 Dokumen	40,000,000	Inspektorat
6 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	11,801,086					Dokumen perencanaan Inspektorat	2 Dokumen	17,000,000	Inspektorat
6 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5,373,620		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen perencanaan Inspektorat	2 Dokumen	8,000,000	Inspektorat
6 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	46,382,471		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen perencanaan Inspektorat	10 Dokumen	75,000,000	Inspektorat
6 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,069,595,535							7,761,557,408	
6 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	45 Orang	6,063,797,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi keuangan inspektorat	45 Orang	7,756,557,408	Inspektorat
6 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17 Dokumen	5,797,685		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi keuangan inspektorat	17 Dokumen	5,000,000	Inspektorat
6 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			671,532,249							817,000,000	
6 1 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan	53 Pasang	47,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN di Inspektorat Kab. Luwu Timur	53 Pasang	60,000,000	Inspektorat
6 1 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	6,821,694		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN di Inspektorat Kab. Luwu Timur	12 Dokumen	7,000,000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1.1.2.1.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	53 Orang	484,391,485		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN di Inspektorat Kab. Luwu Timur	53 Orang	600,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	200 Orang	32,819,070		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN di Inspektorat Kab. Luwu Timur	200 Orang	50,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN di Inspektorat Kab. Luwu Timur	10 Orang	100,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			579,348,300							721,500,000	
6.1.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Unit	1,348,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata	Administrasi Umum Inspektorat	13 Unit	2,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	21,806,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi Umum Inspektorat	2 Unit	80,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	16 Jenis	3,908,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi Umum Inspektorat	16 Jenis	5,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Peggandaan yang diadakan	13000 Lembar	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi Umum Inspektorat	13000 Lembar	12,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Exemplar	6,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi Umum Inspektorat	60 Exemplar	7,500,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	375 Orang	14,875,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi Umum Inspektorat	375 Orang	15,000,000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	73 Kali	521,229,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi Umum Inspektorat	73 Kali	600,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			530,000,000							180,000,000	
6.1.1.2.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	pengadaan Barang Milik daerah di Inspektorat	1 Unit	100,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler yang diadakan	10 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	pengadaan Barang Milik daerah di Inspektorat	10 Unit	50,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	pengadaan Barang Milik daerah di Inspektorat	1 Unit	30,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			134,084,445							162,000,000	
6.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	1.3 Surat	8,379,645		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah di Inspektorat	1.3 Surat	10,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	24 Rekening	50,704,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah di Inspektorat	24 Rekening	65,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	5 Orang	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah di Inspektorat	5 Orang	87,000,000	Inspektorat
6.1.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90,560,000							103,060,000	
6.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	48,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Inspektorat	8 Unit	58,060,000	Inspektorat
6.1.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit	32,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Inspektorat	44 Unit	35,000,000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Inspektorat	1 Unit	10,000,000	Inspektorat
6 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	[?]	0 [?]	3,327,096,174						0 [?]	2,955,000,000	
6 1 2 2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2,927,096,174							2,605,000,000	
6 1 2 2 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah obrik pengawasan kinerja	39 OPD	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur	39 OPD	300,000,000	Inspektorat
6 1 2 2 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah obrik pengawasan keuangan (Opname Kas)	56 Obrik	1,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur	56 Obrik	900,000,000	Inspektorat
6 1 2 2 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilakukan	3 Kali	31,716,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur	3 Kali	35,000,000	Inspektorat
6 1 2 2 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilakukan	6 Kali	67,926,575		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur	6 Kali	70,000,000	Inspektorat
6 1 2 2 5	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang dilakukan	124 Desa	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur	124 Desa	500,000,000	Inspektorat
6 1 2 2 6	Kerjasama Pengawasan Internal	presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	1 Persen	477,453,099		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur	1 Persen	500,000,000	Inspektorat
6 1 2 2 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	88 Persen 95 Persen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur	88 Persen 95 Persen	300,000,000	Inspektorat
6 1 2 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			400,000,000							350,000,000	
6 1 2 2 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	50 Kali	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kasus dugaan KKN dan permohonan perceraian	50 Kali	350,000,000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	[?]	0 [?]	190,380,000						0 [?]	715,000,000	
6 1 3 2	Pendampingan dan Asistensi			190,380,000							715,000,000	
6 1 3 2 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	81 Kali	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat dan asistensi, verifikasi reformasi birokrasi serta zona integritas	81 Kali	500,000,000	Inspektorat
6 1 3 2 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian RB yang dilakukan	39 OPD	11,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat dan asistensi, verifikasi reformasi birokrasi serta zona integritas	39 OPD	15,000,000	Inspektorat
6 1 3 2 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	9 Obrik	28,730,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat dan asistensi, verifikasi reformasi birokrasi serta zona integritas	9 Obrik	200,000,000	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				3,315,975,850						1,309,043,329	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	3,181,473,682							1,127,318,255	
7 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23,814,955							30,000,000	
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tepat waktu	10 Dokumen	9,540,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	4,806,977	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	2 Dokumen	4,817,978	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	4,650,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Burau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,359,229,850							25,000,003	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang gaji Dan Tunjangannya Terbayarkan	25 Orang	2,350,049,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		25 Orang		Kecamatan Burau
7 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	9,180,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan			5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10,000,000							12,000,000	
7 1 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			19,600,000							23,000,000	
7 1 1 2 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi daerah Yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	19,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Dokumen	23,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19,355,000							61,000,000	
7 1 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang Diadakan	32 Orang		Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		32 Orang	23,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Data administrasi Kepegawaian Yang di Mutakhirkan	4 Dokumen	2,500,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan		4 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	16,855,000				5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Orang	23,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			241,800,000							704,024,850	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang disediakan	11 Jenis	4,450,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		11 Jenis	5,000,000	Kecamatan Burau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	2 Jenis	7,900,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Jenis	45,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik kantor Yang disediakan	23 Jenis	6,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		23 Jenis	7,500,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	4 Jenis	12,000,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Jenis	16,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			6,000,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu Yang Difasilitasi Kunjungannya	2000 Orang	91,000,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2000 Orang	134,100,000	Kecamatan Burau
7 1 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD Yang diselenggarakan	1000 kali	113,750,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1000 kali	490,424,850	Kecamatan Burau
7 1 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			290,500,000							23,000,000	
7 1 1 2.1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang diadakan	1 Unit	290,500,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	23,000,000	Kecamatan Burau
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit							5 Unit		
7 1 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			184,173,877							161,293,402	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan surat keluar yang diagendakan	850 Lembar	7,140,877	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		850 Lembar	14,260,402	Kecamatan Burau
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Bulanan yang terbayarkan	72 rekening	54,033,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		72 rekening	54,033,000	Kecamatan Burau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	9 Orang	123,000,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		9 Orang	93,000,000	Kecamatan Burau
7.1.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33,000,000							88,000,000	
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	12,000,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		6 Unit	30,000,000	Kecamatan Burau
7.1.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	31 Unit	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		31 Unit	23,000,000	Kecamatan Burau
7.1.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Unit	35,000,000	Kecamatan Burau
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8,245,500							13,529,631	
7.1.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			8,245,500							13,529,631	
7.1.2.2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 Lembar	8,245,500	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 Lembar	13,529,631	Kecamatan Burau
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			53,004,764							67,839,303	
7.1.3.2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			53,004,764							67,839,303	
7.1.3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	rasio Persentase Keterwakilan perempuan Dan laki-laki dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	0.39 %	9,544,309	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0.39 %	20,000,000	Kecamatan Burau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 3 2 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang di bina	12 kali	43,460,455	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 kali	47,839,303	Kecamatan Burau
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			12,251,904							17,000,000	
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			8,001,904							12,000,000	
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			5,000,000	Kecamatan Burau
7 1 4 2 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	12 kali	4,001,904	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 kali	7,000,000	Kecamatan Burau
7 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah			4,250,000							5,000,000	
7 1 4 2 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan sinergi dengan kepolisian TNI dan instansi vertikal	12 kali	4,250,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 kali	5,000,000	Kecamatan Burau
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			25,000,000							32,062,415	
7 1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			25,000,000							32,062,415	
7 1 5 2 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Rekomendasi Yang ditindak lanjuti	100 %	25,000,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	32,062,415	Kecamatan Burau
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			36,000,000							51,293,725	
7 1 6 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			36,000,000							51,293,725	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 6 2 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan yang disusun tepat waktu	36 Dokumen	3,000,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		36 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Burau
7 1 6 2 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	8,500,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	20,000,000	Kecamatan Burau
7 1 6 2 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Desa Yang Tertib administrasi	100 %	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan		100 %	20,293,725	Kecamatan Burau
7 1 6 2 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			7,000,000	Kecamatan Burau
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				3,122,372,275						4,051,986,411	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	2,987,906,399							3,836,625,578	
7 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24,714,885							25,780,180	
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 Dokumen	4,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Dokumen	3,666,325	Kecamatan Wotu
7 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4,179,885		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			4,179,885	Kecamatan Wotu
7 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	2 Dokumen	5,345,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			2 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Wotu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	10,540,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Dokumen	13,433,970	Kecamatan Wotu
7 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,145,957,850							2,830,900,740	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di lingkup masing-masing	24 orang	2,136,777,850	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		24 orang	2,801,920,740	Kecamatan Wotu
7 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	9,180,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Dokumen	28,980,000	Kecamatan Wotu
7 1 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7,770,222							13,360,188	
7 1 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	7,770,222	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Dokumen	13,360,188	Kecamatan Wotu
7 1 1 2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			6,500,000							21,175,880	
7 1 1 2 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	6,500,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Dokumen	21,175,880	Kecamatan Wotu
7 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20,312,565							45,478,450	
7 1 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	33 orang	0	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		33 orang	15,000,000	Kecamatan Wotu
7 1 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	4 Dokumen	3,457,565	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Dokumen	5,583,450	Kecamatan Wotu
7 1 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	16,855,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 orang	24,895,000	Kecamatan Wotu
7 1 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			264,519,800							422,648,900	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Jenis	2,144,500	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Jenis	3,394,600	Kecamatan Wotu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor Yang disediakan	8 Jenis	5,835,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		8 Jenis	13,285,000	Kecamatan Wotu
7.1.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Jenis	7,390,300	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Jenis	10,390,300	Kecamatan Wotu
7.1.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48 Eksmpl ar	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		48 Eksmpl ar	6,600,000	Kecamatan Wotu
7.1.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di Fasilitasi Kunjungannya	1500 orang	90,900,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1500 orang	95,900,000	Kecamatan Wotu
7.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Yang Diselenggarakan	600 kali	154,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		600 kali	293,079,000	Kecamatan Wotu
7.1.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0							65,000,000	
7.1.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1 paket	0	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 paket	65,000,000	Kecamatan Wotu
7.1.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			201,390,877							245,131,240	
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan surat keluar yang di adminstrasikan	650 Lembar	7,140,877	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		650 Lembar	9,581,240	Kecamatan Wotu
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlag Rekening telepon/ internet, listrik dan air yang terbayarkan	48 rekening	55,750,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		48 rekening	65,000,000	Kecamatan Wotu
7.1.1.2.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	6,500,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Jenis	14,550,000	Kecamatan Wotu
7.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Yang terbayarkan	10 orang	132,000,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 orang	156,000,000	Kecamatan Wotu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			316,740,200							167,150,000	
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	15,150,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		8 Unit	19,150,000	Kecamatan Wotu
7 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas operasional lapangan yang diadakan	1 Unit	295,500,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	135,000,000	Kecamatan Wotu
		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit							8 Unit		
7 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Yang termamfaatkan	1 Unit	6,090,200	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	13,000,000	Kecamatan Wotu
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8,245,500							14,643,012	
7 1 2 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			8,245,500							14,643,012	
7 1 2 2 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Administrasi perizinan yang dikeluarkan	150 Lembar	8,245,500	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		150 Lembar	14,643,012	Kecamatan Wotu
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			52,999,699							84,710,099	
7 1 3 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			52,999,699							84,710,099	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka Partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	0.38 %	9,539,244	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0.38 %	16,309,244	Kecamatan Wotu
7 1 3 2 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yang di bina	90 orang	43,460,455	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		90 orang	68,400,855	Kecamatan Wotu
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			12,251,904							16,000,000	
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			4,000,000							6,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal	12 kali	4,000,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 kali	6,000,000	Kecamatan Wotu
7 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			4,250,000							5,000,000	
7 1 4 2 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	24 kali	4,250,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		24 kali	5,000,000	Kecamatan Wotu
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			4,001,904							5,000,000	
7 1 4 2 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	12 kali	4,001,904	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 kali	5,000,000	Kecamatan Wotu
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			24,000,000							45,838,949	
7 1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			24,000,000							45,838,949	
7 1 5 2 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Rekomendasi Yang ditindak Lanjuti	100 %	24,000,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	45,838,949	Kecamatan Wotu
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			36,968,773							54,168,773	
7 1 6 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			36,968,773							54,168,773	
7 1 6 2 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	34 Dokumen	7,731,910	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		34 Dokumen	10,411,910	Kecamatan Wotu
7 1 6 2 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Pengaduan masyarakat Yang ditindak lanjuti	100 %	5,927,782	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	10,547,782	Kecamatan Wotu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 6 2 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang tertib administrasinya	100 %	19,309,081				5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	27,209,081	Kecamatan Wotu
7 1 6 2 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan pedesaan	1 Desa	4,000,000	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Desa	6,000,000	Kecamatan Wotu
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				4,366,590,550						5,253,625,474	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	3,890,619,961							4,625,057,824	
7 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,977,464							11,003,591	
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	2,416,387	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	2,385,430	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA/SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2,168,573	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	2,595,676	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2,168,573	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	2,476,161	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	2 Dokumen	3,223,931	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	3,546,324	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,538,945,020							3,096,539,508	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya dibayarkan	28 Orang	2,530,945,020	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28 Orang	3,086,539,508	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	8,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2,002,140							2,202,354	
7 1 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	2,002,140	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	2,202,354	Kecamatan Tomoni

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			26,030,000							28,633,000	
7 1 1 2 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	12 Dokumen	26,030,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	28,633,000	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			44,190,000							53,109,000	
7 1 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan (Stel)	28 Stel	26,150,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		28 Stel	28,765,000	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimuktahirkan	12 Laporan	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-undangan (Orang)	5 Orang	13,040,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Orang	14,344,000	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			455,268,800							535,943,180	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Unit	6,084,550	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		15 Unit	6,693,005	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2.1 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	3 Unit	17,420,850	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Unit	19,162,935	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Orang	48,916,800	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Orang	53,808,480	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan/atau Penggandaan yang disediakan	31099 Lembar	14,286,600	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		31099 Lembar	15,715,260	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 Eksemplar	6,120,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		120 Eksemplar	6,732,000	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	8500 Kotak	121,665,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		8500 Kotak	133,831,500	Kecamatan Tomoni

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	800 Kali	240,775,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		800 Kali	300,000,000	Kecamatan Tomoni
7.1.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			281,898,850							307,588,735	
7.1.1.2.1.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	1 Unit	275,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	300,000,000	Kecamatan Tomoni
7.1.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	140 Unit	6,898,850	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				140 Unit	7,588,735	Kecamatan Tomoni
7.1.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			413,566,487							454,923,136	
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1500 Lembar	19,159,127	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1500 Lembar	21,075,040	Kecamatan Tomoni
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang Terbayarkan	132 Rekening	64,656,360	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		132 Rekening	71,121,996	Kecamatan Tomoni
7.1.1.2.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sewa	2 Jenis	24,351,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Jenis	26,786,100	Kecamatan Tomoni
7.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan	24 Orang	305,400,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		24 Orang	335,940,000	Kecamatan Tomoni
7.1.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			118,741,200							135,115,320	
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang di Pelihara	12 Unit	68,516,200	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Unit	75,367,820	Kecamatan Tomoni
7.1.1.2.1.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Unit	10,000,000	Kecamatan Tomoni

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	44 Unit	17,760,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		44 Unit	19,536,000	Kecamatan Tomoni
7 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	27,465,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Unit	30,211,500	Kecamatan Tomoni
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2,749,885							3,024,874	
7 1 2 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			2,749,885							3,024,874	
7 1 2 2 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2,749,885							3,024,874	Kecamatan Tomoni
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			396,399,117							486,039,029	
7 1 3 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			85,799,117							94,379,029	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	16,358,800	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	17,994,680	Kecamatan Tomoni
7 1 3 2 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang dibayarkan	13 Desa/Kelurahan	69,440,317	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		13 Desa/Kelurahan	76,384,349	Kecamatan Tomoni
7 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			310,600,000							391,660,000	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dilaksanakan	100 %	290,600,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	341,660,000	Kecamatan Tomoni
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat	4 Kegiatan	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Kegiatan	50,000,000	Kecamatan Tomoni
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			9,000,000							24,000,000	
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			6,000,000							16,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Upaya Penyelesaian Kasus Penyelenggaraan Kasus Pelanggaran keamanan dan Ketertiban serta Persoalan Sosial yang difasilitasi	100 %	3,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	8,000,000	Kecamatan Tomoni
7 1 4 2 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat dalam Upaya Himbauan atau Pencegahan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	12 Kali	3,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Kali	8,000,000	Kecamatan Tomoni
7 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			3,000,000							8,000,000	
7 1 4 2 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergitas dengan Polri dan/atau Perangkat Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	12 Kali	3,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Kali	8,000,000	Kecamatan Tomoni
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			18,169,008							19,985,909	
7 1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			18,169,008							19,985,909	
7 1 5 2 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	18,169,008	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	19,985,909	Kecamatan Tomoni
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			49,652,579							95,517,838	
7 1 6 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			49,652,579							95,517,838	
7 1 6 2 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa yang difasilitasi Penyusunannya	36 Dokumen	6,649,925	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		36 Dokumen	7,314,918	Kecamatan Tomoni
7 1 6 2 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	10,188,627	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	50,807,490	Kecamatan Tomoni
7 1 6 2 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang Tertib Administrasinya	13 Desa/Kelurahan	15,814,027	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Desa/Kelurahan	17,395,430	Kecamatan Tomoni

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 6 2 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang Terpantau Perencanaan dan Pelaksanaan Programnya	13 Desa/Kelurahan	17,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		13 Desa/Kelurahan	20,000,000	Kecamatan Tomoni
UNSUR KEWILAYAHAN												
7 1	KECAMATAN			3,116,312,800							3,479,822,100	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	2,980,589,493						100 %	3,320,822,100	
7 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100 %	28,796,324						100 %	43,000,000	
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	9,148,191	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	3 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 Dokumen	3,694,072	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	2 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 Dokumen	3,470,455	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	2 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	12,483,606	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	10 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100 %	2,131,634,977						100 %	2,275,000,000	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	22 Orang	2,107,149,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Camat Mangkutana	22 Orang	2,250,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	24,485,027	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Camat Mangkutana	18 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Mangkutana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7 1 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100 %	10,699,790							100 %	12,000,000	
7 1 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	10,699,790	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	4 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Mangkutana	
7 1 1 2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100 %	37,303,689							100 %	50,000,000	
7 1 1 2 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	37,303,689	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Mangkutana	4 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Mangkutana	
7 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian PD (%)	100 %	16,938,739							100 %	27,000,000	
7 1 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	22 paket	1,000,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Maleku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Kepegawaian Camat Mangkutana	22 paket	2,000,000	Kecamatan Mangkutana	
7 1 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	3,088,739	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Kepegawaian Camat Mangkutana	12 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Mangkutana	
7 1 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	12,850,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Kepegawaian Camat Mangkutana	3 Orang	20,000,000	Kecamatan Mangkutana	
7 1 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	271,645,900							100 %	384,000,000	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 Dokumen	2,709,250	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	11 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Mangkutana	
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14 Jenis	4,426,650	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	14 Jenis	5,000,000	Kecamatan Mangkutana	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	8,995,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	6 Jenis	10,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48 Exemplar	4,800,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	48 Exemplar	5,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	3800 Orang	100,715,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3800 Orang	160,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	700 Kali	150,000,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	700 Kali	200,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ("%")	100 %	317,822,100						100 %	332,822,100	
7 1 1 2.1 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1 Unit	275,000,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	1 Unit	280,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	40 Unit	28,250,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	40 Unit	28,250,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	2 Unit	8,000,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	2 Unit	13,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	6,572,100	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	3 Unit	11,572,100	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	117,547,974						100 %	142,000,000	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1500 surat	14,097,974	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kantor Camat Mangkutana	1500 surat	20,000,000	Kecamatan Mangkutana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	120 Rekening	52,900,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kantor Camat Mangkutana	120 Rekening	55,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Jenis	6,150,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kantor Camat Mangkutana	2 Jenis	7,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	7 Orang	44,400,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kantor Camat Mangkutana	7 Orang	60,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ("%)	100 %	48,200,000						100 %	55,000,000	
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	18,870,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	3 Unit	20,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	7,430,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	12 Unit	10,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	18,000,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	3 Unit	20,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 1 2.1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	3,900,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Mangkutana	5 Unit	5,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	4,098,916						100 %	5,000,000	
7 1 2 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Perizinan (Lembar)	100 Lembar	4,098,916						100 Lembar	5,000,000	
		Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ("%)	100 %							100 %		
7 1 2 2 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah administrasi perizinan yang terbitkan (lembar)	100 Lembar	4,098,916	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	100 Lembar	5,000,000	Kecamatan Mangkutana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	100 %	62,825,786						100 %	70,000,000	
7 1 3 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	62,825,786						100 %	70,000,000	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah (%)	100 persen	12,956,560	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	100 persen	15,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 3 2 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	66 Orang	49,869,226	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	66 Orang	55,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	12,000,000						100 %	15,000,000	
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	8,000,000						100 %	10,000,000	
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi (%)	100 persen	4,000,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	100 persen	5,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 4 2 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	10 Kali	4,000,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	10 Kali	5,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 Persen	4,000,000						100 Persen	5,000,000	
7 1 4 2 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali)	10 Kali	4,000,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	10 Kali	5,000,000	Kecamatan Mangkutana
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	31,406,625						100 %	35,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
							Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7 1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 Persen	31,406,625						100 Persen	35,000,000			
7 1 5 2 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 persen	31,406,625	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	100 persen	35,000,000	Kecamatan Mangkutana		
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	25,391,980						100 %	34,000,000			
7 1 6 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ("%")	100 %	25,391,980						100 %	34,000,000			
7 1 6 2 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	22 Dokumen	3,213,105	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	22 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Mangkutana		
7 1 6 2 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	6,811,865	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	100 persen	8,000,000	Kecamatan Mangkutana		
7 1 6 2 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	100 persen	12,367,010	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	100 persen	18,000,000	Kecamatan Mangkutana		
7 1 6 2 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kawasan perdesaan yang terpantau perencanaan programnya (desa)	11 Desa	3,000,000	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	11 Desa	4,000,000	Kecamatan Mangkutana		
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7 1	KECAMATAN			2,653,323,250								2,883,281,293		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase rata-rata kinerja pelayanan adminisitrasi perkantoran terpenuhi	100 persen	2,511,448,871								100 persen	2,684,046,523	
7 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	36,350,144								100 persen	36,350,144	
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	3 dokumen	3,004,320	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	3 dokumen	3,004,320	Kecamatan Tomoni Timur		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	4,800,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	2 dokumen	4,800,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	3,995,824	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	2 dokumen	3,995,824	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	24,550,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	10 dokumen	24,550,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	1,734,260,471						100 Persen	1,778,790,000	
		persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen									100 persen
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	16 orang	1,716,980,471	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kecamatan Tomoni Timur	16 orang	1,760,000,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	18 dokumen	17,280,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kecamatan Tomoni Timur	18 dokumen	18,790,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4 dokumen	11,309,979						4 dokumen	11,309,979	
7 1 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 dokumen	11,309,979	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi barang milik daerah di kantor kecamatan tomoni timur	4 dokumen	11,309,979	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 1 2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	4 dokumen	31,080,000						4 dokumen	32,000,000	
7 1 1 2 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang disusun tepat waktu	4 dokumen	31,080,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	4 dokumen	32,000,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	37,939,726						100 Persen	44,750,000	
7 1 1 2 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	jumlah pakaian dinas beserta atribut	16 orang	15,250,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kecamatan	16 orang	15,250,000	Kecamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.1.1.2.1.4	Atribut Kelengkapannya			13,230,000				5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tomoni Timur		13,230,000	Tomoni Timur	
7.1.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12 dokumen	3,999,726	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kecamatan Tomoni Timur	12 dokumen	4,500,000	Kecamatan Tomoni Timur	
7.1.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	4 orang	18,690,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kecamatan Tomoni Timur	4 orang	25,000,000	Kecamatan Tomoni Timur	
7.1.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	294,856,500						100 persen	401,446,000		
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 jenis	3,830,500	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	15 jenis	7,500,000	Kecamatan Tomoni Timur	
7.1.1.2.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	5 jenis	0	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	5 jenis	7,500,000	Kecamatan Tomoni Timur	
7.1.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 jenis	13,076,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	15 jenis	13,076,000	Kecamatan Tomoni Timur	
7.1.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2700 exam	8,750,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	2700 exam	13,250,000	Kecamatan Tomoni Timur	
7.1.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	48 exam	6,120,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	48 exam	6,120,000	Kecamatan Tomoni Timur	
7.1.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	4438 orang	115,810,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	4438 orang	155,000,000	Kecamatan Tomoni Timur	
7.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	472 kali	147,270,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	472 kali	199,000,000	Kecamatan Tomoni Timur	
7.1.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	6 unit	123,968,648						6 unit	118,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
7	1	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 unit	73,468,648	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	1 unit	23,000,000	Kecamatan Tomoni Timur
7	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 unit	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	5 unit	15,000,000	Kecamatan Tomoni Timur
7	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	8 unit	26,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	8 unit	65,000,000	Kecamatan Tomoni Timur
7	1	1	2.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadatkan	1 unit	9,500,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	1 unit	15,000,000	Kecamatan Tomoni Timur
7	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	170,033,403						100 persen	177,100,400	
7	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan	900 surat	12,883,003		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	900 surat	15,250,000	Kecamatan Tomoni Timur
7	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan	36 rekening	58,800,400	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	36 rekening	58,800,400	Kecamatan Tomoni Timur
7	1	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 unit	7,800,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	4 unit	12,500,000	Kecamatan Tomoni Timur
7	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan	10 orang	90,550,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	10 orang	90,550,000	Kecamatan Tomoni Timur
7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	8 unit	71,650,000						8 unit	84,300,000	
7	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	24,500,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	4 unit	24,500,000	Kecamatan Tomoni Timur
7	1	1	2.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	5 buah	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	5 buah	5,000,000	Kecamatan Tomoni Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17 unit	3,150,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	17 unit	9,800,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	39,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	5 unit	45,000,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum	100 persen	26,190,340						100 persen	28,250,000	
7 1 2 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 persen	26,190,340						100 persen	28,250,000	
7 1 2 2 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentasi Rumah yang diterbitkan IMBnya	100 persen	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	100 persen	15,000,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 2 2 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Volume sampah yang terangkut (Ton)	100 persen	11,190,340	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	100 persen	13,250,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum	100 persen	41,644,770						100 persen	57,994,770	
7 1 3 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100 persen	41,644,770						100 persen	57,994,770	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	100 persen	13,644,770	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur	100 persen	15,644,770	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 3 2 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah pkk desa yang diberdayakan	85 orang	28,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur	85 orang	42,350,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	100 persen	25,840,000						100 persen	27,440,000	
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	100 persen	19,640,000						100 persen	19,640,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal	100 persen	9,820,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	100 persen	9,820,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 4 2 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	100 persen	9,820,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	100 persen	9,820,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	100 persen	6,200,000						100 persen	7,800,000	
7 1 4 2 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	100 persen	6,200,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Kecamatan Tomoni Timur	100 persen	7,800,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum	100 persen	20,000,000						100 persen	31,250,000	
7 1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 persen	20,000,000						100 persen	31,250,000	
7 1 5 2 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 persen	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Tomoni Timur	100 persen	31,250,000	Kecamatan Tomoni Timur
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban	100 persen	28,199,269						100 persen	54,300,000	
7 1 6 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi	100 persen	28,199,269						100 persen	54,300,000	
7 1 6 2 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	16 dokumen		7,800,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur		16 dokumen
7 1 6 2 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	8,200,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur	100 persen	13,500,000	Kecamatan Tomoni Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7 1 6 2 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	100 persen	4,858,269	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur	100 persen	17,800,000	Kecamatan Tomoni Timur	
7 1 6 2 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	100 persen	7,341,000	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur	100 persen	8,000,000	Kecamatan Tomoni Timur	
7 UNSUR KEWILAYAHAN													
7 1 KECAMATAN				2,611,735,700							3,501,000,000		
7 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,460,495,938					100 %	3,255,000,000		
7 1 1 2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	18,905,083						2 Dokumen	30,000,000	
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen							10 Dokumen		
			Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	3 Dokumen							3 Dokumen		
			Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen							2 Dokumen		
			Jumlah Sub. Kegiatan yang mendukung Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Sub. Kegiatan							4 Sub. Kegiatan		
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun tepat Waktu	3 Dokumen	3,853,423	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	3 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Kalaena	
7 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 Dokumen	3,447,204	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Kalaena	
7 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4,272,668	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Kalaena	
7 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	10 Dokumen	7,331,788	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	10 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Kalaena	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	16 Orang	1,498,338,550						16 Orang	2,028,000,000	
		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	16 Dokumen							16 Dokumen		
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan	16 Orang	1,486,338,550	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	16 Orang	2,000,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	16 Dokumen	12,000,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	16 Dokumen	28,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	11,737,361						2 Dokumen	12,000,000	
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen							10 Dokumen		
		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	3 Dokumen							3 Dokumen		
		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah Sub. Kegiatan yang mendukung Kegiatan Administrasi Barang Mili Daerah pada Perangkat Daerah	1 Sub. Kegiatan							1 Sub. Kegiatan		
		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100 %							100 %		
7 1 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	11,737,361	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	4 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	12 Dokumen	25,324,808						12 Dokumen	30,000,000	
7 1 1 2 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	12 Dokumen	25,324,808	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	12 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Kalaena

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
7	1	1	2.1													
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	2 Orang	43,641,698						2 Orang	52,000,000				
			Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12 Laporan							12 Laporan					
			Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	27 Stel							27 Stel					
7	1	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27 Paket	17,450,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	27 Paket	20,000,000	Kecamatan Kalaena
7	1	1	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang di mutakhirkan	12 Laporan	4,651,698	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	12 Laporan	7,000,000	Kecamatan Kalaena
7	1	1	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	21,540,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	2 Orang	25,000,000	Kecamatan Kalaena
7	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	14 Jenis	282,612,150						14 Jenis	383,000,000	
					Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis									
					Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	10 Jenis	10 Jenis									
					Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 Eksamplar	48 Eksamplar									
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	1264 Kali	1264 Kali									
					Jumlah Sub. Kegiatan yang mendukung Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Sub. Kegiatan	6 Sub. Kegiatan									
					Jumlah tamu yang difasilitasi	4860 Orang	4860 Orang									
7	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	10 Jenis	2,409,100	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	10 Jenis	6,000,000	Kecamatan Kalaena

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	14 Jenis	4,056,050	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	14 Jenis	5,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang diadakan	6 Jenis	10,307,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	6 Jenis	15,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 Eksampler	5,700,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	48 Eksampler	7,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	4860 Orang	80,000,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	4860 Orang	100,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	1264 Kali	180,140,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	1264 Kali	250,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0 Unit	322,950,000						0 Unit	390,000,000	
		Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit							2 Unit		
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8 Unit							8 Unit		
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0							0		
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit							3 Unit		
7 1 1 2.1 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG DIADAKAN (UNIT)	1 Unit	275,000,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	1 Unit	290,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit	7,000,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	2 Unit	20,000,000	Kecamatan Kalaena

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8 Unit	18,550,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	8 Unit	40,000,000	Kecamatan Kalaena
7.1.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	8,000,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Kalaena
7.1.1.2.1.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	14,400,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	3 Unit	30,000,000	Kecamatan Kalaena
7.1.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan	2 Jenis	177,226,288						2 Jenis	192,000,000	
		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	8 Orang							8 Orang		
		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	60 Rekening							60 Rekening		
		Jumlah Sub. Kegiatan yang mendukung Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub. Kegiatan							4 Sub. Kegiatan		
		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1200 Surat							1200 Surat		
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1200 Lembar	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	1200 Lembar	20,000,000	Kecamatan Kalaena
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan	60 Rekening	57,576,288	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	60 Rekening	60,000,000	Kecamatan Kalaena
7.1.1.2.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa	2 Jenis	7,650,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	2 Jenis	10,000,000	Kecamatan Kalaena
7.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan yang Terbayarkan	8 Orang	102,000,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	8 Orang	102,000,000	Kecamatan Kalaena

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	79,760,000						4 Unit	138,000,000	
		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit							7 Unit		
		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit							7 Unit		
		Jumlah mebel yang dipelihara	0 0							0 0		
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 Unit							36 Unit		
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 0							0 0		
		Jumlah Sub. Kegiatan yang mendukung Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub. Kegiatan							3 Sub. Kegiatan		
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	17,760,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	7 Unit	20,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2.1 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	1,000,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	5 unit	3,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 Unit	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	36 Unit	10,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	55,000,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	4 Unit	100,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 1 2.1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	1,000,000	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	2 Unit	5,000,000	Kecamatan Kalaena

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	14,533,281						100 %	40,000,000	
7 1 2 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	60 Lembar	14,533,281						60 Lembar	40,000,000	
		Jumlah volume sampah yang terangkut	0 ton							0 ton		
7 1 2 2 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	60 lembar	14,533,281	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	60 lembar	20,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 2 2 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah volume sampah yang terangkut	0 ton	0	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	0 ton	20,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	100 %	83,695,830						100 %	114,000,000	
7 1 3 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	49 Orang	83,695,830						49 Orang	114,000,000	
		Jumlah Sub. Kegiatan yang mendukung Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Sub. Kegiatan							2 Sub. Kegiatan		
		Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah	10 %							10 %		
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Angka Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	10 Persen	13,026,925	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	10 Persen	14,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 3 2 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	49 Orang	70,668,905	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	49 Orang	100,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi	100 %	0						100 %	0	
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	12 kali	0						12 kali	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 4 2 1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi	12 kali								12 kali	
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi	12 Kali		Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	12 Kali		Kecamatan Kalaena
7 1 4 2 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	12 Kali		Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	12 Kali		Kecamatan Kalaena
7 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	12 kali	0						12 kali	0	
7 1 4 2 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	12 kali	0	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	12 kali		Kecamatan Kalaena
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	15,858,719						100 %	20,000,000	
7 1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 Sub. Kegiatan							1 Sub. Kegiatan		
		Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	15,858,719						100 %	20,000,000	
7 1 5 2 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100 Persen	15,858,719	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	100 Persen	20,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	37,151,932						100 %	72,000,000	
		Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	14 Dokumen							14 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7 1 6 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Sub. Kegiatan yang mendukung Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	3 Sub. Kegiatan 10 % 100 Kasus	37,151,932							3 Sub. Kegiatan 10 % 100 Kasus	72,000,000	
7 1 6 2 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	14 Dokumen	10,843,876	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	14 Dokumen		20,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 6 2 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	100 Persen	8,154,209	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	100 Persen		18,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 6 2 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	100 Persen	15,888,156	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	100 Persen		30,000,000	Kecamatan Kalaena
7 1 6 2 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	umlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	100 Persen	2,265,691	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Kalaena	100 Persen		4,000,000	Kecamatan Kalaena
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7 1	KECAMATAN				2,974,603,900							3,353,044,311	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,719,090,990							100 %	3,055,028,311	
7 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	13 Dokumen	27,723,942							13 Dokumen	31,575,700	
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	3,490,815	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	3 Dokumen		3,665,300	Kecamatan Angkona

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5,759,551	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	2 Dokumen	7,660,200	Kecamatan Angkona
7 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	3,046,511	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	2 Dokumen	4,051,800	Kecamatan Angkona
7 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	15,427,065	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	10 Dokumen	16,198,400	Kecamatan Angkona
7 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2,039,798,129						100 %	2,220,676,200	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	19 Orang	2,002,529,304	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	19 Orang	2,181,544,000	Kecamatan Angkona
7 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	37,268,825	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	18 Dokumen	39,132,200	Kecamatan Angkona
7 1 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada perangkat daerah yang ditatausahakan	100 %	12,292,940						100 %	13,522,200	
7 1 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	12,292,940	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pejabatpengurus barang pengguna	4 Dokumen	13,522,200	Kecamatan Angkona
7 1 1 2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD Perangkat Daerah	50 Juta Rupiah	34,292,940						50 Juta Rupiah	36,007,500	
7 1 1 2 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	34,292,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur pengelola PAD Kantor Camat Angkona	4 Dokumen	36,007,500	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sug kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan	43,002,884						3 Sub Kegiatan	44,280,500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	1 Paket	17,450,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	1 Paket	17,450,000	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	4 Dokumen	3,132,884	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	4 Dokumen	3,289,500	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	22,420,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	4 Orang	23,541,000	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	285,508,400						100 %	344,356,500	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Jenis	5,761,350	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tamu yang datang	9 Jenis	6,164,700	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	28 Jenis	12,487,050	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tamu yang datang	28 Jenis	13,735,700	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	15,360,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tamu yang datang	5 Jenis	16,128,000	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Eksemplar	6,900,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tamu yang datang	60 Eksemplar	7,383,000	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	1900 Orang	90,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tamu yang datang	1900 Orang	107,625,000	Kecamatan Angkona

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	535 Kali	155,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tamu yang datang	535 Kali	193,320,100	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	12 unit	101,874,250						12 unit	127,957,011	
7 1 1 2.1 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 Unit	25,500,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparat Kantor Camat Angkona dan masyarakat umum	1 Unit	51,000,000	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparat Kantor Camat Angkona dan masyarakat umum	2 Unit	11	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	3 Unit	22,543,350	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparat Kantor Camat Angkona dan masyarakat umum	3 Unit	32,687,800	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 Unit	43,830,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparat Kantor Camat Angkona dan masyarakat umum	5 Unit	44,269,200	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	9 Sub Kegiatan	101,267,505						9 Sub Kegiatan	107,152,700	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	900 Surat	18,271,705	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	900 Surat	20,098,800	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan	96 Rekening	47,020,800	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	96 Rekening	50,312,200	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	2 Jenis	4,725,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	2 Jenis	4,866,700	Kecamatan Angkona

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan	2 Orang	31,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Kantor Camat Angkona	2 Orang	31,875,000	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	25 25 unit	73,330,000						25 25 unit	129,500,000	
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	22,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan prasarana kantor	2 Unit	26,000,000	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	1,500,000	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan prasarana kantor	2 unit	1,700,000	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 Unit	17,360,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan prasarana kantor	24 Unit	19,800,000	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	22,470,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan prasarana kantor	1 Unit	70,000,000	Kecamatan Angkona
7 1 1 2.1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan prasarana kantor	2 unit	12,000,000	Kecamatan Angkona
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPersentase capaian kinerja penyelenggaraan dan pelayanan publik	100 %	52,655,610						100 %	55,035,300	
7 1 2 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah sub kegiatan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Camat yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	52,655,610						1 Sub Kegiatan	55,035,300	
7 1 2 2 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah administrasi perizinan yang diterbitkan	55 Lembar	12,655,610	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Umum	55 Lembar	13,035,300	Kecamatan Angkona
7 1 2 2 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah volume sampah yang terangkut	20 Ton	40,000,000	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Umum	20 Ton	42,000,000	Kecamatan Angkona

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
			4	5	6	7	Nasional	Daerah		8	9		10
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	66,353,724							100 %	68,344,200	
7 1 3 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	2 sub kegiatan	66,353,724							2 sub kegiatan	68,344,200	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	30 %	11,078,023	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Desa Secara Umum	30 %	11,410,300	Kecamatan Angkona	
7 1 3 2 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	70 Orang	55,275,701	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Desa Secara Umum	70 Orang	56,933,900	Kecamatan Angkona	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	61,250,000						100 %	67,700,000		
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan Trantibum yang dilaksanakan	2 Kegiatan	46,250,000						2 Kegiatan	51,200,000		
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang fasilitasi	100 %	11,250,000	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat umum	100 %	13,200,000	Kecamatan Angkona	
7 1 4 2 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran keenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	12 Kali	35,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat umum	12 Kali	38,000,000	Kecamatan Angkona	
7 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum	3 Kegiatan	15,000,000						3 Kegiatan	16,500,000		
7 1 4 2 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	12 kali	15,000,000	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat umum	12 kali	16,500,000	Kecamatan Angkona	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	33,467,162						100 %	34,471,100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	1 Kegiatan 100 %	33,467,162						1 Kegiatan 100 %	34,471,100	
7 1 5 2 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	33,467,162	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat	100 %	34,471,100	Kecamatan Angkona
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0 [%]	41,786,414						0 [%]	72,465,400	
7 1 6 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PJumlah sub kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	20 Dokumen	41,786,414						20 Dokumen	72,465,400	
7 1 6 2 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan/atau Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	20 Dokumen	17,322,084	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparat Desa dan masyarakat umum	20 Dokumen	18,188,100	Kecamatan Angkona
7 1 6 2 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa yang tertib administrasinya	100 %	18,359,330	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparat Desa dan masyarakat umum	100 %	19,277,300	Kecamatan Angkona
7 1 6 2 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	10 Desa	6,105,000	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparat Desa dan masyarakat umum	10 Desa	35,000,000	Kecamatan Angkona
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				3,919,696,700						4,096,368,874	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	3,745,031,125							3,797,711,125	
7 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24,076,350							19,076,350	
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan			5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			5,000,000	Kecamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2 1	Perangkat Daerah			5,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			5,000,000	Malili
7 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	4 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Malili
7 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			0	Kecamatan Malili
7 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,076,350							9,076,350	Kecamatan Malili
7 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,235,463,148							2,235,463,148	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2,215,166,768							2,215,166,768	Kecamatan Malili
7 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			20,296,380			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			20,296,380	Kecamatan Malili
7 1 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13,949,920							13,949,920	
7 1 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			13,949,920							13,949,920	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			35,270,584							60,450,584	
7 1 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	100 %	15,270,584	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	15,270,584	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Tehnis,Diklat,workshop,Seminar Per Undang - Undangan	10 Orang	20,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Orang	45,180,000	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			593,432,900							608,432,900	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6,604,300							6,604,300	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	4 Jenis	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Jenis	25,000,000	Kecamatan Malili

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			59,304,000							59,304,000	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			45,089,900							45,089,900	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9,900,000							9,900,000	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			125,580,000							125,580,000	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang dilaksanakan	33 Kali	336,954,700	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		33 Kali	336,954,700	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			316,260,000							316,260,000	
7 1 1 2.1 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diadakan	1 Unit	278,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	278,000,000	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			38,260,000							38,260,000	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			425,778,223							425,778,223	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			19,098,223							19,098,223	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			127,680,000							127,680,000	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			279,000,000							279,000,000	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,800,000							118,300,000	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	7,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		8 Unit	25,000,000	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17,800,000							17,800,000	Kecamatan Malili
7 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			75,500,000							75,500,000	Kecamatan Malili
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			78,399,600							143,090,600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 2 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			53,399,600							53,399,600	
7 1 2 2 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			53,399,600							53,399,600	Kecamatan Malili
7 1 2 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			25,000,000							89,691,000	
7 1 2 2 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	200 Lembar	25,000,000						200 Lembar	89,691,000	Kecamatan Malili
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			53,199,826							110,501,000	
7 1 3 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			25,501,000							25,501,000	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	95 %	25,501,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		95 %	25,501,000	Kecamatan Malili
7 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			27,698,826							85,000,000	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang dibangun	1 Paket	17,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Paket	30,000,000	Kecamatan Malili
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kelurahan Yang Memberdayakan Masyarakat	2 Kegiatan	10,698,826	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Kegiatan	55,000,000	Kecamatan Malili
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			13,000,000							15,000,000	
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			8,000,000							10,000,000	
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal	95 %	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		95 %	5,000,000	Kecamatan Malili

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 4 2 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	3 Kegiatan	3,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Kegiatan	5,000,000	Kecamatan Malili
7 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			5,000,000							5,000,000	
7 1 4 2 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	100 %	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	5,000,000	Kecamatan Malili
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			25,066,149							25,066,149	
7 1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			25,066,149							25,066,149	
7 1 5 2 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100 %	25,066,149	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	25,066,149	Kecamatan Malili
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			5,000,000							5,000,000	
7 1 6 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5,000,000							5,000,000	
7 1 6 2 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	14 Desa	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		14 Desa	5,000,000	Kecamatan Malili
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN			2,818,221,400							2,823,300,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	2,698,031,405						100 %	2,651,300,000	
7 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %	25,454,627						100 %	31,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			4	5	6	7	Nasional	Daerah		8	9		10	11	12	13
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %							100 %					
7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun tepat Waktu	3 Dokumen	3,500,990	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Wasuponda
7	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat Waktu	2 Dokumen	3,499,978	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Wasuponda
7	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2,998,731	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Wasuponda
7	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	15,454,928	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	10 Dokumen	18,000,000	Kecamatan Wasuponda
7	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16 Orang	1,819,574,796						16 Orang	1,828,000,000	
					Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %						100 %				
					persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 %						100 %				
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan	16 Orang	1,792,339,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor kecamatan wasuponda	16 Orang	1,800,000,000	Kecamatan Wasuponda
7	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat Waktu	18 Dokumen	27,235,796	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor kecamatan wasuponda	18 Dokumen	28,000,000	Kecamatan Wasuponda
7	1	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan	100 %	13,349,785							100 %	15,000,000	
					Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100 %						100 %				
7	1	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	4 Dokumen	13,349,785	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang milik daerah	4 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Wasuponda
7	1	1	2		Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	36,070,778						4 Dokumen	37,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat Daerah	100 %							100 %		
7 1 1 2 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	36,070,778	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Retribusi IMB bangunan permanen	4 Dokumen	37,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian PD (%)	100 %	28,547,605						100 %	41,900,000	
7 1 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan	26 Orang	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Camat Wasuponda	26 Orang	16,900,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	3,017,605	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Camat Wasuponda	12 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	2 Orang	15,530,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Camat Wasuponda	2 Orang	20,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	240,165,950						100 %	371,000,000	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	1,091,150	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Camat Wasuponda	6 Jenis	2,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	20 Jenis	10,275,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Camat Wasuponda	20 Jenis	11,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	12,849,800	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Camat Wasuponda	2 Jenis	15,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	24 eksemplar	2,700,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Camat Wasuponda	24 eksemplar	3,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi Kunjungannya	2400 Orang	63,250,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Camat Wasuponda	2400 Orang	140,000,000	Kecamatan Wasuponda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di selenggarakan	299 kali	150,000,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Kantor Camat Wasuponda	299 kali	200,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	9 unit	283,250,000						9 unit	55,000,000	
		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %							100 %		
7 1 1 2.1 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan (unit)	1 Unit	275,000,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Unit	0	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	8 Unit	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	8 Unit	50,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang diadakan	1 Unit	3,250,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Unit	5,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase rata - rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 %	182,797,864						100 %	186,900,000	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diadministrasikan	800 Surat	15,297,864	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	800 Surat	16,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon Internet, Listrik dan Air yang terbayarkan	48 Rekening	48,000,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	48 Rekening	50,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disewa	2 Jenis	6,100,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 Jenis	7,500,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan yang terbayarkan	7 Orang	113,400,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	7 Orang	113,400,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	34 unit	68,820,000						34 unit	85,000,000	
		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %							100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	44,680,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	10 Unit	50,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang diadakan	1 Unit	14,140,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 Unit	20,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	7,500,000						100 %	7,500,000	
7 1 2 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	7,500,000						1 Kegiatan	7,500,000	
7 1 2 2 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan	20 lembar	7,500,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	20 lembar	7,500,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 2 2 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0		0	Kecamatan Wasuponda
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	50,457,505						100 %	75,000,000	
7 1 3 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	2 Kegiatan	50,457,505						2 Kegiatan	75,000,000	
		PersentJumlah kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	2 Kegiatan							2 Kegiatan		
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	35 %	14,337,810	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wasuponda	35 %	15,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 3 2 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	42 Orang	36,119,695	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wasuponda	42 Orang	60,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	16,500,000						100 %	21,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	10,000,000						100 %	15,000,000	
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal	5 jumlah	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	5 jumlah	5,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 4 2 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	3 jumlah	5,000,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 jumlah	10,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %	6,500,000						100 %	6,500,000	
7 1 4 2 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	2 jumlah	6,500,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 jumlah	6,500,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	23,073,937						100 %	40,000,000	
7 1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	1 Kegiatan	23,073,937						1 Kegiatan	40,000,000	
7 1 5 2 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Presentase Rekomendasi Forum kooedinasi Pimpinan Kecamatan Yang ditindak Lanjuti	100 %	23,073,937	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	100 %	40,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	22,658,553						100 %	28,000,000	
7 1 6 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		12 Dokumen	22,658,553						12 Dokumen	28,000,000	
		Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	100 %							100 %		
7 1 6 2 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	12 Dokumen	2,175,485	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Forkofinka kecamatan wasuponda	12 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Wasuponda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 6 2 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	2,738,178	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Forkofinka kecamatan wasuponda	100 %	5,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 6 2 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Presentase Desa dan Kelurahan yang tertib Administrasinya	100 %	7,744,890	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Forkofinka kecamatan wasuponda	100 %	8,000,000	Kecamatan Wasuponda
7 1 6 2 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	1 jumlah	10,000,000	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Forkofinka kecamatan wasuponda	1 jumlah	10,000,000	Kecamatan Wasuponda
UNSUR KEWILAYAHAN												
7 1	KECAMATAN			3,747,968,600							3,984,038,692	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,524,363,966						100 %	3,718,565,254	
7 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	45,135,914						100 %	45,335,676	
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	13,300,238		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan Unit Kerja	2 Dokumen	13,500,000	Kecamatan Towuti
7 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	6,358,219		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan Unit Kerja	2 Dokumen	6,358,219	Kecamatan Towuti
7 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4,110,130		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan Unit Kerja	2 Dokumen	4,110,130	Kecamatan Towuti
7 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	21,367,327		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan Unit Kerja	10 Dokumen	21,367,327	Kecamatan Towuti
7 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	2,364,470,058						100 %	2,591,431,584	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	27 Orang	2,316,279,994		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur	27 Orang	2,556,241,520	Kecamatan Towuti
7 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	16 Dokumen	48,190,064		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur	16 Dokumen	35,190,064	Kecamatan Towuti

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7 1 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100 %	15,481,256							100 %	15,481,256	
7 1 1 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	15,481,256				5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur	4 Dokumen	15,481,256	Kecamatan Towuti	
7 1 1 2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	37,582,271						100 %	37,582,271		
7 1 1 2 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	120 Dokumen	37,582,271			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pendapatan Asli Daerah Kab.Luwu Timur	120 Dokumen	37,582,271	Kecamatan Towuti	
7 1 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	46,345,030						100 %	72,385,030		
7 1 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	39 Stel	11,700,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur	39 Stel	25,000,000	Kecamatan Towuti	
7 1 1 2.1 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12 Dokumen	11,635,030			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur	12 Dokumen	11,635,030	Kecamatan Towuti	
7 1 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	23,010,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur	3 Orang	35,750,000	Kecamatan Towuti	
7 1 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	409,562,150						100 %	540,562,150		
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	8,610,950			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur, Aset dan Masyarakat	10 Jenis	8,610,950	Kecamatan Towuti	
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	10,753,200			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur, Aset dan Masyarakat	3 Jenis	10,753,200	Kecamatan Towuti	
7 1 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	19,458,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur, Aset dan Masyarakat	5 Jenis	19,458,000	Kecamatan Towuti	
7 1 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks	60 Eksamp	6,240,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur, Aset dan Masyarakat	60 Eksamp	6,240,000	Kecamatan Towuti	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	2700 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur, Aset dan Masyarakat	2700 Orang	135,000,000	Kecamatan Towuti
7.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	285 Kali	264,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur, Aset dan Masyarakat	285 Kali	360,500,000	Kecamatan Towuti
7.1.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	275,000,000						100 %	56,000,000	
7.1.1.2.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 Unit	275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur	1 Unit	0	Kecamatan Towuti
7.1.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0 -	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur	0 -	6,000,000	Kecamatan Towuti
7.1.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mebel yang diadakan	5 Unit	0				5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur	5 Unit	50,000,000	Kecamatan Towuti
7.1.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	240,217,287						100 %	242,217,287	
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	1250 Surat	14,316,937		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan Sarana dan Prasarana	1250 Surat	16,316,937	Kecamatan Towuti
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan	84 Rekening	79,550,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan Sarana dan Prasarana	84 Rekening	79,550,350	Kecamatan Towuti
7.1.1.2.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	11,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan Sarana dan Prasarana	2 Jenis	11,950,000	Kecamatan Towuti
7.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	9 Orang	134,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan Sarana dan Prasarana	9 Orang	134,400,000	Kecamatan Towuti
7.1.1.2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	90,570,000						100 %	117,570,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %							100 %		
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan Aset	15 Unit	67,000,000	Kecamatan Towuti
7 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	29 Unit	15,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan Aset	29 Unit	15,570,000	Kecamatan Towuti
7 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur dan Aset	1 Unit	35,000,000	Kecamatan Towuti
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	16,282,258						100 %	16,282,258	
7 1 2 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 %	16,282,258						100 %	16,282,258	
7 1 2 2 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah IMB yang diterbitkan	120 Lembar	16,282,258		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Rumah Tinggal	120 Lembar	16,282,258	Kecamatan Towuti
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	102,449,915						100 %	102,449,915	
7 1 3 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100 %	102,449,915						100 %	102,449,915	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	35 %	22,273,782		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa, Unit Kerja dan Lembaga/Ormas	35 %	22,273,782	Kecamatan Towuti
7 1 3 2 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PPK Desa yang diberdayakan	108 Orang	80,176,133		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa, Unit Kerja dan Lembaga/Ormas	108 Orang	80,176,133	Kecamatan Towuti
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	42,230,000						100 %	43,500,000	
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	32,230,000						100 %	33,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi	100 %	12,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Semua Unsur dan Masyarakat	100 %	12,500,000	Kecamatan Towuti
7 1 4 2 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	4 Kali	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Semua Unsur dan Masyarakat	4 Kali	20,500,000	Kecamatan Towuti
7 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %	10,000,000						100 %	10,500,000	
7 1 4 2 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	4 Kali	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Semua Unsur dan Masyarakat	4 Kali	10,500,000	Kecamatan Towuti
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	37,856,634						100 %	37,856,634	
7 1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	37,856,634						100 %	37,856,634	
7 1 5 2 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan	12 Kali	37,856,634		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Forkopimka, Unit Kerja, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas dan lainnya	12 Kali	37,856,634	Kecamatan Towuti
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	24,785,827						100 %	65,384,631	
7 1 6 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100 %	24,785,827						100 %	65,384,631	
7 1 6 2 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	36 Dokumen	13,946,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa	36 Dokumen	10,446,750	Kecamatan Towuti
7 1 6 2 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa	100 %	12,573,804	Kecamatan Towuti

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 6 2 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	100 %	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa	100 %	30,839,077	Kecamatan Towuti
7 1 6 2 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	3 Desa	10,839,077		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Desa	3 Desa	11,525,000	Kecamatan Towuti
UNSUR KEWILAYAHAN												
7 1	KECAMATAN			4,078,143,000						4,258,431,644		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	3,776,330,292						100 %	3,787,395,767	
7 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ("%")	100 %	29,729,854						100 %	38,729,854	
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	3 dokumen	10,524,065		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	3 dokumen	16,524,065	Kecamatan Nuha
7 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)"	2 dokumen	3,478,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 dokumen	3,478,720	Kecamatan Nuha
7 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2 kegiatan	3,154,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 kegiatan	3,154,720	Kecamatan Nuha
7 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu(Dokumen)	10 dokumen	12,572,349		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	10 dokumen	15,572,349	Kecamatan Nuha
7 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("%")	100 %	2,465,085,159						100 %	2,599,723,023	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan (Orang)	23 orang	2,439,885,159		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Staf Kec. Nuha	23 orang	2,574,523,023	Kecamatan Nuha

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	3 orang	25,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Staf Kec. Nuha	3 orang	25,200,000	Kecamatan Nuha
7.1.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100 %	11,563,913						100 %	11,563,913	
7.1.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4 dokumen	11,563,913		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kec.Nuha	4 dokumen	11,563,913	Kecamatan Nuha
7.1.1.2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	49,944,465						100 %	51,744,465	
7.1.1.2.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	4 dokumen	49,944,465		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Nuha	4 dokumen	51,744,465	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian PD (%)	100 %	27,874,166						100 %	43,134,166	
7.1.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian PD (%)	100 %	12,614,166		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Staf Kec Nuha	100 %	12,614,166	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	2 orang	15,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Staf Kec Nuha	2 orang	30,520,000	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	557,910,050						100 %	550,775,551	
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Jenis	5,289,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Nuha	9 Jenis	5,289,550	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)	2 kegiatan	6,597,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Nuha	2 kegiatan	6,597,500	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik Kantor yang disediakan	15 Jenis	8,543,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Nuha	15 Jenis	8,543,500	Kecamatan Nuha

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 jenis	17,929,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Nuha	5 jenis	19,295,001	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48 exempl er	9,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Nuha	48 exempl er	9,600,000	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi kunjungannya	8313 kota k	180,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Nuha	8313 kota k	230,450,000	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	806 kali	329,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Nuha	806 kali	271,000,000	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ("%")	100 %	275,000,000						100 %	117,702,110	
7.1.1.2.1.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1 unit	275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Nuha	1 unit	0	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	0 jenis	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Nuha	0 jenis	35,100,000	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	0 unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Nuha	0 unit	56,719,650	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	0 unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Nuha	0 unit	25,882,460	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	288,222,685						100 %	290,022,685	
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	28 jenis	27,322,685		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Nuha	28 jenis	27,322,685	Kecamatan Nuha
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	48 rekening	76,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Nuha	48 rekening	78,500,000	Kecamatan Nuha

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	32 orang	184,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Nuha	32 orang	184,200,000	Kecamatan Nuha
7 1 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100 %	71,000,000						100 %	84,000,000	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)"	9 jenis	32,000,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kec. Nuha	9 jenis	32,000,000	Kecamatan Nuha
7 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	27,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Nuha	20 unit	27,000,000	Kecamatan Nuha
7 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5 unit	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Nuha	5 unit	25,000,000	Kecamatan Nuha
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100 %	4,001,870						100 %	5,001,870	
7 1 2 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	100 %	4,001,870						100 %	5,001,870	
7 1 2 2 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah IMB yang diterbitkan (IMB)	40 izin	4,001,870		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Nuha	40 izin	5,001,870	Kecamatan Nuha
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	OPersentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	254,059,484						100 %	425,741,442	
		Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100 %							100 %		
7 1 3 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100 %	121,439,783						100 %	131,439,783	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah (100 %	16,860,526		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kec. nuha	100 %	16,860,526	Kecamatan Nuha

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 3 2 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	20 orang	104,579,257		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kec. nuha	20 orang	114,579,257	Kecamatan Nuha
7 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ("%")	100 %	132,619,701						100 %	294,301,659	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)	2 kegiatan	59,531,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat kelurahan	2 kegiatan	99,531,500	Kecamatan Nuha
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan	2 kegiatan	73,088,201	Kab. Luwu Timur, Nuha, Magani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat kelurahan	2 kegiatan	194,770,159	Kecamatan Nuha
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	8,000,000						100 %	8,500,000	
7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ("%")	100 %	5,000,000						100 %	5,500,000	
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	5 dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	5 dokumen	3,000,000	Kecamatan Nuha
7 1 4 2 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	5 dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	5 dokumen	2,500,000	Kecamatan Nuha
7 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi ("%")	100 %	3,000,000						100 %	3,000,000	
7 1 4 2 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali)	5 dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Camat Nuha	5 dokumen	3,000,000	Kecamatan Nuha
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ("%")	100 %	35,751,354						100 %	31,792,565	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 6 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ("%")	100 %	35,751,354						100 %	31,792,565	
7 1 6 2 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan desa dan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	8 dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kec.Nuha	8 dokumen	3,041,211	Kecamatan Nuha
7 1 6 2 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus yg terselesaikan	100 %	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kec.Nuha	100 %	8,104,213	Kecamatan Nuha
7 1 6 2 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang tertib administrasinya (desa)	8 dokumen	18,751,354		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kec.Nuha	8 dokumen	20,647,141	Kecamatan Nuha
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											4,781,733,733
8 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100%	2,299,531,881							3,073,066,667	
8 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20,805,000							32,000,000	
8 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	2 dokumen	13,140,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 dokumen	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	2 dokumen	1,825,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 dokumen	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	2 dokumen	1,825,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 dokumen	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	4,015,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 dokumen	6,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,407,106,881							1,771,666,667	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	9 org	1,363,306,881	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		9 org	1,706,666,667	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 dokumen	43,800,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		18 dokumen	65,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,825,000							3,000,000	
8.1.1.2.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun	4 dokumen	1,825,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 dokumen	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			72,270,000							53,000,000	
8.1.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	22 Paket	12,410,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		22 Paket	19,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Laporan	19,710,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	28,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	9 Orang	40,150,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		9 Orang	6,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			327,405,000							455,200,000	
8.1.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	2,555,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		7 jenis	3,700,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	7 Unit	36,500,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		7 Unit	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	21 jenis	2,920,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		21 jenis	4,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	3 jenis	2,190,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 jenis	3,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Eksamp lar	5,110,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		60 Eksamp lar	7,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	220 Orang	8,030,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		220 Orang	11,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	437 Kali	270,100,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		437 Kali	370,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			317,550,000							521,000,000	
8.1.1.2.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			255,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1 unit	18,250,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 unit	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan / mesin lainnya yang diadakan	4 unit	21,900,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 unit	31,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	0	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 unit	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	21,900,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81,760,000							122,200,000	
8.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	350 surat	1,460,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		350 surat	2,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening, telepon, listrik dan air yang terbayarkan	24 rekening	29,200,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		24 rekening	45,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 org	51,100,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 org	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70,810,000							115,000,000	
8 1 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	18,250,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 unit	16,060,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		36 unit	23,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	21,900,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 unit	32,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 1 2.1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara / direhabilitasi	1 unit	14,600,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			380,086,958							550,667,066	
8 1 2 2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			380,086,958							550,667,066	
8 1 2 2 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	4 Dokumen	380,086,958	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Dokumen	550,667,066	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 1 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			186,150,000							295,000,000	
8 1 3 2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			186,150,000							295,000,000	
8 1 3 2 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	110 Orang	124,100,000	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		110 Orang	190,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 3 2 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi	11 Laporan	32,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		11 Laporan	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 3 2 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan Situasi Politik Daerah	4 Laporan	29,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Laporan	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			40,150,000							60,000,000	
8 1 4 2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			40,150,000							60,000,000	
8 1 4 2 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah SKT yang terbit	102 SKT	40,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		102 SKT	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			153,300,000							220,000,000	
8 1 5 2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			153,300,000							220,000,000	
8 1 5 2 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi kerukunan umat beragama	4 Laporan	153,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Laporan	220,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			410,990,000							583,000,000	
8 1 6 2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			410,990,000							583,000,000	
8 1 6 2 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah	4 Dokumen	379,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Dokumen	530,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81625	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	4 dokumen	31,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 dokumen	53,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber Data: sipd.kemendagri.go.id/daerah